Pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara

2025-2045

RPJPD GORONTALO UTARA

MAJU SEJAHTERA BERADAB BERKELANJUTAN



BAPPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian
2024



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah

Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 183).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara dengan berpedoman pada RPJP Nasional;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi, selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun 2045;
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo, yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Gorontalo adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari

visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Gorontalo serta mengacu pada RPJM Nasional;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun 2045;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten serta mengacu pada RPJM Daerah Provinsi;
7. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
9. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

Pasal 2

(1) RPJPD Kabupaten adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

(2) RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk tahun 2025-2045 yang disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi 2025-2045, RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 dan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031.

BAB III

SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

(1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH

BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VI : PENUTUP

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) RPJP Kabupaten merupakan acuan dalam penyusunan RPJPMD Kabupaten dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

(2) Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang maka Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD Kabupaten untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.

(3) Tatacara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) RPJPD Kabupaten dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(2) Tatacara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Bupati pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.
(2) Pelaksanaan ketentuan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025 – 2045 dalam Peraturan Daerah ini dimulai pada Tahun 2025.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

Pada tanggal 25 Oktober 2024

BUPATI GORONTALO UTARA

SLA N. BOTUTIHE

Diundangkan di kwandang

Pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

SULEMAN LAKORO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA PROVINSI GORONTALO: (4/18/2024)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan daerah, RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gorontalo Utara.

Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang lingkup RPJPD yang meliputi visi Pembangunan, misi Pembangunan, arah kebijakan

Pembangunan, sasaran pokok Pembangunan, sistematika RPJPD, serta pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 277

BUPATI GORONTALO UTARA 2007-2024



Hamdan Datunsolang
2007-2008 (1)



Rusli Habibie
2008-2012 (2)



Indra Yasin
2012-2013 (3)
2013-2018



Abdul Haris Hadju
2018 (1)



Indra Yasin
2018-2022 (4)



Thariq Modanggu
2022 (3)
2022-2023



Sila N. Botutihe
2023-..... (1)

Keterangan:
1. Penjabat Bupati
2. Mengundurkan diri karena dilantik sebagai Gubernur
3. Pelaksana Tugas Bupati
4. Meninggal dunia saat menjabat sebagai Bupati

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2025-2045 dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen RPJPD disusun sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 12 ayat (1) bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk dua puluh tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW, serta merujuk pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045, yang mendorong agar Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memastikan RPJP Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya selaras dan berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi Gorontalo dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, serta telah memperhatikan dan selaras dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya: RPJP Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045, RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2044, RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, sekaligus telah diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penyusunan dokumen ini dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya rapat orientasi, penyelarasan KLHS dan RTRW, Forum Konsultasi Publik, konsultasi Provinsi, Musrenbang, rapat koordinasi sektoral dengan melibatkan pemangku kepentingan, pembahasan di DPRD, serta evaluasi Provinsi Gorontalo. Diharapkan dokumen ini bermanfaat untuk dijadikan pedoman bersama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, tahunan, dan rencana pembangunan sektoral lainnya, sehingga terwujud sinergi pembangunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi-Misi Pembangunan jangka panjang sebagai bagian dari perwujudan Indonesia Emas Tahun 2045.

Demikian dokumen RPJPD 2025-2045 ini disusun. Masukan, kritik, dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan ke depan, semata-mata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara. Semoga Allah SWT melindungi kita semua untuk memberikan yang terbaik melalui kerja ikhlas dan cerdas demi pembangunan yang lebih baik. Amin.

Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh**.**

Gorontalo Utara, 2024

Pj. Bupati Gorontalo Utara,

Sila N. Botutihe

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR GRAFIK xvi
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR FOTO xxi
BAB 1 PENDAHULUAN ..... BAB 1–1
1.1 Latar Belakang ..... BAB 1–1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan ..... BAB 1–3
1.3 Hubungan Antara RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara dengan Rencana Pembangunan Daerah Lainnya ..... BAB 1–9
1.4 Maksud dan Tujuan ..... BAB 1–11
1.5 Sistematika Penulisan ..... BAB 1–11
BAB 2 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... BAB 2–1
2.1 Kondisi Umum Daerah ..... BAB 2–1
2.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2–1
2.1.2 Aspek Geografis ..... BAB 2–7
2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... BAB 2–7
2.1.2.2 Topografi Daerah ..... BAB 2–11
2.1.2.3 Klimatologi ..... BAB 2–13
2.1.2.4 Kondisi Tanah ..... BAB 2–14
2.1.2.5 Hidrologi ..... BAB 2–15
2.1.2.6 Geologi ..... BAB 2–17
2.1.2.7 Penggunaan Lahan ..... BAB 2–18
2.1.2.8 Potensi Pengembangan Wilayah ..... BAB 2–26
2.1.3 Aspek Demografis ..... BAB 2–55
2.1.3.1 Struktur Penduduk ..... BAB 2–56
2.1.3.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk ..... BAB 2–59
2.1.3.3 Distribusi Penduduk ..... BAB 2–61
2.1.3.4 Dinamika Penduduk ..... BAB 2–62
2.1.3.5 Penduduk Menurut Kepercayaan ..... BAB 2–65
2.1.3.6 Penduduk Menurut Pendidikan ..... BAB 2–66
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB 2–67
2.2.1 Fokus Produktifitas Daerah ..... BAB 2–67
1. Laju Pertumbuhan PDRB ..... BAB 2–67
2. PDRB dan Pengeluaran Per Kapita ..... BAB 2–74
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat ..... BAB 2–76
1. Laju Inflasi ..... BAB 2–76
2. Indeks Pembangunan Manusia ..... BAB 2–79
3. Indeks Gini ..... BAB 2–83

4. Kemiskinan ..... BAB 2–86
5. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan ..... BAB 2–95
6. Pengeluaran Konsumsi RumahTangga ..... BAB 2–102
7. Nilai Tukar Petani ..... BAB 2–103
8. Nilai Tukar Nelayan ..... BAB 2–105
9. Indeks Keluarga Sehat ..... BAB 2–105
10. Indeks Pembangunan Pemuda ..... BAB 2–107
11. Indeks Gender (Pemberdayaan, Pembangunan dan Ketimpangan Gender ..... BAB 2–110
12. Indeks Kualitas Keluarga ..... BAB 2–112
13. Indeks Pembangunan Kebudayaan ..... BAB 2–114

2.3 Aspek Daya Saing ..... BAB 2–117
2.3.1 Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia ..... BAB 2–117
1. Indeks Pendidikan ..... BAB 2–117
2. Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi ..... BAB 2–119
3. Indeks Literasi Digital ..... BAB 2–122
4. Indeks Masyarakat Digital ..... BAB 2–124
2.3.2 Fokus Daya Saing Ekonomi ..... BAB 2–126
1. Indeks Daya Saing Daerah ..... BAB 2–126
2. Indeks Ekonomi Hijau ..... BAB 2–128
3. Indeks Ketahanan Pangan ..... BAB 2–130
2.3.3 Fokus Daya Saing Iklim Investasi ..... BAB 2–131
1. Indeks Demokrasi Indonesia ..... BAB 2–131
2. Indeks Kerukunan Umat Beragama ..... BAB 2–133
3. Indeks Kriminalitas ..... BAB 2–134
2.3.4 Fokus Daya Saing Infrastruktur ..... BAB 2–135
1. Indeks Ketahanan Air ..... BAB 2–135
2. Indeks Ketahanan Energi ..... BAB 2–138
3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ..... BAB 2–140
4. Indeks Daya Saing Digital ..... BAB 2–141

2.4 Aspek Pelayanan Umum ..... BAB 2–143
1. Indeks Reformasi Birokrasi ..... BAB 2–144
2. Indeks Pelayanan Publik ..... BAB 2–145
3. Indeks Inovasi Daerah ..... BAB 2–148
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar . BAB 2–150
1. Urusan Pendidikan ..... BAB 2–150
2. Urusan Kesehatan ..... BAB 2–166
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ..... BAB 2–197
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman .... BAB 2–206
5. Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ..... BAB 2–209
6. Urusan Sosial ..... BAB 2–222
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar ..... BAB 2–225

1. Urusan Tenaga Kerja ..... BAB 2–225
2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... BAB 2–230
3. Urusan Pangan ..... BAB 2–240
4. Urusan Pertanahan ..... BAB 2–248
5. Urusan Lingkungan Hidup ..... BAB 2–250
6. Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... BAB 2–259
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ..... BAB 2–261
8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ..... BAB 2–269
9. Urusan Perhubungan ..... BAB 2–276
10. Urusan Komunikasi dan Informatika ..... BAB 2–283
11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah ..... BAB 2–289
12. Urusan Penanaman Modal ..... BAB 2–295
13. Urusan Pemuda dan Olahraga ..... BAB 2–304
14. Urusan Statistik ..... BAB 2–311
15. Urusan Kebudayaan ..... BAB 2–313
16. Urusan Perpustakaan ..... BAB 2–315
17. Urusan Kearsipan ..... BAB 2–318
18. Urusan Persandian ..... BAB 2–320

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan ..... BAB 2–320
1. Urusan Kehutanan ..... BAB 2–320
2. Urusan Pariwisata ..... BAB 2–328
3. Urusan Pertanian ..... BAB 2–334
4. Urusan Kelautan dan Perikanan ..... BAB 2–360
5. Urusan Energi dan Sumber Daya Alam ..... BAB 2–366
6. Urusan Perdagangan ..... BAB 2–370
7. Urusan Perindustrian ..... BAB 2–373
8. Urusan Transmigrasi ..... BAB 2–376

2.4.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan ..... BAB 2–384
1. Perencanaan Pembangunan ..... BAB 2–384
2. Keuangan ..... BAB 2–386
3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan ..... BAB 2–389
4. Penelitian dan Pengembangan ..... BAB 2–393
5. Pengawasan ..... BAB 2–394
6. Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik ..... BAB 2–397
7. Sekretariat Dewan ..... BAB 2–400
8. Sekretariat Daerah ..... BAB 2–401

2.5 Evaluasi RPJPD Gorontalo Utara 2009-2029 ..... BAB 2–405
2.6 Proyeksi Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana ..... BAB 2–411
2.6.1 Proyeksi Demografi ..... BAB 2–412
2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk ..... BAB 2–412
2.6.1.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

dan Kelompok Umur ..... BAB 2–414
2.6.1.3 Bonus Demografi ..... BAB 2–418
2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana ..... BAB 2–419
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah ..... BAB 2–441
2.7.1 Pengembangan Struktur Ruang ..... BAB 2–444
2.7.2 Pengembangan Pola Ruang ..... BAB 2–449
2.7.3 Pengembangan Kawasan Strategis ..... BAB 2–451
2.7.4 Pengembangan Gorontalo Utara dalam RPJPD Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–452

BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..... BAB 3–1
3.1 Gambaran Indikator Makro ..... BAB 3–1
3.2 Permasalahan Pembangunan ..... BAB 3–2
3.3 Isu Strategis Pembangunan ..... BAB 3–32
3.3.1 Isu Strategis Global yang Dihadapi Indonesia ..... BAB 3–33
3.3.2 Telaahan RPJPN 2025-2045 terkait Isu dan Tantangan Nasional ..... BAB 3–37
3.3.3 Telaahan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 terkait Isu Strategis dan Tantangan Provinsi Gorontalo ..... BAB 3–45
3.3.4 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs di Gorontalo Utara ..... BAB 3–56
3.3.5 Telaahan Isu Lingkungan Dokumen KLHS Gorontalo Utara ..... BAB 3–58
3.3.6 Telaahan Isu Pembangunan dalam Dokumen RTRW Gorontalo Utara ..... BAB 3–59
3.3.7 Isu Strategis Pembangunan Daerah Gorontalo Utara 2025-2045 ..... BAB 3–59

BAB 4 VISI DAN MISI GORONTALO UTARA ..... BAB 4–1
4.1 Visi Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 4–1
4.2 Misi Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 4–6

BAB 5 ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK ..... BAB 5–1
5.1 Arah Kebijakan ..... BAB 5–1
5.1.1 Tahapan Arah Kebijakan Setiap Periode ..... BAB 5–2
5.1.1.1 Arah Kebijakan Lima Tahun Pertama 2025-2029 ..... BAB 5–2
5.1.1.2 Arah Kebijakan Lima Tahun Kedua 2030-2034 ..... BAB 5–3
5.1.1.3 Arah Kebijakan Lima Tahun Ketiga 2035-2039 ..... BAB 5–3
5.1.1.4 Arah Kebijakan Lima Tahun Keempat 2040-2045 ..... BAB 5–3
5.1.2 Arah Kebijakan Strategis ..... BAB 5–4
5.2 Sasaran Pokok ..... BAB 5–9

BAB 6 PENUTUP ..... BAB 6–1
6.1 Implementasi Pelaksanaan ..... BAB 6–1
6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan ..... BAB 6–1
6.1.2 Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan

Lainnya ..... BAB 6–1
6.1.3 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis ..... BAB 6–2
6.1.4 Pendanaan dan Penganggaran ..... BAB 6–4
6.2 Kerangka Pengendalian ..... BAB 6–4
6.2.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan ..... BAB 6–4
6.2.2 Sistem Insentif ..... BAB 6–6
6.2.3 Mekanisme Perubahan ..... BAB 6–6
6.2.4 Komunikasi Publik ..... BAB 6–7
6.2.5 Pembiayaan Pembangunan ..... BAB 6–8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kecamatan yang Dirinci Menurut Luas Wilayah dan Jumlah Desa ..... BAB 2–8
Tabel 2.2 Nama Pulau dan Koordinat ..... BAB 2–10
Tabel 2.3 Tinggi Wilayah dan Koordinat Kecamatan ..... BAB 2–11
Tabel 2.4 Luasan Kemiringan Lereng ..... BAB 2–12
Tabel 2.5 Jumlah Curah Hujan, Kelembaban, dan Temperatur Udara Menurut Bulan Tahun 2022 ..... BAB 2–14
Tabel 2.6 DAS di Gorontalo Utara Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 dan Luasannya ..... BAB 2–17
Tabel 2.7 Formasi Batuan Gorontalo Utara ..... BAB 2–18
Tabel 2.8 Luas Penutup/Penggunaan Lahan ..... BAB 2–20
Tabel 2.9 Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya ..... BAB 2–21
Tabel 2.10 Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung . BAB 2–24
Tabel 2.11 Luas Kawasan Hutan Kabupaten Gorontalo Utara (Ha) ..... BAB 2–25
Tabel 2.12 Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2019 (Hektar) ..... BAB 2–32
Tabel 2.13 Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2020 (Hektar) ..... BAB 2–32
Tabel 2.14 Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2021 (Hektar) ..... BAB 2–33
Tabel 2.15 Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2022 (Hektar) ..... BAB 2–33
Tabel 2.16 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 ..... BAB 2–37
Tabel 2.17 Estimasi Potensi, Volume Tangkap yang Diperbolehkan, dan Pemanfaatan WPP 716 ..... BAB 2–40
Tabel 2.18 Klasifikasi Jenis Daya Tarik Wisata (DTW) ..... BAB 2–44
Tabel 2.19 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Gorontalo Utara ..... BAB 2–58
Tabel 2.20 Populasi Penduduk Per Kecamatan (Jiwa) ..... BAB 2–60
Tabel 2.21 Kepadatan Penduduk ..... BAB 2–61
Tabel 2.22 Penduduk Menurut Kepercayaan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ..... BAB 2–65
Tabel 2.23 Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan ..... BAB 2–66
Tabel 2.24 Pendapatan Domestik Regional Bruto Gorontalo Utara ..... BAB 2–68
Tabel 2.25 PDRB ADHB Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah) ..... BAB 2–69
Tabel 2.26 PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah) ..... BAB 2–69
Tabel 2.27 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen) ... BAB 2–70
Tabel 2.28 PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) ..... BAB 2–71
Tabel 2.29 PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) ..... BAB 2–72
Tabel 2.30 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen) ..... BAB 2–73
Tabel 2.31 PDRB Per kapita Gorontalo Utara ..... BAB 2–75
Tabel 2.32 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–81
Tabel 2.33 Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo BAB 2–81
Tabel 2.34 Indeks Gini Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional BAB 2–85

Tabel 2.35 Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023 ..... BAB 2–91
Tabel 2.36 Jumlah dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–94
Tabel 2.37 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka..... BAB 2–96
Tabel 2.38 TPAK dan TPT Menurut Gender..... BAB 2–96
Tabel 2.39 Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Ditamatkan dan Status Pekerjaan Tahun 2023 ..... BAB 2–98
Tabel 2.40 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2023..... BAB 2–99
Tabel 2.41 Angkatan Kerja di Gorontalo Utara..... BAB 2–100
Tabel 2.42 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023 ..... BAB 2–100
Tabel 2.43 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga..... BAB 2–103
Tabel 2.44 Perubahan It, IB, dan NTP Desember 2022 terhadap Desember 2021 ..... BAB 2–104
Tabel 2.45 Nilai Tukar Nelayan Provinsi Gorontalo..... BAB 2–105
Tabel 2.46 Capaian Indikator Keluarga Sehat..... BAB 2–107
Tabel 2.47 Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo Tahun 2022..... BAB 2–109
Tabel 2.47 Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo Tahun 2022 (lanjutan) ..... BAB 2–109
Tabel 2.48 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo..... BAB 2–110
Tabel 2.49 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo..... BAB 2–111
Tabel 2.50 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–112
Table 2.51 Perubahan Indikator Pembentuk IKK Provinsi Gorontalo..... BAB 2–113
Tabel 2.52 Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ..... BAB 2–120
Tabel 2.53 Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ..... BAB 2–121
Tabel 2.54 Provinsi 15 Besar ILD Tahun 2021 dan 2022 ..... BAB 2–123
Tabel 2.55 Skor Indikator Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022..... BAB 2–127
Tabel 2.56 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Tahun 2023..... BAB 2–128
Tabel 2.57 Komparasi Komponen Penyusun Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023..... BAB 2–130
Tabel 2.58 Indeks Demokrasi di Provinsi Gorontalo Menurut Aspek ..... BAB 2–132
Tabel 2.59 Kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo..... BAB 2–135

Tabel 2.60 *Intake* Air Baku di Gorontalo Utara ..... BAB 2–136
Tabel 2.61 Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak ..... BAB 2–137
Tabel 2.62 Komposisi Sumber Air Minum Layak ..... BAB 2–137
Tabel 2.63 Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas BAB ..... BAB 2–137
Tabel 2.64 Komposisi Kepemilikan Kloset ..... BAB 2–138
Tabel 2.65 Komponen Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan ..... BAB 2–141
Tabel 2.66 Indeks dan Sub Indeks Daya Saing Digital Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ..... BAB 2–143
Tabel 2.67 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–144
Tabel 2.68 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–147
Tabel 2.69 Indeks Pelayanan Publik Nasional ..... BAB 2–147
Tabel 2.70 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. BAB 2–149
Tabel 2.71 Cakupan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini ..... BAB 2–154
Tabel 2.72 APS Pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun ..... BAB 2–154
Tabel 2.73 Partisipasi Sekolah Per Kelompok Umur Menurut Jenis Gender ..... BAB 2–156
Tabel 2.74 Angka Putus Sekolah ..... BAB 2–157
Tabel 2.75 Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 ..... BAB 2–158
Tabel 2.76 Rasio Guru dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2021/2022 ..... BAB 2–160
Tabel 2.77 Rasio Ketersediaan Sekolah dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022 ..... BAB 2–161
Tabel 2.78 Kondisi Ruang Kelas ..... BAB 2–161
Tabel 2.79 Cakupan Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B ..... BAB 2–162
Tabel 2.80 Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi "A" ..... BAB 2–163
Tabel 2.81 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1/D4 ..... BAB 2–164
Tabel 2.82 Guru yang Memenuhi Kualifikasi Jenjang Sarjana ..... BAB 2–164
Tabel 2.83 Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah Jenjang Sekolah Dasar ..... BAB 2–165
Tabel 2.84 Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah Jenjang SMP ..... BAB – 166
Tabel 2.85 Kejadian Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Wilayah Kerja ..... BAB 2–167
Tabel 2.86 Sebaran Bayi dengan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2023 . BAB 2–168
Tabel 2.87 Capaian *Universal Child Immunization* (UCI) ..... BAB 2–169
Tabel 2.88 Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI) Menurut Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2023 ..... BAB 2–169
Tabel 2.89 Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan ..... BAB 2–171

Tabel 2.90 Cakupan Desa Siaga Aktif ..... BAB 2–172
Tabel 2.91 Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum Layak..... BAB 2–172
Tabel 2.92 Sebaran Penduduk Berakses Air Minum Layak Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023..... BAB 2–173
Tabel 2.93 KK Berakses Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023 ..... BAB 2–174
Tabel 2.94 Desa *Open Defecation Free* ..... BAB 2–174
Tabel 2.95 Penemuan dan Penanganan Penderita TBC/BTA ..... BAB 2–180
Tabel 2.96 Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis ..... BAB 2–180
Tabel 2.97 Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Melalui Program DOTS BAB 2–181
Tabel 2.98 Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD ..... BAB 2–181
Tabel 2.99 Penderita Diare yang Ditangani ..... BAB 2–182
Tabel 2.100 Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi ..... BAB 2–182
Tabel 2.101 Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani ..... BAB 2–183
Tabel 2.102 Balita ISPA dan Pneumonia yang Ditangani per Kecamatan. BAB 2–184
Tabel 2.103 Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan 2008–2023…… BAB 2–184
Tabel 2.104 Rasio Posyandu ..... BAB 2–185
Tabel 2.105 Cakupan Posyandu Aktif ..... BAB 2–185
Tabel 2.106 Rasio Puskesmas dan Jaringannya ..... BAB 2–186
Tabel 2.107 Perkembangan Layanan RS ZUS dan RSTM Tahun 2023…. BAB 2–187
Tabel 2.108 Layanan Rumah Sakit ZUS ..... BAB 2–187
Tabel 2.109 Tenaga Medis dan Paramedis pada Dinas Kesehatan ..... BAB 2–189
Tabel 2.110 Rasio Tenaga Medis dan Paramedis per 100.000 Penduduk Tahun 2023 ..... BAB 2–189
Tabel 2.111 Kasus Balita Gizi Kurang ..... BAB 2–194
Tabel 2.112 Kasus Balita Pendek/Stunting..... BAB 2–195
Tabel 2.113 Kasus Balita Kurus..... BAB 2–196
Tabel 2.114 Kondisi Jalan Kabupaten ..... BAB 2–197
Tabel 2.115 Daerah dan Jaringan Irigasi..... BAB 2–201
Tabel 2.116 Normalisasi Sungai ..... BAB 2–203
Tabel 2.117 Pekerjaan Drainase..... BAB 2–203
Tabel 2.118 Pembangunan Sanitasi Baru ..... BAB 2–204
Tabel 2.119 Pembangunan Instalasi Air Bersih Rumah Tangga..... BAB 2–205
Tabel 2.120 Air Minum Layak Berdasarkan Tipe Daerah (%)……..BAB 2–205
Tabel 2.121 Ketaatan Terhadap Tata Ruang ..... BAB 2–206
Tabel 2.122 Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Perumahan ..... BAB 2–207
Tabel 2.123 Unit Rumah di Gorontalo Utara (Tahun 2021)..... BAB 2–207
Tabel 2.124 Capaian Pelaksanaan Program Pamsimas..... BAB 2–208
Tabel 2.125 Kawasan Kumuh Gorontalo Utara ..... BAB 2–209
Tabel 2.126 Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja..... BAB 2–209
Tabel 2.127 Komposisi PPNS Dinas Satpol PP ..... BAB 2–210
Tabel 2.128 Penegakan Peraturan Daerah ..... BAB 2–211
Tabel 2.129 Cakupan Petugas Linmas..... BAB 2–211

Tabel 2.130 Tingkat Penyelesaian Penanganan Kebakaran ..... BAB 2–212
Tabel 2.131 Personil dan Armada Penanganan Kebakaran ..... BAB 2–213
Tabel 2.132 Jenis Bencana Alam dan Intensitasnya ..... BAB 2–213
Tabel 2.133 Intensitas Bencana Alam Banjir per Kecamatan ..... BAB 2–214
Tabel 2.134 Luasan Ancaman Banjir ..... BAB 2–214
Tabel 2.135 Desa Tangguh Bencana di Gorontalo Utara ..... BAB 2–217
Tabel 2.136 Lokasi Rambu Peringatan Bencana ..... BAB 2–218
Tabel 2.137 Sekolah Aman Bencana (SAB) di Gorontalo Utara ..... BAB 2–219
Tabel 2.138 Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–220
Tabel 2.138 Komponen IRB Gorontalo Utara ..... BAB 2–220
Tabel 2.140 Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ..... BAB 2–221
Tabel 2.141 Jenis PMKS Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2–222
Tabel 2.142 PMKS Penerima Bantuan Sosial ..... BAB 2–223
Tabel 2.143 Penerima BPNT, BST, BLPD, dan PKH ..... BAB 2–224
Tabel 2.144 Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial ..... BAB 2-224
Tabel 2.145 Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja ..... BAB 2–225
Tabel 2.146 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) ..... BAB 2–226
Tabel 2.147 Pencari Kerja Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha ..... BAB 2–227
Tabel 2.148 Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek ..... BAB 2–229
Tabel 2.149 Produktivitas Tenaga Kerja ..... BAB 2–230
Tabel 2.150 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ..... BAB 2–232
Tabel 2.151 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah) ..... BAB 2–234
Tabel 2.152 Kejadian Kekerasan pada Perempuan dan Anak ..... BAB 2–237
Tabel 2.153 Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan ..... BAB 2–237
Tabel 2.154 Peristiwa Nikah di Bawah Umur ..... BAB 2–238
Tabel 2.155 IPA, IPKA, IPHA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ..... BAB 2–240
Tabel 2.156 Ketersediaan Pangan Utama ..... BAB 2–241
Tabel 2.157 Cadangan Pangan ..... BAB 2–241
Tabel 2.158 Skor Pola Pangan Harapan ..... BAB 2–242
Tabel 2.159 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Kkal/Hari) ..... BAB 2–244
Tabel 2.160 Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Gram/Hari) ..... BAB 2–245
Tabel 2.161 Kategori Daerah Rawan Pangan ..... BAB 2–246
Tabel 2.162 Jumlah Desa Rawan dan Aman Pangan Per Kecamatan ..... BAB 2–247
Tabel 2.163 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Gorontalo (%) ..... BAB 2–248
Tabel 2.164 Pembebasan Lahan ..... BAB 2–249
Tabel 2.165 Titik Pemantauan Kualitas Air ..... BAB 2–251

Tabel 2.166 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup..... BAB 2–252
Tabel 2.167 Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani..... BAB 2–256
Tabel 2.168 TPS per Satuan Penduduk.....BAB 2–257
Tabel 2.169 Cakupan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan ..... BAB 2–257
Tabel 2.170 Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup..... BAB 2–258
Tabel 2.171 Kegiatan yang Diawasi dalam Pemantauan Lingkungan ..... BAB 2–259
Tabel 2.172 Bayi Berakta Lahir..... BAB 2–259
Tabel 2.173 Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2–260
Tabel 2.174 Kepemilikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran..... BAB 2–261
Tabel 2.175 Perkembangan Status Desa Membangun per Kecamatan Tahun 2023..... BAB 2–262
Tabel 2.176 Status Desa Membangun di Gorontalo Utara..... BAB 2–262
Tabel 2.177 Indeks Desa Membangun ..... BAB 2–263
Tabel 2.178 Indeks Desa Membangun per Komponen per Kecamatan Tahun 2023..... BAB 2–264
Tabel 2.179 Status BUMDES Berdasarkan Klasifikasi Dasar Tahun 2022 BAB 2–266
Tabel 2.180 Jumlah Anak dalam Keluarga..... BAB 2–271
Tabel 2.181 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif..... BAB 2–271
Tabel 2.182 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Per Kecamatan Tahun 2023.....BAB 2–273
Tabel 2.183 *Unmet Need* Tahun 2023..... BAB 2–275
Tabel 2.184 Jumlah Kendaraan Menurut Jenisnya.....BAB 2–277
Tabel 2.185 Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)..... BAB 2–278
Tabel 2.186 Uji KIR Angkutan Umum.....BAB 2–278
Tabel 2.187 Pembangunan Tambatan Perahu dan Bus Gratis..... BAB 2–279
Tabel 2.188 Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2022.....BAB 2–281
Tabel 2.189 Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2023.....BAB 2–281
Tabel 2.190 Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2022..... BAB 2–282
Tabel 2.191 Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2023..... BAB 2–282
Tabel 2.192 Indeks SPBE.....BAB 2–284
Tabel 2.193 Komponen Indeks SPBE.....BAB 2–284
Tabel 2.194 Tingkat Kematangan Indikator Indeks SPBE Tahun 2023 ..... BAB 2–284
Tabel 2.195 Cakupan Jaringan Komunikasi.....BAB 2–286
Tabel 2.196 Tower Pemancar Seluler Menurut Kecamatan..... BAB 2–286
Tabel 2.197 Aplikasi Layanan Publik.....BAB 2–287
Tabel 2.198 Rasio Akses Internet Publik terhadap Penduduk ..... BAB 2–288
Tabel 2.199 Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi 3 Bulan terakhir..... BAB 2–289

Tabel 2.200 Pertumbuhan Koperasi ..... BAB 2–291
Tabel 2.201 Koperasi Aktif ..... BAB 2–291
Tabel 2.202 Jumlah Koperasi Per Kecamatan..... BAB 2–292
Tabel 2.203 Koperasi Menurut Jenis Per Kecamatan Tahun 2022..... BAB 2–292
Tabel 2.204 Usaha Mikro, Kecil, Menengah..... ... BAB 2–294
Tabel 2.205 UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2021-2023 ..... BAB 2–295
Tabel 2.206 Realisasi Investasi Melalui OSS 2019-2023..... BAB 2–298
Tabel 2.207 Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral Non-UMK Non-SPIPISE dan Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui *Online Single Submission* (OSS)..... BAB 2–299
Tabel 2.208 Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral IUMK Non-SPIPISE dan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui *Online Single Submission* (OSS) ..... BAB 2–300
Tabel 2.209 Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal..... BAB 2–301
Tabel 2.210 Rencana Nilai Investasi Menurut Sumber Investasi..... BAB 2–301
Tabel 2.211 Kumulasi Investasi Sektoral Tahun 2023 ..... BAB 2–302
Tabel 2.212 Realisasi Perizinan Berusaha..... BAB 2–302
Tabel 2.213 Realisasi Non Perizinan Berusaha ..... BAB 2–303
Tabel 2.214 Pengajuan IMB/PBG per Satuan Rumah ..... BAB 2–304
Tabel 2.215 Organisasi Olahraga dan Pemuda ..... BAB 2–307
Tabel 2.216 Organisasi Kepemudaan Aktif ..... BAB 2–308
Tabel 2.217 Organisasi/Persatuan Olahraga Aktif ..... BAB 2–309
Tabel 2.218 Pembinaan Atlet Muda..... BAB 2–310
Tabel 2.219 Pelatih Bersertifikat ..... BAB 2–310
Tabel 2.220 Ketersediaan Dokumen Statistik..... BAB 2–312
Tabel 2.221 Nilai IPS Tahun 2023 dan Indeks Domain..... BAB 2–312
Tabel 2.222 Pemanfaatan Cagar Budaya Kabupaten Tahun 2023..... BAB 2–315
Tabel 2.223 Daftar Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku..... BAB 2–316
Tabel 2.224 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023 ..... BAB 2–317
Tabel 2.225 Pengelolaan Arsip Baku..... BAB 2–319
Tabel 2.226 Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan ..... BAB 2–320
Tabel 2.227 Jenis Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan..... BAB 2–320
Tabel 2.228 Luas Kawasan Hutan Wilayah Kerja KPH Wilayah IV Gorontalo Utara Tahun 2022 ..... BAB 2–322
Tabel 2.229 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Gorontalo..... BAB 2–323
Tabel 2.230 Data Produksi Kelompok Tani Hutan..... BAB 2–323
Tabel 2.231 Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022..... BAB 2–326
Tabel 2.232 Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 (Ha) BAB 2–326
Tabel 2.233 Kunjungan Wisatawan ..... BAB 2–330
Tabel 2.234 Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur..... BAB 2–332
Tabel 2.235 Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan ..... BAB 2–332
Tabel 2.236 Tingkat Okupansi Hotel..... BAB 2–333

Tabel 2.237 Kontribusi Sektor Makan Minum dalam PDRB ..... BAB 2–334
Tabel 2.238 Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Ladang, serta Jagung ..... BAB 2–336
Tabel 2.239 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan ..... BAB 2–338
Tabel 2.240 Produksi Tanaman Hortikultura ..... BAB 2–338
Tabel 2.241 Luas Panen dan Produksi Kelapa Dalam ..... BAB 2–340
Tabel 2.242 Luas Panen dan Produksi Kakao ..... BAB 2–341
Tabel 2.243 Luas Panen dan Produksi Cengkeh ..... BAB 2–342
Tabel 2.244 Perbandingan Luasan Sawah Pra dan Pasca Inventarisasi LP2B ..... BAB 2–343
Tabel 2.245 Luasan dan Sebaran LP2B, LCP2B, dan KP2B Tahun 2023 BAB 2–344
Tabel 2.246 Entitas RTUP Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga ..... BAB 2–348
Tabel 2.247 Entitas RTUP Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga ..... BAB 2–349
Tabel 2.248 Entitas Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga ..... BAB 2–350
Tabel 2.249 Entitas Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Kecamatan ..... BAB 2–353
Tabel 2.250 Entitas Petani Milenial Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Klasifikasinya ..... BAB 2–355
Tabel 2.251 Kelompok Tani Menurut Kecamatan ..... BAB 2–356
Tabel 2.252 Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor) ..... BAB 2–357
Tabel 2.253 Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan ..... BAB 2–358
Tabel 2.254 Produksi Daging/Kilogram ..... BAB 2–358
Tabel 2.255 Produksi Telur (Kg) ..... BAB 2–359
Tabel 2.256 Data Produksi Perikanan ..... BAB 2–360
Tabel 2.257 Produksi Perikanan Tangkap per Komoditas ..... BAB 2–361
Tabel 2.258 Penyebaran Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya BAB 2–362
Tabel 2.259 Produksi Perikanan Budidaya per Komoditas ..... BAB 2–362
Tabel 2.260 Penyebaran Potensi Perikanan Budidaya ..... BAB 2–363
Tabel 2.261 Penyebaran Pemanfaatan Perikanan Budidaya ..... BAB 2–364
Tabel 2.262 Desa Pesisir dan Non Pesisir ..... BAB 2–366
Tabel 2.263 Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PLN ..... BAB 2–367
Tabel 2.264 Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan ..... BAB 2–367
Tabel 2.265 Penyediaan Air dan Nilainya Menurut Kecamatan ..... BAB 2–369
Tabel 2.266 Pasar dan Penambahan Sarana Perdagangan yang Terdaftar Menurut Jenisnya ..... BAB 2–372
Tabel 2.267 Minimarket dan Swalayan yang Berizin serta Lokasinya Tahun 2022 ..... BAB 2–373
Tabel 2.268 Pertumbuhan Industri Kecil ..... BAB 2–375
Tabel 2.269 IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi,

Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2021..... BAB 2–375
Tabel 2.270 IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi, Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2022 ..... BAB 2–375
Tabel 2.271 Bina Kelompok Pengrajin..... BAB 2–375
Tabel 2.272 Penempatan Transmigran Berdasarkan Jenis ..... BAB 2–377
Tabel 2.273 Pelaku Transmigran Setiap UPT di Gorontalo Utara..... BAB 2–378
Tabel 2.274 Dokumen Perencanaan Transmigrasi ..... BAB 2–383
Tabel 2.275 Potensi Satuan Permukiman Transmigrasi Sumalata ..... BAB 2–384
Tabel 2.276 Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan ..... BAB 2–386
Tabel 2.277 Tingkat Serapan Anggaran APBD ..... BAB 2–387
Tabel 2.278 Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023..... BAB 2–388
Tabel 2.279 Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 ..... BAB 2–389
Tabel 2.280 ASN Berdasarkan Gender ..... BAB 2–390
Tabel 2.281 Indeks Profesionalitas ASN 2021 ..... BAB 2–391
Tabel 2.282 Indeks Profesionalitas ASN 2022 ..... BAB 2–391
Tabel 2.283 Indeks Profesionalitas ASN 2023 ..... BAB 2–392
Tabel 2.284 Indeks Sistem Merit Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ..... BAB 2–392
Tabel 2.285 Judul dan Lembaga Pengampu Penelitian ..... BAB 2–393
Tabel 2.286 Pengawasan Internal Inspektorat ..... BAB 2–395
Tabel 2.287 Tindak Lanjut Temuan ..... BAB 2–397
Tabel 2.288 Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri..... BAB 2–397
Tabel 2.289 Organisasi Kemasyarakatan yang Mendaftar..... BAB 2–398
Tabel 2.290 Rapat Sosialisasi Forum Pencegahan Konflik ..... BAB 2–399
Tabel 2.291 Penanganan Gangguan Keamanan ..... BAB 2–399
Tabel 2.292 Anggota DPRD Menurut Partai Politik ..... BAB 2–400
Tabel 2.293 Keputusan dan Kegiatan DPRD ..... BAB 2–401
Tabel 2.294 Peringkat, Skor, dan Status LPPD..... BAB 2–402
Tabel 2.295 Nilai LPPD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo..... BAB 2–402
Tabel 2.296 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Periode 2009-2025 ..... BAB 2–409
Tabel 2.297 Kesimpulan Evaluasi Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 ..... BAB 2–410
Tabel 2.298 Parameter Hasil Proyeksi Penduduk..... BAB 2–415
Tabel 2.299 Rumah Tangga Menurut Karakteristik Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2022..... BAB 2–420
Tabel 2.300 Proyeksi Kebutuhan Perumahan 2025-2045..... BAB 2–421
Tabel 2.301 Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Air ..... BAB 2–423
Tabel 2.302 Status Daya Dukung Air Indikatif ..... BAB 2–424
Tabel 2.303 Standar Kebutuhan Air Bersih Per Hari ..... BAB 2–425
Tabel 2.304 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 2025-2045..... BAB 2–426
Tabel 2.305 Analisis Kebutuhan Air Minum Kabupaten/Kota

Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–427
Tabel 2.306 Proyeksi Kebutuhan Listrik 2025-2045 ..... BAB 2–430
Tabel 2.307 Perkiraan Timbulan Sampah Per Kecamatan Tahun 2023 .... BAB 2–433
Tabel 2.308 Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045 ..... BAB 2–433
Tabel 2.309 Timbulan Sampah Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–434
Tabel 2.310 Proyeksi Kubikasi Kumulatif Sampah TPA Molantadu Tahun 2017-2045 ..... BAB 2–435
Tabel 2.311 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di RS ZUS dan RS TM ..... BAB 2–438
Tabel 2.312 Tenaga Medis dan Paramedis per Satuan Penduduk Tahun 2022 ..... BAB 2–438
Tabel 2.313 Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan ..... BAB 2–439
Tabel 2.314 Proyeksi Kebutuhan Sekolah ..... BAB 2–441
Tabel 3.1 Perbandingan Capaian Makro Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional ..... BAB 3–2
Tabel 4.1 Sasaran Visi Gorontalo Utara Tahun 2045 ..... BAB 4–5
Tabel 4.2 Target Sasaran Visi 5 Tahunan ..... BAB 4–6
Tabel 4.3 Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD ..... BAB 4–6
Tabel 4.4 Persandingan Misi RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045 ..... BAB 4–8
Tabel 5.1 Arah Kebijakan Strategis/Kebijakan Transformasi Daerah ..... BAB 5–4
Tabel 5.2 Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan ..... BAB 5–10
Tabel 5.3 Persandingan Sasaran Pokok Pembangunan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 5–16
Tabel 5.4 Sasaran Pokok Pembangunan, Indikator Sasaran Pokok, dan Target Akhir RPJPD ..... BAB 5–17
Tabel 5.5 Sasaran Pokok Pembangunan, Indikator, dan Target Per Periode RPJPD ..... BAB 5–19

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Piramida Penduduk Tahun 2022 dan 2023 ..... BAB 2–57
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Gorontalo Utara ..... BAB 2–60
Grafik 2.3 Komposisi Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan ..... BAB 2–61
Grafik 2.4 Tren TFR Gorontalo Utara ..... BAB 2–62
Grafik 2.5 Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (ASFR) .... BAB 2–63
Grafik 2.6 Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi ..... BAB 2–64
Grafik 2.7 Proporsi Penduduk Berstatus Migran Risen Antar Kabupaten Menurut Generasi ..... BAB 2–64
Grafik 2.8 Angka Kematian Bayi..... BAB 2–65
Grafik 2.9 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (Persen)..... BAB 2–74
Grafik 2.10 Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah) .. BAB 2–76
Grafik 2.11 Laju Inflasi (YoY) di Kota Gorontalo dan Nasional Tahun 2014–2023 (Persen) ..... BAB 2–78
Grafik 2.12 Garis Kemiskinan Tahun 2010-2023 (Rupiah)..... BAB 2–87
Grafik 2.13 Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)..... BAB 2–88
Grafik 2.14 Angka Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)..... BAB 2–89
Grafik 2.15 Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen) ..... BAB 2–97
Grafik 2.16 TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan ..... BAB 2–98
Grafik 2.17 Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Persen)..... BAB 2–99
Grafik 2.18 Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Persen)BAB 2–101
Grafik 2.19 Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal..... BAB 2–102
Grafik 2.20 Indeks Keluarga Sehat ..... BAB 2–106
Grafik 2.21 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2023..... BAB 2–106
Grafik 2.22 Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–108
Grafik 2.23 Capaian IPK Provinsi Gorontalo dan Nasional ..... BAB 2–115
Grafik 2.24 IPK Per Dimensi Provinsi Gorontalo dan Nasional, Proyeksi Tahun 2024, dan Peringkat Per Dimensi di Tingkat Nasional. BAB 2–116
Grafik 2.25 Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)..... BAB 2–117
Grafik 2.26 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) ..... BAB 2–118
Grafik 2.27 Indeks Pendidikan Gorontalo Utara ..... BAB 2–118
Grafik 2.28 Komparasi Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022 ..... BAB 2–119
Grafik 2.29 Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SD ..... BAB 2–120
Grafik 2.30 Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SMP ..... BAB 2–121

Grafik 2.31 ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021 ..... BAB 2–124
Grafik 2.32 ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022 ..... BAB 2–124
Grafik 2.33 IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2022 ..... BAB 2–125
Grafik 2.34 IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2023 ..... BAB 2–125
Grafik 2.35 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2–128
Grafik 2.36 Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023 ..... BAB 2–132
Grafik 2.37 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Gorontalo..... BAB 2–133
Grafik 2.38 Dimensi Pembentuk IKUB Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–134
Grafik 2.39 Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2023 ..... BAB 2–151
Grafik 2.40 Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2023 ..... BAB 2–152
Grafik 2.41 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2022 ..... BAB 2–153
Grafik 2.42 Tren Rasio Guru-Murid ..... BAB 2–159
Grafik 2.43 Guru Tersertifikasi ..... BAB 2–163
Grafik 2.44 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%) ..... BAB 2–166
Grafik 2.45 Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2011-2023 (%) ..... BAB 2–167
Grafik 2.46 Peserta Jamkesda (Jiwa) ..... BAB 2–170
Grafik 2.47 Alokasi Anggaran Jamkesda (Ribuan Rupiah) ..... BAB 2–171
Grafik 2.48 Akses Sanitasi Layak Gorontalo Utara 2019-2023 ..... BAB 2–173
Grafik 2.49 Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%) ..... BAB 2–176
Grafik 2.50 Jumlah dan Angka Kematian Bayi ..... BAB 2–177
Grafik 2.51 Jumlah dan Angka Kematian Balita ..... BAB 2–177
Grafik 2.52 Jumlah Kematian Ibu ..... BAB 2–179
Grafik 2.53 Angka Kematian Ibu ..... BAB 2–179
Grafik 2.54 Realisasi PAD dari RSUD ZUS 2018-2023 ..... BAB 2–188
Grafik 2.55 Prevalensi Stunting Gorontalo Utara Berdasarkan SSGI/SKI dan Hasil Gelar Timbang ..... BAB 2–190
Grafik 2.56 ASI Ekslusif di Gorontalo Utara (Persen) ..... BAB 2–192
Grafik 2.57 Jalan yang Dikerjakan ..... BAB 2–199
Grafik 2.58 Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan ..... BAB 2–200
Grafik 2.59 Kinerja Jaringan Irigasi (%) ..... BAB 2–202
Grafik 2.60 Sanitasi Layak (%) ..... BAB 2–204
Grafik 2.61 Kondisi Hunian Layak (%) ..... BAB 2–206
Grafik 2.62 Nilai Per Prioritas IKD Gorontalo Utara Tahun 2023 ..... BAB 2–222
Grafik 2.63 Pengangguran Berdasarkan Gender (%) ..... BAB 2–226
Grafik 2.64 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja 2020-2022 (%) ..... BAB 2–227
Grafik 2.65 Upah Minimum Kabupaten (Rupiah) ..... BAB 2–228

Grafik 2.66 Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen) ..... BAB 2–233
Grafik 2.67 Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen) ..... BAB 2–236
Grafik 2.68 OPD Berperencana Anggaran Responsif Gender (%) ..... BAB 2–239
Grafik 2.69 IPA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–240
Grafik 2.70 Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari (Kkal/Hari) ..... BAB 2–243
Grafik 2.71 Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari (Gram/Hari) .... BAB 2–244
Grafik 2.72 Komposisi Sampah di Sumber Sampah Tahun 2022 (%) ..... BAB 2–254
Grafik 2.73 Laju Pertumbuhan Penduduk (%) ..... BAB 2–270
Grafik 2.74 Volume Usaha Koperasi (Jutaan Rupiah) ..... BAB 2–292
Grafik 2.75 Retribusi Objek Wisata ..... BAB 2–331
Grafik 2.76 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB ..... BAB 2–335
Grafik 2.77 Entitas Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Menurut Kecamatan ..... BAB 2–345
Grafik 2.78 Entitas Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Menurut Subsektor ..... BAB 2–346
Grafik 2.79 Entitas RTUP Menurut Kecamatan ..... BAB 2–347
Grafik 2.80 Entitas RTUP Subsektor ..... BAB 2–347
Grafik 2.81 Persentase RTUP Menurut Jenis Kelamin KRT ..... BAB 2–348
Grafik 2.82 Entitas Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan ..... BAB 2–349
Grafik 2.83 Persentase Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Jenis Kelamin ..... BAB 2–351
Grafik 2.84 Persentase Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Subsektor Menurut Jenis Kelamin ..... BAB 2–351
Grafik 2.85 Entitas Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan dan Usaha Pertanian Gurem Menurut Kecamatan BAB 2–352
Grafik 2.86 Entitas UTP Menurut 10 Komoditas Terbanyak yang Diusahakan UTP ..... BAB 2–353
Grafik 2.87 Penggunaan Teknologi Digital Entitas Petani ..... BAB 2–354
Grafik 2.88 Sebaran Petani Milenial Usia 19-39 Tahun ..... BAB 2–355
Grafik 2.89 Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun) ..... BAB 2–365
Grafik 2.90 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian (%) ..... BAB 2–370
Grafik 2.91 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran (%) ..... BAB 2–370
Grafik 2.92 Entitas Pedagang Menurut Pasar Tahun 2023 ..... BAB 2–371
Grafik 2.93 Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Industri Pengolahan (%) ..... BAB 2–374
Grafik 2.94 Nilai Dimensi IPKT 2023 ..... BAB 2–382
Grafik 2.95 Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan Tahun Anggaran 2020 Hingga 2023 ..... BAB 2–387
Grafik 2.96 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ..... BAB 2–388

Grafik 2.97 Latar Belakang Pendidikan ASN ..... BAB 2–390
Grafik 2.98 Pembagian Golongan ASN Tahun 2023 ..... BAB 2–390
Grafik 2.99 Indeks Sistem Merit ..... BAB 2–392
Grafik 2.100 Skor Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022 ..... BAB 2–400
Grafik 2.101 Indeks Tata Kelola Pengadaan ..... BAB 2–404
Grafik 2.102 Indeks Kepuasan Masyarakat ..... BAB 2–405
Grafik 2.103 Proyeksi Populasi Penduduk 2025-2035 (Ribuan Jiwa) ..... BAB 2–413
Grafik 2.104 Proyeksi Populasi Penduduk 2036-2045 (Ribuan Jiwa) ..... BAB 2–413
Grafik 2.105 Proyeksi Piramida Penduduk 2020-2035
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)... BAB 2–416
Grafik 2.106 Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Bangunan
Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2023 (%) ..... BAB 2–421
Grafik 2.107 Sumber Timbulan Sampah (%) ..... BAB 2–432
Grafik 3.1 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (%) ..... BAB 3–58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen ..... BAB 1–9
Gambar 1.2 Sinkronisasi Perencanaan Spasial Pusat dan Daerah ..... BAB 1–9
Gambar 2.1 Peta dan Batas Administrasi Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2–9
Gambar 2.2 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2–12
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2–13
Gambar 2.4 Peta Jenis Tanah Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2–14
Gambar 2.5 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Gorontalo ..... BAB 2–15
Gambar 2.6 Peta Ketersediaan Air Tanah Gorontalo Utara ..... BAB 2–15
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai di Gorontalo Utara..... BAB 2–16
Gambar 2.8 Peta Geologi Gorontalo Utara..... BAB 2–18
Gambar 2.9 Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019..... BAB 2–20
Gambar 2.10 Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya..... BAB 2–22
Gambar 2.11 Kawasan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2–23
Gambar 2.12 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung ..... BAB 2–24
Gambar 2.13 Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara..... BAB 2–27
Gambar 2.14 Arahan Kemampuan Lahan Pengembangan Wilayah ..... BAB 2–28
Gambar 2.15 Historis dan Proyeksi Penggunaan Lahan Tahun 2013-2040..BAB 2–34
Gambar 2.16 Peta Kawasan Hutan ..... BAB 2–37
Gambar 2.17 Wilayah Potensi Perikanan Tangkap WPP 716 ..... BAB 2–39
Gambar 2.18 Rencana Pola Ruang Gorontalo Utara ..... BAB 2–50
Gambar 2.19 Satuan Kemampuan Lahan Potensi Bencana Alam ..... BAB 2–54
Gambar 2.20 Ketimpangan Pengeluaran Tahun 2023..... BAB 2–85
Gambar 2.21 Angka Absolut (Dalam Ribuan) dan Persentase Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo Tahun 2023 ..... BAB 2–88
Gambar 2.22 Persentase Klasifikasi Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Gorontalo Tahun 2022..... BAB 2–94
Gambar 2.23 Aspek dan Prinsip Evaluasi IPP..... BAB 2–146
Gambar 2.24 Rencana Segmen I, II, dan III Bypass Gorontalo Utara ……BAB 2–199
Gambar 2.25 Peta Rawan Bencana Banjir..... BAB 2–215
Gambar 2.26 Peta Rawan Bencana Longsor..... BAB 2–215
Gambar 2.27 Peta Rawan Bencana ..... BAB 2–216
Gambar 2.28 Interelasi Struktural Dimensi SDI..... BAB 2–305
Gambar 2.29 IPLM Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Provinsi Gorontalo.... BAB 2–317
Gambar 2.30 Usaha Pertanian Perorangan Menurut Subsektor..... BAB 2–325
Gambar 2.31 Usaha Pertanian Perorangan Menurut Subsektor Kehutanan Per Kecamatan..... BAB 2–325
Gambar 2.32 Rencana Struktur Ruang Kabupaten Gorontalo Utara..... BAB 2–446
Gambar 2.33 Rencana Pola Ruang Kabupaten Gorontalo Utara ..... BAB 2–451
Gambar 2.34 Kawasan Strategis Provinsi Terintegrasi Pelabuhan Anggrek..... BAB 2–454

Gambar 2.35 Kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Minanga ..... BAB 2–455
Gambar 4.1 Skema Perumusan Alternatif Pokok Visi ..... BAB 4–3

DAFTAR FOTO

Foto 2.1 Spanduk dukungan pemekaran dibentangkan di Senayan, Jakarta..... BAB 2–6
Foto 2.2 Musyawarah Besar II untuk menghimpun aspirasi rakyat pasca Pemekaran……..... BAB 2–6
Foto 2.3 Peresmian pembentukan Gorontalo Utara dan pelantikan Penjabat Bupati oleh Mendagri ad interim……..... BAB 2–7
Foto 2.4 The Big Five Destinations di Gorontalo Utara ..... BAB 2–44

2025

Bab I

Pendahuluan

2045

MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 1 Ayat (4), menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai dokumen perencanaan untuk periode dua puluh tahun. Sesuai amanat undang-undang tersebut, daerah perlu mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional (Pasal 5 Ayat 1). RPJPD ini selanjutnya menjadi pedoman/navigasi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang berdimensi waktu lima tahunan, dan selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Strategis setiap perangkat daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang berdimensi tahunan.

Meskipun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2011 masa berlaku RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara mulai berlaku tahun 2011 hingga 2029, pada Rancangan Undang-Undang RPJPN Tahun 2025-2045 Pasal 10 ayat 2, yang juga diperkuat oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, RPJP Daerah wajib selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah, salah satu implikasinya setiap provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya diminta menyesuaikan dengan periodisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang akan berakhir di 2025, sehingga dalam penyusunannya RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045.

Dengan akan berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, perlu dipersiapkan langkah-langkah strategis untuk merumuskan dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara periode berikutnya melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045. Dimulai dari penyusunan dokumen rancangan awal RPJPD, melalui penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan seperti aspek geografis, demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, serta mempertimbangkan isu eksternal (hubungan Kabupaten Gorontalo Utara dengan wilayah di sekitarnya, bahkan dengan isu Ibukota Negara (IKN)) dan isu internal (pemenuhan infrastruktur dasar, kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat yang rendah, kualitas dan daya saing SDM, dan tata kelola pemerintah). Selain itu, penyusunan dokumen RPJPD juga perlu memperhatikan kebijakan Provinsi Gorontalo dan Nasional, yang berkaitan dengan **Visi Indonesia Emas 2045** yang harus dijadikan orientasi akhir guna mendukung cita-cita Indonesia. Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 7 hingga 10, bahwa perencanaan pembangunan daerah memperhatikan empat pendekatan: teknokratis, partisipatif, politis, dan perpaduan antara *bottom-up* dan *top-down planning*. Secara substansi, menggunakan pendekatan **tematik**-**holistik**, yang mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan. Pendekatan berikutnya **integratif**, yaitu menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan **spasial**, yang mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025-2045 disusun sebagai kelanjutan dan pembaruan dari pelaksanaan pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 4 juga disebutkan, tujuan perencanaan pembangunan daerah adalah mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan

kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, dan daya saing daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa peraturan terkait penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464); telah dicabut sebagian dan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
25. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
27. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

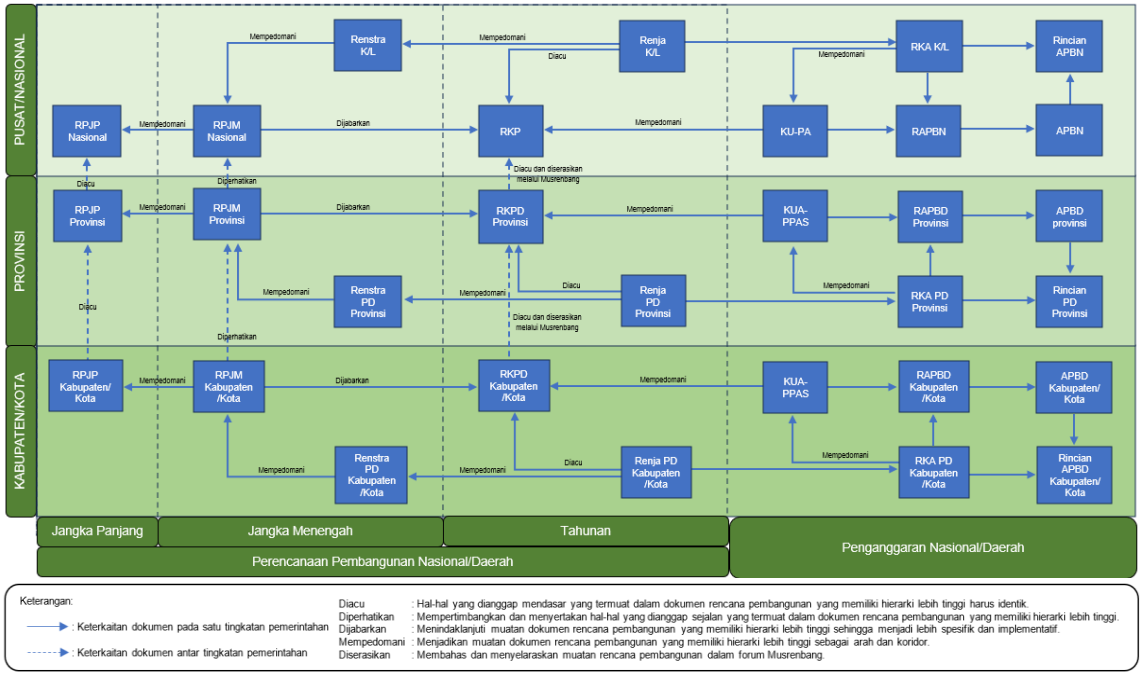
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
29. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
36. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

37. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2024);
39. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 183);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 209);
42. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
43. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 600.1/176/SJ/Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
44. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI Nomor 600.2.1/3674/SJ/Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3 HUBUNGAN ANTARA RPJPD KABUPATEN GORONTALO UTARA DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH LAINNYA

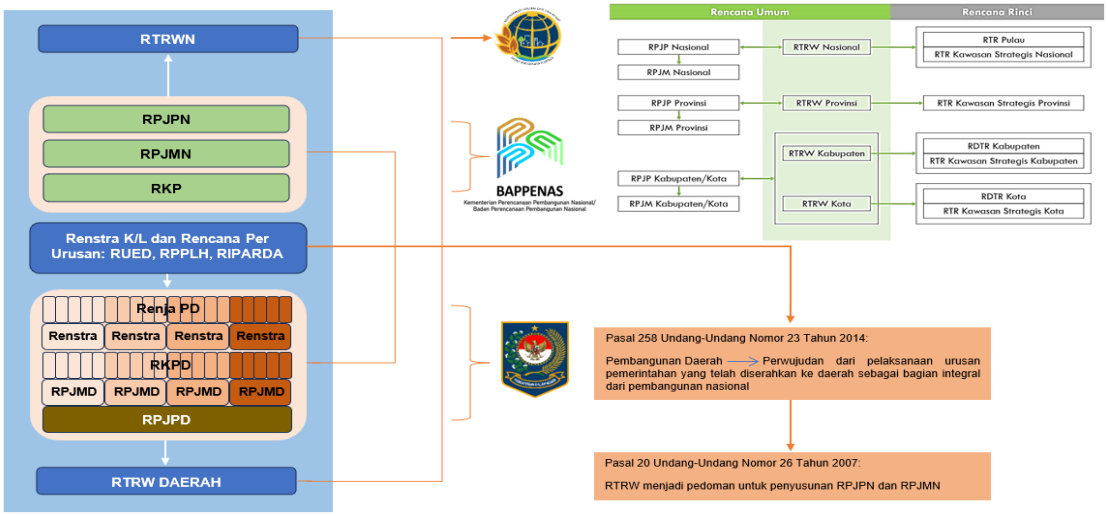
Keterkaitan antar dokumen perencanaan sebagaimana pada Gambar 1.1 di bawah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), urgensinya agar dapat terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah maupun antar fungsi pemerintahan.

Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen



Sumber: Diolah dari UU Nomor 25 Tahun 2004

Gambar 1.2
Sinkronisasi Perencanaan Spasial Pusat dan Daerah



Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Gorontalo, maupun Kabupaten Gorontalo Utara. Lebih jauh, dokumen ini merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama dua puluh tahun, dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya, serta akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara setiap jangka waktu lima tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan Perangkat Daerah yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar perangkat daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain RPJMD merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan langsung (Kabupaten Gorontalo, Bonebolango, Buol, Boalemo, Bolaang Mongondow Utara, dan Pohuwato, serta dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah). Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara yang pada hilirnya memberikan dukungan agregasi terhadap pencapaian cita-cita Indonesia Emas 2045. Adapun tujuannya adalah:

1. Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu dua puluh tahun atau empat periode dalam penyelenggaraan pembangunan;
2. Menjadi pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah yang dikemas dalam kerangka sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan latar belakang penyusunan RPJPD; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat secara logis dasar-dasar analisis gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD periode sebelumnya, tren demografi yang dikoneksikan dengan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, serta pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah, dengan sebelumnya diceritakan rentetan tahapan sejarah berdirinya Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat dasar utama penjelasan butir-butir permasalahan penyelenggaraan pembangunan dan isu-isu strategis terkini dan yang akan dihadapi dan berusaha dipecahkan dalam pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang, isu-isu strategis daerah tersebut adalah isu yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar, beserta analisis terhadap amanat dokumen atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menyajikan Visi dan Misi pembangunan daerah selama dua puluh tahun yang menjadi bagian penting dalam penyajian dokumen RPJPD, sebagai cita-cita yang diharapkan dari hasil pembangunan daerah.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, yang menjabarkan kebijakan dan indikator serta target pembangunan jangka panjang daerah dalam perwujudan visi misi pembangunan. Arah kebijakan dan sasaran pokok juga merupakan pondasi dalam pentahapan pembangunan yang dilakukan pada empat periodisasi pembangunan jangka menengah.

BAB VI PENUTUP

Memuat harapan dan penjabaran dari kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045.

2025

Bab II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2045

MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan kabupaten yang memiliki struktur wilayah yang *unique* dan berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, wilayah daratan yang memanjang secara horizontal, dan setiap kecamatan berada di wilayah pesisir. Memiliki wilayah seluas 1.777,03 Kilometer^2 yang terdiri atas 11 kecamatan dan 123 desa, serta bergaris pantai terpanjang se-Provinsi Gorontalo, dengan sebaran 55 pulau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022. Melihat kondisi alam tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, potensi daerah penting untuk ditingkatkan fungsi pemanfaatannya guna mendorong iklim investasi di daerah. Pada bagian ini dijelaskan dan disajikan secara logis dasar-dasar analisa yang dimulai dari gambaran umum kondisi daerah yang meliputi sejarah berdirinya daerah, aspek geografis dan demografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah.

2.1 KONDISI UMUM DAERAH

2.1.1 Sejarah Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara

Sejarah berdirinya Kabupaten Gorontalo Utara dimulai sejak tahun 1966 dengan peristiwa yang dikenal dengan “Resolusi 1966”. Periode tersebut ditandai dengan peristiwa dilaksanakannya Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara oleh Badan Musjawarah Pembangunan Daerah Gorontalo Utara (BMPDGU) di Kecamatan Kwandang pada tanggal 15-17 Desember 1966. Pertemuan ini dihadiri oleh para tokoh di wilayah Gorontalo Utara dari unsur partai politik, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan unsur daerah lainnya. Setelah pertemuan ini, dilahirkan resolusi untuk membentuk sebuah kabupaten baru di bagian utara Kabupaten Gorontalo. Beberapa tahun berselang, pada tanggal 11 April 1968, BMPDGU melayangkan Surat Tuntutan Nomor 14/BMPDGU/68 dengan pokok tuntutan eks Kewedanaan Kwandang

(Kwandang, Sumalata, Atinggola) menjadi Kabupaten Gorontalo Utara yang ditujukan kepada Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo, Ketua DPR GR Kabupaten Gorontalo, Gubernur Sulawesi Utara, Menteri Dalam Negeri, dan Ketua DPR GR Republik Indonesia. Perjuangan awal ini dipimpin oleh SH. Puti dan Abdulkadir Uno, masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris BMPDGU.

Lama tidak terdengar karena situasi negara yang belum stabil pasca pemberontakan PKI dan populasi penduduk yang masih kecil, gaung pembentukan Gorontalo Utara kembali bergema di tahun 2001, dengan nama Kabupaten Pantura. Komite Pembentukan Daerah Pantura Gorontalo (KOPDA PG) terbentuk dibawah pimpinan (alm.) Drs. Hamid Dunggio dan Moch. Tajim Boki, yang masing-masing bertindak sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum, Muhtar Darise sebagai Ketua Dewan Kehormatan, dan Thomas Mopili sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan. Isu pembentukan yang beredar kencang di masyarakat dan kalangan pemerintah memicu segelintir pihak yang tidak setuju adanya pembentukan ini untuk menghalang-halangi sehingga isu tersebut kembali redup.

Episode perjuangan dilanjutkan pada Desember 2003, dengan terbentuknya ‘Tim 7’ pasca sosialisasi dana bantuan dari *Islamic Development Bank* (IDB) oleh pemerintah dan DPRD Kabupaten Gorontalo di Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) Kwandang. Pada awalnya, bantuan dari IDB tersebut dijadikan sebagai pengalih perhatian masyarakat dan upaya untuk meredam isu gerakan pembentukan Gorontalo Utara. Perdebatan sengit terjadi antara para tokoh masyarakat dengan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang berujung pada bubarnya forum sosialisasi bantuan tersebut. Ketidaksepahaman para tokoh masyarakat kemudian bermuara pada dibentuknya “Tim 7” yang dipimpin oleh (alm.) Husain Udit dan Sekretaris, Aidin M. Nusa. Tugas utama dari tim ini yakni melakukan sosialisasi pembentukan kabupaten baru dan mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat dari lima kecamatan. Tidak lama, saat berlangsung halal-bihalal dan Pemantapan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Pantura Gorontalo pada 27 Desember 2003, dibentuklah Panitia Pemekaran Pantura (Komite Pembentukan Kabupaten – KPK) dengan Thariq Modanggu terpilih sebagai Ketua, dan Jost Pomalinggo sebagai Sekretaris.

Perjuangan masyarakat Gorontalo Utara untuk memisahkan diri dari Kabupaten Gorontalo dilanjutkan pada medio 2004 hingga 2006. Pendekatan yang lebih cerdas, komprehensif, sistematis, taktis-strategis, hingga simpatik dilakukan oleh para tokoh pemekaran daerah. Pada tanggal 2 hingga 4 Januari 2004 dilaksanakan rapat-rapat awal sebagai pengisian kepengurusan KPK bertempat di kediaman Dedi Sumaga, Jl. Trans Sulawesi Desa Moluo, membahas struktur keanggotaan panitia yang sudah disiapkan oleh Ketua Panitia Pemekaran yang menyepakati Komite Pembentukan Kabupaten Pantura. Rapat ini juga membahas langkah awal KPK Pantura untuk menghadap Ahmad Hoesa Pakaya sebagai Bupati Kabupaten Gorontalo dan membahas sosialisasi di lima kecamatan di pesisir utara Kabupaten Gorontalo.

Pada tanggal 6 Januari 2004, KPK bersilaturahmi dengan Bupati Kabupaten Gorontalo yang didampingi pejabat teras Kabupaten Gorontalo untuk melaporkan rencana strategis program komite dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di pantai utara. Pertemuan ini berhasil meyakinkan Bupati Kabupaten Gorontalo bahwa keinginan pembentukan kabupaten baru murni merupakan aspirasi rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta memperpendek rentang kendali pemerintahan yang terpusat di Limboto (Ibukota Kabupaten Gorontalo). KPK juga menegaskan bahwa perjuangan pembentukan kabupaten baru tidak dikerahkan oleh para elit tetapi dimotori oleh kesadaran progresif kelompok pemuda yang menghendaki perubahan di daerahnya. Pada tanggal 15 hingga 19 Januari 2004 digelar sosialisasi pembentukan kabupaten di lima kecamatan pesisir utara. Sosialisasi ini mendapatkan respon yang positif dan secara perlahan berhasil mendapatkan dukungan yang luas dari masyarakat.

Dengan memanfaatkan momentum heroisme 23 Januari 1942, pada tanggal 23 Januari 2004, KPK Pantura berhasil melaksanakan deklarasi rakyat dengan satu tekad bulat untuk menjadi satu kabupaten tersendiri. Momentum bersejarah ini dihadiri oleh berbagai komponen masyarakat di lima kecamatan yang ada di pesisir pantai utara Provinsi Gorontalo. Peristiwa akbar ini diwarnai penandatanganan 500 meter spanduk oleh Gubernur Gorontalo diikuti undangan dan para tokoh masyarakat yang berada di lapangan Kwandang Desa Moluo,

penandatanganan komunike bersama oleh elemen masyarakat yang menyatakan lahirnya Kabupaten Pantura dan pembacaan pidato *Iftitah* oleh Prof. Dr. Nani Tuloli. Deklarasi Pembentukan Kabupaten Pantura oleh Ketua KPK, Thariq Modanggu, dan penandatanganan persetujuan deklarasi pembentukan Kabupaten Pantura oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Abdullah Talani, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Muchtar Darise, dan Gubernur Gorontalo, Fadel Mohamad.

Tanggal 26 Januari 2004, KPK Pantura beraudiensi dan mengajukan permohonan rekomendasi dukungan DPRD Kabupaten Gorontalo untuk membentuk Kabupaten Pantura. Tanggal 3 Februari 2004, KPK mempresentasikan proposal kelayakan pembentukan Kabupaten Pantura pada Sidang Paripurna Khusus DPRD Kabupaten Gorontalo, pada saat itu dikeluarkan keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rekomendasi Pernyataan Sikap Mendukung Pembentukan Kabupaten Pantura. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 24 Februari 2004, lahirlah Rekomendasi Bupati Kabupaten Gorontalo tentang Usulan Pembentukan Kabupaten Pantura yang ditujukan kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Gorontalo.

Dukungan dari partai-partai politik di DPRD Provinsi Gorontalo mengalir dengan diloloskannya Keputusan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rekomendasi/Persetujuan Pembentukan Kabupaten Pantura pada tanggal 25 Februari 2004. Di hari yang sama, Gubernur Provinsi Gorontalo menandatangani rekomendasi usulan tentang pembentukan Kabupaten Pantura di Provinsi Gorontalo kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dengan adanya dua rekomendasi dari lembaga legislatif dan eksekutif di Provinsi Gorontalo, dukungan politik terhadap aspirasi rakyat pantai utara Gorontalo untuk memekarkan diri telah sangat kuat, sehingga memudahkan tim KPK Pantura untuk menyampaikan aspirasi ke Pemerintah Pusat. Akhirnya pada tanggal 26 Februari 2004, Ketua Komite, Koordinator Dewan Kehormatan Komite, Prof. Dr. Nani Tuloli, membawa dan mengajukan proposal kelayakan pembentukan Kabupaten Pantura ke Komisi II DPR RI.

Sepekan setelah proposal kelayakan Pantura diajukan, tanggal 2 Maret 2004, Komisi II DPR RI meninjau calon wilayah pemekaran yang kemudian merespon

dan memberi dukungan positif, serta memberikan jaminan bahwa pembentukan Kabupaten Pantura tidak lebih 3 bulan. Dalam kunjungan tersebut, perwakilan dari lima kecamatan di wilayah Pantura menyampaikan aspirasinya. Seiring waktu berjalan, KPK tetap berusaha menghimpun dukungan politik dan penguatan dari partai-partai politik yang ada di Provinsi Gorontalo kepada fraksi-fraksi politik di DPR RI.

Pada tanggal 26 Juni 2004, KPK Pantura bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Gorontalo menerima kunjungan tim kerja dari Komisi II DPR RI untuk melihat langsung kesiapan calon pembentukan kabupaten pemekaran, seiring dengan berbagai upaya dan pendekatan yang dilakukan KPK, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Gorontalo kepada pemerintah pusat untuk mempercepat pembentukan daerah otonomi baru.

Setelah melalui sidang di DPR RI yang cukup panjang dan maraton pada tanggal 8 Desember 2006, tepat pada pukul 23:45 WITA, akhirnya perjuangan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara selama 40 tahun membuahkan hasil manis dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Saat itu KPK menggelar agenda MSMG “Menuju Senayan Menjemput Gorut” dengan memobilisasi lebih dari 100 orang dari berbagai elemen masyarakat untuk menghadiri momentum sakral pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. Dua buah spanduk KPK mencuri perhatian ribuan orang di DPR (termasuk pendukung 16 daerah lain yang disahkan di DPR-RI). Spanduk pertama, “di Nusantara II Gorontalo Utara dilahirkan, di Gorontalo Utara Nusantara Dibesarkan”. Spanduk kedua, “40 Tahun Impian Rakyat Gorontalo Utara Terwujud di Sini”.



Foto 2.1 Spanduk dukungan pemekaran dibentangkan di Senayan, Jakarta

Tidak berpuas diri dan tanpa menunggu lama, tanggal 26 Desember 2006, KPK Gorontalo Utara mengadakan Musyawarah Besar II (Mubes II) yang merupakan lanjutan dari Mubes I tahun 1966 yang berusaha menghimpun aspirasi, gagasan, dan kehendak rakyat tentang arah pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.



Foto 2.2 Musyawarah Besar II untuk menghimpun aspirasi rakyat pasca pemekaran

Pada tanggal 14 Februari 2007, KPK Gorontalo Utara melaksanakan dialog interaktif yang mengusung tema “Menegaskan Kembali Cita-cita Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Sekaligus Penguatan Komitmen untuk Mewujudkannya”, disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia, bertempat di kediaman salah satu tokoh pemekaran kabupaten, (alm.) Husain Udit.

Rentang waktu 5 Februari hingga 26 April 2007, KPK Gorontalo Utara melaksanakan tiga agenda yakni mempresentasikan dan menyerahkan “Resolusi Pantura” kepada Bupati Kabupaten Gorontalo, calon Penjabat Bupati

Gorontalo Utara, DPRD Provinsi Gorontalo, dan pejabat dari Kementerian Dalam Negeri. Agenda lainnya yakni dialog bertemakan prospek dan strategi pengembangan ekonomi bersama H. Suharso Monoarfa, dan Pemerintah Daerah mempersiapkan peresmian Penjabat Bupati Gorontalo Utara.

Akhirnya pada tanggal 26 April 2007, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara mempersiapkan peresmian sekaligus pelantikan Penjabat Bupati Gorontalo Utara, Drs. H. Hamdan Datungsolang. Menteri Dalam Negeri ad interim, Widodo AS, kemudian meresmikan pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo dan melantik Penjabat Bupati Gorontalo Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007.



Foto 2.3 Peresmian pembentukan Gorontalo Utara dan pelantikan Penjabat Bupati oleh Mendagri ad interim

2.1.2 Aspek Geografis

2.1.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten terbungsu di Provinsi Gorontalo, saat ini terdiri atas 11 kecamatan dan 123 desa. Sudah banyak berkembang dibanding saat berdiri di tahun 2007 yang hanya terdapat 5 kecamatan dan 56 desa. Luas wilayahnya mencapai 1.777,022 Kilometer^2 atau setara 15,79 persen dari luas wilayah Provinsi Gorontalo. Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022, luas wilayah Gorontalo Utara seluas 1.703,628 Km^2.

Secara geografis Kabupaten Gorontalo Utara terletak pada 00º41’23” – 1º07’55”LU dan 121º58‘59” – 123º16‘29“BT. Lebih dari 75 persen wilayahnya

merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai mencapai 317,39 kilometer (menurut Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, garis pantai di bagian utara Provinsi Gorontalo mencapai 331,2 Kilometer). Perairan di daerah ini termasuk dalam perairan Laut Sulawesi yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik, serta termasuk dalam Wilayah Pengembangan Perikanan (WPP) 716. Tabel 2.1 menyajikan luas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dirinci menurut kecamatan, luas kecamatan, dan jumlah desa di setiap kecamatan.

Tabel 2.1
Kecamatan yang Dirinci Menurut Luas Wilayah dan Jumlah Desa

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas Wilayah (Km^2)	Persentase Luas (%)	Jumlah Desa
1	Atinggola	Kota Jin	40	264,55	14,89	14
2	Gentuma Raya	Gentuma	27	100,34	5,65	11
3	Tomilito	Dambalo	15	99,31	5,59	10
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	23	7,84	0,44	4
5	Kwandang	Titidu	11	190,75	10,73	18
6	Anggrek	Ilangata	15	141,51	7,96	15
7	Monano	Mokonowu	33	144,02	8,10	10
8	Sumalata Timur	Buladu	55	197,55	11,12	10
9	Sumalata	Bulontio Barat	71	305,59	17,20	11
10	Biau	Biau	112	111,69	6,29	10
11	Tolinggula	Tolinggula Tengah	122	213,89	12,04	10
Jumlah				**1.777,022**	**100,00**	**123**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Kabupaten Gorontalo Utara dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo. Wilayahnya terdiri dari daratan yang sebagian besarnya adalah wilayah perbukitan rendah, dan dataran tinggi yang mencapai 0 – 2.000 Meter di atas permukaan laut serta didominasi oleh kemiringan 15 persen – 45 persen (komposisinya 50 persen-60 persen).

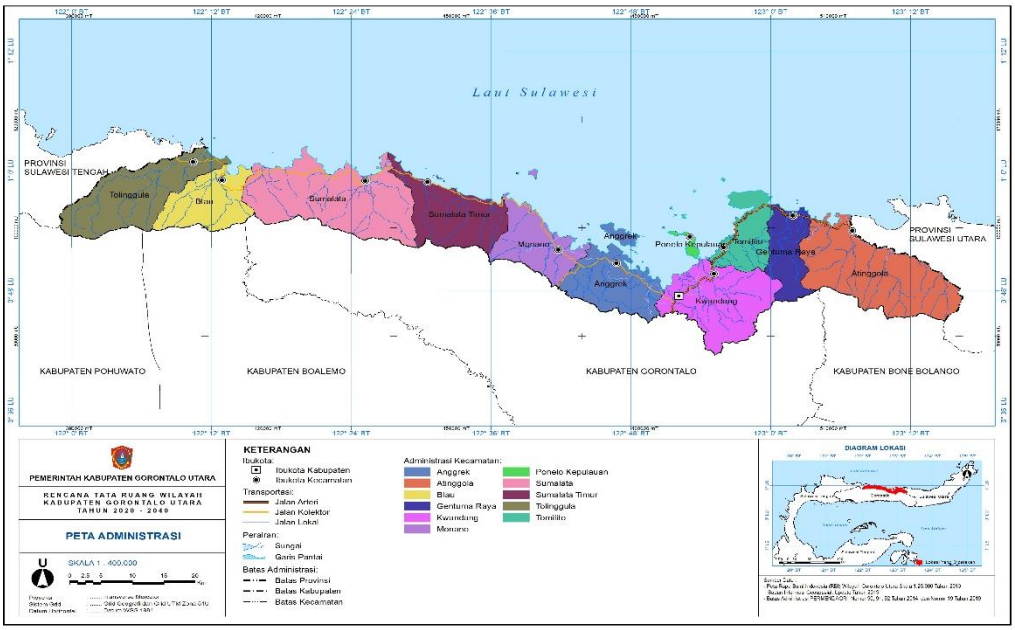
Kabupaten Gorontalo Utara memanjang horizontal di bagian utara Provinsi Gorontalo, sepanjang jalur Trans-Sulawesi bagian utara, yang menghubungkan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara dengan Kabupaten Buol di Provinsi Sulawesi Tengah, terletak pada 386.732 mT – 530.446 mT dan 74.367 mU – 115.085 mU (zone UTM 51 North).

Secara geografis, letak Kabupaten Gorontalo Utara memiliki batas-batas administratif dengan beberapa wilayah lainnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Sulawesi
- Sebelah barat : Kabupaten Buol
- Sebelah selatan : Kabupaten Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, Bonebolango
- Sebelah timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Peta dan batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Peta dan Batas Administrasi Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Lebih dari 75 persen wilayah Kabupaten Gorontalo Utara merupakan wilayah pesisir, dengan garis pantai umumnya mencapai 100 Meter dari daratan, yang panjangnya bervariasi berkisar antara 2,5 sampai 25 Kilometer. Daerah-daerah yang memiliki garis pantai jauh masuk ke daratan adalah sekitar Teluk Paleleh ±9 Kilometer, Teluk Bulontio ±8 Kilometer, dan Teluk Kwandang ±25 Kilometer, yang pada umumnya dibentuk oleh batuan karang (coral). Daerah daratan dengan ketinggian sampai ±100 Meter mempunyai jarak terjauh berkisar antara 250 hingga 500 Meter.

Sebagai daerah pesisir, di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat banyak pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak, sejumlah 55 pulau yang mencapai 43

persen dari seluruh pulau yang ada di Provinsi Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022.

Tabel 2.2
Nama Pulau dan Koordinat

No.	Nama Pulau	Koordinat	Status
1	Pulau Batumandi	00°54'42.55" U 122°44'16.40" T	Tidak berpenghuni
2	Pulau Batumandi	00°57'57.21" U 122°56'51.68" T	Tidak berpenghuni
3	Pulau Batusungo Oluwo	00°58'32.66" U 122°56'38.36" T	Tidak berpenghuni
4	Pulau Batusungo Otolu	00°58'23.07" U 122°56'52.31" T	Tidak berpenghuni
5	Pulau Bibinanga	00°51'11.24" U 122°53'37.05" T	Tidak berpenghuni
6	Pulau Bogisa	00°56'16.28" U 122°51'27.41" T	Tidak berpenghuni
7	Pulau Bohu	00°54'35.07" U 122°44'21.58" T	Tidak berpenghuni
8	Pulau Bolas	00°55'24.80" U 123°04'49.49" T	Berpenghuni
9	Pulau Botubotuo	00°52'23.90" U 122°48'31.21" T	Tidak berpenghuni
10	Pulau Botubotuwo	00°50'51.03" U 122°48'59.87" T	Tidak berpenghuni
11	Pulau Botubotuwo Kiki	00°50'55.75" U 122°48'57.27" T	Tidak berpenghuni
12	Pulau Botudidingga	00°58'17.76" U 122°33'07.01" T	Tidak berpenghuni
13	Pulau Botuduyonumo	00°59'13.87" U 122°31'51.95" T	Tidak berpenghuni
14	Pulau Botulobuntho Da'A	00°57'41.59" U 122°37'02.35" T	Tidak berpenghuni
15	Pulau Botulobuntho Kiki	00°56'56.31" U 122°36'28.73" T	Tidak berpenghuni
16	Pulau Botungalaa	00°59'31.29" U 122°31'06.60" T	Tidak berpenghuni
17	Pulau Botungalaa Da'A	01°01'12.42" U 122°26'19.27" T	Tidak berpenghuni
18	Pulau Botungobungo	00°55'25.65" U 122°44'14.43" T	Tidak berpenghuni
19	Pulau Botutotolu	00°53'33.82" U 122°42'35.26" T	Tidak berpenghuni
20	Pulau Botuwopato	00°53'12.72" U 122°44'06.96" T	Tidak berpenghuni
21	Pulau Buloila	01°01'47.09" U 122°17'16.11" T	Tidak berpenghuni
22	Pulau Dokokayu Da'A	00°57'00.46" U 123°02'16.87" T	Tidak berpenghuni
23	Pulau Dokokayu Kiki	00°56'41.91" U 123°02'16.64" T	Tidak berpenghuni
24	Pulau Dudepo	00°52'27.99" U 122°47'56.00" T	Berpenghuni
25	Pulau Dudepo Kiki	00°53'31.99" U 122°47'06.00" T	Berpenghuni
26	Pulau Diyonumo	00°59'17.61" U 122°31'26.02" T	Berpenghuni
27	Pulau Hokimu	00°51'20.30" U 122°53'55.13" T	Tidak berpenghuni
28	Pulau Huha	00°59'06.17" U 122°55'56.00" T	Tidak berpenghuni
29	Pulau Hulawa	01°00'12.77" U 122°30'23.16" T	Berpenghuni
30	Pulau Hulawa	00°57'54.08" U 122°53'26.90" T	Tidak berpenghuni
31	Pulau Hulawa Kiki	00°58'00.15" U 122°53'21.99" T	Tidak berpenghuni
32	Pulau Huliyahu Bunggu	00°57'23.20" U 122°56'16.12" T	Tidak berpenghuni
33	Pulau Huliyahu Da'A	00°57'12.20" U 122°56'20.51" T	Tidak berpenghuni
34	Pulau Hutakalo	01°00'18.59" U 122°26'16.75" T	Tidak berpenghuni
35	Pulau Kaposo	00°53'23.83" U 122°49'04.62" T	Tidak berpenghuni
36	Pulau Kaposo Kiki	00°53'30.57" U 122°48'55.19" T	Tidak berpenghuni
37	Pulau Karangbogisa	00°56'11.36" U 122°51'41.12" T	Tidak berpenghuni
38	Pulau Katialada	00°51'21.31" U 122°54'24.78" T	Tidak berpenghuni
39	Pulau Limuyudu	00°52'55.47" U 122°43'09.81" T	Tidak berpenghuni
40	Pulau Lumboso Da'A	00°51'46.14" U 122°48'26.16" T	Tidak berpenghuni
41	Pulau Lumboso Kiki	00°52'05.00" U 122°47'58.56" T	Tidak berpenghuni
42	Pulau Mohinggito	00°55'25.38" U 122°52'32.63" T	Berpenghuni
43	Pulau Mongaila	00°53'02.00" U 122°44'27.54" T	Tidak berpenghuni
44	Pulau Motuo	00°59'46.75" U 122°39'37.73" T	Tidak berpenghuni
45	Pulau Otilade	00°54'16.24" U 122°50'49.28" T	Berpenghuni
46	Pulau Otiola Da'A	00°51'33.72" U 122°52'51.79" T	Tidak berpenghuni
47	Pulau Otiola Kiki	00°52'14.22" U 122°52'38.28" T	Tidak berpenghuni
48	Pulau Palowa	00°55'25.63" U 122°51'40.78" T	Tidak berpenghuni
49	Pulau Ponelo	00°52'13.88" U 122°53'11.45" T	Berpenghuni
50	Pulau Popaya	00°59'45.51" U 122°38'13.24" T	Tidak berpenghuni
51	Pulau Saronde	00°55'33.00" U 122°51'52.79" T	Tidak berpenghuni
52	Pulau Tinggolodu	01°00'54.26" U 122°23'33.41" T	Tidak berpenghuni
53	Pulau Tolinggula	01°03'14.40" U 122°12'17.08" T	Tidak berpenghuni
54	Pulau Huliahu Da'A	00°53'58.99" U 122°55'41.99" T	Tidak berpenghuni
55	Pulau Batusungo Tuwawu	00°58'58.79" U 122°56'23.83" T	Tidak berpenghuni
Jumlah pulau Gorontalo Utara		**55**	
Jumlah pulau Provinsi Gorontalo		**127**	

Sumber: Gazeter Nasional Tahun 2021, dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

2.1.2.2 Topografi Daerah

Topografi Kabupaten Gorontalo Utara dianalisis dari aspek ketinggian dan kemiringan lahan. Kontur wilayah didominasi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan, meski tidak terdapat gunung api. Daerah berkontur pegunungan sebagian besar terletak di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, Tolinggula, dan Atinggola, sehingga pengembangan wilayah terbatas. Dari 11 kecamatan yang ada, kecamatan yang memiliki wilayah datar yang cukup luas di Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Tolinggula. Dataran rendah yang memiliki sumberdaya air yang cukup kemudian dimanfaatkan petani sebagai areal persawahan.

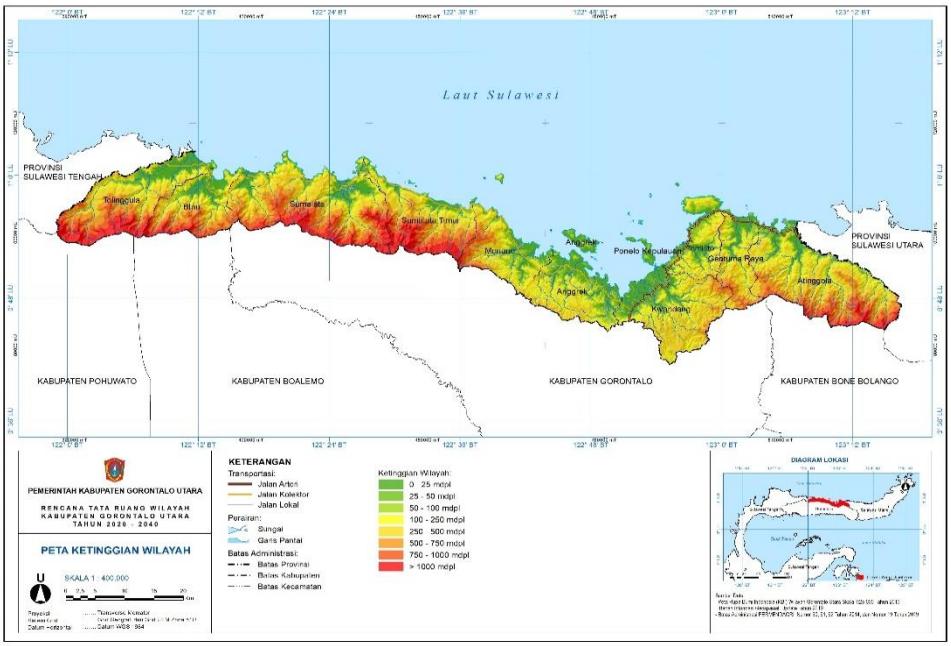
Ketinggian tanah bervariasi dari 0 sampai dengan 2.061 Meter dari permukaan laut. Adapun dataran tertinggi terletak di Kecamatan Sumalata Timur, sedangkan terendah di Kecamatan Ponelo dengan elevasi tertinggi 109 Meter seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Tinggi Wilayah dan Koordinat Kecamatan

Kecamatan	Tinggi DPL (Meter)	Ketinggian Kantor Camat (Meter)	Koordinat	
			LU (^{0})	BT (^{0})
Atinggola	0-1.794	9	0º51’43.414”	123°09’8.822”
Gentuma Raya	0-1.001	8	0º51’56.455”	123°01’34.939”
Kwandang	0-910	16	0º47’20.613”	122°54’58.675”
Tomilito	0-698	66	0º54’5.653”	122°57’41.871”
Ponelo Kepulauan	0-109	13	0º53’46.127”	122°52’38.626”
Anggrek	0-613	17	0º49’24.624”	122°46’24.895”
Monano	0-1.299	12	0º53’30.900”	122°39’59.802”
Sumalata	0-1.822	5	0º57’16.935”	122°22’20.898”
Sumalata Timur	0-2.061	8	0º56’11.842”	122°32’29.766”
Tolinggula	0-2.001	6	0º57’39.687”	122°5’54.830”
Biau	0-1.900	8	0º57’4.130”	122°11’31.192”

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang (BPN), 2022

Gambar 2.2
Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

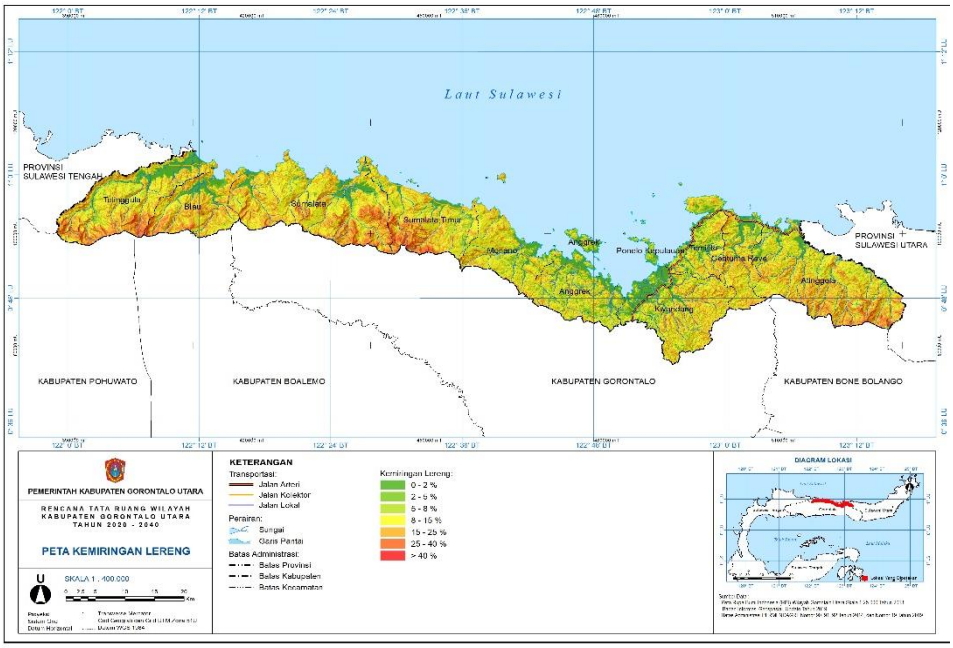
Kemiringan lereng Kabupaten Gorontalo Utara diklasifikasikan dalam 5 kelas yang diperoleh dari hasil analisis Citra DEM STRM. Hasil pemetaan lereng tersebut diolah dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis, dengan kondisi kelerengan disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Luasan Kemiringan Lereng

No.	Kemiringan Lereng		Luas (Ha)	Persentase (%)
1	<8%	Datar	17.965,62	10,45
2	8-15%	Landai	16.033,63	9,33
3	15-30%	Sedang	35.449,33	20,63
4	30-45%	Curam	63.069,30	36,70
5	>45%	Sangat Curam	39.334,01	22,89
Jumlah			**171.851,90**	**100**

Sumber: Analisis Peta Lereng pada KLHS RPJPD Gorontalo Utara 2025-2045

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

2.1.2.3 Klimatologi

Dalam hal musim, seperti daerah lain di Indonesia pada umumnya, musim di Provinsi Gorontalo hanya 2, yakni hujan dan kemarau. Dengan posisi yang spesifik, cuaca kawasan dipengaruhi oleh angin darat dan laut yang bertiup bergantian siang dan malam. Iklim termasuk dalam tipe C dengan jumlah curah hujan rata-rata 2.267 Mm^3/tahun, temperatur udara bervariasi antara 21,0° – 34,4°C dengan rata-rata suhu terendah di bulan Februari, dan rata-rata temperatur tertinggi di bulan Desember, sedangkan rata-rata tahunan mencapai 26,93°C. Kelembaban udara relatif tinggi, tercatat rata-rata sebesar 84,83 persen.

Tabel 2.5
Jumlah Curah Hujan, Kelembaban, dan Temperatur Udara Menurut Bulan Tahun 2022

Bulan	Jumlah Curah Hujan (Mm³)	Rata-Rata Kelembaban Udara (%)	Rata-Rata Temperatur Udara (°C)
Januari	111	84	26,7
Februari	241	86	26,1
Maret	290	85	26,7
April	101	84	27,2
Mei	174	86	27,0
Juni	151	86	26,4
Juli	238	86	26,3
Agustus	178	86	26,2
September	155	85	26,2
Oktober	215	83	26,9
November	89	85	26,8
Desember	138	82	30,6

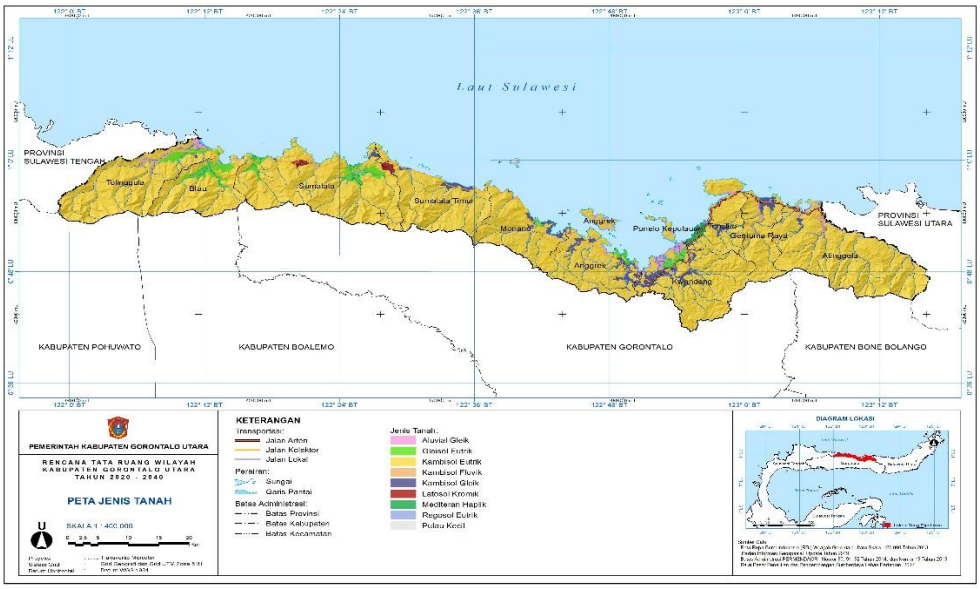
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Karakteristik curah hujan sangat mempengaruhi ketersediaan air baku terutama untuk kepentingan pengairan lahan pertanian. Namun perlu diwaspadai juga bahwa pada bulan puncak curah hujan tinggi, kerentanan risiko terhadap bencana longsor, banjir, dan gerakan tanah juga meningkat.

2.1.2.4 Kondisi Tanah

Berdasarkan peta jenis tanah, terdapat beberapa jenis tanah: aluvial, gleisol, kambisol, latosol, mediteran haplik, dan regosol.

Gambar 2.4
Peta Jenis Tanah Kabupaten Gorontalo Utara

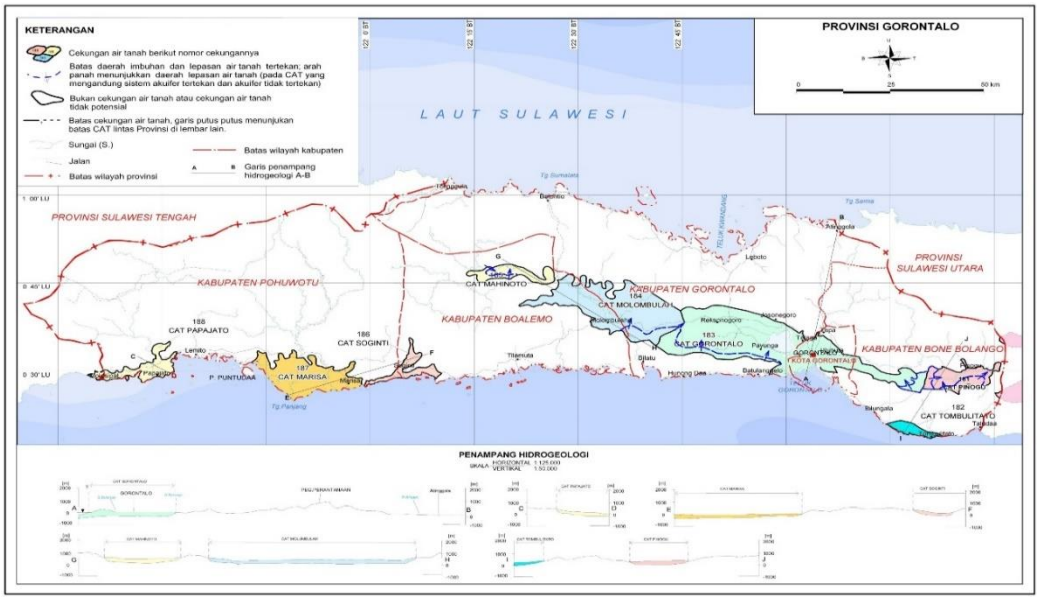


Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

2.1.2.5 Hidrologi

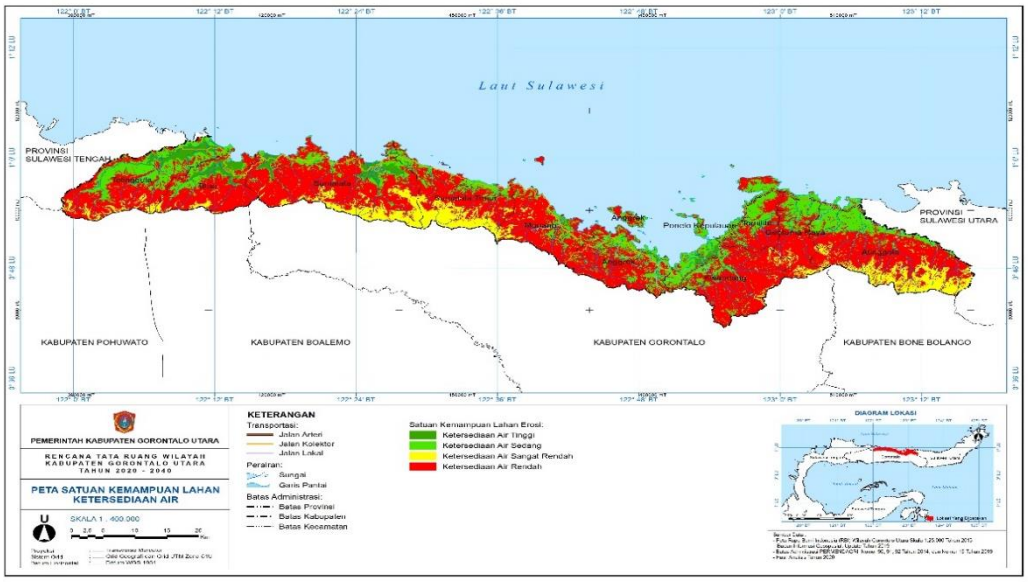
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah (CAT), wilayah Gorontalo Utara tidak termasuk dalam CAT manapun di wilayah Provinsi Gorontalo maupun provinsi tetangganya sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Hal demikian salah satu yang mengakibatkan sebagian besar wilayah Gorontalo Utara memiliki ketersediaan air yang rendah, sebagaimana Gambar 2.5.

Gambar 2.5
Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Gorontalo



Sumber: Pamsimas, 2022

Gambar 2.6
Peta Ketersediaan Air Tanah Gorontalo Utara

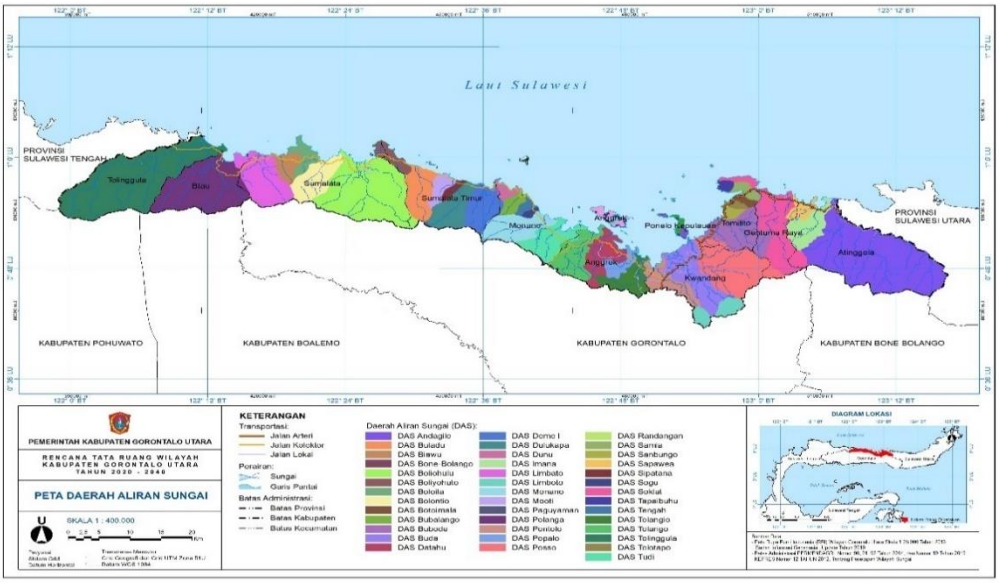


Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Dalam penyediaan kebutuhan air dan pengairan, beberapa sumber air permukaan digunakan penduduk Gorontalo Utara, berasal dari beberapa sungai besar dan kecil yang dimanfaatkan masyarakat sebagai *provider* sumber air dan energi. Sumber air untuk keperluan penduduk sehari-hari masih memanfaatkan potensi alami tersebut karena belum terjangkau seluruhnya oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM) Gorontalo Utara. Adapun jaringan perpipaan hanya terdapat di beberapa tempat yang dekat dengan sumber air sehingga sebagian besar masih menggunakan air tanah dangkal dan sumur.

Sedangkan wilayah sungai yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam Wilayah Sungai Limboto-Bone Bolango, yang secara total terdiri dari 75 Daerah Aliran Sungai/DAS. DAS yang ada di Gorontalo Utara berdasarkan dokumen Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031, ditunjukkan pada Gambar 2.7 berikut.

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai di Gorontalo Utara



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Sedangkan DAS di wilayah Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, ditunjukkan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
DAS di Gorontalo Utara
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 4/PRT.M/2015 dan Luasannya

No.	Nama DAS	Luasan (Km^2)
1	DAS Tolinggula	204,2
2	DAS Polanga	121,44
3	DAS Limbato	67,31
4	DAS Biawu	18,81
5	DAS Buloila	18,22
6	DAS Bulontio	41,64
7	DAS Buliohulu	151,62
8	DAS Boliyohuto	16,67
9	DAS Baladu	40,15
10	DAS Mooti	15,4
11	DAS Sipatana	7,67
12	DAS Dulukapa	39,11
13	DAS Deme I	41,3
14	DAS Dunu	6,71
15	DAS Bubalango	12,88
16	DAS Tengah	6,08
17	DAS Sogu	3,28
18	DAS Monano	47,64
19	DAS Tudi	43,68
20	DAS Tolango	43,16
21	DAS Datahu	41,27
22	DAS Popalo	15,37
23	DAS Tolangio	42,33
24	DAS Pontolo	37,81
25	DAS Buda	62,57
26	DAS Posso	95,74
27	DAS Bubode	59,9
28	DAS Sanbungo	6,09
29	DAS Tolotapo	5,08
30	DAS Butoimola	4,69
31	DAS Samia	10,9
32	DAS Tapa-Ibuhu	5,58
33	DAS Soklat	85,45
34	DAS Sapawea	12,71
35	DAS Imana	37,17
Total Luas Wilayah DAS		**1.469,63**

Sumber: https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/data/daerah-aliran-sungai/

2.1.2.6 Geologi

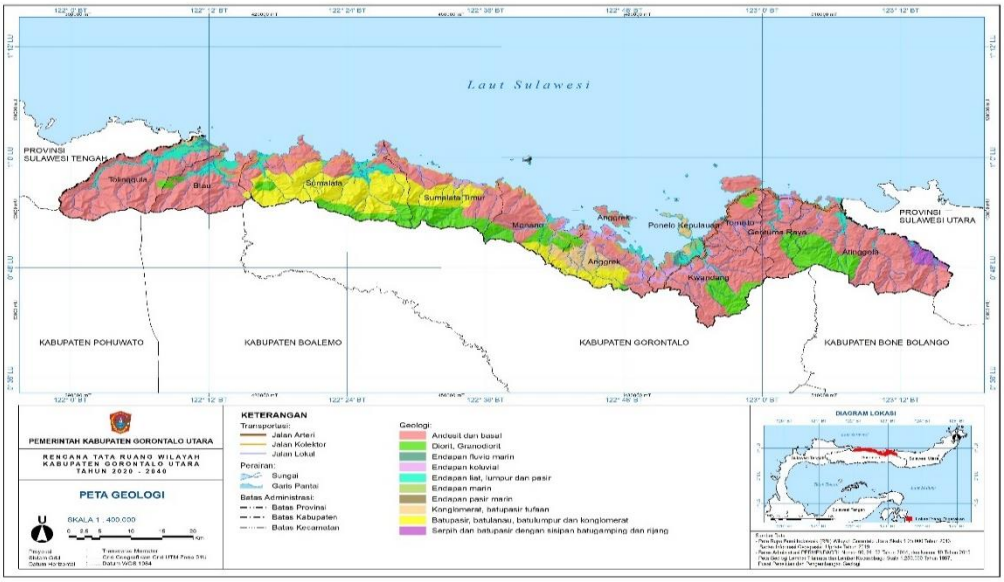
Formasi batuan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas beberapa formasi: Qal, TQls, TQpv, Tets, Tmb, Tmbo, Tmbv, Tmd, dan Tpwv, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Formasi Batuan Gorontalo Utara

No.	Formasi	Batuan	Luas (Ha)
1	Qal: Aluvium dan endapan pantai	Qal: Pasir, lempung, lumpur, kerikil, dan kerakal	3.005,90
2	TQls: Formasi Lokodidi	TQls: Konglomerat, batu pasir, batu pasir konglomeratan, batu pasir, tufan, tuf, dan batulempung	5.382,69
3	TQpv: Batu Gunungapi Pinogu	TQpv: Tuf, tuf lapili, breksi, dan lava	5.445,88
4	Tets: Formasi Tinombo Fasies Sedimen	Tets: Serpih dan batu pasir dengan sisipan batu gamping dan rijang, serpih kelabu dan merah, getas	1.703,42
5	Tmb: Diorit Bone	Tmb: Diorit, diorit kuarsa, granodiorit, dan adamelit	10.428,10
6	Tmbo: Diorit Boliohuto	Tmbo: Diorit dan granodiorit	14.724,17
7	Tmbv: Batuan Gunung Api Bilungala	Tmbv: Breksi, tuf, dan lava andesit sampai basal	40.254,76
8	Tmd: Formasi Dolokapa	Tmd: Batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuf lapili, dan aglomerat	27.075,49
9	Tpwv: Breksi Wubudu	Tpwv: Breksi gunung api, aglomerat, tuf, tuf lapili, dan lava	63.708,57

Sumber: Analisis Peta Geologi, Bachri, *et al*, (1985) pada KLHS RPJPD Gorontalo Utara 2025-2045

Gambar 2.8
Peta Geologi Gorontalo Utara



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

2.1.2.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan yang paling luas di wilayah Gorontalo Utara adalah berupa hutan yang mencapai 55,75 persen dari luas keseluruhan penggunaan lahan. Proporsi luas hutan ini dapat dibedakan atas hutan lebat sebesar 49,96 persen, hutan belukar sebesar 4,29 persen dan hutan sejenis sebesar 1,49 persen. Hutan paling banyak dijumpai di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, dan Atinggola.

Pertanian lahan kering (perkebunan, kebun campuran, dan ladang) menempati 22,7 persen dari luas keseluruhan penggunaan lahan. Pertanian lahan kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Sebagian besar sistem pertanaman dalam bentuk campuran. Di wilayah perencanaan, sebagian areal pertanian lahan kering ditelantarkan sehingga banyak ditumbuhi semak. Tegalan banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Anggrek dan Sumalata. Komoditas lahan kering yang paling banyak dibudidayakan adalah jagung, yang merupakan komoditas unggulan di Provinsi Gorontalo saat ini.

Semak belukar banyak dijumpai di wilayah Kecamatan Sumalata, Kwandang, dan Anggrek. Semak belukar merupakan areal pertanian lahan kering yang telah lama tidak diolah sehingga ditumbuhi semak belukar, atau sering juga ditemui semak belukar dibiarkan tumbuh bersama tanaman buah-buahan atau tanaman perkebunan seperti kelapa. Sebagian semak/belukar menempati bekas areal penghijauan yang pernah terbakar. Penggunaan lahan semak belukar di wilayah penggunaan lahan menempati lahan sekitar 10,73 persen dari keseluruhan wilayah penggunaan lahan.

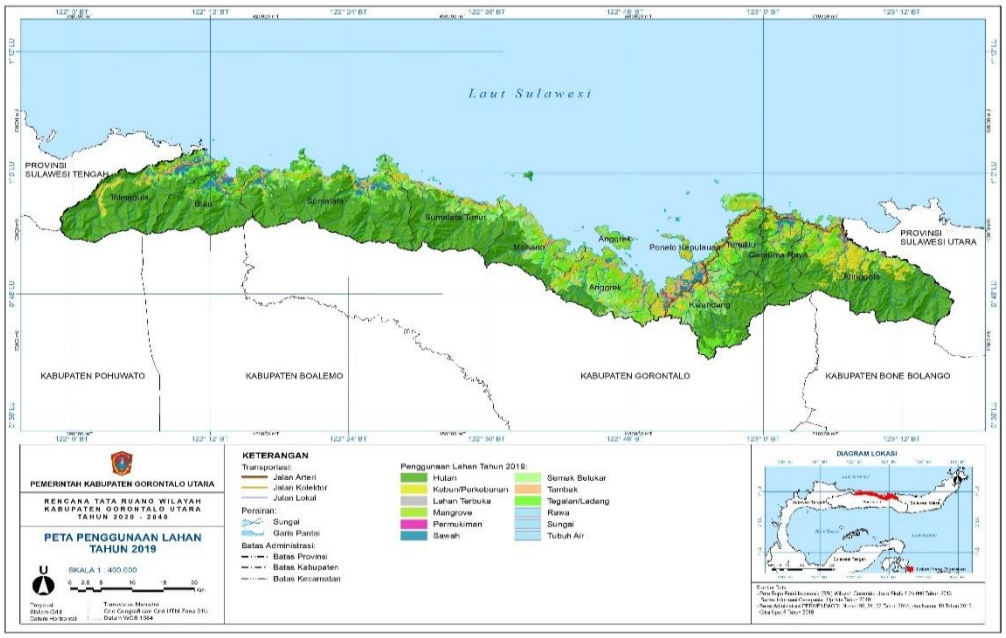
Perkebunan di wilayah perencanaan menempati areal sekitar 1,19 persen dari luas wilayah penggunaan lahan. Perkebunan tersebar hampir di semua wilayah kecamatan, terutama di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Sumalata, dan Atinggola. Hutan mangrove dapat dijumpai di wilayah Kecamatan Anggrek, Kwandang, Tolinggula, dan Atinggola. Luas penggunaan lahan ini sekitar 1,45 persen dari luas keseluruhan wilayah penggunaan lahan. Sementara permukiman tersebar di sepanjang jalur jalan utama, namun tidak teridentifikasi dengan baik pada citra Landsat ETM+ karena luas lahan terbangun yang relatif sempit. Rincian penggunaan lahan wilayah Gorontalo Utara ditampilkan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8
Luas Penutup/Penggunaan Lahan

Penutup/Penggunaan Lahan	Luas Total (Ha)	Persentase (%)
Hutan lebat	89.006,44	49,964
Alang-alang	428,14	0,240
Hutan belukar	7.653,98	4,297
Hutan sejenis	2.657,28	1,492
Kebun campuran	5.505,98	3,091
Permukiman	771,56	0,433
Perkebunan	2.122,52	1,191
Sawah 1 x padi/tahun	964,80	0,542
Sawah 2 x padi/tahun	10.271,24	5,766
Semak belukar	19.177,20	10,732
Tanah terbuka sementara	549,19	0,308
Tegalan/ladang	32.765,93	18,393
Mangrove	2.587,5	1,453
Padang lamun	4,54	0,003
Terumbu karang	3.294,72	1,850
Tambak	438,82	0,246
Luas	**178.139,84**	**100,00**

Sumber: Hasil *overlay* digitasi SPOT 5 Tahun 2014 dengan RTRW Gorontalo Utara dalam Dokumen Renstra Pesisir Tahun 2015

Gambar 2.9
Peta Penggunaan Lahan Tahun 2019



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Berdasarkan penggunaannya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan budidaya, strategis, dan lindung. Berikut adalah uraian untuk masing-masing kawasan.

- **Kawasan Budidaya**

  Kawasan budidaya dapat diartikan sebagai wilayah yang dapat dibudidayakan dan difungsikan untuk kepentingan pembangunan dalam

bentuk kegiatan usaha berbagai sektor atau sub sektor pembangunan terkait. Penetapan kawasan budidaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kriteria, yaitu kriteria sektoral dan kriteria ruang. Kriteria teknis sektoral kawasan budidaya adalah suatu kegiatan dalam kawasan yang memenuhi ketentuan-ketentuan teknis seperti daya dukung, kesesuaian lahan, bebas bencana, dan lain-lain. Sedangkan kriteria ruang kawasan budidaya menentukan pemanfaatan ruang kegiatan budidaya yang menghasilkan nilai sinergi terbesar untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak bertentangan dengan kelestarian lingkungan.

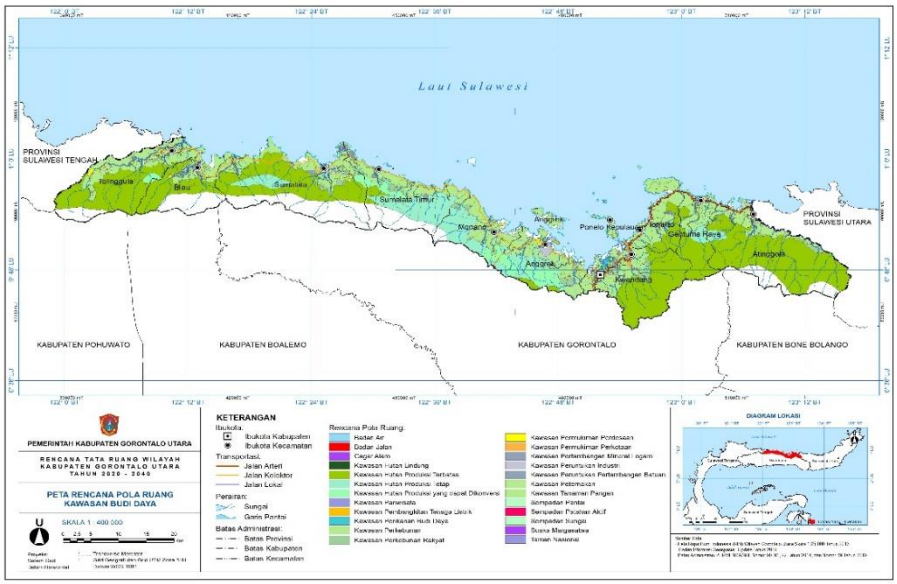
Kawasan budidaya di Kabupaten Gorontalo Utara terbagi atas beberapa kawasan dengan detail luasan diinformasikan pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

No.	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	Komposisi (%)
1	Kawasan hutan produksi terbatas	66.288,67	47,68
2	Kawasan hutan produksi tetap	15.065,04	10,84
3	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	5.564,08	4,00
4	Kawasan pariwisata	106,09	0,08
5	Kawasan pembangkitan tenaga listrik	57,96	0,04
6	Kawasan perikanan budidaya	359,99	0,26
7	Kawasan perkebunan	43.474,96	31,27
8	Kawasan perkebunan rakyat	2.728,26	1,96
9	Kawasan permukiman perdesaan	2.023,96	1,46
10	Kawasan permukiman perkotaan	869,85	0,63
11	Kawasan pertambangan mineral logam	66,39	0,05
12	Kawasan peruntukan industri	510,11	0,37
13	Kawasan peruntukan pertambangan batuan	634,32	0,46
14	Kawasan peternakan	716,56	0,52
15	Sempadan patahan aktif	26,67	0,02
Luas Wilayah Budidaya		**139.032,91**	**100**

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020

Gambar 2.10
Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

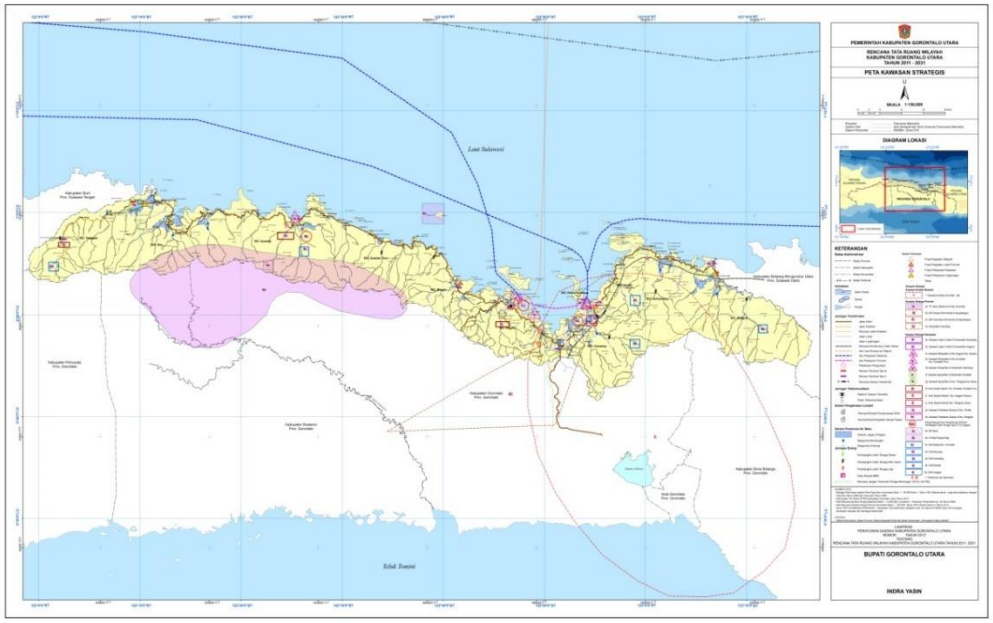


Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

- **Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)**

  Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten (KSK) merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, sumber daya alam, teknologi tinggi, dan Hankam. Provinsi Gorontalo menunjuk beberapa kawasan di Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi untuk dikembangkan dan memiliki nilai strategis pertumbuhan ekonomi: Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pariwisata Minanga, KSP terintegrasi Pelabuhan Anggrek yang terdiri dari kawasan peti kemas, dan Pergudangan Anggrek. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ditinjau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan meliputi seluruh kawasan perbatasan negara di wilayah Gorontalo Utara, sudut kepentingan ekonomi yang secara bersama disokong oleh kawasan Gorontalo-Paguyaman-Kwandang. Serta beberapa lokasi menjadi Pusat Kegiatan Strategis Nasional (Kwandang dan Anggrek), Pusat Kegiatan Wilayah (Kwandang), Pusat Kegiatan Lokal (Atinggola, dan Tolinggula). Untuk KSK Kabupaten, penentuannya lebih bersifat indikatif yang ditunjukkan pada Gambar 2.11.

Gambar 2.11
Kawasan Strategis Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031

- **Kawasan Lindung**

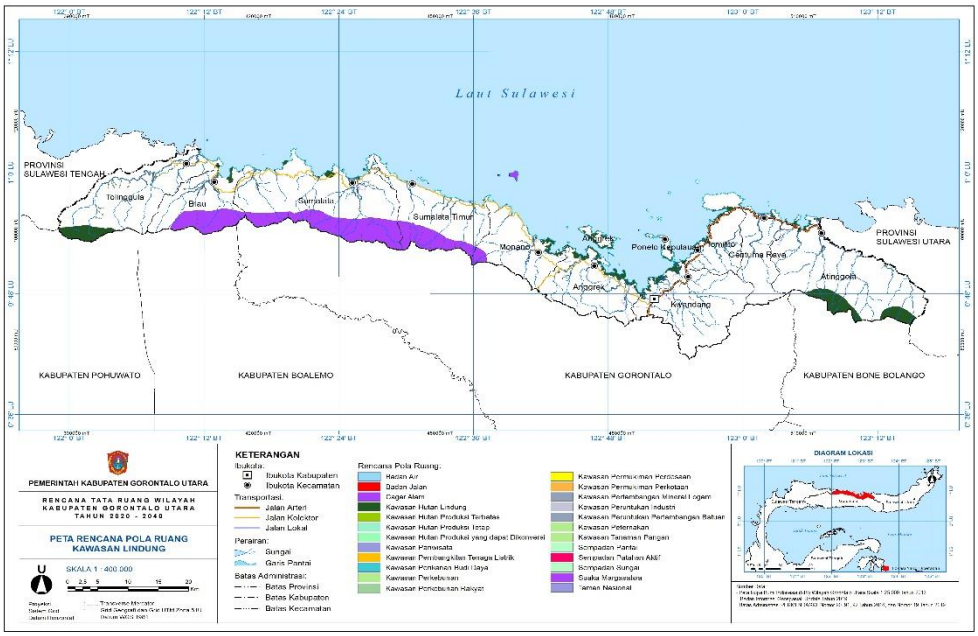
  Kawasan lindung didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah, serta budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung, yang ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup melalui keterpaduan pemanfaatan sumberdaya alam secara optimal dengan upaya pelestariannya. Dengan demikian diharapkan penetapan alokasi peruntukan ruang dalam rangka pengembangan wilayah sesuai dengan kemampuan, daya dukung, dan daya tampung wilayah. Peruntukan kawasan lindung pada rencana pola ruang Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10
Luasan Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Lindung

No.	Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Komposisi (%)
1	Cagar alam	151	0,51
2	Kawasan hutan lindung	8.717	29,58
3	Sempadan pantai	1.512	5,13
4	Sempadan sungai	3.015	10,23
5	Suaka margasatwa	16.057	54,50
6	Taman nasional	14	0,05
Luas		**29.465**	**100**

Sumber: Laporan Akhir Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020

Gambar 2.12
Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Sedangkan luasan kawasan hutan yang masuk kawasan budidaya dan lindung berdasarkan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) IV Gorontalo Utara dijabarkan per kecamatan pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Gorontalo Utara (Ha)

Kawasan Hutan	Anggrek	Atinggola	Biau	Gentuma Raya	Kwandang	Monano	Ponelo Kep.	Sumalata	Sumalata Timur	Tolinggula	Tomilito	Total
APL	7.880,88	4.478,1	3.014,45	3.654,11	8.084,99	5.873,43	617,38	7.798,55	4.922,59	7.491,15	6.650,16	**60.465,79**
CA						153,47			0,66			**154,13**
HL	872,36	3.219,28	195,83	59,2	547,46	403,14	119,07	227,85		1.838,19	412,01	**7.894,39**
HP	2.422,68	158,28		1.351,26		4.452,55		1.751,92	5.403,37			**15.540,06**
HPK	2.952,01		56,4			733,38		333,53	1.084,36	394,34		**5.554,02**
HPT	605,89	17.623,11	5.409,3	6.227,27	9.147,92			11.673,85	684,03	10.496,57	2.458,27	**64.326,21**
SM			3.767			551,11		8.031,95	3.665,64			**16.015,7**
TN		38,1										**38,1**
Total	**14.733,82**	**25.516,87**	**12.442,98**	**11.291,84**	**17.780,37**	**12.167,08**	**736,45**	**29.817,65**	**15.760,65**	**20.220,25**	**9.520,44**	**169.988,4**

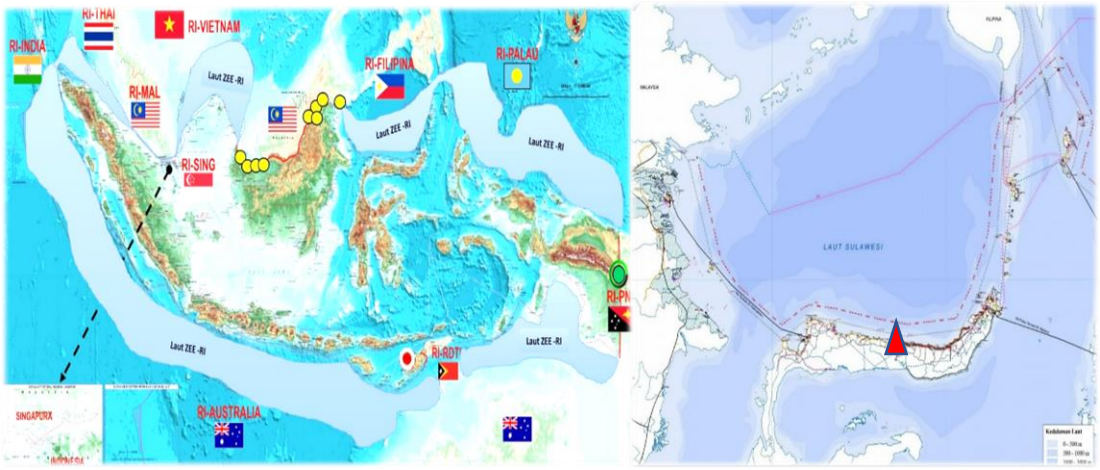
Sumber: KPH Unit IV Gorontalo Utara, 2021
*Catatan:

- APL : Areal Penggunaan Lain
- CA : Cagar Alam
- HL : Hutan Lindung
- HP : Hutan Produksi
- HPK : Kesatuan Pengelolaan Hutan
- HPT : Hutan Produksi Terbatas
- SM : Suaka Margasatwa
- TN : Taman Nasional

2.1.2.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara tidak terlepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya yang direncanakan secara integral dengan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Junto Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dilaksanakan oleh Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara, serta RTRW Kabupaten Gorontalo Utara dan RTRW Provinsi Gorontalo. Berdasarkan aturan di atas, Gorontalo Utara, khususnya Kecamatan Kwandang menjadi Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN). PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengolahan komoditas lokal dengan orientasi pasar ke dalam dan ke luar, yang membutuhkan penataan ruang dimaksudkan untuk menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia; kawasan fungsi lindung yang lestari, serta kawasan budidaya yang mandiri dan berdaya saing, sehingga perlu didukung dengan pengembangan prasarana dan sarana dasar (pemenuhan standar pelayanan minimum sosial dasar sektor kesehatan dan pendidikan), pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi yang mendukung kedaulatan dan keutuhan batas wilayah negara.

Gambar 2.13
Gorontalo Utara sebagai Kawasan Strategis Perbatasan Negara



Sumber: Analisa Bapppeda, 2023

Dengan dibangunnya Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, lokasinya yang relatif lebih dekat dengan Kabupaten Gorontalo Utara dibandingkan Jakarta, sehingga dapat berperan lebih sebagai penyangga kebutuhan ibukota. Dengan akses melalui perairan yang lebih mudah karena terdapat beberapa pelabuhan, seperti pelabuhan peti kemas bertaraf internasional di Kecamatan Anggrek, serta pelabuhan penyeberangan di Kwandang dan Gentuma, jembatan penghubung IKN dengan Kawasan Timur Indonesia dapat diperankan melalui integrasi tol laut. Melaluinya juga dapat berfungsi sebagai penunjang perdagangan karena pada area Pelabuhan Anggrek akan dibangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk melengkapi kawasan peruntukan industri yang telah ada. Bentangan pantai yang cantik dan memanjang juga dapat dijadikan sebagai alternatif *provider* sektor wisata penduduk IKN. Berbagai *priviledge* tersebut akan didorong oleh dan berkoordinasi dengan *stakeholder*, termasuk dengan K/L dan swasta, agar peran tersebut terealisasi dan semakin kuat.

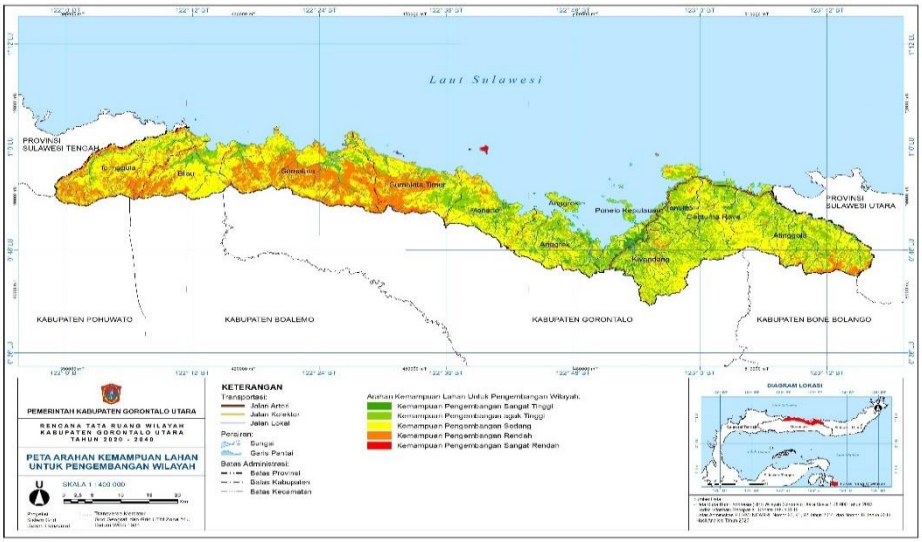
Letak strategis dekat dengan IKN, prospek pengembangan kewilayahan yang masih terbuka, dan potensi peningkatan simpul interkonektivitas yang tinggi, menjadi modal dasar di masa mendatang peningkatan peran regional Gorontalo Utara menjadi salah satu daerah terpenting di bagian utara Sulawesi bahkan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Gorontalo kelak. Selain itu, dengan konektivitas yang lebih baik dengan rencana dibangunnya Jalan Nasional yang menghubungkan kawasan Bulontio (Kecamatan

Sumalata) dengan Tilamuta di Kabupaten Boalemo membuka ruang opsi yang lebih baik dalam peningkatan hasil pertanian karena Kabupaten Boalemo sebagai salah satu lumbung pertanian Provinsi Gorontalo.

Untuk mencapai keadaan demikian, selain peningkatan kawasan secara infrastruktur, perlu dilakukan pembenahan kelembagaan. Upaya pertama perlu ada peningkatan kolaborasi bersama pengelolaan kawasan antara daerah-daerah tetangga. Berikutnya perlu peningkatan sinergitas serta koordinasi, serta penguatan komitmen pembangunan antara pemerintah daerah dengan kementerian atau lembaga. Yang ketiga adalah peningkatan kerjasama pentahelix guna pengembangan kawasan ekonomi yang diantaranya melalui keterlibatan perguruan tinggi atau kerjasama lainnya yang potensial dan memiliki kompetensi dalam pembangunan kawasan, pembangunan infrastruktur transportasi, ketersediaan energi, serta peningkatan layanan komunikasi serta penggunaan teknologi/digitalisasi.

Kawasan daratan Gorontalo Utara yang terbuka untuk dilakukan pengembangan wilayah secara umum di seluruh kawasan, hanya saja di beberapa kawasan kemampuan lahannya relatif lebih rendah, terutama di wilayah Kecamatan Sumalata dan Sumalata Timur karena salah satunya akibat ketinggian dan kemiringan lahannya.

Gambar 2.14
Arahan Kemampuan Lahan Pengembangan Wilayah



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Dalam mengembangkan dan meningkatkan sektor ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan, harus berbasis sektor unggulan dengan berdasarkan karakteristik wilayah memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk menghadirkan kawasan yang berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera. Secara umum, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai berikut:

1. Potensi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

   Sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo, salah satunya karena menjadi penyumbang terbesar dalam komposisi PDRB. Sektor ini bersifat padat karya dan memiliki daya serap yang tinggi terhadap tenaga kerja, terutama di wilayah perdesaan. Potensi pertanian yang bisa dikembangkan antara lain:

   a. Kawasan Tanaman Pangan

      Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan. Secara umum, dengan mempertimbangkan iklim dan ketinggian tempat, seluruh daerah dataran dapat ditanami komoditas tanaman pangan.

      Untuk pengembangan potensi kawasan pertanian, khusus pertanian tanaman pangan dan perkebunan dapat dibuat program yang saling berintegrasi sehingga dapat menggabungkan beberapa unit usaha yang dikelola secara terpadu dan berorientasi ekologis. Program terpadu ini diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh kecamatan sehingga seluruh masyarakat diharapkan dapat memperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi, produktivitas, dan produksi yang tinggi.

      Untuk kawasan persawahan, sejak tahun 2018 mulai disusun dokumen Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang hingga tahun 2024 ini masih diukur luasannya, namun merupakan bagian dari luasan baku lahan sawah seluas 4.189 Hektar, dan potensi lahan sawah sesuai data BPS yang seluas 5.366 Hektar. Lahan LP2B diproyeksikan untuk penyediaan pangan mandiri selama 5 tahun berikutnya karena didorong

tidak akan beralih fungsi menjadi lahan kering atau lahan selain sawah untuk mencapai tujuan pencapaian swasembada pangan.

Lahan sawah yang terdiri dari sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis, selain itu pemenuhan sumber-sumber air dan perbaikan infrastruktur dalam rangka mendukung peningkatan produksi dan produktivitas harus menjadi prioritas. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan agropolitan dan agrowisata.

b. Kawasan Pertanian Hortikultura

Kabupaten Gorontalo Utara juga memproduksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas tersebut berupa tanaman sayur, antara lain cabai rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman sayuran yang paling banyak tumbuh dan tersebar merata adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas 516 Hektar, meningkat dibanding 455 Hektar setahun sebelumnya, dengan produksi mencapai 2.314,9 Ton pada tahun 2022. Untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 596,9 Ton, berkurang dibandingkan tahun sebelumnya di 655,3 Ton. Kecamatan Atinggola merupakan produsen buah durian terbanyak pada tahun 2021 dan 2022.

Kawasan pertanian hortikultura terdapat di seluruh kecamatan. Pengembangan tanaman hortikultura sayuran dan buah di wilayah perencanaan sebagai berikut: tanaman cabe terutama di Kecamatan Anggrek, Biau, Monano, Kwandang, Sumalata Timur, Tomilito, Gentuma, Atinggola, Tolinggula, dan Kecamatan Sumalata; sedangkan tanaman mangga di seluruh kecamatan. Saat ini sedang didorong pengembangan durian lokal yang ternyata terbukti lebih baik kualitasnya secara umur produktif, kandungan serat, dan lainnya dengan cara memperbanyak pengadaan bibit, terutama di Kecamatan Atinggola, Tolinggula, Sumalata, dan Biau. Selain varian lokal, jenis montong pun tetap didukung karena permintaan pasar tetap tinggi, kawasan khusus pengembangannya terletak di Kecamatan Atinggola, Tolinggula, Sumalata, Biau, dan Sumalata Timur.

c. Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan

Kawasan pertanian tanaman perkebunan terdiri atas:

- Kawasan perkebunan kakao, yang terletak di Kecamatan Tolinggula, Atinggola, Sumalata Timur. Namun tanaman perkebunan jenis ini sudah tidak dilakukan peremajaan sehingga produktivitasnya mulai turun;
- Kawasan perkebunan kelapa dalam yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan perkebunan cengkeh terdapat di Kecamatan Sumalata, Sumalata Timur, dan Tolinggula.

2. Penggunaan Lahan oleh Penduduk

Penggunaan lahan terbagi dalam dua bagian besar, yakni untuk kawasan lindung dan budidaya. Kawasan lindung nasional yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara yakni Suaka Margasatwa Nantu Boliyohuto yang termasuk pada wilayah Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo, dan Kabupaten Gorontalo Utara dengan luas 51.639,17 Hektar, Cagar Alam Mas-Popayato-Raja dengan luas 147,94 Hektar, dan Hutan Lindung Hutokalo seluas 16.695 Hektar.

Secara umum, penggunaan lahan oleh penduduk, khususnya terhadap lahan pertanian sawah seiring tahun mengalami degradasi luasan, khususnya yang beririgasi. Sebaliknya lahan yang bukan sawah senantiasa meluas. Sedangkan untuk permukiman tidak teridentifikasi dengan baik pada citra Landsat ETM+ karena luas lahan terbangun yang relatif sempit. Tabel yang menerangkan hal tersebut disajikan pada Tabel 2.12 hingga 2.15 berikut.

2,91% dan 2,81%

Komposisi luasan lahan sawah beririgasi, masing-masing tahun 2019 dan 2022



Tabel 2.12
Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2019 (Hektar)

No.	Penggunaan Lahan	Realisasi dalam Satu Tahun					Jumlah Luas
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	
1	**LAHAN PERTANIAN**						
1.1	**Lahan Sawah**						
	a. Irigasi	61,00	4.908,00	-	-	-	4.969,00
	b. Tadah hujan	288,00	380,00	-	-	-	668,00
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	
	Jumlah Lahan Sawah	**349,00**	**5.288,00**	**-**	**-**	**-**	**5.637,00**

No.	Penggunaan Lahan	Luas
1.2	**Lahan Bukan Sawah**	
	a. Tegal/kebun	26.782,00
	b. Ladang/huma	8.432,00
	c. Perkebunan	13.617,00
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	14.474,00
	e. Padang penggembalaan/rumput	2.652,00
	f. Sementara tidak diusahakan	7.948,00
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain)	2.800,00
	Jumlah Lahan Bukan Sawah	76.705,00
2	**LAHAN BUKAN PERTANIAN**	
	Jumlah Lahan Bukan Pertanian	88.515,00
LUAS PENGGUNAAN LAHAN KESELURUHAN		**170.857,00**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023

Tabel 2.13
Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2020 (Hektar)

No.	Penggunaan Lahan	Realisasi dalam Satu Tahun					Jumlah Luas
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	
1	**LAHAN PERTANIAN**						
1.1	**Lahan Sawah**						
	a. Irigasi	61,00	4.880,00	-	-	-	4.941,00
	b. Tadah hujan	259,00	367,00	-	-	-	626,00
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	
	Jumlah Lahan Sawah	**320,00**	**5.247,00**	**-**	**-**	**-**	**5.567,00**

No.	Penggunaan Lahan	Luas
1.2	**Lahan Bukan Sawah**	
	a. Tegal/kebun	26.778,00
	b. Ladang/huma	8.602,00
	c. Perkebunan	13.617,00
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	14.474,00
	e. Padang penggembalaan/rumput	2.652,00
	f. Sementara tidak diusahakan	7.948,00
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain)	2.800,00
	Jumlah Lahan Bukan Sawah	76.871,00
2	**LAHAN BUKAN PERTANIAN**	
	Jumlah Lahan Bukan Pertanian	88.515,00
LUAS PENGGUNAAN LAHAN KESELURUHAN		**170.953,00**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2020

Tabel 2.14
Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2021 (Hektar)

No.	Penggunaan Lahan	Realisasi dalam Satu Tahun					Jumlah Luas
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	
1	**LAHAN PERTANIAN**						
1.1	**Lahan Sawah**						
	a. Irigasi	51,00	4.766,00	-	-	-	4.817,00
	b. Tadah hujan	225,00	344,00	-	-	-	569,00
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	
	Jumlah Lahan Sawah	**276,00**	**5.110,00**	**-**	**-**	**-**	**5.386,00**

No.	Penggunaan Lahan	Luas
1.2	**Lahan Bukan Sawah**	
	a. Tegal/kebun	26.359,00
	b. Ladang/huma	8.546,00
	c. Perkebunan	14.859,00
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	14.474,00
	e. Padang penggembalaan/rumput	2.650,00
	f. Sementara tidak diusahakan	7.424,00
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain)	2.739,00
	Jumlah Lahan Bukan Sawah	77.051,00
2	**LAHAN BUKAN PERTANIAN**	
	Jumlah Lahan Bukan Pertanian	88.515,00
LUAS PENGGUNAAN LAHAN KESELURUHAN		**170.952,00**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023

Tabel 2.15
Luasan Penggunaan Lahan Tahun 2022 (Hektar)

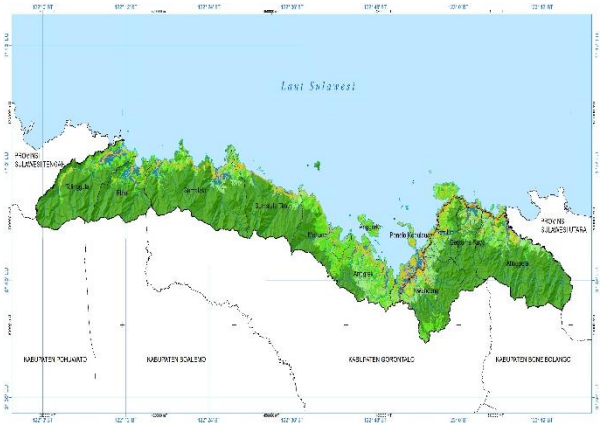
No.	Penggunaan Lahan	Realisasi dalam Satu Tahun					Jumlah Luas
		Ditanami Padi			Tidak Ditanami Padi		
		Satu Kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami Tanaman Lainnya	Tidak Ditanami Apapun	
1	**LAHAN PERTANIAN**						
1.1	**Lahan Sawah**						
	a. Irigasi	51,00	4.757,00	-	-	-	4.808,00
	b. Tadah hujan	225,00	333,00	-	-	-	558,00
	c. Rawa pasang surut	-	-	-	-	-	-
	d. Rawa lebak	-	-	-	-	-	
	Jumlah Lahan Sawah	**276,00**	**5.090,00**	**-**	**-**	**-**	**5.366,00**

No.	Penggunaan Lahan	Luas
1.2	**Lahan Bukan Sawah**	
	a. Tegal/kebun	26.370,00
	b. Ladang/huma	8.553,00
	c. Perkebunan	14.859,00
	d. Ditanami pohon/hutan rakyat	14.474,00
	e. Padang penggembalaan/rumput	2.650,00
	f. Sementara tidak diusahakan	7.424,00
	g. Lainnya (tambak, kolam, empang, hutan negara, dan lain-lain)	2.739,00
	Jumlah Lahan Bukan Sawah	77.069,00
2	**LAHAN BUKAN PERTANIAN**	
	Jumlah Lahan Bukan Pertanian	88.517,00
LUAS PENGGUNAAN LAHAN KESELURUHAN		**170.952,00**

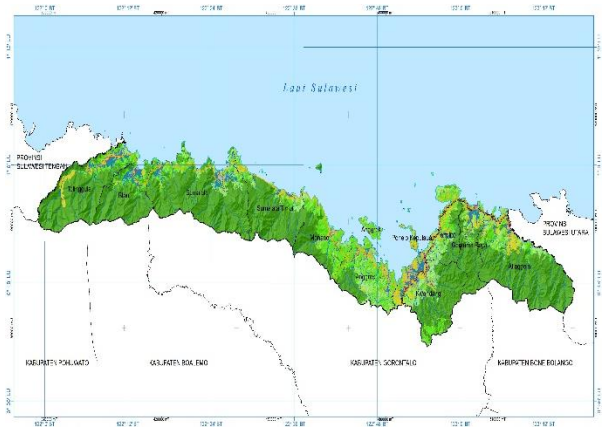
Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023

Secara spasial, penggunaan lahan juga terlihat perubahan yang signifikan dalam 1 dekade terakhir, lebih-lebih jika dibandingkan dengan proyeksi hingga 2040 mendatang menggunakan dasar perubahan tahunan saat ini. Secara detail informasi tersebut disajikan pada Gambar 2.15 berikut.

Gambar 2.15
Historis dan Proyeksi Penggunaan Lahan Tahun 2013-2040



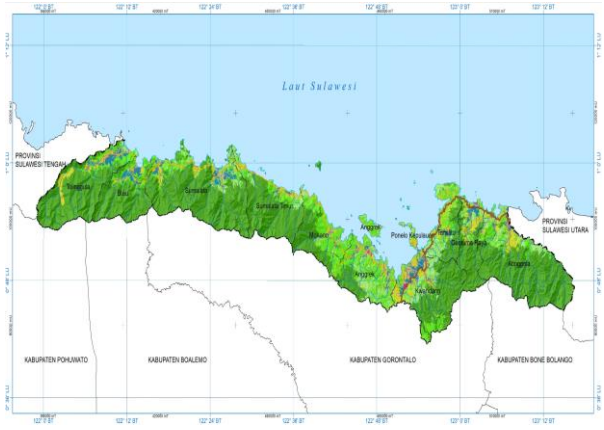
Tahun 2013



Tahun 2016



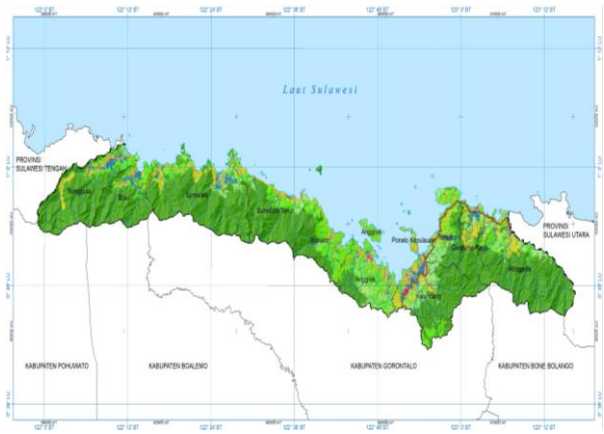
Tahun 2019



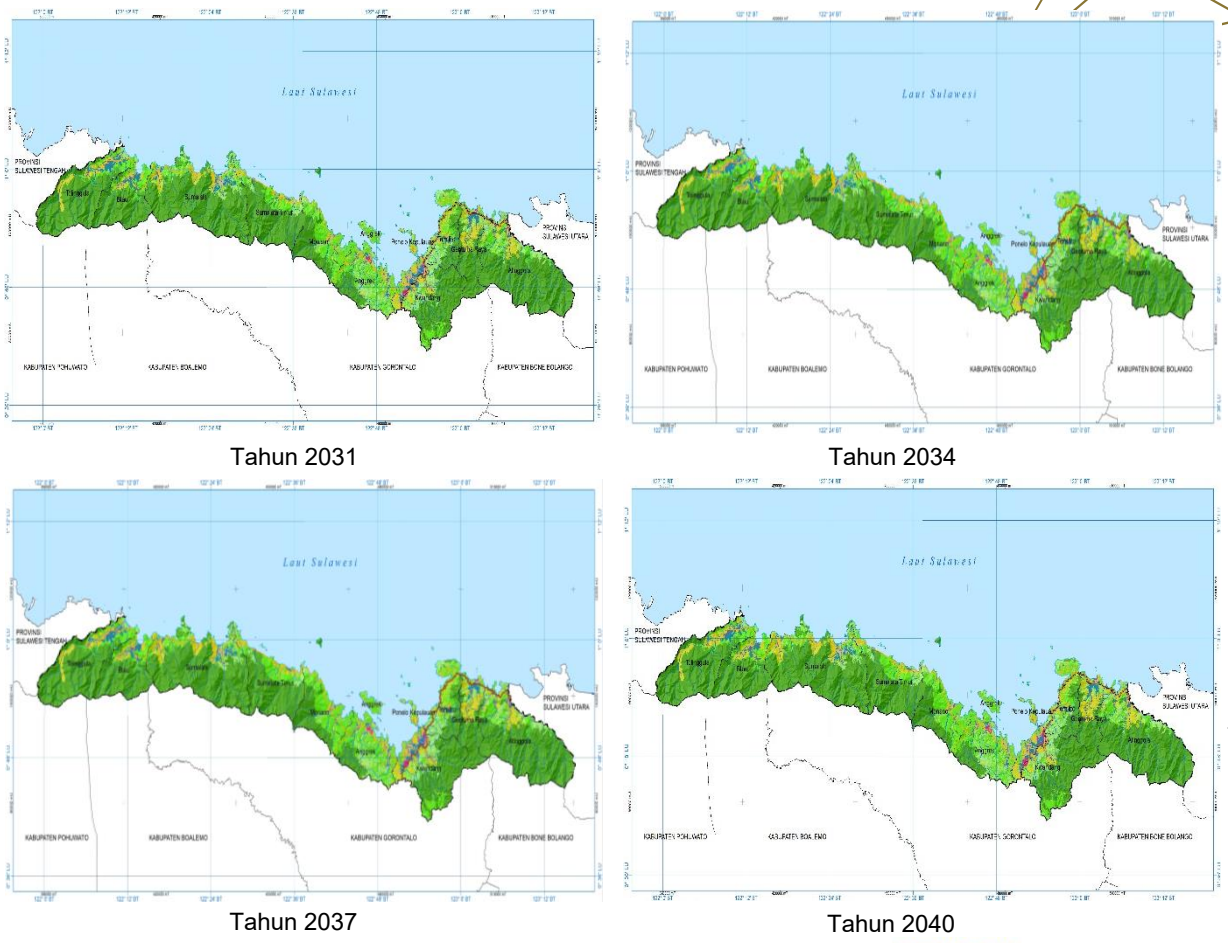
Tahun 2022



Tahun 2025



Tahun 2028



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031 (2020-2040)

Jika dilihat dari tabel-tabel di atas, lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lahan kering adalah lahan perkebunan, tegalan/kebun, dan ladang huma, dengan total 49.782 Hektar pada tahun 2022 atau 29,12 persen dari luasan seluruh penggunaan lahan oleh masyarakat. Lahan kering sendiri biasanya dimanfaatkan untuk pengembangan jagung, padi ladang, kacang-kacangan, dan tanaman hortikultura. Khusus pengembangan tanaman jagung dan padi ladang, setiap tahun terus bertambah luasannya, karena program pemerintah yang terus mengembangkan tanaman jagung dengan cara pembukaan lahan baru dan penanaman di bawah pohon kelapa, sehingga jumlah lahan untuk pengembangan lahan kering terus bertambah. Budidaya tanaman jagung masih menjadi primadona, dengan wilayah pengembangan terluas di Kecamatan Atinggola, Gentuma, Tomilito, Kwandang, Anggrek, dan Sumalata. Namun meskipun demikian, alih fungsi lahan ke pertanian yang terlalu masif juga memberikan tekanan terhadap lingkungan, sehingga perlu dicari solusi jenis tumbuhan yang bernilai tambah tinggi dan cocok ditanam di lahan Gorontalo Utara namun minimal ekses negatifnya terhadap lingkungan.

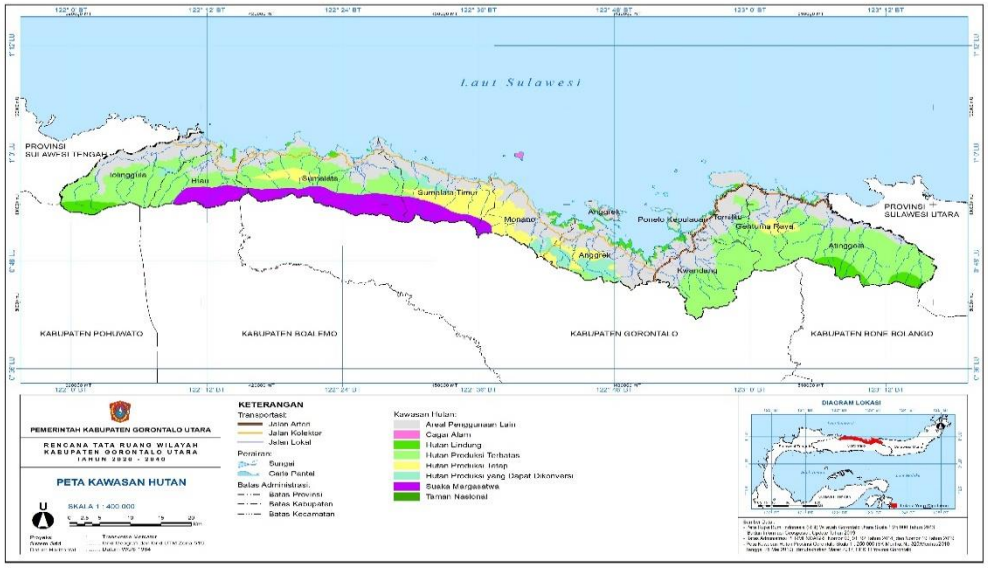
Hutan di Kabupaten Gorontalo Utara sejak dulu sudah dikenal sebagai salah satu penghasil kayu jati kualitas terbaik, namun rendah nilai tambahnya karena hampir seluruh hasilnya dikirim ke luar dalam bentuk kayu bulat/gelondongan. Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas keseluruhan hutan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 824.668 Hektar. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit dan daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luasannya berkurang menjadi 764.881,23 Hektar. Pada Tabel 2.16 berikut disajikan luas kawasan hutan menurut kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2020.

Tabel 2.16
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bonebolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	252.663,30	90.092,02	23.254,95	764.881,27

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Gambar 2.16
Peta Kawasan hutan



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara 2011-2031 (2020-2040)

3. Potensi Pengembangan Kawasan Peruntukan Peternakan

Karakteristik wilayah Gorontalo Utara sangat mendukung dalam terbentuknya wilayah peternakan sapi potong. Namun demikian, khusus Kecamatan Anggrek dan Kwandang tidak diarahkan pada pengembangan peternakan karena merupakan wilayah peruntukan industri serta perdagangan dan perkotaan. Dukungan kawasan Anggrek terhadap sektor peternakan berupa pengembangan industri Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan Rumah Potong Hewan (RPH) bagi unggas dan ternak besar, bahkan pengembangan juga rencananya diarahkan pada pembangunan TPH dan RPH berkonsep halal. Kawasan yang didorong sebagai sentra ternak yaitu di Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, dan Atinggola.

Pengembangan populasi ternak tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan infrastruktur pendukung peternakan. Keinginan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sentra pengembangan budidaya hewan ternak di masa mendatang diharapkan dapat terwujud dengan rencana didirikannya sebuah *ranch* seluas 700 Hektar di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, mendampingi *mini ranch* yang telah dibangun di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito. Upaya pengembangan *ranch* di Papualangi telah dimulai dari pembangunan sarana pendukung yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus tahun 2022, berupa jalan produksi peternakan dan irigasi tanah dalam yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Sedangkan pada *mini ranch* memiliki areal peruntukan lahan gembala seluas 3 Ha, lahan hijauan pakan 2 Ha, serta lahan peruntukan rumah jaga 1 Ha (kandang 2 unit, *paddock* 2 unit, rumah jaga 1 unit, silo 1 unit). Hanya saja, peningkatan kualitas dan kapasitas di *mini ranch* perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi visi peningkatan populasi ternak seiring ekspor ke beberapa daerah potensial, termasuk rencana besar sebagai penyangga ketersediaan pangan bagi Ibukota Negara (IKN).

Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan kesehatan hewan ternak, telah tersedia Puskeswan yang terletak di Tolinggula, Sumalata Timur, Kwandang, dan Atinggola dengan masing-masing tersedia dokter hewan. Untuk pos Inseminasi Buatan (IB) hanya terdapat di Desa Bulalo Kecamatan Kwandang, namun petugas IB selalu aktif *mobile* ke seluruh kecamatan. Ketersediaan infrastruktur peningkat produksi hewan ternak juga didukung dengan fasilitas pemotongan hewan. Saat ini tersedia Tempat Pemotongan Hewan (TPH) sebanyak 12 unit (Kecamatan Kwandang 6 unit, Anggrek 2 unit, Tolinggula 1 unit, Biau 1 unit, Atinggola 1 unit, dan Kecamatan Gentuma 1 unit), Rumah Potong Hewan (RPH) unggas dan RPH Ruminansia masing-masing 1 unit yang terletak di Desa Putiana Kecamatan Anggrek, serta Unit Pengelola Pakan Organik (UPO) 3 unit (Kecamatan Atinggola 1 unit, Tomilito 1 unit, dan Kwandang 1 unit).

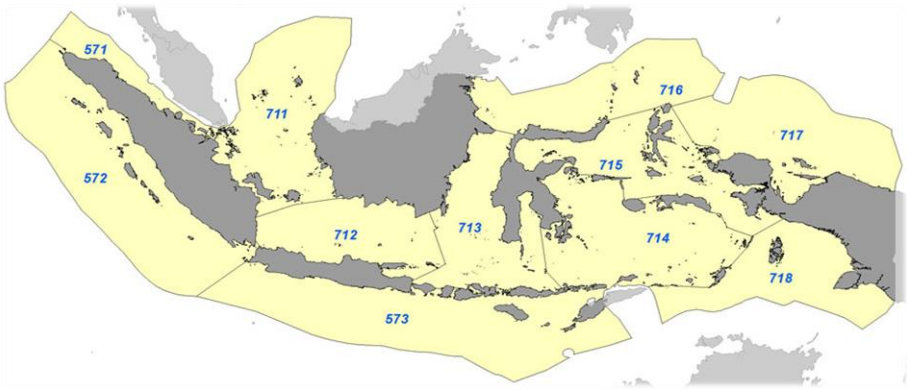
Mempertimbangkan karakteristik wilayah, peluang dan potensi terbentuknya satu atau lebih kawasan peternakan sapi sangat besar. Program Gertak Birahi yang didorong oleh Pemerintah Kabupaten

Gorontalo Utara diharapkan dapat berhasil dicapai dengan pengembangan kawasan peternakan sebagai pemicunya. Namun, perlu menjadi perhatian bersama, bahwa pengembangan tersebut membutuhkan integrasi antara sektor peternakan dengan sektor lainnya, seperti lahan yang luas untuk penyediaan lahan bagi pakan ternak. Lahan yang ada sendiri saat ini telah banyak terdistorsi dan digunakan untuk peruntukan lainnya seperti permukiman, pertambangan, industri, dan sebagainya yang menyebabkan ketersediaan lahan untuk pengadaan hijauan dan pakan ternak mendapat tekanan. Pemerintah daerah dapat melakukan optimalisasi limbah pertanian dan agroindustri untuk memperbaiki ketersediaan tanaman pangan dan penyediaan pakan ternak yang berkesinambungan.

4. Potensi Pengembangan Kawasan Perikanan

   Kabupaten Gorontalo Utara, dengan garis pantai ±317,39 Kilometer (331,2 Kilometer berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo) dan wilayah Laut ZEE seluas 40.000 Kilometer^2, memiliki 55 pulau besar/kecil yang delapan diantaranya telah berpenghuni, mempunyai potensi ikan yang cukup besar. Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50 Tahun 2017, wilayah perikanan tangkap Kabupaten Gorontalo Utara masuk pada Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan (WPP) 716 dengan kawasan mencakup Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian utara Pulau Halmahera dan Papua. Potensi WPP 716 ini mencapai 626.045 Ton/tahun. Pada Gambar 2.17 digambarkan garis imajiner WPP 716 yang menunjukkan potensi dari perikanan tangkap.

Gambar 2.17
Wilayah Potensi Perikanan Tangkap WPP 716



Sumber: Litbang Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016

Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, potensi pada WPP 716 terdapat 9 jenis hasil perikanan tangkap yang dapat dimanfaatkan dari kawasan tersebut. Secara detail jenis perikanan tangkap sekaligus potensi dan pemanfaatannya disajikan pada Tabel 2.17 berikut.

Tabel 2.17
Estimasi Potensi, Volume Tangkap yang Diperbolehkan, dan Pemanfaatan WPP 716

No.	Jenis Perikanan Tangkap	Potensi (Ton)	JTB (Ton)	Pemanfaatan (%)
1	Ikan pelagis kecil	197.012,00	137.908,00	0,70
2	Ikan pelagis besar	176.382,00	123.468,00	0,50
3	Ikan demersal	215.900,00	194.310,00	0,40
4	Ikan karang	24.909,00	12.455,00	1,60
5	Udang penaeid	6.705,00	4.694,00	0,50
6	Lobster	1.494,00	1.046,00	0,90
7	Kepiting	1.470,00	1.029,00	0,80
8	Rajungan	265,00	186,00	0,50
9	Cumi-cumi	1.908,00	1.336,00	0,90
Total		**626.045,00**	**476.432,00**	**0,76**

JTB: Jumlah Tangkap yang Diperbolehkan
Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2022

Kawasan perikanan meliputi seluruh kecamatan yang ada, termasuk Kecamatan Ponelo sebagai satu-satunya kecamatan yang berbentuk kepulauan. Kawasan yang saat ini berfungsi sebagai sentra/kawasan perikanan budidaya diantaranya berada di Kecamatan Anggrek dan Kwandang bagi jenis budidaya tambak semi intensif dan sederhana, rumput laut di Kecamatan Anggrek dan Ponelo Kepulauan, sedangkan kolam air tenang/deras di Kecamatan Tolinggula dan Sumalata Timur.

Mempertimbangkan potensi dan ketersediaan sumber air yang berkesinambungan, serta tingkat kemandirian masyarakatnya, pengembangan perikanan budidaya tawar yang meliputi ikan jenis nila dan mas, akan dikembangkan di Kecamatan Atinggola, khususnya di Desa Tombilelato. Sedangkan pengembangan rumput laut sebagai tulang punggung dalam produksi perikanan budidaya tetap didorong di wilayah perairan Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Tomilito.

5. Potensi Pengembangan Kawasan Pariwisata

   Secara umum, seluruh kawasan merupakan kawasan yang potensial dikembangkan sebagai obyek wisata, yang meliputi:

   1. Kawasan peruntukan pariwisata budaya yang meliputi upaya pelestarian dan pengembangan atas kawasan:

a. Kawasan pariwisata Situs Budaya Tanjung Kramat di Desa Hutokalo Kecamatan Sumalata;
b. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Benteng Kota Maas di Kecamatan Kwandang;
c. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Benteng Leiden atau Oranye di Desa Jembatan Merah Kecamatan Tomilito;
d. Kawasan Pariwisata Kotajin sebagai situs yang diajukan sebagai kawasan *geopark* yang ada di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola;
e. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya *Pillbox* di Desa Katialada Kecamatan Kwandang;
f. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Makam Herman Christiaan Knappert di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur;
g. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Bulongo Da'a di Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur;
h. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Makam Pecinan di Desa Hulawa dan Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur;
i. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Pertambangan *Maatscappy* Sumalata di Desa Hulawa Kecamatan Sumalata Timur;
j. Kawasan pariwisata Situs Cagar Budaya Rumah Instalasi Menara Suar Pulau Lampu di Desa Buladu Kecamatan Sumalata Timur.

2. Kawasan peruntukan pariwisata alam, yang meliputi upaya pengembangan atas kawasan:
   a. Kawasan wisata pantai:
      - Wisata Pantai Monano di Kecamatan Monano;
      - Wisata Pantai Minanga di Kecamatan Atinggola;
      - Wisata Pantai Botudidingga di Kecamatan Tomilito;
      - Wisata Pantai Hutokalo di Kecamatan Sumalata;
      - Wisata Pantai Tolitehuyu di Kecamatan Monano;
      - Wisata Pantai Dunu di Kecamatan Monano;
      - Wisata pantai berpasir putih Pantai Panjang di Kecamatan Tolinggula; dan
      - Wisata Pantai Malagoso di Kecamatan Gentuma Raya.

b. Kawasan wisata air terjun:
- Wisata Air Terjun Didingga di Desa Didingga di Kecamatan Biau;
- Wisata Air Terjun Limbato di Kecamatan Tolinggula;
- Wisata Air Terjun Papualangi di Kecamatan Tolinggula;
- Wisata Air Terjun Masuru di Desa Masuru di Kecamatan Kwandang; dan
- Wisata Air Terjun Butato di Kecamatan Sumalata.

c. Kawasan wisata bawah laut:
- Wisata bawah laut di Desa Buladu Kecamatan Sumalata;
- Wisata bawah laut di Pulau Bohu Desa Garapia Kecamatan Anggrek;
- Wisata bawah laut Pulau Tolinggula di Desa Tolinggula Pantai Kecamatan Tolinggula;
- Wisata bawah laut Pulau Raja dan Pulau Popaya di Kecamatan Sumalata Timur; dan
- Wisata bawah laut Pulau Lampu di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

d. Kawasan wisata pulau:
- Wisata Pulau Saronde di Kecamatan Ponelo Kepulauan;
- Wisata Pulau Diyonumo di Kecamatan Sumalata Timur;
- Wisata Pulau Dokokayu di Kecamatan Gentuma Raya;
- Wisata Pulau Bohu di Kecamatan Anggrek;
- Wisata Pulau Tolinggula di Kecamatan Tolinggula; dan
- Wisata Pulau Mohinggito di Kecamatan Ponelo Kepulauan.

e. Kawasan wisata terbatas cagar alam dan suaka margasatwa:
- Kawasan Cagar Alam Mas - Popaya - Raja;
- Kawasan Wisata Alam Papualangi *Hills*;
- Kawasan Suaka Margasatwa Nantu;
- Kawasan Mebongo *Hills*;
- Tombulalilato (*village attraction*);
- Lelato *Hills*.

f. Kawasan *rest area*:
- Taman Pontolo Indah;

- Taman Ota lo Jin.

g. Kawasan wisata *Resort*:
   - *Oyile Beach Resort* di Kecamatan Tomilito;
   - *Diyonumo Sea Resort* di Kecamatan Sumalata Timur;
   - *Minanga Beach Resort* di Kecamatan Atinggola.

h. Kawasan wisata olahraga:
   - Olahraga arung jeram dan *flying fox* di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula;
   - Olahraga paralayang di Bukit Dunu Kecamatan Sumalata Timur;
   - Olahraga *Snorkeling* di Pulau Mohinggoto dan Saronde di Kecamatan Ponelo kepulauan.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPDA) Kabupaten Gorontalo Utara, sektor pariwisata sudah direncanakan pembangunannya. Skala prioritas pembangunan kepariwisataan didasarkan pada skor dari kriteria-kriteria minimal Peraturan Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Nomor PM.37/UM.001/MKP/07, yang digolongkan dalam beberapa klasifikasi. Dalam konteks Gorontalo Utara, diterjemahkan dalam penentuan objek wisata yang termasuk dalam '*the big five destinations*' (5 objek wisata yang menjadi unggulan daerah):

a. Ota lo Jin atau Kota Jin (dikatakan berupa istana atau benteng para jin), merupakan bongkahan batu gamping raksasa yang terdiri dari stalagtit dan stalagmit dengan pintu masuk gua yang sempit dan di atasnya ditumbuhi pohon beringin. Ada juga Pantai Minanga yang tidak jauh dari lokasi Ota lo Jin, pantai yang sangat indah dengan sajian pasir putih dan pantai panjangnya;
b. Pulau Saronde, merupakan destinasi wisata premium yang saat ini telah dikelola oleh pihak asing. Kemasan pulau eksotis ini berpasir putih, air laut yang bersih dan bening, sekaligus telah dilengkapi fasilitas penginapan (bungalow) dan restoran;
c. Pulau Mohinggito, merupakan pulau yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas lengkap, seperti *cottage*, gazebo, restoran, panggung, MCK, dan lain-lain, selain itu terdapat pula atraksi wisata berupa *banana boat*, dan lain sebagainya;

d. Pulau Diyonumo, merupakan pulau yang termasuk dalam rencana kawasan Sumalata *Waterpark* bersama dengan *resort* lautnya. Pulau yang indah dengan sungguhan pemandangan atas bukit yang ditumbuhi oleh rumput ilalang;
e. Pantai Monano, merupakan kawasan pantai berpasir putih gading yang banyak diminati oleh wisatawan untuk melaksanakan aktivitas berenang bersama keluarga.



Foto 2.4 *The Big Five Destinations* di Gorontalo Utara

Tabel 2.18
Klasifikasi Jenis Daya Tarik Wisata (DTW)

No.	Jenis Obyek Wisata	15 DTW Unggulan	15 DTW Berkembang	25 DTW Rintisan
1	Wisata Alam *the big five destinations*: - Pulau Saronde - Pulau Mohinggito - Kawasan *Sumalata Waterpark Beach Resort* (Diyonumo, Bunto Koluwoka, dan lain-lain.) - Pantai Monano - Pantai Minanga	- Pulau Saronde - Pantai Botudidingga - Pantai Minanga - Pantai Monano - Pulau Mohinggito - Taman Laut Pulau Raja - Pulau Diyonumo - Pulau Dokokayu - Oyile *Resort* - Diyonumo *Sea Resort* - Minanga *Resort*	- Pulau Bohu - Pulau Tolinggula - Papualangi *Hills* - Pantai Hutokalo/Milango - Pantai Kikia - Pantai Malagoso - Pantai panjang Tolinggula	- Wisata agro Leboto - Air panas Posso - Pantai Dunu - Wisata agro pisang - Wisata agro cengkeh - Wisata agro kelapa - Wisata agro kebun sawit PT Umika Makmur Mootilango - Budidaya *Buffalo Park* - Budidaya penyu - Napo Kima (*diving site*) - Kawasan Rabua (*beach attraction*) - Tumbulilato (*village attraction*)
2	Wisata Budaya *the big five destinations*: - Ota lo Jin	- Benteng Orange - Benteng Maas - *Geopark* Ota Jin - Kubur Aulia di Moluo - Makam C. Knappert di Sumalata Timur	- Desa Wisata Logpon - Batu Tiga Molingkopoto Selatan - Benteng Maas - Pasar Sore Tradisi Kwandang	- Embung Pemancingan dan Kuliner Pontolo - Ritual selamatan laut - Tombilotohe - Walima - Mandi Safar

No.	Jenis Obyek Wisata	15 DTW Unggulan	15 DTW Berkembang	25 DTW Rintisan
			- Tanjung Kramat - Kampung Wisata Nelayan Sumalata - Belanga Besar Hulawa	- Moloopu dan Pulangga - Makam Raja Panipi - Tulude
3	Minat khusus (buatan manusia)	- *Rest Area* Pontolo *Tourism Information Center* (TIC)	- Ragam atraksi di Sungai Koluwoka - Pantai Syariah Dambalo Indah - Bumi Perkemahan Pantai Monano - Wisata ziarah kuburan Belanda	- *Outbond* (*Flying Fox*, ATV, *horse riding*) - Wisata olahraga paralayang - Bumi Perkemahan Puncak Bukit Panorama - *Tracking crosser* di hutan - Aneka *ecosport marine tourism* (jet ski) - Paket mancing mania - Kebun binatang - *Waterboom* - Bukit Paralayang (*aerosport*) Monano - Paralayang di Bukit Dunu Ceria

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

Pemerintah Daerah Gorontalo Utara selain mendorong objek wisata yang telah lama dikembangkan, juga melakukan pemetaan dan inisiasi dalam mengembangkan objek-objek baru (rintisan), diantaranya:

a. Kawasan Pantai Rabua di Desa Dunu Kecamatan Monano

   Keunggulannya memiliki bentangan pantai pasir putih gading sepanjang 1,76 Kilometer dan luas 156.999 Meter^2, berada di wilayah teluk sehingga perairannya relatif tenang, dikelilingi oleh perbukitan sehingga menambah eksotisme pemandangan pantai, serta sangat dekat dengan jalan raya. Di kawasan ini dekat dengan pulau konservasi tukik dan lobster serta terdapat *diving site*.

b. Kawasan Lembah Lelato di Desa Lelato Kecamatan Sumalata

   Keunggulan objek wisata ini memiliki karakteristik bentangan alam perkampungan dan persawahan bersandingan dengan lautan sekaligus dekat dengan jalan raya, sehingga sangat tepat untuk didirikan pusat jajanan ringan dan *rest area* sepanjang kurang lebih 2 Kilometer. Selain itu, karena karakternya perbukitan yang memantulkan angin, cocok dikembangkan untuk olahraga paralayang.

c. Kawasan Lembah Mebongo di Desa Mebongo Kecamatan Sumalata

Serupa dengan Lembah Lelato, kawasan ini memiliki *view* yang mirip, dengan perbukitan yang memantulkan angin, bersanding dengan pandangan lautan sehingga tepat dikembangkan olahraga paralayang. Dengan bentangan area potensial sejauh kurang lebih 1,5 Kilometer, tepat dijadikan sebagai *rest area* dan area penjualan jajanan ringan.

d. Napo Kima (*diving site*)

   Terletak di Desa Hutokalo Kecamatan Sumalata sejauh 17,53 Mil dari Pantai Hutokalo yang sangat cocok sebagai area menikmati keindahan alam bawah laut karena memiliki tingkat visibilitas dalam air yang baik serta terdapat bentangan batuan/terumbu karang sebagai rumah berbagai spesies ikan. Pemanfaatan objek ini sudah dalam bentuk lokasi *scuba diving*, *free diving*, *underwater photography*, dan tempat memancing ikan karang.

e. Pantai Panjang Tolinggula Desa Tolinggula Pante Kecamatan Tolinggula

   Pantai ini memiliki karakter pemandangan pantai tropis pasir berwarna hitam/kelabu dengan area potensial sepanjang 1,5 Kilometer yang cocok dijadikan lokasi berbagai atraksi seperti jalur berkuda, *rest area*, *surfing*, *sand-play*, *moto TV*, *camping*, dan lain sebagainya.

f. Kawasan *Kwandang Waterfront City* (KWC) berupa rencana perluasan lahan/reklamasi yang akan dikembangkan untuk pengembangan *property*, kewilayahan, dan industri kreatif layaknya Kawasan Boulevard Manado, Pantai Losari Makassar, atau Mandalika.

g. Kawasan Bukit Dunu Ceria di Kecamatan Sumalata Timur, yang menawarkan *all in one package*, pengunjung dapat menikmati alam dengan berkemah di atas bukit, serta melakukan wisata olahraga paralayang.

h. Kawasan *Sumalata Waterpark* yang terletak di Kawasan Sumalata Timur yang merupakan kawasan terintegrasi wisata alam dan pulau, wisata sejarah dan *heritage*, hingga desa wisata.

Selain yang sudah ada saat ini, ke depan pengembangan pariwisata tidak hanya mengejar angka kunjungan wisatawan, juga mendorong pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan (*sustainable tourism*

development), melalui konsep pengelolaan yang berkelanjutan (bisnis pariwisata), ekonomi yang berkelanjutan (sosio ekonomi) jangka panjang, keberlanjutan budaya (*sustainable culture*) yang harus selalu dikembangkan dan dijaga, serta aspek keberlanjutan lingkungan (*environment sustainability*). Guna mencapai kondisi pengembangan tersebut, di Gorontalo Utara perlu disiapkan:

1. Partisipasi

   Masyarakat Gorontalo Utara harus mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata. Masyarakat juga harus berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi-strategi yang telah disusun sebelumnya.

2. Keikutsertaan para pelaku/*stakeholder involvement*

   Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis, dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3. Kepemilikan lokal (*local belonging*)

   Pembangunan pariwisata di Gorontalo Utara harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang kepariwisataan seperti penginapan/hotel, restoran/rumah makan, dan seterusnya harus dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat, serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat, sangat dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (*linkages*) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4. Penggunaan sumber daya yang berkelanjutan

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan, yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*irreversible*) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan, dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5. Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat

   Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, lokasi wisata, dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau *cultural tourism partnership* dapat dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6. Daya dukung

   Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial, dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7. Monitor dan evaluasi

   Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata, serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8. Akuntabilitas

   Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal Gorontalo Utara yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9. Pelatihan

   Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, *vocational* dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik- topik lain yang relevan.

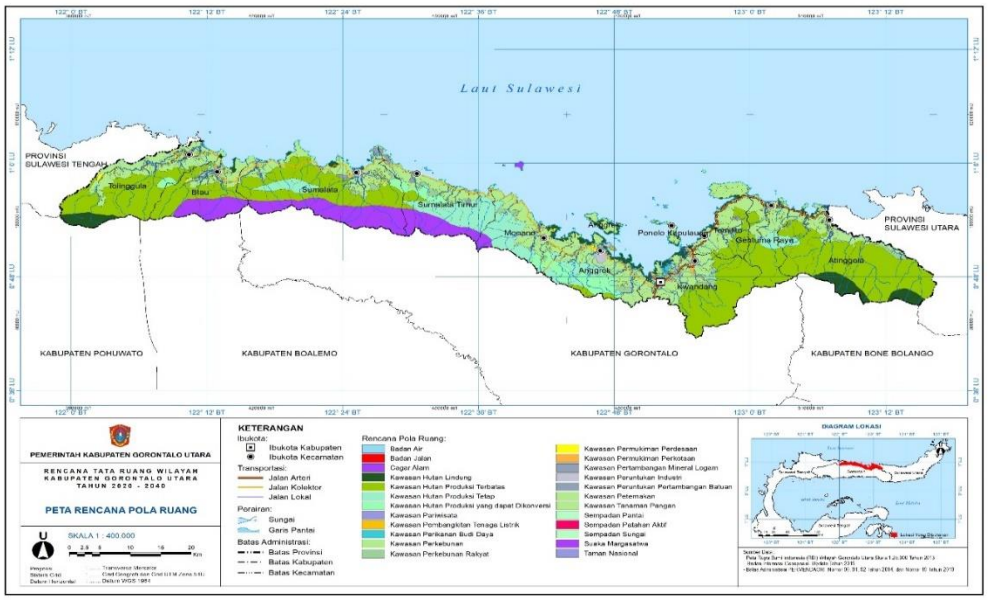
10. Promosi

    Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter *landscape*, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut seharusnya bertujuan untuk mewujudkan pengalaman wisata yang berkualitas yang memberikan kepuasan bagi pengunjung.

6. Potensi Pengembangan Kawasan Permukiman

   Rencana pola ruang kawasan permukiman Kabupaten Gorontalo Utara 2024-2044 menggambarkan pola pemanfaatan ruang kawasan-kawasan permukiman; kaitan struktural antara berbagai jenis kawasan berdasarkan rencana pengembangannya; serta hierarki dari pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat pelayanannya.

Gambar 2.18
Rencana Pola Ruang Gorontalo Utara



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2040

Melihat dinamika dan perkembangan saat ini, tidak semua penduduk bermukim di tempat yang layak dan baik. Sebagian penduduk ada yang bermukim di kawasan rawan bencana, kawasan yang tidak memiliki keteraturan, atau bercampur dengan dengan kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan permukiman, contohnya seperti kawasan permukiman Katialada. Ketidakteraturan permukiman akan berdampak pada masalah kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi masyarakat yang berujung pada munculnya *slum area*. Kawasan permukiman yang baik dan sehat selayaknya memiliki keteraturan dan kelayakan bangunan serta fasilitas penunjang seperti ketersediaan jalan akses, air bersih, pembuangan air limbah, dan tempat pembuangan sampah.

Keadaan permukiman di Kabupaten Gorontalo utara secara umum belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor SK. 47.III Tahun 2022, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan permukiman kumuh yang tersebar di wilayah peruntukan perkotaan yaitu Kecamatan Kwandang dan Anggrek dengan luasan total 123.67 Ha. Untuk itu perlu adanya kebijakan pemerintah daerah dalam hal pengembangan kawasan permukiman baru, peremajaan dan peningkatan kualitas permukiman, serta penyedian hunian yang layak bagi masyarakat yang kurang mampu.

Strategi pengembangan wilayah permukiman disesuaikan berdasarkan potensi, karakteristik, dan hemogenitas wilayah. Secara geografis, kawasan permukiman terdiri dari dua kelompok, yakni kelompok *continent* (daratan induk) dan kelompok *archipelago* (kepulauan). Kelompok *continent* adalah yang terletak di daratan Pulau Sulawesi, dan kelompok *archipelago* adalah yang terdiri dari tatanan kepulauan yang didominasi oleh pulau-pulau kecil di bagian utara. Kawasan permukiman di Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas:

1. Kawasan permukiman perkotaan

   Kawasan perkotaan adalah kawasan yang kegiatan utamanya non-agraris dan lebih menonjolkan pada kegiatan pemerintahan, pelayanan jasa sosial dan ekonomi. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan dan terletak di Kecamatan Kwandang dan Anggrek.

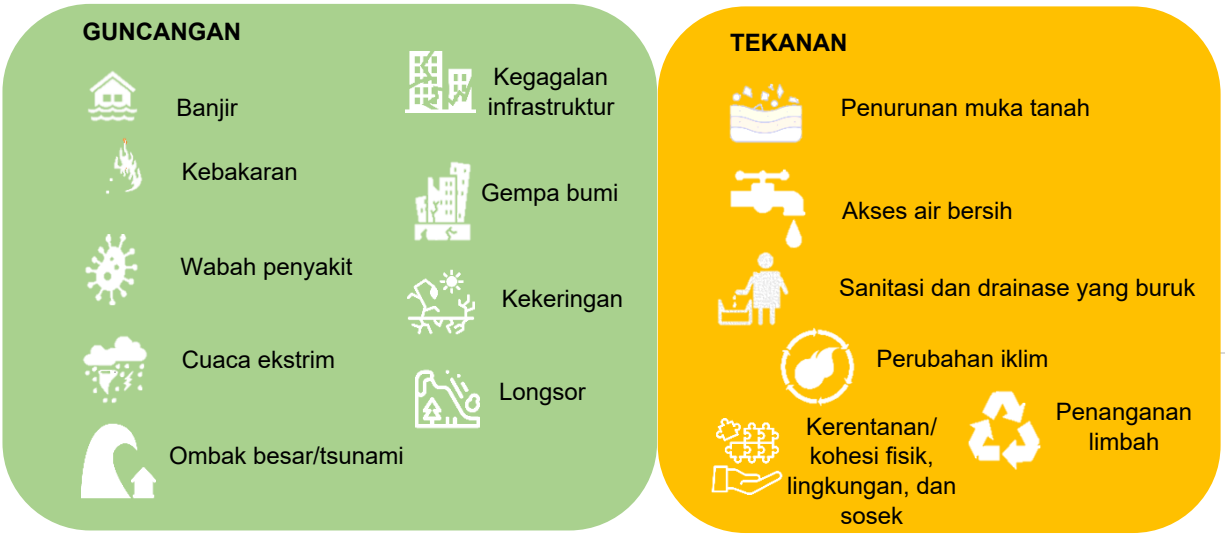
2. Kawasan permukiman perdesaan

   Kawasan perdesaan merupakan kawasan dengan kegiatan utamanya berorientasi pada kegiatan pertanian/agraris, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi pertanian. Kawasan perdesaan dikembangkan mengikuti pola pengembangan kawasan agropolitan (Kecamatan Sumalata, Biau, Tolinggula) dan/atau minapolitan (Kecamatan Kwandang, Anggrek, Monano, Ponelo Kepulauan, Sumalata Timur, dan Kecamatan Sumalata) dan pengembangan permukiman transmigrasi (Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, dan Kecamatan Tolinggula) menjadi suatu kota terpadu mandiri.

Berdasarkan data penggunaan lahan yang tertuang dalam RTRW, kawasan permukiman Kabupaten Gorontalo Utara memiliki luas sebesar 20.228 Ha atau sekitar 4 persen dari luas keseluruhan wilayah. Selain itu, pengembangan kawasan pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, harus memperhatikan kawasan rawan bencana yang akan dibahas pada bahasan berikutnya.

7. Kawasan Rawan Bencana

Kabupaten Gorontalo Utara tidak luput dari kerentanannya terhadap bencana, baik bencana alam/lingkungan, seperti banjir, *land subsidence*, gempa, dan bencana lainnya, serta bencana non-alam seperti kebakaran. Para pemangku kepentingan menyepakati jenis guncangan dan ancaman bencana yang berpotensi dialami di Gorontalo Utara sebagai berikut.



Berdasarkan hasil analisis spasial, hampir 60 persen wilayahnya berada pada wilayah dengan lereng curam dan sangat curam, sehingga menghadapi tantangan yang unik dan kompleks, seperti:

1. Erosi: Lereng curam rentan terhadap erosi tanah, terutama jika hutan atau vegetasi alami dihilangkan. Hujan deras atau aktivitas manusia seperti pertanian yang tidak berkelanjutan dapat memicu erosi yang dapat merusak lapisan tanah, menyebabkan longsor, dan mengancam keberlanjutan lingkungan.
2. Longsor: Wilayah berlereng curam dapat mengalami longsor tanah yang disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk curah hujan tinggi, gempa bumi, atau aktivitas manusia seperti penebangan hutan yang tidak terkendali. Longsor dapat mengakibatkan kerusakan properti, infrastuktur, dan bahkan membahayakan nyawa.
3. Aksesibilitas dan infrastruktur: Membangun infrastruktur di wilayah berlereng curam lebih sulit dan mahal dibandingkan dengan wilayah datar. Jalan, jembatan, dan sarana transportasi lainnya dapat

menghadapi kendala topografi dan memerlukan teknik konstruksi khusus untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan.

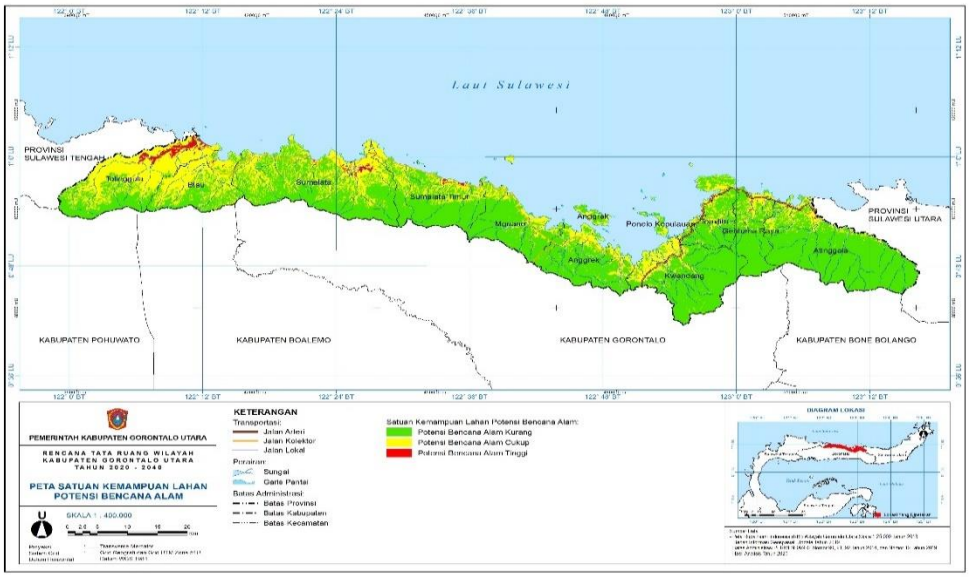
4. Ketersediaan lahan untuk pertanian: Lereng curam mungkin memiliki keterbatasan dalam hal ketersediaan lahan untuk pertanian. Penanaman tanaman secara efektif di lereng curam memerlukan metode pertanian terkontrol yang dapat mencegah erosi tanah dan mempertahankan kesuburan tanah.
5. Ancaman bencana alam: Wilayah dengan lereng curam seringkali lebih rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, atau gempa bumi, yang memerlukan perencanaan bencana yang baik dan infrastruktur yang tahan gempa untuk melindungi penduduk dan properti.
6. Konservasi lingkungan: Lereng curam sering menjadi habitat alami flora dan fauna. Mempertahankan keanekaragaman hayati dan melindungi ekosistem asli dapat menjadi tantangan di tengah tekanan pembangunan dan eksploitasi manusia. Solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini melibatkan pendekatan yang holistik, termasuk manajemen tanah yang berkelanjutan, pengelolaan hutan yang bijaksana, perencanaan perkotaan yang cerdas, dan peringatan dini serta mitigasi bencana. Keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam mengelola wilayah dengan lereng curam.

Kawasan rawan bencana merupakan kawasan yang sering dan berpotensi tinggi terhadap terjadinya bencana alam termasuk yang diakibatkan oleh perubahan iklim, dalam konteks Kabupaten Gorontalo Utara dalam 20 tahun ke depan potensinya terdiri atas:

1. Kawasan rawan gempa bumi, yang mencakup seluruh wilayah kabupaten;
2. Kawasan rawan gerakan tanah, terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, dan Tolinggula;
3. Kawasan yang terletak di zona patahan aktif, terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata, dan Tolinggula;

4. Kawasan rawan tsunami, terdapat di Kecamatan Kwandang, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, Atinggola, Anggrek, Sumalata Timur, Sumalata, Biau, Tolinggula; dan
5. Kawasan rawan abrasi; terdapat di Kecamatan Kwandang, Gentuma Raya, Atinggola, Ponelo Kepulauan, Anggrek, Sumalata Timur, Sumalata, dan Tolinggula.

Gambar 2.19
Satuan Kemampuan Lahan Potensi Bencana Alam



Sumber: RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020-2040

Karena rentan terhadap bencana, dalam arahan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara telah dipetakan wilayah-wilayah rawan bencana, beserta jalur-jalur evakuasi bencana alam diantaranya sebagai berikut:

1. Ruang Mitigasi Bencana

   Ruang mitigasi bencana diarahkan berada pada daerah pesisir/daerah pinggiran pantai di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan; Desa Moluo dan Dambalo Kecamatan Kwandang; Desa Kikia, Kasia, Bulontio Timur, Hutokalo, Bulontio Barat di Kecamatan Sumalata; Desa Wubudu, Deme I, Deme II Kecamatan Sumalata Timur; Desa Molonggota Kecamatan Gentuma Raya; serta Desa Dunu dan Monano Kecamatan Monano.
2. Ruang Evakuasi Bencana

   Ruang evakuasi bencana diarahkan mengikuti jaringan jalan menuju daerah dataran tinggi, perbukitan, dan pegunungan terdekat. Mitigasi

bencana ini akan mengikuti pola penetapan terbaru dari kawasan yang terkena dengan rawan bencana tersebut. Untuk itu ditetapkan kawasan rawan bencana yang terdiri atas:

a. Kawasan rawan bencana tinggi (letusan gunung api, gerakan tanah/longsor, dan sempadan sesar aktif) menjadi kawasan lindung. Pemanfaatan ruangnya diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ).
b. Kawasan rawan bencana tinggi (banjir dan tsunami), yang diusulkan menjadi kawasan budidaya, harus memenuhi persyaratan teknis yang adaptif terhadap bencana, yang diatur secara rinci dalam peraturan zonasi (KUPZ dan PZ).

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Gorontalo Utara ditetapkan mengenai Kawasan Rawan Bencana. Dari penetapan tersebut selanjutnya perlu dipilah kembali, mana yang tetap sebagai kawasan lindung dan mana yang diubah menjadi kawasan budidaya.

Pada dokumen Kajian Rawan Bencana (KRB) dan Jitu Pasna yang disusun tahun 2022, telah diidentifikasi berbagai lokasi berpotensi terjadi bencana di Gorontalo Utara pada berbagai level risiko. Sedangkan pada dokumen Jitu Pasna, terdapat tahapan-tahapan yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah jika terjadi bencana, termasuk di dalamnya bagaimana menghitung kerusakan dan kerugian pasca bencana baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Dengan telah terbitnya dokumen-dokumen tersebut, upaya mitigasi bencana dapat dilakukan berdasarkan kriteria masing-masing jenis bencana, dan dapat diketahui rencana penanganan pasca bencananya.

2.1.3 Aspek Demografis

Demografi adalah studi tentang penduduk yang dilihat dari ukuran (jumlah), struktur/komposisi, persebaran keruangan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur, dan persebaran penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi di suatu wilayah tertentu. Penduduk (SDM) merupakan modal penting dalam pembangunan suatu wilayah, selain sumber daya alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dengan kata lain, dalam pencapaian tujuan pembangunan, penduduk merupakan modal besar yang krusial. Diperlukan

komponen penduduk yang tidak hanya besar, namun juga memiliki daya saing untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Hanya dengan penduduk yang berkualitas, sumber daya dan kekayaan alam dapat dimanfaatkan secara pantas, tepat, efisien, dan berkesinambungan. Sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan bermoral merupakan jaminan masa depan yang cerah bagi daerah.

Masyarakat merupakan aktor utama dalam pembangunan karena penduduk memiliki dualisme fungsi, yaitu sebagai subjek dan objek pembangunan. Peranan penduduk sebagai subjek menentukan arah dan keberhasilan pembangunan. Besaran, komposisi, kualitas, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial, serta kebijakan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan yang cepat, namun dengan kualitas yang rendah, akan memperlambat tercapainya kondisi pembangunan yang ideal. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi demografi memiliki nilai strategis dalam pengambilan kebijakan.

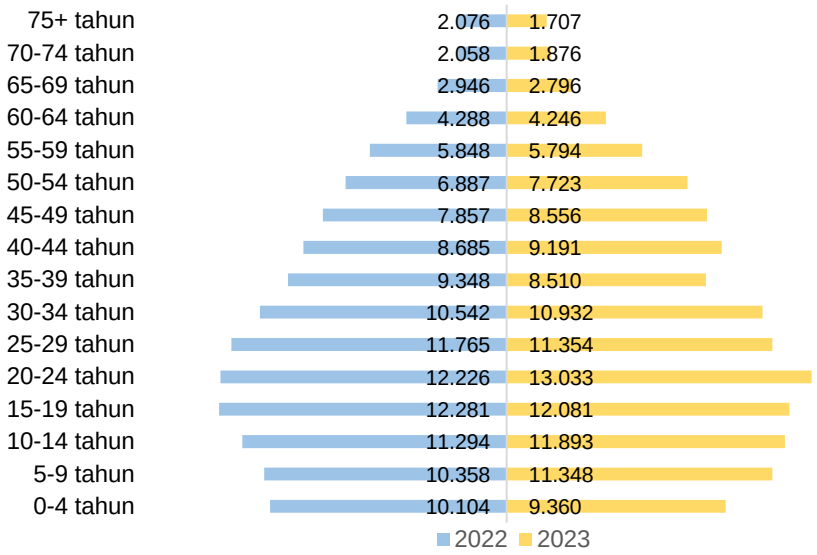
2.1.3.1 Struktur Penduduk

Struktur penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu. Struktur penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin.

Struktur penduduk yang ada menunjukkan dominasi penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebagaimana terlihat pada Grafik 2.1. Secara umum, penduduk usia produktif meningkat. Pada tahun 2022, penduduk usia produktif tercatat sebanyak 89.727 jiwa, atau sebesar 69,79 persen dari total penduduk. Penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) sebanyak 31.756 jiwa atau 24,70 persen, sedangkan yang sudah tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) atau melewati masa pensiun sebanyak 7.080 jiwa setara 5,51 persen. Setali tiga uang pada tahun 2023. Penduduk usia produktif sebanyak 91.420 jiwa, atau sebesar 70,11 persen dari total penduduk. Penduduk yang belum produktif sebanyak 32.601 jiwa atau 25,00 persen, sedangkan yang sudah tidak produktif lagi sebanyak 6.379 jiwa setara 4,89 persen. Dengan struktur penduduk tersebut, angka ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Gorontalo Utara tahun 2022 sebesar 48,08 persen, dan tahun 2023 sebesar

42,64 persen, yang berarti bahwa dari 100 penduduk usia produktif di Gorontalo Utara menanggung secara ekonomi masing-masing sebanyak 48 dan 42 penduduk usia non produktif di 2022 dan 2023, yang menunjukkan bahwa Gorontalo Utara masih berada pada tahap bonus demografi yang masih mengarah ke arah positif, yang dimaknai sebagai keuntungan ekonomi yang disebabkan besarnya jumlah penduduk produktif sehingga dapat memacu investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sering disebut dengan jendela kesempatan.

Grafik 2.1
Piramida Penduduk Tahun 2022 dan 2023

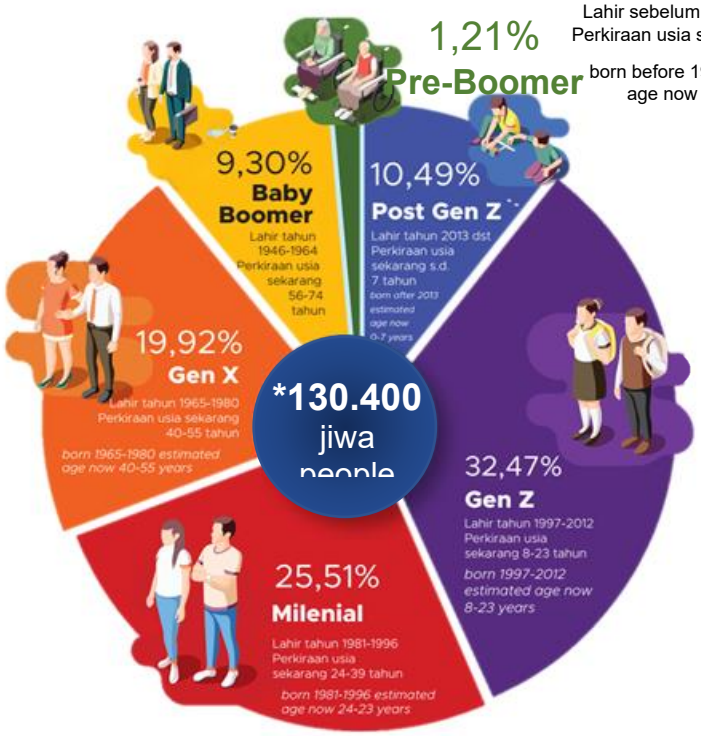


Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah
Data tahun 2022 bersumber dari proyeksi interim BPS, dan 2023 bersumber dari Dinas Dukcapil Gorontalo Utara

Generasi Gen-Z (yang lahir antara tahun 1997-2012) dan Millenial (yang lahir antara tahun 1981 dan 1996) merupakan komposisi terbesar dalam struktur penduduk. Kedua generasi ini termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat percepatan pertumbuhan ekonomi. Potensi tersebut harus dioptimalkan oleh pemerintah melalui peningkatan kualitas dan investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) mulai dari pendidikan, kesehatan, kemampuan komunikasi, keterampilan, serta penguasaan teknologi. Bonus demografi tidak akan memberikan dampak yang signifikan jika pemerintah tidak melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jika mayoritas penduduk berusia produktif memiliki

kualitas yang rendah, justru akan memicu gelombang pengangguran massal dan semakin menambah beban daerah.

Sedangkan jika dilihat dari keseimbangan komposisi penduduk berdasarkan gender, ternyata didapatkan angka 104, yang berarti terdapat 104 orang laki-laki bagi keberadaan 100 orang perempuan. Secara umum, komposisi tersebut berimbang yang menunjukkan bahwa sudah seharusnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan berwawasan gender dan berimbang serta adil antara pembangunan bagi laki-laki maupun perempuan, termasuk memastikan pada keterwakilan yang adil bagi perempuan dalam parlemen. Informasi rasio jenis kelamin yang di-*breakdown* per kecamatan ditampilkan pada Tabel 2.19, yang menunjukkan setelah lewat 1 dekade pun, rasio gender tetap identik meskipun terjadi pergeseran angka di beberapa kecamatan.



Sumber: BPS, 2024. Pengklasifikasian oleh William H. Frey. *Analysis of Census Bureau Population Estimates*.
*Jumlah penduduk berdasarkan hasil pendataan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam DDA 2024

Tabel 2.19
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Gorontalo Utara

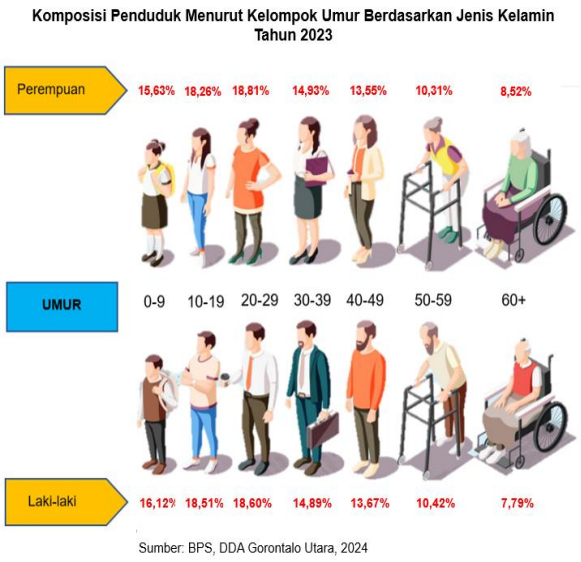
No.	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin			
		2010	2020	2022	2023
1	Atinggola	102	105	105	104
2	Gentuma Raya	102	104	104	105
3	Kwandang	101	102	102	102
4	Tomilito		105	105	104
5	Ponelo Kepulauan		101	101	104
6	Anggrek	104	110	111	105
7	Monano		101	101	101
8	Sumalata	108	106	105	106
9	Sumalata Timur		103	102	105
10	Tolinggula	106	105	104	103
11	Biau		103	102	104
Gorontalo Utara		**104**	**104**	**104**	**104**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Pada rentang usia 20 hingga 59 tahun, usia yang dianggap usia kerja, komposisi penduduk berdasarkan gender pun relatif berimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dengan persentase masing-masing 56,95 berbanding 56,54 persen, yang menunjukkan hal yang searah dengan rasio jenis kelamin yang relatif berimbang.

2.1.3.2 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Selain karena sebab alami (fertilitas), pertumbuhan penduduk juga dapat diakibatkan oleh adanya migrasi dari daerah lainnya, sepanjang penduduk yang masuk lebih besar dibandingkan keluar. Setiap tahun, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara selalu meningkat. Geliat ekonomi yang semakin bergairah dan kebutuhan ketersediaan lahan garapan tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu daya tarik bagi masuknya penduduk dari luar daerah. Dinamika ini perlu didukung sekaligus diantisipasi oleh pemerintah daerah agar pertambahan penduduk dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi wilayah, dan memacu dalam peningkatan pelayanan dasar.



Sumber: BPS, DDA Gorontalo Utara, 2024

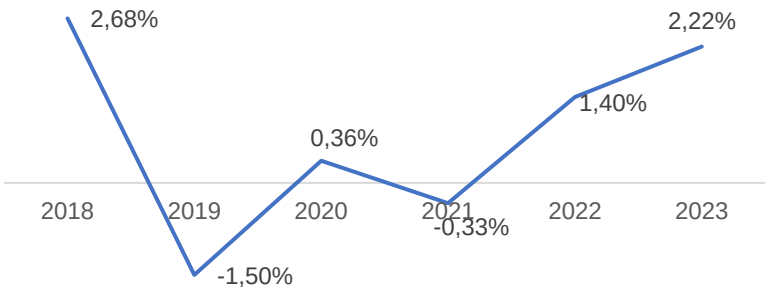
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 104.617 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 53.128 jiwa dan penduduk perempuan 51.489 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, berdasarkan Sensus Penduduk yang dilaksanakan pada bulan September 2020, diproyeksikan jumlahnya menjadi 126.521 jiwa dengan 64.594 penduduk laki-laki dan 61.927 penduduk perempuan. Berdasarkan proyeksi interim BPS Gorontalo Utara tahun 2022, jumlah penduduk telah mencapai 128.563.



Sedikit berbeda dengan jumlah penduduk yang dicatat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang mendasarkan datanya berdasarkan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK), mencatat pada tahun 2023 populasi telah mencapai 130.400 jiwa, meningkat 2,2 persen dibanding 127.580 jiwa di tahun 2022.

Rata-rata pertumbuhan penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2023 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 1,67 persen/tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk berdasarkan data Disdukcapil terlihat fluktuatif yang ditunjukkan oleh Grafik 2.2, dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan sesuai Tabel 2.20.

Grafik 2.2
Laju Pertumbuhan Penduduk Gorontalo Utara



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Tabel 2.20
Populasi Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)

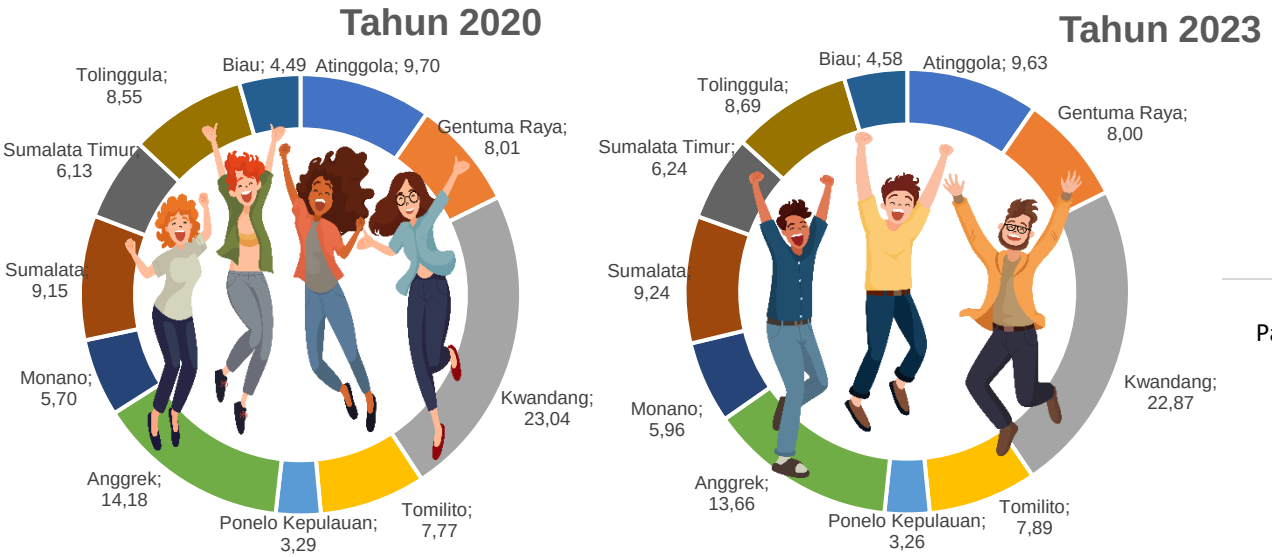
No.	Kecamatan	*2010			**2023		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Atinggola				6.395	6.156	12.551
2	Gentuma Raya				5.353	5.082	10.435
3	Tomilito				5.241	5.044	10.285
4	Ponelo Kepulauan				2.160	2.086	4.246
5	Kwandang				15.071	14.745	29.816
6	Anggrek				9.137	8.675	17.812
7	Monano				3.898	3.874	7.772
8	Sumalata Timur				4.174		8.137
9	Sumalata				6.197	5.846	12.043
10	Biau				3.051	2.926	5.977
11	Tolinggula				5.743	5.583	11.326
Jumlah		**53.128**	**51.489**	**104.617**	**66.420**	**63.980**	**130.400**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024
*Data proyeksi Badan Pusat Statistik
**Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.1.3.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk ditunjukkan dari persebaran jumlah penduduk dan angka kepadatan penduduk di setiap kecamatan. Analisis distribusi penduduk menentukan kesesuaian jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada. Kecamatan Kwandang dan Anggrek berpopulasi terbanyak, namun Kecamatan Ponelo Kepulauan adalah kecamatan terpadat.

Grafik 2.3
Komposisi Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Tabel 2.21
Kepadatan Penduduk

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km^2)		
		2010	2020	2023
1	Atinggola	39	22	47
2	Gentuma Raya	79	49	104
3	Kwandang	119	75	156
4	Tomilito		48	104
5	Ponelo Kepulauan		261	542
6	Anggrek	72	60	126
7	Monano		25	54
8	Sumalata	32	18	39
9	Sumalata Timur		19	41
10	Tolinggula	42	24	53
11	Biau		25	54
Gorontalo Utara		**59**	**70**	**73**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

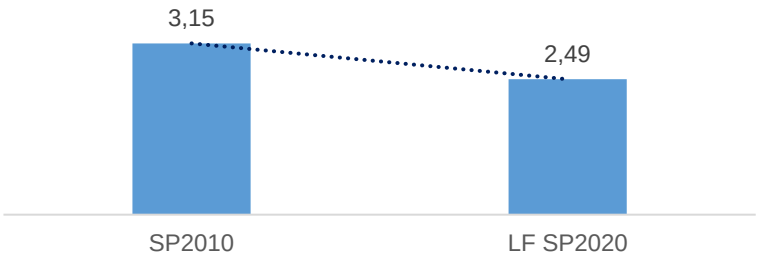
Meskipun kepadatannya relatif rendah, perlu diperhatikan bahwa seiring bertambahnya tahun, kepadatan diindikasikan semakin meningkat, hal lumrah jika dikorelasikan dengan perkembangan ekonomi Gorontalo Utara yang

semakin baik sehingga menarik migrasi ke dalam serta perbaikan layanan kesehatan. Namun demikian, dalam beberapa dekade mendatang kepadatan penduduk mungkin telah mencapai dua kali lipat kepadatan saat ini, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai ekses negatif atau permasalahan dalam pembangunan, yang biasanya mencakup sektor perumahan, kesehatan, pendidikan, transportasi, sanitasi dan lingkungan hidup, pertanian dan ketahanan pangan, serta ketenagakerjaan. Sedangkan di kawasan peruntukan perkotaan, akan memunculkan *slum area*.

2.1.3.4 Dinamika Penduduk

Dinamika penduduk di suatu wilayah dapat dilihat dari natalitas, mortalitas, serta migrasi/mobilitas. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur natalitas adalah angka kelahiran kasar, merupakan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1.000 penduduk, yang saat ini mencapai 21,44 kelahiran hidup diantara 1.000 penduduk Gorontalo Utara pada pertengahan tahun, dan angka kelahiran total (TFR), mencerminkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia suburnya (15-49 tahun) yang menunjukkan terjadinya penurunan dalam 1 dekade terakhir berdasarkan hasil *Long Form* SP2020 (LF SP2020). Penurunan fertilitas mengakibatkan proporsi anak-anak dalam populasi ikut menurun, yang mengakibatkan rasio ketergantungan menjadi lebih rendah dan menciptakan bonus demografi, sebesar 2,49 yang mendekati tingkat *replacement level* di 2,1. Perbandingan tren TFR pada dua sensus disajikan pada Grafik 2.4.

Grafik 2.4
Tren TFR Gorontalo Utara

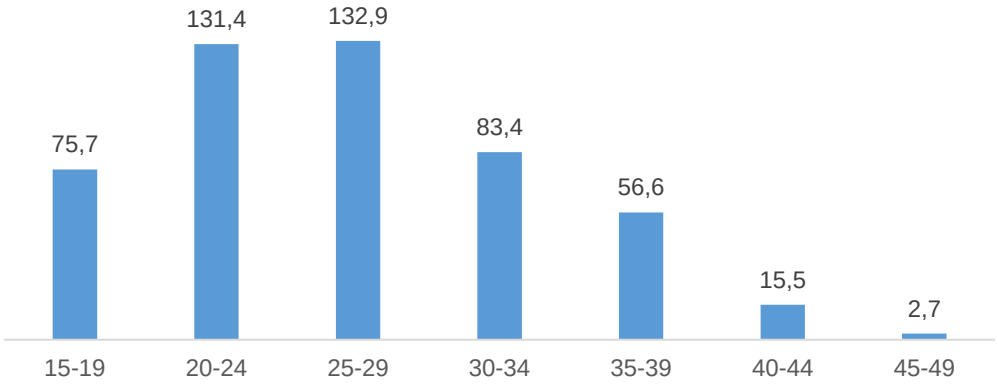


Sumber: BPS, *Long Form* SP2020

Pada angka kelahiran menurut kelompok umur tertentu, puncaknya terjadi pada perempuan usia 25-29 tahun. Menurut generasinya, kelahiran

didominasi oleh perempuan yang saat ini masuk pada kategori generasi milenial (kisaran usia 26-41 tahun). Detail informasi tersebut pada Grafik 2.5.

Grafik 2.5
Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Tertentu (ASFR)



Sumber: BPS, *Long Form* SP2020

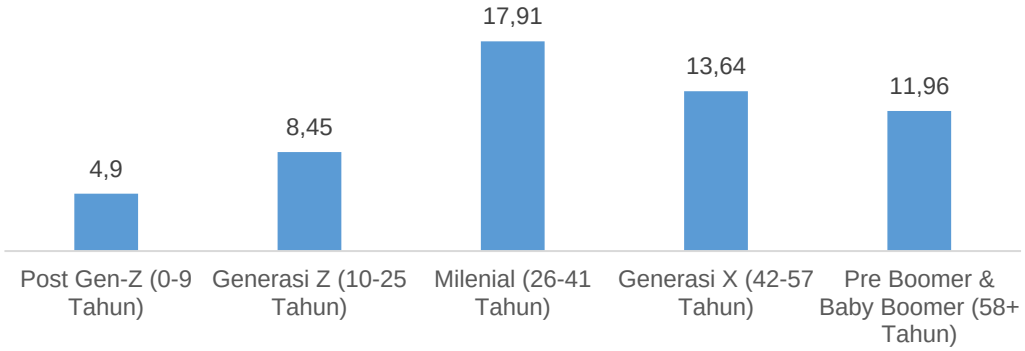
Migrasi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk, pelaku migrasi disebut migran. BPS membagi migran ke dalam dua kelompok, yaitu migran seumur hidup dan migran risen. Migran seumur hidup merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi (provinsi maupun kabupaten/kota) dengan tempat lahirnya. Sementara itu, migran risen merupakan penduduk yang tempat tinggal saat pencacahan berbeda wilayah administrasi dengan tempat tinggalnya pada lima tahun yang lalu.

Berdasarkan hasil LF SP2020 juga, sebanyak 11,62 (11 hingga 12 orang) dari 100 penduduk lahir di luar Gorontalo Utara, dengan lebih dari setengah migran seumur hidup tersebut berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, penduduk berstatus migran seumur hidup pada generasi milenial lebih tinggi daripada generasi yang lebih muda maupun lebih tua. Sebanyak 17-18 orang dari 100 penduduk milenial lahir di luar Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.6 berikut.



Disagregasi Berdasarkan Jenis Kelamin Migran Seumur Hidup di Gorontalo Utara

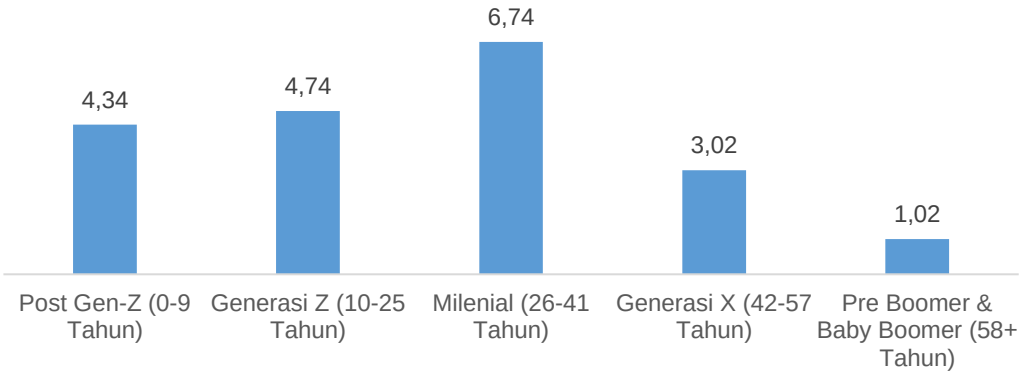
Grafik 2.6
Proporsi Penduduk Berstatus Migran Seumur Hidup Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi



Sumber: BPS, *Long Form* SP2020

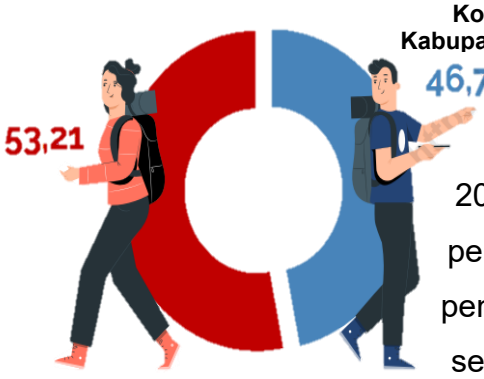
Pada migran risen, didapat angka 4,49, yang berarti sebanyak 4-5 dari 100 penduduk berumur 5 tahun ke atas di Gorontalo Utara bertempat tinggal di luar Gorontalo Utara pada 5 tahun sebelumnya (tahun 2017). Migran risen pada generasi milenial merupakan komposisi terbesar, dibandingkan generasi lainnya, dan lebih dari setengah migran risen berjenis kelamin perempuan, sebagaimana Grafik 2.7 berikut.

Grafik 2.7
Proporsi Penduduk Berstatus Migran Risen Antar Kabupaten/Kota Menurut Generasi



Sumber: BPS, *Long Form* SP2020

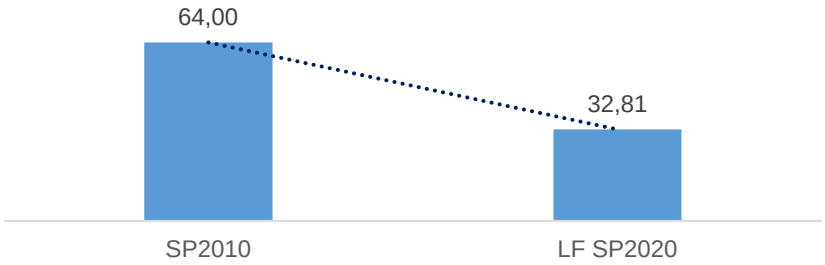
Komposisi Migran Risen Antar Kabupaten/Kota Menurut Jenis Kelamin



Selain mobilitas dan fertilitas, indikator lainnya yaitu mortalitas. Dalam rentang tahun 12 tahun (periode 2010-2022), penurunan angka kematian bayi mencapai 50 persen. Hal tersebut disinyalir sebagai buah dari peningkatan bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta peningkatan rata-rata lama pemberian ASI

(sumber: Susenas tahun 2019-2022) membuat bayi semakin mampu bertahan hidup, sebagaimana ditunjukkan Grafik 2.8.

Grafik 2.8
Angka Kematian Bayi



Sumber: BPS, *Long Form* SP2020

Angka kematian anak 1-4 tahun (*child mortality rate*) sebesar 7,56 yang berarti terdapat sekitar 7-8 kematian anak umur 1-4 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian Balita (*under 5 mortality rate*) mencapai 40,37 yang berarti pada setiap 1.000 kelahiran hidup, 40-41 diantaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

2.1.3.5 Penduduk Menurut Kepercayaan

Analisis jumlah penduduk menurut agama/kepercayaan mengkategorikan penduduk berdasarkan agama yang dianut. Besaran jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.22 berikut.

Tabel 2.22
Penduduk Menurut Kepercayaan di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1	Boalemo	145.257	1.885	155	2.464	7	-
2	Gorontalo	416.519	1.483	159	52	77	-
3	Pohuwato	137.789	4.659	256	1.328	8	-
4	Bonebolango	168.208	162	80	12	4	-
5	Gorontalo Utara	109.089	3.168	124	6	-	-
6	Kota Gorontalo	196.690	3.887	597	118	842	5
Provinsi Gorontalo		**1.173.552**	**15.244**	**1.371**	**3.980**	**938**	**5**

Sumber: Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Berdasarkan Tabel 2.22, agama yang dianut oleh penduduk Provinsi Gorontalo didominasi oleh Islam dengan persentase mencapai 98,19 persen. Komposisi tersebut menunjukkan julukan Gorontalo sebagai “Serambi Madinah” bukan isapan jempol belaka. Hal yang menjadi perhatian bagaimana konsep, nilai-nilai, dan norma agama yang dianut dapat tetap mewarnai aktivitas penduduk di tengah kemajuan dan modernisasi.

2.1.3.6 Penduduk Menurut Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dan potensi kekuatan pembangunan daerah dapat tercermin dari kualitas pendidikan penduduknya. Aspek pendidikan yang baik memegang peranan strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan sebagai sebuah proses yang berkesinambungan membutuhkan lembaga pendidikan formal dengan sistem persekolahan yang merupakan lembaga utama dalam mengembangkan pengetahuan, serta melatih kemampuan, keahlian, dan menanamkan sikap modern para individu yang diperlukan dalam proses pembangunan. Selain itu, proses pencerdasan SDM melalui peningkatan pendidikan merupakan elemen penting agar dapat menjaga tingkat daya saing dan keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dapat memberi gambaran tentang jenjang pendidikan tertinggi dan kualitas penduduknya dari segi pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat berdasarkan data tahun 2022 di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat disimak pada Tabel 2.23 berikut.

Tabel 2.23
Penduduk Menurut Pendidikan Ditamatkan

No.	Pendidikan Terakhir	Penduduk Tahun 2021		Penduduk Tahun 2022	
		Jiwa	(%)	Jiwa	(%)
1	Tidak/Belum Sekolah	24.078	19,14	24.547	19,45
2	Belum Tamat SD/Sederajat	19.327	15,36	19.375	15,35
3	Tamat SD/Sederajat	44.703	35,53	44.414	35,19
4	SLTP/Sederajat	13.234	10,52	13.309	10,54
5	SLTA/Sederajat	18.704	14,87	18.750	14,85
6	Diploma I/II	315	0,25	304	0,24
7	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	772	0,61	752	0,60
8	Diploma IV/Strata I	4.505	3,58	4.585	3,63
9	Strata II	174	0,14	184	0,15
10	Strata III	4	0,0032	3	0,00
JUMLAH		**125.816**	**100**	**126.223**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Jika melihat Tabel 2.23, komposisi penduduk yang mengenyam pendidikan hanya hingga level dasar (SD dan SMP/sederajat) masih sangat tinggi, bahkan di atas 50 persen akumulasi penduduk. Namun persentase yang ditamatkan pada jenjang dasar tahun 2022 telah berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, yang menunjukkan *eagerness* dan *awareness* masyarakat terhadap pentingnya pendidikan seiring waktu berjalan semakin baik. Hal ini

juga ditunjang dengan adanya kebijakan pemerintah yang terus menggalakkan urusan wajib di bidang pendidikan secara masif serta dukungan anggaran untuk pemenuhan SPM yang konsisten di atas 20 persen. Namun terlepas dari itu, perlu dilakukan kajian mendalam oleh pemerintah daerah perihal penyebab dari angka kriteria hanya tamat pendidikan dasar yang tinggi hingga kasus per kasus dan per area, sehingga bisa diambil kebijakan yang tepat sasaran/efektif dengan upaya yang efisien.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga dalam tata kelola pembangunan menjadi tujuan utama yang dikedepankan dalam berbagai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara. Pemerataan menjamin pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin golongan masyarakat, tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir golongan. Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai dengan tercapainya pemerataan atau inklusivitas hasil-hasil pembangunan. Dalam bagian ini akan diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

2.2.1 Fokus Produktivitas Daerah

1. Laju Pertumbuhan PDRB

Peningkatan kesejahteraan dalam paradigma ekonomi dicerminkan dengan kenaikan produksi masyarakat yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produksi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sektor unggulan yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah sektor yang berkontribusi besar secara konsisten dan kontinyu terhadap *output* yang dihasilkan masyarakat yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun

kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor, dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut lapangan usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut pengeluaran/*expenditure*), serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

PDRB pendekatan produksi pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB terdiri atas dua jenis, yakni PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHB merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK merupakan perhitungan suatu nilai barang dan jasa yang menggunakan tahun tertentu sebagai tahun dasar.

Selama tujuh tahun terakhir, produksi daerah selalu meningkat (kecuali pada ADHK tahun 2020 saat terjadi pandemi) baik jika dilihat menggunakan konsep harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.24
Pendapatan Domestik Regional Bruto Gorontalo Utara

No.	Tahun Pengamatan	PDRB ADHK (dalam Miliar Rupiah)	PDRB ADHB (dalam Miliar Rupiah)
1	2017	2.036,91	2.806,61
2	2018	2.177,97	3.079,62
3	2019	2.325,47	3.369,05
4	2020	2.325,06	3.429,39
5	2021	2.376,38	3.592,42
6	2022	2.454,88	3.853,83
7	2023	2.560,60	4.145,15

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Tabel 2.25
PDRB ADHB Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.422,4	1.594,36	1.757,9	1.801,03	1.897,17	2.000,04	2.140,77
Pertambangan & Penggalian	56,1	58,77	63,1	65,94	67,88	72,68	77,73
Industri Pengolahan	50,6	54,72	61,2	61,66	65,95	71,98	75,31
Pengadaan Listrik & Gas	0,9	0,97	1,1	1,26	1,32	1,45	1,53
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,3	0,37	0,4	0,42	0,44	0,45	0,47
Konstruksi	289,9	302,24	314,1	314,40	330,37	374,51	405,60
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil, & Sepeda Motor	255,8	289,77	331,6	332,23	349,87	398,06	445,91
Transportasi & Pergudangan	103,3	108,87	121,2	121,11	125,65	142,36	157,64
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	52,7	58,41	63,1	63,08	66,04	70,13	74,92
Informasi & Komunikasi	47,3	51,86	55,9	57,71	60,16	62,43	66,48
Jasa Keuangan & Asuransi	20,7	22,24	23,5	25,49	27,37	29,04	28,24
Real Estate	44,5	47,49	51,9	52,07	51,36	53,62	53,13
Jasa Perusahaan	1,6	1,68	1,8	1,71	1,76	1,95	1,94
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	221,4	226,49	238,42	238,42	240,31	253,45	268,49
Jasa Pendidikan	86,7	97,26	112,83	112,77	116,81	123,68	133,04
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	99,4	108,47	123,20	123,20	131,35	138,01	151,54
Jasa lainnya	53,0	55,65	58,82	56,82	58,61	60,00	62,41
Total	**2.806,6**	**3.079,62**	**3.369,05**	**3.429,39**	**3.592,42**	**3.853,83**	**4.145,15**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Tabel 2.26
PDRB ADHK Kabupaten Gorontalo Utara (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan	1.004,1	1.089,43	1.165,78	1.163,89	1.190,11	1.213,05	1.259,59
Pertambangan & Penggalian	41,4	42,58	44,69	44,47	45,24	47,09	49,27
Industri Pengolahan	35,0	36,97	40,76	40,76	42,60	44,76	45,22
Pengadaan Listrik & Gas	1,0	1,13	1,22	1,46	1,54	1,64	1,72
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,2	0,3	0,31	0,32	0,32	0,32	0,33
Konstruksi	211,1	215,64	220,16	220,20	223,50	236,93	247,51
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil, & Sepeda Motor	177,5	195,32	218,76	216,28	223,33	241,26	261,16
Transportasi & Pergudangan	77,5	81,22	88,81	87,02	88,93	95,61	100,49
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	36,4	39,50	41,97	41,67	43,27	45,05	47,58
Informasi & Komunikasi	39,2	43,01	46,03	49,42	51,46	52,67	54,77
Jasa Keuangan & Asuransi	14,9	15,74	16,37	17,49	18,14	17,87	16,89
Real Estate	28,3	29,92	32,36	32,43	31,80	32,84	32,28
Jasa Perusahaan	1,1	1,16	1,23	1,15	1,16	1,26	1,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	190,7	194,24	199,37	199,41	199,46	204,47	211,49
Jasa Pendidikan	65,2	71,13	77,65	79,68	81,43	84,29	89,01
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	75,4	81,65	89,20	90,28	94,16	95,59	100,60
Jasa lainnya	37,7	39,07	40,81	39,13	39,93	40,17	41,48
Total	**2.036,9**	**2.177,97**	**2.325,47**	**2.325,06**	**2.376,38**	**2.454,88**	**2.560,60**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024



Berdasarkan Tabel 2.25 dan Tabel 2.26, sektor yang secara konsisten memiliki nilai *output* tinggi dalam PDRB yaitu sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; sektor Kontruksi; sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; serta sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Berkembangnya sektor perdagangan secara konsisten merupakan salah satu indikator positif bagi tumbuhnya ekonomi Gorontalo Utara karena peran *privat sector* sebagai penggerak ekonomi telah meningkat.

Secara komposisi, sektor primer seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memberikan kontribusi terbesar dalam nilai PDRB, sekaligus menunjukkan perekonomian lokal Gorontalo Utara masih bergantung pada sektor tersebut. Sementara sektor lainnya yang non-primer seperti sektor industri dan jasa belum banyak memberikan dampak yang signifikan seperti terlihat pada Tabel 2.27 di bawah ini.

Tabel 2.27
Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Persen)

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	49,49	50,72	51,77	52,17	52,52	52,81	51,90	51,65
Pertambangan & Penggalian	2,10	1,99	1,91	1,87	1,92	1,89	1,89	1,88
Industri Pengolahan	1,89	1,79	1,78	1,82	1,80	1,84	1,87	1,82
Pengadaan Listrik & Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, & Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Konstruksi	10,75	10,34	9,81	9,31	9,17	9,20	9,72	9,78
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	8,84	9,04	9,41	9,84	9,69	9,74	10,33	10,76
Transportasi & Pergudangan	3,82	3,67	3,54	3,60	3,53	3,50	3,69	3,80
Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,82	1,87	1,90	1,87	1,84	1,84	1,82	1,81
Informasi & Komunikasi	1,67	1,69	1,68	1,65	1,68	1,67	1,62	1,60
Jasa Keuangan & Asuransi	0,70	0,74	0,72	0,70	0,74	0,76	0,75	0,68
Real Estate	1,63	1,58	1,54	1,54	1,52	1,43	1,39	1,28
Jasa Perusahaan	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	8,62	7,90	7,35	7,01	6,95	6,69	6,58	6,48
Jasa Pendidikan	3,02	3,10	3,16	3,22	3,29	3,25	3,21	3,21
Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	3,57	3,53	3,52	3,56	3,59	3,66	3,58	3,66
Jasa lainnya	1,98	1,91	1,81	1,75	1,66	1,63	1,56	1,51
TOTAL	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Di masa mendatang, perekonomian daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus tetap mengedepankan kemajuan sektor kelautan dan pertanian karena sektor ini merupakan soko guru/identitas asli masyarakat Gorontalo Utara yang berada di wilayah pesisir, bersifat *infinite resources*, dengan upaya modernisasi dan peningkatan alat produksi/modal. Selain itu, juga dengan mendorong kemajuan sektor lainnya terutama turunan dari sektor primer seperti sektor jasa dan industri pengolahan, sehingga *level of dependency* kepada sektor primer semakin berkurang. Transformasi dari sektor primer ke sektor lainnya harus bertahap dan *by design*, karena sektor primer sesuai sifatnya bersifat rentan terhadap perubahan alam. Sektor jasa/ekonomi kreatif harus terus didorong dan menyatu dengan identitas asli masyarakat Gorontalo Utara sebagai pengelola agraris, sehingga diharapkan menjadi *second driver* terhadap sinergitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif identitas lokal dari sektor kelautan/maritim yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Tabel 2.28
PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.862,07	2.037,39	2.077,11	2.178,77	2.331,62	2.500,92
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	47,33	53,09	52,91	54,91	59,58	64,83
3	Konsumsi Pemerintah	675,78	710,43	675,98	701,20	722,09	745,79
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	957,28	1.009,77	1.020,39	1.068,68	1.144,03	1.221,81
5	Perubahan Inventori	59,65	62,39	49,28	45,89	47,99	50,69
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-	-
Total PDRB		**3.079,62**	**3.369,05**	**3.429,39**	**3.592,42**	**3.853,83**	**4.145,15**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Kinerja perekonomian PDRB juga dilihat dari sisi pengeluaran. PDRB ADHB sisi pengeluaran menunjukkan porsi penyumbangan pengeluaran perekonomian antara tahun 2018-2023. Berdasarkan data pada Tabel 2.28, komponen pengeluaran PDRB ADHB mengalami kenaikan signifikan yang dipengaruhi perubahan harga dan juga perubahan volume. Sektor Konsumsi Rumah Tangga menyumbang lebih dari 50 persen agregat pengeluaran, yang juga berhubungan dengan tingkat inflasi yang mempengaruhi daya beli

masyarakat konsumsi barang dan jasa, yang lebih lanjut juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain itu, unsur Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang memberikan gambaran investasi, memberikan kontribusi sebesar 29,47 persen kepada perekonomian, yang berhubungan dengan kondisi iklim investasi di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.29
PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Rumah Tangga	1.293,77	1.383,24	1.386,92	1.425,05	1.476,26	1.536,57
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	34,67	38,22	37,78	38,35	40,15	42,08
3	Konsumsi Pemerintah	451,45	471,55	442,30	445,28	446,53	448,66
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	720,31	746,98	744,47	759,71	778,14	804,87
5	Perubahan Inventori	31,76	32,38	25,25	22,88	23,16	23,51
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-	-
Total PDRB		**2.177,97**	**2.325,47**	**2.325,06**	**2.376,38**	**2.454,88**	**2.560,60**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Berbeda halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 dan 2019, tetapi mengalami perlambatan di tahun 2020 kecuali untuk komponen konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2021 s.d. 2023, seluruh komponen kembali menunjukkan peningkatan kecuali komponen perubahan inventori yang nilainya tidak dapat melebihi nilai pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 2.30, selama periode tahun 2018 s.d. 2023, produk yang dikonsumsi sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 60 persen). Selain itu, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi diatas 29 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 18 hingga 22 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik cukup besar. Sedangkan net ekspor tidak tergambarkan.

Tabel 2.30
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Persen)

No.	Komponen Pengeluaran	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Rumah Tangga	60,46	60,47	60,57	60,65	60,50	60,33
2	Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,54	1,58	1,54	1,53	1,55	1,56
3	Konsumsi Pemerintah	21,94	21,09	19,71	19,52	18,74	17,99
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,08	29,97	29,75	29,75	29,69	29,48
5	Perubahan Inventori	1,94	1,85	1,44	1,28	1,25	1,22
6	Net Ekspor	-	-	-	-	-	-
Total PDRB		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan *output* agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Walaupun begitu, pertumbuhan ekonomi bukanlah merupakan tujuan akhir dari pembangunan, melainkan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya.

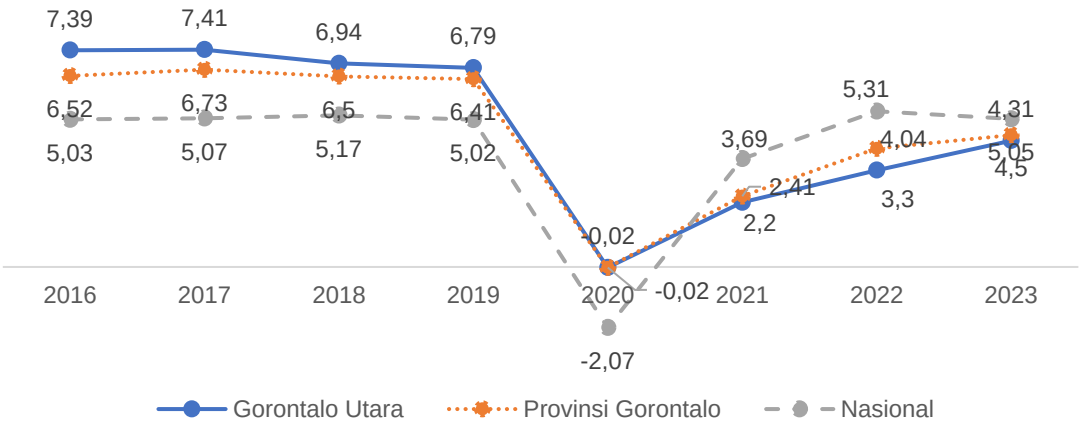
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara selama tujuh tahun terakhir (tahun 2016–2023) fluktuatif. Jika pada tahun 2016 bisa mencapai 7,39 persen, dilanjutkan *slope* yang *downward* hingga pada tahun 2019 menjadi hanya 6,79 persen. Pada tahun 2020, terjadi anomali akibat pandemi/wabah yang mematahkan seluruh prediksi pertumbuhan ekonomi lokal bahkan global dari yang diperkirakan akan positif, justru mengarah kepada resesi. Tak terkecuali di Gorontalo Utara yang ekonominya mengalami pukulan telak, sehingga mengakibatkan *output* yang dihasilkan oleh masyarakat turun drastis, bahkan pertumbuhannya menyentuh angka negatif meskipun tidak separah angka nasional.

Kontraksi LPE akibat wabah saat itu berusaha dikurangi dengan berbagai kebijakan strategis daerah yang bersifat mengurangi dampak sekaligus mendorong ekonomi untuk *rebound*, seperti mengalokasikan anggaran lebih besar untuk penanganan kesehatan, Jaring Pengaman Sosial (JPS), stimulus bagi menggeliatnya sektor UMKM, hingga percepatan penyerapan anggaran

untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang didengungkan pemerintah pusat. Berbagai upaya yang ditempuh tersebut bertujuan untuk memelihara daya beli masyarakat selama pandemi. Tiga tahun terakhir terlihat upaya tersebut menunjukkan hasil positif dengan tren kurva pertumbuhan ekonomi berbentuk "V" (*V-shaped*) yang artinya trajektori akan segera pulih seperti sedia kala seperti sebelum pandemi.

Jika dilihat dari Grafik 2.9, tren pergerakan LPE Gorontalo Utara searah dengan LPE Provinsi Gorontalo selama delapan tahun terakhir. Bahkan di tahun 2020, LPE yang dicapai sama persis di angka -0,02 persen, sekaligus menunjukkan bahwa fundamental dan teknikal ekonomi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Gorontalo memiliki kemiripan.

Grafik 2.9
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Gorontalo Utara dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (Persen)



Sumber: BPS Pusat, BPS Provinsi Gorontalo, dan BPS Gorontalo Utara, 2024

2. PDRB dan Pengeluaran Per Kapita

Selain LPE, indikator lain yang bisa dianalisa dari output ekonomi tahunan yaitu nilai PDRB perkapita. PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS di Tabel 2.31 menunjukkan bahwa PDRB perkapita masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2016-2019 baik berdasarkan harga konstan tahun 2010 maupun harga berlaku menunjukkan tren peningkatan seiring dengan lebih tingginya LPE bila dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Hal tersebut merupakan hasil yang positif karena menunjukkan akselerasi ekonomi masyarakat dan wilayah secara keseluruhan karena proses pembangunan yang bersama-sama dilakukan seluruh komponen daerah telah

berjalan dengan baik. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, LPE negatif di 2020 mengakibatkan *outlier* pada tren PDRB perkapita. Dengan besaran LPE yang berada dibawah laju pertumbuhan penduduk, otomatis mengakibatkan kurva PDRB terkoreksi membentuk jurang. Kondisi yang jauh lebih baik tergambar mulai tahun 2021, dimana PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 menunjukkan kenaikan yang signifikan, bahkan berada di atas capaian tahun 2019.

Tabel 2.31
PDRB Per Kapita Gorontalo Utara

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHB (miliaran rupiah)	2.806,6	3.079,62	3.369,05	3.429,39	3.592,42	3.853,83	4.145,15
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	2.036,9	2.177,97	2.325,47	2.325,06	2.376,38	2.454,88	2.560,60
3	Jumlah Penduduk	112.975	114.036	115.070	124.957	126.521	128.563	130.722
4	PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah)	24.842,66	27.005,68	29.278,27	27.444,56	28.393,86	29.976,20	31.709,65
5	PDRB Perkapita ADHK (jutaan rupiah)	18.029,65	19.098,97	20.209,18	18.606,88	18.782,49	19.094,76	19.588,13

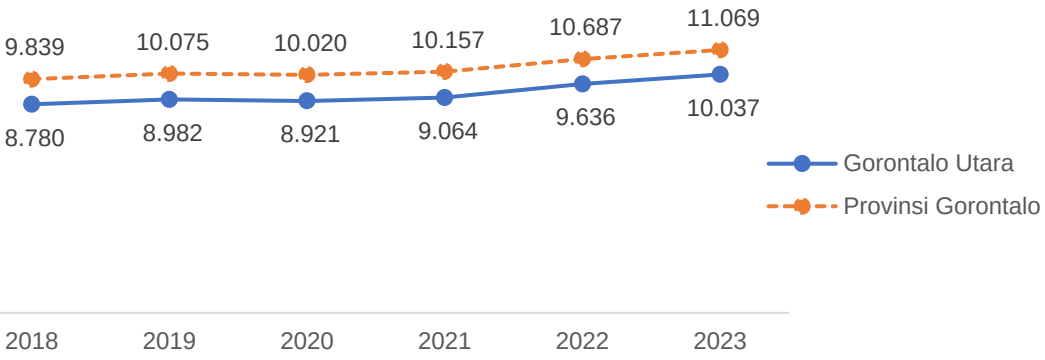
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Terlepas dari keberhasilan secara statistik, pemerintah daerah tidak bisa hanya melihat hasil perhitungan PDRB perkapita untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduknya secara utuh, karena berbagai kelemahan metode ini, seperti ketidakmampuannya dalam menggambarkan pemerataan pendapatan dan pola pengeluaran penduduk yang beragam. Pendapatan perkapita hanya memperlihatkan tingkat pendapatan suatu masyarakat secara rata-rata, yang bisa saja pada kenyataannya ada beberapa orang yang memiliki pendapatan sangat besar dan beberapa lainnya sangat rendah. Selain itu, seringkali kenaikan pendapatan perkapita tidak dibarengi dengan naiknya kualitas hidup masyarakatnya. Kelemahan lainnya, pertumbuhan ekonomi mencerminkan tumbuhnya balas jasa faktor produksi yang tidak mengenal lokasi. Misalnya tingginya balas jasa kepemilikan hotel dan restoran di Kota Gorontalo belum tentu mengalir ke penduduk Kota Gorontalo. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga harus memperhitungkan indeks gini untuk melihat sejauh mana jurang pendapatan penduduknya.

Selain pendapatan per kapita, digunakan juga indikator pengeluaran rata-rata per kapita yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian,

pemberian, maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga. Indikator tersebut ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ini digunakan juga sebagai komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia. Di Gorontalo Utara, secara tren, pencapaian indikator tersebut terus meningkat yang secara umum mencerminkan kesejahteraan/daya beli masyarakat meningkat sebagaimana Grafik 2.10, meskipun sempat mengalami gangguan/*shock* pada tahun 2020 akibat pandemi.

Grafik 2.10
Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan (Ribuan Rupiah)



Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2024

Terlepas dari hal itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pendapatan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Selain faktor ekonomi, faktor-faktor non-ekonomi seperti perbedaan kondisi alam dapat menentukan pola pengeluaran masyarakat. Karena berdasarkan pola masyarakat di seluruh dunia, masyarakat yang tinggal di dataran rendah relatif lebih sejahtera dibanding masyarakat yang tinggal di dataran tinggi. Masyarakat di dataran rendah pada umumnya menghadapi tantangan alam yang lebih "ringan" dibanding masyarakat penghuni dataran tinggi. Di dataran rendah, usaha untuk bercocok tanam/bertani lebih mudah dilakukan, dan energi yang dikeluarkannya pun relatif lebih sedikit, seperti pada usaha perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

1. Laju Inflasi

Laju inflasi adalah salah satu indikator penting dalam bahan analisis ekonomi karena menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang

terjadi karena adanya kegiatan ekonomi melalui proses *supply* dan *demand*. Laju inflasi suatu daerah, khususnya di Provinsi Gorontalo, tidak terlepas dari fenomena nasional dan global, seperti pengaruh harga bahan bakar minyak global atau perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. Secara umum, inflasi dapat dikarenakan dua faktor, yakni inflasi akibat adanya permintaan yang kuat terhadap suatu barang sedangkan barang tersebut masih sama tingkat penawarannya (*demand-pull inflation*). Penyebab lainnya dikarenakan adanya kenaikan biaya produksi (*cost-push inflation*), termasuk disini kelangkaan produksi atau juga kelangkaan distribusi walau permintaan secara umum tidak terjadi adanya kenaikan. Penyebab terakhir karena adanya peningkatan jumlah uang beredar secara tiba-tiba misalnya pada saat pembagian Tunjangan Hari Raya hari besar keagamaan. Kenaikan atau penurunan harga barang/jasa mempunyai kaitan yang erat dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Indikator yang sering digunakan untuk perhitungan inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan/inflasi atau tingkat penurunan/deflasi dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survey Biaya Hidup (SBH) yang saat ini dilakukan oleh BPS di 150 kota (90 kota cakupan lama, dan 60 cakupan kota baru) secara nasional, baik harga di pasar tradisional maupun pasar modern atas sebelas kelompok pengeluaran, seperti pengeluaran sandang, bahan makanan, kesehatan, dan lainnya.

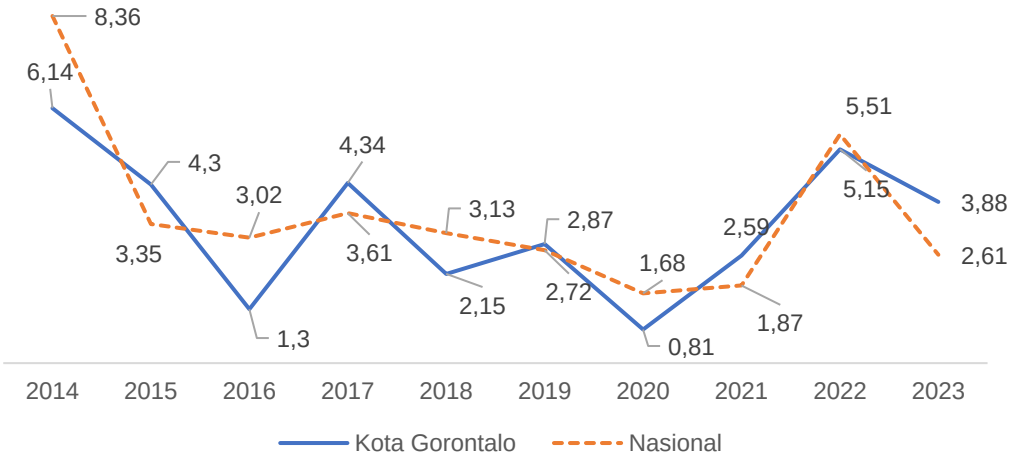
Perhitungan inflasi melalui IHK tidak secara spesifik dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara, alih-alih dilakukan di Kota Gorontalo sebagai lokus perhitungan IHK di Provinsi Gorontalo (dan Kabupaten Gorontalo, sebagai *proxy* dari inflasi perdesaan per Januari 2024), karena komoditas yang digunakan sebagai bahan perhitungan dan analisa inflasi barang dan jasa tidak seluruhnya tersedia di Gorontalo Utara, serta *scope* ekonominya yang

masih kecil. Untuk mengawasi pergerakan harga, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH).

IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harian harga-harga dua puluh komoditas pangan yang memiliki bobot besar dalam IHK dan dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Keunggulannya, seperti dapat dikendalikan dalam jangka pendek, dapat digunakan sebagai sarana evaluasi kinerja kepala daerah dalam pengendalian inflasi, dan mudah dihitung dan dipahami. Dua puluh komoditas yang termasuk dalam penghitungan IPH adalah beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, daging sapi, tepung terigu, ikan bandeng, ikan nila, ikan lele, kangkung, bayam, wortel, tomat, pisang, dan jeruk. Dengan IPH, diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan. IPH juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, dan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada inflasi.



Grafik 2.11
Laju Inflasi (YoY) di Kota Gorontalo dan Nasional
Tahun 2014–2023 (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo Dalam Angka (BPS), 2024

Pada tahun 2014, 2016, 2018, 2020, dan 2022 laju inflasi tahunan nasional lebih tinggi daripada laju inflasi tahunan Kota Gorontalo, sebaliknya tahun 2015, 2017, 2019, 2021, dan 2023 laju inflasi tahunan Kota Gorontalo lebih tinggi daripada laju inflasi tahunan nasional. Selama tahun 2022, inflasi di Kota Gorontalo cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2021. Utamanya dipicu oleh kebijakan kenaikan harga BBM dan gas. Secara umum bisa dilihat bahwa tren inflasi dari tahun 2014 hingga 2020 cenderung menurun, sebelum mengalami kenaikan di 2 periode berikutnya.

Pada tahun 2022, seiring dengan pulihnya permintaan pasca pandemi, mengakibatkan ketidakseimbangan *supply-demand* yang memicu kenaikan harga komoditas. Adanya perang dan ketegangan geopolitik di sejumlah wilayah juga mendisrupsi rantai pasokan barang dan jasa sehingga memicu kenaikan harga pangan dan energi. *Money tight policy* di berbagai negara akibat tingginya inflasi menyebabkan sejumlah negara menaikkan tingkat suku bunga sehingga memicu *capital outflow* terutama pada negara berkembang.

Untuk mengendalikan inflasi, berbagai program kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, dukungan perhubungan laut dan darat untuk membuka akses lalu lintas barang, serta kebijakan sektoral lainnya diantaranya program pasar murah, program Pola Pangan Lestari, Germas Batari (Gerakan Masyarakat Tanam Rica/Cabe), Gerakan Silakan Menanam, serta kegiatan inovatif lainnya. Meskipun demikian, fluktuasi inflasi justru lebih sering terjadi akibat faktor-faktor eksternal. Perlu upaya-upaya inovatif dan konsisten agar penanggulangan inflasi dapat menghasilkan *outcome* yang baik.

2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian keseluruhan pembangunan non-fisik suatu daerah yang direpresentasikan oleh tiga dimensi, yakni umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan kualitas hidup yang layak (*decent standart of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Dengan pengukuran IPM setidaknya ada tiga manfaat yang diperoleh: Pertama, IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia; Kedua, IPM dapat menentukan peringkat/level pembangunan setiap daerah; Ketiga, IPM dapat digunakan sebagai salah satu faktor penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Sejak tahun 2010, BPS telah menyesuaikan metode perhitungan IPM dengan indikator yang lebih mencerminkan data yang lebih valid di lapangan. Indikator angka melek huruf diganti oleh rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Sementara itu dari sisi pendapatan, PNB perkapita menggantikan PDB perkapita karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat di wilayah tertentu. Selain itu, dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lainnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk membangun manusia seutuhnya, keseluruhan dimensi tersebut harus diperhatikan dan memiliki prioritas yang seimbang.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Angka Harapan Hidup (AHH) waktu lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan menggunakan gabungan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Indeks Ekonomi yang dihitung berdasarkan kemampuan/paritas daya beli. Klasifikasi IPM berdasarkan nilainya yaitu: Sangat Tinggi (≥80); Tinggi (70≤IPM<80); Sedang (60≤IPM<70); Rendah (<60).

IPM semakin meningkat tahun demi tahun seperti yang terlihat pada Tabel 2.32 dan Tabel 2.33, hal ini tidak lepas dari peran unsur pemerintah, swasta, akademisi, termasuk masyarakat. Pun jika dilihat dari akselerasi kenaikan di 2021 dan 2022, meskipun di saat yang bersamaan terjadi badai pandemi, Kabupaten Gorontalo Utara “sukses” tumbuh masing-masing sebesar 2,74 dan 1,16 persen, berada di atas beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, bahkan di atas pencapaian Provinsi Gorontalo sendiri.

Jika diamati lebih dekat dari tiga komponen pembentuk IPM, kenaikan angka IPM Gorontalo Utara disokong oleh positifnya seluruh komponen dimensi. Pada komponen dimensi hidup layak yang pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 diakibatkan terpaan badai pandemi, di 3

tahun kemudian berturut-turut terlihat kembali meningkat seiring dengan pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat dan ekonomi wilayah secara keseluruhan.



Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang masih lebih rendah dibanding 2019, selain itu relatif rendahnya uang beredar (yang bukan diakibatkan oleh faktor *saving* dan *investment*) di masyarakat (tergambar pada angka pengeluaran per kapita masyarakat Gorontalo Utara terendah nomor 2 di Provinsi Gorontalo) menggambarkan daya beli masyarakat yang rendah yang sebagian diakibatkan oleh pandemi.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota dan Akselerasi Kenaikan IPM di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	IPM Tahun					Akselerasi Perubahan (%)			
		2019	2020	*2021	*2022	*2023	2020	2021	2022	2023
1	Boalemo	65,53	65,91	67,02	67,86	68,78	0,58	1,68	1,25	1,36
2	Gorontalo	66,69	66,92	68,53	69,51	70,37	0,34	2,41	1,43	1,24
3	Pohuwato	65,27	65,37	67,93	68,67	69,30	0,15	3,92	1,09	0,92
4	Bone Bolango	69,63	69,98	70,76	71,39	71,97	0,50	1,11	0,89	0,81
5	Gorontalo Utara	64,52	64,86	66,64	67,41	68,00	0,53	2,74	1,16	0,88
6	Kota Gorontalo	77,08	77,13	77,41	78,22	78,64	0,06	0,36	1,05	0,54
Provinsi		**68,49**	**68,68**	**69,82**	**70,62**	**71,25**	**0,28**	**1,66**	**1,15**	**0,89**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024
*IPM menggunakan UHH hasil LF SP2020

Tabel 2.33
Komponen IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/ Kota	Komponen											
		*AHH			HLS			RLS			Pengeluaran (Ribu Rupiah)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Boalemo	70,64	70,94	71,24	12,45	12,46	12,48	7,00	7,03	7,30	8.940	9.543	9.941
2	Gorontalo	70,28	70,54	70,81	13,18	13,19	13,21	7,30	7,61	7,79	9.412	9.850	10.336
3	Pohuwato	68,74	69,07	69,40	12,38	12,39	12,46	7,26	7,35	7,59	10.409	10.913	11.018
4	Bonebolango	69,60	69,90	70,19	13,65	13,66	13,67	8,32	8,33	8,35	10.198	10.676	11.114
5	Gorontalo Utara	69,02	69,33	69,65	12,46	12,47	12,49	7,15	7,16	7,17	9.064	9.636	10.037
6	Kota Gorontalo	72,53	72,88	73,25	14,50	14,57	14,58	10,37	10,39	10,40	12.390	13.077	13.351
Provinsi		**69,93**	**70,22**	**70,50**	**13,11**	**13,12**	**13,16**	**7,90**	**8,02**	**8,10**	**10.157**	**10.687**	**11.069**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024
Angka Harapan Hidup (AHH): Hasil LF SP2020
Harapan Lama Sekolah (HLS)
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Semakin meningkatnya indeks dimensi pendidikan, yang diterjemahkan oleh rata-rata dari capaian angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama

sekolah, salah satu penyebabnya karena semakin besarnya proporsi anggaran pendidikan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah dan pusat, salah satunya program unggulan sekolah gratis, dengan disertai meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Anak-anak usia 7 tahun memiliki harapan bersekolah selama 12,49 tahun, sedangkan penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 7,17 tahun. Pencapaian ini sudah positif karena meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun jika melihat angka statistik yang dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara membutuhkan dorongan yang lebih besar untuk meningkatkan skor dimensi pendidikan tersebut.

Peningkatan serupa juga terjadi di indeks dimensi kesehatan yang diterjemahkan oleh angka harapan hidup. Peningkatan ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara secara umum menjadi lebih baik setiap tahunnya, bahkan stabil meningkat di satu dekade terakhir, yang disebabkan makin baiknya kualitas layanan kesehatan.

Meskipun terlihat positif, jika dilihat dari angka mutlak, sebenarnya capaian IPM Gorontalo masih tertinggal sangat jauh dibandingkan daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, masuk pada kategori “Sedang” bersama Kabupaten Pohuwato dan Boalemo. Perlu penguatan dan fokus untuk akselerasi peningkatan capaian IPM melalui kebijakan jangka panjang dan menengah, fokus pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, menciptakan investasi, pembangunan pariwisata, peningkatan nilai tambah dengan modernisasi sektor primer dan pelengkapan fasilitas infrastruktur bagi industri. Dari sisi mikro berupa peningkatan kinerja sektor UMKM, mendorong pelaksanaan kegiatan padat karya, pemerataan pembangunan, peningkatan akses perbankan bagi petani dan nelayan, serta alokasi anggaran pada kantong-kantong/wilayah-wilayah yang tingkat kesejahteraannya rendah.

Jika dilihat dari *trend*-nya, perkembangan kenaikan IPM Gorontalo Utara juga memiliki kaitan yang erat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan, membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal balik (*two-way relationships*) antara modal manusia

(*human capital*) dan pertumbuhan ekonomi. Pertama adalah dari pertumbuhan ekonomi ke pembangunan manusia (*human development*). Perekonomian (PDRB) mempengaruhi pembangunan manusia, khususnya melalui aktivitas rumah tangga dan pemerintah. Di sisi lain, dengan semakin tingginya pembangunan manusia, akan mempengaruhi ekonomi melalui peningkatan kapabilitas masyarakat. Sebagai konsekuensinya akan mengakibatkan peningkatan kreativitas dan produktivitas masyarakat. Stabilitas pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu daerah tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi.

Dengan menempatkan peningkatan pembangunan manusia sebagai tujuan akhir dari proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara, diharapkan dapat menciptakan peluang yang secara langsung menyumbang terhadap cita-cita pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

3. Indeks Gini

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Indeks Gini/Gini Ratio adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (*income disparity*) secara menyeluruh di suatu daerah. Karena menurut metode ini, kita dapat mengetahui sejauh mana pembangunan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat (*people prosperity*). Indeks ini didasarkan pada Kurva Lorentz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi seragam/*uniform* yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan dalam Indeks Gini berada pada kisaran 0 (nol) hingga 1 (satu). Nilai nol menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin mendekati satu, semakin besar ketimpangan pengeluaran antar kelompok yang terjadi pada penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Semakin besar atau melebarnya indeks tersebut, maka kelompok miskin lebih lambat untuk menjadi kaya dan kelompok kaya semakin cepat untuk bertambah kaya. Nilai rasio gini yang dianggap tinggi jika berkisar pada angka 0,50 sampai 0,70, sedangkan nilai 0,20 sampai 0,35 tergolong yang distribusi pendapatannya relatif merata.



Ketimpangan pendapatan dalam Indeks Gini dapat ditentukan oleh adanya perbedaan tingkat pembangunan di masyarakat, heterogenitas etnis, adanya kediktatoran dan kegagalan pemerintah dalam menghargai *property rights*. Ketimpangan pendapatan ini akan menghambat pertumbuhan, yang implikasi negatifnya adalah terjadinya inefesiensi ekonomi, lemahnya stabilitas sosial dan solidaritas serta ketidakadilan. Faktor penyebabnya bisa dikarenakan kondisi demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, perbedaan status sosial dan letak geografis.

Perbandingan tingkat ketimpangan masyarakat antar golongan pendapatan antara kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dan nasional dapat dilihat di Tabel 2.34 berikut.

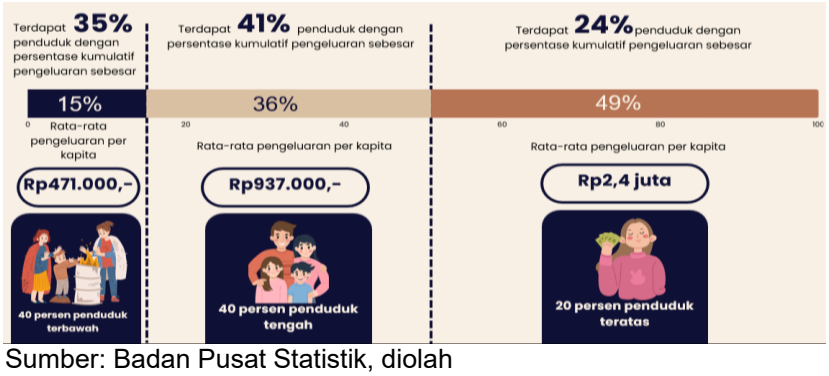
Tabel 2.34
Indeks Gini Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Boalemo	0,383	0,379	0,369	0,405	0,391	0,394
2	Kabupaten Gorontalo	0,412	0,381	0,416	0,389	0,413	0,418
3	Kabupaten Pohuwato	0,358	0,406	0,385	0,413	0,390	0,400
4	Kabupaten Bonebolango	0,348	0,382	0,362	0,364	0,400	0,409
5	Kabupaten Gorontalo Utara	0,411	0,390	0,409	0,404	0,434	0,424
6	Kota Gorontalo	0,380	0,377	0,373	0,406	0,396	0,391
Provinsi Gorontalo		**0,403**	**0,407**	**0,408**	**0,408**	**0,418**	**0,417**
Nasional		**0,389**	**0,382**	**0,381**	**0,384**	**0,384**	**0,388**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Pada tahun terakhir, ketimpangan pendapatan masyarakat baik di Kabupaten Gorontalo Utara maupun di Provinsi Gorontalo meskipun masih tinggi semakin membaik. Kondisi statistik tersebut, apabila dikaitkan dengan PDRB Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo yang terus mengalami peningkatan, menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam distribusi pendapatan penduduk, sehingga diperlukan upaya-upaya penciptaan pemerataan distribusi pendapatan. Diantaranya perlu dilakukan perluasan akses perbankan terhadap *unbanked people* agar masyarakat dapat meningkatkan peluang terhadap ketersediaan sumberdaya dan faktor produksi. Bagaimana caranya agar masyarakat di Gorontalo Utara menjadi *bank-minded*, paham terhadap produk-produk dan jasa Perbankan, sadar akan hak dan kewajibannya sebagai nasabah, serta sadar perlunya aspek kehati-hatian (*prudentiality*) dalam melakukan berbagai transaksi keuangan (*risk awareness*) serta mengenali ketersediaan sarana pengaduan Perbankan dan penyelesaian sengketa dengan bank. Akses Perbankan melalui teknologi digital juga bisa ditingkatkan sehingga literasi dan pemahaman masyarakat akan meningkat dengan biaya yang murah dan efisien.

Gambar 2.20
Ketimpangan Pengeluaran Tahun 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Upaya menekan Indeks Gini di level nasional dapat diwujudkan dengan beberapa cara, diantaranya: Pertama, menekan jumlah penduduk yang masih berada di bawah jaring kemiskinan (bukan angka kemiskinan), adanya redistribusi kepemilikan aset melalui *land reform*, misal melalui pembagian tanah pemerintah yang tidak digunakan kepada warga agar dapat dikelola. Kedua, pajak kekayaan atau pendapatan yang progresif dengan harapan adanya transfer pendapatan dari golongan kaya ke miskin. Ketiga, keringanan atau pembebasan pajak bagi golongan masyarakat prasejahtera. Dan terakhir, optimalisasi penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

Kebijakan program-program bantuan serta pengendalian inflasi yang dilaksanakan juga bisa turut memberikan sumbangsih bagi bergeraknya indeks tersebut ke arah 0 (nol) dengan cara mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dengan tetap berusaha memastikan penerima program tersebut benar-benar merupakan target prioritas untuk mendapatkan intervensi sosial sehingga dampak dari setiap rupiah APBD yang dibelanjakan dapat mengerek indeks dan ekonomi wilayah ke arah yang lebih baik.

Namun demikian, penggunaan indikator ketimpangan melalui Indeks Gini, bukanlah suatu hal yang sempurna. Tidak diperhitungkannya golongan berpendapatan menengah menjadi keterbatasan terbesarnya. Pembagian kelompok/golongan pendapatan dengan kategori yang berbeda yang lebih dari 3 (N>3), akan memungkinkan hasil perhitungan yang diperoleh menjadi lebih besar dari satu (G>1) atau dengan kriteria tidak terdefinisikan. Keterbatasan ini akan menyebabkan metode perhitungan Gini Ratio akan menghasilkan ukuran yang kurang akurat. Metode perhitungan Koefisien Gini dengan N=3 tidak memperhitungkan peran golongan menengah (X_2) akan berimbas pada solusi kebijakan yang bias dan tidak tepat sasaran karena ketika kebijakan pemerintah tidak memperhitungkan peran golongan menengah, akan berpotensi untuk menggeser sebagian golongan menengah menjadi golongan miskin baru.

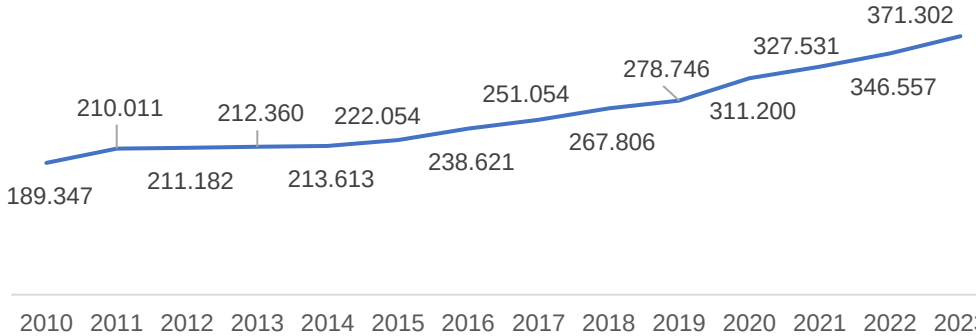
4. Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan

dan pekerjaan. Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam mengentaskan kemiskinan adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara agregat. Terdapat dua strategi dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan dalam berbagai bidang serta melakukan pelatihan kepada kelompok masyarakat miskin supaya memiliki kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Namun terkadang, pertumbuhan ekonomi tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat karena masih ada sebagian yang masih belum dapat mengakses faktor produksi, sumberdaya, atau hasil pembangunan tersebut.

Menurut BPS, kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Konsep tersebut mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* dari *The World Bank*. Seseorang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menjadi batas penentu penduduk dikategorikan miskin atau tidak miskin yang menunjukkan pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok selama sebulan dalam satuan rupiah. Artinya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan tidak hanya dihitung dari sisi makanan, melainkan juga non makanan untuk menghindari kondisi kemiskinan ekstrem.

Grafik 2.12
Garis Kemiskinan Tahun 2010-2023 (Rupiah)

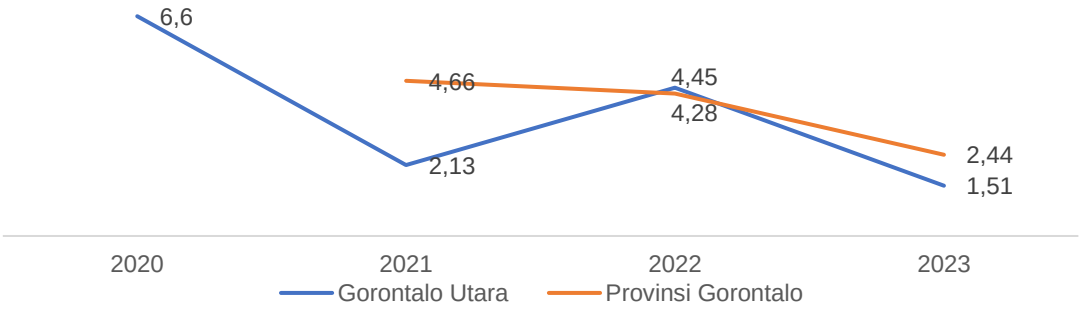


Sumber: Gorontalo Utara Dalam Angka (BPS), 2024

Berdasarkan Grafik 2.12, rata-rata laju kenaikan garis kemiskinan saat pandemi pada tahun 2020, 2021, dan 2022 mencapai 7,57 persen, jauh lebih terjal dibandingkan rata-rata laju kenaikan 5 tahun pra pandemi yang hanya mencapai 5,8 persen. Padahal efek pandemi menimbulkan penduduk dalam kategori rentan miskin masuk dalam kategori miskin karena berkurang atau hilangnya pendapatan.

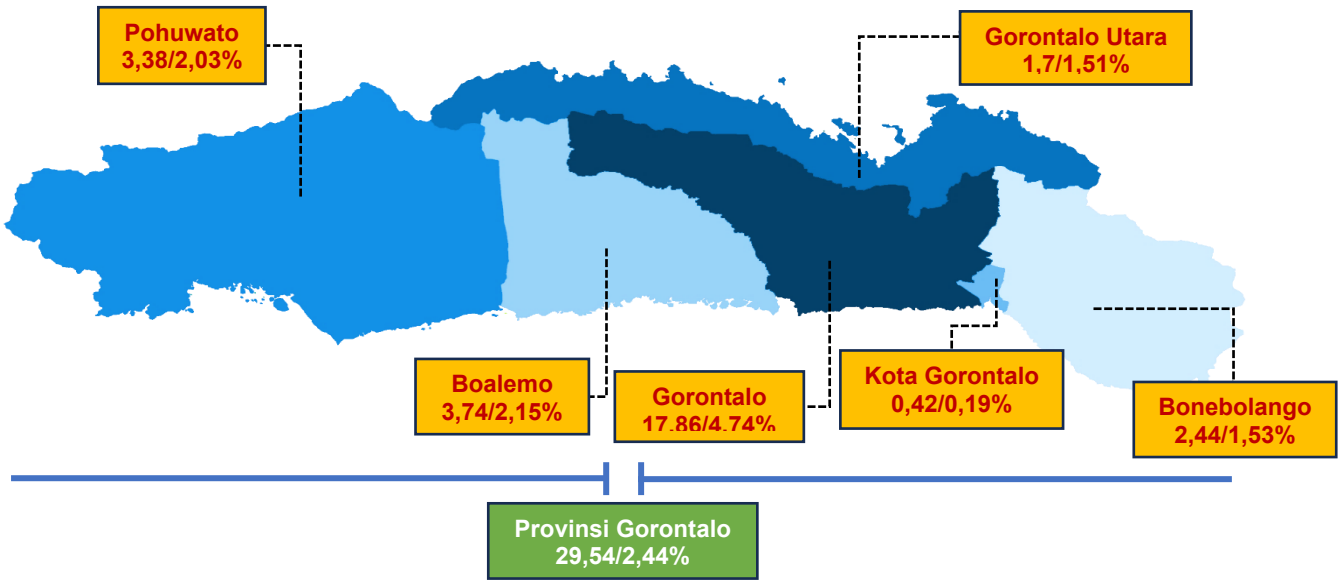
Kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia adalah kondisi dimana pengeluaran penduduk per hari di bawah US$1,90 yang dilihat dari *purchasing power parity*-nya. Laporan *Poverty and Equity Brief East Asia and Pacific* (2019) pada tahun 2017 nilai US$1,90 setara dengan Rp11.941,00/kapita/hari. Kondisi tersebut di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.13 berikut.

Grafik 2.13
Kemiskinan Ekstrem Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Susenas BPS, 2024

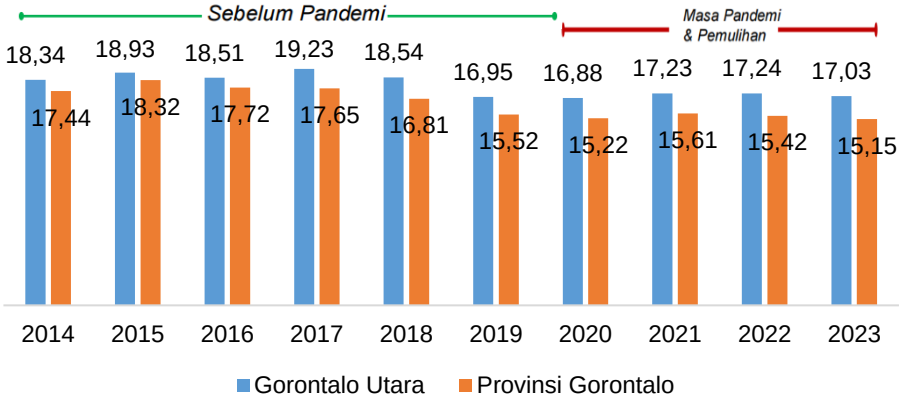
Gambar 2.21
Angka Absolut (Dalam Ribuan) dan Persentase Kemiskinan Ekstrem Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Sumber: Susenas BPS, 2024

Walaupun tren pendapatan perkapita, sebagaimana pembahasan sebelumnya terus meningkat, angka kemiskinan cenderung stabil. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo memiliki komitmen yang sangat besar dalam usaha pengentasan kemiskinan melalui kebijakan menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Deviasi angka kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo selama periode 2014-2023 cenderung masih berada di sekitar angka 1-2 persen seperti yang diperlihatkan pada Grafik 2.14 berikut.

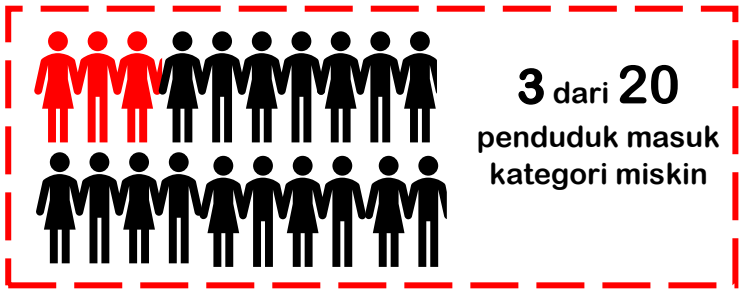
Grafik 2.14
Angka Kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Tahun 2020 pemerintah daerah dapat menurunkan angka kemiskinan ke angka terendah sepanjang Gorontalo Utara berdiri yaitu 16,88 persen. Sebelumnya, bergerak fluktuatif di kisaran 18-19 persen. Hal ini dapat terjadi karena perhitungan angka kemiskinan dilakukan sekitar bulan Februari/Maret 2020, saat masyarakat seluruh wilayah belum terimbas ekses negatif pandemi terhadap ekonomi masyarakat. Perhitungan angka kemiskinan berikutnya dilakukan pada bulan Maret 2021, saat Indonesia dan Gorontalo Utara sedang giat-giatnya melawan penyebaran dan efek destruktif wabah terhadap ekonomi, sehingga angka kemiskinan tersebut kembali melejit naik disebabkan secara umum masyarakat tertekan pendapatannya dan laju kenaikan drastis Garis Kemiskinan. Perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk terganggu/*shock,* sehingga mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Walaupun demikian, angka kemiskinan (*poverty rate*) bukanlah indikator yang menunjukkan persentase nilai absolut dari penduduk miskin. Indikator tersebut lebih cenderung menggambarkan pergerakan/volatilitas sejauh mana efektivitas berbagai kebijakan yang diambil dapat mengurangi penduduk miskin, dan fundamental ekonomi yang sedang berkembang, karena berupa proyeksi. Untuk pendekatan intervensi dan rujukan program bantuan sosial, pemberdayaan, serta mengetahui jumlah penduduk miskin, lebih tepat jika menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (d.h. Basis Data Terpadu) atau data yang bersumber dari Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang secara gradual dilakukan pembaruan yang menggambarkan kondisi sebenarnya individu yang berada di bawah jaring kemiskinan. Namun, P3KE memiliki tujuan lebih spesifik dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem. Keduanya mengelompokkan keluarga atau rumah tangga dalam urutan desil. Desil 1 menunjukkan kondisi kelompok kesejahteraan yang paling rendah. Karena pendekatannya individu, pemerintah dapat fokus pada kondisi masyarakat berdasarkan kelompok desilnya. Karena anggaran yang terbatas, tidak seluruh desil dapat fokus diintervensi oleh anggaran daerah.



Sejak tahun 2022, Badan Pusat Statistik telah melaksanakan upaya membangun data kependudukan tunggal (Satu Data) melalui pelaksanaan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yang mendorong pemerintah untuk dapat melaksanakan berbagai programnya secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, dan lebih efisien. Pendataan tersebut bertujuan untuk menyediakan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan, termasuk basis data untuk perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang termasuk data penduduk miskin di dalamnya, sehingga hal ini diharapkan menjadi *next upgrade* dari DTKS yang sudah digunakan saat ini.

Peran tenaga pendamping bagi masyarakat Gorontalo Utara sangat krusial dalam penanganan kemiskinan, karena berangkat dari *spirit* bagaimana agar secara simultan keluarga dapat memajukan desa dan sekaligus desa dapat mensejahterakan keluarga, serta sebagai *policy and strategic bridging* dari pemerintah kepada masyarakat maupun sebaliknya. Selain itu, dalam jangka panjang perlu dipahami dan diarahkan bahwa pembangunan ekonomi masyarakat seharusnya tidak sekedar "memberi bantuan", namun juga melalui pendampingan dan pemberdayaan masyarakat hingga masyarakat tersebut graduasi dari bawah garis kemiskinan. Dengan peran pendampingan tersebut, dapat menjawab berbagai tantangan yang selama ini dirasakan pemerintah, seperti ketiadaan pendampingan lanjutan (*program sustainability*) bagi masyarakat pasca program, intervensi pemerintah terkadang tidak *well-planned*, atau masyarakat penerima manfaat bantuan cenderung konsumtif alih-alih dipergunakan pada sektor produktif atau modal usaha.

Jika dibandingkan pencapaian angka kemiskinan di kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Gorontalo Utara bersama kabupaten lainnya masih menjadi beban bagi angka kemiskinan Provinsi Gorontalo, hanya Kota Gorontalo yang berhasil menekan angkanya di *single digit* berdasarkan Tabel 2.35.

Tabel 2.35
Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota / Indikator	Boalemo	Gorontalo	Pohuwato	Bonebolango	Gorontalo Utara	Kota Gorontalo	Provinsi
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	31,94	65,88	29,39	24,72	19,17	12,62	183,72
2	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	525.007	568.430	370.530	505.252	371.302	697.650	442.194
3	% penduduk miskin	18,38	17,48	17,64	15,51	17,03	5,64	15,15
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	3,41	3,97	2,69	2,35	2,69	0,62	2,92
5	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,81	1,23	0,60	0,52	0,59	0,11	0,74

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Persoalan kemiskinan bukan hanya mengenai berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index* - P1) merupakan ukuran rata–rata kesenjangan pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sementara untuk melihat

sebaran pengeluaran penduduk di antara penduduk miskin digunakan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index* – P2). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2020-Maret 2022 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin, yang diikuti dengan meningkatnya jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan yang mengalami peningkatan menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin, atau dengan kata lain selisih rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin jauh. Selain itu, indeks keparahan kemiskinan juga mengalami peningkatan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antara sesama penduduk miskin semakin besar. Berbagai pelemahan kesejahteraan masyarakat tersebut disinyalir karena penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh kenaikan harga barang dan jasa serta hilangnya sumber pendapatan. Hal tersebut paralel ditunjukkan oleh pelemahan nilai uang atau inflasi yang meningkat di tahun 2022 dan 2023. Selain itu, rumah tangga miskin yang termasuk pada golongan ekstrem biasanya masih terjebak dalam perangkap demografi yang mengakibatkan mereka sulit untuk bertahan atau berjuang untuk menjadi tidak miskin (Badan Pusat Statistik, 2021).

Nilai P1 pada tahun terakhir statistik berada di bawah nilai provinsi, artinya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan yang ada di Gorontalo Utara lebih baik dibandingkan pencapaian provinsi sehingga relatif lebih tinggi resiliensinya terhadap guncangan yang mengganggu pendapatannya (*economic shock*), sedangkan pencapaian P2 Gorontalo Utara menunjukkan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara lebih rendah ketimpangan pengeluarannya dibandingkan rata-rata provinsi.

Pendidikan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi seseorang. Secara umum, semakin tinggi pendidikan, semakin baik kondisi ekonominya. Berdasarkan Susenas 2023, penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SMA/sederajat ke atas tercatat sebesar 7,7 persen. Yang menamatkan jenjang pendidikan SD/sederajat dan SMP/sederajat tercatat sebesar 44,4 persen, sedangkan yang tidak menamatkan jenjang pendidikan SD/sederajat tercatat 47,9 persen. Jika

dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah, penduduk miskin berumur 7-12 tahun tercatat sebesar 97,29 persen, sedangkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin berumur 13-15 tahun tercatat sebesar 81,86 persen. Pada tingkat partisipasi kasar (APK), penduduk miskin jenjang SD/sederajat sebesar 100,73 sedangkan pada jenjang SMP/sederajat menjadi 82,29.

Bekerja merupakan kegiatan yang dilakukan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan. Berdasarkan Susenas 2022, sebaran penduduk miskin umur 15 tahun ke atas didominasi oleh penduduk yang tidak bekerja sebesar 47,96 persen, diikuti oleh penduduk miskin yang bekerja di sektor informal sebesar 41,36 persen. Sedangkan penduduk miskin yang bekerja di sektor formal tercatat sebesar 10,67 persen. Data tersebut kemudian diperbarui pada tahun berikutnya, dimana terdapat 56,47 persen penduduk miskin yang bekerja selama seminggu terakhir dengan sebagian besar (80,12 persen) penduduk miskin bekerja di sektor informal.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2022, sektor pertanian mendominasi sebaran penduduk yang bekerja sebesar 43,44 persen. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2022, jika dilihat menurut sektor bekerja, penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tercatat sebesar 39,14 persen sedangkan penduduk miskin yang bekerja di sektor non pertanian tercatat sebesar 12,90 persen. Pada hasil Susenas 2023, dari keseluruhan penduduk miskin yang bekerja, sekitar 69,86 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan sisanya di sektor lainnya seperti manufaktur dan jasa-jasa.

Selain itu, data sosial juga menunjukkan bahwa sekitar 15,24 persen penduduk miskin tahun 2023 adalah penyandang disabilitas yang menunjukkan pentingnya kebijakan afirmatif terhadap PMKS. Kecenderungan sebagai perokok pada penduduk miskin juga cukup tinggi dengan angka mencapai 20,74 persen. Usia kawin pertama penduduk miskin pada usia 21 tahun, dan empat dari 10 penduduk miskin berstatus cerai, baik cerai hidup maupun mati.

Selain dilihat dari dua indeks di atas, indikator kemiskinan lainnya dapat dilihat dari persentase keluarga pra sejahtera yang ada di suatu wilayah. Secara

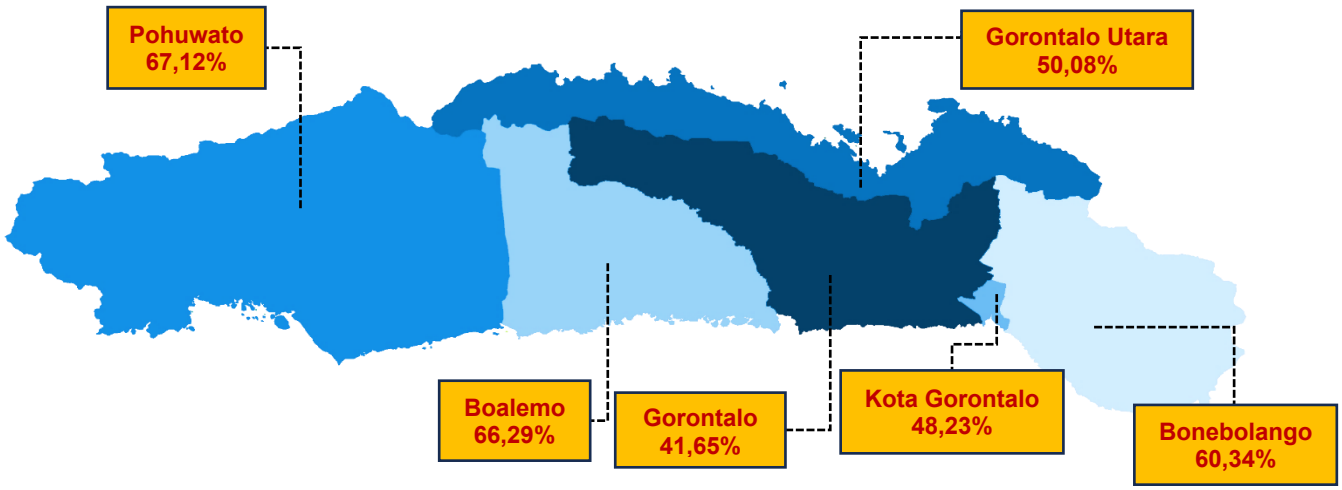
jumlah absolut, jumlah keluarga pra sejahtera Gorontalo Utara paling sedikit dibanding kabupaten/kota lainnya, namun perlu dipahami bahwa mungkin saja karena dipengaruhi jumlah penduduk yang lebih sedikit dibanding lainnya. Namun secara persentase, sepanjang tahun 2022, persentase keluarga pra sejahtera di Gorontalo Utara lebih baik dari Provinsi dan mayoritas kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.36
Jumlah dan Klasifikasi Keluarga di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Klasifikasi Keluarga											
	Pra Sejahtera				Keluarga Sejahtera				Jumlah			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Boalemo	17.652	4.443	17.710	17.710	26.379	35.193	24.537	9.004	44.031	39.636	42.247	26.714
Gorontalo	30.769	9.857	22.882	22.882	70.279	86.582	94.857	32.060	101.048	96.439	117.739	54.942
Pohuwato	17.330	6.637	17.724	17.724	28.086	22.962	22.839	8.682	45.416	29.599	40.563	26.406
Bonebolango	16.531	4.039	16.230	16.230	27.504	37.848	30.149	10.667	44.035	41.887	46.379	26.897
Gorontalo Utara	9.973	2.972	9.958	9.958	19.345	26.962	21.826	9.927	29.318	29.934	31.784	19.885
Kota Gorontalo	16.299	2.213	13.009	13.009	28.974	46.573	37.818	13.963	45.273	48.786	50.827	26.972
Provinsi Gorontalo	**108.554**	**30.161**	**97.513**	**97.513**	**200.567**	**256.120**	**232.026**	**84.303**	**309.121**	**286.281**	**329.539**	**181.816**

Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), diolah

Gambar 2.22
Persentase Klasifikasi Keluarga Pra Sejahtera
Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Sumber: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo, 2023

Dari berbagai indikator di atas, bisa dipetik bahwa kemiskinan erat kaitannya salah satu yang utama dengan tingkat pendidikan. Pendidikan yang rendah menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan. Oleh karena itu pendidikan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem. Dari program-program yang pernah dilaksanakan di daerah baik dari pusat, provinsi, maupun kabupaten, menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya melalui pendidikan, juga dilakukan

melalui pemenuhan bahan pangan dan kesehatan. Upaya penyaluran bantuan dari program-program tersebut diharapkan tepat sasaran kepada penduduk miskin sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Gorontalo Utara.

5. Angkatan Kerja dan Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan mencerminkan kualitas sumber daya manusia dan pendapatan rumah tangga di Gorontalo Utara. Mampu tidaknya suatu rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran dapat dilihat dari karakteristik ketenagakerjaan. Secara logis, semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, peluangnya berada di atas garis kemiskinan semakin besar. Namun juga tidak menutup kemungkinan, justru sebaliknya, bergantung pada tingkat pengeluaran dan jumlah tanggungannya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja.

Penduduk usia kerja merupakan orang yang berumur 15 tahun ke atas yang memiliki potensi untuk masuk ke dalam pasar kerja. Penduduk usia kerja trennya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 71,13 persen atau 69.961 orang, sisanya merupakan bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan kegiatan lainnya).

Secara umum, Angkatan Kerja fluktuatif, ditunjukkan dengan peningkatan jumlah Angkatan Kerja tahun 2017 ke 2018, namun terjadi penurunan pada tahun berikutnya saat terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif sebesar rata-rata 1 persen per tahun, kemudian naik di tahun 2020, dan kembali berkurang di tahun berikutnya seperti yang terlihat pada Tabel 2.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 sebesar 71,13 persen, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 71 orang diantaranya memasuki pasar lapangan kerja selama tahun 2023, tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya, namun dengan perbedaan nilai antara perempuan dan laki-laki yang terpaut cukup jauh, menunjukkan

kesenjangan partisipasi angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki masih sangat besar. Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga.

TPT di tahun 2023 sebesar 2,77 persen, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya dengan didominasi kontribusi negatif angka pengangguran dari gender laki-laki yang bertambah 65,08 persen saat gender perempuan juga berkontribusi negatif sebesar 15,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pun secara tren 1 dekade terakhir, TPT menunjukkan penurunan dan selalu berada di bawah capaian nasional. Hal tersebut lumrah karena antara lain disebabkan sektor primer yang menjadi kontributor utama dalam PDRB bersifat padat karya. Detail informasi ketenagakerjaan ditampilkan pada Tabel 2.37 dan 2.38.

Tabel 2.37
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja	52.434	57.342	56.146	57.155	56.839	58.301	69.961
1.1	Bekerja	49.768	54.634	53.349	54.180	55.529	57.123	68.024
1.2	Menganggur	2.666	2.708	2.797	2.975	1.310	1.178	1.937
2	Bukan Angkatan Kerja	27.051	23.142	25.001	24.946	26.050	25.046	28.395
3	Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	79.485	80.484	81.147	86.667	82.889	83.347	98.356
4	TPAK (%)	65,97	71,25	69,19	69,62	68,57	69,95	71,13
5	TPT (%)	5,08	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02	2,77

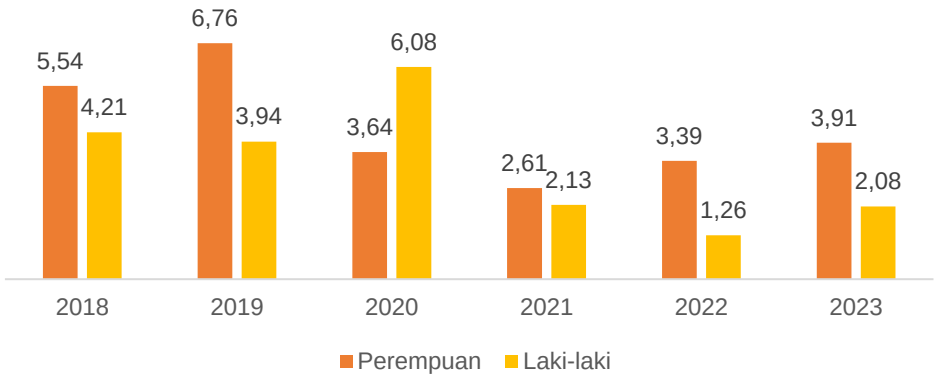
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Tabel 2.38
TPAK dan TPT Menurut Gender

No.	Indikator	2022		2023		% Perubahan	
		Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki
1	TPAK	50,76	88,67	54,74	86,88	7,84	-2,02
2	Pengangguran	3,39	1,26	3,91	2,08	15,34	65,08

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Grafik 2.15
Pengangguran Berdasarkan Gender (Persen)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

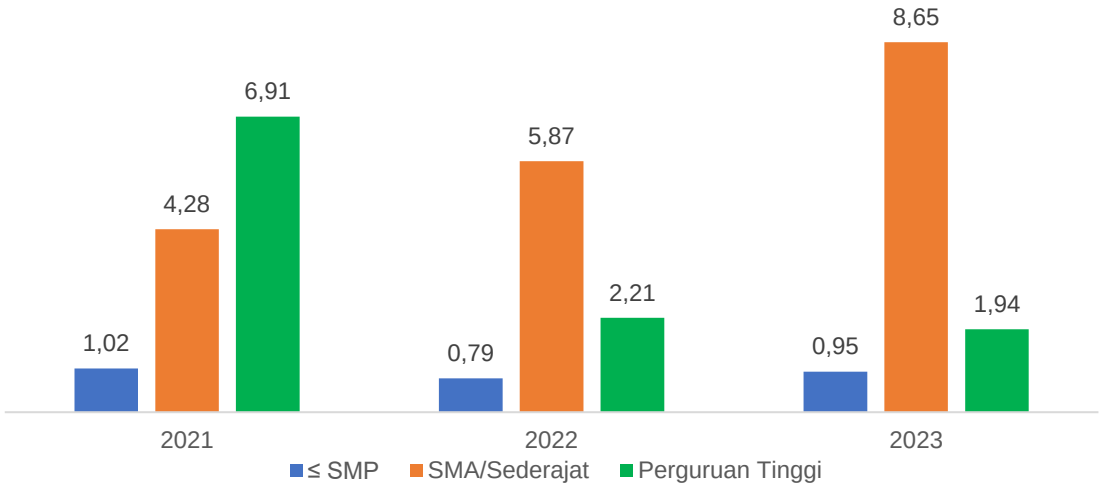
Jika melihat persentase perubahan tahun 2023 pada Tabel 2.38, dapat disimpulkan bahwa penambahan jumlah angkatan kerja laki-laki yang lebih besar yang dibarengi dengan tingkat penyerapannya dalam lapangan pekerjaan yang relatif lebih baik dibandingkan perempuan karena kenaikan angka penganggurannya lebih rendah. Namun, secara statistik pengangguran gender perempuan masih berada di atas laki-laki sebagaimana Grafik 2.15, sehingga menjadi tugas pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian 'Kaum Kartini', dan pencetakan wirausahawan baru khususnya kaum perempuan, agar bertambahnya jumlah *supply* tenaga kerja seimbang dengan tingkat penyerapan dalam lapangan kerja.

Grafik 2.16 menunjukkan pola TPT berdasarkan tingkat pendidikan masih sejalan dengan pola pada tahun 2022, dimana TPT pendidikan SMA/sederajat jauh lebih tinggi dibandingkan TPT pendidikan SMP ke bawah. Pada tahun 2023, TPT tertinggi ada pada jenjang pendidikan SMA/sederajat. Selanjutnya pada jenjang pendidikan Perguruan Tinggi, dan yang terendah ada pada jenjang SMP ke bawah. Pola TPT yang demikian menunjukkan mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia dan mau menerima pekerjaan apa saja, sedangkan mereka yang berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih pekerjaan yang lebih sesuai dengan harapannya.

Jika dibandingkan dengan kondisi setahun sebelumnya, nilai TPT tahun 2023 pada jenjang SMP ke bawah dan SMA/sederajat menunjukkan peningkatan, sedangkan pada jenjang perguruan tinggi mengalami penurunan. TPT jenjang SMA/sederajat mengalami peningkatan paling tinggi, diikuti TPT pada jenjang SMP ke bawah. Sedangkan TPT pada jenjang perguruan tinggi turun.



Grafik 2.16
TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Tabel 2.39
Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Ditamatkan dan Status Pekerjaan Tahun 2023

No.	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			% Bekerja terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	% Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
		Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja				
1	≤ Sekolah Dasar	37.033	373	37.406	99,00	14.485	51.891	72,09
2	SMP/Sederajat	9.757	77	9.834	99,22	6.869	16.703	58,88
3	SMA/Sederajat	14.254	1.349	15.603	91,35	6.101	21.704	71,89
4	Perguruan Tinggi	6.980	138	7.118	98,06	940	8.058	88,33
Total		**68.024**	**1.937**	**69.961**	**97,23**	**28.395**	**98.356**	**71,13**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Pada penduduk yang sudah bekerja, justru penduduk yang hanya mengenyam bangku sekolah dasar mendominasi tenaga kerja yang bekerja pada pasar tenaga kerja dibandingkan tingkat pendidikan di atasnya, pun jika dibandingkan dengan lulusan perguruan tinggi. Tabel 2.39 menunjukkan

tingkat penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja berpendidikan SD lebih tinggi dibandingkan lulusan perguruan tinggi. Penyerapan tersebut disinyalir karena tingkat upah tenaga kerja lulusan SD jauh lebih rendah dibandingkan lulusan PT, juga menggambarkan lapangan kerja yang membutuhkan penduduk lulusan pendidikan tinggi di Gorontalo Utara masih terbatas, ataupun tingkat upah yang ditawarkan oleh lapangan kerja tidak sesuai dengan harapan para lulusan PT, sehingga mereka memilih untuk menganggur sementara.

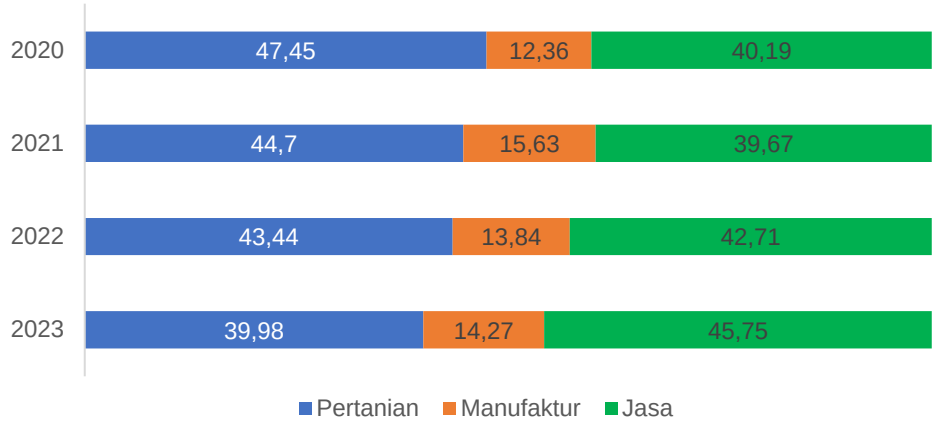
Struktur lapangan pekerjaan utama tahun 2023 di Gorontalo Utara didominasi oleh penduduk yang bekerja di kategori Lainnya, diikuti sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dan sisanya di sektor Industri Pengolahan. Pada periode sebelumnya, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memegang tampuk komposisi terbesar sesuai Grafik 2.17.

Tabel 2.40
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	21.168	6.031	27.199
2	Industri Pengolahan	7.968	1.738	9.706
3	Lainnya/Jasa	13.534	17.585	31.119
Total		**42.670**	**25.354**	**68.024**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Grafik 2.17
Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (Persen)



Sumber: Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara Agustus 2023, BPS

Dari pergerakan pekerja pada lapangan kerja utama, 4 tahun terakhir komposisi penduduk yang bergerak pada sektor jasa trennya semakin

meningkat saat komposisi yang bergerak di sektor agraris bertren turun, yang menunjukkan peran sektor primer dalam penyerapan tenaga kerja semakin berkurang. Penurunan sektor primer dimungkinkan karena minat generasi muda untuk masuk sektor agraris berkurang.

Komposisi penduduk berdasarkan kondisi pekerjaan ditunjukkan oleh jumlah angkatan kerja usia 15-64 tahun yang senantiasa meningkat dengan tren penurunan pengangguran terbuka dan peningkatan persentase yang bekerja dibandingkan angkatan kerja, yang dapat dilihat pada Tabel 2.41 berikut.

Tabel 2.41
Angkatan Kerja di Gorontalo Utara

No.	Tahun Pengamatan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
1	2017	49.768	2.666	52.434	94,91
2	2018	54.634	2.708	57.342	95,28
3	2019	53.349	2.797	56.146	95,02
4	2020	54.180	2.975	57.155	94,79
5	2021	55.529	1.310	56.839	97,70
6	2022	57.123	1.178	58.301	98,43
7	2023	68.024	1.937	69.961	97,23

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Bila angkatan kerja dilihat dari kelompok umur, mulai terlihat kelompok usia senior di atas 60 tahun memegang komposisi terbanyak dibandingkan kelompok umur di atas usia 15 tahun lainnya, namun tetap pada rentang usia 25-49 tahun secara kolektif mencapai lebih dari 50 persen angkatan kerja yang menunjukkan bonus demografi masih berlangsung. Rincian informasi hal tersebut disajikan pada Tabel 2.42 berikut.

Tabel 2.42
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kelompok Umur dan Jenis kelamin Tahun 2023

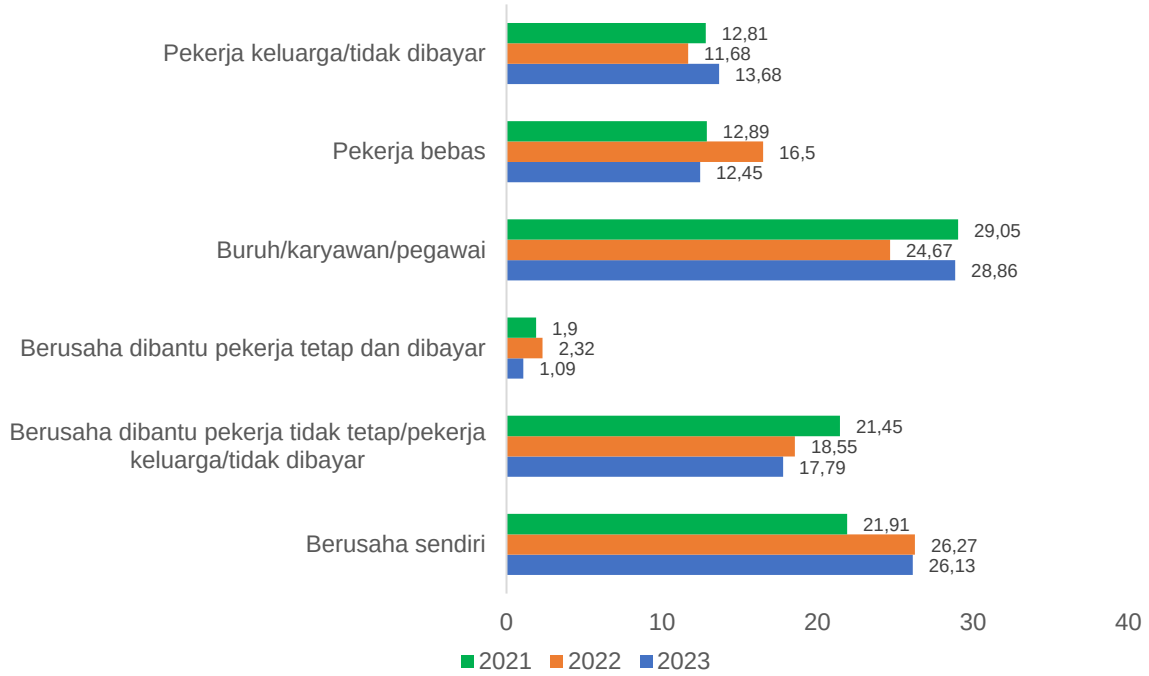
No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jenis Kelamin			Persentase Kelompok Umur terhadap Angkatan Kerja (%)
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1	15-19	2.979	1.363	4.342	6,38
2	20-24	4.803	2.483	7.286	10,71
3	25-29	5.779	2.732	8.511	12,51
4	30-34	5.261	2.827	8.088	11,89
5	35-39	4.734	3.182	7.916	11,64
6	40-44	4.436	2.681	7.117	10,46
7	45-49	4.030	2.601	6.631	9,75
8	50-54	3.437	2.244	5.681	8,35
9	55-59	2.728	2.025	4.753	6,99
10	60+	4.483	3.216	7.699	11,32
Angkatan Kerja		**42.670**	**25.354**	**68.024**	**100,00**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2023, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai, diikuti status berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, pekerja keluarga/tidak dibayar. Keempatnya mencapai total 86,47 persen dari penduduk bekerja di Kabupaten Gorontalo Utara. Sisanya menyebar sebagai pekerja bebas, dan berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar.

Persentase status pekerjaan utama pada Agustus 2023 dibandingkan dengan Agustus 2022, pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai dan pekerja keluarga/tidak dibayar mengalami peningkatan, sedangkan yang lain turun baik secara jumlah maupun persentase.

Grafik 2.18
Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (Persen)

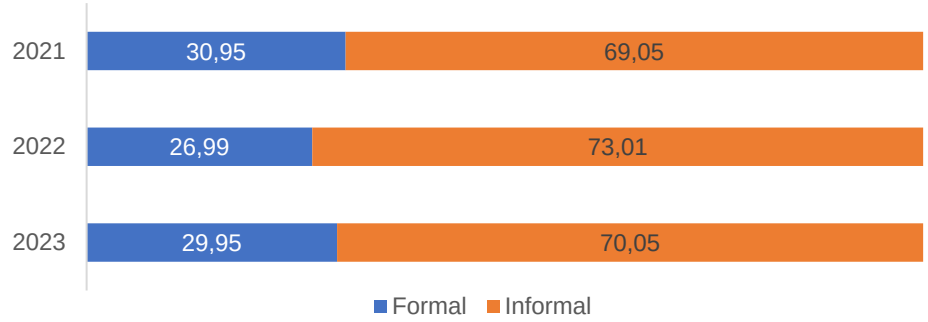


Sumber: Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara Agustus 2023, BPS

Sedangkan pada penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, dari seluruh penduduk bekerja pada Agustus 2023, sebagian besar bekerja pada sektor informal (status berusaha sendiri; berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar; pekerja bebas; dan pekerja keluarga/tidak dibayar), sisanya pada sektor formal (status berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan status buruh/karyawan/pegawai).

Persentase penduduk bekerja di sektor formal pada Agustus 2023 meningkat dibandingkan penduduk yang bekerja di sektor non-formal sebanyak 2,96 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan Agustus 2021, persentase penduduk yang bekerja di sektor formal pada Agustus 2023 mengalami penurunan sebesar 1,00 persen.

Grafik 2.19
Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal



Sumber: Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Utara Agustus 2023, BPS

6. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Secara total, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki tren yang meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat perekonomian daerah. Penurunan sesaat sempat terjadi pada saat pandemi karena pembatasan sosial yang berpengaruh pada tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat.

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa. Kurun waktu 2017-2023, konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (ADHB) maupun riil (ADHK), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk, jumlah rumah tangga, dan tingkat perekonomian daerah. Rata-rata konsumsi per rumah tangga secara umum terus meningkat, baik menurut ADHB maupun ADHK 2010, kecuali terjadi penurunan sesaat di tahun 2020 terdampak pandemi Covid-19. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode 2017-2023 pun rata-rata di atas 60 persen, yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat sangat tinggi.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan oleh setiap rumah tangga untuk membiayai konsumsi anggota rumah tangga baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan

(sandang, perumahan, pendidikan, dan sebagainya). Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi non-makanan. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Kenaikan konsumsi per rumah tangga ini bisa disebabkan oleh peningkatan jumlah anggota rumah tangga, atau peningkatan kualitas komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut yang sangat berkorelasi dengan peningkatan daya beli masyarakat. Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada selang waktu tahun 2017 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.43 berikut.

Tabel 2.43
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

No.	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (milliar rupiah) ADHK 2010	1.210,57	1.293,77	1.383,24	1.386,92	1.425,25	1.476,26	1.536,57
2	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (milliar rupiah) ADHB	1.702,4	1.862,07	2.037,39	2.077,11	2.178,77	2.331,62	2.500,92
3	Jumlah penduduk (BPS)	124.202	127.542	125.603	124.957	126.521	128.563	130.722
4	Konsumsi keluarga per kapita (juta rupiah) ADHK 2010	9,75	10,14	11,01	11,09	11,26	12,48	11,75
5	Konsumsi keluarga per kapita (juta rupiah) ADHB	13,71	14,60	16,22	16,62	17,22	18,14	19,13

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang secara tren searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, pertumbuhan ini terjadi baik ADHB maupun ADHK 2010, yang memberi gambaran bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

7. Nilai Tukar Petani

Sektor unggulan di Gorontalo Utara yang dilihat berdasarkan komposisi PDRB yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Pemerintah Daerah setiap tahun selalu berupaya agar *output* sektor tersebut terus tumbuh karena menjadi motor utama penyerapan tenaga kerja yang sifatnya padat karya. Untuk melihat keberhasilan pembangunan sektor tersebut, diperlukan

indikator yang akurat dapat mengukur kemampuan daya beli petani sebagai salah satu pelaku utama di sektor pertanian. Salah satu pendekatan untuk mengukur daya beli petani di daerah perdesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Secara konsep, NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Gambaran indikator tersebut tidak menggunakan secara spesifik lokasi Gorontalo Utara, alih-alih menggunakan capaian Provinsi Gorontalo yang berdasarkan survey di 5 kabupaten, karena keterbatasan data yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik, namun diharapkan dapat memberikan gambaran kesejahteraan petani secara umum.

Selama tahun 2022, NTP Umum Provinsi Gorontalo mengalami penurunan sebesar 6,06 persen. Hal ini dipengaruhi oleh Indeks yang diterima petani (It) mengalami penurunan, sedangkan Indeks yang dibayar (Ib) petani mengalami kenaikan. It mengalami penurunan sebesar 1,65 persen. sedangkan Ib naik 4,71 persen.

Tabel 2.44
Perubahan It, IB, dan NTP Desember 2022 terhadap Desember 2021

No.	Subsektor	Desember 2021			Desember 2022			YoY (%)		
		It	Ib	NTP	It	Ib	NTP	It	Ib	NTP
1	Tanaman pangan	111,75	109,24	102,30	107,93	114,49	94,26	-3,42	4,81	-7,86
2	Hortikultura	140,14	107,99	129,78	123,88	113,23	109,41	-11,60	4,85	-15,70
3	Tanaman perkebunan rakyat	129,79	108,78	119,31	119,14	114,15	104,37	-8,21	4,94	-12,52
4	Peternakan	108,73	104,94	103,61	117,73	109,09	107,92	8,28	3,95	4,16
5	Perikanan	104,18	107,70	96,73	113,29	113,52	99,80	8,74	5,40	3,17
6	Perikanan tangkap	104,28	107,59	96,92	113,89	113,56	100,29	9,22	5,55	3,48
7	Perikanan budidaya	103,18	108,69	94,93	107,48	113,14	95,00	4,17	4,09	0,07
NTP Umum		**114,22**	**108,17**	**105,59**	**112,34**	**113,26**	**99,19**	**-1,65**	**4,71**	**-6,06**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Penurunan NTP terutama disebabkan oleh turunnya NTP pada 3 subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman hortikultura, dan subsektor tanaman perkebunan rakyat, masing-masing sebesar -7,86 persen; -15,70 persen; dan -12,52 persen. Sedangkan subsektor peternakan dan subsektor perikanan mengalami kenaikan masing-masing 4,16 persen dan 3,17 persen.

Penurunan tertinggi yaitu subsektor tanaman hortikultura sebesar -15,70 persen, yang dipengaruhi oleh turunnya It sebesar -11,60 persen, saat Ib mengalami kenaikan sebesar 4,85 persen. Kenaikan NTP tertinggi terjadi pada subsektor peternakan sebesar 4,16 persen, yang dipengaruhi oleh naiknya It lebih tinggi (8,28 persen) daripada Ib sebesar 3,95 persen.

8. Nilai Tukar Nelayan

Seperti NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga tidak dilakukan spesifik di Gorontalo Utara, sehingga jika digunakan NTN Provinsi Gorontalo sebagai proksi, dihasilkan data sebagaimana Tabel 2.45 berikut.

Tabel 2.45
Nilai Tukar Nelayan Provinsi Gorontalo

No.	Tahun	Bulan ke-											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	2019	106,18	107,36	104,85	102,84	101,15	100,95	101,79	103,51	102,15	100,58	199,05	104,65
2	2020	99,05	97,95	98,81	96,15	97,23	95,58	94,49	95,10	93,68	91,76	90,24	92,79
3	2021	92,72	92,79	94,22	96,11	97,58	98,06	95,91	96,54	99,30	97,12	95,36	96,92
4	2022	94,50	96,24	97,82	99,28	98,10	96,21	99,15	98,49	97,33	99,78	98,60	100,29
5	2023	102,80	103,59	99,91	102,70	99,58	97,34	95,91	98,66	100,21	98,68	95,58	95,94

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

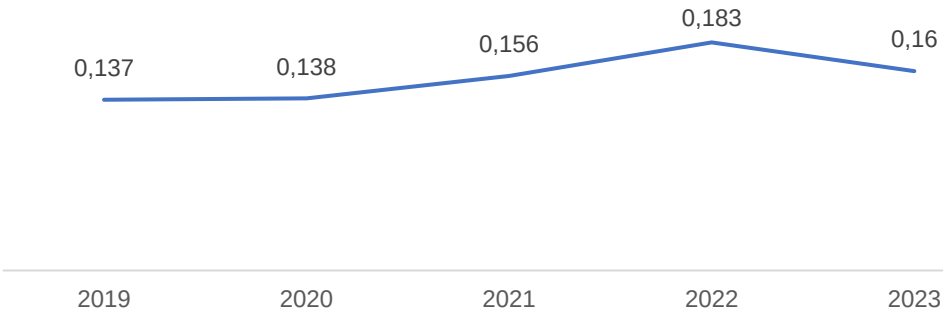
Rata-rata NTN 5 tahun terakhir berada di angka 98,11, dengan rata-rata pertumbuhan mencapai -1,94 persen, yang mengisyaratkan dalam 5 tahun terakhir secara rata-rata pengeluaran nelayan untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi lebih tinggi dibandingkan pendapatan hasil usahanya, sehingga nelayan mengalami defisit.

9. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan dari 12 indikator keluarga sehat dari setiap keluarga, yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8 (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Capaian Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Gorontalo Utara menunjukkan tren peningkatan, sebagaimana informasi yang disajikan pada Grafik 2.20.

Grafik 2.20
Indeks Keluarga Sehat

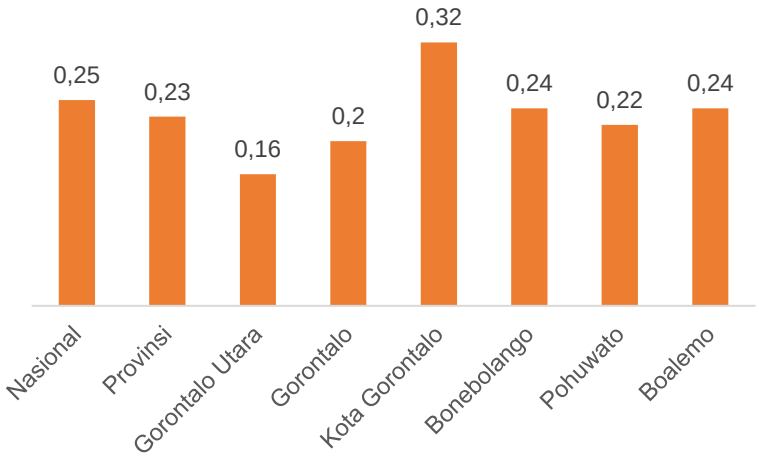


Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Namun jika dikomparasikan dengan kabupaten/kota lain dan nasional, pada tahun 2023 capaian Kabupaten Gorontalo Utara masih berada di bawah rata-rata, sebagaimana Grafik 2.21 berikut.



Grafik 2.21
Indeks Keluarga Sehat Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Sumber: Data Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo, 2023

Capaian IKS Gorontalo Utara tahun 2023 disusun secara komposit oleh 12 indikator keluarga sehat per Oktober tahun 2023, sebagaimana dalam Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46
Capaian Indikator Keluarga Sehat

No.	Indikator	Capaian (%)
1	Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban keluarga	86,81
2	Keluarga mempunyai akses sarana air bersih	90,09
3	Keluarga sudah menjadi anggota jaminan kesehatan nasional	55,49
4	Anggota keluarga tidak ada yang merokok	42,08
5	Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan & tidak ditelantarkan	37,54
6	Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur	24,25
7	Penderita tuberkolosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar	41,90
8	Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan	89,28
9	Bayi mendapat ASI ekslusif	43,02
10	Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap	92,77
11	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan	95,91
12	Keluarga mengikuti program keluarga berencana	52,75

Sumber: Aplikasi Keluarga Sehat Kemenkes RI, 2023
(https://dinkes-gorontaloprov.com/yankes/pispk/)

Berdasarkan Tabel 2.46, indikator yang capaiannya masih rendah yakni penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur, penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan, penderita TB mendapatkan pengobatan sesuai standar, serta anggota keluarga tidak ada yang merokok. Hal yang krusial adalah capaian keluarga yang telah memiliki jaminan kesehatan ternyata masih berada di angka 55,49 persen, sementara data tahun 2022, secara individu kepesertaan jaminan kesehatan telah berada di angka 86 persen. Deskripsi di atas perlu menjadi perhatian dan landasan logis dalam perencanaan di masa mendatang bahwa perlu diperhatikan *updating* data maupun intervensi untuk meningkatkan capaian indikator di masa mendatang.

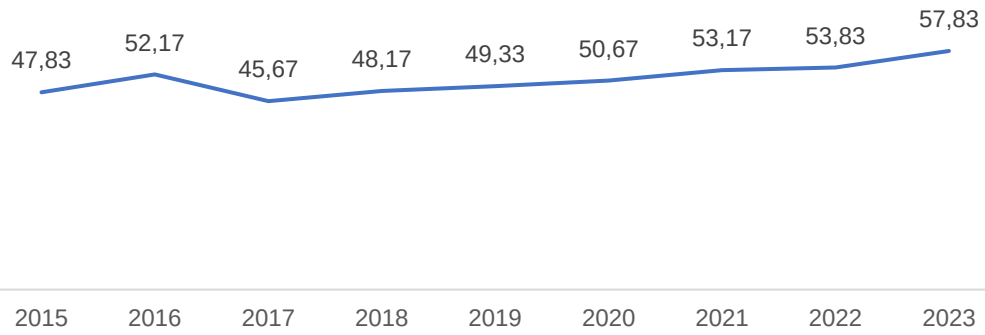
10. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, yang disusun berdasarkan tiga kerangka: kerangka pembangunan individu, kerangka pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta kerangka partisipasi dan diskriminasi. Ketiga kerangka tersebut kemudian diklasifikasikan dalam lima domain utama:

1. Domain pendidikan;
2. Domain kesehatan dan kesejahteraan;
3. Domain lapangan dan kesempatan kerja;
4. Domain partisipasi dan kepemimpinan;
5. Domain gender dan diskriminasi.

Angka IPP dihitung dan diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia sejak tahun 2015, dengan cakupan hanya sampai tingkat provinsi. Namun, data tersebut masih dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara implisit terkait kondisi kepemudaan di Gorontalo Utara. Secara detail, informasi IPP Provinsi Gorontalo disajikan dalam Grafik 2.22, dan rincian nilai setiap domain penyusunnya ditampilkan pada Tabel 2.47.

Grafik 2.22
Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo



Sumber: IPP Provinsi, Kemenpora RI, 2024



Pada tahun 2023, komposisi pemuda yang tercatat sebesar 24,20 persen (Statistik Pemuda, 2023). Populasi pemuda di Provinsi Gorontalo sebanyak 300.470 jiwa (2022), merupakan populasi terendah di Pulau Sulawesi. Nilai IPP Gorontalo tahun 2023 meningkat karena terdapat peningkatan pada empat domain yaitu domain gender dan diskriminasi, partisipasi dan kepemimpinan, lapangan dan kesempatan kerja, serta domain kesehatan dan kesejahteraan. Di sisi lain domain pendidikan mengalami stagnasi.

Bila dibandingkan dengan Nasional, terdapat 3 indeks domain yang bernilai lebih tinggi: domain kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, serta domain partisipasi dan kepemimpinan. Sedangkan dua domain lainnya bernilai lebih rendah, yaitu domain pendidikan serta gender dan diskriminasi.

Tabel 2.47
Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo

Tahun	Pendidikan				Kesehatan dan Kesejahteraan					Lapangan dan Kesempatan Kerja		
	Rata-rata Lama Sekolah	APK Sekolah Menengah	APK Perguruan Tinggi	Capaian	Angka Kesakitan Pemuda	Persentase Korban Kejahatan	Persentase Pemuda yang Merokok	Persentase Remaja Perempuan yang Sedang Hamil	Capaian	Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih	Tingkat Pengangguran Terbuka	Capaian
2015	8,85	84,09	30,35	63,33	14,49	0,93	29,86	8,75	52,5	0,32	11,43	40
2016	9,43	86,01	32,23	66,67	12,66	1,17	27,13	14,06	52,5	0,46	6,75	55
2017	9,34	81,31	37,88	66,67	13,54	1,56	30,17	24,96	40	0,10	11,74	35
2018	9,28	82,04	35,23	66,67	11,96	1,08	30,17	24,96	47,5	0,04	11,17	40
2019	9,89	83,38	36,71	66,67	12,42	1,73	28,34	19,59	45	0,23	10,70	45
2020	9,90	83,82	37,74	66,67	9,07	0,89	25,95	16,33	60	0,16	9,90	40
2021	10,14	83,68	37,32	66,67	11,53	0,49	25	15,66	62,5	0,16	8,69	40
2022	10,23	83,71	36,94	66,67	12,63	0,25	24,93	8,09	67,5	0,19	7,85	45
2023	10,38	84,44	36,23	66,67	9,55	0,25	24,42	6,47	72,5	0,24	7,99	50

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda 2023, 2024
https://ipp.sarikata.com/document

Tabel 2.47
Aspek Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Gorontalo (lanjutan)

Tahun	Partisipasi dan Kepemimpinan				Gender dan Diskriminasi			
	Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Organisasi	Persentase Pemuda yang Memberikan Saran/Pendapat dalam Rapat	Capaian	Angka Perkawinan Usia Anak	Persentase Pemuda Perempuan Berusia 16–24 Tahun yang Sedang Menempuh Pendidikan Tingkat SMA Keatas	Persentase Pemuda Perempuan yang Bekerja di Sektor Formal	Capaian
2015	88,76	2,92	5,50	43,33	15,90	41,20	17,67	40
2016	88,76	2,92	5,50	43,33	14,74	41,45	22,36	43,33
2017	88,76	2,92	5,50	43,33	14,51	42,15	19,41	43,33
2018	78,09	5,76	6,46	43,33	15,29	42,18	21,70	43,33
2019	78,09	5,76	6,46	43,33	13,16	43,50	23,66	46,67
2020	78,09	5,76	6,46	43,33	14,73	44,35	20,16	43,33
2021	83,44	3,86	8,05	46,67	11,64	49,63	20,90	50
2022	83,44	3,86	8,05	46,67	13,65	46,98	19,64	50
2023	85,46	3,39	10,30	50,00	10,91	48,60	23,81	50

Sumber: Indeks Pembangunan Pemuda 2023, 2024
https://ipp.sarikata.com/document

11. Indeks Gender (Pemberdayaan, Pembangunan, dan Ketimpangan Gender)

Perempuan merupakan salah satu unsur yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga kondisi dan kualitas perempuan menjadi hal penting untuk ditingkatkan. Untuk melihat kualitas kesetaraan dan pembangunan gender ditunjukkan menggunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, hanya saja data yang ada dipilah antara laki-laki dan perempuan. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Jika nilai IPG di bawah 100 mengindikasikan bahwa capaian pembangunan perempuan di bawah laki-laki. Sementara jika di atas 100 mengindikasikan capaian pembangunan perempuan di atas laki-laki.

Sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, IPG Gorontalo Utara secara tren terus mengalami peningkatan meskipun nilainya tidak signifikan, sekaligus menunjukkan sejalan dengan peningkatan nilai IPM, meskipun jika dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya termasuk terendah. Namun demikian, peningkatan IPG Gorontalo Utara menggambarkan semakin setaranya pencapaian indikator-indikator pembentuk IPM antara laki-laki dengan perempuan. Rangkaian informasi dan komparasinya antara kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.48.

Tabel 2.48
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Boalemo	80,82	81,14	81,15	81,56	82,76	83,20
2	Gorontalo	81,18	81,33	81,67	82,60	83,12	83,61
3	Pohuwato	91,11	91,46	91,36	91,60	92,22	92,39
4	Bonebolango	86,96	87,71	87,54	88,17	88,53	88,84
5	Gorontalo Utara	81,16	81,25	81,16	81,32	82,03	82,43
6	Kota Gorontalo	86,06	86,25	86,23	86,87	87,41	87,74
Provinsi		**86,63**	**86,83**	**86,73**	**87,52**	**88,12**	**88,24**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Nilai IDG semakin ideal apabila mendekati nilai 100. IDG dibentuk oleh 3 dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Lantas, kondisi IDG di Gorontalo Utara dan perbandingannya dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.49 berikut.

Tabel 2.49
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	*2023
1	Boalemo	68,53	69,15	70,38	67,80	69,46
2	Gorontalo	62,91	62,84	62,48	62,68	63,22
3	Pohuwato	68,74	73,16	69,41	73,66	70,45
4	Bonebolango	51,91	51,73	52,13	52,33	53,38
5	Gorontalo Utara	76,61	70,49	70,51	70,02	69,21
6	Kota Gorontalo	75,33	75,23	71,19	73,08	72,15
Provinsi		**70,67**	**70,74**	**70,40**	**71,20**	**71,11**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), diolah
*Menggunakan UHH hasil SP2020 LF

IDG Kabupaten Gorontalo Utara secara umum, meskipun tidak terlalu tinggi sudah memadai, dan mendekati angka 100 yang dikonotasikan sebagai standar untuk menginterpretasikan angka IDG, meskipun masih perlu didorong untuk semakin menipiskan jaraknya.

Sedangkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG), memberikan gambaran kegagalan atau kerugian (*loss*) dari pencapaian pembangunan akibat ketidaksetaraan gender, yang terdiri dari tiga dimensi: kesehatan, pendidikan, serta pasar kerja. Kondisi ideal yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Capaian IKG 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif dengan terjadi penurunan ketimpangan. Membaiknya berbagai indikator seperti pada faktor risiko kematian Ibu yang mencakup perbaikan proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan, menurunnya fertilitas remaja, proporsi wanita berusia 15-49 tahun yang saat melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun, taraf pendidikan yang mengalami peningkatan signifikan, indeks persentase

penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA dari gender perempuan maupun laki-laki yang semakin merata, persentase keterwakilan perempuan di parlemen yang naik, serta penurunan *gap* kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 2.50
Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

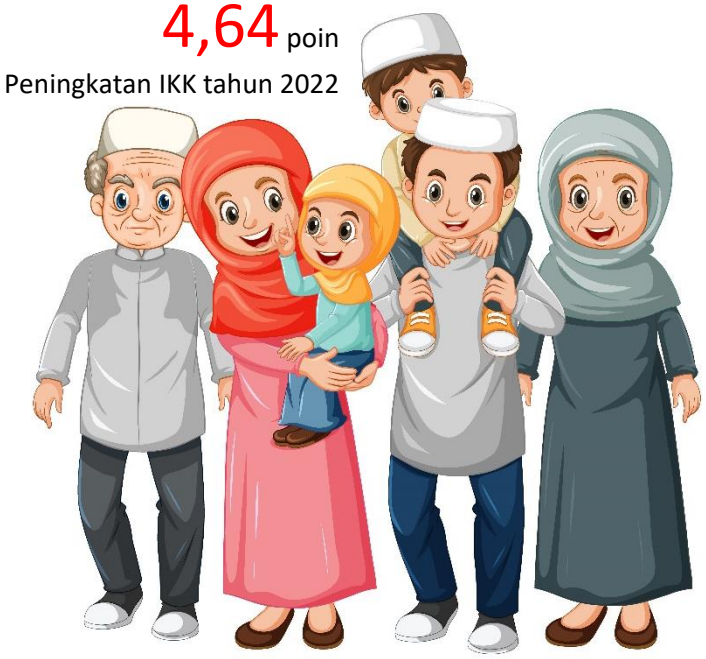
No.	Kabupaten/Kota	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Boalemo	0,472	0,509	0,456	0,480	0,384	0,430
2	Gorontalo	0,480	0,420	0,508	0,449	0,437	0,350
3	Pohuwato	0,548	0,530	0,521	0,545	0,452	0,502
4	Bonebolango	0,586	0,553	0,527	0,446	0,523	0,516
5	Gorontalo Utara	0,463	0,432	0,433	0,481	0,226	0,327
6	Kota Gorontalo	0,428	0,425	0,292	0,370	0,407	0,363
Provinsi		**0,472**	**0,457**	**0,456**	**0,443**	**0,411**	**0,391**

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Secara umum, memang Indeks Pembangunan, Pemberdayaan, serta Ketimpangan Gender terus membaik, namun *gender gap* masih cukup besar, terutama pada tingkat kepemimpinan perempuan, baik di sektor swasta sektor publik, dan di sektor keuangan.

12. Indeks Kualitas Keluarga

Indeks Kualitas Keluarga (IKK) disusun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai alat ukur melihat keberhasilan pembangunan manusia dengan pendekatan keluarga. Dengan indeks tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat akan terbantu dalam menyusun langkah-langkah strategis, rencana aksi, serta melakukan intervensi nyata yang hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat.



Indikator penyusun IKK terdiri dari 29 Indikator yang dibagi menjadi 5 (lima) dimensi: (1) Kualitas Legalitas-Struktur (KLS, 3 indikator); (2) Kualitas Ketahanan Fisik (KKF, 6 indikator); (3) Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE, 8 indikator); (4) Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP, 6 indikator); dan (5) Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB, 6 indikator).

Angka statistik tersebut untuk Kabupaten Gorontalo Utara belum tersedia, untuk mendapatkan gambaran secara umum, dapat melihat capaian Provinsi Gorontalo. Berdasarkan data perubahan indikator pembentuk IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022, diketahui bahwa kelima dimensi pembentuk IKK yaitu dimensi KLS, KKF, KKE, KKSP dan KKSB mengalami peningkatan dan penurunan. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2022, nilai IKK Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 menunjukkan kualitas keluarga pada kategori 'Responsif Gender dan Hak Anak'.

Tabel 2.51
Perubahan Indikator Pembentuk IKK Provinsi Gorontalo

No.	Indikator	Tahun			Perubahan 2021-2022		Indonesia
		2020	2021	2022	Meningkat (+)	Menurun (-)	2022
A	**Dimensi KLS**		**85,52**	**90,02**	**4,50**		**87,45**
1	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	90,15	91,02	92,34	1,32		88,14
2	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan	89,62	88,41	92,1	3,69		91,64
B	**Dimensi KKF**		**73,20**	**73,68**	**0,49**		**78,66**
1	Persentase rumah tangga yang tidak ada saat di anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya	89,45	86,81	90,24	3,43		91,12
2	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan	64,95	58,31	56,23		2,08	49,05
3	PoU semua umur	10,33	14,84	18,63	3,79		10,21
4	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	88,13	99,65	99,36		0,29	98,07
5	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	1,64	1,37	1,39	0,02		1,16
6	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)	40,14	36,42	35,51		0,91	26,22
C	**Dimensi KKE**		**72,51**	**74,67**	**2,16**		**73,08**
1	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	83,24	83,25	85,99	2,74		85,58
2	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi	88,77	88,27	87,72		0,55	92,42
3	Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	51,55	55,85	61,48	5,63		57,18
4	Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	91,04	88,85	89,47	0,62		77,33
5	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	0,49	0,52	0,55	0,03		0,53
6	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja	44,36	41,23	44,24	3,01		42,03
D	**Dimensi KKSP**		**63,37**	**77,51**	**14,14**		**70,00**
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik	51,69	50,52	40,99		9,53	44,06

No.	Indikator	Tahun			Perubahan 2021-2022		Indonesia
		2020	2021	2022	Meningkat (+)	Menurun (-)	2022
	dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir						
2	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	2,95	1,92	2,21	0,29		2,53
3	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	31,66	20,68	58,82	38,14		37,16
4	Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua	94,39	97,07	96,58		0,49	96,95
E	**Dimensi KKSB**		**66,68**	**70,85**	**4,17**		**67,17**
1	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	15,64	12,65	14,52	1,87		8,43
2	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap (kode 1 dan 2)	90,01	90,26	94,37	4,11		85,92
3	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	81,86	94,12	96,97	2,85		89,43
4	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	24,37	27,47	28,92	1,45		29,80
5	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	61,82	70,10	74,78	4,68		64,43
6	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet	3,13	12,09	14,44	2,35		16,65
IKK		**70,32**	**73,16**	**77,80**	**4,64**		**76,53**

Sumber: Laporan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020-2022 (KemenPPA), 2023

Secara keseluruhan, dimensi pembentuk dan capaian IKK Provinsi Gorontalo tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,64 dibandingkan tahun 2021.

13. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan. IPK tidak dimaksudkan untuk mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan untuk mengukur kinerja pembangunan kebudayaan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender. Ketujuh dimensi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang cukup luas dan bersifat lintas sektor.

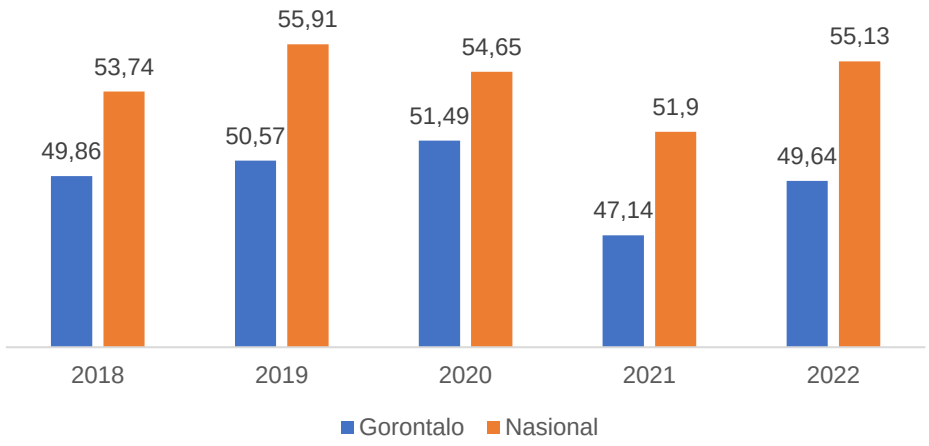
IPK adalah suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan provinsi. Definisi tersebut membatasi cakupan hasil IPK hanya berskala nasional dan provinsi sehingga berakibat data capaian IPK tingkat Kabupaten/kota belum tersedia.



Oleh sebab itu, guna menerawang kinerja IPK Kabupaten Gorontalo Utara menggunakan *proxy* hasil IPK Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir.

Adapun capaian IPK Provinsi Gorontalo sejak pertama kali indeks ini dirilis hingga tahun 2022 beserta perbandingannya dengan angka capaian tingkat nasional disajikan dalam Grafik 2.23 berikut.

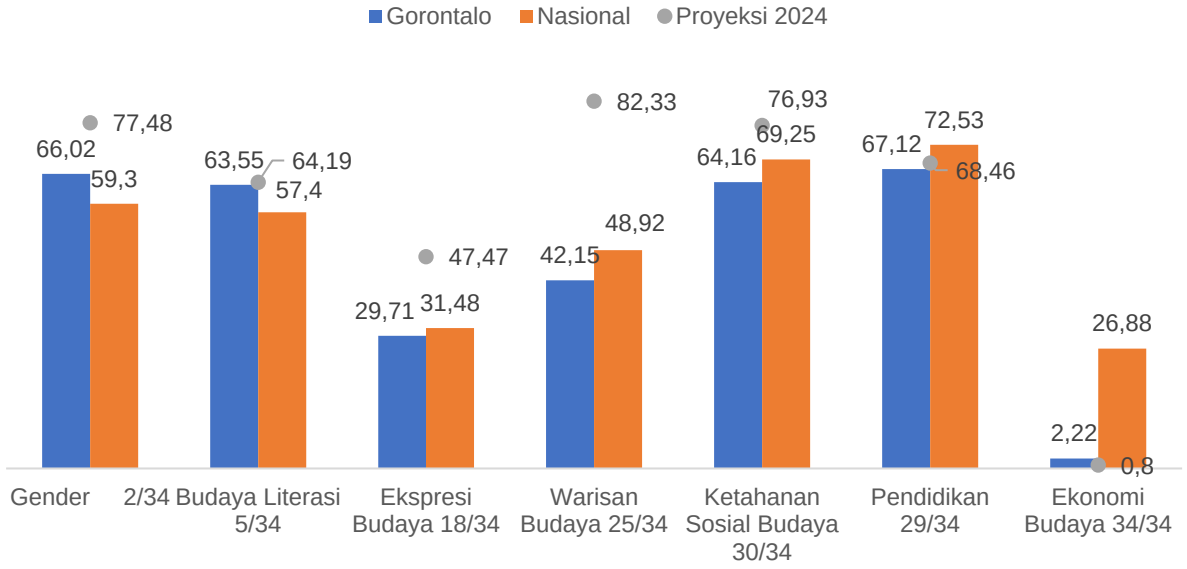
Grafik 2.23
Capaian IPK Provinsi Gorontalo dan Nasional



Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kemendikbud), 2023

Secara umum, perkembangan IPK Provinsi Gorontalo mengalami tren positif meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Perkembangan positif kembali ditunjukkan di tahun 2022 dengan terjadinya pergerakan positif sebesar 2,5 poin, yang merupakan *improvement* tertinggi kurun lima tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut pada hakekatnya ditunjang dari beberapa dimensi yang merupakan komposit dari IPK. Capaian 7 dimensi IPK tahun 2022 Provinsi Gorontalo dan Nasional, proyeksi di tahun 2024, serta peringkat per dimensi level nasional digambarkan pada Grafik 2.24 berikut.

Grafik 2.24
IPK Per Dimensi Provinsi Gorontalo dan Nasional, Proyeksi Tahun 2024, dan Peringkat Per Dimensi di Tingkat Nasional



Sumber: Indeks Pembangunan Kebudayaan (Kemendikbud), 2023

Berdasarkan Grafik 2.24 di atas, capaian dimensi ekonomi budaya merupakan dimensi dengan kategori capaian masih sangat rendah atau merah bahkan merupakan yang terendah dari seluruh Provinsi di Indonesia. Adapun indikator tunggal yang digunakan untuk mengukur capaian dimensi ini adalah persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukkan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas). Indikator ini jika diaplikasikan dalam skala kabupaten dapat diartikan sebagai jumlah penduduk di Gorontalo Utara yang terlibat dalam pertunjukkan seni yang keterlibatannya merupakan sumber penghasilan penduduk. Singkatnya, indeks ini mendeskripsikan sejauh mana penduduk Gorontalo Utara yang sumber penghasilannya berasal dari hasil pertunjukkan seni/budaya.

Capaian dimensi ekonomi budaya yang sangat rendah juga ikut menyiratkan capaian di level kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo. Pencapaian dimensi ini dapat diartikan bahwa cakupan penduduk di Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, yang sumber penghasilannya berasal dari pertunjukkan seni/aktivitas kebudayaan masih minim. Alhasil, dimensi ekonomi budaya merupakan salah satu dimensi yang perlu menjadi bahan orientasi utama dalam dinamika pembangunan kebudayaan Kabupaten Gorontalo Utara di masa mendatang.

2.3 ASPEK DAYA SAING

Salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah adalah daya saing daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Daya saing memiliki beberapa aspek yang terdiri dari kemampuan sumber daya manusia, ekonomi, fasilitas wilayah dan infrastruktur, serta iklim investasi.



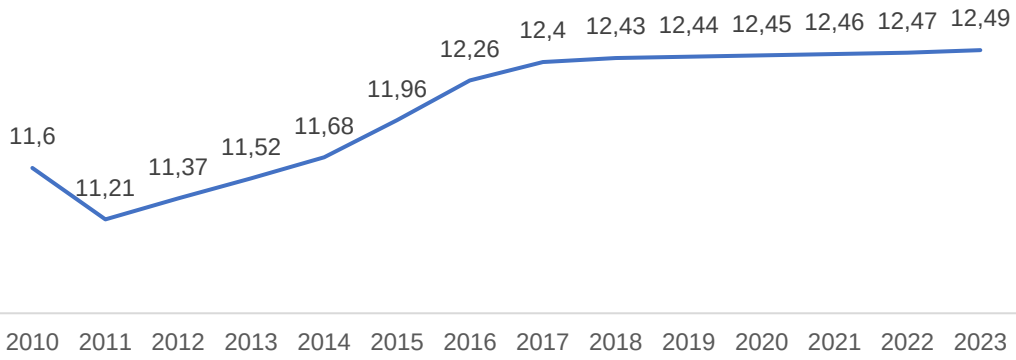
2.3.1 Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan (IP) adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik setiap tahun, yang merupakan hasil perhitungan rata-rata dari dua komponen: Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.

Harapan lama sekolah anak usia 7 tahun di Kabupaten Gorontalo Utara selalu berprogres positif dan saat ini sudah mencapai tamat SMA sesuai yang ditampilkan pada Grafik 2.25.

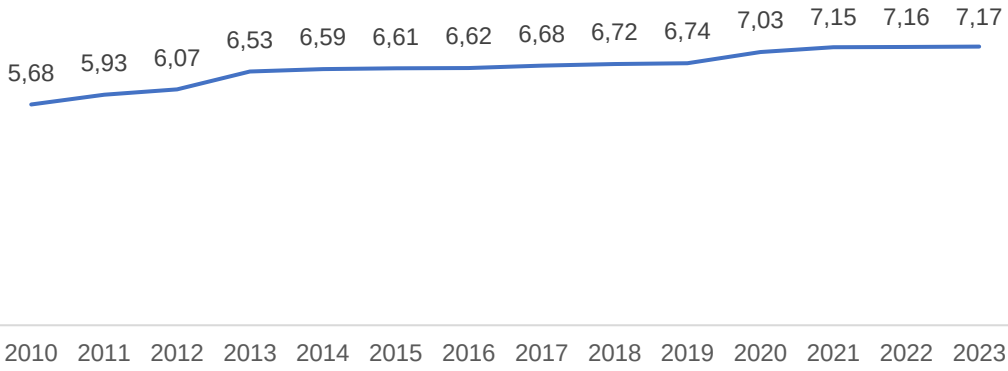
Grafik 2.25
Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Sedangkan pada indikator rata-rata lama sekolah, penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berusia 25 tahun keatas saat ini telah mencapai sekitar kelas 1 SMP atau lulus SD dengan lama sekolah sekitar 7 tahun sesuai yang ditunjukkan pada Grafik 2.26.

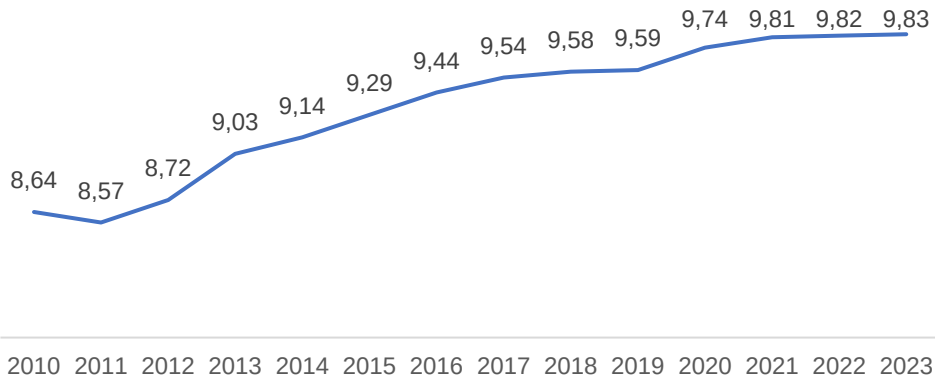
Grafik 2.26
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), diolah

Berdasarkan Grafik 2.27, IP Gorontalo Utara terus mengalami tren positif. Pada tahun 2010 masih berada di level 8,64. Seiring waktu, terus mengalami perbaikan hingga 1,19 poin selama 13 tahun terakhir menjadi 9,83.

Grafik 2.27
Indeks Pendidikan Gorontalo Utara

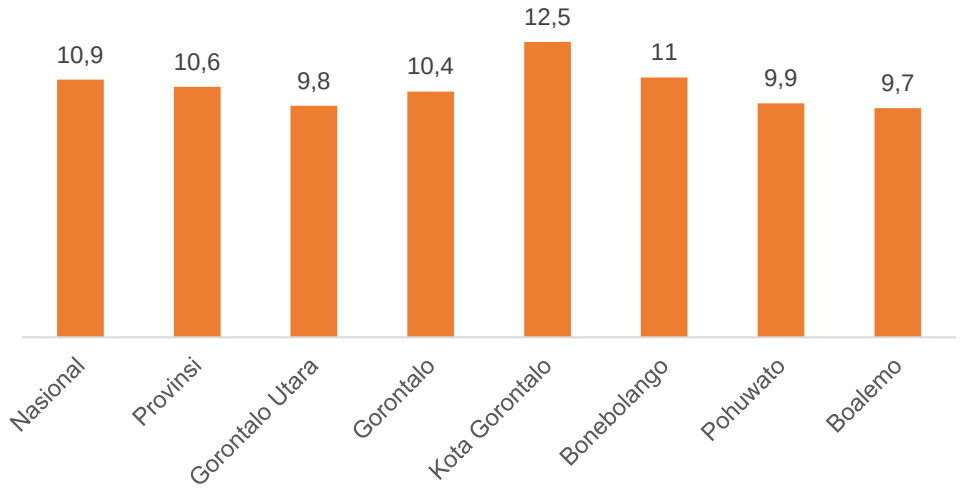


Sumber: Bapppeda Gorontalo Utara, diolah

IP Gorontalo Utara masih rendah jika dikomparasikan dengan capaian Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya. Dibandingkan IP Nasional di tahun 2022 sudah memiliki *gap* 1,1 poin, demikian pula jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi Gorontalo, *gap*-nya sekitar 0,8 poin. Adapun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya berada di posisi dua terbawah,

lebih baik satu tingkat dari Kabupaten Boalemo yang berada di posisi terakhir sebagaimana Grafik 2.28 berikut.

Grafik 2.28
Komparasi Indeks Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Progres pertumbuhan IP Gorontalo Utara relatif lambat dengan rata-rata pertumbuhan berkisar 0,10 poin per tahun, meskipun secara tren naik periode 12 tahun terakhir. Statistik faktual ini perlu menjadi pertimbangan krusial dalam perencanaan pendidikan di masa mendatang terutama dalam hal mendorong lama bersekolah bagi siswa.

2. Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi

Indeks kemampuan literasi dan numerasi merupakan dua indikator komposit penyusun Standar Pelayanan Minimum Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021. Sasaran kedua indeks ini adalah siswa jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sesuai kewenangan kabupaten yang diukur melalui hasil Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK).

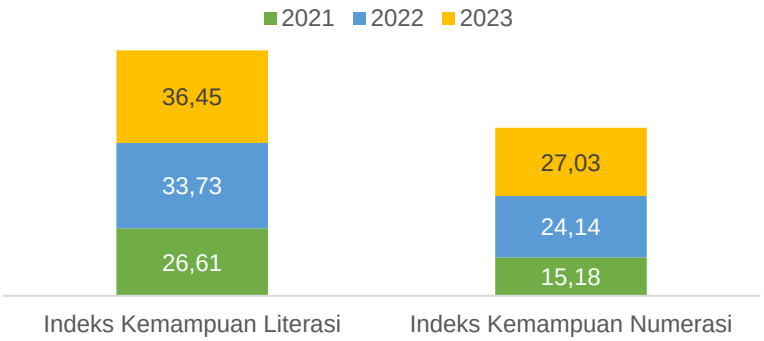
Indeks kemampuan literasi adalah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi). Sementara indeks kemampuan numerasi ialah persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat

matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.

- **Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Sekolah Dasar**

  Indeks kemampuan literasi tingkat SD Gorontalo Utara tahun 2023 mengalami kenaikan 8,06 persen dibandingkan 2022 dengan setahun sebelumnya 7,12 persen. Adapun kemampuan numerasinya mengalami kenaikan 11,97 persen dibandingkan 2022, dengan 8,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kedua indeks ini berdasarkan status penilaian dalam rapor pendidikan masih berada di kategori "Kurang". Gambaran informasi mendetail disajikan pada Grafik 2.29.

Grafik 2.29
Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SD



Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo, capaian dua indikator tersebut merupakan yang terendah, bahkan satu-satunya yang masih berkategori "Kurang", sebagaimana Tabel 2.52 berikut.

Tabel 2.52
Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SD Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

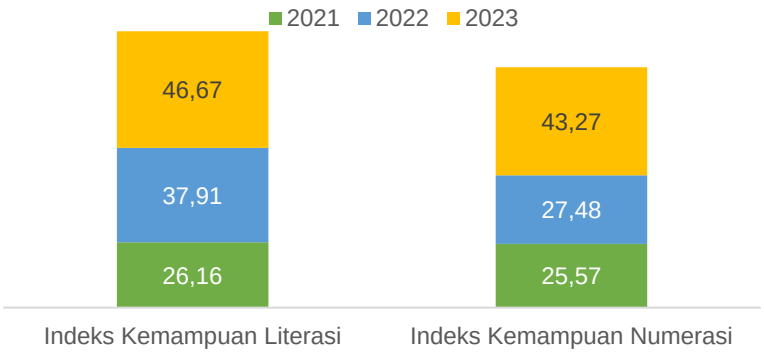
Kabupaten/kota	Indeks Kemampuan Literasi	Indeks Kemampuan Numerasi
Gorontalo Utara	36,45 (Kurang)	27,03 (Kurang)
Gorontalo	59,61 (Sedang)	52,89 (Sedang)
Kota Gorontalo	63,81 (Sedang)	53,35 (Sedang)
Bonebolango	55,86 (Sedang)	47,57 (Sedang)
Pohuwato	50,81 (Sedang)	44,70 (Sedang)
Boalemo	56,75 (Sedang)	46,03 (Sedang)

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2024

- **Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi Jenjang Sekolah Menengah Pertama**

Capaian kemampuan literasi dan numerasi jenjang SMP tidak jauh berbeda dengan jenjang sebelumnya. Kedua indikator tersebut di tahun 2023 sudah dalam kategori “Sedang” dan secara absolut angkanya lebih tinggi dari capaian tingkat sekolah dasar. Angka kemampuan literasi jenjang SMP mengalami kenaikan drastis 23,10 persen di tahun 2023, sedangkan pada tahun sebelumnya hanya 11,75 persen dibandingkan sebelumnya. Sedangkan kemampuan numerasi juga mengalami kenaikan 57,45 persen di tahun 2023. Drastis dibandingkan laju kenaikan 1,91 persen dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik 2.30.

Grafik 2.30
Indeks Literasi dan Numerasi Jenjang SMP



Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, 2023

Capaian indikator literasi dan numerasi jenjang SMP di tahun 2023 masih yang paling rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, sebagaimana Tabel 2.53 berikut.

Tabel 2.53
Perbandingan Indeks Kemampuan Literasi dan Numerasi SMP Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Kemampuan Literasi	Indeks Kemampuan Numerasi
1	Gorontalo Utara	46,67 (Sedang)	43,27 (Sedang)
2	Gorontalo	65,64 (Sedang)	68,90 (Sedang)
3	Kota Gorontalo	75,06 (Baik)	76,04 (Baik)
4	Bonebolango	48,96 (Sedang)	47,03 (Sedang)
5	Pohuwato	55,86 (Sedang)	53,46 (Sedang)
6	Boalemo	70,20 (Baik)	70,56 (Baik)

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2023

Capaian indikator kemampuan literasi dan numerasi di atas merupakan tolok ukur yang mendeskripsikan sejauh mana kualitas pendidikan di Gorontalo

Utara saat ini. Refleksi terhadap capaian indikator-indikator pada dua jenjang berbeda di atas, perlu menjadikan hasil rapor pendidikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan ke depan. Setiap proses pembenahan dalam rangka meningkatkan capaian indikator ini sepatutnya mempedomani hasil evaluasi yang direkomendasikan, baik dari segmentasi akar masalah maupun jenis pembenahan sehingga status keberhasilan intervensi program dapat terukur secara kuantitatif.

3. Indeks Literasi Digital

Indonesia memiliki jumlah pengguna internet setidaknya 62,1 persen dari jumlah penduduk (BPS, 2021), bahkan terus mengalami kenaikan, terutama dari perangkat telepon genggam. Kemampuan masyarakat dan kesempatan akses media digital membawa pengaruh pada berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi digital, dengan adanya peningkatan jumlah pengguna loka pasar di Indonesia menjadi salah satu yang terbanyak di dunia, dan akan terus naik hingga 221 juta pengguna di tahun 2024 (Statista, 2022).

Literasi digital dianggap memegang peran penting dalam pembangunan. Menurut UNESCO (2018), kemampuan literasi digital yang baik akan membantu memberantas kemiskinan, melalui kemudahan akses pada pelayanan sosial digital oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat akan mampu mendapatkan informasi dan memperoleh keuntungan dari media digital melalui informasi yang luas. Terbatasnya akses pendidikan dan tantangan dalam memperoleh pendidikan berkualitas bisa dibantu melalui kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi digital (UN, 2022).

Namun, kehadiran media digital tidak selalu berdampak positif. Beberapa tantangan media digital menjadi masalah serius, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau aktivitas digital yang merugikan lainnya. Salah satu penyebabnya yakni kurangnya kesadaran keamanan siber karena rendahnya kemampuan literasi digital (UNESCO, 2018b).

Guna meningkatkan kebijakan berbasis bukti yang valid untuk peningkatan tingkat literasi digital penduduk Indonesia, diperlukan satu studi agar dapat mengukur kemampuan literasi digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah merilis Indeks Literasi Digital (ILD) sebagai gambaran umum tentang pola penggunaan teknologi dan media digital masyarakat Indonesia dengan terdiri dari empat pilar: *digital skill*, *digital ethics*, *digital safety*, dan *digital culture*. Indeks ini memang masih belum menunjukkan tingkat pemanfaatan teknologi digital di Gorontalo Utara, namun diharapkan dapat dilihat gambaran secara umum dari capaian Provinsi Gorontalo.



ILD nasional secara tren meningkat. Pada tahun 2021, ILD Gorontalo sempat memperoleh peringkat nomor 5 tertinggi nasional meski masih di kriteria "Sedang". Namun di tahun 2022, termasuk mengalami penurunan tertinggi diantara provinsi lainnya dibandingkan kinerja tahun sebelumnya, sebesar 0,26 (selain Kepulauan Bangka Belitung (0,36) dan Sulawesi Barat (0,24)). Gambaran capaian ILD 15 besar nasional sebagaimana Tabel 2.54 berikut.

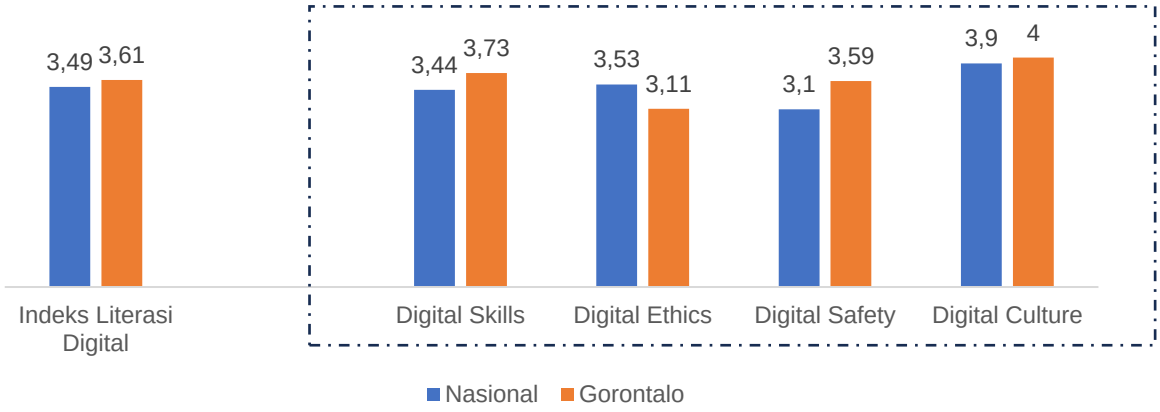
Tabel 2.54
Provinsi 15 Besar ILD Tahun 2021 dan 2022

Peringkat	Tahun 2021		Tahun 2022	
	Provinsi	Indeks	Provinsi	Indeks
1	DI Yogyakarta	3,71	DI Yogyakarta	3,64
2	Kepulauan Riau	3,68	Kalimantan Barat	3,64
3	Kalimantan Timur	3,62	Kalimantan Timur	3,62
4	Sumatra Barat	3,61	Papua Barat	3,62
5	Gorontalo	3,61	Jawa Tengah	3,61
6	Papua Barat	3,61	Kalimantan Tengah	3,60
7	Nusa Tenggara Timur	3,60	Jawa Barat	3,60
8	Kalimantan Barat	3,58	DKI Jakarta	3,59
9	DI Aceh	3,57	Kepulauan Riau	3,59
10	Kalimantan Utara	3,57	Jawa Timur	3,58
11	Sulawesi Barat	3,57	Sulawesi Tenggara	3,57
12	Kepulauan Bangka Belitung	3,57	Papua	3,55
13	Jawa Timur	3,55	Bengkulu	3,55
14	Sulawesi Utara	3,53	Maluku	3,54
15	Lampung	3,52	Jambi	3,54
	SKOR ILD 2021	**3,49**	**SKOR ILD 2022**	**3,54**

Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia 2022 (Kemenkominfo), 2022

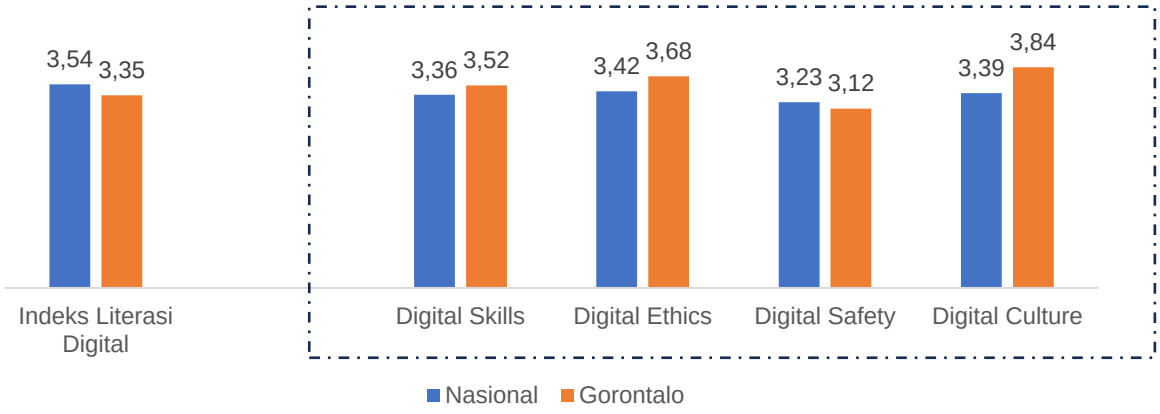
ILD Provinsi Gorontalo di tahun 2021 masih tinggi ditunjang oleh tingginya skor budaya digital, kemampuan digital, dan keamanan digital yang jauh di atas capaian nasional meskipun keduanya sama-sama masih berada di kriteria “Sedang”. Sedangkan pada tahun berikutnya, hanya pilar keamanan digital yang capaiannya di atas nasional sehingga secara agregat nilainya di bawah nasional. Gambaran per pilar ILD di Gorontalo dan Nasional pada tahun 2021 disajikan pada Grafik 2.31, dan tahun 2022 pada Grafik 2.32.

Grafik 2.31
ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2021



Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia 2022 (Kemenkominfo), 2022

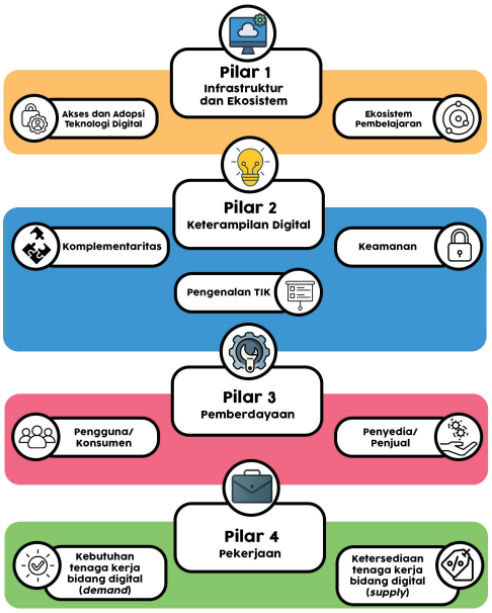
Grafik 2.32
ILD dan Pilar Pembentuknya di Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022



Sumber: Status Literasi Digital di Indonesia 2023 (Kemenkominfo), 2023

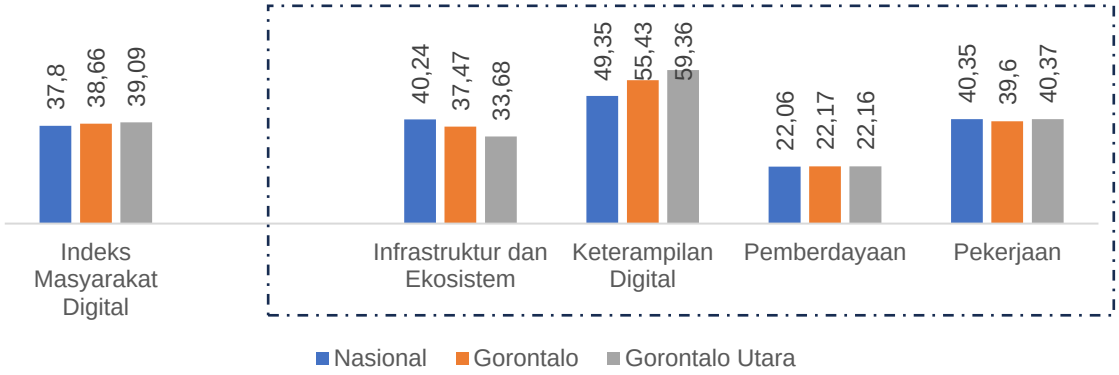
4. Indeks Masyarakat Digital

Indeks Masyarakat Digital (IMD) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya, yang terdiri dari empat pilar penyusun dan 10 sub pilar (tahun 2022 hanya 9 pilar).



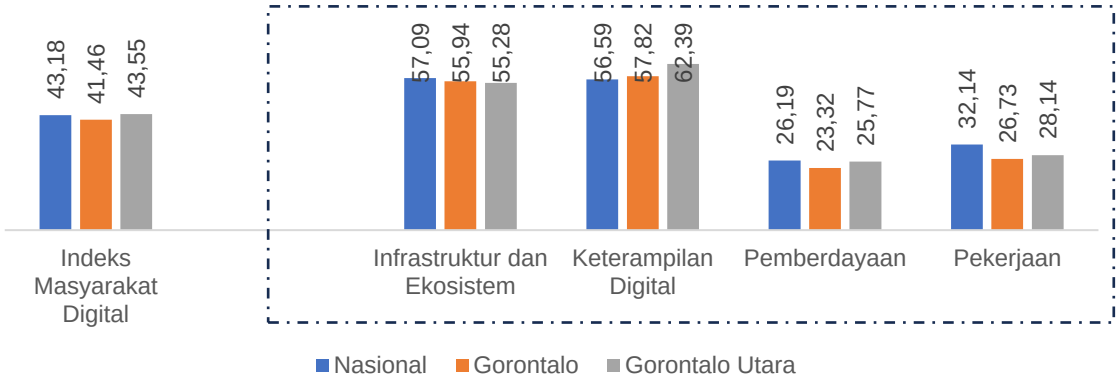
Pada tahun 2022, secara umum capaian Kabupaten Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo di atas Nasional yang menunjukkan bahwa tingkat "melek" digital daerah lebih baik dibandingkan rata-rata Nasional. Komponen terkuat di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 adalah Keterampilan Digital sedangkan terlemah di pilar Pemberdayaan. Begitupun tahun 2023 dengan kondisi yang mirip dengan tahun sebelumnya yang menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo Utara relatif sudah paham keterampilan dasar menggunakan teknologi digital, tapi belum terlalu memiliki kemampuan untuk memberdayakannya untuk meningkatkan perekonomian mereka.

Grafik 2.33
IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2022



Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2022 (BPSDM Kemenkominfo), 2023

Grafik 2.34
IMD dan Pilar-Sub Pilar Pembentuknya Tahun 2023



Sumber: Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2023 (BPSDM Kemenkominfo), 2024

2.3.2 Fokus Daya Saing Ekonomi

1. Indeks Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Untuk mengetahui posisi relatif tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah tersebut, menggunakan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD mengadopsi kerangka pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia, dengan menggunakan 4 aspek utama: lingkungan pendukung, sumberdaya manusia, pasar dan ekosistem inovasi, dan diukur berdasarkan 12 pilar: kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, efisiensi pemasaran produk, pasar tenaga kerja, pasar finansial, tingkat kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.



Berdasarkan laporan pengukuran IDSD 2022 oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh skor 2,66. Dari 12 pilar yang ada, pilar Ukuran Pasar dan Pilar Kapabilitas Inovasi memperoleh skor yang sangat rendah, menunjukkan perlunya perbaikan elementer pada 2 aspek tersebut. Pilar yang memiliki skor sangat baik yakni Pilar Institusi dan Pilar Dinamisme Bisnis. Sedangkan setahun berselang, Gorontalo Utara memperoleh skor yang lebih baik di 2,74 meski masih berada di bawah rata-rata Provinsi Gorontalo. Gambaran per pilar dirinci pada Tabel 2.55 dan 2.56.

Tabel 2.55
Skor Indikator Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	PILAR 1 INSTITUSI											PILAR 2 INFRASTRUKTUR							
	Keamanan		*Check and Balances*				Transparansi	Hak Atas Kepemilikan		Orientasi Masa Depan Pemerintah	Indeks Pilar Institusi	Infrastruktur Transportasi					Infrastruktur Kelistrikan	Infrastruktur Air	Indeks Pilar Infrastruktur
	Kejadian Pungutan Liar	Tingkat Pembunuhan	Transparansi Anggaran	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Upaya Pencegahan Korupsi	Hak Atas Kepemilikan	Kualitas Administrasi Pertanahan	Tingkat Pengelolaan Lingkungan		Konektivitas Jalan	Kualitas Infrastruktur Jalan	Proporsi Jumlah Stasiun Kereta Api	Proporsi Jumlah Bandara	Proporsi Jumlah Pelabuhan	Rasio Elektrifikasi	Akses Air Minum LAyak	
Boalemo	5,00	4,17	5,00	2,27	3,50	3,97	4,30	4,97	N/A	2,17	N/A	2,70	3,76	0,00	0,00	1,27	5,00	3,83	2,37
Gorontalo	5,00	3,89	5,00	2,05	3,50	4,49	4,84	4,85	N/A	3,12	N/A	1,35	2,37	0,00	5,00	N/A	5,00	1,16	N/A
Pohuwato	5,00	2,50	5,00	2,10	3,50	4,39	4,38	4,92	4,25	4,19	4,02	2,70	4,44	0,00	5,00	1,27	5,00	2,59	3,00
Bonebolango	5,00	4,44	5,00	3,17	4,00	4,20	4,00	4,92	N/A	2,93	N/A	1,35	3,34	0,00	0,00	0,00	5,00	3,41	1,87
Gorontalo Utara	5,00	4,72	5,00	1,90	3,50	3,68	4,26	4,96	4,42	2,21	3,96	5,00	3,39	0,00	0,00	3,73	5,00	1,75	2,69
Kota Gorontalo	5,00	5,00	5,00	2,98	3,50	4,56	4,43	4,75	5,00	3,17	4,34	0,00	4,78	0,00	0,00	0,00	5,00	3,34	1,87
Provinsi	**5,00**	**4,21**	**5,00**	**3,83**	**3,50**	**4,26**	**4,95**	**4,75**	**4,39**	**3,63**	**4,25**	**2,59**	**4,08**	**0,00**	**0,79**	**0,81**	**5,00**	**4,98**	**2,40**

Kabupaten/ Kota	PILAR 3 ADOPSI TIK					PILAR 4 STABILITAS EKONOMI MAKRO							Pilar 5 Kesehatan	PILAR 6 KETERAMPILAN						
	Adopsi TIK				Indeks Pilar Adopsi TIK	Stabilitas Ekonomi Makro						Indeks Pilar Stabilitas Ekonomi Makro	Indeks Pilar Kesehatan	Tenaga Kerja Saat Ini			Tenaga Kerja Masa Depan			Indeks Pilar Keterampilan
	Pengguna Telepon Seluler	Jangkauan Jaringan 4G	Pelanggan Internet *Fixed Broadband*	Pengguna Internet		Kapasitas Fiskal Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Pengangguran Terbuka	Indeks Ketahanan Pangan	Nilai Investasi	PDRB Per Kapita		Angka Harapan Hidup	Rata-rata Tahun Sekolah	Keterampilan Lulusan	Kemudahan Menemukan Pekerja Terampil	Angka Harapan Sekolah	Berpikir Kritis dalam Mengajar	Rasio Murid Guru Pendidikan Dasar	
Boalemo	4,70	2,61	0,02	3,16	2,62	1,68	1,79	3,85	4,01	0,16	1,47	2,16	3,77	2,33	2,38	2,44	3,46	2,41	2,91	2,66
Gorontalo	4,53	3,52	0,02	3,27	2,84	3,30	2,14	4,43	3,96	0,64	1,31	2,63	3,69	2,43	2,46	2,44	3,66	3,39	2,61	2,83
Pohuwato	4,69	1,35	0,01	3,07	2,28	2,55	1,94	4,30	4,03	0,20	1,80	2,47	3,38	2,42	2,38	2,31	3,44	2,86	2,78	2,70
Bonebolango	4,54	1,75	0,01	3,52	2,45	2,59	1,93	3,90	4,08	0,19	1,12	2,30	3,69	2,77	3,08	3,08	3,79	3,30	3,68	3,28
Gorontalo Utara	4,44	3,27	0,01	3,03	2,69	1,89	1,94	4,36	3,99	0,15	1,07	2,23	3,54	2,38	2,08	2,05	3,46	2,50	3,17	2,61
Kota Gorontalo	4,54	5,00	0,01	4,29	4,35	3,90	2,48	3,46	4,09	0,42	1,70	2,67	4,08	3,46	4,46	4,49	4,03	4,55	2,65	3,94
Provinsi	**4,53**	**2,33**	**2,17**	**3,86**	**3,22**	**0,93**	**2,24**	**5,00**	**4,03**	**0,16**	**1,43**	**2,58**	**3,58**	**2,63**	**3,40**	**3,56**	**3,64**	**4,24**	**2,58**	**3,58**

Kabupaten /Kota	PILAR 7 PASAR PRODUK		PILAR 8 PASAR TENAGA KERJA				PILAR 9 SISTEM KEUANGAN		PILAR 10 UKURAN PASAR		PILAR 11 DINAMISME BISNIS			PILAR 12 KAPABILITAS INOVASI						
	Persaingan Domestik	Indeks Pilar Pasar Produk	Fleksibilitas		Meritokrasi dan Insentif	Indeks Pilar Pasar Tenaga Kerja	Kedalaman	Indeks Pilar Sistem Keuangan	Ukuran Pasar	Indeks Pilar Ukuran Pasar	Persyaratan Administrasi		Indeks Pilar Dinamisme Bisnis	Keanekaragaman dan Kolaborasi	Riset			Komersialisasi		Indeks Pilar Kapabilitas Inovasi
	Persaingan Sektor Jasa		Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif	Upah Pekerja	Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki		Kredit Usaha Rakyat Per Produk		PDRB		Biaya untuk Memulai Usaha	Waktu untuk Memulai Usaha		Keanekaragaman Tenaga Kerja	Publikasi Ilmiah	Aplikasi Kekayaan Intelektual	Belanja Riset	Indeks Keunggulan Lembaga Riset	Aplikasi Merk Dagang	
Boalemo	2,42	2,42	3,19	3,19	4,05	3,48	2,25	2,25	0,23	0,23	5,00	5,00	5,00	3,43	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,63
Gorontalo	3,89	3,89	3,19	3,19	3,88	3,42	2,63	2,63	0,60	0,60	5,00	5,00	5,00	3,47	3,03	1,30	0,80	0,36	0,00	1,49
Pohuwato	2,06	2,06	5,00	3,19	3,10	3,76	2,77	2,77	0,31	0,31	5,00	5,00	5,00	3,02	2,57	0,16	0,08	0,18	0,00	1,00
Bonebolango	3,04	3,04	3,19	3,14	3,79	3,37	2,90	2,90	0,21	0,21	5,00	5,00	5,00	3,79	2,17	0,00	0,63	0,00	0,00	1,10
Gorontalo Utara	2,40	2,40	3,19	2,89	2,84	2,98	3,13	3,13	0,16	0,16	5,00	5,00	5,00	2,60	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,51
Kota Gorontalo	5,00	5,00	5,00	3,68	5,00	4,56	2,53	2,53	0,42	0,42	5,00	5,00	5,00	4,80	4,54	5,00	4,98	2,14	0,00	3,58
Provinsi	**3,75**	**3,98**	**5,00**	**3,14**	**5,00**	**4,38**	**3,76**	**2,41**	**0,17**	**0,11**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**3,68**	**2,21**	**2,52**	**0,20**	**2,48**	**2,32**

Sumber: Kajian Penyusunan Indeks Daya Saing Daerah 2022, 2023

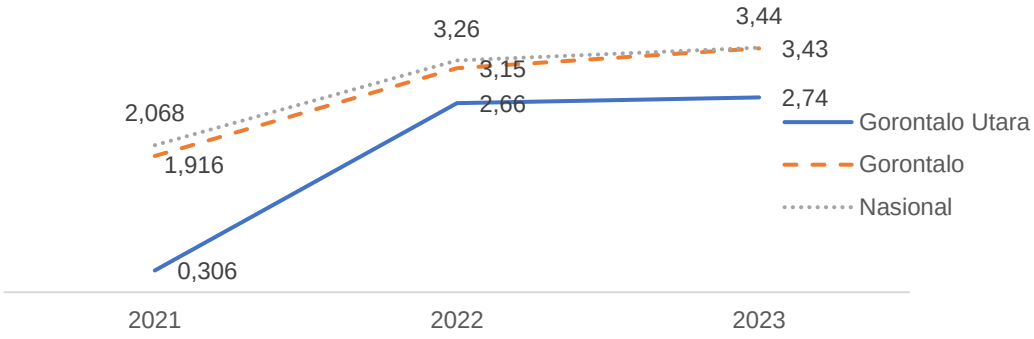
Tabel 2.56
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo
Tahun 2023

Daerah	Lingkungan Pendukung				SDM				Pasar		Ekosistem Inovasi		Skor IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
Nasional	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
Prov. Gorontalo	4,38	1,81	3,31	3,88	3,63	3,68	4,08	4,42	2,12	3,77	2,95	3,16	3,43
Rata-rata Kab/Kota	4,31	1,75	3,80	3,32	3,71	3,45	2,09	4,03	0,74	3,76	2,84	1,82	2,83
Boalemo	4,15	1,40	3,68	3,19	3,82	3,09	1,39	3,54	0,41	3,66	2,93	1,06	2,69
Gorontalo	4,32	1,90	3,95	3,36	3,67	3,44	1,85	4,17	1,46	4,08	2,61	2,48	3,11
Pohuwato	4,42	1,59	3,26	3,23	3,43	3,19	1,14	3,81	0,91	3,78	2,53	1,53	2,74
Bonebolango	4,35	1,62	3,41	3,20	3,75	3,59	1,84	4,32	0,43	3,62	2,96	1,47	2,88
Gorontalo Utara	4,01	1,58	3,75	3,65	3,56	3,37	1,54	3,55	0,50	3,48	3,29	0,60	2,74
Kota Gorontalo	4,60	2,42	4,74	3,29	4,06	4,02	4,81	4,77	-	3,92	2,72	3,76	-

Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023 (BRIN), 2024

Secara *time series*, terlihat capaian di tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan khususnya pada tahun 2022, dengan adanya perbaikan elementer pada beberapa komponen kinerja serta pemenuhan ketersediaan data yang digunakan dalam metode perhitungan meskipun belum berhasil menipiskan *gap* dengan capaian Provinsi Gorontalo dan Nasional.

Grafik 2.35
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

2. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau atau *Green Economy Index* (GEI) menjadi alat ukur *tangible*, representatif, dan akurat untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau, salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas, dengan berprinsip pada menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan

daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia. Indeks Ekonomi Hijau juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang serta mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, sebagai tulang punggung dalam proses transisi menuju Ekonomi Hijau.

Indeks ini terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pilar ekonomi terdiri atas enam indikator: intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita. Sementara itu, pilar sosial mencakup empat indikator, yakni tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah. Pilar lingkungan meliputi lima indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

Dalam konteks Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota yang ada di dalamnya, upaya pembangunan ekonomi hijau perlu dilakukan pertama dengan penyusunan *roadmap* ekonomi hijau, yang saat ini potensinya sangat memungkinkan untuk dikembangkan karena salah satu alasannya masih terdapat bonus demografi, sehingga perlu upaya dorongan dari pemerintah kepada pemuda untuk mengambil peran dan penggerak dalam sektor pertanian (termasuk turunannya seperti bidang UMKM dan kearifan lokal) sebagai komponen utama dalam komposisi PDRB di Provinsi Gorontalo. Selain itu diharapkan telah dilakukan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan atau melalui bank sampah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Angka Indeks Ekonomi Hijau saat dokumen ini disusun masih dalam proses perhitungan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga datanya belum dapat disajikan.

3. Indeks Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional bahkan daerah, terlebih tantangan ketahanan pangan semakin besar dengan adanya isu-isu pangan global dan perubahan iklim. Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan 17 target dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang diantaranya adalah tanpa kemiskinan dan mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan beserta faktor-faktor pendukungnya, digunakan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan: ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Provinsi Gorontalo dalam perhitungan IKP nasional tahun 2023 termasuk pada kelompok “Sangat Tahan” dalam pangan, begitu juga dengan kabupaten/kota yang ada di dalamnya. Rincian informasi tahun 2023 dan perbandingan dengan kinerja tahun sebelumnya dimuat pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57
Komparasi Komponen Penyusun Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Ketersediaan	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
1	Boalemo	98,53	75,22	73,96	81,71	97,60	68,73	78,78	81,41
2	Gorontalo	92,85	77,54	71,68	79,79	94,16	72,87	75,04	80,13
3	Pohuwato	98,34	75,49	70,79	80,47	98,31	71,11	81,29	83,34
4	Bonebolango	83,95	80,98	73,41	78,84	79,30	76,22	79,03	78,27
5	Gorontalo Utara	97,59	77,90	69,22	80,34	96,48	71,14	71,95	79,07
6	Kota Gorontalo	-	91,41	73,28	80,95	-	92,07	83,92	87,59
7	**Provinsi**	**94,25**	**79,76**	**71,91**	**80,35**	**93,17**	**75,36**	**78,33**	**81,63**

Sumber: Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2023 (Badan Pangan Nasional RI), 2024

Capaian kinerja Kabupaten Gorontalo Utara selama dua tahun terakhir menunjukkan kinerja positif meskipun sempat sedikit turun di tahun 2023, yang berdasarkan analisa diakibatkan peningkatan keterjangkauan yang menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat membaik sejalan dengan akses terhadap pangan yang semakin baik pula, serta meningkatnya pemanfaatan yang mengindikasikan pemahaman/pengetahuan yang

meningkat terhadap pangan dan gizi, pola asuh, peningkatan kualitas sanitasi dan akses terhadap air bersih, atau bantuan pangan beras untuk KPM, serta bantuan penanganan stunting berupa telur dan daging ayam. Untuk meningkatkan skor IKP, bisa dilakukan melalui mendorong produksi pangan, mengurangi angka stunting, peningkatan akses air bersih, serta mengentaskan kemiskinan serta perbaikan akses fisik.

2.3.3 Fokus Daya Saing Iklim Investasi

1. Indeks Demokrasi Indonesia

Kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Semakin tinggi kesadaran politik, mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Demokrasi di suatu wilayah, yaitu angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur oleh BPS berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia, seperti Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Berdasarkan narasi di paragraf sebelumnya, saat ini angka IDI baru dihasilkan pada level provinsi, sehingga untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Kabupaten Gorontalo Utara untuk sementara menggunakan *proxy* IDI Provinsi Gorontalo, karena metodologi dan enumerator yang digunakan saat ini lebih banyak terdapat di level provinsi, terutama pada proses koding koran serta portal berita *online*. Kategori nilai indeksnya termasuk “Tinggi” jika skor berada di atas 80, “Sedang” jika di rentang 60-80, selain itu kategori “Rendah”.

Pada periode pembangunan tahun 2018-2023, IDI Provinsi Gorontalo cenderung dinamis, pada kurun waktu 2019 dan 2020 mengalami peningkatan, bahkan capaiannya masuk kategori “Baik” pada tahun 2020. Namun setahun berselang, kembali turun. Capaian indeks tersebut tentu dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di beberapa periode tahun yang berbeda. Setelah menggunakan metode baru, dalam hal

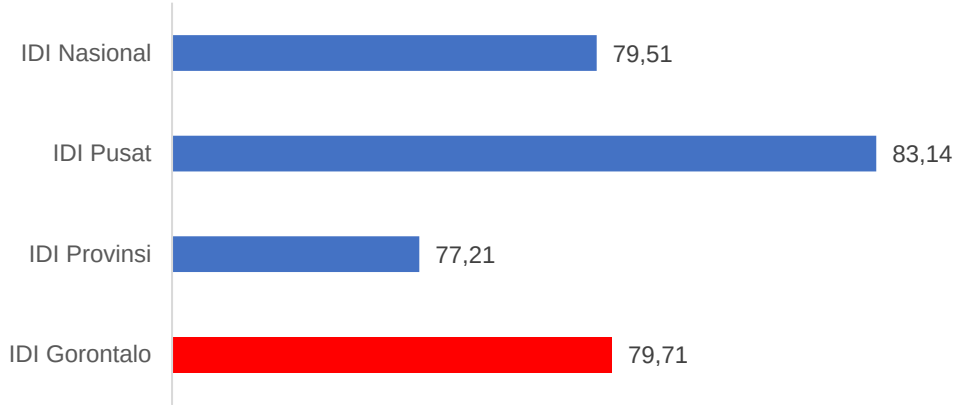
mengukur indeks provinsi (agregasi dari nilai 34 provinsi), pusat (data dari K/L di tingkat pusat), dan nasional yang merupakan agregasi indeks provinsi dan pusat serta indeks menurut provinsi. IDI Provinsi Gorontalo tahun 2023 berada di atas IDI provinsi (agregasi dari 34 provinsi), dan IDI nasional, namun di bawah IDI Pusat, dan nyaris masuk kategori "Tinggi". Jika dilihat dari ketiga aspek penyusunnya, nilai aspek kesetaraan IDI Provinsi Gorontalo paling tinggi dibandingkan dengan dua aspek penyusun lainnya. Nilai aspek kesetaraan dan kebebasan IDI di Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori "Tinggi". Namun, pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, masih berada pada kategori "Sedang". Rangkaian informasi capaian tersebut disajikan pada Tabel 2.58 dan Grafik 2.36.

Tabel 2.58
Indeks Demokrasi di Provinsi Gorontalo Menurut Aspek

No.	Aspek	Tahun					
		2018	2019	2020	*2021	*2022	*2023
1	Kebebasan sipil	79,33	75,17	86,42	81,57	65,31	81,68
2	Hak-hak politik	64,95	76,93	75,89	81,46	82,21	83,32
3	Lembaga demokrasi	76,26	76,70	90,81	67,18	71,92	73,43
	Indeks Demokrasi				77,01	73,74	79,71

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024
*Metode baru

Grafik 2.36
Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2023



Sumber: Profil Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo 2023

Sesuai hasil di atas, aspek kapasitas lembaga demokrasi perlu mendapatkan perhatian khusus, karena semakin rendah nilai IDI, artinya demokrasi di suatu daerah semakin terhambat. Terdapat tiga indikator pada aspek kapasitas lembaga demokrasi yang memiliki nilai rendah, yaitu indikator 15, "Kinerja

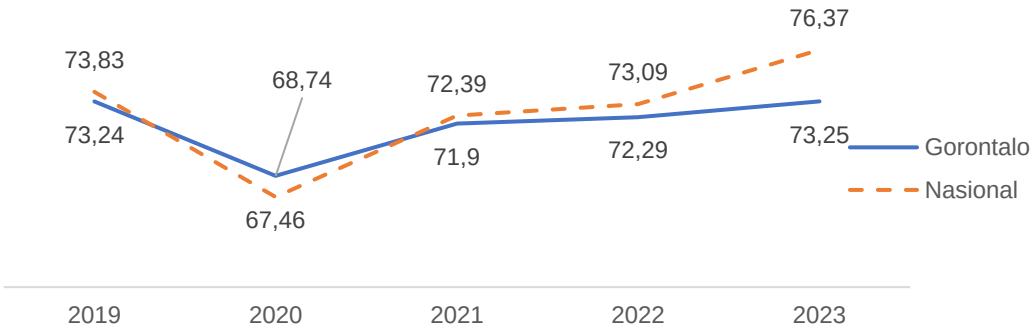
lembaga legislatif", indikator 18, "Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah", dan indikator 22, "Pendidikan politik pada kader partai politik".

2. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Salah satu sasaran pembangunan yakni menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat. Interaksi antar umat beragama juga dapat menjadi salah satu penilaian terkait ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dapat diketahui kondisi kerukunan umat beragama di suatu wilayah, yang disusun oleh 3 dimensi: dimensi toleransi, kesetaraan, dan kerjasama, dengan kategorisasi 0-20,00 (Sangat Rendah); 20,01-40,00 (Rendah); 40,01-60,00 (Sedang); 60,01-80,00 (Tinggi); dan 80,01-100 (Sangat Tinggi).

Indeks KUB menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara dalam menjalankan agama, serta bekerjasama dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, capaian IKUB baru dilihat pada level provinsi, sehingga untuk merefleksikan kondisi kerukunan umat beragama di Gorontalo Utara menggunakan IKUB Provinsi Gorontalo, yang selama lima tahun terakhir menunjukkan tren positif meski nilainya masih dibawah nasional.

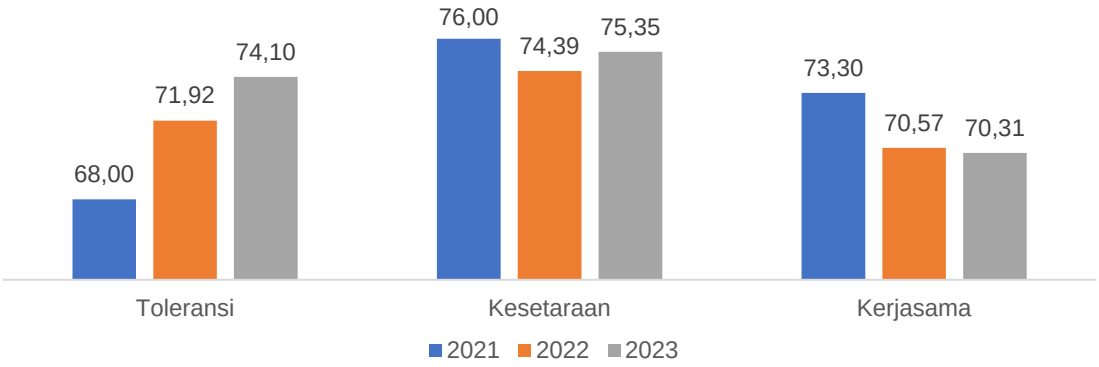
Grafik 2.37
Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Gorontalo



Sumber: Balitbang Kementerian Agama RI, diolah

Komponen dimensi pembentuk IKUB Provinsi Gorontalo tiga tahun terakhir digambarkan sebagai berikut.

Grafik 2.38
Dimensi Pembentuk IKUB Provinsi Gorontalo



Sumber: Balitbang Kementerian Agama RI, diolah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ada beberapa faktor keagamaan yang dapat mempengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik).

3. Indeks Kriminalitas

Tercipta dan terpenuhinya rasa aman pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas termasuk aktifitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang mendukung terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Mewujudkan keamanan merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah. Selain itu, juga diperlukan kesadaran masyarakat untuk ikut menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Untuk menggambarkan kondisi keamanan di Gorontalo Utara, diperlukan suatu gambaran komposit yang memuat beberapa kondisi/enumerasi yang menunjukkan sejauh mana keamanan daerah dalam mendukung upaya peningkatan investasi, namun saat ini belum tersedia indeks kriminalitas di Gorontalo Utara. Sebagai *proxy*, indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kejahatan secara umum adalah angka jumlah kejahatan yang dilaporkan (*crime total*) dan jumlah orang yang beresiko mengalami tindak kejahatan (*crime rate*). Pada tahun 2023, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Gorontalo Utara mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022, namun turun jika dibandingkan tahun 2021. Sedangkan pada

crime rate, secara umum terjadi penurunan, yang dibarengi dengan peningkatan dalam artian positif pada tingkat penyelesaian kejahatan. Namun demikian, *crime rate* Provinsi Gorontalo termasuk tinggi bila dilihat dari kacamata nasional. Gambaran kondisi kriminalitas di wilayah Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Kriminalitas di Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

Kepolisian Resort	Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*)				Risiko Penduduk Terkena Kejahatan per 100.000 Penduduk (*Crime Rate*)				Persentase Penyelesaian Kejahatan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Boalemo	269	235	267	252	181	141	160	167	75,5	43	58	67
Gorontalo	780	563	557	549	196	149	147	135	58,2	67	34	58
Pohuwato	401	338	356	441	269	209	221	290	60,3	75	48	62
Bonebolango	335	352	383	296	202	218	238	176	119,1	57	51	86
Gorontalo Utara	147	224	197	203	114	195	171	155	10,9	29	38	51
Kota Gorontalo	786	638	616	728	390	291	281	354	58,3	92	89	109
Polda Gorontalo	251	242	296	441	-	-	-	-	66,1	85	47	71
Provinsi Gorontalo	2.969	2.592	2.672	2.910	249	216	222	240	65,3	69	55	76

Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

2.3.4 Fokus Daya Saing Infrastruktur

1. Indeks Ketahanan Air

Ketahanan air perlu dijamin untuk mendukung ketahanan nasional, yang mencakup tiga pilar dalam pengelolaan sumber daya air: konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air, serta dilengkapi dengan dua pilar pendukung yaitu pengembangan sistem informasi SDA dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA. Untuk instrumen pemantauan kelima komponen tersebut, diperlukan penyusunan Indeks Ketahanan Air (IKA) tingkat nasional, tingkat provinsi, dan tingkat wilayah sungai, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air.

Dalam Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) yang disusun untuk meningkatkan Ketahanan Air Nasional yang diukur berdasarkan target *Sustainable Development Goals* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional meliputi:

1. Akses terhadap air minum yang aman, merata, terjangkau, dan yang terlayani 100 persen;
2. Akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata mencapai 100 persen;

3. Peningkatan mutu air sesuai Baku Mutu Air yang ditetapkan;
4. Peningkatan efisiensi penggunaan air di semua sektor;
5. Jaminan keberlanjutan pasokan air;
6. Penerapan prinsip pengelolaan sumber daya air terpadu;
7. Perlindungan dan pemulihan ekosistem terkait sumber daya air; dan
8. Pengurangan risiko kerugian akibat bencana terkait air.

Dalam konteks Gorontalo Utara, belum memiliki sumber mata air sehingga masih mengandalkan sumber air baku dari air permukaan pada sungai-sungai yang sudah ada, sehingga pemeliharaan dan perawatan kawasan DAS menjadi hal yang krusial. Ada beberapa lokasi yang berfungsi sebagai *intake* air baku, dengan rincian lokasi sebagaimana Tabel 2.60.

Tabel 2.60
***Intake* Air Baku di Gorontalo Utara**

No.	Instalasi	Kapasitas Produksi (Liter/Detik)	Sumber Air Baku	Daerah Layanan	Lokasi *Intake*
1	IKK Atinggola	20	Sungai Sigaso	Interkoneksi Atinggola dan Gentuma Raya	Desa Sigaso
2	IKK Gentuma Raya	10	Sungai Durian	Motomingo, Molonggota, Gentuma, Bohusami, Pasalae, Katapang, Nanati	Desa Motomingo dan Durian
3	IKK Titidu	10	Sungai Posso	Pelabuhan Kwandang, Katialada, Jemer, Cisadane, Moluo, Titidu	Desa Bualemo
4	IKK Posso	5	Sungai Posso	Posso, Bulalo, Alata, Leboto, Mootinelo, Molingkapoto, Molingkapoto Selatan, Botungobungo	Desa Bualemo
5	IKK Anggrek	10	Embung Ilangata	Ibarat, Ilangata, Tolongio, Ilodulungo	Desa Ilangata
6	IKK Monano	5	Sungai Juriati	Monano, Zuriati, Monano Atas, Tudi, Mokonowu, Pilohulata	Desa Jurati
7	IKK Sumalata	10	Sungai Mebongo	Mebongo, Bulontio Barat, Bulontio Timur	Desa Mebongo
8	IKK Buloila	20	Sungai Tumba	Tumba, Lelato, Buloila	Desa Tumba
9	IKK Biau	20	Sungai Didingga	Didingga, Bualo, Omuto, Biau, Windu, Topi	Desa Didingga
10	IKK Tolinggula	10	Sungai Bogo-bogo	Ilotunggula, Tolinggula Ulu, Tolitejaya, Tolinggula Tengah, Molangga, Ilomangga, Tolinggula Pantai	Desa Bogo

Sumber: PUDAM Gorontalo Utara, 2023

Akses air minum layak menurut kaidah BPS yakni jika sumber air minum utama yang digunakan rumah tangga adalah leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung. Bagi rumah tangga yang menggunakan sumber air minum berupa air kemasan, dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber

air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

Tabel 2.61
Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rumah tangga bersumber air minum layak	-	-	-	86,23	89,47	90,14

Sumber: Susenas (BPS) Gorontalo Utara, diolah
Catatan:
Untuk data tahun 2018-2020 tidak tersedia tabulasi air minum layak. Yang tersedia hanya tabulasi sumber air minum utama yang digunakan

Tabel 2.62
Komposisi Sumber Air Minum Layak

No.	Sumber Air	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Air kemasan bermerk, air isi ulang	41,33	46,45	46,37	0,00	59,68	N/A
2	Leding	9,76	12,85	11,73	27,04	6,30	25,74
3	Sumur bor/pompa	9,67	5,15	6,41	15,67	7,53	23,17
4	Sumur terlindung	24,39	20,05	22,48	41,40	16,36	35,79
5	Sumur tak terlindung	6,04	5,02	4,71		3,78	
6	Mata air terlindung, mata air tak terlindung	8,81	10,03	6,31	9,42	6,35	12,33
7	Air permukaan lainnya	0,00	0,46	1,99	6,35	0,00	1,99

Sumber: Susenas (BPS) Gorontalo Utara, diolah

Menurut kaidah BPS, rumah tangga dikatakan memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak apabila rumah tangga memiliki fasilitas tempat Buang Air Besar (BAB) yang digunakan sendiri atau bersama rumah tangga tertentu (terbatas) ataupun di MCK komunal, menggunakan jenis kloset leher angsa, dan tempat pembuangan akhir tinja di tangki septik atau IPAL atau bisa juga di lubang tanah jika wilayah tempat tinggalnya di perdesaan.

Tabel 2.63
Kepemilikan dan Penggunaan Fasilitas BAB

No.	Status	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sendiri	49,23	62,43	67,19	75,02	72,44	77,58
2	Bersama	9,16	9,10	6,50	4,61	9,91	22,42
3	Komunal/umum	15,14	7,73	5,35	2,87	3,25	
4	Tidak digunakan	0,00	0,00	0,11	0,67	0,20	
5	Tidak ada	26,47	20,74	20,85	16,82	14,20	

Sumber: Susenas (BPS) Gorontalo Utara, diolah

Tabel 2.64
Komposisi Kepemilikan Kloset

No.	Jenis	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Leher angsa	99,56	97,20	97,47	99,75	98,50	97,82
2	Plengsengan	0,44	0,00	0,00	0,00	0,23	2,18
3	Cemplung/cubluk	0,00	2,80	2,53	0,25	1,27	

Sumber: Susenas (BPS) Gorontalo Utara, diolah

Hasil perhitungan IKA oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional saat dokumen ini disusun masih ditunggu hasilnya, yang akan berfungsi sebagai acuan dalam evaluasi pencapaian kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air dan penyusunan program, serta menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah.

2. Indeks Ketahanan Energi

Tingkat ketahanan energi suatu wilayah ditentukan oleh 4 faktor: akses energi (*accessibility*), ramah lingkungan (*acceptability*), suplai energi (*availability*), serta harga yang terjangkau (*affordability*). Dari empat faktor tersebut, akses energi dan energi ramah lingkungan masih harus digenjot. Saat ini, akses energi yang beragam masih terbatas dan menghadapi tantangan geopolitik dan geografis. Pengembangan sumber energi yang ramah lingkungan pun masih belum jadi prioritas pemerintah.

Kabupaten Gorontalo Utara relatif tidak memiliki kendala pada suplai energi listrik, namun masih berupa energi yang sumbernya *mainstream* dan belum bersih/terbarukan, seperti yang bersumber dari pembangkit listrik bertenaga uap yang digerakkan pembakaran batubara, yang bersumber dari PLTU yang berlokasi di Kecamatan Tomilito (PLTU Tanjung Karang) dan PLTU Anggrek di Kecamatan Anggrek, dengan kapasitas masing-masing 2x50 dan 2x25 MW untuk melayani wilayah Gorontalo dan Sulawesi Utara. Selain itu, kebutuhan masyarakat untuk mobilitas antar lokasi masih dipenuhi dari sumber energi fosil, sehingga secara umum kondisinya masih rentan energi.

Pola konsumsi masyarakat serta bisnis energi yang cenderung mengarah ke energi fosil di level nasional dianggap menekan pengembangan *clean and renewable energy*. Ketergantungan tinggi tersebut salah satunya akibat dari kebijakan subsidi yang membuat energi berbasis fosil lebih terjangkau. Selain akibat *policy*, yang menyebabkan keterbatasan pilihan energi bersih di

Gorontalo Utara juga karena potensi kapasitas produksinya. Contohnya rencana pengembangan pembangkit listrik bertenaga air (PLTMH) di beberapa lokasi di Gorontalo Utara (Tolinggula, Sumalata, Gentuma Raya, dan Atinggola) masih menemui tantangan dengan kontinuitas debit air dan ketinggian jatuh air.

Meskipun belum dilakukan perhitungan ketahanan energi berupa indeks ketahanan energi spesifik di Gorontalo Utara, namun secara umum, beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketahanan energi: Pertama, pemerintah perlu terus mendorong peningkatan pasokan energi karena kebutuhannya akan terus meningkat. Untuk meningkatkan pasokan, tidak bisa hanya bergantung pada sumber energi fosil yang jumlahnya terbatas, perlu solusi yang lebih berkelanjutan. Oleh karena itu, transisi menuju energi terbarukan harus segera dilakukan. Untuk mendukung transisi ini, pemerintah, masyarakat, dan industri energi harus bekerja sama untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia, teknologi, modal, dan pasar. Sesuai RTRW Gorontalo Utara 2024-2044, beberapa lokasi yang didorong untuk menjadi pusat suplai energi listrik ramah lingkungan seperti pembangkit listrik bertenaga air dengan lokasi yang sudah disebutkan sebelumnya, serta pembangkit listrik bertenaga surya yang diproyeksikan berada di seluruh kecamatan.

Kedua, pemerintah harus mendorong pemerataan akses sumber energi bagi masyarakat. Saat ini, Desa Dudepo menjadi satu-satunya desa di Gorontalo Utara yang saat dokumen ini disusun belum memiliki akses listrik karena kendala geografis, meskipun saat ini sudah mulai berprogres penyediaan jaringannya melalui kabel bawah laut. Keterbatasan ini seharusnya jadi momentum bagus untuk menyediakan suplai energi terbarukan yang lebih mudah dijangkau penduduk di kawasan 3T daripada energi fosil.

Ketiga, efisiensi energi. Masyarakat perlu bijak dalam menggunakan energi agar ketahanan energi tetap terjaga, karena pasokan energi fosil sudah terbatas dan transisi energi tidak instan.

3. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Untuk mengetahui secara objektif tingkat kepuasan masyarakat dan *outcome* atas penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah dari mulai pusat hingga daerah, perlu diukur melalui suatu perhitungan atau indeks yang konsisten dan berlaku nasional sebagai alat komparasi dengan daerah lainnya. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan alat untuk mengevaluasi kualitas pembangunan infrastruktur tersebut, yang meliputi ketersediaan fisik (*availability*), kualitas fisik (*quality*), kesesuaian (*appropriateness*), efektifitas pemanfaatan (*utility*), penyerapan tenaga kerja (*job creation*), serta kontribusi pada perekonomian. Dengan adanya indeks ini, dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan-permasalahan layanan infrastruktur, serta memberikan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Namun, perhitungan indeks ini belum dilakukan di Gorontalo Utara, disamping belum ada konsensus bersama penggunaan metode agar berlaku *universal* sebagai bahan komparasi.

Terlepas dari urgensi dan manfaat indikator tersebut, sebelumnya Pemerintah Daerah Gorontalo Utara telah menggunakan indikator substitusi dalam melihat tingkat pembangunan infrastruktur, yaitu “Persentase Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan”. Pemenuhan layanan dasar wilayah merupakan pengukuran terhadap capaian 7 sub indikator layanan dasar wilayah, yaitu: persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak; persentase rumah tangga, tipe daerah, memiliki akses terhadap sumber air minum layak; persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak; persentase jalan dalam kondisi mantap; persentase konektivitas antar wilayah; persentase kesesuaian tata ruang; persentase kinerja irigasi. Angka agregat diperoleh dengan cara merata-ratakan realisasi ketujuh sub-indikator tersebut, yang bersumber dari beberapa sumber, seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta Dinas Perhubungan. Ke depan, pemenuhan infrastruktur seharusnya tidak hanya mencapai tahap “Layak”, melainkan hingga mencapai “Aman” sehingga memberikan layanan dan jaminan hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Capaian setiap sub indikator dan agregat rata-ratanya secara *time series* disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65
Komponen Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan

No.	Sub Indikator Layanan Dasar	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak (Susenas BPS)	-	51,35	56,73	58,90	63,03	67,21
2	Persentase rumah tangga, tipe daerah, memiliki akses terhadap sumber air minum layak (Susenas BPS)	-	84,73	87,55	86,23	89,47	90,14
3	Persentase rumah tangga memiliki akses terhadap sanitasi layak (Susenas BPS)	-	69,83	71,80	79,03	81,80	81,37
4	Persentase jalan dalam kondisi mantap (Dinas PU)	41,74	41,82	38,86	43,74	52,99	54,49
5	Persentase konektivitas antar wilayah (Dinas Perhubungan)	67,00	67,00	67,00	67,00	76,00	76,00
6	Persentase kesesuaian tata ruang (Dinas PU)	32,00	68,95	69,22	69,22	74,10	74,10
7	Persentase kinerja irigasi (Dinas PU)	67,12	68,71	67,66	67,53	65,84	67,71
Persentase Pemenuhan Layanan Dasar dan Kewilayahan			**64,63**	**65,55**	**67,38**	**71,89**	**73,00**

Sumber: Susenas (BPS), diolah; Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan

4. Indeks Daya Saing Digital

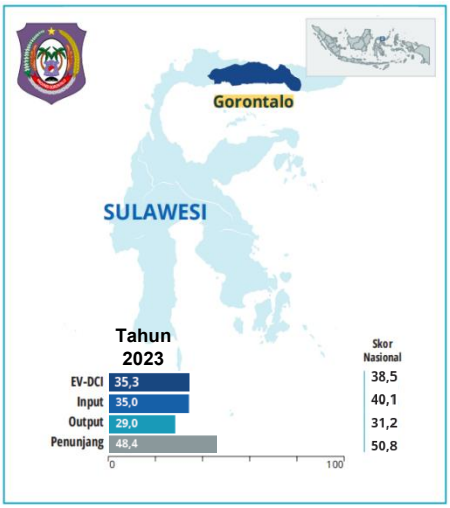
Tiga tahun terakhir, digitalisasi telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagai dampak dari akselerasi pandemi. Tak hanya penetrasi internet yang semakin besar, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sektor *digital* sebagai penopang ekonomi juga kian tinggi. Selama pandemi tersebut, kegiatan dengan interaksi tinggi "dipaksa" beralih ke *virtual*. Orang bertransaksi melalui *marketplace* atau *e-commerce* dan melakukan pembayaran secara *online* menjadi pilihan yang paling aman dan tepat. Akses finansial juga semakin mudah dan merata. Konsultasi dokter menjadi lebih mudah secara *online*. Tanpa terkecuali layanan pemerintahan juga ikut menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kondisi tersebut ditambah berbagai program pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami pemulihan dan semakin stabil.

Untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan teknologi di masyarakat, dihitung Indeks Daya Saing Digital untuk melihat sejauh mana penciptaan teknologi digital yang berupa pilar-pilar digital menunjang sektor ekonomi dan menciptakan pemerataan. Pemerintah daerah dapat melihat capaian dari masing-masing pilar digital tersebut dan digunakan sebagai dasar dalam penciptaan kebijakan pendorong daya saing daerah.

Perhitungan indeks daya saing digital saat dokumen ini disusun masih difokuskan di tingkat provinsi dan beberapa kota besar oleh lembaga *East Ventures* bekerjasama dengan lembaga audit *Pricewaterhouse Coopers* (PwC) dan katadata.id, sehingga Gorontalo Utara secara spesifik belum

memiliki nilai. Sebagai gambaran, digunakan nilai daya saing digital Provinsi Gorontalo untuk melihat sejauh mana pilar-pilar digital di Gorontalo mampu menggerakkan ekonomi dan membawa pemulihan pasca pandemi.

Peringkat Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dari posisi 16 di tahun 2021 menjadi posisi 21 di tahun 2022, dan kembali turun di tahun 2023 menjadi peringkat 30. Meski mengalami kenaikan skor, Gorontalo belum mampu mengejar peningkatan provinsi lainnya. Pilar Keuangan memiliki peningkatan skor tertinggi sementara Perekonomian menjadi pilar dengan penurunan skor terbesar.



Skor 0-100

Input			Output			Penunjang		
Sumber Daya Manusia	Penggunaan TIK	Pengeluaran untuk TIK	Perekonomian	Kewirausahaan dan Produktivitas	Ketenaga-kerjaan	Infrastruktur	Keuangan	Regulasi dan Kapasitas Pemda
13,7	57,3	34,0	25,9	24,5	36,6	64,3	29,3	51,6

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendorong digitalisasi melalui penerapan ETPD dengan perkembangan integrasi kanal pembayaran nontunai yang sudah mencapai 86,3 persen pada semester I 2022. Selain itu, pemerintah juga menyelenggarakan Gebyar UMKM Gorontalo yang berfokus dalam menampilkan produk unggulan dan sosialisasi *Scan* QRIS *via Mobile Banking* (SIMBA) untuk mengakselerasi keuangan digital.

Pada tingkat sub-indeks, terdapat beberapa perubahan yang signifikan pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Pilar Penunjang, komponen Keuangan naik 24,2 poin ditunjang oleh peningkatan Indeks Inklusi Keuangan yang signifikan didorong oleh program sosialisasi terhadap adopsi keuangan digital. Sedangkan pada Pilar Input, komponen Penggunaan TIK naik 9,3 poin ditunjang oleh transaksi *e-commerce* yang meningkat seiring dengan peningkatan akses internet, tercatat pada triwulan I 2022 tumbuh sebesar 30,97 persen dibandingkan triwulan IV 2021. Pada Pilar Output, komponen perekonomian turun 9,3 poin karena pemanfaatan digitalisasi belum menunjukkan kontribusi yang tinggi bagi perekonomian daerah. Per

2022, Gorontalo masih menjadi satu dari lima provinsi termiskin di Indonesia. Penguatan kapasitas pelaku UMKM dan ekonomi kreatif diperlukan agar mampu memacu pertumbuhan PDRB sektor digitalisasi. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo pun menyelenggarakan kegiatan pengembangan UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk unggulan lokal.

Tabel 2.66
Indeks dan Sub Indeks Daya Saing Digital
Provinsi Gorontalo Tahun 2023

		Skor (1-100)	Peringkat Provinsi	Status	Median Skor Nasional
1	**INPUT**	**35,0**	**32**	↓	**40,1**
1.1	**Sumber Daya Manusia**	**13,7**	**36**	↓	**24,2**
1.1.01	Jumlah Mahasiswa Berkemampuan Digital	2,7	32	↓	8,5
1.1.02	Pertumbuhan Mahasiswa Berkemampuan Digital	25,2	9	↑	15,9
1.1.03	Jumlah Dosen Program Studi Terkait Digitalisasi	4,4	29	↓	9,5
1.1.04	Jumlah Program Studi Terkait Digitalisasi	3,9	27	=	7,7
1.1.05	Indeks Literasi Digital	32,6	35	↓	75,6
1.2	**Penggunaan TIK**	**57,3**	**18**	=	**56,9**
1.2.01	Rasio Penduduk yang Memiliki *Handphone*	78,4	18	↑	77,7
1.2.02	Rasio Rumah Tangga yang Memiliki Komputer	38,1	23	↓	41,9
1.2.03	Rasio Penduduk yang Memiliki Akses Internet	69,8	25	↓	73,3
1.2.04	Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dari Rumah	88,0	20	↑	88,3
1.2.05	Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dari Kantor	19,0	29	↑	35,2
1.2.06	Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dari Sekolah	39,4	5	↑	26,8
1.2.07	Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dengan Laptop	33,4	15	↑	27,5
1.2.08	Rasio Penduduk yang Mengakses Internet dengan *Handphone*	92,2	17	↓	91,2
1.3	**Pengeluaran untuk TIK**	**34,0**	**31**	=	**41,8**
1.3.01	Rasio Rumah Tangga yang Memiliki Pengeluaran untuk TIK	92,8	17	=	91,4
1.3.02	Pengeluaran Rata-rata Rumah Tangga untuk TIK	15,1	32	↓	35,0
1.3.03	Balas Jasa dan Upah Pekerja Sektor Informasi dan Komunikasi	0,5	29	↑	1,1
1.3.04	Balas Jasa dan Upah Pekerja Sektor Informasi dan Komunikasi per Kapita	27,9	29	↑	34,1
2	**OUTPUT**	**29,0**	**28**	↓	**31,2**
2.1	**Perekonomian**	**25,9**	**22**	↓	**27,9**
2.1.01	PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi	0,2	35	↓	2,3
2.1.02	Kontribusi PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi	19,0	23	↑	24,0
2.1.03	Pertumbuhan PDRB Sektor Informasi dan Komunikasi	18,0	35	↓	36,1
2.1.04	PDRB Subsektor Pergudangan, Penunjang Angkutan, Pos & Kurir	1,5	30	↑	5,6
2.1.05	Kontribusi PDRB Subsektor Pergudangan, Penunjang Angkutan, Pos & Kurir	48,0	9	=	34,6
2.1.06	Pertumbuhan PDRB Subsektor Pergudangan, Penunjang Angkutan, Pos & Kurir	54,0	23	↓	55,1
2.1.07	PDRB Sektor Jasa Keuangan	0,6	28	↑	1,7
2.1.08	Kontribusi PDRB Sektor Jasa Keuangan	41,3	3	↓	20,8
2.1.09	Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa Keuangan	50,6	5	↓	45,9
2.2	**Kewirausahaan dan Produktivitas**	**24,5**	**26**	↑	**28,6**
2.2.01	Rasio Pekerja yang Menggunakan Internet dalam Pekerjaan Utama	39,0	26	↓	43,6
2.2.02	Rasio Pekerja yang Menggunakan Internet dalam Pekerjaan untuk Komunikasi	38,3	26	↓	42,7
2.2.03	Rasio Pekerja yang Menggunakan Internet dalam Pekerjaan untuk Promosi	28,6	24	↓	32,5
2.2.04	Rasio Pekerja yang Menggunakan Internet dalam Pekerjaan untuk Penjualan via Media Sosial	29,4	25	↑	36,1
2.2.05	Rasio Pekerja yang Menggunakan Internet dalam Pekerjaan untuk Penjualan via *Website/E-commerce*	10,2	24	↑	13,4
2.2.06	Pinjaman *Fintech*	1,2	21	↑	1,9
2.3	**Ketenagakerjaan**	**36,6**	**33**	↓	**40,1**
2.3.01	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Terkait Digitalisasi	1,7	29	↓	5,0
2.3.02	Rasio Tenaga Kerja Sektor Terkait Digitalisasi	29,4	13	↓	23,2
2.3.03	Pertumbuhan Tenaga Kerja Sektor Terkait Digitalisasi	0,0	38	↓	25,2
2.3.04	Jumlah Tenaga Kerja Golongan Rentan Digitalisasi (Indikator Terbalik)	97,9	9	↓	93,8
2.3.05	Rasio Tenaga Kerja Golongan Rentan Digitalisasi (Indikator Terbalik)	22,6	25	↑	29,3
2.3.06	Pertumbuhan Tenaga Kerja Golongan Rentan Digitalisasi (Indikator Terbalik)	67,9	15	↑	64,6
3	**PENUNJANG**	**48,4**	**22**	↓	**50,7**
3.1	**Infrastruktur**	**64,3**	**19**	↓	**62,8**
3.1.01	Tingkat Gangguan Listrik (Indikator terbalik)	70,0	27	↓	87,0
3.1.02	Rasio Desa yang Mendapat Sinyal Kuat dan Sangat Kuat	77,8	14	↑	72,9
3.1.03	Rasio Desa yang Mendapat Sinyal 3G	91,6	19	↑	91,0
3.1.04	Rasio Desa yang Mendapat Sinyal 4G	81,7	12	↓	73,8
3.1.05	Rasio Rumah Tangga dengan Sambungan Telepon Tetap	0,3	36	↓	7,7
3.2	**Keuangan**	**29,3**	**24**	↑	**32,1**
3.2.01	Indeks Inklusi Keuangan (Komposit)	69,3	8	↑	56,4
3.2.02	Jumlah Agen Laku Pandai	2,1	28	↑	5,0
3.2.03	Adopsi *E-wallet* sebagai Metode Pembayaran	16,5	28	↓	38,9
3.3	**Regulasi dan Kapasitas Pemda**	**51,6**	**17**	↓	**49,6**
3.3.01	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK	55,5	17	↓	52,8
3.3.02	Angka Partisipasi Kasar D1-S1	36,4	13	↓	28,7
3.3.03	Pertumbuhan Angka Harapan Hidup	80,1	15	↓	73,3
3.3.04	Penurunan Tingkat Kemiskinan (Indikator Terbalik)	34,2	30	↓	55,3

Sumber: *Digital Competitiveness Index* 2023 (East Ventures), 2023

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Gorontalo Utara diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat, selama 16 tahun Kabupaten Gorontalo Utara berdiri telah menunjukkan dampak yang krusial pada kualitas pelayanan publik. Selain pada pelaksanaan urusan yang menjadi

wewenang pemerintah daerah kabupaten, beberapa indikator yang menjadi tolok ukur dalam kualitas layanan pemerintahan secara umum diantaranya indeks reformasi birokrasi, indeks pelayanan publik, serta indeks inovasi daerah. Pengukuran 3 indikator tersebut diharapkan semakin meningkatkan peran institusi pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta menguatkan *employer branding* "Bangga Melayani Bangsa" dengan kompetensi yang baik, dan kolaborasi yang efektif.

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Proses tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menjadi pemerintahan yang berkelas dunia. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara dari yang sebelumnya *rule-based bureaucracy* menuju *dynamic governance* berupa birokrasi yang semakin efektif, efisien, dan bersih, dengan ciri *agile* dan adaptif sehingga setara dengan birokrasi kelas dunia dengan katalis teknologi informasi dan komunikasi.

Sejak dari awal masa perhitungan, secara umum capaian nilai indeks reformasi birokrasi di Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo meningkat, meskipun dalam konteks Gorontalo Utara berjalan lambat.

Tabel 2.67
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

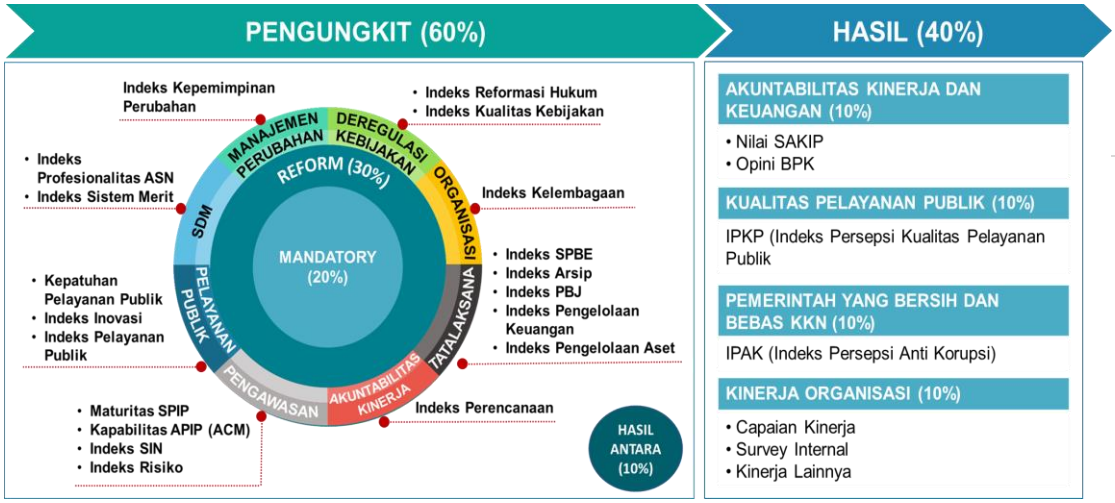
No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	61,60	B	62,12	B	63,21	B	63,81	B
2	Boalemo	53,79	CC	54,86	CC	56,22	CC	59,12	CC
3	Pohuwato	60,14	B	60,67	B	62,03	B	63,10	B
4	Bonebolango	56,63	CC	58,04	CC	60,29	B	69,98	B
5	Gorontalo Utara	19,87	D	50,93	CC	50,71	CC	63,73	B
6	Kota Gorontalo	62,95	B	63,03	B	63,39	B	74,61	BB
Provinsi Gorontalo		**63,36**	**B**	**66,33**	**B**	**69,61**	**B**	**77,75**	**BB**

Sumber: Kementerian PANRB, 2023

Hal yang substantif, selain perlunya komitmen pimpinan yang tinggi, yang krusial juga perlu diimbangi dengan kemampuan daerah dalam menggali *evidence* selama masa penilaian/*self assesment*. Kemampuan mencari dan

menentukan bukti-bukti praktik baik reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara akan berimbas selain pada kecepatan pengisian lembar kerja penilaian, juga terdapat kualitas yang tinggi pada penyajian bukti, serta dampak psikologis yang positif pada kinerja tim kelompok kerja.

Pada penilaian komponen pengungkit/area perubahan reformasi birokrasi, setiap daerah akan dinilai berdasarkan beberapa capaian kinerja yang bersifat *mandatory*, namun pada beberapa hal, Kabupaten Gorontalo Utara belum dapat menyajikan capaian kinerjanya, yang menjadi salah satu penyebab nilai IRB Gorontalo Utara rendah, sehingga perlu diambil berbagai langkah nyata dan kreatif untuk perbaikan hal tersebut.



Terlepas dari berbagai perbaikan elementer pada pelayanan publik efek dari adanya IRB, berbagai kelemahan dianggap masih ditemukan: (1) IRB dipandang belum berdampak banyak terhadap pembangunan; (2) Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama di ASEAN atau Asia, capaian tersebut masih jauh tertinggal; (3) Masih mengukur proses/administratif, bukan pada hasil/dampak; dan (4) Pelaksanaannya kurang kolaboratif karena RB dipandang hanya sebatas proyek, dan dikerjakan oleh kementerian/unit tertentu.

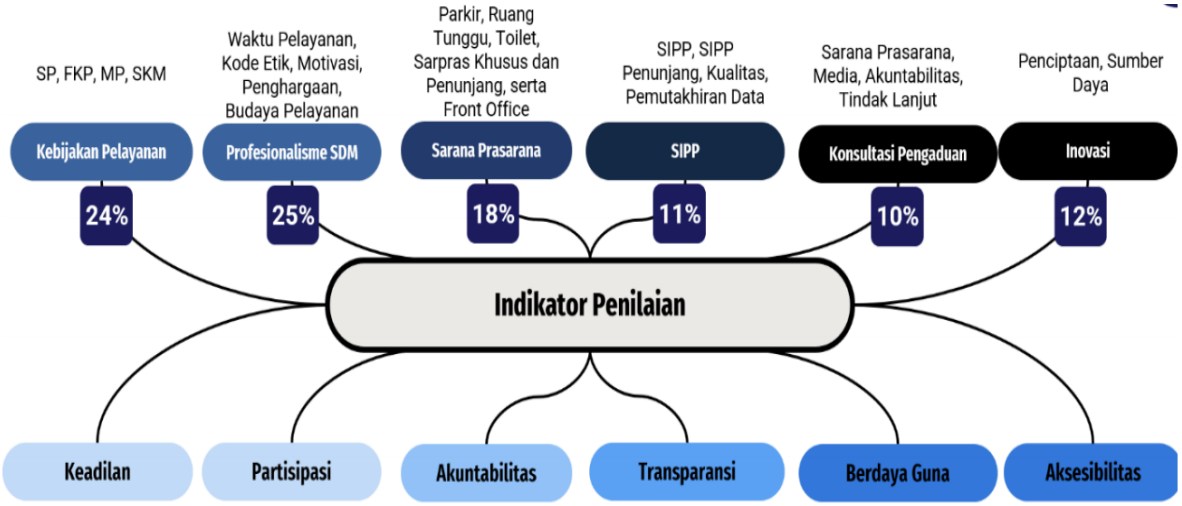
2. Indeks Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik yang baik, yang pada dasarnya adalah *output* dan *outcome* dari reformasi birokrasi, adalah kunci utama memenuhi harapan masyarakat dan membangun kepercayaan publik yang positif, untuk itu perlu dilakukan penguatan kebijakan pelayanan publik dalam

rangka transformasi pelayanan publik yang lebih partisipatif dan inklusif, yang sejalan dengan tuntutan global dan harapan masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 oleh Kemenpan RB, terus bertransformasi dan disempurnakan guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi, dimana pada instrumen yang baru, yang saat dokumen ini disusun menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2022 dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2022, telah memuat ukuran kualitas pelayanan publik yang dapat memotret layanan pemerintah sesuai dengan perkembangan terkini, dengan menggunakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan 6 aspek, yang dikenal dengan Indeks Pelayanan Publik (IPP). Lokus evaluasi IPP pada pemerintah kabupaten/kota yaitu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian untuk pemerintah provinsi, unit lokusnya yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambar 2.23
Aspek dan Prinsip Evaluasi IPP



Sumber: Laporan Hasil PEKPP Nasional Kemenpan RB, 2022

Tabel 2.68
Indeks Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	3,70	B	3,96	B	4,25	A-
2	Boalemo	-	-	3,29	B-	3,99	B
3	Pohuwato	-	-	2,96	C	3,67	B
4	Bonebolango	4,12	A-	4,27	A-	4,57	A
5	Gorontalo Utara	3,86	B	3,70	B	3,83	B
6	Kota Gorontalo	4,11	A-	4,19	A-	3,97	B
Provinsi Gorontalo		**3,60**	**B**	**4,00**	**A-**	**4,34**	**A-**

Sumber: Kementerian PANRB, 2023

Sedangkan pada capaian nasional, terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 sempat turun namun masih dalam kategori Baik (B), yang terjadi seiring dengan penambahan lokus evaluasi yang sangat signifikan. Untuk hasil pada tahun 2022, kembali naik sebagaimana Tabel 2.69.

Tabel 2.69
Indeks Pelayanan Publik Nasional

No.	IPP	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Provinsi	3,12	3,01	3,16	3,36	3,70	4,06
2	Kabupaten	3,30	3,05	3,36	3,58	3,14	3,47
3	Kota	3,49	3,38	3,52	3,78	3,80	4,08
4	Kementerian/Lembaga	0	3,62	3,83	4,00	4,00	4,13
5	Nasional	3,28	3,38	3,63	3,84	3,79	3,88

Sumber: Laporan Hasil PEKPP Nasional Kemenpan RB, 2023

Pada pencapaian per aspek level pemerintah kabupaten, rata-rata nilai terendah terdapat pada aspek inovasi, sehingga dalam konteks Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara perlu terus didorong untuk terdapat *one agency one innovation* untuk mewujudkan pelayanan publik berkelas dunia. Selain itu, juga pada aspek konsultasi dan pengaduan. Pengguna pelayanan publik saat ini semakin "*melek*" digital sehingga menuntut penyelenggara pelayanan publik di Gorontalo Utara dapat memberikan *response time* atas pengelolaan pengaduan secara optimal. Penggunaan kanal SP4N Lapor! harus terus didorong untuk terhubung dan secara aktif menindaklanjuti laporan yang masuk, sehingga secara nasional diharapkan dapat diperoleh tren data pengelolaan pengaduan dan dapat diperoleh pengambilan kebijakan yang tepat guna berbasis data.

3. Indeks Inovasi Daerah

Daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan. Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Terlebih dalam hal daya saing, jika dibanding negara-negara lain, Indonesia saat ini berada di posisi yang jauh tertinggal meskipun telah menunjukkan perbaikan peringkat dari episode-episode sebelumnya. *Global Competitiveness Index* merilis tingkat daya saing negara-negara di dunia untuk 2023. Dalam data tersebut Indonesia masih berada di peringkat ke 34 dari 136 negara.

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovatif yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi dan memacu kreativitas pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Untuk mendorong tingkat daya saing, tingkat kemandirian daerah, dan optimalisasi otonomi daerah, inovasi di suatu daerah diukur melalui indeks inovasi daerah.

Inovasi daerah yang diukur yang termasuk pada kategori inovasi tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, serta inovasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan daerah. Selain itu, terdapat aspek inovasi yang bersifat tematik: digitalisasi layanan pemerintahan, penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, serta prioritas aktual Presiden (stunting, inflasi, Covid-19, pendapatan asli daerah, *green economy*, tingkat kandungan dalam negeri, tata kota, serta stabilitas keamanan dan kehidupan sosial).

Dalam beberapa episode penyelenggaraan *Government Innovative Award*, Kabupaten Gorontalo Utara pernah mendapatkan predikat “Kurang Inovatif” dan “*Disclaimer*”, namun pada episode terakhir berhasil meningkatkan capaian pada level “Inovatif”. Kriteria predikat pada tahun 2020, berbeda standarnya dengan tahun 2021 dan setelahnya, sehingga terdapat perbedaan penggolongan predikat. Meski demikian, capaian Gorontalo Utara masih tergolong rendah dibanding capaian kabupaten/kota lainnya.

Tabel 2.70
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	53	Kurang Inovatif	27,32	Kurang Inovatif	53,82	Inovatif
2	Boalemo	0	*Disclaimer*	58,07	Inovatif	47,22	Inovatif
3	Pohuwato	34	Kurang Inovatif	38,76	Inovatif	34,48	Kurang Inovatif
4	Bonebolango	59	Kurang Inovatif	50,72	Inovatif	44,85	Inovatif
5	Gorontalo Utara	3	Kurang Inovatif	0	*Disclaimer*	41,46	Inovatif
6	Kota Gorontalo	763	Inovatif	44,36	Inovatif	51,47	Inovatif
Provinsi Gorontalo		**59**	**Kurang Inovatif**	**50,42**	**Inovatif**	**48,19**	**Inovatif**

Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI, 2023

Untuk peningkatan capaian kategori di masa depan perlu perbaikan pada 2 aspek utama:

1. Satuan pemerintah daerah, setidaknya terdapat 10 indikator wajib: visi dan misi, kualitas peningkatan perizinan, jumlah pendapatan perkapita, penurunan tingkat pengangguran terbuka, jumlah peningkatan investasi, jumlah peningkatan PAD, opini BPK, nilai capaian SAKIP, penurunan angka kemiskinan, dan nilai IPM.
2. Satuan inovasi daerah, setidaknya terdapat 5 Indikator wajib: regulasi inovasi daerah, ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, kecepatan penciptaan inovasi, kemanfaatan inovasi, dan kualitas inovasi daerah.

Gambaran aspek pelayanan umum di Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pengejawantahan pelaksanaan capaian kinerja indikator-indikator di atas dapat digambarkan dengan indikator pembangunan daerah yang disajikan berdasarkan tiga fokus urusan layanan wajib dan pilihan, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah.



32 Urusan Konkuren Pemerintahan (UU 23/2014)
(24 Urusan Wajib & 8 Urusan Pilihan)
Ditambah 7 Urusan Pemerintahan Umum

Fokus layanan urusan wajib dilakukan melalui analisis kinerja atas indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah yang menjadi pelayanan dasar masyarakat, yaitu bidang Urusan Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Adapun urusan wajib non pelayanan

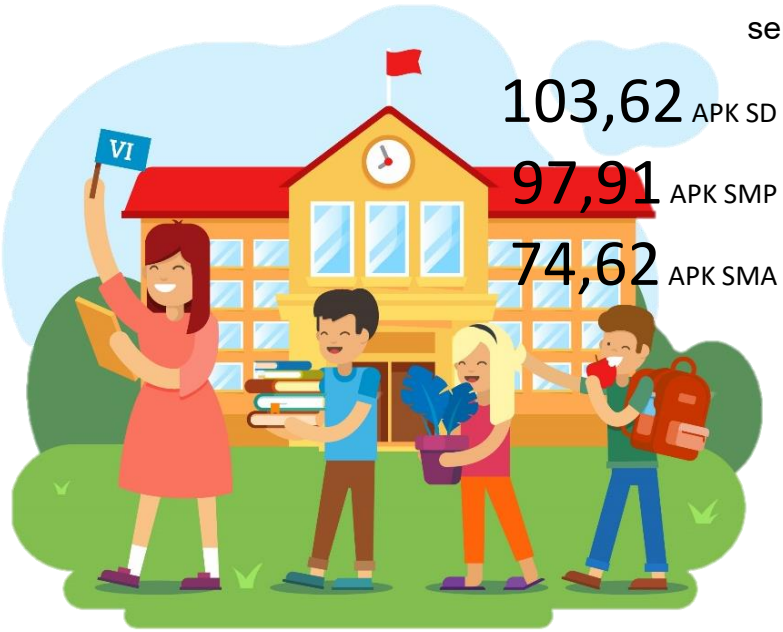
dasar meliputi Urusan Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olah Raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan. Urusan pilihan yang dilaksanakan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Transmigrasi, dan Pertanian. Sedangkan penunjang meliputi Perencanaan, Penelitian, Pengawasan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, serta Kewilayahan. Unsur pendukung yang terdiri dari Bidang Sekretariat Daerah dan Bidang Sekretariat Dewan. Serta unsur pemerintahan umum yang terdiri dari Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

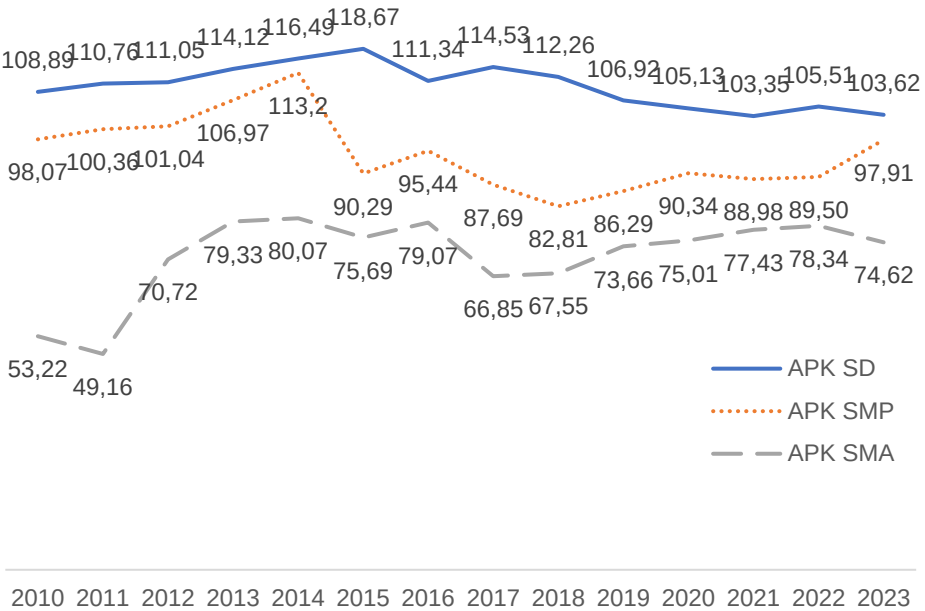
1. Urusan Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Capaian APK Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2010-2023 dapat ditunjukkan oleh Grafik 2.39 berikut.



Grafik 2.39
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2023



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2010-2024

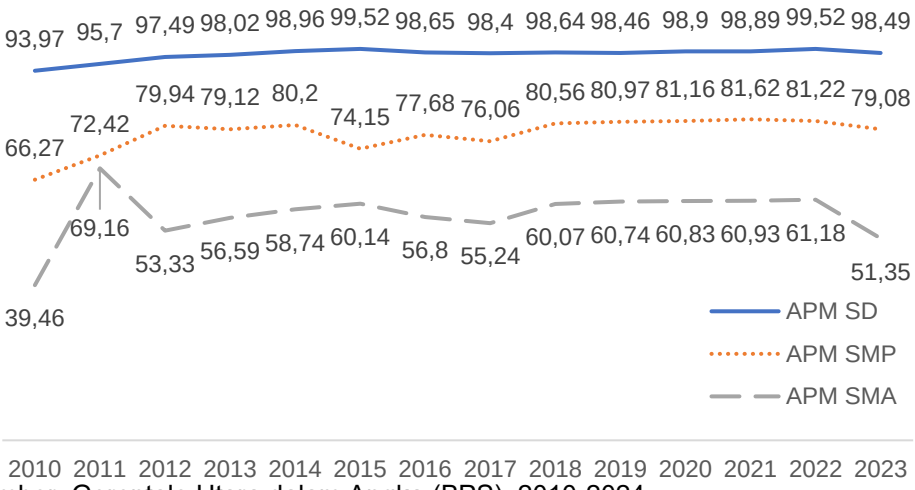
Berdasarkan Grafik 2.39 secara *time series*, tren kecenderungan angka APK sekolah dasar yang menunjukkan telah terjadi penurunan pengulangan kelas, penambahan murid dari daerah lain, atau adanya paket penyetaraan. Sedangkan pada APK jenjang menengah pertama dan menengah atas, meskipun memiliki tren positif, namun angka APK SMA termasuk rendah. Hal ini dikarenakan banyak siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang SMA.

B. Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat capaian pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Murni (APM). Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. APM di Indonesia semakin menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar kecenderungan penduduk bersekolah tidak tepat waktu/tidak pada umurnya.

Target APM nasional 100 persen untuk semua jenjang pendidikan. Pada capaian statistik *time series* selama periode 13 tahun RPJPD, APM mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada semua tingkatan. APM SD di tahun 2010 hanya sebesar 93,97 persen, kemudian naik lebih dari 5 persen menjadi 98,49 persen. Adapun untuk jenjang SMP dan SMA mengalami progresivitas yang cukup pesat meskipun di tahun 2023 masih belum mencapai level 90 persen dan turun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka APM SMP mengalami kenaikan sebesar 19,33 persen, serta APM SMA mengalami kenaikan 30,13 persen.

Grafik 2.40
Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2023



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2010-2024

C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

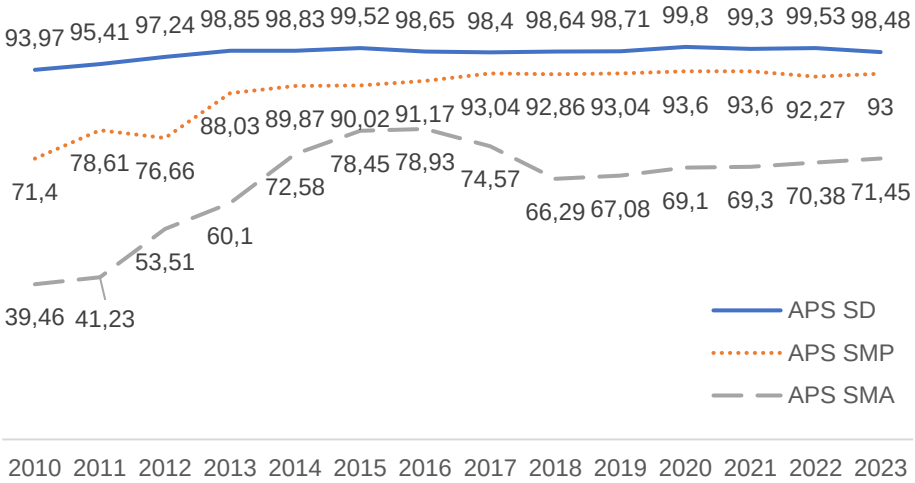
Indikator lain yang dapat digunakan sebagai ukuran perkembangan pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini dapat dijadikan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian, meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Hal ini dipengaruhi pula oleh budaya dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Mencermati tren APS penduduk Gorontalo Utara di tiga jenjang sebagaimana Grafik 2.41, terlihat memiliki pola tertentu pada setiap



kelompok umurnya. Pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun, APS masih menunjukkan persentase yang cukup tinggi, masing-masing 98,48 persen dan 93,00 persen. Artinya, sudah hampir 100 persen penduduk pada kelompok umur ini sedang aktif bersekolah. Jenjang yang masih perlu intervensi secara komprehensif justru APS jenjang 16-18 tahun atau tingkat SMA/sederajat yang berada di level 71,45 persen. Angka tersebut mendeskripsikan bahwa masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun di Gorontalo Utara yang belum berada di bangku sekolah SMA/sederajat. Hanya saja, intervensi pemerintah pada jenjang ini merupakan kewenangan penuh Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Grafik 2.41
Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010-2022



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2010-2023

D. Angka Partisipasi Sekolah Jenjang PAUD

Di Gorontalo Utara, PAUD diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, dan/atau informal. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), *Raudhatul Athfal* (RA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD jalur pendidikan non-formal berbentuk

Kelompok Bermain (Kober) atau bentuk lain yang sederajat. Informasi mengenai entitas jenjang ini disampaikan pada Tabel 2.71 berikut.

Tabel 2.71
Cakupan Peserta Pendidikan Anak Usia Dini

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	APS jenjang PAUD/sederajat	60,04	80,00	80,05
2	Kategori		Sedang	Sedang

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

Dari Tabel 2.71 dapat ditarik kesimpulan bahwa meskipun cakupannya di dua tahun terakhir sudah tinggi, namun faktanya masih ada sekitar 20 persen anak usia PAUD yang tidak mengenyam pendidikan bagi usia dini.

E. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan

APS kesetaraan khusus usia 7-18 tahun di Gorontalo Utara masih berada di kategori rendah, sesuai rilis Rapor Pendidikan Gorontalo Utara Tahun 2024, dengan data rinci sebagai berikut.

Tabel 2.72
APS Pendidikan Kesetaraan 7-18 Tahun

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	APS pendidikan kesetaraan	11,93	12,65	14,44
2	Kategori	Rendah	Rendah	Rendah

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa capaian keikutsertaan penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah melalui pendidikan kesetaraan/Paket A, B, dan C masih sangat rendah. Urgensi data ini perlu menjadi prioritas karena tingkat capaian yang masih sangat rendah, dan diprediksi dapat berdampak negatif terhadap peningkatan indeks pendidikan Gorontalo Utara, khususnya pada rata-rata lama sekolah. Oleh sebab itu, isu ini menjadi cukup strategis untuk ditangani di tahun-tahun mendatang guna peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan di Gorontalo Utara.



peningkatan partisipasi pendidikan kesetaraan 2023

F. Angka Putus Sekolah

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai berhasil/tidaknya pembangunan di bidang pendidikan adalah angka putus sekolah, yaitu indikator yang mencerminkan anak-anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Indikator ini berfungsi untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15, dan 16-18 tahun). Pada tahun 2022, Angka Putus Sekolah Gorontalo Utara baik tingkat SD maupun SMP secara persentase mengalami penurunan jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Anomali justru terjadi pada jumlah siswa putus sekolah SD yang justru mengalami kenaikan dalam kurun tiga tahun terakhir. Hal ini memungkinkan terjadi dengan perkiraan terjadi lonjakan jumlah anak usia SD di kurun 3 tahun terakhir sehingga menyebabkan persentase Angka Putus Sekolah SD tetap turun meskipun secara jumlah justru mengalami kenaikan. Gambaran secara *time series* angka putus sekolah yang digambarkan dari partisipasi sekolah di Kabupaten Gorontalo Utara dicantumkan pada Tabel 2.73 berikut.

Tabel 2.73
Partisipasi Sekolah Per Kelompok Umur Menurut Jenis Gender

No.	Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah		2020			2021			2022			2023		
			Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Tidak/belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
1	Laki-laki	7-12 tahun	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,80	99,20	0,00	0,00	100	0,00
		13-15 tahun	0,80	93,40	5,80	0,00	92,00	8,00	6,24	87,91	5,85	3,6	91,5	4,9
		16-18 tahun	0,00	73,90	26,10	0,00	64,8	35,2	0,00	65,88	34,12	0,00	59,7	40,3
			0,10	**69,60**	**30,30**	**3,6**	**68,4**	**28**	**1,31**	**62,25**	**36,44**	**1,2**	**67,9**	**30,9**
2	Perempuan	7-12 tahun	0,00	99,60	0,40	1,6	98,4	0,00	0,14	99,86	0,00	0,00	97,3	2,7
		13-15 tahun	0,00	93,90	6,10	0,00	94,8	5,2	1,03	97,65	1,32	1,1	94,7	4,3
		16-18 tahun	0,00	63,90	36,10	0,00	69,1	30,9	0,00	74,32	25,68	0,00	83,9	16,1
			0,60	**67,60**	**31,80**	**1,2**	**71,1**	**27,7**	**0,20**	**67,55**	**32,25**	**0,3**	**73,5**	**26,1**
3	Gabungan	7-12 tahun	0,00	99,80	0,20	0,7	99,3	0,00	0,48	99,52	0,00	0,00	98,5	1,5
		13-15 tahun	0,40	93,60	6,00	0,00	93,6	6,4	3,92	92,25	3,83	2,4	93,0	4,6
		16-18 tahun	0,00	69,10	30,90	0,00	69,3	30,7	0,00	70,38	29,62	0,00	71,5	28,5
			0,30	**68,70**	**31,00**	**2,7**	**69,3**	**28,1**	**0,78**	**64,77**	**34,35**	**0,8**	**70,8**	**28,5**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2021-2024

Dilihat dari Tabel 2.73, menunjukkan masih banyak penduduk Gorontalo Utara terutama pada jenjang usia SMP dan SMA, sudah tidak melanjutkan pendidikannya. Namun patut diapresiasi bahwa pada 2 tahun terakhir, di jenjang pendidikan dasar, status tidak bersekolah lagi dapat ditekan serendah mungkin hingga menyentuh poin nol. Hal yang menarik justru terlihat pada laki-laki usia SMP dan SMA yang lebih tinggi persentasenya dibandingkan perempuan yang semakin menguatkan nilai APM jenjang menengah atas sulit untuk bergerak naik. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah karena disinyalir mereka terpaksa membantu orang tua dalam mencari nafkah. Dinas terkait dibantu oleh pemerintah desa harus mampu mensosialisasikan dan mengajak para orang tua agar sadar dan kembali menyekolahkan anaknya di bangku sekolah.

Tingkat anak putus sekolah pada semua jenjang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius dari satuan pendidikan, sehingga tidak ada lagi anak usia sekolah yang tidak duduk di bangku sekolah, namun di sisi lain banyak faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah, misalnya akibat dari pernikahan dini, meninggal dunia, bahkan dengan alasan ekonomi.

Senada dengan data BPS di atas, Dinas Pendidikan Gorontalo Utara melaporkan bahwa terdapat beberapa siswa pada jenjang dasar maupun menengah pertama mengalami putus sekolah. Detail informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.74 berikut.

Tabel 2.74
Angka Putus Sekolah

No.	Indikator	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Angka putus sekolah SD/MI	0,20	0,23	0,10	0,10
2	Jumlah anak putus sekolah SD/MI	26	28	47	44
3	Angka putus sekolah SMP/MTs	1,89	1,86	0,09	0,08
4	Jumlah anak putus sekolah SMP/MTs	117	110	33	30

Sumber: Dinas Pendidikan, 2024

G. Ketersediaan Sekolah Pendidikan Kesetaraan

Tersedianya fasilitas pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan menjadi penting guna mendukung peningkatan partisipasi sekolah kesetaraan di Gorontalo Utara. Hanya saja, ketersediaan fasilitas pendidikan kesetaraan masih cukup terbatas saat ini. Berdasarkan data

Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, jumlah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan hanya 9 lembaga/sekolah, yang tersebut terbagi dalam dua jenis: SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) dan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) yang rinciannya pada Tabel 2.75 berikut.

Tabel 2.75
Lembaga Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Lembaga Pendidikan Kesetaraan
1	Atinggola	SKB Atinggola
2	Kwandang	PKBM Budi Mulia
3		SKB Kwandang
4	Sumalata	PKBM Tunas Harapan
5	Sumalata Timur	PKBM Insan Cipta
6	Tolinggula	PKBM Mutiara
7		PKBM Mutiara Ilmu
8	Gentuma Raya	PKBM Panorama
9	Tomilito	PKBM Helumo

Sumber: Dinas Pendidikan, 2023

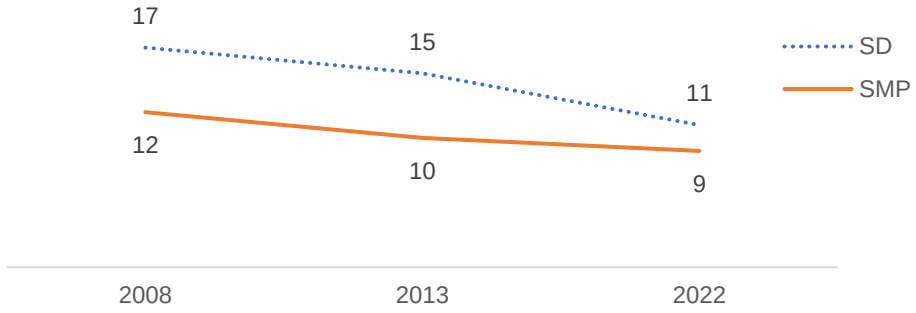
Data di atas menunjukkan bahwa hanya terdapat tujuh wilayah kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan kesetaraan dari total 11 kecamatan. Kondisi ini berpotensi menjadi kendala bagi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah untuk mengakses lembaga/sekolah kesetaraan. Hanya saja, karena belum tersedianya data penduduk usia 7-18 tahun dengan status belum menyelesaikan pendidikan dasar maupun menengah yang disertai alamat, sulit untuk menganalisis hubungan akses ke fasilitas dengan tingkat partisipasi sekolah. Meskipun demikian, refleksi terhadap capaian di atas dengan kondisi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan kesetaraan diidentifikasi adanya korelasi antara keduanya.

H. Rasio Guru dan Murid

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi siswa khususnya kemampuan literasi dan numerasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, rasio ideal guru dan murid khusus level SD, SMP, dan SMA sebesar 1:20. Dalam kurun 10 tahun terakhir, rasio

guru-murid masih berada pada kategori ideal, bahkan cenderung mengalami perbaikan.

Grafik 2.42
Tren Rasio Guru-Murid



Sumber: Kabupaten Gorontalo dalam Angka (BPS), 2009-2023

Pada jenjang dasar (SD/MI), Kecamatan Sumalata, Biau, dan Tomilito memiliki rasio tertinggi. Sedangkan pada jenjang menengah pertama (SMP/MTs), Kecamatan Biau sebagai wilayah dengan rasio tertinggi. Pada Tabel 2.75 berikut digambarkan secara lebih detail kondisi jumlah murid-guru, dengan data guru yang memiliki NUPTK Dapodik, termasuk guru kontrak (GTT) yang masih banyak jumlahnya meskipun sebagian besar sudah beralih status ke PPPK. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah daerah adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru, khususnya guru yang mengabdi di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

1:11
rasio guru-siswa jenjang SD/MI

1:9
rasio guru-siswa jenjang SMP/MTs



Tabel 2.76
Rasio Guru dan Murid Level Dasar dan Menengah Pertama Menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2021/2022

No.	Wilayah	Tahun Ajaran 2021/2022					
		Siswa SD/MI	Jumlah Guru	Rasio	Siswa SMP/MTs	Jumlah Guru	Rasio
1	Kwandang	2.994	252	12	1.576	150	11
2	Anggrek	1.640	162	10	736	78	9
3	Sumalata	1.326	94	14	640	62	10
4	Atinggola	1.303	170	8	726	99	7
5	Tolinggula	1.287	108	12	557	74	8
6	Gentuma Raya	1.113	97	11	543	60	9
7	Sumalata Timur	905	73	12	394	35	11
8	Biau	637	46	14	287	22	13
9	Tomilito	1.045	77	14	331	36	9
10	Monano	785	80	10	387	53	7
11	Ponelo Kepulauan	429	47	9	196	26	8
Total		**13.464**	**1.206**	**11**	**6.373**	**695**	**9**

Sumber: Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan EMIS Kementerian Agama, 2022 (diolah)

I. Rasio Ketersediaan Sekolah

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesilibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan di bidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan dapat memberantas buta huruf.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik maksimal dalam satu rombongan belajar untuk jenjang SD/sederajat sejumlah 28 siswa, sedangkan pada jenjang SMP/sederajat maksimal 32 siswa. Jumlah rombongan belajar jenjang SD berkisar 6-24 Rombel, sedangkan di jenjang berikutnya sejumlah 3-33 Rombel.

Di Gorontalo Utara, rasio kelas (Rombel) per siswa pada jenjang sekolah menengah secara rata-rata berada di atas ketentuan maksimal Kemendikbud RI, yaitu berada pada 38 siswa per kelas, dengan Kecamatan Kwandang dan Anggrek berada di kisaran 1:50 siswa per Rombel. Sedangkan pada jenjang dasar, secara rata-rata rasio Rombel per siswa

masih berada pada ketentuan jumlah maksimal. Secara lebih detail informasi rasio sekolah tersaji pada Tabel 2.77 berikut.

Tabel 2.77
Rasio Ketersediaan Sekolah dan Murid
Level Dasar dan Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022

No.	Wilayah	Tahun Ajaran 2021/2022							
		Siswa SD/MI	Jumlah Sekolah Dasar	Rasio Sekolah Dasar/ Siswa	Rasio Kelas Dasar/ Siswa	Siswa SMP/ MTs	Jumlah Sekolah Menengah	Rasio Sekolah Menengah /Siswa	Rasio Kelas Menengah/ Siswa
1	Kwandang	2.994	27	111	18	1.576	9	175	58
2	Anggrek	1.640	17	96	16	736	5	147	49
3	Sumalata	1.326	15	88	15	640	5	128	43
4	Atinggola	1.303	18	72	12	726	7	104	35
5	Tolinggula	1.287	17	76	13	557	7	80	27
6	Gentuma Raya	1.113	11	101	17	543	5	109	36
7	Sumalata Timur	905	10	91	15	394	4	99	33
8	Biau	637	7	91	15	287	3	96	32
9	Tomilito	1.045	10	105	17	331	4	83	28
10	Monano	785	10	79	13	387	5	77	26
11	Ponelo Kepulauan	429	6	72	12	196	2	98	33
Total		**13.464**	**148**	**91**	**15**	**6.373**	**56**	**114**	**38**

Sumber: Dapodik Kemendikbud dan EMIS Kemenag, 2022 (diolah)

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam tiga kondisi, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Tabel 2.78 berikut adalah gambaran kondisi ruang kelas di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.78
Kondisi Ruang Kelas

No.	Uraian Kondisi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2023
1	**Rusak Berat**				
	PAUD	33	30	5	0
	SD	73	66	5	0
	SMP	15	10	3	0
2	**Rusak Sedang**				
	PAUD	10	10	74	0
	SD	43	43	583	0
	SMP	8	8	162	0
3	**Baik + Rusak Ringan**				
	PAUD	231	228	145	366
	SD	693	649	310	964
	SMP	223	217	116	366

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Utara, 2023

Berdasarkan Tabel 2.78 di atas, kondisi ruang kelas di Kabupaten Gorontalo Utara selama setahun terakhir berhasil dilaksanakan perbaikan fisik di seluruh jenjang pendidikan.

J. Proporsi Satuan PAUD Terakreditasi “B”

Berdasarkan tingkat akreditasinya, sebagian besar PAUD yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI telah dilakukan sertifikasi, meskipun dengan status akreditasi “B” masih berkategori rendah sesuai Rapor Pendidikan di tahun 2023, dengan rincian sebagaimana Tabel 2.79 berikut.

Tabel 2.79
Cakupan Lembaga PAUD Terakreditasi Minimal B

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Persentase lembaga yang sudah terakreditasi minimal B	58,12	59,07	64,21

Sumber: Rapor Pendidikan, 2024

Akreditasi menjadi penting karena kualitas satuan pendidikan PAUD dalam memenuhi delapan standar nasional pendidikan ditunjukkan melalui nilai akreditasi PAUD tersebut. Data diatas menggambarkan bahwa masih terdapat sekitar 35 persen PAUD belum terakreditasi “B” yang menunjukkan kualitas pemenuhan delapan standar nasional pendidikan belum optimal. Data dan fakta di atas menjadi penting untuk menjadi pertimbangan perbaikan kualitas pembangunan pendidikan Gorontalo Utara di masa mendatang.

K. Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi “A”

Persentase sekolah yang terakreditasi “A” menggambarkan berapa banyak jumlah sekolah yang terdapat di Gorontalo Utara yang memiliki kualitas baik dalam menjamin mutu pendidikan sebagai salah satu lembaga dalam mengembangkan sumber daya manusia.

Pada 2 tahun terakhir, persentase sekolah terakreditasi “A” jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama di Gorontalo Utara masih sangat rendah. Selama periode tersebut, SD/MI menjadi jenjang pendidikan yang memiliki persentase sekolah terakreditasi “A” terbesar, meskipun turun di tahun terakhir. Gambaran kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlu adanya pembenahan yang mendasar dan menyeluruh terhadap kualitas sekolah di seluruh jenjang agar masyarakat mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Secara lebih rinci, berikut data persentase sekolah yang memperoleh akreditasi “A”.

Tabel 2.80
Jenjang Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Terakreditasi "A"

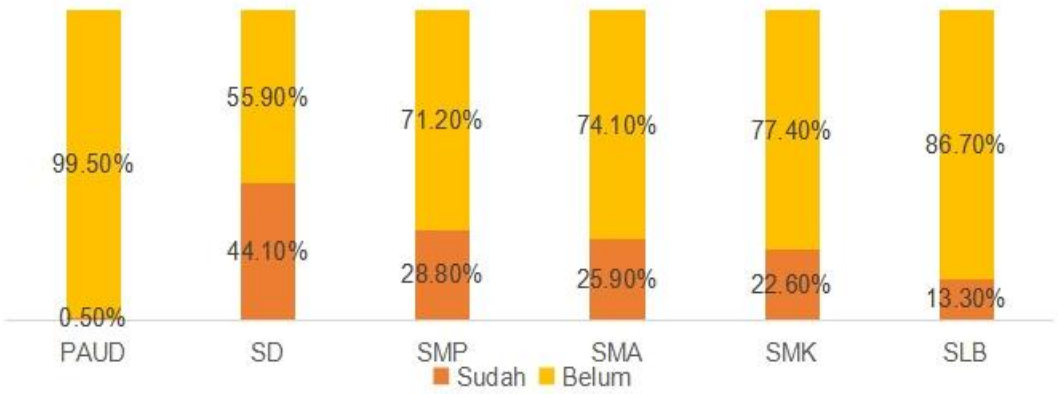
No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah sekolah jenjang SD/MI terakreditasi "A"	26	23	12
2	Persentase sekolah jenjang SD/MI terakreditasi "A"	19,26	17,16	8,7
3	Jumlah sekolah jenjang SMP/MTs terakreditasi "A"	6	6	6
4	Persentase sekolah jenjang SMP/MTs terakreditasi "A"	13,33	13,33	13,33

Sumber: Dinas Pendidikan, dikutip dari Badan Akreditasi Nasional, 2024

L. Status Guru Tersertifikasi

Jika dilihat dari status sertifikasinya, guru yang kompeten adalah guru yang memiliki sertifikat kompetensi, dan untuk mengukur komposisinya dengan cara membandingkan jumlah guru yang memiliki sertifikasi dibagi dengan jumlah keseluruhan guru. Guru bersertifikasi yang berada dalam naungan Kemendikbud RI diinformasikan pada Grafik 2.43 berikut.

Grafik 2.43
Guru Tersertifikasi



Sumber: Pusdatin Kemendikbud RI, November 2021

Data rendahnya tingkat sertifikasi guru seperti yang ditampilkan pada grafik di atas, menggambarkan bahwa diperlukan upaya khusus untuk dapat meningkatkan kualitas guru di Kabupaten Gorontalo Utara.

M. Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4

Kompetensi guru PAUD menjadi salah satu faktor utama peningkatan mutu pendidikan di jenjang PAUD. Oleh sebab itu, cakupan guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 menjadi salah satu indikator prioritas dari tiga indikator prioritas SPM Pendidikan. Adapun gambaran capaian proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 di Gorontalo Utara saat ini sebagai berikut.

Tabel 2.81
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi Minimal S1/D4

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	72,05	80,65	76,57

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2024

N. Proporsi Guru SD dan SMP dengan Kualifikasi Minimal S1/D4

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia perlu adanya perbaikan kualitas guru untuk memperoleh standar kompetensi dalam menunjang aktifitas pendidikan. Salah satu cara untuk memperbaiki nilai tersebut yakni dengan cara meningkatkan standar kualifikasi pendidikan minimal level sarjana/sederajat. Dengan kualifikasi demikian, diharapkan kualitas ajar terhadap siswa akan meningkat. Berikut gambaran persentase guru yang berkualifikasi sarjana/sederajat di Kabupaten Gorontalo Utara pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama.

Tabel 2.82
Guru yang Memenuhi Kualifikasi Jenjang Sarjana

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs berijazah kualifikasi S1/D-IV	1.261	1.333	1.551
2	Jumlah guru SD/MI dan SMP/MTs	1.534	1.446	1.534
3	Persentase guru SD/MI dan SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	82,20	92,19	92,25

Sumber: Data Pokok Pendidikan, 2023

Pada tahun terakhir, capaian tenaga pengajar yang memenuhi kualifikasi tingkat sarjana telah jauh meningkat, yang menunjukkan keberhasilan daerah dalam mendorong peningkatan pengajaran yang berasal dari tenaga ajar yang *qualified*. Hal ini juga didorong oleh program beasiswa bagi guru SD dan SMP yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan beberapa tahun terakhir. Program ini perlu untuk dilanjutkan di tahun mendatang karena terbukti berhasil, hingga pemenuhan kebutuhan guru dengan kualifikasi S1/D4 terpenuhi secara sempurna.

O. Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Sekolah Jenjang SD

Iklim keamanan sekolah merupakan kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik. Sementara iklim kebhinekaan diartikan sebagai kondisi sekolah yang menunjukkan adanya

sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan. Adapun kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa merupakan definisi dari iklim inklusivitas sekolah. Ketiga jenis iklim sekolah ini merupakan tiga indikator baru dalam SPM Pendidikan sehingga ketersediaan data hasil evaluasi capaian pun hanya tersedia di periode tiga tahun terakhir. Capaian ketiga iklim sekolah tersebut di tingkat sekolah dasar dijabarkan dalam Tabel 2.83 di bawah ini.

Tabel 2.83
Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah
Jenjang Sekolah Dasar

No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Iklim keamanan sekolah jenjang SD	59,17	62,79	63,71
2	Iklim kebhinekaan sekolah jenjang SD	60,01	65,64	69,04
3	Iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	49,55	53,26	48,60

Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2024

Gambaran data di atas menunjukkan bahwa secara rata-rata iklim sekolah di jenjang SD Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024 dalam kondisi baik meskipun masih berada di bawah rata-rata nasional. Dalam mendorong peningkatan iklim keamanan sekolah, sekolah perlu memperkuat program pencegahan dan penanganan kekerasan termasuk kegiatan antiperundungan, antihukuman fisik, antikekerasan seksual, antinarkoba, antimerokok, dan antiminuman keras. Sedangkan upaya untuk meningkatkan iklim kebhinekaan di sekolah, sekolah perlu memberikan lebih banyak kesempatan untuk murid saling berinteraksi secara positif dengan masyarakat dari beragam latar belakang sosial dan budaya. Sedangkan pada inklusivitas sekolah perlu ditingkatkan pemahaman masyarakat, orang tua, serta dunia kerja dan industri terkait kebutuhan dan kemampuan murid disabilitas serta Cerdas Istimewa dan Berbakat Istimewa (CIBI).

P. Iklim Keamanan, Inklusivitas, dan Kebhinekaan Sekolah Jenjang SMP

Situasi yang hampir sama juga terjadi di jenjang SMP terkait penciptaan iklim keamanan, inklusivitas, serta kebhinekaan di lingkungan sekolah. Hal

ini terlihat dari progres capaian dalam setahun terakhir yang mengalami eskalasi nilai hampir di seluruh jenis iklim yang dievaluasi. Adapun detailnya dijabarkan berikut ini.

Tabel 2.84
Iklim Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas Sekolah Jenjang SMP

No.	Indikator	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Iklim keamanan sekolah jenjang SMP	63,07	64,14	64,81
2	Iklim kebhinekaan sekolah jenjang SMP	59	65,19	71,31
3	Iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	51,82	55,21	52,75

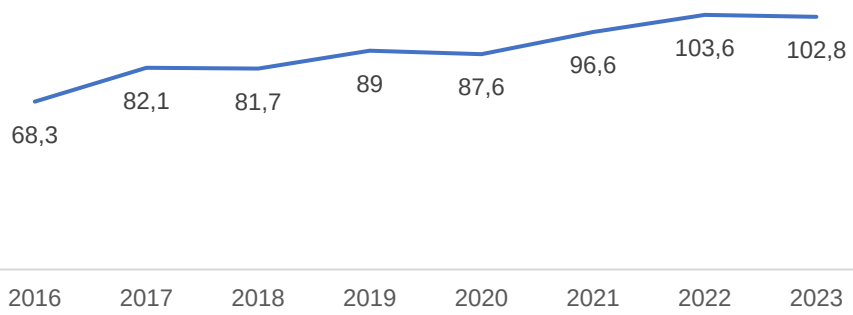
Sumber: Rapor Pendidikan Gorontalo Utara, 2024

2. Urusan Kesehatan

A. Cakupan Pertolongan Persalinan

Komplikasi dan kematian ibu maternal serta bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada saat proses persalinan, sehingga diperlukan keterlibatan tenaga kesehatan untuk dapat meminimalisir jumlah komplikasi/kematian ibu dan bayi. Nilai indikator ini semakin meningkat di Gorontalo Utara yang menggambarkan kesadaran masyarakat untuk persalinan yang aman semakin baik serta gambaran aksesibilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat seiring bertambahnya tahun.

Grafik 2.44
Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan (%)



Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, 2024

Berdasarkan data persebaran pertolongan persalinan berdasarkan wilayah kerja Puskesmas, di tahun 2022 pertolongan persalinan tertinggi adalah Puskesmas Molingkapoto dengan 237 persalinan, bertambah 8 persalinan dibandingkan tahun 2021, serta Puskesmas Limbato adalah yang terendah dengan 33 persalinan, bertambah 1 persalinan dibandingkan tahun

sebelumnya. Data real capaian tersebut sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.85 berikut.

Tabel 2.85
Kejadian Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Menurut Wilayah Kerja

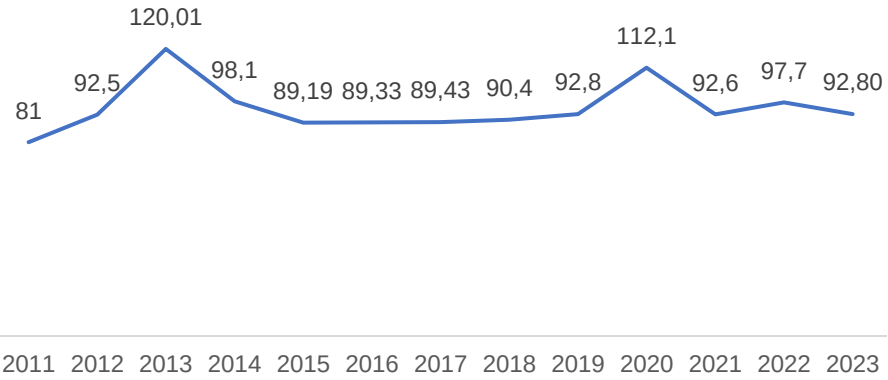
No.	Wilayah Puskesmas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Atinggola	81	185	181	210	92
2	Gentuma	105	154	164	197	114
3	Dambalo	90	193	161	170	116
4	Kwandang	90	236	216	195	118
5	Ponelo	85	82	52	59	73
6	Molingkapoto	86	250	229	237	79
7	Anggrek	103	192	172	195	117
8	Ilangata	78	148	127	147	97
9	Monano	86	132	134	156	127
10	Dulukapa	93	132	126	134	123
11	Sumalata	97	115	112	108	93
12	Buloila	85	96	82	83	115
13	Biau	101	109	94	98	124
14	Tolinggula	105	195	195	188	119
15	Limbato	100	42	32	33	109
JUMLAH		**1.385**	**2.261**	**2.077**	**2.210**	**1.621**

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, 2024

B. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap dan *Universal Child Immunization* (UCI)

Pemenuhan imunisasi dasar lengkap bagi anak merupakan salah satu tolok ukur peningkatan kualitas kesehatan keluarga. Imunisasi dasar lengkap merupakan pemberian vaksin kepada bayi umur 0-11 bulan 29 hari secara lengkap dan sesuai dengan periode waktu vaksinnya. Capaian imunisasi ini di Gorontalo Utara kurun waktu dua belas tahun terakhir disajikan dalam Grafik 2.45 berikut.

Grafik 2.45
Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2011-2023 (%)



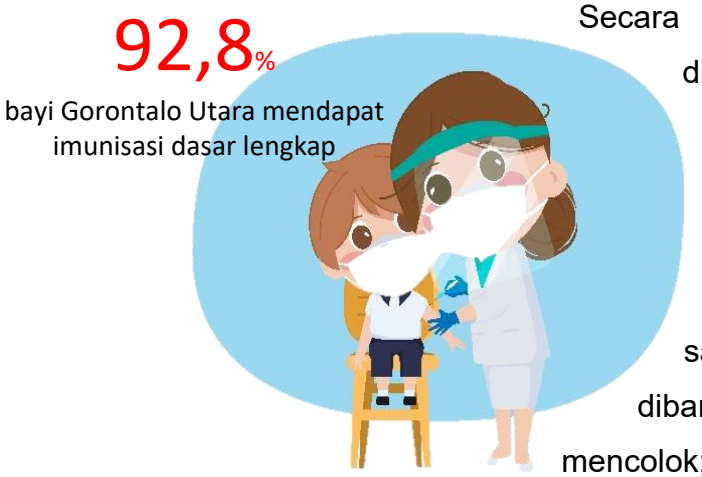
Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara 2024

Tabel 2.86
Sebaran Bayi dengan Imunisasi Dasar Lengkap Tahun 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Bayi			Imunisasi Dasar Lengkap					
			L	P	L+P	L		P		L+P	
						Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Atinggola	Atinggola	96	88	184	101	105,2	83	94,3	184	100,0
2	Gentuma Raya	Gentuma	75	69	144	54	72,0	58	84,1	112	77,8
3	Tomilito	Dambalo	75	69	144	71	94,7	79	114,5	150	104,2
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	32	29	61	31	96,9	27	93,1	58	95,1
5	Kwandang	Kwandang	112	107	219	77	68,8	69	64,5	146	66,7
6		Molingkapoto	129	123	252	103	79,8	89	72,4	192	76,2
7	Anggrek	Anggrek	67	62	129	63	94,0	54	87,1	117	90,7
8		Ilangata	69	67	136	70	101,4	61	91,0	131	96,3
9	Monano	Monano	51	49	100	43	84,3	60	122,4	103	103,0
10	Sumalata Timur	Dulukapa	57	52	109	62	108,8	56	107,7	118	108,3
11	Sumalata	Sumalata	48	46	94	63	131,3	43	93,5	106	112,8
12		Buloila	34	34	68	41	120,6	34	100,0	75	110,3
13	Biau	Biau	39	37	76	47	120,5	54	145,9	101	132,9
14	Tolinggula	Tolinggula	66	62	128	52	78,8	61	98,4	113	88,3
15		Limbato	15	14	29	19	126,7	13	92,9	32	110,3
JUMLAH			**965**	**908**	**1.873**	**897**	**93,0**	**841**	**92,6**	**1.738**	**92,8**

Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara 2024

Terdapat dua jenis imunisasi, yaitu imunisasi wajib dan imunisasi tambahan (dianjurkan). Pemerintah mewajibkan lima jenis vaksinasi wajib pada bayi/anak: BCG, Polio, Hepatitis B, DPT, dan Campak. Menurut WHO, imunisasi tersebut diwajibkan karena dampak atau pengaruh dari penyakit-penyakit tersebut dapat menyebabkan kecacatan hingga kematian. Sementara jenis imunisasi tambahan dianjurkan untuk menambah daya tahan tubuh terhadap beberapa jenis penyakit. Vaksin imunisasi tambahan meliputi HiB, Pneumokokus (PCV), Influenza, MMR, Tifoid, Hepatitis A, Varisela, dan HPV.



Secara umum, cakupan imunisasi perlu ditingkatkan hingga tercapai 100 persen. Faktor penyebab terjadinya *drop out* (tidak lengkap) imunisasi dasar, yaitu:

- Adanya perbedaaan jumlah sasaran pada perencanaan dibandingkan dengan sasaran riil yang mencolok;

- Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan pemanfaatan yang kurang optimal;
- Pemberdayaan Posyandu kurang karena tidak semua Posyandu dapat melayani imunisasi;
- Pelaksanaan *sweeping* imunisasi pada daerah yang cakupan imunisasi rendah belum optimal.

Program *Universal Child Immunization* (UCI) merupakan program dimana seluruh anak usia bayi mendapat imunisasi lengkap. Diupayakan minimal 80 persen anak-anak yang ada di desa tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap.

Tabel 2.87
Capaian *Universal Child Immunization* (UCI)

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa UCI	118	114	114	112	104	110	102
2	Jumlah seluruh desa	123	123	123	123	123	123	123
3	Cakupan desa *Universal Child Immunization* (UCI)	95,9	92,7	92,7	91,1	87,8	89,4	82,92

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Jika dilihat secara lebih detail, capaian UCI desa per wilayah kerja Puskesmas tergambar bahwa di wilayah kerja Puskesmas Gentuma dan Kwandang capaiannya masih rendah, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.88 berikut.

Tabel 2.88
Cakupan Desa *Universal Child Immunization* (UCI)
Menurut Wilayah Kerja Puskesmas Tahun 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah Desa	Desa UCI	% Desa UCI
1	Atinggola	Atinggola	14	14	100,00
2	Gentuma Raya	Gentuma	11	4	36,36
3	Tomilito	Dambalo	10	7	70,00
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	4	3	75,00
5	Kwandang	Kwandang	7	3	42,85
6		Molingkapoto	11	10	90,90
7	Anggrek	Anggrek	9	9	100,00
8		Ilangata	6	5	83,33
9	Monano	Monano	10	10	100
10	Sumalata Timur	Dulukapa	10	9	90,00
11	Sumalata	Sumalata	5	5	100,00
12		Buloila	6	5	83,33
13	Biau	Biau	10	10	100,00
14	Tolinggula	Tolinggula	7	5	71,42
15		Limbato	3	5	100
JUMLAH			**123**	**102**	**82,92**

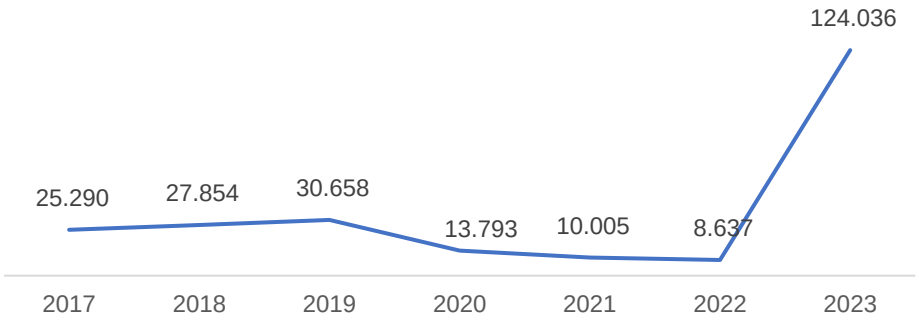
Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan capaian tahun 2023 di atas, diidentifikasi bahwa masih terdapat 21 desa yang belum berstatus UCI, menjadi hal yang perlu diseriusi oleh Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa dalam mewujudkan desa UCI 100 persen di masa mendatang.

C. Jaminan Kesehatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) adalah sistem jaminan kesehatan yang bersifat sosial, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan pemerintahan di bidang kesehatan dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Grafik 2.46 berikut menggambarkan jumlah penerima Jamkesda di Kabupaten Gorontalo Utara.

Grafik 2.46
Peserta Jamkesda (Jiwa)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

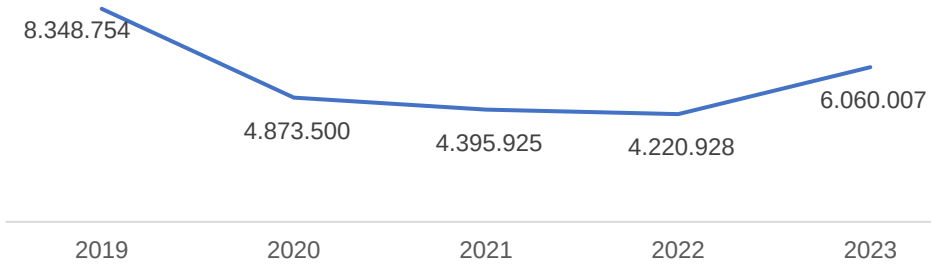
Penurunan jumlah peserta Jamkesda diakibatkan adanya pembagian tanggungjawab pembayaran premi dengan komposisi 60 persen oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dan 40 persen oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo (atau pindah kepesertaan dari PBI APBD ke APBN), dikarenakan perpindahan penduduk, NIK tidak aktif, dan atau peserta meninggal dunia. Rincian pembagian porsi beban penyelenggaraan jaminan kesehatan antara APBN dan APBD pada tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 2.89 berikut.

Tabel 2.89
Cakupan Jaminan Kesehatan Penduduk Menurut Jenis Jaminan

No.	Jenis Kepesertaan	Peserta Jaminan Kesehatan	
		Jumlah Jiwa	Persentase Penduduk
Penerima Bantuan Iuran (PBI)			
1	PBI APBN	62.874	48,75
2	PBI APBD	37.498	29,07
Sub Jumlah PBI		100.372	77,83
Non PBI			
1	Pekerja Penerima Upah (PPU)	18.210	14,12
2	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	4.771	3,70
3	Bukan Pekerja (BP)	683	0,53
Sub Jumlah Non PBI		23.664	18,35
Jumlah Penduduk Memiliki Jaminan		124.036	96,17
Jumlah Penduduk		128.970	
Selisih (Belum Ter-*cover* Asuransi)		4.934	3,83

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Grafik 2.47
Alokasi Anggaran Jamkesda (Ribuan Rupiah)



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

D. Desa Siaga Aktif

Desa Siaga merupakan salah satu bentuk re-orientasi pelayanan kesehatan dari sebelumnya bersifat sentralistik dan *top-down* menjadi lebih partisipatif dan *bottom-up*, desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan secara mandiri. Desa Siaga adalah suatu konsep peran serta dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, disertai dengan pengembangan kesiagaan dan kesiapan masyarakat untuk memelihara kesehatannya secara mandiri.

Sejak tahun 2017, program Desa Siaga telah digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Hingga tahun 2023, seluruh desa yang ada telah membentuk Desa Siaga seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90
Cakupan Desa Siaga Aktif

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Siaga aktif	62	98	121	123	123	123
2	Jumlah Desa Siaga yang dibentuk	62	98	121	123	123	123
3	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15	15	15
4	Jumlah desa keseluruhan	123	123	123	123	123	123
5	Cakupan Desa Siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase Desa Siaga	50,40%	79,67%	91,38%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

E. Akses Air Minum Layak - Aman

Ketersediaan akses air minum merupakan syarat untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 karena berpengaruh terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Visi 2045 melalui transisi ekonomi yang didukung pembangunan SDM dimana penyediaan air minum berperan penting, sekaligus sebagai salah satu indikator SDG's.

Di Gorontalo Utara, gambaran akses terhadap air minum layak senantiasa mengalami perbaikan, hasil dari kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, yang digambarkan pada Tabel 2.91 berikut.

Tabel 2.91
Persentase Penduduk dengan Akses Air Minum Layak

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	*Jumlah penduduk	114.036	115.072	116.139	112.303	120.341	120.805
2	Jumlah penduduk berakses air minum layak	83.493	94.295	98.108	101.807	109.076	112.109
3	Persentase penduduk berakses air minum layak	73,22	81,94	84,47	90,65	90,64	92,80

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024
*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Berdasarkan Tabel 2.91 di atas, diidentifikasi bahwa masih terdapat tujuh persen penduduk di Gorontalo Utara yang belum memiliki akses terhadap air minum layak di tahun 2023. Sebaran akses air minum layak tahun 2023 diuraikan pada Tabel 2.92 berikut.

Tabel 2.92
Sebaran Penduduk Berakses Air Minum Layak
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

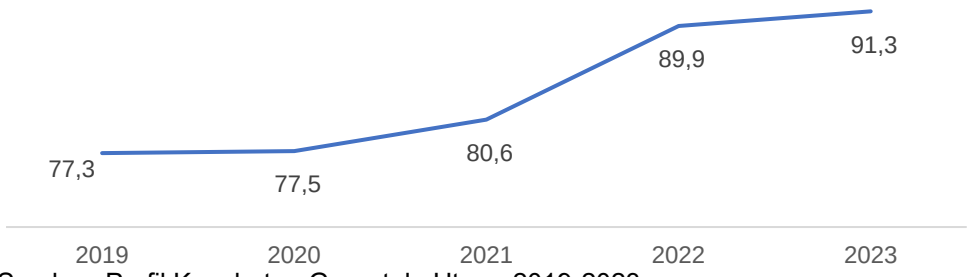
No.	Kecamatan	*Jumlah Penduduk	Penduduk Berakses Air Minum Layak	
			Jumlah	Persentase
1	Atinggola	11.776	9.563	81,21
2	Gentuma Raya	10.238	8.334	81,40
3	Tomilito	9.437	8.596	91,09
4	Ponelo Kepulauan	4.201	4.065	96,76
5	Kwandang	27.838	26.038	93,53
6	Anggrek	16.039	15.381	95,90
7	Monano	6.238	6.210	99,55
8	Sumalata Timur	7.714	7.714	100,00
9	Sumalata	11.613	10.961	94,39
10	Biau	5.919	5.887	99,46
11	Tolinggula	9.792	9.360	95,59
Gorontalo Utara		**120.805**	112.109	92,80

Sumber: Bidang Kesmas Dinas Kesehatan, 2024
*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

F. Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi layak juga merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan keluarga Gorontalo Utara yang sehat. Aksesibilitas yang mudah dan memadai diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan lingkungan masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan penduduk. Statistik terkait penduduk dengan akses sanitasi layak di Gorontalo Utara selama periode lima tahun terakhir disajikan pada Grafik 2.48 berikut.

Grafik 2.48
Akses Sanitasi Layak Gorontalo Utara 2019-2023



Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara, 2019-2023

Sebaran penduduk dalam satuan Kepala Keluarga berakses sanitasi layak per wilayah kecamatan tahun 2023 diurai pada Tabel 2.93 berikut.

Tabel 2.93
KK Berakses Fasilitas Sanitasi Layak (Jamban Sehat)
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Puskesmas	Jumlah KK	KK Berakses Fasilitas Sanitasi Layak	
				Jumlah	Persentase
1	Atinggola	Atinggola	3.557	3.148	88,50
2	Gentuma Raya	Gentuma	2.947	2.744	93,11
3	Tomilito	Dambalo	2.856	2.430	85,08
4	Ponelo Kepulauan	Ponelo	1.172	1.065	90,87
5	Kwandang	Kwandang	2.472	2.301	93,08
		Molingkapoto	4.486	4.387	97,79
6	Anggrek	Anggrek	2.610	2.292	87,82
		Ilangata	2.642	2.060	77,97
7	Monano	Monano	1.943	1.875	96,50
8	Sumalata Timur	Dulukapa	2.330	2.330	100,00
9	Sumalata	Sumalata	1.955	1.922	98,31
		Buloila	1.539	1.474	95,78
10	Biau	Biau	1.664	1.253	75,30
11	Tolinggula	Tolinggula	2.157	2.097	97,22
		Limbato	583	502	86,11
Gorontalo Utara			**34.913**	**31.880**	**91,31**

Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara, 2024

Upaya pencegahan penyakit berbasis lingkungan yang diimplementasikan di Gorontalo Utara salah satunya yaitu melalui upaya menjadikan seluruh desa sebagai desa *Open Defecation Free* (ODF). ODF merupakan kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. Desa ODF adalah desa yang 100 persen masyarakatnya telah buang air besar di jamban sehat, yaitu mencapai perubahan perilaku kolektif terkait Pilar 1 dari 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Pada tahun-tahun mendatang, seluruh desa diharapkan dapat menjadi desa ODF, kemudian dapat meningkatkan statusnya menjadi desa STBM. Gambaran desa ODF 3 tahun terakhir diinformasikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94
Desa *Open Defecation Free*

Tahun	Kecamatan	Desa	Status Verifikasi
2023	Atinggola	Wopalo	ODF
	Atinggola	Kotajin	ODF
	Atinggola	Monggupo	ODF
	Atinggola	Pinontoyonga	ODF
	Biau	Windu	ODF
	Sumalata	Lelato	ODF
	Sumalata	Buloila	ODF
	Sumalata	Kasia	ODF
	Tomilito	Milango	ODF
	Tomilito	Mutiara Laut	ODF
	Sumalata Timur	Hulawa	ODF
	Sumalata Timur	Wubudu	ODF
	Sumalata Timur	Bubalango	ODF
	Gentuma Raya	Ipilo	ODF
	Gentuma Raya	Molonggota	ODF
	Gentuma Raya	Pasalae	ODF

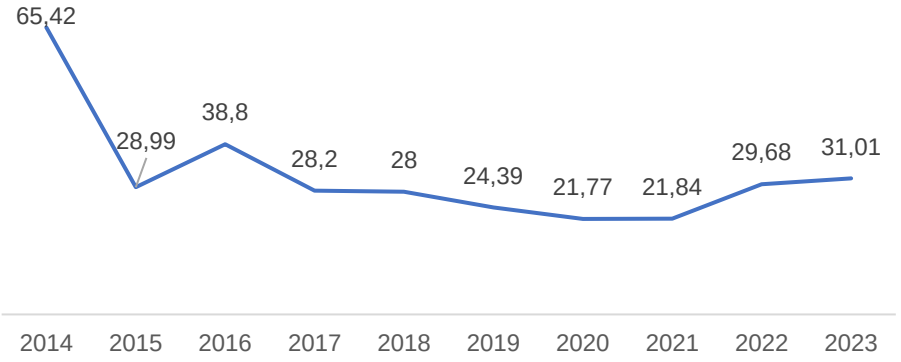
Tahun	Kecamatan	Desa	Status Verifikasi
	Kwandang	Bualemo	ODF
	Kwandang	Masuru	ODF
	Tolinggula	Cempaka Putih	ODF
	Kwandang	Ombulodata	ODF
	Kwandang	Pontolo	ODF
	Kwandang	Molingkapoto Selatan	ODF
	Kwandang	Alata Karya	ODF
	Kwandang	Bulalo	ODF
	Monano	Garapia	ODF
	Monano	Tudi	ODF
	Monano	Monano	ODF
	Monano	Zuriati	ODF
	Monano	Monano Atas	ODF
	Monano	Tolitehuyu	ODF
	Sumalata	Hutokalo	ODF
	Sumalata	Pulohenti	ODF
	Tolinggula	Tolinggula Tengah	ODF
	Tolinggula	Tolinggula Ulu	ODF
2022	Anggrek	Popalo	ODF
	Anggrek	Ilodulungga	ODF
	Anggrek	Datahu	ODF
	Biau	Omuto	ODF
	Gentuma	Gentuma	ODF
	Kwandang	Molingkapoto	ODF
	Kwandang	Botungobungo	ODF
	Kwandang	Mootinelo	ODF
	Kwandang	Moluo	ODF
	Kwandang	Cisadane	ODF
	Kwandang	Titidu	ODF
	Sumalata	Puncak Mandiri	ODF
	Sumalata Timur	Deme I	ODF
	Sumalata Timur	Motihelumo	ODF
	Sumalata Timur	Dulukapa	ODF
	Sumalata Timur	Deme II	ODF
	Sumalata Timur	Koluwoka	ODF
2021	Ponelo Kepulauan	Ponelo	ODF
	Tomilito	Jembatan Merah	ODF
	Monano	Pilohulata	ODF
2020	Atinggola	Bintana	ODF
	Atinggola	Tombulilato	ODF/STBM
	Gentuma	Bohusami	ODF
	Monano	Mokonowu	ODF
	Sumalata	Mebongo	ODF
	Sumalata Timur	Buluwatu	ODF/STBM
	Sumalata Timur	Buladu	ODF/STBM
	Tolinggula	Molangga	ODF

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

G. Cakupan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

Capaian upaya kesehatan masyarakat melalui indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) keluarga adalah salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Capaian PHBS Gorontalo Utara rendah, dengan tren cenderung turun meskipun sempat naik kembali di dua tahun terakhir, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 2.49 berikut.

Grafik 2.49
Capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (%)



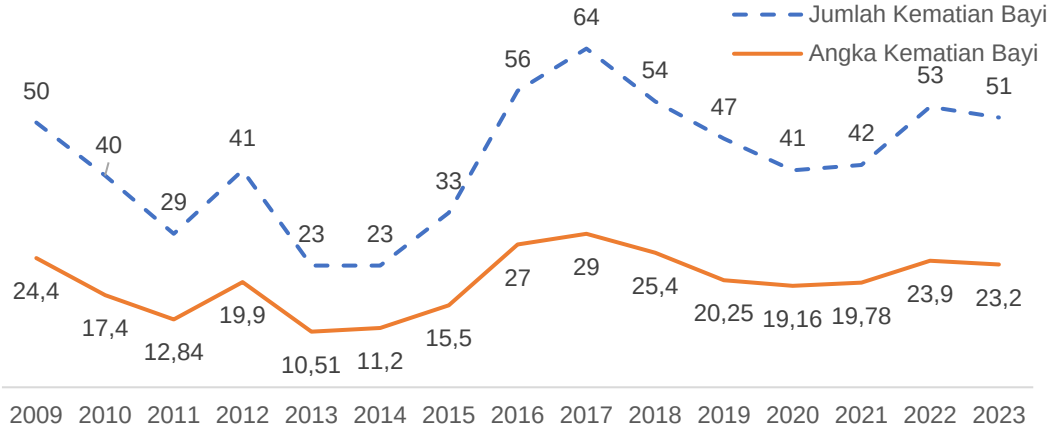
Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

H. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka Kematian (*mortality rate*) dalam suatu kelompok populasi dapat menggambarkan kondisi kesehatan masyarakatnya. Keberhasilan pelayanan kesehatan dan berbagai program kesehatan lainnya dapat diukur melalui tingkat kematian yang terjadi, antara lain melalui angka kematian bayi dan Balita serta angka kematian ibu maternal. Diharapkan pada tahun 2030 dapat mengakhiri kematian bayi baru lahir dan Balita yang dapat dicegah dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 kelahiran hidup dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000 kelahiran hidup.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat bayi lahir sampai bayi belum berumur tepat satu tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang sangat berguna untuk mengetahui status kesehatan anak, khususnya bayi dan dapat mencerminkan tingkat kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan secara umum, status kesehatan penduduk secara keseluruhan, serta tingkat perkembangan sosial masyarakat. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi AKB secara umum adalah tingkat kesakitan dan status gizi, kesehatan ibu waktu hamil, dan proses penanganan saat persalinan. Gangguan perinatal merupakan salah satu dari sekian faktor yang mempengaruhi kondisi kesehatan ibu selama hamil yang mempengaruhi perkembangan fungsi dan organ janin.

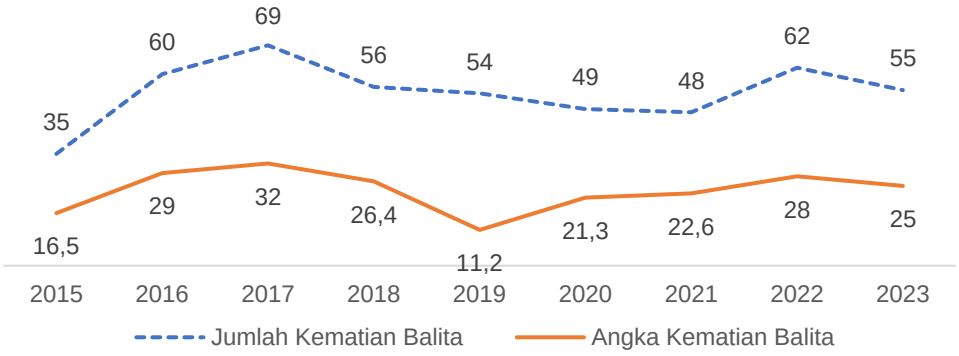
Grafik 2.50
Jumlah dan Angka Kematian Bayi



Sumber: RPJMD 2013-2018 dan 2018-2023, serta Renstra Dinas Kesehatan 2024-2026 (diolah)

Angka Kematian Balita/Akaba (0-4 tahun) adalah jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun per 1.000 anak umur yang sama pada tahun itu (termasuk kematian bayi), yang menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan anak Balita seperti gizi, sanitasi, penyakit menular, atau kecelakaan. Indikator ini seperti AKB, menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial dalam arti besar dan tingkat kemiskinan penduduk. Gambaran Akaba di Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Grafik 2.51 berikut.

Grafik 2.51
Jumlah dan Angka Kematian Balita



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Grafik 2.51 menunjukkan nilai yang meningkat kembali pada tahun-tahun pandemi, hal ini kemungkinan dipicu oleh berkurangnya intensitas kunjungan pemeriksaan kesehatan masyarakat ke Fasyankes. Di masa mendatang, perlu didorong untuk peningkatan dukungan akses pelayanan

kesehatan yang mencakup peningkatan akses Balita terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan cakupan imunisasi dasar.

Gambaran AKB dan Akaba yang belum optimal tersebut tidak terlepas dari fakta bahwa masih ada masalah krusial yang terjadi di lapangan, yakni:

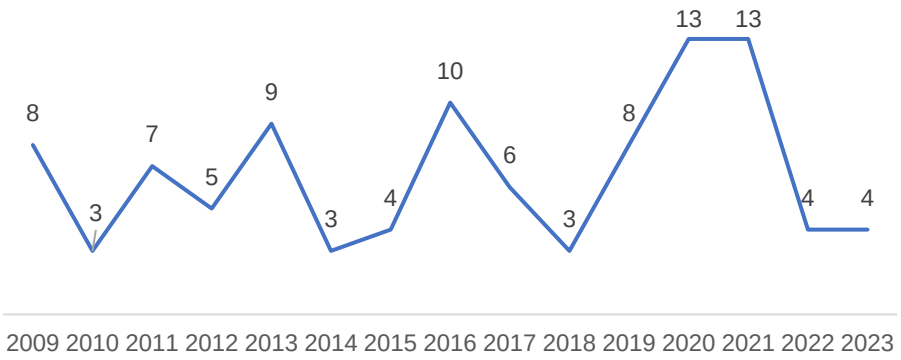
a. Kualitas layanan manajemen terpadu bayi muda yang dilakukan oleh petugas kesehatan belum maksimal;
b. Sistem penanganan neonatal emergensi atau rujukan darurat belum sesuai standar, karena pelayanan yang seharusnya dilakukan sedini mungkin, terkendala dengan sarana dan prasarana di RS rujukan kabupaten;
c. Sarana dan prasarana di fasilitas tingkat pertama ikut mempengaruhi kematian karena pelayanan *screening* deteksi awal kehamilan dan deteksi resiko tinggi belum optimal. Salah satu penghambatnya yakni SDM untuk petugas analisis laboratorium dan bahan reagen untuk pemeriksaan laboratorium belum tersedia.

I. Angka Kematian Ibu

Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan Balita merupakan salah satu target dalam SDGs di sektor kesehatan, diharapkan pada tahun 2030, dapat mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu maternal mengacu pada jumlah kematian ibu terkait dengan masa kehamilan persalinan dan masa nifas.

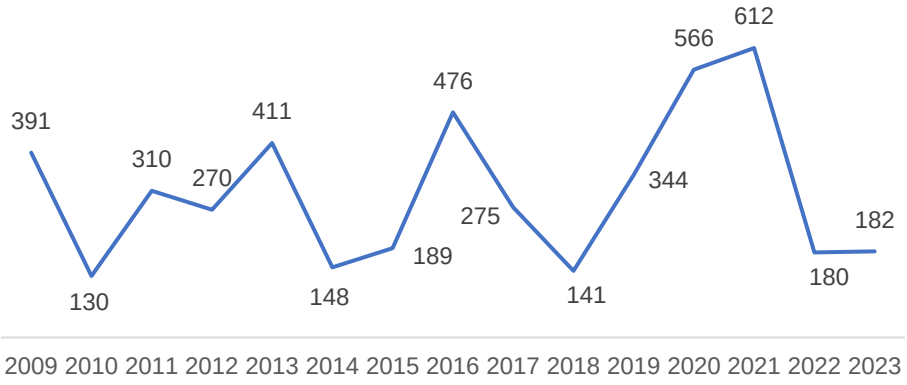
AKI Kabupaten Gorontalo Utara selama rentang 2009 hingga 2023 secara umum kurang menggembirakan, karena belum menggambarkan capaian dibawah toleransi maksimal AKI. Beberapa faktor ditenggarai merupakan alasan tingginya angka ini, selain pengaruh ekonomi dan akses terhadap layanan kesehatan, pernikahan di usia terlalu muda juga dapat mendorong adanya kehamilan pada wanita muda yang mempunyai resiko tinggi bagi kesehatan dan keselamatan bayi maupun ibu.

Grafik 2.52
Jumlah Kematian Ibu



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Grafik 2.53
Angka Kematian Ibu



Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Upaya yang telah dilakukan dalam menekan angka AKI yaitu secara rutin melaksanakan Audit Maternal Perinatal (AMP) untuk mengetahui akar permasalahan penyebab kematian ibu, serta dilaksanakannya pembelajaran kasus yang menyebabkan terjadinya kematian ibu. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas program agar kondisi ibu hamil, melahirkan, dan pasca melahirkan dapat terus dipantau melalui Gerakan Sayang Ibu. Selain itu dilakukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam penanganan komplikasi kegawatdaruratan.

J. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) merupakan jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di suatu wilayah kerja selama satu tahun dibanding dengan jumlah perkiraan

penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (+) di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.95 berikut.

Tabel 2.95
Penemuan dan Penanganan Penderita TBC BTA

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati	219	234	297	204	192	155	213
2	Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	238	256	396	397	396	396	254
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	92,02	91,41	75,00	51,39	48,48	39,14	83,86

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA semakin berkurang. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penemuan penderita baru TBC BTA yaitu dengan cara penyisiran data aktif ke rumah sakit/Puskesmas dan peningkatan pencatatan serta pelaporan, sehingga kinerjanya membaik di tahun 2023.

Kasus TB telah mengakibatkan korban jiwa di Gorontalo Utara, dengan tidak kurang dari 62 jiwa telah melayang selama tujuh tahun terakhir. Tingkat kematian dari indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah pasien TB yang meninggal dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang sama, pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam per 100.000.

Tabel 2.96
Tingkat Kematian Akibat Tuberkulosis

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis yang meninggal	3	7	6	7	11	6	22
2	*Jumlah penduduk	112.975	114.036	115.702	116.139	112.303	112.439	112544
3	Tingkat kematian karena tuberkulosis	2,66	6,14	5,19	6,03	9,79	5,34	7,10

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024
*Jumlah penduduk berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

Dalam upaya menanggulangi/mengendalikan TB, terdapat strategi yang direkomendasikan WHO yang bernama DOTS (*Directly Observed Treatment Short-course*), adalah strategi pengendalian TB yang dikembangkan dan telah direkomendasikan sebagai strategi pengendalian TB sejak 1995. Bank Dunia menyatakan strategi DOTS sebagai salah satu

intervensi kesehatan yang secara ekonomi sangat efektif. Pada Tabel 2.96 berikut merupakan proporsi jumlah tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS.

Tabel 2.97
Kasus Tuberkulosis yang Terdeteksi Melalui Program DOTS

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatanan melalui DOTS	254	256	297	258	252	201	313
2	Jumlah pasien baru tuberkulosis paru BTA	254	256	297	258	252	201	313
3	Proporsi jumlah kasus tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

K. Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Penderita DBD yang ditangani sesuai standar SOP adalah penderita DBD yang didiagnosis dan diobati/dirawat sesuai standar, ditindaklanjuti dengan Penanggulangan Fokus (PF).

Tabel 2.98
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita baru DBD yang ditangani sesuai SOP	36	104	100	161	22	33	10
2	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	36	104	100	161	22	33	10
3	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Selama kurun 2017-2023, jumlah penderita DBD terbanyak ditemukan tahun 2020. Kasus DBD yang ditemukan dan yang ditangani pada tahun 2021 menurun dari tahun 2019 dan 2020 karena dilaksanakannya langkah-langkah pencegahan DBD berupa G1R1J atau Gerakan 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Program ini dapat disosialisasikan ke seluruh Puskesmas dan berjalan dengan baik meskipun belum semua wilayah menjadi lokus program. Desa Leboto merupakan desa yang menjadi *pilot project* dari program ini karena selalu menjadi penyumbang terbanyak kasus DBD setiap tahun. Implementasi gerakan Pemberantasan Sarang

Nyamuk (PSN) yang didukung implementasi kegiatan 3M dan pembagian larvasida di desa yang ditemukan jentik nyamuk di masyarakat, berhasil mengurangi populasi nyamuk yang biasanya mendiami air bersih yang menggenang. Secara umum, cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD selama kurun waktu 2017-2023 telah mencapai 100 persen yang menandakan bahwa seluruh penderita penyakit DBD yang ditemukan sudah ditangani.

L. Penderita Diare yang Ditangani

Definisi indikator ini adalah jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun. Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Sarana kesehatan yang dimaksud adalah semua sarana kesehatan baik pemerintah maupun swasta (Puskesmas, Pustu, RS, balai pengobatan, atau praktik dokter).

Tabel 2.99
Penderita Diare yang Ditangani

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani di sarana kesehatan dan kader	3.194	2.716	2.571	1.565	1.069	843	2.007
2	Jumlah perkiraan penderita diare (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	3.050	3.079	3.107	3.136	3.032	3.036	3.077
3	Penderita diare yang ditangani	104,7	88,2	82,8	49,9	35,3	27,7	65,2

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

M. Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi ini menunjukkan banyaknya jumlah pasien HIV dan AIDS dibandingkan dengan jumlah penduduk di daerah tersebut dalam kurun waktu yang sama. Data prevalensi HIV/AIDS di Gorontalo Utara dapat dilihat pada Tabel 2.100 berikut.

Tabel 2.100
Prevalensi HIV/AIDS dari Total Populasi

No.	Uraian	Jenis Penderita											
		HIV						AIDS					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasien	7	4	0	11	9	5	7	4	0	11	7	5
2	Jumlah penduduk	114.036	115.702	116.139	112.303	112.439	112.544	114.036	115.072	116.139	112.303	112.439	112.544
3	Prevalensi HIV/AIDS	0,006	0,003	0	0,009	0,085	0,004	0,006	0,003	0,000	0,010	0,006	0,0001

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.100 di atas, jumlah pasien HIV/AIDS dalam kurun waktu lima tahun terakhir bersifat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, meskipun jika dilihat dari prevalensinya angkanya sangat kecil <1 persen. Seluruh Puskesmas di Gorontalo Utara dapat melayani ARV (*Anti Retro Viral*), namun saat ini yang aktif memberikan layanan hanya di Puskesmas Molingkapoto, Anggrek, dan Gentuma. Disamping itu, seluruh fasilitas Puskesmas yang ada telah mampu melaksanakan *screening* HIV hingga R1, untuk layanan *screening* tingkat lanjut (R2 dan R3) saat ini masih mencukupi namun masih mengandalkan pasokan dari Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

N. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (*alveoli*) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat/kesukaran bernafas. Jenis infeksi ini adalah kelanjutan dari Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) yang berlatur. Penderita infeksi ini akan diberikan tatalaksana atau ditangani dengan diberikan pelayanan sesuai klasifikasinya, untuk pneumonia ringan diberikan antibiotik, dan pneumonia berat dirujuk ke sarana kesehatan yang lebih memadai.

Tabel 2.101
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penderita pneumonia Balita yang ditangani	309	328	317	189	229	235	391
2	Jumlah perkiraan penderita pneumonia Balita	565	546	488	489	562	544	545
3	Cakupan Balita pneumonia yang ditangani	54,67	60,1	64,95	38,7	40,74	43,19	71,7

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pneumonia yang ditangani yaitu melalui program Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), *update* tata laksana pneumonia, validasi data pneumonia, dan meningkatkan koordinasi dengan rumah sakit. Detail penderita pneumonia dan ISPA yang ditangani per kecamatan disampaikan pada Tabel 2.102 berikut.

Tabel 2.102
Balita ISPA dan Pneumonia yang Ditangani per Kecamatan

No.	Kecamatan	ISPA						Pneumonia					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Atinggola	349	285	102	120	154	62	11	15	5	3	3	61
2	Gentuma Raya	49	110	133	66	85	251	10	32	26	30	24	203
3	Tomilito	23	62	55	58	130	168	18	7	5	7	2	155
4	Ponelo Kepulauan	34	2	5	9	29	279	7	2	5	0	1	258
5	Kwandang	878	859	641	373	327	972	45	28	22	3	46	779
6	Anggrek	452	250	39	131	95	299	12	6	15	70	28	289
7	Monano	15	160	119	275	241	179	1	24	10	24	24	142
8	Sumalata Timur	120	153	68	67	122	165	9	26	11	7	7	153
9	Sumalata	680	474	359	470	359	347	173	120	44	29	7	269
10	Biau	77	63	69	75	27	135	20	21	22	27	14	111
11	Tolinggula	661	813	430	285	314	560	22	36	24	29	53	502

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

O. Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sektoral kesehatan di Gorontalo Utara menjadi faktor utama dalam menjamin kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai akan memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses kesehatan, sementara kompetensi SDM kesehatan yang handal pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

Rentang waktu 12 tahun terakhir di Gorontalo Utara, telah terjadi peningkatan yang signifikan dalam komposisi fasilitas kesehatan serta kuantitas dan kualitas SDM Kesehatan. Gambaran perkembangan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan digambarkan dalam Tabel 2.103 berikut ini.

Tabel 2.103
Perkembangan Jumlah Fasilitas Kesehatan 2008 – 2023

No.	Jenis Fasilitas Kesehatan	Tahun	
		2008	2023
1	Posyandu	161	226
2	Pustu	23	26
3	Pusling	9	
4	Polindes	n/a	
5	Puskesmas	10	15
6	Rumah Sakit	0	2

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2009; dan Profil Kesehatan 2023 (data diolah)

1) Posyandu

Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasar, sehingga diharapkan strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih luas, serta idealnya setiap 1 Posyandu dapat melayani 100 Balita. Posyandu dapat dikembangkan dari pos pengembangan Balita, pos imunisasi, pos KB, serta pos kesehatan, yang pelayanannya meliputi: KB, KIA, gizi imunisasi, penanggulangan diare, serta kegiatan sektor lainnya. Gambaran lengkap rasio pelayanan Posyandu di Kabupaten Gorontalo Utara selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2023 disajikan pada Tabel 2.104 berikut.

Tabel 2.104
Rasio Posyandu

No.	Uraian	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu	219	219	219	219	222	222	225	225	226
2	Jumlah Balita	10.995	13.744	11.648	11.677	8.763	8.936	9.225	9.675	9.512
3	Rasio Layanan Posyandu	1:50	1:63	1:53	1:53	1:40	1:40	1:41	1:43	1:42

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Tabel 2.104 di atas menunjukkan bahwa pelayanan Posyandu masih *undervalued*, dalam artian kapasitas standarnya masih jauh di atas jumlah Balita yang dilayani, terlihat dari rasio yang jauh dari angka standar di 100 Balita per 1 Posyandu. Namun jika dibandingkan dengan status Posyandu yang aktif, cakupan layanannya sedikit lebih baik. Data Posyandu aktif ditampilkan pada Tabel 2.105 berikut.

Tabel 2.105
Cakupan Posyandu Aktif

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Posyandu aktif	219	79	64	40	174	166	220
2	Jumlah seluruh Posyandu	219	221	222	223	225	225	226
3	Persentase Posyandu aktif	100	35,7	28,8	17,9	77,3	73,78	97,3
4	Jumlah Balita	11.648	11.677	8.763	8.936	9.225	9.675	9.512
5	Rasio layanan Posyandu aktif	53	148	137	223	53	58	43

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

2) Puskesmas

Puskesmas, poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) merupakan sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediaannya, semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Keberadaan Puskesmas dan Pustu merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Melalui keduanya, masyarakat Gorontalo Utara diharapkan dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan lebih mudah dan efektif. Rasio Puskesmas dan Pustu merupakan perhitungan untuk mengetahui kecukupan pelayanan kesehatan di suatu wilayah, sehingga pemerintah daerah dapat memastikan pelayanan kesehatan dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat.

Tabel 2.106
Rasio Puskesmas dan Jaringannya

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	125.603	126.238	125.816	127.580	130.400
2	Jumlah Puskesmas	15	15	15	15	15
	Rasio Puskesmas/satuan penduduk	**1:8.373**	**1:8.415**	**1:8.387**	**1:8.414**	**1:8.693**
3	Jumlah Puskesmas Pembantu	30	26	26	26	26
	Rasio Pustu/satuan penduduk	**1:4.186**	**1:4.855**	**1:4.839**	**1:4.854**	**1:4.960**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan Dinas Kesehatan, 2024 (diolah)

Tabel 2.106 menunjukkan pertambahan penduduk yang terjadi tidak sejalan dengan pertambahan jumlah Puskesmas. Hal tersebut patut diwaspadai pemerintah daerah, karena *load* pelayanan Puskesmas/Pustu yang semakin tinggi tanpa diimbangi dengan peningkatan *man-power* maupun jumlah fasilitas, akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan. Secara umum, rasio tersebut masih berada di bawah batas standar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, namun rasio ketersediaan dokter dan paramedis berada pada kondisi yang berbeda.

3) Rumah Sakit Daerah

Pada awal tahun 2008, Gorontalo Utara belum memiliki fasilitas rumah sakit. Selama perkembangan empat belas tahun tahun terakhir, Gorontalo Utara kini justru telah memiliki dua buah rumah sakit yang megah dan representatif: Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki (RSUD ZUS) dan Rumah Sakit Pratama Tolinggula Melayani (RSTM).

RS ZUS saat ini telah mengalami perkembangan cukup baik, diantaranya peningkatan ketersediaan dokter spesialis, jenis ruangan, dan tipe Rumah Sakit. Sementara RSTM yang baru diresmikan di Bulan Oktober tahun 2023 diuraikan gambaran layanannya sebagaimana Tabel 2.107 berikut.

Tabel 2.107
Perkembangan Layanan RS ZUS dan RSTM Tahun 2023

No.	Uraian	RSUD ZUS	RS Pratama TM
1	Jumlah dokter spesialis (ASN dan non-ASN)	11 dokter	-
2	Jumlah jenis layanan dokter spesialis yang tersedia	9 jenis spesialis	9 jenis spesialis
3	Jumlah dokter umum	8 orang	1 orang
4	Jumlah dokter gigi	1 orang	1 orang
5	Jumlah tenaga medis lainnya (ASN dan non-ASN)	342 orang	12 orang
5	Jumlah ketersediaan jenis ruangan/gedung rumah sakit	23 jenis bangunan	15 jenis bangunan
6	Tipe rumah sakit	Tipe C	Tipe D
7	Status akreditasi RS	Paripurna	Belum akreditasi

Sumber: RS ZUS dan Dinas Kesehatan Gorontalo Utara, 2024

Adapun data lengkap kondisi capaian layanan Rumah Sakit Zainal Umar Sidiki diuraikan dalam Tabel 2.108 berikut.

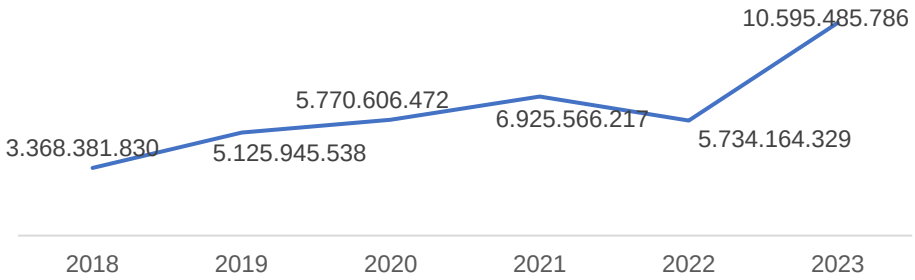
Tabel 2.108
Layanan Rumah Sakit ZUS

No.	Indikator	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kunjungan rawat inap	2.659	2.482	1.288	842	1.687	2.682
2	Jumlah kunjungan rawat jalan	5.674	6.119	3.738	4.055	4.651	6.088
3	Jumlah tempat tidur	50	50	88	102	102	106
4	Jumlah pasien keluar (hidup + mati)	2.659	2.482	1.288	869	1.732	2.682
5	Jumlah hari perawatan	8.828	8.711	5.432	4.748	6.682	9.953
6	Jumlah lama dirawat	8.736	6.570	4.156	2.376	4.450	7.573

Sumber: RSUD ZUS, 2024

Dengan bertambah masa dan jenis layanan di RSUD ZUS, berkorelasi sangat positif juga pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Gambaran kontribusi RS ZUS terhadap PAD disajikan pada Grafik 2.52.

Grafik 2.54
Realisasi PAD dari RSUD ZUS 2018-2023



Sumber: RSUD ZUS, 2024

Berdasarkan grafik di atas, kontribusi RSUD ZUS terhadap pendapatan daerah mengalami peningkatan cukup signifikan kurun enam tahun terakhir. Angka ini diprediksi terus naik karena faktor naiknya status tipe RSUD ZUS dari tipe "D" menjadi tipe "C" di tahun 2023 berdasarkan hasil kredensial BPJS Kesehatan, yang berdampak terhadap komposisi jasa yang akan dibayarkan BPJS Kesehatan terhadap layanan di Rumah Sakit ZUS. Selain itu, mulai beroperasinya RSTM di Kecamatan Tolinggula juga diyakini akan mendatangkan manfaat yang cukup signifikan, baik dari segmentasi finansial maupun derajat kesehatan masyarakat di wilayah bagian barat Gorontalo Utara. Untuk itu, di tahun-tahun mendatang perlu didorong perbaikan kualitas layanan di kedua RS, baik dari segi pengelolaan manajemen rumah sakit, ekspansi jenis dan kualitas layanan rumah sakit, serta peningkatan kepuasan masyarakat.

4) Ketersediaan Dokter dan Paramedis

Tenaga medis dan paramedis merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan kesehatan. Profesi tersebut memegang peranan penting dalam capaian kinerja kesehatan masyarakat. Tabel 2.109 berikut menyajikan jumlah ketersediaan tenaga medis dan paramedis di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2020-2023.

Tabel 2.109
Tenaga Medis dan Paramedis pada Dinas Kesehatan

No.	Uraian	2020			2021			2022			2023		
		PNS	PTT	Jumlah	PNS	PTT	Jumlah	PNS	PTT	Jumlah	PNS	PTT	Jumlah
1	Dokter umum	12	2	14	18	8	26	17	5	22	15	4	19
2	Dokter gigi	1	2	3	1	0	1	2	1	3	2	1	3
3	Dokter spesialis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Perawat	104	67	171	118	71	188	106	82	188	171	5	176
5	Bidan	103	67	170	96	99	195	92	127	219	187	0	187
6	Sanitarian	24	16	40	26	7	33	26	6	32	28	0	28
7	Nutrisionis	21	9	30	21	13	34	23	18	41	35	0	35

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

Ketersediaan tenaga kesehatan yang diuraikan di atas perlu untuk dianalisis berdasarkan komposisi masyarakat sehingga kebutuhan tenaga medis dan paramedis dapat diperhitungkan. Dengan mengakumulasikan tenaga medis yang terdapat pada Dinas Kesehatan (termasuk Puskesmas dan RS TM) dan RS ZUS, didapat rasio sebagaimana Tabel 2.110 berikut.

Tabel 2.110
Rasio Tenaga Medis dan Paramedis per 100.000 Penduduk Tahun 2023

No.	Indikator	Rasio
1	Jumlah penduduk	128.560 (tahun 2022)
2	Rasio dokter (spesialis + umum) terhadap 100.000 penduduk	32,66:100.000
3	Rasio dokter gigi terhadap 100.000 penduduk	3,88:100.000
4	Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk	192,90:100.000
5	Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk	241,13:100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Gorontalo Utara dan RS ZUS, 2024

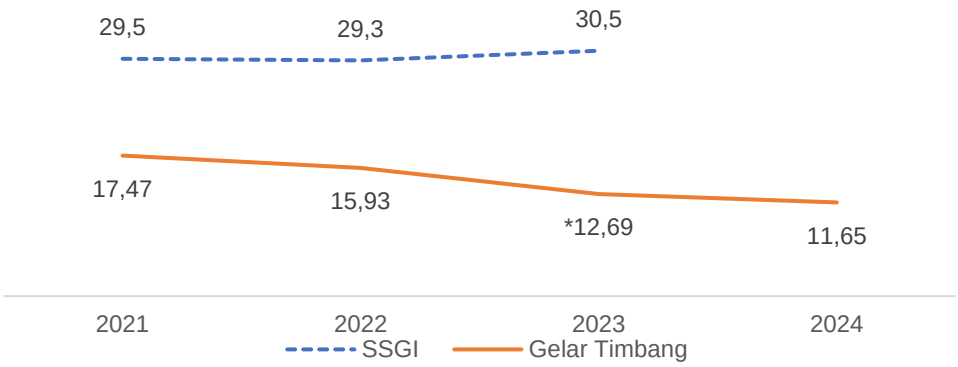
Pada kedua tabel terakhir di atas, diketahui bahwa ketersediaan tenaga kesehatan masih berada pada posisi sangat kurang, terutama tenaga dokter. Rendahnya ketersediaan tenaga kesehatan tentu selain mempengaruhi terhadap status kelas rumah sakit, juga mempengaruhi kualitas kesehatan dan pelayanan kesehatan secara umum bagi masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara, terlebih lagi dengan telah beroperasinya RSTM di tahun 2023, yang tentu saja membutuhkan tambahan tenaga dokter dan paramedis lainnya. Peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan selain akan meningkatkan tingkat harapan hidup, juga akan membantu dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

P. Status Gizi Balita

Kurang gizi merupakan salah satu ancaman serius bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah. Hal ini dapat menjadi masalah karena adanya beban jumlah anak kurang gizi yang cukup besar. Persoalan malnutrisi di Indonesia masih menjadi tantangan dalam upaya membangun generasi Indonesia yang berkualitas di masa mendatang. Walaupun demikian, berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan sebagai tindakan antisipatif khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil maupun Balita, memberikan hasil yang cukup menggembirakan karena selama 3 tahun terakhir permasalahan stunting di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan.

Berkaca hasil Survey Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023, angka stunting nasional mencapai angka terendah selama satu dekade terakhir karena menyentuh 21,5 persen, hanya berkurang 0,1 poin dibanding setahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2021 relatif masih tinggi di kisaran 24,4 persen dan 2019 27,7 persen. Jika dibandingkan target RPJMN 2020-2024, angka tersebut masih jauh dari yang diharapkan sebesar 14 persen. Sedangkan pada Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045, target untuk Provinsi Gorontalo di angka 7,0 persen tahun 2045. Berikut grafik tren prevalensi stunting di Gorontalo Utara berdasarkan dua metode sumber pengumpulan data yaitu SSGI/SKI dan Hasil Gelar Timbang Dinas Kesehatan Gorontalo Utara.

Grafik 2.55
Prevalensi Stunting Gorontalo Utara
Berdasarkan SSGI/SKI dan Hasil Gelar Timbang



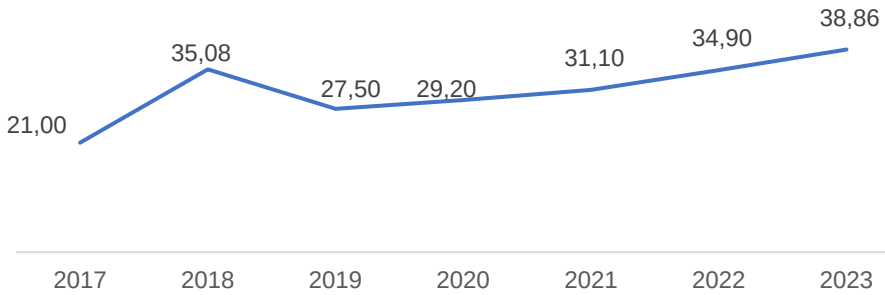
Sumber: SSGI dan Dinas Kesehatan, 2024

Formulasi program percepatan dalam penurunan stunting mengarah pada intervensi berbasis keluarga berisiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi, sehingga kasus malnutrisi bukan hanya menjadi tumpuan dalam satu bidang saja. Edukasi gizi, sistem reproduksi, sanitasi, pola asuh hingga faktor ekonomi turut andil dalam upaya mengentaskan kasus malnutrisi di Indonesia. Bahkan jika ditelaah lebih dalam kasus malnutrisi merupakan sebuah lingkaran siklus, dimana anak yang lahir dengan gizi kurang akan tumbuh menjadi remaja dengan status kurang gizi dan berpotensi kembali melahirkan anak berkondisi sama. Pada posisi ini, anak menjadi fase yang rentan terhadap kasus malnutrisi dan berpotensi berulang ke generasi berikutnya.

Sejalan hal itu, ibu yang sedang mengandung harus mulai memperhatikan asupan yang dimakan, dan juga harus melakukan imunisasi. Air Susu Ibu (ASI) merupakan sumber nutrisi pada bayi. Komposisi yang terkandung di dalam ASI menunjang tumbuh kembang bayi karena mengandung antibodi alami yang dapat membantu dalam mencegah infeksi dan gangguan kesehatan pada bayi. Di samping pemberian ASI, pemberian imunisasi juga penting untuk menjaga kesehatan bayi dan Balita.

Berdasarkan Profil Kesehatan Gorontalo Utara 2024, capaian ASI ekslusif juga terus meningkat. Angka ini kemungkinan senantiasa meningkat karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dan gencarnya promosi kesehatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Gorontalo Utara.

Grafik 2.56
ASI Ekslusif di Gorontalo Utara (Persen)



Sumber: Profil Kesehatan Gorontalo Utara, 2017-2024

Secara teknis, status gizi anak Balita diukur berdasarkan umur, Berat Badan (BB) dan Tinggi Badan (TB). Berdasarkan Tabel 2.111, dari 9.188 Balita yang ditimbang badannya di tahun 2020, kasus bayi gizi kurang terjadi sebanyak 1.351 kasus. Persentase kasus terbesar terjadi di Kecamatan Sumalata Timur dan Puskesmas yang menangani di Dulukapa dengan persentase 28,69 persen. Kasus tertinggi berikutnya pada Kecamatan Anggrek di Puskesmas Ilangata dengan persentase kasus 25,36 persen. Sedangkan pada tahun berikutnya, dari 8.505 Balita terjadi 1.214 Balita gizi kurang, persentase tertinggi terjadi pada Puskesmas Ilangata di Kecamatan Anggrek dengan persentase kasus 26,03 persen dan Puskesmas Dambalo di Kecamatan Tomilito. Setahun berselang, dari 10.903 Balita yang ditimbang badannya, kasus bayi gizi kurang terjadi sebanyak 1.882 kasus. Persentase kasus terbesar terjadi di Kecamatan Anggrek dan Puskesmas yang menangani di Ilangata dengan persentase 25,60 persen. Kasus tertinggi berikutnya pada Kecamatan Sumalata di Puskesmas Sumalata dengan persentase kasus 22,20 persen. Secara umum, kasus Balita gizi kurang pada tahun 2020, 2021, dan 2022 masih kurang lebih sama, masing-masing sejumlah 14,70 persen; 14,27 persen; dan 17,26 persen.

Sedangkan pada kasus Balita pendek, dari 9.188 Balita yang diukur tinggi badannya tahun 2020, terjadi 1.667 kasus sesuai Tabel 2.112. Persentase tertinggi terjadi di Puskesmas Sumalata Kecamatan Sumalata dan Puskesmas Dulukapa di Sumalata Timur dengan masing-masing 32,06 persen dan 30,98 persen kasus. Sedangkan di tahun 2021 terjadi pergeseran lokasi menjadi di Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek dan

Puskesmas Dambalo Kecamatan Tomilito dengan masing-masing angkanya 37,33 persen dan 26,45 persen pada keseluruhan 1.486 kasus dari 8.505 Balita. Pada tahun berikutnya, dari 10.876 Balita yang diukur tinggi badannya, terjadi 1.634 kasus. Persentase tertinggi terjadi di Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek dan Puskesmas Molingkapoto di Kwandang dengan masing-masing 34,14 persen dan 21,41 persen kasus. Secara umum, pada 2021 dan 2022 terjadi penurunan persentase kasus dibandingkan tahun 2000 dari 18,14 persen ke 17,47 persen, dan terakhir 15,02 persen.

Pada kasus Balita kurus, dari 9.188 Balita yang ditimbang di tahun 2000, terjadi 662 kasus. Persentase kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Ilangata Kecamatan Anggrek, dan Puskesmas Dambalo Kecamatan Tomilito, masing-masing 16,01 persen dan 14,16 persen. Sedangkan di tahun berikutnya, terjadi 593 kasus dari 8.505 Balita yang ditimbang badannya, dengan angka Balita kurus tertinggi ditemukan di Puskesmas Dambalo Kecamatan Tomilito dan Puskesmas Dulukapa Kecamatan Sumalata Timur, masing-masing dengan persentase 19,50 persen dan 15,25 persen. Pada tahun 2022, dari 10.830 Balita yang ditimbang, terjadi 1.160 kasus. Persentase kasus tertinggi terjadi di Puskesmas Gentuma Kecamatan Gentuma Raya, dan Puskesmas Limbato Kecamatan Tolinggula, masing-masing 21,81 persen dan 19,46 persen. Secara umum, terjadi penurunan kinerja pada indikator ini, dimana persentase temuan kasus di 2022 lebih besar dibandingkan 2020 dan 2021, masing-masing 10,71 persen berbanding 7,21 persen dan 6,97 persen sesuai yang ditampilkan pada Tabel 2.113.



Tabel 2.111
Kasus Balita Gizi Kurang

No.	Kecamatan	Puskesmas	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jumlah Balita 0-59 Bulan Ditimbang		Balita Gizi Kurang (BB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Ditimbang		Balita Gizi Kurang (BB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Ditimbang		Balita Gizi Kurang (BB/U)	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Atinggola	Atinggola	368	362	51	51	325	350	49	54	565	562	139	96
2	Gentuma Raya	Gentuma	297	309	46	35	258	224	27	22	458	379	104	72
3	Tomilito	Dambalo	445	360	88	69	332	273	83	62	453	380	47	34
4	Kwandang	Kwandang	689	498	110	59	691	493	127	68	685	466	141	74
5		Molingkapoto	411	411	13	4	527	476	81	66	625	441	142	79
6	Ponelo Kepulauan	Ponelo	148	139	21	15	160	134	25	16	225	131	43	24
7	Anggrek	Anggrek	460	390	90	53	379	359	23	24	453	385	74	43
8		Ilangata	271	285	72	69	144	148	33	43	308	313	95	64
9	Monano	Monano	311	321	19	29	258	261	35	43	278	235	32	21
10	Sumalata Timur	Dulukapa	272	209	81	57	270	235	38	23	419	262	72	38
11	Sumalata	Sumalata	246	225	58	47	249	234	34	42	313	259	62	65
12		Buloila	205	238	26	31	194	203	20	26	263	260	28	25
13	Biau	Biau	258	225	34	30	256	217	32	26	324	281	50	42
14	Tolinggula	Tolinggula	354	321	45	39	373	347	45	38	528	467	78	68
15		Limbato	89	71	5	4	63	72	6	3	108	77	19	11
Jumlah			**4.824**	**4.364**	**759**	**592**	**4.479**	**4.026**	**658**	**556**	**6.005**	**4.898**	**1.126**	**756**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.112
Kasus Balita Pendek/Stunting

No.	Kecamatan	Puskesmas	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jumlah Balita 0-59 Bulan Diukur Tinggi Badan		Balita Pendek + Sangat Pendek (TB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Diukur Tinggi Badan		Balita Pendek + Sangat Pendek (TB/U)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Diukur Tinggi Badan		Balita Pendek + Sangat Pendek (TB/U)	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Atinggola	Atinggola	368	362	60	57	325	350	80	60	564	561	102	55
2	Gentuma Raya	Gentuma	297	309	41	34	258	224	29	23	452	376	45	51
3	Tomilito	Dambalo	445	360	100	57	332	273	94	66	453	380	40	26
4	Kwandang	Kwandang	689	498	159	74	691	493	154	80	685	466	105	49
5		Molingkapoto	411	411	54	24	527	476	125	90	616	435	150	75
6	Ponelo Kepulauan	Ponelo	148	139	31	17	160	134	26	23	225	131	24	11
7	Anggrek	Anggrek	460	390	109	85	379	359	40	35	453	385	89	37
8		Ilangata	271	285	67	76	144	148	54	55	308	313	112	100
9	Monano	Monano	311	321	19	26	258	261	31	30	278	235	31	24
10	Sumalata Timur	Dulukapa	272	209	92	57	270	235	36	26	419	262	45	18
11	Sumalata	Sumalata	246	225	58	93	249	234	47	48	313	259	68	41
12		Buloila	205	238	31	36	194	203	28	30	263	260	45	39
13	Biau	Biau	258	225	42	28	256	217	38	26	324	281	51	38
14	Tolinggula	Tolinggula	354	321	53	65	373	347	48	49	527	467	85	65
15		Limbato	89	71	15	7	63	72	9	6	108	77	11	2
Jumlah			**4.824**	**4.364**	**931**	**736**	**4.479**	**4.026**	**839**	**647**	**5.988**	**4.888**	**1.003**	**631**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

Tabel 2.113
Kasus Balita Kurus

No.	Kecamatan	Puskesmas	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022			
			Jumlah Balita 0-59 Bulan Ditimbang		Balita Kurus (BB/TB)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Ditimbang		Balita Kurus (BB/TB)		Jumlah Balita 0-59 Bulan Ditimbang		Balita Kurus (BB/TB)	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
1	Atinggola	Atinggola	368	362	30	26	325	350	19	17	565	562	68	49
2	Gentuma Raya	Gentuma	297	309	8	0	258	224	19	13	455	375	104	77
3	Tomilito	Dambalo	445	360	53	61	332	273	72	46	453	380	58	25
4	Kwandang	Kwandang	689	498	65	24	691	493	45	20	683	465	84	32
5		Molingkapoto	411	411	4	2	527	476	52	28	623	439	101	59
6	Ponelo Kepulauan	Ponelo	148	139	23	11	160	134	18	12	225	131	36	22
7	Anggrek	Anggrek	460	390	49	25	379	359	9	10	453	385	42	27
8		Ilangata	271	285	41	48	144	148	10	17	308	313	38	19
9	Monano	Monano	311	321	4	1	258	261	8	5	278	235	32	16
10	Sumalata Timur	Dulukapa	272	209	30	34	270	235	40	37	419	262	45	12
11	Sumalata	Sumalata	246	225	15	18	249	234	5	17	278	235	32	16
12		Buloila	205	238	13	13	194	203	10	9	263	260	10	12
13	Biau	Biau	258	225	12	18	256	217	18	18	324	281	23	15
14	Tolinggula	Tolinggula	354	321	17	9	373	347	6	7	528	467	43	27
15		Limbato	89	71	4	4	63	72	5	1	108	77	23	13
Jumlah			**4.824**	**4.364**	**368**	**294**	**4.479**	**4.026**	**336**	**257**	**5.963**	**4.867**	**739**	**421**

Sumber: Dinas Kesehatan, 2023

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Jaringan Jalan Kondisi Mantap

Salah satu capaian kinerja Bina Marga yaitu proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi "Mantap" (gabungan kondisi "Baik" dan "Sedang"), yang memiliki arti panjang jalan kabupaten dalam kondisi "Baik" dan "Sedang" dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum RI Direktorat Jenderal Bina Marga, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Jalan dengan kondisi "Baik" adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi "Sedang" adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai ada gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan.
- Jalan dengan kondisi "Rusak Ringan" adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan jalan.
- Jalan dengan kondisi "Rusak Berat" adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak dalam ukuran besar, dan terkelupas cukup dalam, disertai dengan kerusakan lapis fondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Secara umum, tren panjang jaringan jalan dalam kondisi "Mantap" di Kabupaten Gorontalo Utara terus meningkat. Namun pada tahun 2023 terjadi degradasi pada kualitas "Sedang" sehingga kondisi kemantapan jalan turun drastis. Rincian tersebut ditunjukkan pada Tabel 2.114 berikut.

Tabel 2.114
Kondisi Jalan Kabupaten

No.	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	229,648	217,54	217,908	226,108	122,664	130,684	143,89
2	Sedang	107,75	9,55	10,506	10,506	200,427	192,407	140,10
3	Rusak ringan	74,172	5,15	9,035	9,035	134,135	142,155	154,44
4	Rusak berat	109,55	288,88	283,671	275,471	63,894	55,874	82,69
5	Jalan kabupaten keseluruhan	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12	521,12
Proporsi jalan kondisi mantap (%)		**64,74**	**43,58**	**43,83**	**45,40**	**62,00**	**62,00**	**54,49**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Jalan harus memiliki kondisi mantap untuk memberikan pelayanan yang maksimum terhadap pengguna jalan. Kerusakan jalan lebih cepat dari umur rencana sering terjadi khususnya di jalan-jalan arteri. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar mencapai umur layan sesuai yang direncanakan. Pada tahun 2021, kondisi jalan “Rusak Berat” sudah jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, namun perlu dicatat bahwa kondisi yang “Baik” pun turut berkurang. Patut diwaspadai peningkatan panjang jalan kondisi “Sedang” yang sangat signifikan, yang jika tidak dijaga kualitasnya akan menjadi bom waktu di tahun berikutnya karena berubah ke status “Rusak Ringan” atau “Rusak Berat”.

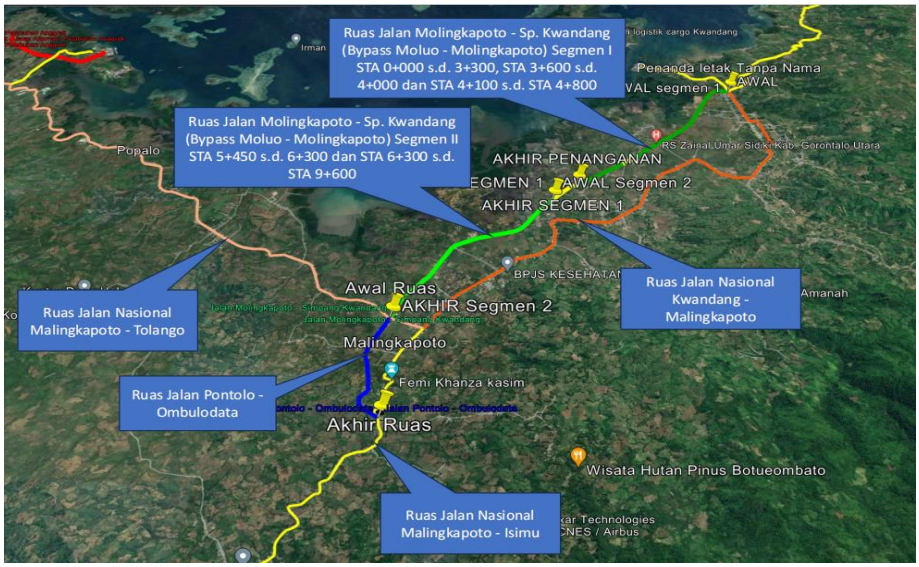
Jalan sebagai sarana penghubung antar/lintas kota/kabupaten, serta kecamatan sangat krusial perannya dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang, selain perannya dalam interaksi sosial budaya. Untuk itu, pemerintah daerah selalu berkomitmen menjaga kualitas jalan tersebut sebagai modal sosial, sehingga pada tahun 2022 dilaksanakan peningkatan jalan pada berbagai lokasi dengan anggaran pinjaman daerah PEN senilai Rp163 Miliar, setelah selama 2 tahun sebelumnya peningkatan jalan yang dilaksanakan sangat minim, mempertimbangkan kondisi keuangan daerah terutama saat pandemi. Selain itu, diupayakan juga peralihan status menjadi Jalan Nasional pada beberapa ruas jalan yang ada di Gorontalo Utara, yakni ruas yang menghubungkan kawasan Pontolo hingga ke Simpang Polres Lama Gorontalo Utara (*Bypass*) karena kemampuan fiskal daerah yang terbatas dalam hal pemeliharaan. Upaya untuk masuk dalam ruas jalan yang termasuk pada bagian intervensi Inpres Jalan Daerah merupakan upaya awal dari hal tersebut, sehingga pada tahun 2023 telah dilaksanakan pembangunan Segmen I (Bypass Moluo-Molingkapoto)

23 ruas jalan diintervensi dari sumber anggaran PEN tahun 2022-2023



melalui APBN. Alternatif lainnya, pengelolaan jalan bukan tidak mungkin diskemakan dalam *creative financing* lainnya, seperti dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) guna memberikan solusi keterbatasan fiskal.

Gambar 2.24
Rencana Segmen I, II, dan III Bypass Gorontalo Utara



Sumber: Balai Jalan Nasional Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan Grafik 2.57, jalan kabupaten secara keseluruhan tidak bertambah, namun peningkatan dan pemeliharaan jalan tetap dikerjakan.

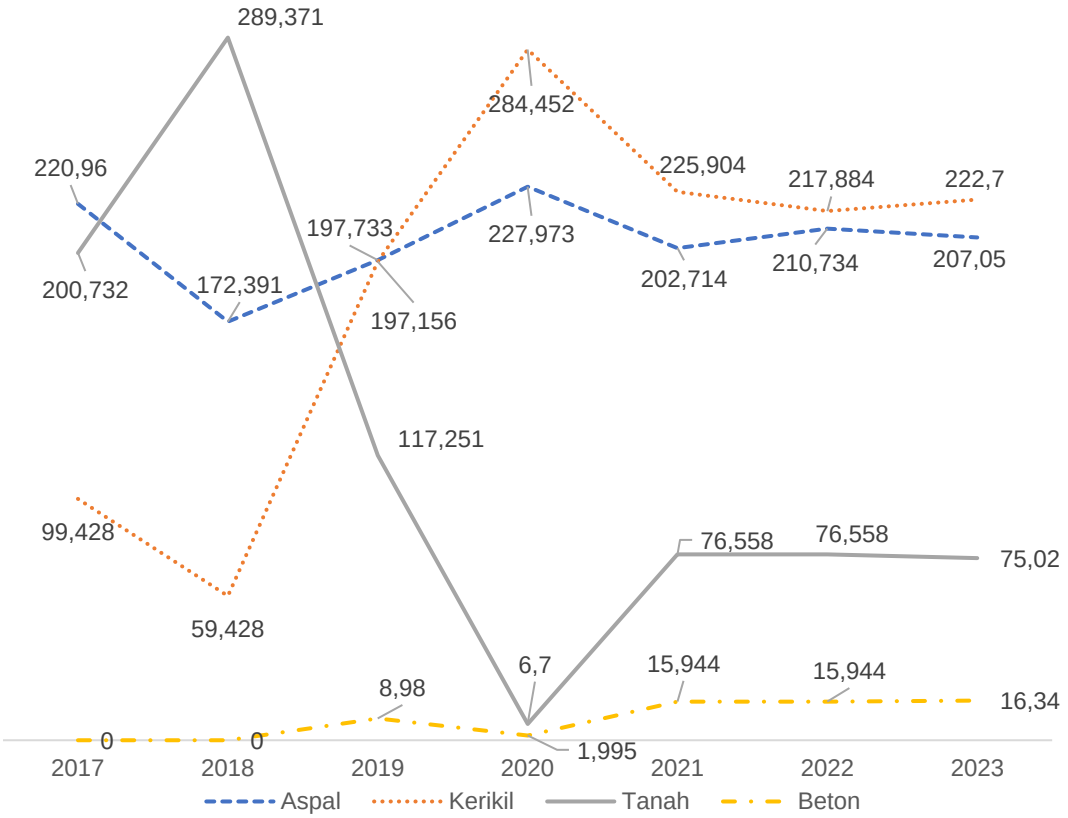
Grafik 2.57
Jalan yang Dikerjakan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Sedangkan dari sisi material permukaan jalan, kualitas jalan di Gorontalo Utara seharusnya sudah meningkat karena ada peralihan dari permukaan tanah menjadi permukaan aspal, kerikil, atau beton selayaknya ditampilkan pada Grafik 2.58 Dengan transformasi ini, seharusnya aksesibilitas antar daerah dan mobilitas masyarakat sudah meningkat.

Grafik 2.58
Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

B. Jaringan Irigasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, definisi irigasi disebutkan sebagai usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Sedangkan jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi, yang terdiri dari jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terus berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi “Baik” jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya, karena jaringan irigasi yang berfungsi sebagai

prasarana pelayanan air irigasi berperan penting dalam mendukung produktivitas lahan pertanian.

Daerah irigasi di wilayah Gorontalo Utara seluas 5.674,59 Ha dari 39 Daerah Irigasi (DI), dengan panjang total jaringan irigasi yang masuk kewenangan Kabupaten Gorontalo Utara sepanjang 191.322 Meter. Informasi tersebut dirincikan pada Tabel 2.115 sebagai berikut.

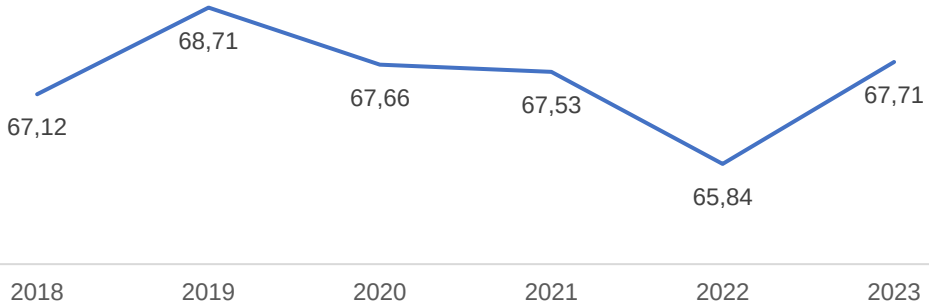
Tabel 2.115
Daerah dan Jaringan Irigasi

No.	Daerah Irigasi	Luas Areal Permen PU 14/2015 (Ha)	Saluran/Jaringan Irigasi			
			Primer (M)	Sekunder (M)	*Tersier (M)	*Pembuang (M)
1	D.I. Didingga	641	1.210	9.635	21.865	295
2	D.I. Leboto	142	674	1.432	7.284	2.059
3	D.I. Posso	310	1.810	3.350	1.360	0
4	D.I. Pulahenti	411	1.900	2.920	830	0
5	D.I. Soklat	515	865	4.111	20.279	1.443
6	D.I. Abati I	125	100	560	3.120	650
7	D.I. Abati II	150	217	2.341	363	661
8	D.I. Bohulo	120	1.800	1.276	2.772	150
9	D.I. Bualemo	11	100	450	300	150
10	D.I. Buata	150	162	1.211	500	300
11	D.I. Bubode	150	986	4.869	11.421	839
12	D.I. Buloila Kanan	190	2.130	1.180	290	0
13	D.I. Buloila Kiri	100	397	2.163	1.644	200
14	D.I. Deme I	200	81	1.795	2.102	400
15	D.I. Deme II	80				
16	D.I. Pulahenti II	145	571	132	1.835	320
17	D.I. Dulukapa	200	122	1.200	750	330
18	D.I. Ilangata	80	416	635	1.960	200
19	D.I. Imana Tengah	37	200	37	200	37
20	D.I. Imana Ulu	165	600	0	0	0
21	D.I. Kasia	15	300			
22	D.I. Kota Jin	10				
23	D.I. Mebongo	195	450	2.800	490	570
24	D.I. Molingkapoto	130				
25	D.I. Monano	250	244	1.690	1.876	96
26	D.I. Monggupo	40	312	1.941	4.481	443
27	D.I. Mootinelo	50	54	58	1.057	200
28	D.I. Omuto	80	982	2.170	200	150
29	D.I. Omuto II	75	1.029	1.110	513	200
30	D.I. Pinontoyongan	75				
31	D.I. Sigaso	185	219	2.099	3.963	829
32	D.I. Tenilo	125	308	329	4.997	186
33	D.I. Tolango	65	297	138	1.401	671
34	D.I. Tolongio	150	300	420	550	170
35	D.I. Tudi	50	76	160	350	100
36	D.I. Wubudu	150	254	1.068	672	150
37	D.I. Ipilo**	35,05	150	420	750	200
38	D.I. Iloheluma**	23	396	264	1.559	109
39	D.I. Motihelumo**	49,54	276	845	2.534	423
Jumlah		5.674,59	19.988	54.772	104.068	12.494

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024
*Data sementara
**D.I. baru yang secara teknis ada, namun tidak termasuk di Peraturan Menteri PU

Dengan berbagai upaya pengembangan dan peningkatan jaringan irigasi, kinerja sistem dan jaringan irigasi kabupaten meningkat setiap tahun. Dengan menggunakan parameter-parameter yang dimuat pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), kinerja irigasi disajikan pada Grafik 2.59 berikut.

Grafik 2.59
Kinerja Jaringan Irigasi (%)



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Ke depan, guna mewujudkan peningkatan ketertiban pengelolaan jaringan irigasi, peran strategis Komisi Irigasi Gorontalo Utara perlu diperkuat dan ditingkatkan guna sinkronisasi perencanaan antara pemerintah dengan para petani pengguna air.

C. Jaringan Sungai

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 39 Tahun 1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai, Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa sungai merupakan sistem pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi pada kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Jaringan sungai dapat mempengaruhi besarnya debit aliran sungai yang dialirkan oleh anak-anak sungainya, dan dapat diukur secara kuantitatif dari nisbah percabangan, yaitu perbandingan antara jumlah alur sungai orde tertentu dengan orde sungai tingkat di atasnya. Faktor yang dapat mempengaruhi air sungai terdiri dari curah hujan, penggunaan air sungai oleh manusia, pencemaran lingkungan, penyerapan air tanah, dan lain sebagainya.

Dalam perjalanannya, aliran sungai mungkin akan terhambat karena proses sedimentasi, dan lain sebagainya. Untuk itu, dilaksanakan revitalisasi/normalisasi sungai dengan harapan dapat meningkatkan

kapasitas pengairan pada jaringan irigasi. Detail informasi tersebut ditampilkan pada Tabel 2.116 berikut.

Tabel 2.116
Normalisasi Sungai

No.	Kecamatan	Lokasi Kegiatan	2020		2021		2022	
			Panjang (M)	Luasan (M^2)	Panjang (M)	Luasan (M^2)	Panjang (M)	Luasan (M^2)
1	Biau	Normalisasi Sungai Desa Bohulo	80	198	-	-	-	-
2	Kwandang	Normalisasi Sungai Molingkapoto Selatan	-	-	830	16.849	-	-
3	Tolinggula	Normalisasi Sungai Ilomangga	-	-	480	9.393,6	-	-
4	Tolinggula	Normalisasi Sungai Tolinggula Tengah	-	-	400	3.520	-	-
5	Kwandang	Normalisasi Sungai Pontolo	-	-	200	1.200	-	-
6	Tolinggula	Normalisasi Saluran Tolite Jaya	-	-	686	9.912,7	-	-
7	Anggrek	Normalisasi Sungai Tolango	-	-			630	3.150
TOTAL			**80**	**198**	**2.596**	**40.875,30**	**630**	**3.150**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

D. Jaringan Drainase

Drainase merupakan saluran yang digunakan untuk menyalurkan massa air berlebih dari sebuah kawasan seperti perumahan, perkotaan, dan jalan. Sistem saluran ini memiliki peran penting untuk menghindari terjadinya genangan air di permukaan. Air kelebihan secepatnya dialirkan ke saluran drainase, kemudian ke sungai dan akhirnya ke laut, sehingga tidak menimbulkan genangan atau banjir. Panjang drainase yang dikerjakan selama kurun waktu tahun 2017 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.117 berikut.

Tabel 2.117
Pekerjaan Drainase

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang drainase yang dikerjakan (Meter)	750	190	356	242	330	1.531,39	2.449

Sumber: Bidang SDA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

E. Sanitasi dan Air Bersih

Sanitasi adalah sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung dengan bahan-bahan kotor dan berbahaya.

Dalam konteks sanitasi lingkungan, yaitu status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyediaan air bersih dan sebagainya.

Jumlah rumah tangga terlayani yang mendapatkan bantuan pembangunan sanitasi baru (*septic tank* komunal) dari tahun 2019 hingga 2023 sebanyak 1.262 rumah tangga, dengan tahun 2023 tidak ada pembangunan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.118 berikut.

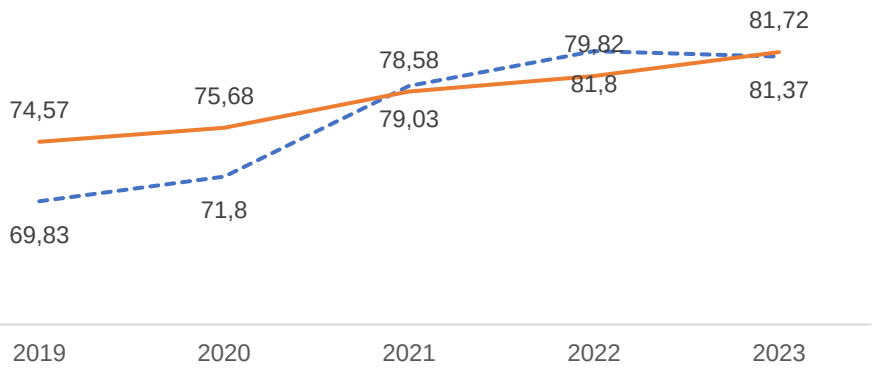
Tabel 2.118
Pembangunan Sanitasi Baru

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan sanitasi baru (rumah tangga)	569	219	112	362	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Serangkaian intervensi tersebut, terbukti pada hasil rilis Badan Pusat Statistik, setiap tahun angka persentase sanitasi layak selalu meningkat, yang detail capaian setiap tahun disajikan pada Grafik 2.60.

Grafik 2.60
Sanitasi Layak (%)



Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, diolah

Intervensi sambungan air bersih, instalasi sambungan rumah tangga selang tahun 2015 hingga 2022 yang telah dibangun sebanyak 3.675 rumah tangga, sedangkan yang disasar pada Renstra Dinas Kesehatan Gorontalo Utara 2018-2023 sebanyak 6.830 RT dari kondisi awal di 2018 sebanyak 4.760 RT, sehingga selama 5 tahun sebanyak 2.070 RT yang menjadi sasaran intervensi program, dengan realisasi 2.200 sambungan baru. Detail data dapat dilihat pada Tabel 2.119 berikut.

Tabel 2.119
Pembangunan Instalasi Air Bersih Rumah Tangga

Uraian	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pembangunan instalasi air bersih (rumah tangga)	100	350	445	580	1.256	410	404	100	30

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara, kinerja air minum layak secara tren meningkat, namun jika dilihat lebih detail terjadi pasang surut kinerja di daerah perkotaan, hal ini mungkin disebabkan banyaknya pendatang/pembangunan rumah baru di wilayah yang belum sempat memiliki akses air minum. Rincian hal tersebut digambarkan pada Tabel 2.120 berikut.

Tabel 2.120
Air Minum Layak Berdasarkan Tipe Daerah (%)

Tahun	Kategori	Tipe Daerah		
		Perkotaan	Perdesaan	Total
2019	Layak	94,00	83,28	84,73
	Tidak Layak	6,00	16,72	15,27
2020	Layak	100,00	85,59	87,55
	Tidak Layak	0,00	14,41	12,45
2021	Layak	93,85	84,97	86,23
	Tidak Layak	6,15	15,03	13,77
2022	Layak	86,14	90,05	89,47
	Tidak Layak	13,86	9,95	10,53
2023	Layak			90,14
	Tidak Layak			9,86

Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik Gorontalo Utara, diolah

F. Penataan Ruang

Sebagai wujud penataan ruang di Kabupaten Gorontalo Utara, Pemerintah Daerah melakukan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang merupakan suatu kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Sebagai wujud perencanaan tata ruang terkait dengan pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang. Gambaran ketaatan ruang di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.121 berikut.

Tabel 2.121
Ketaatan Terhadap Tata Ruang

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase ketaatan tata ruang	68,95	69,22	69,22	74,1	74,1

Sumber: Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2024

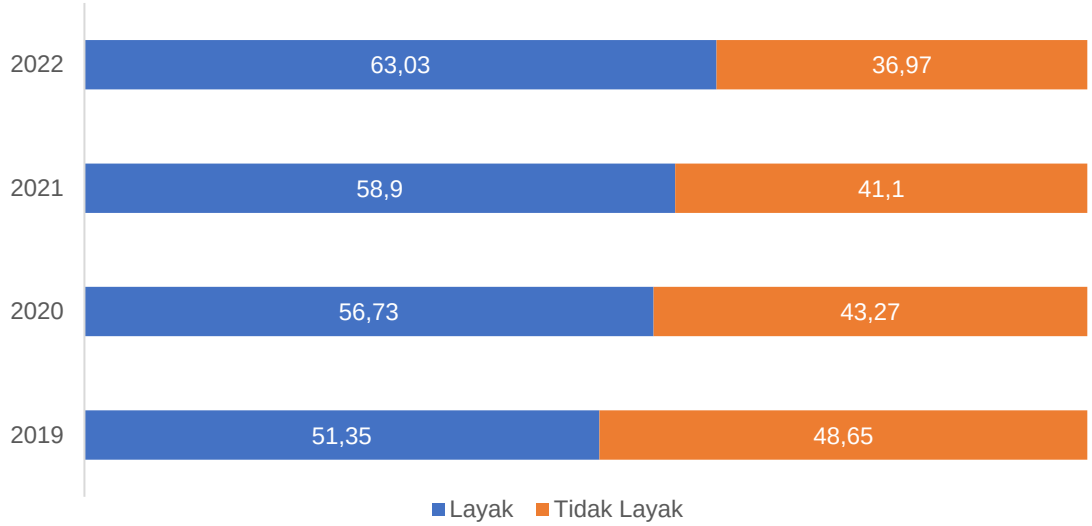
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rumah Layak Huni

Menurut Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2019, rumah tangga yang diklasifikasikan sebagai hunian/rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni yang dinilai dari 4 kriteria:

- Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 per kapita (*sufficient living space*);
- Memiliki akses terhadap air minum layak;
- Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
- Ketahanan bangunan (*durable housing*), yaitu atap terluas berupa beton, genteng, seng, kayu, sirap; dinding terluas berupa tembok, plesteran anyaman bambu, kawat, kayu, papan dan batang kayu; dan lantai terluas yang terbuat dari marmer, granit, keramik, parket, vinyl, karpet, ubin, tegel, teraso, kayu, papan, semen, bata merah.

Grafik 2.61
Kondisi Hunian Layak (%)



Sumber: Susenas Badan Pusat Statistik, diolah

Angka rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo Utara secara tren terus meningkat, namun masih menjadi pekerjaan serius yang harus diperhatikan karena hunian tidak layak masih berada di atas 30 persen. Menindaklanjuti data demikian, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan baik pembangunan/peningkatan kualitas perumahan.

Tabel 2.122
Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Perumahan

No.	Kegiatan	Tahun							Total
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) (unit)	222	337	451	1.018	368	480	266	3.132
2	Rumah khusus nelayan (unit)	80	50	-	-	-	-	-	130
3	Rumah susun sederhana sewa (unit)	70	-	-	-	-	42	-	112
4	Bangun baru Mahyani sehat (unit)	-	1	34	64	50	49	32	230
5	Rehab berat Mahyani sehat (unit)	222	3	29	1	1	10	3	269

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

Berdasarkan Laporan Akhir Revisi Dokumen RP3KP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021, luas permukiman layak huni di Gorontalo Utara seluas 76.473 Hektar, dengan jumlah rumah layak huni 25.491 unit dari total 29.391 unit rumah. Rincian kepemilikan rumah di setiap rumah tangga dan jumlah rumah tangga yang ada di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.123 berikut.

Tabel 2.123
Unit Rumah di Gorontalo Utara (Tahun 2021)

No.	Kecamatan	Rumah Tangga	Rumah	RT Tidak Memiliki Rumah	Rumah Tidak Layak Huni
1	Atinggola	3.688	3.303	388	340
2	Gentuma Raya	2.947	2.446	233	319
3	Kwandang	4.682	6.058	839	737
4	Anggrek	4.854	3.840	440	450
5	Tolinggula	3.044	2.466	346	453
6	Sumalata	3.234	2.835	254	307
7	Ponelo Kepulauan	1.169	913	140	147
8	Monano	2.192	1.816	269	149
9	Biau	1.611	1.441	77	122
10	Sumalata Timur	2.215	1.903	258	232
11	Tomilito	2.790	2.370	318	259
Jumlah		**32.426**	**29.391**	**3.562**	**3.414**

Sumber: Laporan Akhir Revisi Dokumen RP3KP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021

B. Cakupan Layanan Pamsimas

Program Pamsimas di Kabupaten Gorontalo Utara dimulai sejak Pamsimas II pada tahun 2014-2015 yang diikuti oleh desa intervensi sebanyak 20 desa. Pada tahun 2017-2021, dilaksanakan program Pamsimas III dengan jumlah

intervensi sebanyak 52 desa, jadi total desa intervensi tahun 2014-2021 sebanyak 72 desa dengan capain akses air minum dan sanitasi total sebanyak 34.637 jiwa dan 9.306 KK. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, dilaksanakan masing-masing di 16 dan 6 desa. Rincian pelaksanaan program Pamsimas selama 7 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.124 berikut.

Tabel 2.124
Capaian Pelaksanaan Program Pamsimas

Indikator	Tahun							Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jumlah rumah tangga yang terlayani Pamsimas	2.316	1.248	936	522	1.229	2.316	596	9.163

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2024

C. Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Pencegahan, penanganan, dan pengendalian kawasan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menciptakan ruang hidup dan tempat tinggal yang lebih layak bagi masyarakat.

Pada tahun 2022, berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 47.III.2022 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten di Gorontalo Utara Tahun 2022, terdapat 12 kawasan kumuh. 12 kawasan ini menjadi sasaran dari peningkatan kualitas air bersih, jalan rabat, serta rumah layak huni. Rincian lokasi dan luasan kawasan kumuh tersebut sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.125 berikut.

Tabel 2.125
Kawasan Kumuh Gorontalo Utara

No.	Kawasan	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Kawasan Moluo	13,27	Kwandang
2	Kawasan Katang Indah Yapi-Yapi	12,79	Kwandang
3	Kawasan Hokkimu-Mangrove	15,98	Kwandang
4	Kawasan Bulalo	10,52	Kwandang
5	Kawasan Leboto	6,67	Kwandang
6	Kawasan Mootinelo	4,63	Kwandang
7	Kawasan Molingkapoto	2,13	Kwandang
8	Kawasan Tolongio	13,05	Anggrek
9	Kawasan Popalo	10,02	Anggrek
10	Kawasan Ilangata	19,39	Anggrek
11	Kawasan Ilodulunga	5,87	Anggrek
12	Kawasan Langge	9,35	Anggrek
Total		**123,67**	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, 2023

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

A. Cakupan Polisi Pamong Praja

Dalam hal penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok tersebut adalah Polisi Pamong Praja. Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) per 10.000 penduduk mengalami fluktuasi selama tahun 2018 hingga tahun 2022, yang sejalan dengan jumlah SDM yang juga naik turun, seperti digambarkan pada Tabel 2.126 berikut.

Tabel 2.126
Cakupan Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Polisi Pamong Praja	116	125	102	102	112	117
2	Jumlah penduduk	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563	-
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	10:10.000	11:10.000	8:10.000	8:10.000	9:10.000	-

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2024

Kondisi rasio yang tergambar pada Tabel 2.126 menyebabkan pelayanan terhadap jaminan keamanan dan ketertiban kurang optimal, seiring rendahnya rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012, jumlah ideal petugas Satpol PP dengan melihat beberapa kriteria yang menjadi ketentuan di Gorontalo Utara sebanyak 251 sampai dengan 350 orang.

Selain itu, dalam menunjang tugas dan fungsi serta pelayanan Satpol PP perlu adanya jabatan Penyidik yang berasal dari lingkup Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada konteks Satpol PP, PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Perda yang ditegakkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di Gorontalo Utara, terdapat beberapa PPNS yang tergabung pada Dinas Satpol PP, dengan rincian perbandingannya dengan seluruh PolPP sesuai Tabel 2.127 berikut.

Tabel 2.127
Komposisi PPNS Dinas Satpol PP

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Polisi Pamong Praja yang berkualifikasi PPNS	3	3	3	3	2	1
2	Jumlah Polisi Pamong Praja	116	125	102	102	112	117
3	Persentase Polisi Pamong Praja yang Berkualifikasi PPNS	2,59	2,40	2,94	2,94	1,79	0,85

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2024

B. Penegakan Peraturan Daerah dan Gangguan Kamtibmas

Penegakan Perda (Peraturan Daerah) menjadi salah satu aktivitas yang sangat esensial karena penegakan Perda terhadap pelanggarannya memiliki pengaruh besar terhadap terciptanya lingkungan yang nyaman, aman, dan tertib. Setiap Perda perlu dikawal dengan baik dalam implementasinya, sehingga dapat mencapai sasaran yang tepat dan optimal dalam mengatur suatu subjek seperti yang telah dijelaskan dalam setiap Perda. Oleh karena itu, terhitung sejak waktu berlakunya, sebuah Perda perlu untuk selalu dimonitor. Rincian pelaksanaan penegakan Perda di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.128 berikut.

23 kali

Penegakan Perda tahun 2023



Tabel 2.128
Penegakan Peraturan Daerah

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Intensitas kejadian Perda dan Perkada yang ditegakkan	7	23	64	10	16	23
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2024

C. Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat

Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) memiliki tujuan untuk mendukung pelayanan keamanan ketertiban sampai pada instansi terbawah yaitu desa. Meskipun merupakan daerah yang relatif homogen dibandingkan Kota Gorontalo, di Kabupaten Gorontalo Utara sendiri dihuni oleh beberapa etnis pendatang, sehingga kemungkinan terjadinya friksi/masalah di tengah lingkungan masyarakat pun tetap ada. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan Trantibumlinmas secara luas.

Perhitungan cakupan petugas Linmas bertujuan untuk mengetahui berapa banyak petugas Linmas yang bertugas di tengah-tengah masyarakat. Tabel 2.129 berikut adalah perhitungan cakupan petugas Linmas di Gorontalo Utara dengan menggunakan aspek wilayah kerja yaitu cakupan per 10.000 penduduk.

Tabel 2.129
Cakupan Petugas Linmas

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah satuan Linmas	816	816	816	816	816
2	Jumlah penduduk	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563
3	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	72:10.000	71:10.000	65:10.000	64:10.000	63:10.000

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2023

Berdasarkan Tabel 2.129, seiring dengan pertambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh kenaikan SDM Linmas, maka rasio semakin kecil, menunjukkan kemampuan pengawasan dan pelayanan terhadap Trantibumlinmas di masyarakat semakin berkurang.

D. Unit Reaksi Penanganan Kebakaran

Dalam memberikan perlindungan terhadap bencana kebakaran, menurut Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Kebakaran Perkotaan, suatu kota (daerah) perlu membentuk WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran). Manajemen penanggulangan kebakaran merupakan upaya dalam melindungi kebakaran suatu daerah yang akan dipenuhi dengan adanya instansi kebakaran sebagai suatu *public service* dalam suatu WMK. Untuk mencapai tingkat pelayanan dan waktu tempuh yang baik, perlu didukung oleh penyediaan SDM, sarana prasarana (mobil pemadam kebakaran dan motor unit reaksi cepat), pos kewilayahan, *hydrant*, dan peran serta masyarakat/Satwankar, karena saat ini fasilitas-fasilitas tersebut belum menunjukkan angka yang memenuhi kebutuhan minimal. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanganan kebakaran diperlukan peningkatan kualitas SDM pemadam melalui pelatihan, serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan risiko bencana kebakaran. Gambaran intensitas kebakaran dan penyelesaiannya yang terjadi selang tahun 2018 hingga 2023 disajikan pada Tabel 2.130.



Tabel 2.130
Tingkat Penyelesaian Penanganan Kebakaran

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kejadian kebakaran	-	-	-	8	6	29
2	Jumlah kejadian kebakaran yang tertangani	-	-	-	5	6	29
3	Tingkat penyelesaian kejadian kebakaran (persen)	-	-	-	63	100	100

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2024

Tabel 2.130 menunjukkan tren intensitas yang semakin tinggi, menunjukkan bahwa kebutuhan sarana prasarana serta SDM baik kualitas dan kuantitas, serta peningkatan waktu tanggap menjadi krusial. Mulai tahun 2022, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah merespon dengan baik meningkatkan kualitas sarana penanganan kebakaran di dinas, maupun penambahan *man power* untuk meningkatkan kemampuan dan jangkauan penanganan kebakaran di Gorontalo Utara.

Tabel 2.131
Personil dan Armada Penanganan Kebakaran

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah personil pemadam kebakaran	-	-	9	9	24	25
2	Jumlah armada pemadam kebakaran	8	8	8	2	2	2

Sumber: Dinas Satpol PP dan Kebakaran, 2024

E. Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam

Gorontalo Utara merupakan wilayah yang *disaster-prone* sehingga setiap pemangku kepentingan yang ada harus memikirkan dan melakukan berbagai mitigasi dan meningkatkan ketahanan/resiliensi wilayah. Gambaran bencana alam yang pernah terjadi di Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.132 berikut.

Tabel 2.132
Jenis Bencana Alam dan Intensitasnya

No.	Jenis Bencana	Jumlah						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0
2	Gempa	0	39	17	26	43	19	0
3	Kekeringan	0	0	3	0	0	0	18
4	Tanah longsor	2	2	3	3	0	0	1
5	Gelombang ekstrim dan abrasi	2	0	0	3	1	0	1
7	Banjir	27	9	3	11	17	4	20

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Gempa bumi merupakan jenis bencana alam dengan intensitas tertinggi meskipun sebagian besar berpusat di daerah sekitar, namun karena dampaknya tidak sampai merusak, secara umum tidak berpengaruh terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Wilayah perairan utara Gorontalo merupakan daerah gempa teraktif kedua di Provinsi Gorontalo. Wilayahnya membentang di perairan laut Sulawesi dari utara Sumalata ke

utara Kwandang, serta patahan aktif jalur pantai utara menuju pantai selatan, yang terdapat di 2 kecamatan yang terdiri 11 desa.

Selain gempa, bencana banjir adalah bencana yang paling sering terjadi sekaligus mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Rincian lokasi banjir per kecamatan disajikan pada Tabel 2.133 dan luasan ancamannya pada Tabel 2.134.

Tabel 2.133
Intensitas Bencana Alam Banjir per Kecamatan

No.	Kecamatan	Intensitas Bencana Banjir						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tolinggula	4	1	-	-	-	-	1
2	Biau	5	-	1	1	2	-	2
3	Ponelo Kepulauan	1	-	-	-	1	-	-
4	Monano	5	3	-	3	1	1	1
5	Kwandang	3	1	-	1	2	-	3
6	Sumalata	4	2	1	1	2	-	3
7	Tomilito	2	1	-	1	4	-	4
8	Atinggola	3	1	1	1	2	1	1
9	Sumalata Timur	-	-	-	2	-	-	3
10	Anggrek	-	-	-	1	2	1	2
11	Gentuma Raya	-	-	-	-	1	1	1

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2024

Tabel 2.134
Luasan Ancaman Banjir

No.	Kecamatan	Ancaman Banjir (Ha)			Jumlah
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Anggrek	6.553	7.486	4.210	18.249
2	Atinggola	10.395	5.571	2.811	18.777
3	Biau	2.720	2.120	1.233	6.073
4	Gentuma Raya	4.101	3.151	1.734	8.986
5	Kwandang	9.472	7.359	4.603	21.434
6	Monano	4.501	4.750	2.618	11.869
7	Ponelo Kepulauan	629	985	345	1.959
8	Sumalata	7.110	6.129	3.220	16.459
9	Sumalata Timur	4.682	3.196	1.816	9.694
10	Tolinggula	5.648	4.129	2.641	12.418
11	Tomilito	5.734	7.650	4.330	17.714
Jumlah		61.545	52.526	29.561	143.632

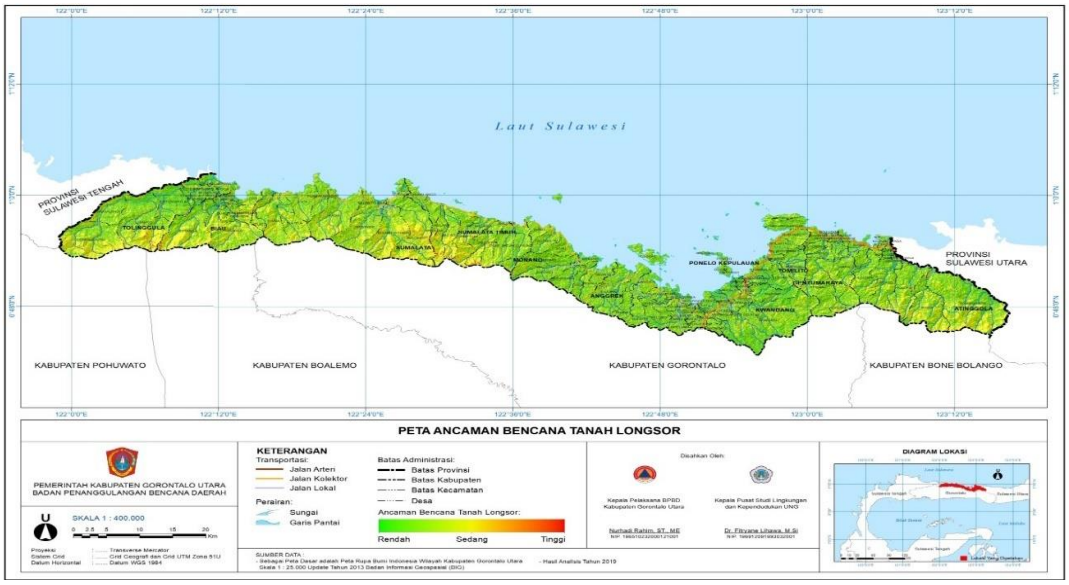
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Tabel 2.134 menunjukkan bahwa 16,63 persen berada dalam wilayah yang terancam banjir skala tinggi, dengan komposisi kewilayahan terbesar berada di Kecamatan Kwandang dengan luasan 4.603 Hektar.

Disamping secara geografis berada di wilayah berisiko tinggi, pembangunan yang masif tanpa memperhitungkan tata guna lahan ditenggarai menjadi penyebab utama meningkatnya resiko terjadinya

bencana banjir. Secara spasial, wilayah terancam banjir seperti yang terlihat pada Gambar 2.25 berikut.

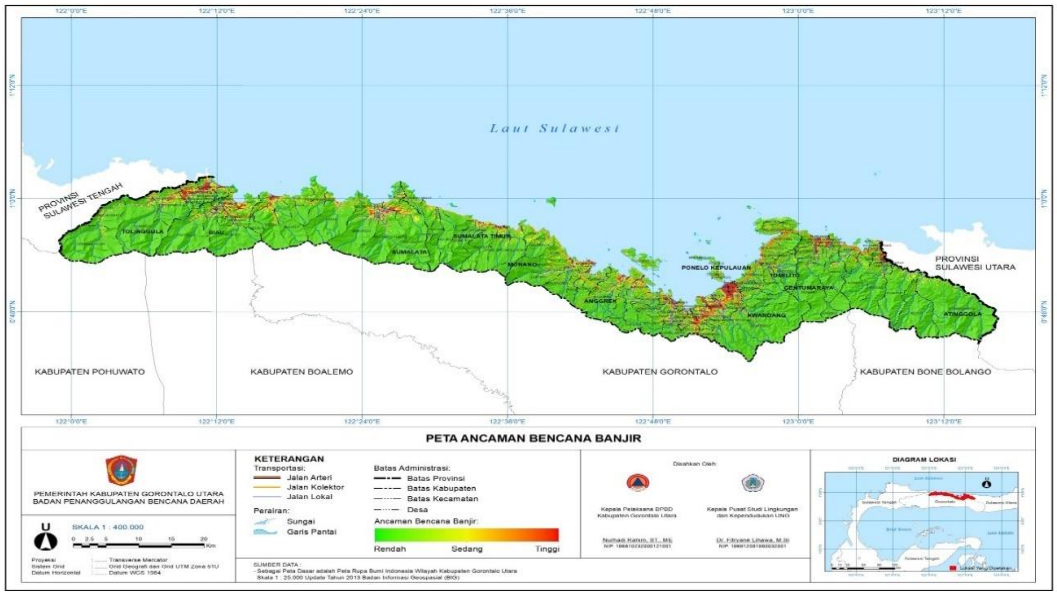
Gambar 2.25
Peta Rawan Bencana Banjir



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Selain banjir, bencana alam yang sering terjadi adalah longsor. Kecamatan yang sering terkena longsor yakni Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, dan Atinggola. Secara spasial, wilayah rawan longsor digambarkan pada Gambar 2.26 berikut.

Gambar 2.26
Peta Rawan Bencana Longsor



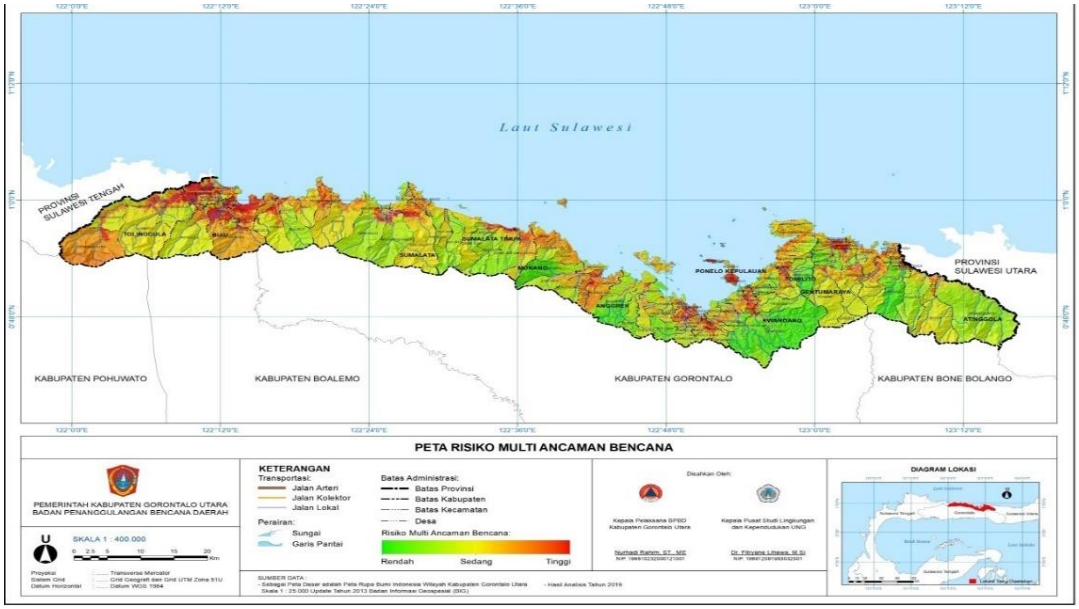
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi

Gorontalo 2023-2027, Desa Kasia Kecamatan Sumalata, Bulontio Timur, Bulontio Barat, dan Hutokalo di Kecamatan Sumalata; di Monano Selatan dan Kecamatan Tolinggula. Desa Milango, Jembatan Merah, Bubode di Kecamatan Tomilito. Desa Mootinelo dan Titidu di Kecamatan Kwandang, serta di Desa Imana Kecamatan Gentuma Raya yang merupakan daerah rawan terjadi bencana longsor.

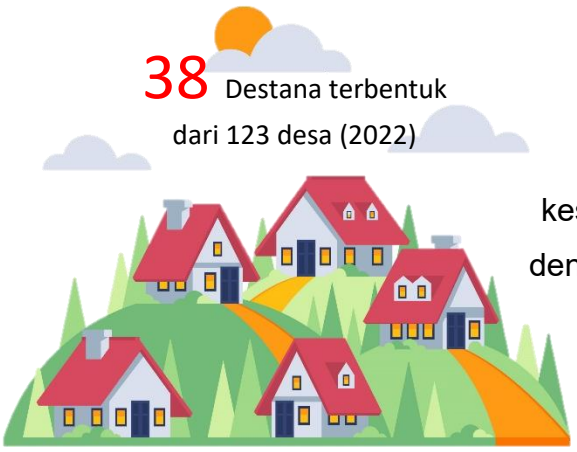
Secara garis besar, wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam digambarkan pada Gambar 2.27 berikut.

Gambar 2.27
Peta Rawan Bencana



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020

Melihat Gambar 2.27, terlihat bencana alam secara merata berpotensi terjadi di seluruh wilayah sehingga membutuhkan berbagai upaya kesiapsiagaan dan tanggap bencana dari masyarakat dan pemerintah daerah.



Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dengan membentuk desa yang memiliki kemandirian untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari

dampak bencana. Peran serta relawan/masyarakat di tingkat desa sebagai *first responder* yang melakukan upaya penanganan awal/dini kejadian bencana di wilayahnya. Rincian Destana dan sumber pembiayaan kegiatannya disajikan pada Tabel 2.135 berikut.

Tabel 2.135
Desa Tangguh Bencana di Gorontalo Utara

No.	Lokasi Pembentukan		Tahun Pembentukan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
	Desa	Kecamatan			
1	Kota Jin	Atinggola	2012	Banjir, Gempa	APBD Provinsi
2	Ipilo	Gentuma Raya	2013	Banjir, Tanah Longsor	APBD Provinsi
3	Langge	Anggrek	2013	Banjir, Tanah Longsor	APBD Kabupaten
4	Titidu	Kwandang	2015	Banjir, Tanah Longsor	APBD Provinsi
5	Wubudu	Sumalata Timur	2015	Banjir, Abrasi, Gempa, Tsunami	APBD Kabupaten
6	Mokonowu	Monano	2016	Banjir, Tanah Longsor	APBN
7	Hutokalo	Sumalata	2016	Banjir	APBN
8	Didingga	Biau	2018	Banjir	APBD Provinsi
9	Deme II	Sumalata Timur	2018	Banjir, Abrasi, Gempa, Tsunami	APBD Kabupaten
10	Tolango	Anggrek	2018	Banjir	APBD Kabupaten
11	Tudi	Monano	2019	Banjir	APBD Kabupaten
12	Monas	Monano	2019	Banjir	APBD Kabupaten
13	Molingkapoto Selatan	Kwandang	2019	Banjir, Tanah Longsor	APBD Kabupaten
14	Ponelo	Ponelo Kepulauan	2019	Abrasi, Gempa, Tsunami	APBD Kabupaten
15	Iloheluma	Atinggola	2019	Banjir	APBD Kabupaten
16	Zuriyati	Monano	2020	Banjir, Tanah Longsor	APBD Kabupaten
17	Monano	Monano	2020	Banjir	APBD Kabupaten
18	Bulontio Barat	Sumalata	2020	Banjir	APBD Kabupaten
19	Mebongo	Sumalata	2020	Banjir	APBD Kabupaten
20	Topi	Biau	2020	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD Kabupaten
21	TolinggulaPantai	Tolinggula	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
22	Tolite Jaya	Tolinggula	2022	Gempa, Banjir	Sumber Lainnya
23	Monggupo	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
24	Pinontoyonga	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
25	Bintana	Atinggola	2022	Banjir	Sumber Lainnya
26	Oluhuta	Atinggola	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
27	Windu	Biau	2022	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	Sumber Lainnya
28	Luhuto	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
29	Bualo	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
30	Biau	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
31	Omuto	Biau	2022	Banjir	Sumber Lainnya
32	Gentuma	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
33	Pasale	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
34	Bohusami	Gentuma Raya	2022		Sumber Lainnya
35	Ketapang	Gentuma Raya	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
36	Bulontio Timur	Sumalata	2022	Gempa, Tsunami	Sumber Lainnya
37	Pulahenti	Sumalata	2022		Sumber Lainnya
38	Molingkapoto	Kwandang	2022		APBD Provinsi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Selain pembentukan Destana, pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan melalui mitigasi non-struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan *Early Warning System* (EWS—sistem peringatan dini) berbasis masyarakat di lokasi yang

rentan terhadap bencana. Kota Gorontalo dan Gorontalo Utara adalah 2 daerah yang memiliki EWS di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Desa Moluo Kecamatan Kwandang yang didirikan oleh BMKG pada tahun 2007. Untuk itu, menimbang Gorontalo Utara dan Provinsi Gorontalo termasuk daerah rentan, pihak BMKG dan pemerintah daerah perlu mempertimbangkan pembangunan EWS baru di titik-titik yang dianggap sesuai.

Selain itu, pada tahun 2019 telah dipasang rambu peringatan bencana sebanyak 54 titik di 47 desa dan 20 titik pada tahun berikutnya. Sedangkan pada tahun 2022, terdapat 19 titik.

Tabel 2.136
Lokasi Rambu Peringatan Bencana

No.	Kecamatan	Desa/Dusun	Titik Koordinat (Kode Google Maps)	Daerah Rawan
1	Kwandang	Bualemo	6QG4RW29+VR	Longsor
2	Tomilito	Dambalo (Dusun Gudang Arang)	6QG4VW59+M9	Tsunami
3	Tomilito	Tanjung Karang	6QG4WXRV+WG	Karhutla
4	Gentuma Raya	Gentuma Raya	6QG5W2JP+VV	Tsunami
5	Atinggola	Imana	6QG5W36H+FJ	Longsor dan Karhutla
6	Atinggola	Imana	6QG5W37G+C7	Longsor
7	Atinggola	Kotajin Utara	6QG5W447+9M	Longsor
8	Atinggola	Kotajin (Pantai Minanga)	6QG5W4G5+G8	Tsunami
9	Anggrek	Tolango Cs	6QG4VQ23+587	Banjir
10	Monano	Tudi Cs	6QG4VM8X+MV	Banjir
11	Monano	Monano (Pantai Monano)	6QG4VMQX+P8	Tsunami
12	Monano	Dunu	6QG4WJVW+QH	Karhutla
13	Sumalata	Kasia	6QG4X9QG+RC	Longsor
14	Sumalata	Lelato Cs (Buloila)	6QG4X7V9+88	Longsor
15	Biau	Sembihingan	6QG4X6CW+X5	Longsor
16	Biau	Luhuto Cs	6QG4X6Q9+6M	Banjir
17	Biau	Topi Cs	6QG4X6VJ+2M	Tsunami
18	Biau	Hubulo/Potanga Cs	6QG4X5HX+H3	Banjir
19	Tolinggula	Limbato	6QG4X4X7+V6	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

Selain level desa, juga ditetapkan Sekolah-Sekolah Aman Bencana (SMAB) dimulai dari level dasar hingga menengah pertama sesuai wewenang kabupaten yang sudah terbentuk sebanyak 21 lembaga. Rincian lembaga pendidikan/sekolah aman bencana tersebut disajikan pada Tabel 2.137 berikut.

Tabel 2.137
Sekolah Aman Bencana (SAB) di Gorontalo Utara

No.	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Jenis Ancaman	Sumber Dana
1	2017	SDN 3 Ponelo Kepulauan	Penguatan kelembagaan	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBN
2	2017	SMPN 1 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
3	2017	SMPN 2 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
4	2018	SDN 22 Kwandang	Sosialisasi dan simulasi SAB	Tanah Longsor	APBD
5	2019	SMPN 1 Tomilito	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
6	2019	SDN 5 Gentuma Raya	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
7	2019	SMPN 1 Gentuma Raya	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
8	2019	SMPN 5 Tolinggula	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
9	2019	SMPN 1 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	Tanah Longsor	APBD
10	2019	SDN 2 Monano	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
11	2019	SMPN 4 Monano	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
12	2019	SDN 6 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
13	2019	SMPN 2 Sumalata Timur	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
14	2019	SDN 1 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
15	2019	SMPN 2 Biau	Sosialisasi dan simulasi SAB	Tanah Longsor	APBD
16	2020	SMPN 1 Atinggola	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa	APBD
17	2020	SMPN 2 Atinggola	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
18	2020	SMPN 1 Ponelo Kepulauan	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
19	2020	SDN 1 Ponelo Kepulauan	Sosialisasi dan simulasi SAB	Gempa, Tsunami, Cuaca Ekstrim	APBD
20	2020	SDN 4 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD
21	2020	SMPN 5 Anggrek	Sosialisasi dan simulasi SAB	Banjir	APBD

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

F. Indeks Risiko Bencana

Sedangkan berdasarkan data Indeks Risiko Bencana, yang merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas suatu daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di suatu daerah kondisinya tetap yang meliputi penilaian indeks kapasitas, kerentanan, dan ancaman bencana. Indeks ini merupakan perubahan paradigma *treatment* terhadap bencana yang sebelumnya penanganan dampak bencana, menjadi

penilaian potensi kehilangan terhadap bencana. Perbandingan Indeks Risiko Bencana Gorontalo Utara dan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.138 berikut.

Tabel 2.138
Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko 2023
1	Boalemo	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	122,40	116,77	110,01	Sedang
2	Gorontalo	146,40	146,40	133,01	114,92	103,21	103,21	94,04	94,04	86,55	Sedang
3	Pohuwato	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	161,60	Tinggi
4	Bonebolango	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	135,07	123,98	Sedang
5	Gorontalo Utara	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60	137,60	134,37	131,85	126,57	Sedang
6	Kota Gorontalo	123,20	123,20	115,02	98,90	87,82	87,82	78,75	84,34	91,52	Sedang

Sumber: BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia, diolah

Meski masih masuk dalam risiko “Sedang”, secara absolut tingkat risiko Kabupaten Gorontalo Utara sudah berkurang berkat berbagai upaya mitigasi baik fisik maupun administratif yang telah dilaksanakan daerah. Dalam indeks risiko tersebut, tingkat kebencanaan setiap daerah dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Tidak hanya ditinjau dari sisi absolut atau kompositnya, sisi komponen penyusunnya pun seiring tahun semakin membaik.

Tabel 2.139
Komponen IRB Gorontalo Utara

No.	Tahun	Risiko Tsunami	Risiko Gempa Bumi	Risiko Kekeringan	Risiko Tanah Longsor	Risiko Gelombang Ekstrem dan Abrasi	Risiko Cuaca Ekstrem	Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan
1	2020	14,4	21,6	16	24	24	13,6	24
2	2021	13,42	19,91	14,75	22,12	24	12,53	22,12
3	2022	13,19	19,78	14,65	21,98	21,98	12,45	21,98
4	2023	11,96	17,93	13,29	19,93	19,93	11,29	11,93

Sumber: BNPB, Indeks Risiko Bencana Indonesia, diolah

G. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana, baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan peta kapasitas dan selanjutnya dapat memutakhirkan peta risiko bencana. Secara garis besar, perangkat penilaian terdiri atas 7 parameter yang diturunkan menjadi 7 prioritas. Dalam 7 prioritas tersebut terdapat 71 indikator total dan 284 pertanyaan. Setiap indikator memiliki 4 pertanyaan kunci yang memiliki tingkatan. Setiap pertanyaan kunci menggambarkan nilai ketahanan yang penilaiannya dibuat per level, yakni dari level 1 yang berarti belum ada inisiatif dalam indikator tersebut, hingga level 5 yang telah berdampak bagi masyarakat.

Dari penilaian yang telah dilaksanakan tahun 2023, Kabupaten Gorontalo Utara bersama Kabupaten Pohuwato tergolong daerah dengan tingkat resiliensi “Rendah” di Provinsi Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut.

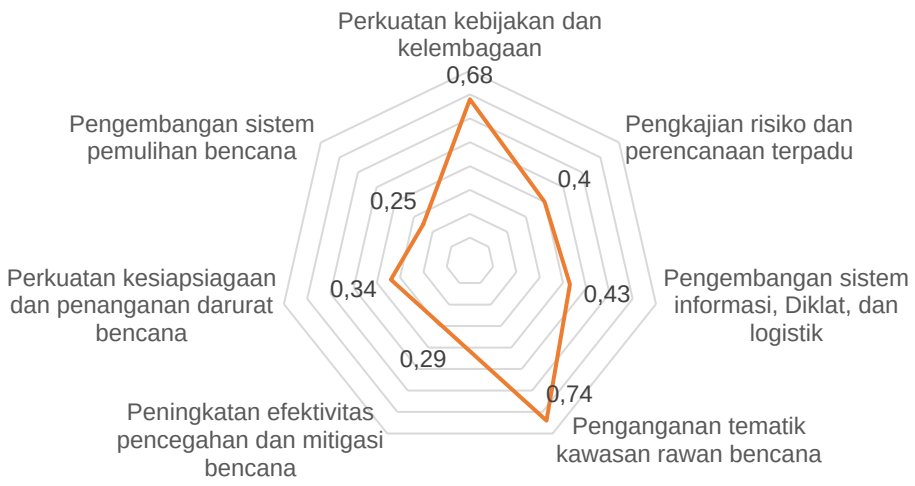
Tabel 2.140
Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Daerah	Kategori
1	Boalemo	0,42	Sedang
2	Gorontalo	0,68	Sedang
3	Pohuwato	0,28	Rendah
4	Bonebolango	0,48	Sedang
5	Gorontalo Utara	0,39	Rendah
6	Kota Gorontalo	0,66	Sedang
Provinsi Gorontalo		**0,49**	**Sedang**

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

Dalam penilaian IKD Kabupaten Gorontalo Utara, prioritas tertinggi yakni pada “Penanganan tematik kawasan rawan bencana”, sedangkan terendah pada “Pengembangan sistem pemulihan bencana”. Rincian penilaian tersebut pada Grafik 2.62 berikut.

Grafik 2.62
Nilai Per Prioritas IKD Gorontalo Utara Tahun 2023



Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024

6. Urusan Sosial

A. Jumlah Penyandang Masalah Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan perorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, atau keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Tabel 2.141
Jenis PMKS Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Jenis PMKS	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Anak Balita terlantar	119	0	1	0	0	0	0	0
2	Anak terlantar	104	104	0	0	0	0	0	0
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	38	38	20	100	0	14	5	5
4	Anak jalanan	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Anak dengan kedisabilitasan	106	106	0	0	0	0	0	207
6	Anak korban tindak kekerasan	16	0	7	0	0	15	25	26
7	Anak memerlukan perlindungan khusus	139	0	1	0	0	0	0	0

No.	Jenis PMKS	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8	Lanjut usia terlantar	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.028	1.222
9	Penyandang disabilitas	506	506	555	490	490	490	370	568
10	Tuna susila	5	5	0	0	0	0	0	0
11	Gelandangan	102	0	0	0	0	0	0	15
12	Pengemis	18	18	0	0	0	0	0	1
13	Pemulung	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Kelompok minoritas	140	0	0	0	0	0	0	7
15	Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan	132	132	132	11	11	0	0	65
16	Orang dengan HIV/AIDS	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Korban penyalahgunaan Napza	73	73	0	0	0	0	0	0
18	Korban *trafficking*	5	0	0	0	0	0	0	17
19	Korban tindak kekerasan	31	31	31	0	0	0	0	6
20	Pekerja migran bermasalah sosial	91	91	0	0	0	0	0	0
21	Korban bencana alam	2.458	1.358	1.005	225	1.747	1.130	648	308
22	Korban bencana sosial	27	12	11	15	11	16	11	12
23	Perempuan rawan sosial ekonomi	0	0	0	0	0	0	0	416
24	Fakir miskin (jiwa)	65.492	65.492	16.357	65.534	65.534	98.596	98.596	86.673
25	Keluarga bermasalah	775	43	46	0	0	0	0	0
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	276	0	45	40	40	294	104	104

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo Utara, 2024

B. PMKS yang Memperoleh Bantuan

Bantuan dan intervensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Gorontalo Utara dilakukan secara selektif disebabkan jumlah PMKS yang cukup banyak. Persentase PMKS Kabupaten Gorontalo Utara yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar penerima manfaat program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan sasaran penyandang disabilitas yang dijabarkan melalui Tabel 2.142 berikut.

Tabel 2.142
PMKS Penerima Bantuan Sosial

Indikator	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase PMKS skala kabupaten/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	20	22,84	20,3	57,4	60,1	85,5	85,7	85	88,30
Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	19,23	21,7	19,9	23,8	40,4	44,6	56,8	57,2	58,43

Sumber: Dinas Sosial, 2024

Tabel 2.143
Penerima BPNT, BST, BLPD, dan PKH

No.	Uraian	Jumlah Penerima (KPM)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai)	-	-	9.683	11.681	34.890	15.589	-
2	BST (Bantuan Sosial Tunai)	-	-	-	-	-	-	-
3	BLPD (Bantuan Langsung Pangan Daerah)	-	-	-	-	1.793	-	-
4	PKH (Program Keluarga Harapan)	4.081	6.696	6.452	6.885	8.496	8.643	7.433
5	BLT BBM	-	-	-	-	-	350	-

Sumber: Dinas Sosial, 2024



5
panti sosial yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial

Berbagai upaya penanganan telah dilakukan, antara lain dengan meningkatkan kualitas pelayanan sarana prasarana rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan dan pembinaan bagi Lansia, peningkatan kualitas SDM keluarga miskin, dan pembinaan mental bagi PMKS.

Dalam usaha menanggulangi peningkatan jumlah PMKS, dilakukan melalui pemberian bantuan sebagai stimulan bagi masyarakat penerima, sebagaimana Tabel 2.143 di atas, serta ketersediaan sarana sosial (panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi) bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan merupakan salah satu pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.144
Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

No.	Indikator	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah panti sosial kabupaten yang melaksanakan usaha kesejahteraan sosial	3	3	4	4	4	4	4	4	5
2	Jumlah panti sosial dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos	3	3	4	4	4	4	4	4	5
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan Kesos	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial, 2024

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Urusan Tenaga Kerja

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Pada kelompok umur muda (15-24 tahun), TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun). Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai penduduk usia kerja di Kabupaten Gorontalo Utara selang tahun 2016-2023.

Tabel 2.145
Status Ketenagakerjaan Penduduk Usia Kerja

Kegiatan	Tahun							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Angkatan kerja	52.557	52.434	54.979	56.146	57.155	56.839	58.301	69.961
Bekerja	49.611	49.768	54.634	53.349	54.180	55.529	57.123	68.024
Penganggur	2.946	2,666	2,708	2,797	2.975	1.310	1.178	1.937
Bukan angkatan kerja	24.680	27.051	23.142	25.001	24.946	26.050	25.046	28.395
Penduduk usia kerja	77.237	79.485	80.484	81.147	82.101	82.889	83.347	98.356
TPAK (%)	68,05	65,96	71,25	69,19	69,62	68,57	69,95	71,13
TPT (%)	5,61	5,08	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02	2,77

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024
TPAK = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT = Tingkat Penganggur Terbuka

Sepanjang delapan tahun terakhir angkatan kerja menunjukkan tren peningkatan, yang kemudian sempat menyebabkan pengangguran terbuka mengalami peningkatan hingga tahun 2020, *outlier* terjadi pada 2021 saat angkatan kerja berkurang yang berimbas pada penurunan pengangguran. Meningkatnya angkatan kerja dapat menjadi potensi bagi pertumbuhan ekonomi wilayah bila peningkatan jumlah angkatan kerja dibarengi dengan peningkatan output/produktivitas wilayah. Namun, jika peningkatan jumlah angkatan kerja tersebut tidak dapat memasuki atau menciptakan lapangan kerja baru, menyebabkan meningkatkan angka pengangguran serta menekan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan tingkat pengangguran terbuka, adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran, dan diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Gambaran tingkat pengangguran terbuka dan perubahannya di Kabupaten Gorontalo Utara selang tahun 2016-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.146 berikut.

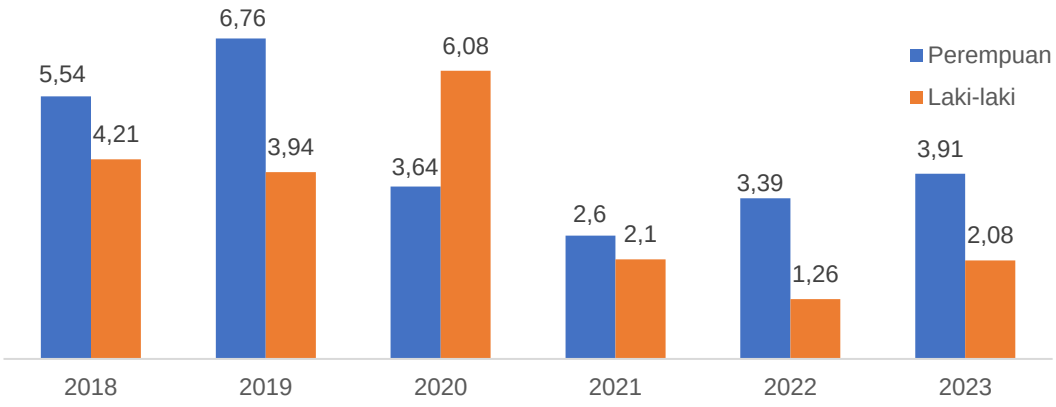
Tabel 2.146
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

No.	Uraian	Tingkat Pengangguran Terbuka							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,61	5,08	4,72	4,98	5,20	2,30	2,02	2,77
2	Persentase perubahan		-9,45	-7,09	5,51	4,42	-55,77	-1,02	1,77

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Jika dilihat lebih detail berdasarkan gender, tingkat pengangguran antara laki-laki dan perempuan berada dalam kondisi yang berbeda, dimana setiap tahun angka pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan kompositnya, kecuali pada tahun 2020 saat pandemi pengangguran pada laki-laki lebih tinggi. Gambaran kondisi tersebut disajikan pada Grafik 2.63.

Grafik 2.63
Pengangguran Berdasarkan Gender (%)

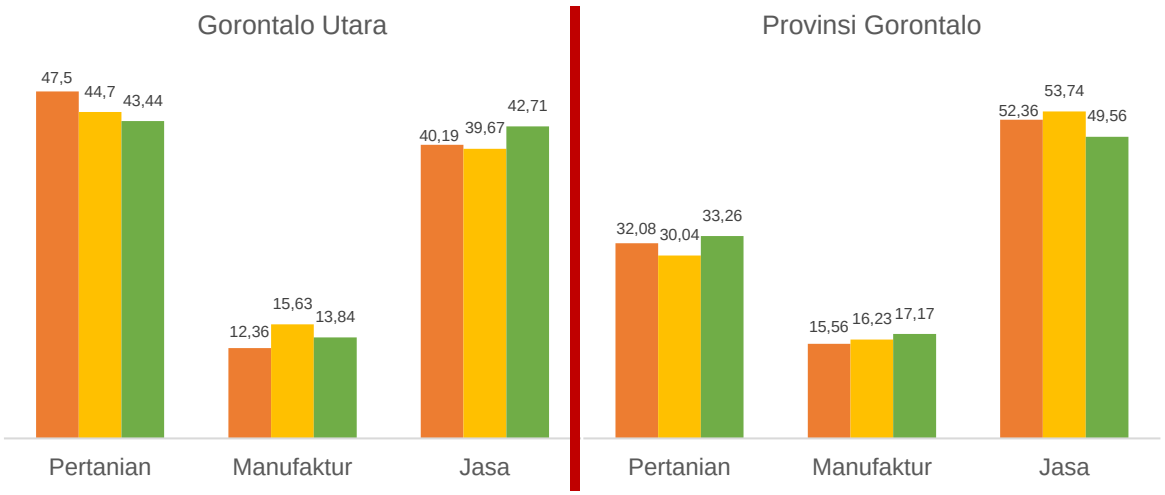


Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

Jika dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, di Gorontalo Utara antara sektor pertanian dan jasa memiliki porsi yang hampir setara, dengan

serapan tenaga kerja di sektor manufaktur cukup rendah dibawah 15 persen. Berbeda dengan kondisi Provinsi Gorontalo dimana sektor jasa berkibar hingga di atas 50 persen. Kondisi tersebut digambarkan pada Grafik 2.64.

Grafik 2.64
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Kerja 2020-2022 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 2.64 menggambarkan bahwa secara umum Provinsi Gorontalo tidak terlalu menggantungkan harapan pada penyerapan tenaga kerja sektor pertanian yang sekaligus menunjukkan transformasi ekonomi pada sektor non primer berjalan lebih baik dibandingkan kondisi Gorontalo Utara.

B. Pencari Kerja yang Terdaftar yang Ditempatkan dan Berwirausaha

Indikator pencari kerja yang ditempatkan merupakan perbandingan antara jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan berwirausaha terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Gambaran pencari kerja terdaftar dan yang berhasil ditempatkan dan berwirausaha disajikan pada Tabel 2.147.

Tabel 2.147
Pencari Kerja Berhasil Ditempatkan dan Berwirausaha

No.	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pencari kerja yang berhasil ditempatkan		69			43
2	Jumlah pencari kerja yang berwirausaha		219	260	35	85
3	Pencari kerja yang mendaftar	232	239	64	114	238
4	Persentase pencari kerja yang terdaftar kemudian ditempatkan dan berwirausaha	0,00	120,50	406,25	30,70	53,78

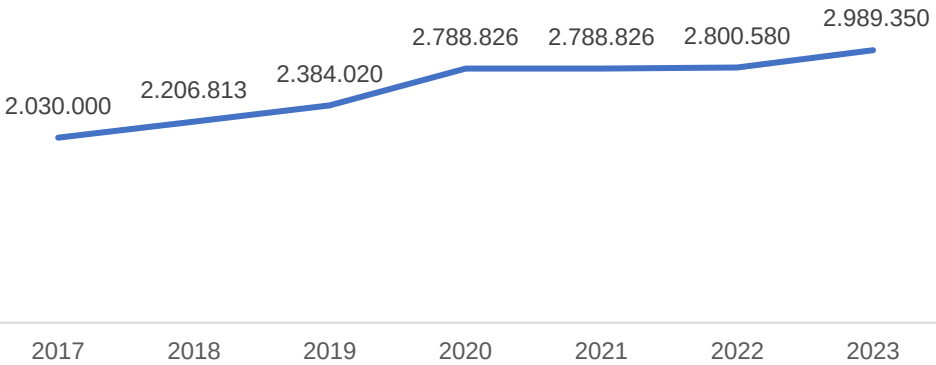
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Angka persentase pencari kerja yang ditempatkan dan berwirausaha sempat berada di atas 100 persen karena pencari kerja terdaftar di tahun-tahun sebelumnya baru mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha di tahun-tahun berikutnya, sehingga misalnya pada tahun 2020 angka yang berwirausaha lebih besar dibandingkan yang mendaftar. Pun pada tahun 2020 dan 2021, karena kondisi ekonomi sedang kontraksi saat pandemi, tidak ada tenaga kerja yang ditempatkan karena secara umum dunia usaha sedang melakukan efisiensi dan tidak membuka lowongan pekerjaan. Dalam perkembangannya, tingkat pendidikan tidak menjamin pencari kerja akan mudah memperoleh pekerjaan. Di sisi lain, lapangan kerja yang tersedia sangat terbatas. Tingginya *supply* (pencari kerja) dan terbatasnya lapangan kerja *(demand)* yang tersedia mengakibatkan terjadinya pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan tinggi. Oleh karena itu, selain membuka kesempatan kerja, kebijakan ketenagakerjaan diarahkan untuk menggeser paradigma mencari kerja (*job seeking*) menjadi menciptakan lapangan kerja atau berwirausaha (*job creation*).

C. Perkembangan Upah Minimum

Untuk penentuan Upah Minimum Kabupaten, Gorontalo Utara masih mengikuti Upah Minimum Provinsi, karena tidak memiliki Dewan Pengupahan sendiri. Gambaran Upah Minimum Kabupaten (Upah Minimum Provinsi) disajikan pada Grafik 2.65.

Grafik 2.65
Upah Minimum Kabupaten (Rupiah)



Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

Seiring kenaikan inflasi, UMK (UMP) senantiasa meningkat. Kenaikan UMK secara rata-rata di 7 tahun terakhir mencapai 6,81 persen, jauh lebih tinggi

dibandingkan rata-rata inflasi tahunan di 3 persen. Persentase kenaikan UMK tertinggi pada tahun 2020 dengan 16,98 persen, dan sempat tidak terjadi kenaikan pada tahun 2021 mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih tertekan.

Data rata-rata upah/gaji bersih sebulan yang didapatkan dari BPS, ternyata tidak sesuai dengan besaran UMK. Pada upah berdasarkan lapangan pekerjaan utama sektor formal di tahun 2022, justru sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mendapatkan rata-rata terbesar di kisaran Rp2.797.200,00. Sedangkan pada lapangan pekerjaan utama sektor informal, rata-rata tertinggi pada sektor industri sebesar Rp1.509.637,00. Upah diperoleh pekerja sektor informal yang dilihat dari tingkat pendidikan, justru pekerja yang tidak pernah sekolah mendapatkan rata-rata upah lebih tinggi dibandingkan pekerja berpendidikan SMA ke atas, masing-masing sebesar Rp1.540.251,00 dan Rp1.341.822,00.

D. Pekerja/Buruh Peserta Program Jamsostek

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek adalah indikator yang menghitung persentase pekerja yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek dari keseluruhan pekerja. Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Gorontalo Utara diwajibkan untuk mengikuti asuransi Jamsostek. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek secara tren terus bertambah, sebelum mengalami tren turun saat pandemi. Secara umum, kepesertaan Jamsostek trennya menurun, patut diwaspadai karena penurunan kepesertaan Jamsostek juga diikuti dengan berkurangnya jumlah pekerja yang mengindikasikan pergeseran dari peserta jalur formal, ke informal, bahkan menganggur.

Tabel 2.148
Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek (jiwa)	2.521	2.501	2.531	2.773	1.088	1.291
2	Jumlah seluruh pekerja	3.384	3.548	4.404	2.583	2.283	2.743
3	Persentase tenaga kerja yang mengikuti program Jamsostek	74,50	70,50	71,34	62,97	42,12	47,07

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2023

E. Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja adalah kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan barang produksi. Dalam konteks daerah, hal tersebut diterjemahkan dengan membandingkan output daerah (digambarkan oleh PDRB) dengan jumlah pekerja yang ada. Informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.149.

Tabel 2.149
Produktivitas Tenaga Kerja

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHB	2.806,61	3.079,62	3.369,05	3.429,29	3.592,16	3.853,83	4.145,15
2	Jumlah tenaga kerja	79.485	80.484	81.147	82.101	82.889	83.347	98.356
3	PDRB ADHB per tenaga kerja	3,53	3,82	4,15	4,17	4,33	4,62	4,21

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Secara umum, produktivitas tenaga kerja meningkat karena pertumbuhan PDRB lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tenaga kerja, yang menggambarkan efisiensi, efektivitas dan kualitas yang dihasilkan tenaga kerja di Gorontalo Utara semakin baik. Yang patut didalami lagi bagaimana disparitas antar tenaga kerja pada sektor yang berbeda, misalnya perbedaan produktivitas antara sektor jasa dan pertanian.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam mengembangkan potensi diri agar mampu mandiri dan berkarya. Kesadaran mengenai peran perempuan diwujudkan dalam program-program pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan salah satu prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dapat menjadi indikator untuk mengetahui peran aktif perempuan, sedangkan untuk pembangunan di bidang anak dapat diukur melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Gorontalo Utara, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan seperti parlemen, menejer, profesi, administrasi, teknis, dan mendapat kesempatan dalam

berbagai lapangan pekerjaan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan indikator utama pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dalam dimensi yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, terutama pada indikator pembentuk usia harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, dan sumbangan dalam pendapatan kerja. Ke depan, Pemda Kabupaten Gorontalo Utara harus bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mulai memperhitungkan menghitung capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) tingkat kabupaten, yang diharapkan dapat menjadi ukuran capaian pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah baik di level pusat maupun daerah untuk memastikan program dan kebijakan telah efektif dan efisien dalam menjawab berbagai permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak, dan melahirkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi lintas sektor. Perhitungan indeks-indeks tersebut saat ini menggunakan beberapa klaster dengan penentuan bobot yang berbeda, yaitu klaster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus.

Dengan adanya berbagai indikator tersebut, untuk membentuk Indonesia yang sejahtera, potensi perempuan dan anak harus dioptimalkan melalui pemberdayaan, pemenuhan hak, dan perlindungan.

“PRATAMA”

Predikat KLA Gorontalo Utara Tahun 2023



A. Angkatan Kerja dan Partisipasi Kerja Perempuan

Kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat dari peran perempuan di Kabupaten Gorontalo Utara dalam pembangunan, yang dapat dilihat dari partisipasi angkatan kerjanya. Statistik ini berguna untuk menganalisis pasar tenaga kerja, terutama ketika dipasangkan dengan tingkat pengangguran. Ketika ekonomi berkembang, tingkat partisipasi meningkat karena prospek pekerjaan dan upah meningkat.

Adapun gambaran jumlah angkatan kerja dan partisipasi perempuan disajikan dalam Tabel 2.150 di bawah ini.

Tabel 2.150
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (jiwa)	6.460	6.370	5.500	6.031
2	Industri Pengolahan (jiwa)	1.720	2.434	1.970	1.738
3	Lainnya (jiwa)	11.757	11.223	12.720	17.585
Total perempuan bekerja (jiwa)		19.937	20.027	20.190	25.354
Total angkatan kerja perempuan (jiwa)		20.692	20.563	20.898	26.386
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)		57.155	56.839	58.301	69.961
TPAK Perempuan (%)		51,40	50,31	50,76	54,74

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, diolah

Data pada Tabel 2.150 menunjukkan angkatan kerja perempuan meningkat tahun 2023, sehingga untuk memperkuat ketenagakerjaan di kalangan perempuan di era digital, harus dibarengi dengan perkembangan teknologi komunikasi di era media digital ini, ibu-ibu rumah tangga yang semula bukan sebagai kelompok Bukan Angkatan Kerja, memanfaatkan media sosial untuk memperoleh penghasilan dari rumah melalui aplikasi–aplikasi digital, karena melalui platform kolaborasi di era *digital* akan memunculkan ide-ide inovatif.

Partisipasi perempuan juga meningkat di tahun 2020 yang menggambarkan pergeseran peran perempuan yang lebih tinggi saat pandemi, yang kemudian seiring semakin redanya pandemi partisipasinya kembali berkurang dan menyesuaikan dengan kondisi normal pre pandemi.

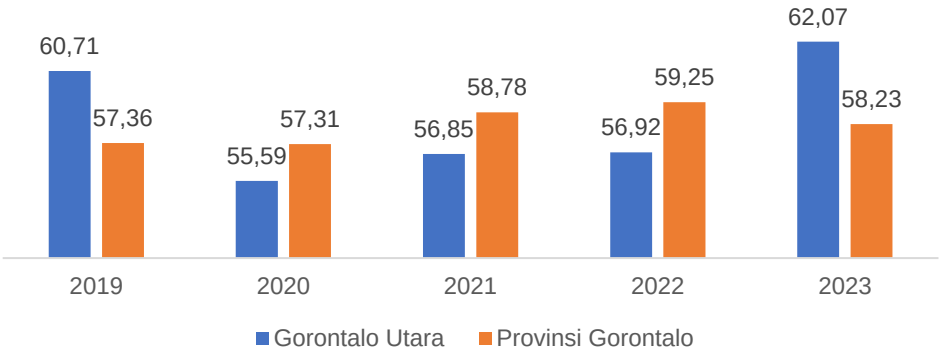
Persentase keterlibatan perempuan di parlemen menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur peran aktif perempuan dalam

bidang politik. Dengan adanya peran aktif perempuan di bidang politik diharapkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilakukan lebih responsif gender dan fokus pada perlindungan anak. Dari 25 orang anggota DPRD periode 2019-2024, 6 orang diantaranya berjenis kelamin perempuan, yang artinya hanya 24 persen anggota legislatif berkelamin perempuan. Ke depan peran perempuan dalam dunia legislasi perlu didorong hingga minimal 30 persen, agar diharapkan program dan peran daerah dalam mendorong pemberdayaan perempuan meningkat.

Faktor-faktor internal yang mendasari tingkat partisipasi angkatan kerja dipengaruhi beberapa faktor, baik secara sosial maupun demografi serta ekonomi, antara lain: (1) Umur; (2) Status perkawinan; (3) Tingkat pendidikan atau keahlian; (4) Daerah tempat tinggal; (5) Pendapatan; (6) Agama. Sedangkan faktor eksternal seperti: (1) Siklus bisnis; (2) Pertumbuhan penduduk; dan (3) Kemajuan teknologi.

Sedangkan pada perempuan sebagai tenaga profesional, sebagai salah satu dimensi partisipasi ekonomi yang menggambarkan keterlibatan perempuan pada dunia kerja formal sebagai menejer, profesional, administrasi, dan teknisi menunjukkan tren yang fluktuatif sebagaimana Grafik 2.66.

Grafik 2.66
Perempuan sebagai Tenaga Profesional (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2024

Grafik 2.66 menunjukkan bahwa lebih dari setengah tenaga kerja perempuan yang berada di Gorontalo Utara maupun Provinsi Gorontalo berada pada jalur formal. Bahkan angka keterlibatan perempuan dalam dunia profesional di Gorontalo Utara lebih tinggi dibandingkan angka

Provinsi Gorontalo. Semakin tinggi persentase indikator tersebut akan mendorong peningkatan pemberdayaan perempuan dan perannya dalam ekonomi keluarga.

B. Pengeluaran Per Kapita Perempuan

Dengan meningkatnya pendapatan, diharapkan tingkat pengeluaran juga meningkat, khususnya pada gender perempuan. Semakin tinggi pengeluaran, selain mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor konsumsi akhir (barang dan jasa), juga menggambarkan semakin besarnya peran perempuan dalam ekonomi. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan per gender di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo digambarkan pada Tabel 2.151.

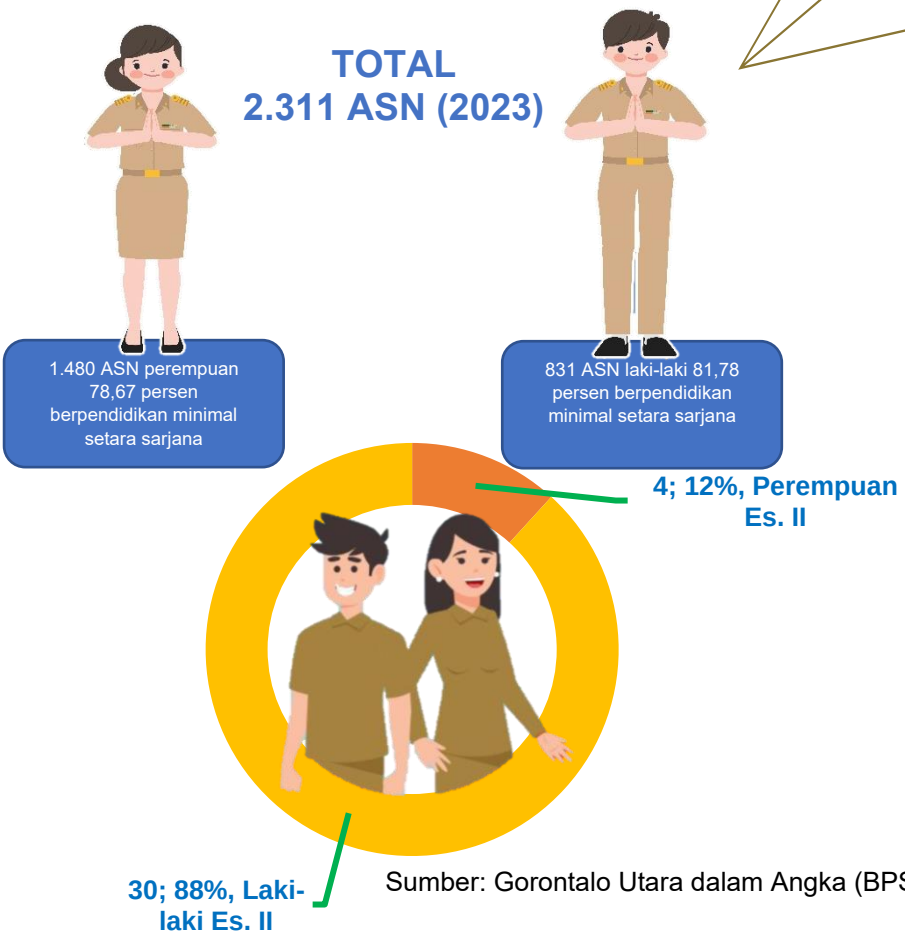
Tabel 2.151
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah)

Wilayah	Laki-laki				Perempuan			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Boalemo	13.362	13.583	14.470	14.963	3.687	3.759	4.022	4.180
Gorontalo	14.080	14.205	14.836	15.427	3.895	4.031	4.228	4.442
Pohuwato	13.033	13.239	13.871	14.045	6.810	6.902	7.225	7.306
Bonebolango	14.136	14.281	14.890	15.438	5.222	5.389	5.652	5.895
Gorontalo Utara	13.569	13.767	14.506	14.907	3.719	3.803	4.053	4.232
Kota Gorontalo	17.874	17.966	18.849	19.129	6.325	6.457	6.828	6.984
Provinsi Gorontalo	14.079	14.211	14.822	15.221	5.252	5.394	5.656	5.849

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

C. Latar Belakang Pendidikan PNS Perempuan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam menunjang karier sebagai ASN/PNS. Pengetahuan yang diperoleh secara formal berakibat pada setiap individu yaitu memiliki pola pikir, perilaku, dan akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Termasuk bagi perempuan, pendidikan dapat mendorong peningkatan partisipasi ASN perempuan terutama dalam pengambilan keputusan strategis dan pembangunan nasional, yang dapat membawa beragam dampak positif, misalnya ketika keberagaman perwakilan terjadi sehingga muncul perspektif yang lebih luas, ide yang beragam, serta meningkatnya inovasi dalam pencapaian tujuan pemerintah.



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

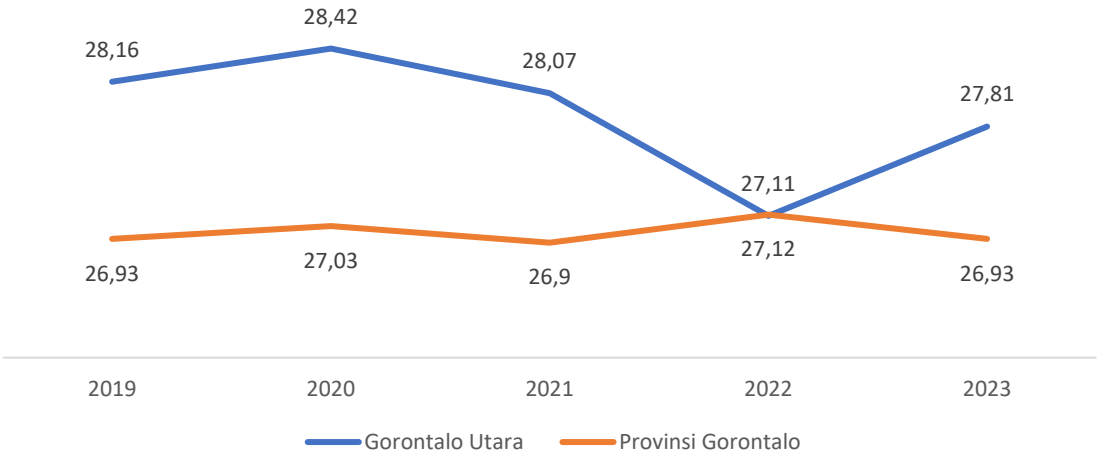
Berdasarkan ilustrasi di atas, secara entitas, ASN perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki (1.547:879), namun secara persentase yang mengenyam pendidikan minimal sarjana/sederajat, lebih kecil meskipun tidak terlalu berbeda jauh. Setali tiga uang, hanya 4 orang atau sekitar 12 persen perempuan yang menduduki jabatan eselon II pada perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

D. Sumbangan Pendapatan Perempuan

Indikator sumbangan pendapatan pada gender perempuan menggambarkan tingkat peran perempuan pada keluarga, yang secara umum menunjukkan ketimpangan yang nyata, merupakan fenomena umum terjadi terutama di negara-negara berkembang. Perbedaan upah yang diterima menjadi salah satu hal yang paling sering terjadi. Kesenjangan dalam upah pada akhirnya berimbas pada munculnya kesenjangan dalam sumbangan pendapatan kaum perempuan yang memberikan tekanan terhadap capaian indikator Indeks Pemberdayaan

Gender (IDG). Gambaran indikator ini di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.67.

Grafik 2.67
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)



Sumber: Provinsi Gorontalo dalam Angka (BPS), 2023

Grafik 2.67 menunjukkan peran ekonomi perempuan dalam keluarga di Gorontalo Utara yang relatif lebih berperan dibandingkan capaian Provinsi Gorontalo meskipun secara tren semakin bekurang. Untuk meningkatkan capaiannya, implementasi pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan menjadi strategi yang tepat untuk mempersempit kesenjangan pada khususnya sektor ekonomi.

E. Kekerasan pada Perempuan dan Anak dan Pernikahan di Bawah Umur

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahun berfluktuasi. Secara umum, kasus kekerasan pada perempuan dan anak disebabkan karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), yang sebagian besar disebabkan oleh pencabulan, persetubuhan,

dan pemukulan terhadap anak seperti yang tertera pada Tabel 2.152 berikut.

Tabel 2.152
Kejadian Kekerasan pada Perempuan dan Anak

No.	Uraian	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kekerasan pada perempuan	9	14	2	0	17	31	23	2	11
2	Kekerasan pada anak	5	40	15	6	10	21	17	22	25
3	Jumlah kasus yang dilaporkan ke Kepolisian	14	54	17	6	27	52	40	24	36
4	*Kekerasan pada perempuan dewasa (>18 tahun)		3	1	1	11	2	22	1	8
5	*Kekerasan pada anak		25	9	6	15	11	35	27	19

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024
*Sumber data *dashboard* Simfoni KemenPPA RI berdasarkan kriteria "Waktu Input"

Tabel 2.152 di atas menunjukkan terdapat perbedaan jumlah kasus yang diinput dalam *dashboard* Simfoni KemenPPA RI dengan laporan Dinas PPPA Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga perlu dilakukan sinkronisasi ke depan. Selain itu juga menunjukkan bahwa seluruh kejadian kekerasan yang terjadi dilaporkan seluruhnya kepada unit PPPA Kepolisian Republik Indonesia, namun dalam penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan belum dapat diselesaikan seluruhnya, yang menunjukkan komitmen dan tingkat penyelesaian kasus perlu ditingkatkan melalui komunikasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian Republik Indonesia. Penjelasan secara numerik disajikan dalam Tabel 2.153 di bawah ini.

Tabel 2.153
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan	13	17	27	39	20	9	8
2	Jumlah pengaduan perlindungan perempuan dan anak	13	17	27	44	32	24	37
3	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	88,64	62,5	37,5	21,6

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

Pernikahan usia muda/di bawah umur juga beberapa kasus terjadi di Gorontalo Utara. Beberapa faktor yang menjadi penyebab diantaranya faktor ekonomi, faktor pendidikan, keluarga, adat istiadat, serta yang paling

berbahaya adalah faktor media massa sebagai representasi dari meningkatnya akses terhadap konten pornografi pada usia dini. Faktor ekonomi erat kaitannya dengan kemiskinan, dimana berdasarkan Susenas (2023) sekitar 51,87 persen penduduk miskin adalah perempuan, serta sekitar 40,41 persen penduduk miskin berada pada usia dibawah 17 tahun, meski rata-rata usia kawin pertama pada penduduk miskin adalah 21 tahun.

Pada tahun 2019 hingga 2023, telah terjadi lebih dari 350 pernikahan yang melibatkan pasangan di bawah umur, dengan Kecamatan Kwandang sebagai penyumbang tertinggi, dan 76 persen diantaranya melibatkan perempuan.

Tabel 2.154
Peristiwa Nikah di Bawah Umur

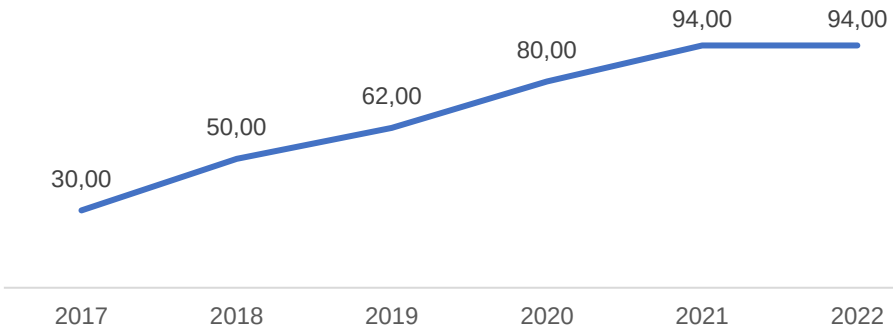
No.	Kantor Urusan Agama	Tahun										Jumlah
		2019		2020		2021		2022		2023		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	KUA Kwandang	4	4	5	17	4	24	9	23	15	40	145
2	KUA Atinggola	0	2	0	4	0	8	3	7	1	7	32
3	KUA Anggrek	1	2	5	7	2	12	7	9	6	24	75
4	KUA Sumalata	5	2	1	7	1	6	6	19	0	7	54
5	KUA Tolinggula	2	2	0	3	1	6	0	2	0	4	20
6	KUA Gentuma Raya	1	2	1	3	1	6	3	8	0	6	31
	Jumlah	13	14	12	41	9	62	28	68	22	88	357

Sumber: Kantor Kementerian Agama Gorontalo Utara, 2024

F. Penganggaran Responsif Gender

Di dalam pemerintahan, responsif gender diterjemahkan salah satunya melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender yang merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Sementara anggaran yang responsif gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Dapat dilihat dalam grafik di bawah ini, terjadi tren peningkatan Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran responsif gender dari tahun 2017-2022.

Grafik 2.68
OPD Berperencana Anggaran Responsif Gender (%)



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

Dari 43 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, saat ini hampir seluruhnya telah menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Gambaran capaian indikator ini meskipun sudah baik, namun menunjukkan masih perlunya dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang.

G. Perlindungan Anak

Menyadari peran penting negara dalam menjamin hak dan perlindungan khusus anak, sejak tahun 2019 disusun Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk mengukur capaian upaya perlindungan anak yang telah dilakukan pemerintah, baik pusat maupun daerah. IPA, IPHA, dan IPKA menggambarkan capaian pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak sesuai amanat Konvensi Hak Anak (KHA), meliputi hak sipil dan kebebasan (klaster I), hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif (klaster II), hak kesehatan dasar dan kesejahteraan (klaster III), hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang (klaster IV), serta perlindungan khusus anak (klaster V).

Dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak, capaian Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 terendah di Provinsi Gorontalo, juga memiliki capaian persentase terendah pada klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta klaster Perlindungan Khusus.

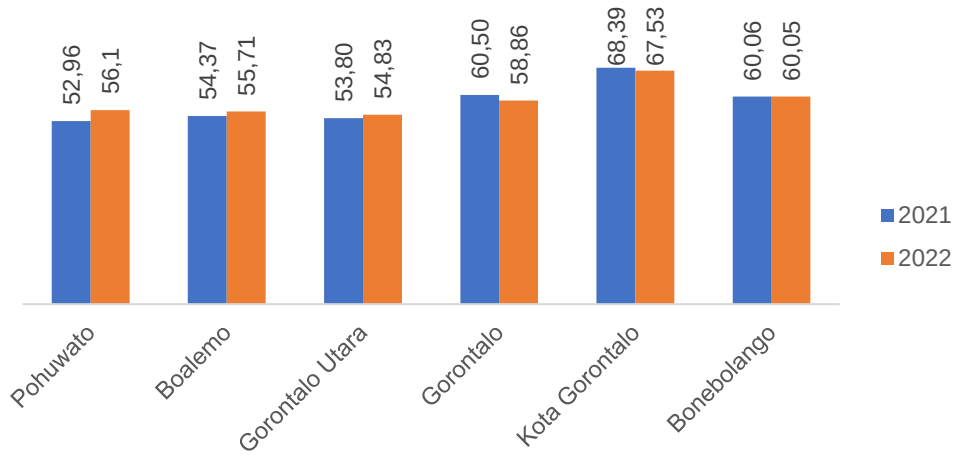
Tabel 2.155
IPA, IPKA, IPHA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Klaster I	Klaster II	Klaster III	Klaster IV	Klaster V	IPA	IPHA	IPKA
1	Boalemo	51,55	77,34	70,36	19,31	55,64	55,71	55,68	54,59
2	Gorontalo	49,60	79,31	75,63	25,14	60,70	58,86	58,28	61,59
3	Pohuwato	48,93	76,30	75,74	19,90	55,95	56,10	56,08	53,43
4	Bonebolango	50,74	81,23	76,11	24,42	66,10	60,65	59,06	67,43
5	Gorontalo Utara	52,14	68,19	74,66	22,68	53,98	54,83	55,04	52,55
6	Kota Gorontalo	49,61	86,57	79,24	38,23	79,17	67,53	64,15	83,36
Provinsi Gorontalo		**50,26**	**74,89**	**76,18**	**26,10**	**58,90**	**57,90**	**57,56**	**60,47**

Sumber: KemenPPA dan BPS, 2022

Secara *time series*, kinerja Gorontalo Utara dan Boalemo telah positif di tahun 2022 meski tidak seprogresif Kabupaten Pohuwato. Sedangkan kinerja Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, dan Bonebolango justru negatif meski telah berada di atas 60,0.

Grafik 2.69
IPA Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo



Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023

3. Urusan Pangan

Ketahanan pangan merupakan agenda penting dalam pembangunan ekonomi. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kejadian mengenai rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial-politik. Oleh sebab itu, mewujudkan

ketahanan pangan menjadi hal yang sangat penting, terutama di Kabupaten Gorontalo Utara yang daerahnya masih kental nuansa agraris dan maritim.

A. Ketersediaan Pangan Utama

Tabel Ketersediaan Pangan Utama Gorontalo Utara di bawah menunjukkan hasil yang fluktuatif. Saat terjadi penurunan ketersediaan pangan pokok menggambarkan berkurangnya dominasi pangan pokok sumber karbohidrat yang berasal dari beras, jagung, ubi jalar, atau ubi kayu. Penurunan tersebut terjadi sering karena kondisi alam dan cuaca karena pendekatan produksi pangan di Gorontalo Utara masih menggunakan basis lahan, sedangkan penggunaan teknologi tinggi belum banyak dipakai.

Tabel 2.156
Ketersediaan Pangan Utama

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg)	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215	625,215
2	*Jumlah penduduk	112.975	114.036	115.072	124.957	126.521	128.563	130.722
3	Ketersediaan pangan utama (Kg/Kapita/tahun)	771,11	449,61	695,31	612,26	775, 7	619,09	606,89

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024
(*) Jumlah penduduk menggunakan data tahunan BPS

B. Cadangan Pangan

Sedangkan dalam hal cadangan pangan, yang dilihat dari proyeksi indikator produksi dan konsumsi, secara tren persentasenya masih stagnan di kisaran 92-93 persen, sebagaimana Tabel 2.157 berikut.

Tabel 2.157
Cadangan Pangan

No.	Indikator	Satuan	Tahun					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Produksi	Ton	261,347	170,922	240,034	229,522	294,430	223,723
2	Kebutuhan konsumsi	Ton	17,265	17,620	17,513	17,185	17,753	17,546
3	Cadangan pangan	Ton	244,082	153,302	222,521	212,337	276,677	206,177
4	Persentase cadangan pangan	Persen	93,39	89,69	92,70	92,51	93,97	92,16

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

C. Konsumsi Pangan Penduduk

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat dicerminkan dari besaran Skor PPH (Pola Pangan Harapan). Skor PPH memiliki nilai maksimal 100, yang berarti memiliki tingkat keberagaman yang optimal, yang merupakan

indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Selain hal tersebut, juga digunakan sebagai pedoman dalam evaluasi dan perencanaan penyediaan, produksi dan konsumsi pangan penduduk, baik secara kuantitas, kualitas, maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

Secara umum, masyarakat di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengkonsumsi pangan belum beragam dan berimbang, hal ini terlihat pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun 2015 hingga 2023. Semakin tinggi Skor PPH Konsumsi, akan semakin beragam dan berimbang konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.158
Skor Pola Pangan Harapan

No.	Kelompok Pangan	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	22,4	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	0,6	1,0	0,6	1,0	0,7	1,3	0,6	0,7	0,9
3	Pangan hewani	24,0	13,1	11,4	10,6	13,9	13,5	11,7	16,9	16,7
4	Minyak dan lemak	4,2	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/biji berminyak	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	0,8
6	Kacang-kacangan	1,6	3,0	2,8	2,8	3,6	4,7	1,8	1,7	2,8
7	Gula	0,1	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,0	1,8	2,1
8	Sayur dan buah	19,1	18,9	14,6	23,5	21,4	30,0	20,5	18,00	23,7
9	Lain-lain	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		**72,5**	**69,5**	**63,0**	**71,4**	**73,1**	**83,0**	**67,4**	**70,08**	**77,0**

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, diolah

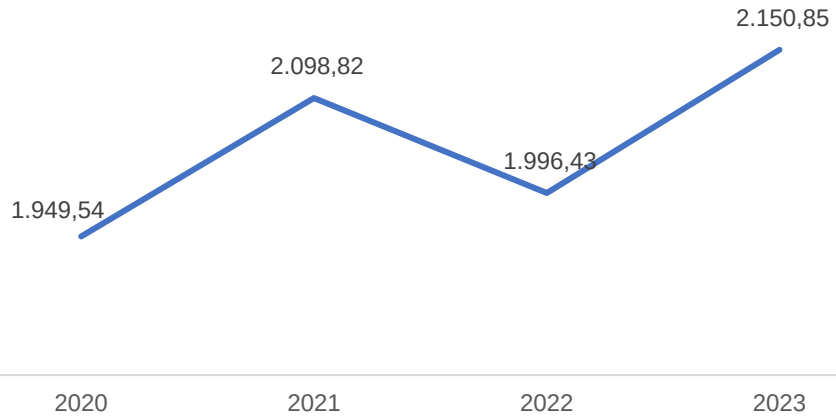
Pada tahun 2015 hanya kelompok pangan hewani yang memenuhi standar ideal. Pada tahun 2016 hingga 2019 hanya kelompok pangan padi-padian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, dan gula yang Skor PPH Konsumsinya telah memenuhi standar ideal. Sedangkan pada tahun 2020, pola konsumsi pangan mengalami peningkatan, dengan capaian pemenuhan kelompok pangan periode sebelumnya, ditambah sayur dan buah, karena didukung Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian: Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan, Pemanfataan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengembangan Lumbung Pangan Desa, Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengelolaan

Hasil Pertanian. Tahun 2021 mengalami penurunan 15,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Padi-padian tetap tinggi, namun pangan hewani, kacang-kacangan, sayur dan buah turun drastis, yang sebagian disinyalir karena pola konsumsi yang bergeser akibat berkurangnya pendapatan saat pandemi Covid-19. Di tahun 2022 dan 2023, dengan mulai pulihnya ekonomi, pola konsumsi masyarakat juga meningkat, ditandai konsumsi pangan hewani serta sayur dan buah yang meningkat.

D. Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari

Rata-rata konsumsi kalori per kapita pada tahun 2023 telah meningkat 7,73 persen dari tahun sebelumnya, dengan rata-rata positif 3,50 persen pada 4 tahun terakhir. Secara umum, tingkat konsumsi kalori penduduk Gorontalo Utara telah mencapai batas kecukupan yang dianjurkan Kementerian Kesehatan dan berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI tahun 2018 di tahun 2023, dari angka kecukupan energi (AKE) yang direkomendasikan sebesar 2.100 Kkal/hari.

Grafik 2.70
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari (Kkal/Hari)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

Tingkat rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari jika diuraikan menurut kelompok makanan disajikan pada Tabel 2.159 sebagai berikut.

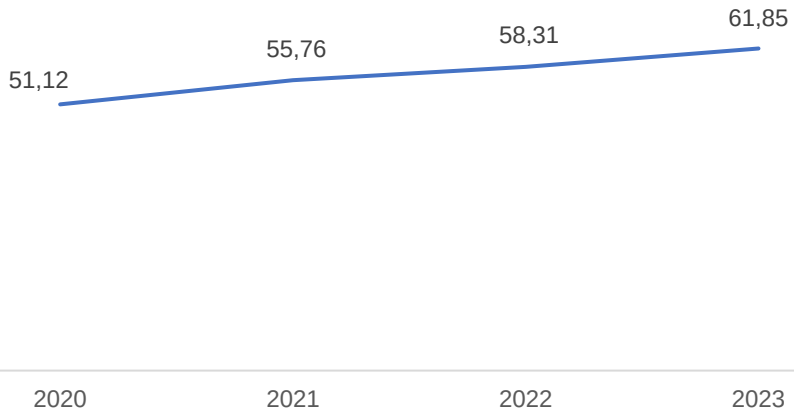
Tabel 2.159
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Kkal/Hari)

No.	Kelompok Komoditas Makanan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	958,46	1.023,19	920,91	1.025,11
2	Umbi-umbian	24,34	48,47	32,18	41,22
3	Ikan/udang/cumi/kerang	64,16	79,48	77,39	65,91
4	Daging	15,54	22,83	25,20	27,12
5	Telur dan susu	29,00	26,04	28,24	24,89
6	Sayur-sayuran	31,32	32,73	37,49	35,20
7	Kacang-kacangan	18,93	20,97	19,00	23,98
8	Buah-buahan	53,37	42,58	47,13	41,51
9	Minyak dan kelapa	297,76	341,12	312,07	309,11
10	Bahan minuman	93,41	115,42	102,07	86,53
11	Bumbu-bumbuan	16,55	20,34	18,34	17,67
12	Konsumsi lainnya	25,69	32,28	34,88	32,17
13	Makanan dan minuman jadi	321,01	293,38	341,53	420,43
14	Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata konsumsi		**1.949,54**	**2.098,82**	**1.996,43**	**2.150,85**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

Sementara itu, konsumsi protein per kapita terus naik di 3 tahun terakhir dan rata-rata meningkat sebesar 6,57 persen. Nilai terakhir di tahun 2023 sudah melebihi standar angka kecukupan protein ideal bagi perempuan sebesar 56-59 Gram/hari, namun belum memenuhi minimal 62-66 Gram/hari bagi laki-laki. Karena daerah pesisir, konsumsi ikan penduduk Gorontalo Utara sangat tinggi, tercatat sebanyak 12,41 Gram/hari, di lain pihak konsumsi daging hanya 1,71 Gram/hari.

Grafik 2.71
Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari (Gram/Hari)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

Tabel 2.160
Rata-rata Konsumsi Protein per Kapita Sehari Menurut Kelompok Makanan (Gram/Hari)

No.	Kelompok Komoditas Makanan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	22,54	24,09	21,65	24,11
2	Umbi-umbian	0,18	0,34	0,20	0,29
3	Ikan/udang/cumi/kerang	10,59	12,99	14,59	12,41
4	Daging	0,97	1,34	1,59	1,71
5	Telur dan susu	1,74	1,46	1,74	1,46
6	Sayur-sayuran	1,86	1,93	2,28	2,21
7	Kacang-kacangan	2,05	1,95	2,00	2,46
8	Buah-buahan	0,65	0,40	0,47	0,44
9	Minyak dan kelapa	0,23	0,27	0,22	0,17
10	Bahan minuman	0,51	0,67	0,61	0,69
11	Bumbu-bumbuan	0,54	0,66	0,59	0,61
12	Konsumsi lainnya	0,55	0,66	0,71	0,68
13	Makanan dan minuman jadi	8,71	8,98	11,67	14,62
14	Rokok dan tembakau	0,00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata konsumsi		**51,12**	**55,76**	**58,31**	**61,85**

Sumber: Statistik Kesejahteraan Gorontalo Utara (BPS), diolah

E. Tingkat Kerawanan Pangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Indikator penyebab kerawanan pangan di suatu daerah adalah:

1. Ketersediaan pangan
   a. Tidak adanya produksi padi
   b. Kekurangan produksi pangan setara beras
2. Distribusi pangan
   a. Akses fisik pangan (jalan, topografi)
   b. Akses ekonomi (kemiskinan, kios akses pangan)
   c. Akses sosial (penduduk buta huruf)
3. Pemanfaatan pangan
   a. Konsumsi pangan (kualitas konsumsi pangan/AKG);
   b. Akses terhadap fasilitas kesehatan (rasio jumlah Puskesmas);
   c. Akses terhadap air bersih;
   d. Perempuan buta huruf;
   e. Status gizi (bayi gizi buruk dan BBLR);

f. Dampak status gizi (kematian bayi dan Balita).

Daerah rawan pangan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) sebagai berikut.

Tabel 2.161
Kategori Daerah Rawan Pangan

No.	Kecamatan/Desa	Prioritas/Kategori						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Atinggola	5	5					
2	Gentuma Raya	4	4					
3	Tomilito	2	2					
4	Ponelo Kepulauan	1	1					
5	Kwandang	5	5					
6	Anggrek	3	3					
7	Monano	2	2					
8	Sumalata Timur	4	4					
9	Sumalata	3	3					
10	Biau	3	3					
11	Tolinggula	5	5					
12	Desa Dudepo, Kec. Anggrek			1	1	1	3	
13	Desa Potanga, Kec. Biau			1	1	1	3	
14	Desa Masuru, Kec. Kwandang			2	2	2	3	
15	Desa Pulohenti, Kec. Sumalata			2	2	2		
16	Desa Cempaka Putih, Kec. Tolinggula			2	2	3		
17	Desa Mutiara Laut, Kec. Tomilito			2	2	2		
18	Desa Windu Kec. Biau			2	2	2	2	
19	Desa Bohulo Kec. Biau			2	2	2	3	
20	Desa Sembihingan Kec. Biau			2	2	3		
21	Desa Deme I, Kec. Sumalata Timur			2	2	4	2	
22	Desa Puncak Mandiri Kec. Sumalata			3	3	2		
23	Desa Papualangi, Kec. Tolinggula			3	3	2		
24	Desa Langke, Kec. Gentuma Raya			3	3	2	2	
25	Desa Dambalo Kec. Tomilito			3	3	4	3	
26	Desa Tudi, Kec. Monano			3	3	4	3	
27	Desa Bulango Raya, Kec. Tomilito					3	2	
28	Desa Langge, Kec. Anggrek					3	2	
29	Desa Otiola, Kec. Ponelo					3	2	3
30	Desa Helumo, Kec. Anggrek					3	3	
31	Desa Tihengo, Kec. Ponelo					3	2	
32	Desa Durian, Kec. Gentuma					3	3	
33	Desa Tutuwoto, Kec. Anggrek					3	3	
34	Desa Pontolo Atas, Kec. Kwandang					3	3	
35	Desa Koluwoka, Kec. Sumalata Timur					3	2	
36	Desa Tanjung Karang, Kec. Tomilito					3	3	
37	Desa Kasia, Kec. Sumalata					3	3	
38	Desa Huidu Melito, Kec. Tomilito					3	3	
39	Desa Ipilo, Kec. Gentuma Raya					3	3	
40	Desa Ilomangga, Kec. Tolinggula						2	
41	Desa Bohusami, Kec. Gentuma Raya						2	3
42	Desa Tolite Huyu, Kec. Monano						2	
43	Desa Hiyalo Oyile, Kec. Monano						3	
44	Desa Iloheluma Kec. Anggrek						3	
45	Desa Ilodulunga, Kec. Anggrek						3	
46	Desa Putiana, Kec. Anggrek						3	
47	Desa Molantadu, Kec. Tomilito						3	
48	Desa Milango Kec. Tomilito						3	
49	Desa Bubode, Kec. Tomilito						3	
50	Desa Leyao, Kec. Tomilito						3	
51	Desa Dunu, Kec. Monano						3	
52	Desa Sogu, Kec. Monano						3	
53	Desa Zuriyati, Kec.Monano						3	
54	Desa Didingga, Kec. Biau						3	
55	Desa Motihelumo, Kec. Sumalata Timur						3	
56	Desa Dumolodo, Kec. Gentuma Raya							3

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2023

Rekapitulasi per kecamatan atas tabel 2.161 disajikan pada Tabel 2.162 yang menunjukkan hampir seluruh desa termasuk aman pangan.

Tabel 2.162
Jumlah Desa Rawan dan Aman Pangan per Kecamatan

No.	Kecamatan	2020		2021		2022		2023	
		Aman Pangan	Rawan Pangan	Aman Pangan	Rawan Pangan	Aman Pangan	Rawan Pangan	Aman Pangan	Rawan Pangan
1	Tolinggula	8 desa	2 desa	8 desa	2 desa	9 desa	1 desa	10 desa	-
2	Biau	6 desa	4 desa	6 desa	4 desa	6 desa	4 desa	10 desa	-
3	Sumalata	9 desa	2 desa	8 desa	3 desa	10 desa	1 desa	11 desa	-
4	Sumalata Timur	9 desa	1 desa	9 desa	1 desa	7 desa	3 desa	10 desa	-
5	Monano	9 desa	1 desa	10 desa	0 desa	5 desa	5 desa	10 desa	-
6	Anggrek	14 desa	1 desa	11 desa	4 desa	7 desa	8 desa	15 desa	-
7	Kwandang	17 desa	1 desa	16 desa	2 desa	16 desa	2 desa	18 desa	-
8	Ponelo Kepulauan	4 desa	0 desa	2 desa	2 desa	2 desa	2 desa	3 desa	1 desa
9	Tomilito	10 desa	2 desa	6 desa	4 desa	2 desa	8 desa	10 desa	-
10	Gentuma Raya	10 desa	1 desa	8 desa	3 desa	7 desa	4 desa	9 desa	2 desa
11	Atinggola	14 desa	0 desa	14 desa	0 desa	14 desa	0 desa	14 desa	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, 2024

F. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan salah satu indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian tujuan SDGs ke-2 yaitu “Tanpa Kelaparan”, didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat (FAO, 2021). PoU kemudian dihitung sebagai persentase populasi yang konsumsinya di bawah *Minimum Dietary Energy Requirement* (MDER). MDER populasi digunakan sebagai proksi ambang batas (*threshold*) dan dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari persyaratan energi minimum untuk setiap kelompok usia dan jenis kelamin dalam populasi (Wanner et al., 2014).

Jumlah orang yang mengalami kelaparan meningkat pada tahun 2020 di masa pandemi (FAO *et al*., 2021). Selain itu, Covid-19 menciptakan tekanan pada ketahanan pangan melalui penurunan pendapatan masyarakat dan berkurangnya akses, peningkatan biaya transaksi, dan ketidakpastian dalam sistem pangan negara. Masalah ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan bagian dari masalah ketahanan pangan. Menurut Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian (2021), terdapat

tiga aspek yang menjadi pilar ketahanan pangan di antaranya aspek keterjangkauan pangan, aspek ketersediaan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan.

Tabel 2.163
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Provinsi Gorontalo (%)

No.	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023
1	Boalemo	12,99	17,47	19,09	13,99
2	Gorontalo	10,74	14,97	19,01	14,97
3	Pohuwato	11,48	15,32	20,02	18,72
4	Bonebolango	7,98	13,25	17,59	16,03
5	Gorontalo Utara	14,06	15,77	22,84	18,90
6	Kota Gorontalo	6,29	12,96	15,17	10,84
Provinsi Gorontalo		10,33	14,84	18,63	15,10

Sumber: https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI2OSMy/prevalensi-ketidakcukupan-konsumsi-pangan--persen--per-kabupaten-kota--persen-.html

Capaian kinerja Gorontalo Utara pada indikator tersebut masih termasuk yang terburuk di Provinsi Gorontalo, karena pada tahun 2023 mendapat skor tertinggi meski membaik dibandingkan setahun sebelumnya yang memiliki korelasi dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.

Untuk itu, guna menjamin ketersediaan dan stabilitas harga pangan di daerah, pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan pengawasan terhadap distribusi dan rantai pasok produk pangan. Selain itu, dalam jangka pendek, jika fiskal memungkinkan pemerintah daerah dapat meningkatkan pemberian subsidi pada komoditas-komoditas pangan strategis maupun pada produk perawatan pangan dan energi yang menunjang produksi pangan serta sedang mengalami lonjakan harga yang tinggi. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah daerah dapat mendorong optimalisasi program intensifikasi pertanian dan program diversifikasi pangan.

4. **Urusan Pertanahan**

Tanah merupakan kebutuhan sangat mendasar dan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan pembangunan. Belum terdatanya semua tanah yang ada mengakibatkan tidak jelasnya pemilikan tanah secara maksimum, tanah-tanah *absentee*, timbulnya *absentee* baru, dan penggunaan tanah maksimum, selain itu mengakibatkan tidak diketahuinya *present* pengaturan penggunaan (*land-use*) dan pengaturan pemanfaatan (*present land tenure*) dari tanah tersebut, juga disebabkan

tingkat pendaftaran tanah masih relatif rendah. Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menetapkan perlunya program *land reform* sebagai salah satu arah kebijakan pembaruan agraria yang dilakukan melalui pendataan pertanahan melalui Inventarisasi dan Registrasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, secara komprehensif dan sistematis.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pada pasal 8 poin (2) huruf (e) disebutkan bahwa “Pengguna Barang Milik Negara/Daerah berwenang dan bertanggung jawab mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya”. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Gorontalo Utara terus berupaya melakukan pensertifikatan tanah daerah melalui kegiatan sertifikasi tanah.

Permasalahan pertanahan erat kaitannya dengan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut, sehingga membutuhkan anggaran untuk sertifikasi hak atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Adapun pembebasan lahan yang dilaksanakan pada rentang 2007-2023 (tahun 2022 tidak ada pembebasan lahan) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.164.

Tabel 2.164
Pembebasan Lahan

No.	Unit Organisasi	Tahun	Rincian			Sumber Data
			Total Luas (M^2)	Total Harga (Rp000)	Pembebasan Lahan	
1	Bagian Umum SETDA	2007	2.212.63	90.000	2 lahan	Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kabupaten Gorontalo Utara
		2008	3.000	274.000	1 lahan	
		2009	375.806.85	3.508.095	14 lahan	
		2010	36.993	219.641	6 lahan	
		2011	574.816.30	7.261.109	14 lahan	
		2012	48.548.02	633.522	5 lahan	
		2013	43.561.01	1.593.687	5 lahan	
2	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah SETDA	2014	113.447.07	10.268.121	20 lahan	
		2015	137.247.88	6.306.180	12 lahan	
		2016	137.176.25	8.350.856	20 lahan	
3	Dinas PRKPP	2017	139.183	9.226.166	46 lahan	Dinas PRKPP
		2018	58.290	5.518.608	8 lahan	
		2019	102.183	11.590.380	20 lahan	
		2020	123.771	11.221.642	39 lahan	
		2021	26.218	2.381.664	5 lahan	
		2022	-	-	-	
		2023	4.764	400.038	2 lahan	
Total			**494.402**	**78.843.709,00**	**219 lahan**	

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, diolah

5. **Urusan Lingkungan Hidup**

Mengacu pada prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), pelaksanaan pembangunan perlu mempertimbangkan 3 pilar: pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup ditujukan agar dampak kerusakan lingkungan yang timbul karena pembangunan masih dapat ditoleransi serta memenuhi daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup juga diupayakan tetap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economically feasible*) secara optimal serta tetap dapat diterima secara sosial (*socially acceptable*) dan mendukung kesejahteraan oleh masyarakat.

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Gorontalo Utara relatif masih terjaga kualitasnya, terutama di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Nantu. Namun, berjalannya waktu, seiring kebutuhan pengembangan area perkebunan dan perumahan oleh masyarakat, lahan kritis dan pencemaran terus meningkat. Beberapa pencemaran lingkungan yang terjadi berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan seperti tambak, permukiman, industri, transportasi laut, dan lainnya.

Upaya pengendalian pencemaran lingkungan sudah dilakukan, namun masih terdapat berbagai aktivitas yang tidak ramah lingkungan seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Mulai munculnya kantong-kantong industri rumahan juga berdampak pada pencemaran lingkungan. Selain itu terdapat indikasi pencemaran tinggi pada beberapa sungai akibat aktivitas industri dan permukiman.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada dasarnya digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena sudah paripurna dalam melihat kualitas lingkungan, nilai IKLH dapat dijadikan rujukan bagi para penentu kebijakan dalam merumuskan program yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Adapun permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi di Gorontalo Utara terkait IKLH meliputi:

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas air (air permukaan dan air tanah). Dari 6 lokasi sungai yang menjadi lokasi uji pada tahun 2020, ada 1 titik sungai di Gorontalo Utara yang sudah memiliki status “Cemar Ringan” (Sungai Posso) dan 5 kategori “Cemar Sedang” (Sungai Wubudu, Buladu, Ilangata, Sungai Hulawa, Biau) yang diuji melalui pengambilan *sample* air di beberapa titik sungai menggunakan metode analisis storet dan indeks pencemaran dari 35 Daerah Aliran Sungai (DAS), 137 sungai, dan 232 anak sungai yang ada di Gorontalo Utara. Sedangkan pada tahun 2022 dan 2023, hanya 1 titik uji kualitas air di Sungai Posso dengan kategori hasil uji “Cemar Sedang”. Rincian jumlah titik uji air disajikan pada Tabel 2.165.

Tabel 2.165
Titik Pemantauan Kualitas Air

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah titik pemantauan kualitas air sungai	4	6	5	1	1
2	Jumlah ttik pemantauan kualitas air tanah	4	-	4	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan kualitas dan kuantitas air menjadi perhatian bersama yang harus dituntaskan. Untuk mencegah meningkatnya level pencemaran, Pemerintah Daerah telah melakukan langkah preventif dan korektif, seperti memaksimalkan pemantauan dan pengawasan secara berkala terhadap pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pembinaan dan sosialisasi lingkungan, inventarisasi SDA secara baik, konservasi (penghijauan) serta pelaksanaan penegakan hukum lingkungan secara terpadu.

2. Rendahnya kualitas tutupan lahan yang memiliki korelasi dengan terjadinya permasalahan terkait kuantitas air dan kualitas udara. Luasan RTH yang semakin rendah akibat alih fungsi mengakibatkan serapan air menurun dan berpengaruh pula pada jumlah tumbuhan yang memiliki fungsi sebagai penetral kualitas udara, sehingga kualitas udara semakin memburuk.

3. Menurunnya kualitas udara, yang merupakan konsekuensi rendahnya luasan RTH, kurangnya tutupan vegetasi, dan bertambahnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya.

Tabel 2.166 menguraikan skor setiap komponen penilaian IKLH pada empat tahun terakhir.

Tabel 2.166
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No.	Uraian	IKLH 2020	IKLH 2021	IKLH 2022	IKLH 2023	Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	59,63	58,67	55,00	56,67	Kurang
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,81	89,34	95,51	93,40	Unggul
3	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTP)	61,71	75,61	75,61	76,88	Cukup
Nilai IKLH		**70,12**	**74,47**	**75,92**	**75,97**	**Baik**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Dari Tabel 2.166 di atas dapat dilihat bahwa capaian IKLH Kabupaten Gorontalo Utara di masa pemantauan empat tahun terakhir positif. Faktor yang dianggap mempengaruhi hasil tersebut salah satunya pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak Maret 2020, yang menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat sehingga *volume* lalu lintas juga mengalami penurunan cukup besar sehingga kualitas udara meningkat. Beberapa usaha/industri juga mengalami penurunan atau malah menutup usahanya selama pandemi. Hal ini sangat mengurangi beban pencemaran air dan udara.

Namun jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terlihat ada nilai indeks yang trennya mengalami penurunan. Satu sisi, hal tersebut wajar karena ekses dari pembangunan adalah pengaruhnya terhadap tutupan vegetasi, pencemaran badan air dan udara. Namun perlu perhatian dan penanganan khusus secara komprehensif serta serius agar nilainya dapat terkelola dan terjaga terutama pada nilai Indeks Kualitas Air. Pemerintah Daerah harus memfokuskan usahanya pada perbaikan kualitas air dengan tetap menjaga kualitas udara dan tutupan lahan, dengan tujuan perolehan nilai IKLH secara agregat meningkat.

Tekanan jumlah penduduk yang semakin bertambah akan berbanding lurus dengan upaya pemanfaatan sumber daya alam. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam seperti air

bersih, pangan, dan lahan untuk bermukim. Dalam hal ini, Gorontalo Utara sebenarnya masih memiliki lahan relatif luas yang bisa dimanfaatkan, namun banyak lahannya tersebut memiliki kemiringan di atas 15 persen, sehingga lahan yang relatif datar memiliki keterbatasan, sehingga membutuhkan kebijakan yang dinamis untuk memenuhi kebutuhan dasar utamanya terkait air bersih dan pangan secara berkelanjutan. Bahkan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipandang secara politis dengan melibatkan banyak pihak dan daerah sekitarnya dalam rangka mewujudkan keseimbangan daya dukung lingkungan hidup.

Berdasarkan penetapan standar secara nasional, IKLH Kabupaten Gorontalo Utara berada diatas IKLH standar nasional yang telah ditetapkan pemerintah melalui kementerian teknis sebesar 60,00. Namun, masih ada komponen yang justru turun, sehingga perlu perhatian dan penanganan komprehensif, maka diharapkan perhatian yang serius semua elemen pemangku kebijakan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat untuk lebih fokus dalam mengelola dan memberikan dukungan terhadap pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, serta penanganan dan pengurangan sampah demi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.



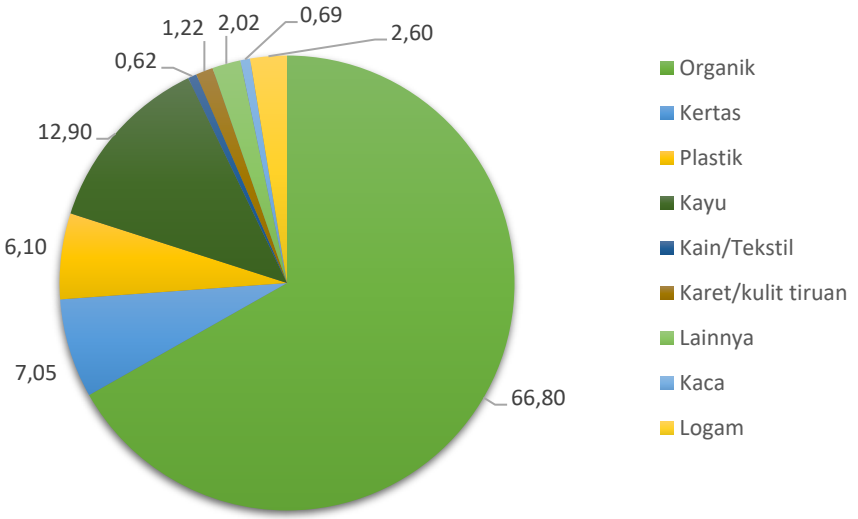
72,54

IKLH Nasional (2023)

B. Cakupan Layanan Sampah

Kebersihan lingkungan ialah suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti, debu, sampah, dan juga bau. Namun, pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat justru menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Secara rinci, gambaran mengenai komposisi dan karakteristik sampah di Gorontalo Utara digambarkan pada Grafik 2.72 berikut.

Grafik 2.72
Komposisi Sampah di Sumber Sampah Tahun 2022 (%)



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, dan Sampah Sejenis, sampah rumah tangga terdiri atas: a) Pengurangan sampah; dan b) Penanganan sampah. Upaya pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sesuatu yang berpotensi menjadi sumber daya.

Untuk pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah telah mendirikan Tempat Pembuangan Sementara di berbagai tempat, namun penyebarannya tidak merata. Pembangunan TPS sementara baru dapat dilakukan di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Sumalata, dan Atinggola, sehingga kapasitasnya masih perlu ditambah agar mampu menampung *volume* sampah harian masyarakat. Selain jumlah TPS yang tidak merata, kendala lainnya dalam kegiatan pengelolaan persampahan adalah jumlah sarana TPSA yang hanya ada 1 dan terdapat di wilayah sebelah timur dari Ibukota Kabupaten, sehingga menyulitkan kecamatan-kecamatan yang terdapat di wilayah barat untuk membuang sampah dikarenakan rentang jarak layanan pengangkutan sampah yang relatif jauh. Keberadaan TPSA selain dapat menampung timbulan sampah yang dihasilkan juga harus dapat meminimalisasi bahaya yang mungkin timbul akibat penimbunan sampah

tersebut, sehingga alternatif penambahan TPSA lain serta penambahan armada mobil pengangkut sampah menjadi opsi yang paling memungkinkan untuk dapat dilaksanakan di kangka pendek dan menengah. Sedangkan pada pelaksanaan TPST 3R, saat ini ada sekitar 5 TPST 3R yang ada, kesulitannya cakupan sampah yang ditangani pada TPST 3R belum masuk pada skala ekonomi, sehingga masyarakat belum melihat pengolahan sampah ini memberikan suatu *added value* sebagai alternatif penghasilan masyarakat.

Terlepas dari hal di atas, upaya yang selama ini dlaksanakan sebenarnya adalah paradigma lama, dimana sistem pengelolaan sampah menitikberatkan pada penanganan sampah yang terfokus kepada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan ke Tempat Pemrosesan Sampah Akhir (TPSA). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan baru ketika penampungan di TPSA sudah melebihi kapasitas. Seperti saat ini TPSA sudah beroperasi dengan sistem *open dumping* dari kondisi ideal berkonsep *sanitary landfill*. Pengelolaan sampah paradigma baru terdiri dari pengurangan dan penanganan sampah. Tujuannya adalah untuk membatasi timbulan sampah dari sumbernya dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPSA. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pemanfaatan kembali sampah (*reuse*) dan pendauran ulang sampah (*recycle*). Sedangkan, kegiatan penanganan sampah meliputi:



- Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah;
- Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST);

- Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS atau dari TPST menuju ke TPSA;
- Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah;
- Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Berikut kondisi penanganan persampahan di Kabupaten Gorontalo Utara selang waktu tahun 2020-2022.

Tabel 2.167
Timbulan Sampah dan Persentase Sampah Tertangani

No.	Uraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Produksi sampah (Ton/tahun)	18.243,72	18.472,07	347.932,75 (M^3/tahun)
2	Sampah tertangani (Ton/tahun)	2.176,07	3.672,20	11.887 (M^3/tahun)
3	Persentase sampah yang tertangani	11,93	19,88	3,41

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Jangkauan pelayanan dan pengelolaan persampahan yang masih terbatas merupakan masalah utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. Akibat atas keterbatasan ini diantaranya karena ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik fisik maupun non fisik (jumlah tenaga kerja/SDM) serta pemanfaatannya, keterlibatan dan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah, pelaksanaan regulasi serta penerapan manajemen pengelolaan sampah belum optimal, belum terpadu dan fokus penanganannya belum merata, masih terkonsentrasi pada wilayah kawasan Kecamatan Kwandang. Hal-hal tersebut menjadi faktor tambahan dari faktor utama masalah belum terpenuhinya kesesuaian alokasi penyediaan dana maupun anggaran untuk menunjang pelaksanaan operasional pengelolaan persampahan. Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk yang berkorelasi positif dengan produksi sampah, kebutuhan terhadap peningkatan pengelolaan TPSA yang ada semakin mengemuka/lokasi TPSA baru, khususnya bagi cakupan wilayah Gorontalo Utara bagian barat.

Namun sebelum sampai pada tahap TPSA, kebutuhan terhadap Tempat Pembuangan Sampah Sementara juga penting. Tabel 2.168 menunjukkan jumlah dan kapasitas TPS yang ada.

Tabel 2.168
TPS per Satuan Penduduk

No.	Uraian	Tahun							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah TPS	22	35	10	20	20	15	6	6
2	*Jumlah penduduk	123.830	124.202	127.542	125.603	126.930	125.816	127.580	130.400
3	Rasio TPS per satuan penduduk	1:5.628	1:3.268	1:12.754	1:3.174	1:3.185	1:8.387	1:21.263	1:21.733

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023
*Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Tabel 2.168 di atas menunjukkan bahwa rasio TPS per satuan penduduk menunjukkan fluktuasi, kondisinya membaik terutama pada tahun 2019, namun kembali memburuk di 3 tahun berikutnya, diakibatkan pertambahan penduduk tidak sebanding dengan TPS yang beroperasi/tersedia. Dari 6 TPS 3R yang tersedia, hanya terdapat 1 TPS yang aktif (KSM Bahari di Kecamatan Ponelo Kepulauan), sisanya kurang aktif bahkan tidak aktif.

Adapun penempatan dan pembangunan fasilitas sarana pengelolaan persampahan sebagian besar masih difokuskan di wilayah Kecamatan Kwandang dengan pertimbangan aktifitas tinggi kegiatan masyarakat dan pemerintahan, sehingga diperkirakan menghasilkan volume produksi sampah cukup besar. Pemerintah Daerah selalu berupaya untuk menambah lokus pembangunan TPS sehingga dapat menurunkan rasio TPS per satuan penduduk, terutama di wilayah yang belum memiliki TPS dan berpotensi untuk menghasilkan sampah harian yang besar.

C. Cakupan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan serta Penanganan Pengaduan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Tabel 2.169
Cakupan Pengawasan Pelaksanaan Izin Lingkungan

No.	Jenis Izin Lingkungan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	AMDAL	2	2	1	1	1	1	1
2	UKL-UPL	18	10	17	15	9	20	14
3	SPPL	6	4	20	23	6	2	0

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Tabel 2.169 di atas menunjukkan kegiatan pengawasan dalam hal pengawasan izin lingkungan. Secara umum, pengawasan terhadap pelaku usaha/industri oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kepemilikan izin dan dokumen lingkungan sampai saat ini masih dilakukan secara pasif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan SDM yang memiliki kualifikasi lingkungan dan sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban pelaku usaha/industri adalah ketaatan melaporkan perkembangan kegiatan usaha dan pengelolaan lingkungan hidup setiap 6 bulan sekali sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen lingkungan. Bila melihat jumlah pelaku usaha/industri yang ada dan jumlah entitas yang telah melapor, terdapat jurang jumlah yang sangat jauh. Untuk itu langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah pendekatan persuasif, berupa sosialisasi, pembinaan, dan bimbingan kepada para pelaku usaha seiring pula kepada instansi pemerintah lainnya dan masyarakat untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan pelaporan.

Tabel 2.170
Penanganan Pengaduan Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pengaduan	Tahun								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Masuk	6	6	10	5	8	10	9	9	8
Ditangani	6	6	8	4	5	10	9	8	8

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

Tabel 2.170 menunjukkan jumlah laporan pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti dan diverifikasi tingkat permasalahannya dan penyesuaian kewenangan penanganannya oleh Pemerintah Daerah.

D. Implementasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Lebih lanjut, sepanjang tahun 2017-2023, terdapat kenaikan jumlah kegiatan usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan terutama pada tahun 2022. Secara umum meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan kegiatan dari tahun sebelumnya sebagai imbas dari pandemi, kegiatan pemantauan kembali menggeliat di tahun 2022 dan 2023. Terkait dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemrakarsa kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap penataan dan komitmen dari

pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.171 berikut.

Tabel 2.171
Kegiatan yang Diawasi dalam Pemantauan Lingkungan

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan yang diawasi dalam rangka implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan	18	10	17	15	9	22	14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2024

6. **Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

A. Persentase Bayi Berakta Lahir

Administrasi kependudukan sangat penting dimiliki agar setiap masyarakat mendapatkan haknya sebagai warga negara. Begitupun dengan bayi baru lahir yang memiliki perlakuan yang sama. Kepemilikan akta lahir menunjukkan bahwa kelahirannya telah dicatat dalam data kependudukan dan dijadikan salah satu syarat untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau pembuatan surat-surat penting lainnya, serta kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang bersifat formal. Akta kelahiran merupakan sumber data jumlah kelahiran di suatu daerah dan data tersebut sangat penting untuk proyeksi penduduk ke depan, sehingga Pemerintah Daerah selalu berusaha agar setiap bayi lahir sesegera mungkin untuk diurus Akta Kelahirannya. Apabila rasio akta kelahiran minim, akan menyulitkan pemerintah untuk memproyeksikan penduduk yang dapat berdampak pada tidak maksimalnya program pembangunan.

Tabel 2.172
Bayi Berakta Lahir

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	*2023
1	Jumlah bayi berakta kelahiran (jiwa)	2.185	2.019	2.045	1.901	1.283	1.820	11.553
2	Jumlah bayi (jiwa)	2.188	2.023	2.050	1.902	1.284	1.820	11.572
3	Rasio bayi berakta kelahiran	99,86	99,80	99,76	99,95	99,92	100	99,84

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024
*Kepemilikan akta lahir bagi anak usia Balita

B. Persentase Pasangan Berakta Nikah

Pada rasio pasangan berakta nikah, indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk menikah yang memiliki akta nikah.

Akta nikah merupakan bukti pernikahan suami istri yang sah diakui oleh negara dan agama, dan kepemilikannya memudahkan dalam administrasi dan identifikasi kependudukan. Rasio pasangan berakta nikah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pasangan berakta nikah dengan jumlah seluruh pasangan nikah. Namun jumlah pasangan nikah belum didapatkan datanya dari Kantor Urusan Agama, sehingga hanya disajikan jumlah pasangan nikah berakta nikah.

Tabel 2.173
Pasangan Berakta Nikah di Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pasangan nikah ber-akta nikah (pasangan)	20.086	23.461	25.381	33.984	20.991	37.289	41.660

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

C. Kepemilikan e-KTP dan KK

Penerapan e-KTP nasional berbasis NIK di Kabupaten Gorontalo Utara telah mulai dilaksanakan pada tahun 2011. Peningkatan angka kepemilikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk di Gorontalo Utara sejak 2017-2023 menunjukkan semakin baiknya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pendataan keluarga, terutama jika melihat pada tahun 2023 yang merupakan tahun dimulainya tahapan-tahapan pemilihan umum (baik Pilpres maupun Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah yang menuntut untuk perbaikan data kependudukan.

KTP merupakan salah satu kartu identitas yang wajib dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia di atas 17 tahun, merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di Indonesia, dan akan memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan dan juga dapat digunakan sebagai syarat untuk membuat surat-surat tertentu seperti SKCK, akta pernikahan, NPWP, SIM, dan sebagainya. Indikator ini bertujuan untuk melihat seberapa besar persentase penduduk yang memiliki KTP. Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah). Data indikator-indikator di atas dapat dilihat pada Tabel 2.174 berikut.

Tabel 2.174
Kepemilikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Kelahiran

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk	124.202	128.599	125.603	126.238	125.816	127.580	130.400
2	Jumlah penduduk usia >17 tahun/telah menikah	80.926	88.997	86.690	89.269	90.060	97.405	62.664
3	Jumlah penduduk usia >17 tahun/telah menikah yang ber-KTP	71.605	80.644	83.611	86.660	88.748	88.102	92.708
4	Persentase (rasio) penduduk ber-KTP	88,48%	90,61%	96,45%	97,08%	98,54%	97,02%	71,09%
5	Jumlah keluarga ber-KK	27.651	27.818	27.883	35.579	35.525	39.582	40.530
6	Jumlah keluarga	35.241	35.343	36.646	37.536	38.123	39.682	40.587
7	Persentase keluarga ber-KK	78,46%	78,71%	76,09%	94,79%	93,19%	99,75%	99,86%
8	Jumlah penduduk ber-akta lahir	42.895	52.122	57.555	95.665	79.821	114.002	119.518
9	Persentase penduduk ber-akta lahir	34,53%	40,53%	44,75%	75,78%	63,42%	89,36%	91,65%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

7. **Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Penyelenggaraan urusan ini bertujuan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Selain itu, sesuai RPJMN 2015-2019 (yang kemudian dilanjutkan pada RPJMN periode berikutnya), Gorontalo Utara termasuk dalam Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional (KTPN) dan Kawasan Prioritas Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) yang mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk merevitalisasi kawasan-kawasan tersebut untuk mandiri dan memiliki daya saing. Dalam upaya meningkatkan daya saing tersebut, beberapa penyesuaian upaya dilakukan Kemendes PDT dan Transmigrasi yang membedakan dengan penanganan periode sebelumnya, yaitu dengan dukungan model kolaborasi kerjasama sejak perencanaan (*co-creation*), kentalnya teknologi informasi pada kawasan, proses produksi produk-produk dari kawasan, dan dilibatkannya SDM millenial. Dari proses pendampingan terhadap kawasan prioritas yang ada tersebut, diperoleh 5 dimensi yang akan coba didorong

untuk diimplementasikan oleh seluruh *stakeholder* pembangunan, yaitu: mulai dari inisiatif masyarakat, proyek berskala kecil dan menengah, proyek skala besar, layanan publik, dan regulasi.

A. Status Desa

Tabel 2.175 dan 2.176 menunjukkan kondisi status desa menurut kaidah Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa dan PDT. Pengklasifikasian hal tersebut digunakan sebagai acuan untuk melakukan afirmasi, integrasi, dan sinergi pembangunan sehingga terwujudnya kondisi masyarakat yang sejahtera, adil, dan mandiri akan lebih mudah untuk dicapai dan lebih tepat sasaran.

Tabel 2.175
Perkembangan Status Desa Membangun per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Status IDM (Capaian Per Semester)									
			Mandiri		Maju		Berkembang		Tertinggal		Sangat Tertinggal	
			I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
1	Atinggola	14	2	4	7	7	5	3	0	0	0	0
2	Kwandang	18	4	6	6	5	8	7	0	0	0	0
3	Anggrek	15	0	3	3	3	9	9	3	0	0	0
4	Sumalata	11	1	1	5	5	5	5	0	0	0	0
5	Tolinggula	10	1	1	3	5	6	4	0	0	0	0
6	Gentuma Raya	11	1	2	4	7	6	2	0	0	0	0
7	Tomilito	10	2	2	6	6	2	2	0	0	0	0
8	Ponelo Kepulauan	4	0	1	2	2	2	1	0	0	0	0
9	Monano	10	1	2	4	5	5	3	0	0	0	0
10	Biau	10	0	0	1	7	9	3	0	0	0	0
11	Sumalata Timur	10	0	2	6	4	4	4	0	0	0	0
Total		**123**	**12**	**24**	**47**	**56**	**61**	**43**	**3**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Tabel 2.176
Status Desa Membangun di Gorontalo Utara

No.	Kecamatan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa	123	123	123	123	123	123	123
2	Jumlah Desa Status Mandiri	-	0	0	0	2	12	24
3	Jumlah Desa Status Maju	-	2	6	13	18	47	56
4	Jumlah Desa Status Berkembang	-	40	72	92	89	61	43
5	Jumlah Desa Status Tertinggal	-	75	42	18	14	3	0
6	Jumlah Desa Status Sangat Tertinggal	-	6	3	0	0	0	0

Sumber: idm.kemendesa.go.id (2024)

Secara umum, status desa semakin baik, pada tahun 2023 dilihat dari status “Desa Tertinggal” yang sudah tidak ada, dan status “Desa Berkembang” yang semakin berkurang, beralih ke status yang lebih tinggi. Perhatian layak difokuskan pada Kecamatan Anggrek yang masih memiliki

9 desa yang berstatus “Berkembang” meskipun menjadi salah satu daerah penggerak ekspor impor antar negara dan *hub* antar pulau di Provinsi Gorontalo.

B. Indeks Desa Membangun

Untuk mengukur tingkat kemandirian desa, digunakan Indeks Desa Membangun (IDM), yang merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks: Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL). Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Gambaran dari skor IDM Gorontalo Utara dan perbandingannya dengan skor Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.177.

Tabel 2.177
Indeks Desa Membangun

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Provinsi Gorontalo	0,595	0,6345	0,658	0,6736	0,7068	0,7317
2	Gorontalo Utara	0,5732	0,6106	0,6437	0,6588	0,713	0,7439

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2024

Pada capaian di tahun 2023, desa-desa yang ada di Gorontalo Utara secara rata-rata nilai IDM-nya telah berada di atas capaian rata-rata desa-desa yang ada di Provinsi Gorontalo, yang menggambarkan pembangunan komponen-komponen penyusun IDM di tingkat desa Gorontalo Utara secara relatif sudah lebih baik dibandingkan rata-rata desa lain di Provinsi Gorontalo. Gambaran skor IDM setiap kecamatan setiap komponen penyusun IDM digambarkan sebagai berikut.

Tabel 2.178
Indeks Desa Membangun per Komponen per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	IKS	IKE	IKL	IDM	Status
1	Kwandang	0,8174	0,7277	0,7556	0,7669	Maju
2	Tomilito	0,7788	0,6950	0,8200	0,7646	Maju
3	Atinggola	0,7898	0,6643	0,8238	0,7593	Maju
4	Monano	0,7863	0,5967	0,8800	0,7543	Maju
5	Gentuma Raya	0,7766	0,6500	0,8243	0,7503	Maju
6	Sumalata	0,8109	0,6955	0,7212	0,7425	Maju
7	Tolinggula	0,7697	0,7083	0,7400	0,7393	Maju
8	Ponelo Kepulauan	0,8000	0,5625	0,8500	0,7375	Maju
9	Biau	0,7794	0,6050	0,8000	0,7282	Maju
10	Sumalata Timur	0,7520	0,7000	0,7200	0,7240	Maju
11	Anggrek	0,7874	0,5833	0,7466	0,7058	Berkembang
Gorontalo Utara		**0,7862**	**0,6535**	**0,7892**	**0,7439**	**Maju**

Sumber: Peringkat IDM Tahun 2023 (Kemendes PDT dan Transmigrasi), 2024

C. PKK Aktif

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah serta pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. PKK adalah kegiatan sekelompok kaum wanita yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga merupakan sebuah kekuatan mendasar pada setiap keluarga. Pembangunan terkecil dilakukan oleh PKK di rumah tangganya masing-masing. Untuk itu, peran PKK menjadi sangat strategis dalam merealisasikan visi dan misi pemerintah pada lingkup paling kecil.

Pemantauan kegiatan PKK menjadi sangat penting untuk mengetahui usaha-usaha aktif di tingkat akar rumput dalam merealisasikan program

pembangunan. Monitoring terhadap kegiatan PKK dilakukan untuk melihat peran sertanya dalam mencapai tujuan pembangunan. Keaktifan PKK sebenarnya dapat membantu ibu-ibu untuk meningkatkan kreativitas di berbagai bidang yang mungkin dapat dikembangkan untuk membantu ekonomi keluarga.

Semenjak 4 tahun terakhir, jumlah PKK yang terbentuk di Gorontalo Utara stabil di 134 PKK. Dari jumlah tersebut, seluruhnya dapat menyelenggarakan program pokok PKK, seperti:

1. Penghayatan dan pengamalan pancasila;
2. Gotong royong;
3. Pangan;
4. Sandang;
5. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga;
6. Pendidikan dan keterampilan;
7. Kesehatan;
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. Kelestarian lingkungan hidup;
10. Perencanaan sehat.

D. BUMD Desa Aktif

Aspek lain dari pemberdayaan masyarakat adalah melalui penguatan keberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan penuh bagi berjalannya operasional BUMDesa melalui peningkatan kapasitas pengurus BUMDesa melalui pelaksanaan bimbingan teknis dalam mengelola modal yang ada untuk meningkatkan perputaran ekonomi perdesaan.

Sedangkan status 123 BUMDES yang diklasifikasikan berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan, Pemeringkatan, Pembinaan, dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDesa/BUMDesa Bersama; Pasal 22 butir 6 yang

membagi BUMDES dalam 3 klasifikasi: “Tumbuh”, “Berkembang”, dan “Maju”; disajikan pada Tabel 2.179 berikut.

Tabel 2.178
Status BUMDES Berdasarkan Klasifikasi Dasar Tahun 2022

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMD	Klasifikasi	Jenis Usaha	Status Usaha
1	Atinggola	Imana	Maju Bersama	Berkembang	Saprodi, sewa molen, bak jemuran, penyewaan kursi	Berbadan hukum
2		Bintana	Pinonsayu	Berkembang	Pertanian, jasa	Pendaftaran badan hukum
3		Buata	Usaha Bersama	Tumbuh	Usaha pertanian, perdagangan, simpan pinjam	Berbadan hukum
4		Pinontoyonga	Harapan Kita	Tumbuh	Depot air, sewa tenda kursi, perdagangan pupuk	Berbadan hukum
5		Monggupo	Maju Bersama	Tumbuh	Saprodi	Berbadan hukum
6		Kotajin	Otinongora	Berkembang	Simpan pinjam	Nama terverifikasi
7		Ilomata	Harapan Baru	Tumbuh	Simpan pinjam	Berbadan hukum
8		Iloheluma	Helumo	Tumbuh	Saprodi	Berbadan hukum
9		Wopalo	Puncak Gapura	Tumbuh	Saprodi, kios sembako	Berbadan hukum
10		Posono	Semangat Baru	Berkembang	Agen LPG, sewa peralatan pesta, jasa transportasi	Perbaikan administrasi badan hukum
11		Sigaso	Oginawa	Tumbuh	Sewa tenda kursi, perdagangan pupuk	Berbadan hukum
12		Tombulilato	Semangat Muda	Tumbuh	Perdagangan, sewa barang	Pendaftaran badan hukum
13		Kotajin Utara	Otani Jini	Maju	Saprodi, penggemukan sapi, usaha sablon, bengkel, simpan pinjam	Berbadan hukum
14		Oluhuta	Bukit Idaman	Berkembang	Saprodi	Berbadan hukum
15	Kwandang	Pontolo	Nikmat	Tumbuh	Perdanganga	Nama terverifikasi
16		Molingkapoto	Ceria	Tumbuh	Simpan pinjam	Nama terverifikasi
17		Leboto	Mekar Jaya	Berkembang	Peternakan sapi, kerajinan kerawang, perdagangan pupuk	Nama terverifikasi
18		Posso	Taruna Putra	Tumbuh	Simpan pinjam, pakan ternak	Nama terverifikasi
19		Titidu	Amanah	Tumbuh	Sewa orgen	Nama terverifikasi
20		Moluo	Karya Bersama	Tumbuh	Simpan pinjam, sewa tenda kursi	Belum daftar nama
21		Mootinelo	Karya Bersama	Berkembang	Depot air, sewa peralatan pesta	Nama terverifikasi
22		Bualemo	Setia	Tumbuh	Saprodi	Belum daftar nama
23		Bulalo	Karya Bersama	Tumbuh	Simpan pinjam, jasa, Saprodi	Belum daftar nama
24		Katialada	Bahtera Katialada	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Belum daftar nama
25		Ombulodata	Usaha Bersama	Tumbuh	Saprodi	Berbadan hukum
26		Alata Karya	Harmoni	Berkembang	Simpan pinjam, sewa tenda kursi, sewa *sound system*, kredit barang, *barber shop*	Nama terverifikasi
27		Cisadane	Bentaci	Tumbuh	Pertanian, perikanan	Belum daftar nama
28		Botuwombato	Nikmat	Berkembang	Saprodi, jasa	Berbadan hukum
29		Botungobungo	Sejahtera	Tumbuh	Simpan pinjam, sewa tenda	Nama terverifikasi
30		Molingkapoto Selatan	Cahaya Indah	Berkembang	Simpan pinjam	Berbadan hukum
31		Pontolo Atas	Gerbang Indah	Tumbuh	Simpan pinjam	Nama terverifikasi

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMD	Klasifikasi	Jenis Usaha	Status Usaha
32		Masuru	Harapan Bersama	Berkembang	Saprodi, simpan pinjam, jasa sewa	Berbadan hukum
33	Anggrek	Ilangata	Abadi	Tumbuh	Saprodi	Nama terverifikasi
34		Tolongio	Nusa Indah	Tumbuh	Kios, sewa tenda	Berbadan hukum
35		Tolango	Buhuta Walama	Berkembang	Saprodi, simpan pinjam	Berbadan hukum
36		Popalo	Huyula	Tumbuh	*Photocopy*, BRIlink, sewa *sound system*	Berbadan hukum
37		Dudepo	Dudepo Bahari	Tumbuh	Sewa perlengkapan pesta, agen LPG	Perbaikan administrasi badan hukum
38		Mootilango	Nusa Indah	Berkembang	Sewa *sound system,* sewa tenda	Perbaikan administrasi badan hukum
39		Langge	Permata	Tumbuh	sewa tenda, sewa *sound system*	Nama terverifikasi
40		Tutuwoto	Harapan	Tumbuh	Simpan pinjam	Perbaikan administrasi badan hukum
41		Hiyalooile	Harapan	Tumbuh	Saprodi	Belum daftar nama
42		Ibarat	Desmaratra	Tumbuh	Kios desa	Nama terverifikasi
43		Iloheluma	Harapan	Tumbuh	Depot air	Perbaikan administrasi badan hukum
44		Ilodulunga	Jaya Bersama	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Perbaikan administrasi badan hukum
45		Putiana	Multi Dimensi	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Perbaikan administrasi badan hukum
46		Helumo	Mekar	Tumbuh	Depot air, sewa tenda kursi	Perbaikan administrasi badan hukum
47		Datahu	Heluma	Berkembang	Depot air, sewa perlengkapan pesta	Perbaikan administrasi badan hukum
48	Sumalata	Bulontio Timur	Anugerah	Tumbuh	Simpan pinjam, pertanian	Berbadan hukum
49		Bulontio Barat	Maju Bersama	Tumbuh	Produksi es batu, pertanian	Nama terverifikasi
50		Buloila	Karya Mandiri	Tumbuh	Saprodi, perdagangan beras	Nama terverifikasi
51		Kasia	Bina Usaha	Tumbuh	Pembelian hasil tani	Nama terverifikasi
52		Kikia	Usaha Bersama	Tumbuh	Agen LPG	Berbadan hukum
53		Tumba	Mandiri Bersama	Tumbuh	Saprodi	Belum daftar nama
54		Mebongo	Ceria Bersatu	Tumbuh	Agen LPG, simpan pinjam	Berbadan hukum
55		Lelato	Usaha Bersama	Tumbuh	Pertanian	Berbadan hukum
56		Pulohenti	Idaman	Tumbuh	Saprodi, *wifi*	Berbadan hukum
57		Puncak Mandiri	Karya Abadi	Tumbuh	Simpan pinjam	Nama terverifikasi
58		Hutokalo	Pentadu	Tumbuh	Pertanian	Berbadan hukum
59	Tolinggula	Tolinggula Tengah	Rajawali	Berkembang	Sewa lapak, sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
60		Tolinggula Pantai	Nyiur Melambai	Tumbuh	Simpan pinjam, sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
61		Tolinggula Ulu	Huyula	Tumbuh	Saprodi, simpan pinjam	Nama terverifikasi
62		Limbato	Mulya	Tumbuh	Saprodi	Belum daftar nama
63		Papualangi	Berkat Bersama	Berkembang	Sewa peralatan pesta, jasa transportasi	Berbadan hukum
64		Molangga	Ceria	Tumbuh	Simpan pinjam, kios desa, sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
65		Cempaka Putih	Sinar Usaha	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Perbaikan nama

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMD	Klasifikasi	Jenis Usaha	Status Usaha
66		Tolite Jaya	Permata	Berkembang	Saprodi, kredit barang elektronik	Nama terverifikasi
67		Ilomangga	Usaha Bersama	Berkembang	Saprodi, agen LPG	Nama terverifikasi
68		Ilotunggulo	Suka Maju	Tumbuh	Sewa tenda kursi, jasa angkutan barang	Nama terverifikasi
69	Gentuma Raya	Gentuma	Mandiri	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
70		Dumolodo	Permata Bunda	Tumbuh	Simpan pinjam	Nama terverifikasi
71		Molonggota	Molonggota Jaya	Tumbuh	Simpan pinjam	Berbadan hukum
72		Ipilo	Ipilo Makmur	Tumbuh	Saprodi, simpan pinjam	Nama terverifikasi
73		Langke	Segghighilang	Tumbuh	Gilingan padi	Nama terverifikasi
74		Pasalae	Mitra Mandiri	Tumbuh	Sewa *sound system*, sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
75		Nanati Jaya	Teratai Jaya	Berkembang	Depot air minum, batako, simpan pinjam, jasa angkutan barang, sewa tenda kursi, BRIlink	Berbadan hukum
76		Ketapang	Sejahtera Mandiri	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
77		Motomingo	Maju Bersama	Berkembang	Sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
78		Durian	Durian Bersatu	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
79		Bohusami	Maju Bersama	Berkembang	Sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
80	Tomolito	Dambalo	Sinar Lestari	Maju	Wisata pantai, simpan pinjam	Nama terverifikasi
81		Milango	Mitra Usaha	Berkembang	Sewa tenda kursi, sewa sound sistem, simpan pinjam, Saprodi	Berbadan hukum
82		Jembatan Merah	Orange Jaya	Tumbuh	Simpan pinjam, peternakan ayam	Belum daftar nama
83		Bubode	Hujula Jaya	Tumbuh	Depot air minum, simpan pinjam, sewa tenda kursi, sewa sound sistem, lampu	Belum daftar nama
84		Leyao	Bank Persada	Tumbuh	Saprodi	Nama terverifikasi
85		Molantadu	Sinar Harapan	Berkembang	Simpan pinjam, Saprodi, jasa internet, sewa bak jemuran	Berbadan hukum
86		Huidu Melito	Helumo	Berkembang	Saprodi	Berbadan hukum
87		Bulango Raya	Sinar Bulango	Tumbuh	Pertanian	Belum daftar nama
88		Tanjung Karang	Iloheluma	Tumbuh	Simpan pinjam, sewa tenda kursi	Berbadan hukum
89		Mutiara Laut	Mutiara	Tumbuh	Saprodi	Nama terverifikasi
90	Ponelo Kepulauan	Ponelo	Bahari	Tumbuh	Taksi perahu, sewa *cottage*	Berbadan hukum
91		Malambe	Cahaya	Tumbuh	Bagan ikan	Nama terverifikasi
92		Otiola	Mandiri	Tumbuh	Depot air minum, gilingan padi, jual beli beras	Nama terverifikasi
93		Tihengo	Pelangi	Berkembang	Bagan ikan, Brilink, agen LPG, sewa tenda kursi	Berbadan hukum
94	Monano	Monano	Tunas Harapan	Tumbuh	Saprodi	Nama terverifikasi
95		Tudi	Harapan Rakyat	Tumbuh	perbengkelan	Nama terverifikasi
96		Monas	Monas Jaya	Tumbuh	Saprodi, *photocopy*, sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
97		Dunu	Mutiara Indah	Tumbuh	Kios nelayan	Nama terverifikasi
98		Garapia	Damai Sejahtera	Tumbuh	Simpan pinjam	Nama terverifikasi
99		Sogu	Sogu Indah	Tumbuh	Kios nelayan	Nama terverifikasi
100		Pilohulata	Pelangi	Tumbuh	Saprodi, meubeller	Nama terverifikasi
101		Mokonowu	Mentari	Berkembang	*Photocopy*, simpan pinjam	Berbadan hukum
102		Tolitehuyu	Usaha Karya	Tumbuh	Saprodi, depot air minum	Nama terverifikasi
103		Zuriyati	Zuriyati Mekar	Tumbuh	Depot air minum	Nama terverifikasi
104	Biau	Biau	Karya Biau Mandiri	Tumbuh	Saprodi, BRIlink	Nama terverifikasi

No.	Kecamatan	Desa	Nama BUMD	Klasifikasi	Jenis Usaha	Status Usaha
105		Omuto	Omuto Karya	Tumbuh	BRIlink, simpan pinjam	Belum daftar nama
106		Luhuto	Dulohupa	Tumbuh	Saprodi	Perbaikan administrasi badan hukum
107		Windu	Huyula	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
108		Topi	Bintang Muda	Tumbuh	Simpan pinjam, Saprodi	Nama terverifikasi
109		Sembihingan	Karya Nyata	Berkembang	Simpan pinjam	Berbadan hukum
110		Didingga	Sinar Damai	Tumbuh	Simpan pinjam, Saprodi	Nama terverifikasi
111		Bualo	Karya Bersama	Tumbuh	Saprodi, simpan pinjam	Nama terverifikasi
112		Potanga	Bumdes Mandiri	Maju	Saprodi	Perbaikan administrasi badan hukum
113		Bohulo	Sinar Harapan	Tumbuh	Saprodi	Nama terverifikasi
114	Sumalata Timur	Deme Satu	Sinar Lestari	Tumbuh	Sewa tenda kursi	Nama terverifikasi
115		Buluwatu	Sinar Usaha	Tumbuh	Sewa tenda kursi, sewa orgen	Berbadan hukum
116		Dulukapa	Tinelo	Tumbuh	*Photocopy,* Saprodi	Berbadan hukum
117		Deme Dua	Sejahtera	Tumbuh	Simpan pinjam	Berbadan Hukum
118		Buladu	Lamahu	Tumbuh	sewa lapak	Berbadan Hukum
119		Hulawa	Amanah	Tumbuh	Saprodi	Nama Terverifikasi
120		Wubudu	Lestari	Tumbuh	Simpan pinjam, jasa internet	Nama terverifikasi
121		Bubalango	Maju Bersama	Berkembang	Saprodi, agen LPG, depot air minum, simpan pinjam	Berbadan hukum
122		Motiheluma	Permata	Tumbuh	Saprodi	Pendaftaran badan hukum
123		Koluwoka	Putih Merah	Tumbuh	Saprodi	Nama terverifikasi

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2023

8. **Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi).

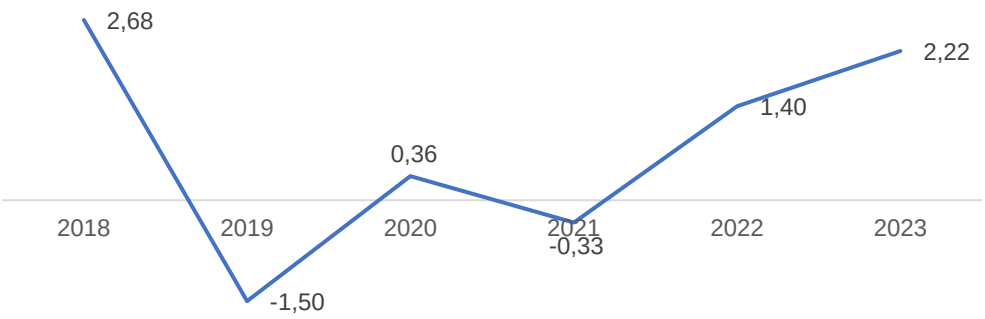
Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan pada umumnya serta merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T, terlalu muda melahirkan (dibawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (diatas usia 35 tahun). Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan

Pembangunan Keluarga, dikatakan bahwa tujuan program KB adalah meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dan perwujudan tujuan tersebut dimulai dengan pembentukan keluarga kecil melalui perencanaan jumlah anak dalam keluarga.

A. Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Gorontalo Utara termasuk daerah yang berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal itu ditunjukkan oleh laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun terakhir yang stabil di kisaran rata-rata 1 persen, bahkan sempat negatif di tahun 2019 dan 2021, sebagaimana ditampilkan Grafik 2.73.

Grafik 2.73
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023



Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibandingkan jumlah keluarga. Angka jumlah anak rata-rata selang tahun 2016-2022 menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam pengendalian jumlah penduduk melalui

keluarga berencana cukup berhasil dan masyarakat pun sudah menyadari manfaat dari adanya keluarga berencana, lebih detail dijabarkan pada Tabel 2.180 berikut ini.

Tabel 2.180
Jumlah Anak dalam Keluarga

No.	Tahun	Jumlah Anak (Orang)	Rasio Anak:Orangtua
1	2016	40.150	1,4
2	2017	42.305	1,5
3	2018	43.365	
4	2019	43.742	
5	2020	40.617	
6	2021	35.876	0,88

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

B. Pasangan Usia Subur dan Cakupan Peserta KB

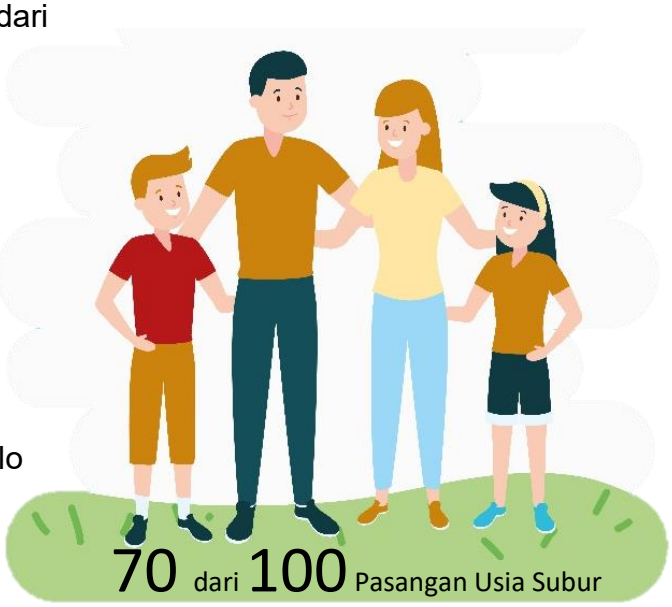
Keluarga berencana dan keluarga sejahtera dicanangkan guna mengetahui tingkat partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Pasangan usia subur adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 hingga 49 tahun. Peserta KB aktif adalah PUS yang saat ini menggunakan salah satu kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Tabel 2.181 berikut menunjukkan komposisi peserta KB di Gorontalo Utara sejak 2015 hingga tahun 2023.

Tabel 2.181
Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif

No.	Indikator	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pasangan Usia Subur (PUS)	22.067	21.973	17.572	19.699	19.345	19.301	19.476	19.149	20.208
2	Peserta KB aktif	17.323	17.679	15.549	15.360	14.259	14.287	15.189	12.978	14.252
3	Cakupan KB aktif				17.352	16.457	15.791	16.604	14.393	14.214
4	Rasio akseptor KB				77,97	73,71	74,02	77,99	67,77	70,52
5	Peserta KB IUD	603	713	517	592	623	614	671	573	579
6	Peserta KB MOP	44	35	29	34	35	27	31	21	17
7	Peserta KB MOW	311	351	312	442	496	497	794	380	365
8	Peserta KB implan	3.902	4.207	3.293	4.106	3.919	3.808	3.846	3.614	3.949
9	Peserta KB suntik	8.028	7.989	6.078	6.700	6.396	19.301	6.150	5.678	6.135
10	Peserta KB pil	4.323	4.269	3.300	3.463	3.064	14.287	3.341	2.653	3.073
11	Peserta KB kondom	112	115	27	23	63	74	138	58	95

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

Cakupan peserta KB aktif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami pasang surut. Penurunan lebih mendominasi dibandingkan dengan kenaikan, yang disebabkan karena ada pasangan yang ingin segera memiliki anak dan sebagian pasangan tidak ingin anak lagi. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), SPM peserta KB aktif sebesar 65 persen dari total pasangan usia subur. Dengan demikian, cakupan di Gorontalo Utara sebenarnya masih masuk dalam kriteria SPM, dengan metode yang paling banyak dipakai oleh masyarakat Gorontalo Utara yakni kontrasepsi pil, implan, dan suntik. Jika ditinjau secara spasial administratif wilayah kecamatan, rincian PUS peserta KB aktif pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.182 berikut.



memakai alat kontrasepsi (2023)

Tabel 2.182
Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB Aktif Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	PUS	PUS Peserta KB Aktif																	
			IUD		MOW		MOP		Kondom		Implan		Suntik		Pil		MAL		Jumlah	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Atinggola	2.037	93	4,57	39	1,91	1	0,05	7	0,34	480	23,56	516	25,33	449	22,04	0	0,00	1.585	77,81
2	Kwandang	4.620	215	4,65	103	2,23	9	0,19	27	0,58	873	18,90	1.438	31,13	594	12,86	0	0,00	3.259	70,54
3	Anggrek	2.928	51	1,74	52	1,78	1	0,03	17	0,58	623	21,28	1.119	38,22	367	12,53	0	0,00	2.230	76,16
4	Sumalata	1.627	33	2,03	32	1,97	1	0,06	16	0,98	429	26,37	437	26,86	287	17,64	0	0,00	1.235	75,91
5	Tolinggula	1.582	10	0,63	21	1,33	0	0,00	4	0,25	321	20,29	416	26,30	217	13,72	0	0,00	989	62,52
6	Gentuma Raya	1.531	52	3,40	21	1,37	2	0,13	0	0,00	234	15,28	540	35,27	148	9,67	0	0,00	997	65,12
7	Tomilito	1.593	46	2,89	36	2,26	2	0,13	13	0,82	239	15,00	379	23,79	357	22,41	0	0,00	1.072	67,29
8	Ponelo Kepulauan	687	10	1,46	18	2,62	0	0,00	1	0,15	85	12,37	292	42,50	115	16,74	0	0,00	521	75,84
9	Monano	1.212	28	2,31	12	0,99	0	0,00	1	0,08	257	21,20	396	32,67	141	11,63	0	0,00	835	68,89
10	Biau	1.140	22	1,93	5	0,44	0	0,00	8	0,70	196	17,19	288	25,26	168	14,74	0	0,00	687	60,26
11	Sumalata Timur	1.251	19	1,52	26	2,08	1	0,08	1	0,08	313	25,02	314	25,10	230	18,39	0	0,00	904	72,26
Jumlah		20.208	579	2,87	365	1,81	17	0,08	95	0,47	4.050	20,04	6.135	30,36	3.073	15,21	0	0,00	14.314	**70,83**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024
IUD : *Intra Uterine device*
MOW : Metode Operatif Wanita
MOP : Metode Operatif Pria
MAL : Metode *Amenore* Laktasi

Dalam hal pengendalian penduduk, terdapat *unmet need*, yaitu kelompok yang belum terpenuhi kebutuhan kontrasepsinya, mencakup semua pria atau wanita usia subur yang sudah menikah atau hidup bersama dan dianggap aktif secara seksual yang tidak menggunakan metode kontrasepsi, baik yang tidak ingin punya anak lagi ataupun menunda kelahiran berikutnya. *Unmet need* merupakan permasalahan multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses pelayanan. Secara umum, *unmet need* banyak terjadi pada wanita yang menghadapi hambatan keuangan, pendidikan, geografis, dan sosial. Pada tahun 2023, jumlahnya menjadi 2.107 dengan angka *unmet need* mencapai 10,43 persen. Capaian tersebut sangat tinggi jika dibandingkan dengan target BKKBN di angka hanya 8 persen, sehingga di masa mendatang akan menekan pencapaian pengendalian penduduk atau upaya pengurangan stunting. Rincian data per kecamatan *unmet need* ditampilkan pada Tabel 2.183.

Tabel 2.183
Unmet Need Tahun 2023

No.	Kecamatan	PUS	PUS Peserta KB Aktif		PUS Bukan Peserta KB										*Unmet Need*	
					Hamil		IAS		IAT		TIAL		Jumlah		IAT & TIAL	%
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
1	Atinggola	2.037	1.576	77,37			7	0,34	40	1,96	78	3,83	125	6,14	118	5,79
2	Kwandang	4.620	3.273	70,84			17	0,37	143	3,10	333	7,21	493	10,67	476	10,30
3	Anggrek	2.928	2.216	75,68			8	0,27	33	1,13	165	5,64	206	7,04	198	6,76
4	Sumalata	1.627	1.231	75,66			4	0,25	29	1,78	107	6,58	140	8,60	136	8,36
5	Tolinggula	1.582	983	62,14			8	0,51	67	4,24	211	13,34	286	18,08	278	17,57
6	Gentuma Raya	1.531	997	65,12			8	0,52	57	3,72	227	14,83	292	19,07	284	18,55
7	Tomolito	1.593	1.071	67,23			7	0,44	63	3,95	157	9,86	227	14,25	220	13,81
8	Ponelo Kepulauan	687	521	75,84			1	0,15	15	2,18	34	4,95	50	7,28	49	7,13
9	Monano	1.212	853	70,38			4	0,33	20	1,65	76	6,27	100	8,25	96	7,92
10	Biau	1.140	681	59,74			8	0,70	43	3,77	125	10,96	176	15,44	168	14,74
11	Sumalata Timur	1.251	912	72,90			1	0,08	31	2,48	53	4,24	85	6,79	84	6,71
Jumlah		**20.208**	**14.314**	**70,83**			**73**	**0,36**	**541**	**2,68**	**1.566**	**7,75**	**2.180**	**10,79**	**2.107**	**10,43**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2024

IAS : Ingin Anak Segera
IAT : Ingin Anak Ditunda
TIAL : Tidak Ingin Anak Lagi

9. Urusan Perhubungan

Transportasi darat dan laut merupakan penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Gorontalo Utara. Kinerja penyelenggaraan perhubungan darat dapat dilihat dari indikator tingkat ketersediaan sarana, prasarana perhubungan darat dan fasilitas perlengkapan jalan. Pada transportasi yang memanfaatkan moda darat, mayoritas masyarakat memanfaatkan moda angkutan umum atau kendaraan pribadi. Selain itu, guna memastikan keselamatan berkendara dan berlalu lintas, dilakukan serangkaian pemasangan rambu-rambu di sepanjang jalan utama, yang berupa perintah, larangan, atau petunjuk atau isyarat serta dilengkapi sarana penunjang keselamatan seperti *guardreel*, marka jalan, lampu penerangan jalan, dan sebagainya.

A. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Menurut Buku Informasi Statistik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Menurut perhitungan tersebut, berarti 1 Kilometer jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan di sini terdiri dari mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten/jalan kota. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan. Jumlah panjang jalan seluruhnya akan dibagi dengan jumlah kendaraan yang ada untuk mencari seberapa besar rasionya.

Tabel 2.184
Jumlah Kendaraan Menurut Jenisnya

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tahun	
		2021 (Unit)	2022 (Unit)
1	Sedan	7	7
2	*Station Wagon*		
3	Jip	38	40
4	Bus		
5	Bus mikro	13	9
6	Bus mini	1.391	1.465
7	Bus sedang		
8	Mikrolet		
9	Oplet		
10	Truk	145	140
11	Tanki		9
12	Truk boks		4
13	Truk sampah	38	60
14	*Pick-up*	1.077	1.070
15	Boks *wagon*		79
16	*Double cabin*	6	4
17	Alat berat		
18	Ambulan	12	16
19	Pemadam api	1	1
20	Sepeda motor	9.245	9.684
21	Skuter		
22	Roda 3 dan bentor	69	94
Jumlah		12.042	12.682

Data merupakan jumlah kendaraan yang aktif membayar BBN-KB/PKB
Sumber: Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Gorontalo, diolah

Sedangkan panjang jalan yang ada di Gorontalo Utara, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten tidak ada perubahan data selama 3 tahun terakhir, dengan masing-masing sepanjang 227,36 Kilometer : 54,42 Kilometer : 521,12 Kilometer. Dengan kondisi demikian, rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang terbentuk sebesar 1 : 16, yang berarti setiap kilometer jalan yang ada diisi oleh rata-rata 16 kendaraan berbagai jenis.

B. Uji Berkala KIR

Jumlah angkutan umum yang meningkat disebabkan peningkatan kualitas jalan di kecamatan yang jauh dari pusat kabupaten. Sejak tahun 2016 hingga 2020 awal, pelaksanaan uji KIR/berkala dilakukan di Kabupaten Gorontalo dikarenakan alat uji yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara belum terkalibrasi. Pada tahun 2020 akhir, uji KIR bisa kembali dilakukan di Gorontalo Utara. Tabel 2.185 menyajikan data kendaraan yang wajib uji delapan tahun terakhir.

Tabel 2.185
Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)

No.	Jenis Kendaraan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kanjen IV	0	0	0	0	0	0	0
2	Penumpang umum	1		9	6	2	0	0
3	Mobil barang	160	217	317	118	117	100	94
4	Mobil bus	0	0	0	0	3	2	0
5	Kendaraan khusus	0	0	0	0	0	0	0
Total		161	217	326	124	122	102	94

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat mencolok pada mobil barang jenis pick-up dikarenakan kebijakan pembatasan aktivitas selama pandemi. Hal yang penting juga yaitu keterjangkauan biaya uji KIR. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021, biaya uji KIR bagi setiap jenis kendaraan yaitu:

- Mobil barang (per kendaraan/6 bulan)
  - Mobil Barang JBB 0 s.d. JBB 5.000 Kg Rp102.000,00
  - Mobil Barang JBB 5.000 s.d. JBB 8.250 Kg Rp107.500,00
  - Mobil Barang JBB 8.250 s.d. JBB 15.000 Kg Rp112.500,00
  - Mobil Barang JBB 15.000 Kg ke atas Rp117.500,00
- Mobil bus (per kendaraan/6 bulan) Rp102.000,00
- Kendaraan khusus (per kendaraan/6 bulan) Rp82.500,00
- Kereta tempelan/gandengan (per kendaraan/6 bulan) Rp83.000,00
- Mobil penumpang umum Rp97.500,00

Selama tujuh tahun terakhir, baru sedikit angkutan umum yang melakukan uji KIR, sebagaimana Tabel 2.186.

Tabel 2.186
Uji KIR Angkutan Umum

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah uji KIR angkutan umum	1	0	9	6	5	0	0

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

C. Tambatan Perahu dan Layanan Bus Sekolah

Tabel 2.187 berikut menggambarkan jumlah pembangunan tambatan perahu yang telah dilaksanakan selang tahun 2015-2023 dan bus sekolah yang beroperasi hingga tahun 2023 di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.187
Pembangunan Tambatan Perahu dan Bus Gratis

No.	Uraian	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bus sekolah	4	4	4	4	4	7	8	8	
2	Tambatan perahu	-	-	2	1	1	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan, 2024

Tambatan perahu selama empat tahun terakhir tidak bisa dilaksanakan karena fiskal belum memenuhi, namun karena kebutuhan yang tinggi dan didorong komersialisasi Pelabuhan Anggrek pada tahun 2022, pembangunan tambatan perahu di beberapa lokasi desa, khususnya di sekeliling Pelabuhan Anggrek menjadi krusial, contohnya di Desa Tolango.

Bus sekolah mengalami peningkatan di tahun 2022, demi tercapainya tujuan Kabupaten Gorontalo Utara yang Cerdas. Rute armada yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu: 1) Gentuma - Atinggola (1 Unit); 2) Papualangi - Tolinggula Pantai (1 Unit); 3) Tomilito - Kwandang (1 Unit); 4) Sembihingan - Biau (1 unit); (5) Masih belum memiliki trayek (1 Unit); 5) Monano - Anggrek (1 Unit). Dari 8 unit yang ada, 2 unit masih belum bisa beroperasi karena rusak.

D. Jumlah Pelabuhan Laut

Keberadaan hub-hub transportasi menjadi penting dalam penyelenggaraan serta pengelolaan pembangunan. Kegiatan distribusi barang dan jasa secara langsung berdampak kepada pemerataan ekonomi daerah. Transportasi publik diperlukan sebagai salah satu pilihan moda yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pelayanan transportasi massal yang baik dapat menciptakan perpindahan barang dan manusia secara lebih efektif dan efisien. Berdasarkan data statistik, terdapat empat pelabuhan penyeberangan di Gorontalo Utara, yaitu Pelabuhan barang/peti kemas Anggrek, Pelabuhan penyeberangan orang/Nusantara Kwandang, Pelabuhan Pendaratan Ikan Kwandang, serta Pelabuhan Pendaratan Ikan Gentuma. Seiring tahun, pelabuhan-pelabuhan tersebut semakin vital perannya, bukan hanya bagi Gorontalo Utara, namun juga untuk Provinsi Gorontalo.

4

Pelabuhan yang beroperasi di Gorontalo Utara



Letak Kabupaten Gorontalo Utara yang berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) II membuat keberadaan hub transportasi di laut menjadi sangat penting untuk dikelola dan dikembangkan oleh pemerintah daerah. Setelah Pelabuhan Anggrek menerima komitmen pendanaan kreatif non APBN berskema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebesar 1,4 Triliun rupiah, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Gorontalo dan kawasan sekitarnya serta meningkatkan daya saing Indonesia. Rincian intensitas kunjungan kapal dan *volume* bongkar muat barang di Pelabuhan Anggrek serta aktivitas penyeberangan manusia di Pelabuhan Kwandang sebagaimana data pada Tabel 2.188 hingga 2.191 berikut.

Tabel 2.188
Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2022

Bulan	Kapal Masuk	GT	Kapal Berangkat	GT	Barang Bongkar (MT/^{3})	Barang Muat (MT/^{3})	Kontainer Bongkar (Teuz)	Kontainer Muat (Teuz)	Barang Impor (MT/^{3})	Barang Ekspor (MT/^{3})
Januari	23	119.589	19	101.649	45.311	27.438	1.085	1.294	1.615	12.000
Februari	25	116.427	21	101.549	53.720	34.660	1.433	1.285	24.322	331
Maret	19	104.593	18	103.561	33.877	51.982	1.785	1.639	-	-
April	18	10.309	14	2.529	31.551	47.660	1.896	1.989	1.400	-
Mei	12	67.860	10	61.038	15.104	28.847	1.036	1.104	-	-
Juni	19	113.580	19	113.580	41.701	37.678	1.578	1.673	1.516	-
Juli	13	94.452	12	93.420	17.191	28.464	991	1.228	-	-
Agustus	13	83.033	13	83.033	12.772	21.551	1.267	893	-	12.200
September	23	123.462	16	123.462	39.807	42.793	1.930	1.761	1.482	6.100
Oktober	22	133.038	19	125.678	29.508	27.826	1.148	1.344	26.750	-
November	23	121.610	19	117.331	32.080	21.681	811	1.281	1.400	29.007
Desember	15	114.581	14	111.513	16.003	15.078	880	744	22.000	13.200
JUMLAH	**225**	**1.202.534**	**194**	**1.138.343**	**368.625**	**385.658**	**15.840**	**16.235**	**80.485**	**72.838**

Sumber: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Anggrek, 2023

Tabel 2.189
Volume Bongkar Muat Pelabuhan Anggrek Tahun 2023

Bulan	Kapal Masuk	GT	Kapal Berangkat	GT	Barang Bongkar (MT/^{3})	Barang Muat (MT/^{3})	Kontainer Bongkar (Teuz)	Kontainer Muat (Teuz)	Barang Impor (MT/^{3})	Barang Ekspor (MT/^{3})
Januari	23	119.589	19	101.649	45.311	27.438	1.085	1.294	1.615	12.000
Februari	25	116.427	21	101.549	53.720	34.660	1.433	1.285	24.322	331
Maret	19	104.593	18	103.561	33.877	51.982	1.785	1.639	-	-
April	18	10.309	14	92.529	31.551	47.660	1.896	1.989	1.400	-
Mei	12	67.860	9	51.658	15.104	28.847	1.036	1.104	-	-
Juni	19	113.580	13	95.447	41.701	37.678	1.578	1.673	1.516	-
Juli	13	94.452	12	93.420	17.191	28.464	991	1.228	-	-
Agustus	13	83.033	12	81.964	12.772	21.551	1.267	893	-	12.200
September	23	123.462	16	104.760	39.807	42.793	1.930	1.761	1.482	6.100
Oktober	22	133.038	19	125.660	31.508	26.807	1.148	1.344	-	26.750
November	23	121.610	19	117.331	32.080	21.681	811	1.281	1.400	29.007
Desember	15	114.581	13	111.513	16.003	15.078	880	744	22.000	13.200
JUMLAH	**225**	**1.302.534**	**185**	**1.181.041**	**370.625**	**384.639**	**15.840**	**16.235**	**53.735**	**99.588**

Sumber: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Anggrek, 2024

Tabel 2.190
Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2022

Bulan	Kapal Tiba	GT	Kapal Berangkat	GT	Penumpang Turun	Penumpang Naik	Barang Bongkar (Ton)	Barang Muat (Ton)
Januari	17	30.367	19	33.212	45	117	53.875	860,7
Februari	13	20.600	15	25.386	26	52	30.000,12	70,1
Maret	10	13.635	13	18.494	-	34	25.000,1	87
April	14	21.938	15	23.196	63	43	25.200,34	70,86
Mei	10	17.981	12	20.826	67	254	31,05	76,5
Juni	14	24.056	14	24.056	110	116	30.020	103,8
Juli	16	27.725	16	27.725	73	131	40.003	41.725
Agustus	12	25.690	16	32.024	81	95	40.011,16	122,5
September	12	27.816	14	34.019	58	49	40.004,30	55,33
Oktober	10	22.854	13	29.052	55	60	30.016,39	5,55
November	9	16.605	10	17.863	47	91	20.100,5	0,1
Desember	11	23.229	13	27.840	78	73	37.121,43	1,6
JUMLAH	**148**	**272.496**	**170**	**313.693**	**703**	**1.115**	**407.401**	**1.495,77**

Sumber: UPP Kelas III Kwandang, 2023

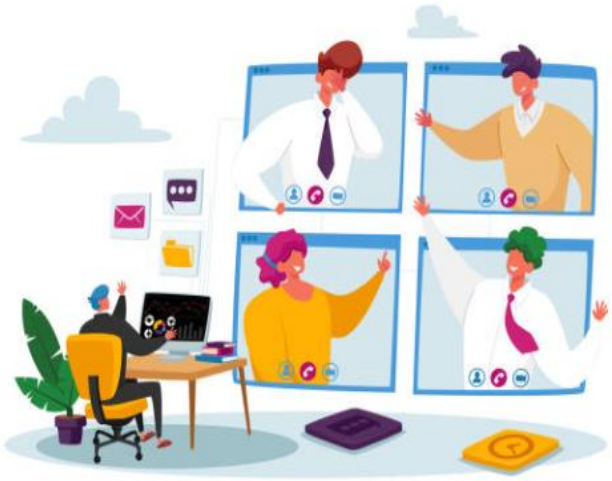
Tabel 2.191
Volume Bongkar Muat Barang dan Naik Turun Penumpang Pelabuhan Kwandang Tahun 2023

No.	Bulan	*Call*	Kegiatan							
			Tiba/Bongkar				Berangkat/Muat			
			Jenis Kemasan				Jenis Kemasan			
			Batubara (MT)	*General Cargo* (Ton)	Hewan (Ekor)	Pmp. Turun (Orang)	Batu Split (M^3)	*General Cargo* (Ton)	Hewan (Ekor)	Pmp. Naik (Orang)
1	Januari	12	30.000,29	14,63		44	4.782,67	-	120	150
2	Februari	14	20.000,52	16,12		69	-	8,5	199	64
3	Maret	14	39.135,64	2		9	-	3	155	33
4	April	12	29.100,17	0,6		41	-	9,1	-	83
5	Mei	21	40.000,69	4,2		83	4.774,54	4,08	384	213
6	Juni	18	29.100,26	2,06		106	-	2,55	1.332	163
7	Juli	23	40.000,59	4,58		136	-	6,4	122	239
8	Agustus	19	30.000,95	10,08		96	4.821,50	1,55	486	105
9	September	16	28.200,00	21,5		63	4.765,05	8,9	-	103
10	Oktober	15	30.000,00	12,5		69	3.289,75	105,58	207	98
11	November	19	38.111,00	12,5		108	4.739,82	15,42	-	132
12	Desember	26	70.811,18	3,16		89	-	98,20	288	86
JUMLAH		**209**	**424.461,30**	**103,93**	**-**	**913**	**27.173,33**	**263,28**	**3.293**	**1.469**

Sumber: UPP Kelas III Kwandang, 2024

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Sarana/prasarana komunikasi dan informatika saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik mengenai cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, maupun hal lainnya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dilakukan dengan cara yang baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, dan efektif. Kemudian, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi *digital, mobile, virtual* serta *personal*, dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.



A. Sistem Elektronik Pemerintah

Rangkaian pelaksanaan urusan teknologi dan informatika di Gorontalo Utara digunakan untuk mendorong tercapainya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang lebih dikenal dengan *e-government*, yang diharapkan berdampak pada integrasi sistem. Di domain teknologi dan informasi, SPBE idealnya meliputi penyediaan pusat data terpadu, jaringan intra pemerintah, sistem penghubung layanan pemerintah, aplikasi layanan SPBE serta keamanan informasi pemerintah. Implementasi SPBE yang terpadu ini bertujuan untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Pelaksanaan kinerja SPBE dinilai dalam suatu indeks bernama Indeks Maturitas SPBE, adalah nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan, yang merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain (kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE dan layanan SPBE) dan bobot domain.

Tabel 2.192
Indeks SPBE

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Indeks SPBE	1,55	1,55	1,55	2,64
2	Predikat	Rendah	Rendah	Rendah	Baik

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Capaian tahun 2023 yang naik drastis dibandingkan tahun 2022 dan sebelumnya, ditopang oleh tingginya capaian pada komponen-komponen indeks yang sebelumnya bernilai sangat rendah, seperti tata kelola dan layanan SPBE. Rincian perbandingan nilai per komponen indeks SPBE tahun 2022 dan 2023 diuraikan pada Tabel 2.193.

Tabel 2.193
Komponen Indeks SPBE

No.	Komponen Indeks SPBE	Tahun	
		2022	2023
1	Domain Kebijakan	3,00	3,00
2	Domain Tata Kelola	1,30	2,30
3	Domain Manajemen	1,00	1,36
4	Domain Layanan	1,46	3,19

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Meski sudah berkategori “Baik” di 2023 bersama 3 daerah lainnya di Provinsi Gorontalo, tingkat kematangan pelayanan sistem pemerintahan berbasis elektronik terdapat hasil yang bervariatif. Masih ada 8 indikator yang mendapatkan skor 1, yang tingkat kematangannya masih berupa informasi yang searah, namun jauh lebih baik dibandingkan 31 indikator di tahun sebelumnya. Rincian nilai tingkat kematangan indikator-indikator tersebut disajikan pada Tabel 2.194.

Tabel 2.194
Tingkat Kematangan Indikator Indeks SPBE Tahun 2023*

No.	Indikator	Level
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3

No.	Indikator	Level
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	2
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	3
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	3
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	2
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3

Sumber: Versi Penilaian Mandiri Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024
*Versi penilaian mandiri

B. Cakupan Layanan Telekomunikasi

Perkembangan jaringan komunikasi di Kabupaten Gorontalo Utara relatif menurun setelah tahun 2014, karena jaringan komunikasi *mobile* PLIK, MPLIK (Mobil Pelayanan Internet Kecamatan), sudah tidak berfungsi lagi karena alasan anggaran pemeliharaan. Namun untuk fasilitas jaringan *Base Transceiver Station* (BTS) mulai mengalami peningkatan sebagaimana data pada Tabel 2.195 berikut.

Tabel 2.195
Cakupan Jaringan Komunikasi

No.	Jenis Jaringan Komunikasi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	PLIK (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Telkom (Unit)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	MPLIK (Unit)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tower/BTS (unit)	23	24	36	36	36	36	36	36	36
5	Jaringan internet (di kecamatan)	11	11	11	11	11	11	11	11	11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Fasilitas pendukung kecepatan informasi dan telekomunikasi didukung oleh ketersediaan BTS/*tower* pemancar, yang saat ini terdapat 36 *tower* (42 *tower* jika termasuk BTS Bakti Kemenkominfo) yang beroperasi di seluruh wilayah Gorontalo Utara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.196
Tower Pemancar Seluler Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Tower						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tolinggula	2	2	2	2	2	3	3
2	Biau	1	1	1	1	1	1	1
3	Sumalata	3	3	3	3	3	3	3
4	Sumalata Timur	3	3	3	3	3	3	3
5	Monano	2	2	2	2	2	2	2
6	Anggrek	5	5	5	5	5	7	7
7	Kwandang	9	9	9	9	9	12	12
8	Tomilito	6	6	6	6	6	7	7
9	Ponelo Kepulauan	-	-	-	-	-	-	-
10	Gentuma Raya	3	3	3	3	3	3	3
11	Atinggola	2	2	2	2	2	3	3
Jumlah		**36**	**36**	**36**	**36**	**36**	**42**	**42**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

Terdapat beberapa stasiun siaran televisi nasional yang salurannya dapat ditangkap di Kabupaten Gorontalo Utara melalui antena parabola atau *3rd party provider* yaitu metro TV, TV ONE, SCTV, TVRI, RCTI, INDOSIAR, NET TV, ANTV, dan media TV nasional lainnya. Selain itu, sosialisasi yang gencar dari pemerintah terhadap migrasi saluran televisi dari analog ke digital telah berhasil meningkatkan kualitas tangkapan siaran di rumah-rumah masyarakat. Sedangkan untuk stasiun radio lokal yang salurannya dapat ditangkap melalui antena diantaranya RRI dan Poliyama FM.

Selain media elektronik, informasi juga disebarkan melalui media cetak/surat kabar. Contoh surat kabar yang beredar di wilayah Gorontalo Utara seperti “Gorontalo Pos” dan Harian “Rakyat Gorontalo”. Seluruh

media tersebut berjasa memberikan informasi yang terjadi di dalam dan luar negeri sehingga masyarakat dapat memilih dengan bijak informasi yang dibutuhkan untuk keperluan informasi baik bisnis maupun sosial.

C. Aplikasi Layanan Publik

Penyediaan infrastruktur TIK ditujukan antara lain untuk memastikan penuntasan dan pemanfaatan infrastruktur TIK serta fasilitas pendukung transformasi digital di seluruh pelosok Indonesia. Teknologi informasi bisa digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, serta dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat sangat memerlukan keterlibatan berbagai unsur seperti pemerintah, kalangan pengusaha, maupun masyarakat. Dikarenakan masih banyak terdapat layanan perizinan dan non perizinan yang belum berbasis TIK, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara terus mengupayakan untuk membangun aplikasi guna meningkatkan jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang berbasis TIK. Berikut gambaran tahunan ketersediaan aplikasi layanan publik yang ada di Gorontalo Utara.

Tabel 2.197
Aplikasi Layanan Publik

No.	Uraian	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aplikasi non perizinan	-	87	120	127	127	150	156
2	Aplikasi perizinan	-	2	2	2	2	3	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2024

D. *Website* Milik Pemerintah Daerah dan *Free Hotspot*

Keberadaan *website* milik pemerintah daerah menjadi suatu keniscayaan sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan bagi internal dan eksternal. Laju kinerja pembangunan daerah yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika dapat ditinjau dari ketersediaan *website* milik pemerintah daerah yang berfungsi sebagai media penyebarluasan informasi penyelenggaraan pembangunan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, yang dapat diakses di www.gorutkab.go.id.

Fasilitas akses internet/*free hotspot* menjadi tren terkini. Namun, fasilitas *hotspot* gratis yang disediakan pemerintah sejak tahun 2020 hingga saat ini masih terbatas hanya ada di 1 lokasi. Sedangkan fasilitas yang disediakan penyedia swasta/pribadi, khususnya di tempat-tempat berkumpul generasi milenial, bertebaran di berbagai titik di wilayah Gorontalo Utara, seperti pada warung kopi dan tempat anak muda berkumpul lainnya. Terlihat dari terus meningkatnya rasio ketersediaan titik yang memiliki akses internet per 1.000 penduduk seperti pada Tabel 2.198 berikut.

Tabel 2.198
Rasio Akses Internet Publik terhadap Penduduk

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Akses internet	0,02	0,03	0,10	0,15	0,30	0,40	0,45	0,50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2023

E. Penggunaan Teknologi Informasi

Kemajuan suatu masyarakat tercermin dari sejauh mana masyarakatnya dapat mengakses/mengadopsi teknologi informasi. Akses masyarakat tersebut digambarkan oleh penggunaan telepon seluler atau komputer yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan atau hiburan, serta tingkat akses terhadap layanan/jaringan internet.

Di Gorontalo Utara, secara umum penggunaan ponsel/komputer termasuk tinggi, dengan tingkat adopsi oleh jenis kelamin laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Sebaliknya pada akses internet, meskipun secara gender setara, terhitung masih rendah. Kemampuan ekonomi pun berperan penting, dengan secara umum masyarakat dengan tingkat pengeluaran 20 persen tertinggi lebih tinggi *share*-nya dibandingkan kelompok pengeluaran lainnya. Sebagai tambahan, tingkat pendidikan pun secara umum memiliki korelasi positif terhadap tingkat penggunaan ponsel/komputer dan akses internet, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula penggunaan ponsel/komputer dan akses internet. Rincian informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.199.

Tabel 2.199
Persentase Anggota Rumah Tangga Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Penggunaan Teknologi Informasi 3 Bulan terakhir

No.	Karakteristik	Menggunakan Ponsel/Komputer			Akses Internet		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	**Jenis Kelamin KRT**						
1.a	Laki-laki	85,24	86,79	82,22	49,93	56,57	56,88
1.b	Perempuan	82,01	83,48	79,28	50,57	53,97	54,61
2	**Kuintil Pengeluaran**						
2.a	40 persen terbawah	81,20	77,66	73,10	42,22	46,61	48,17
2.b	40 persen tengah	84,03	90,72	85,56	48,64	57,19	58,90
2.c	20 persen teratas	93,74	95,05	92,21	66,51	73,21	68,91
3	**Pendidikan Tertinggi ART**						
3.a	SD ke Bawah	82,33	84,47	73,79	42,17	49,43	42,12
3.b	SMP ke Atas	91,53	91,32	95,70	68,98	72,20	80,94
Gorontalo Utara		85,01	86,56	82,04	49,97	56,39	56,74

Sumber: Susenas (BPS), diolah

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Usaha kecil dan usaha menengah serta koperasi memiliki perbedaan yang cukup mencolok, dimana perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;
2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan; dan
3. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip usaha.

Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memajukan kuantitas dan kualitas koperasi lebih berdaya saing melalui pengembangan koperasi dan UMKM yang menjadi prioritas pembangunan di hampir setiap tahunnya melalui penguatan kembali kelembagaan, revitalisasi peran koperasi sebagai penyangga perekonomian rakyat, serta peningkatan kemampuan mereka dalam akses pasar dan permodalan.

A. Pertumbuhan Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha yang berguna dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan. Jumlah koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara cenderung meningkat secara stabil dan positif. Kebijakan pemerintah pusat yang mengeluarkan kebijakan tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang juga dibantu fasilitasinya oleh Pemerintah Daerah (sosialisasi) turut mendorong tumbuhnya jumlah koperasi. Perlu diperhatikan penyebaran jenis koperasi pada suatu wilayah dengan pola persebaran mengikuti karakteristik wilayah yang berkaitan dengan lokasi dan rencana tata ruang wilayah secara komprehensif, berpengaruh terhadap tingkat perkembangan koperasi dan perekonomian masyarakat. Tabel 2.200 berikut menggambarkan perkembangan jumlah koperasi dan pertumbuhan tahunannya.

2,65%

Rata-rata pertumbuhan koperasi 9 tahun terakhir



Tabel 2.200
Pertumbuhan Koperasi

Tahun	Jumlah Koperasi	Pertumbuhan
2015	106	
2016	109	2,83%
2017	113	3,67%
2018	115	1,77%
2019	119	3,48%
2020	121	1,68%
2021	126	4,13%
2022	130	3,17%
2023	134	3,08%

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2024

B. Koperasi Aktif

Persentase koperasi aktif menunjukkan kinerja eksistensi, layanan, dan produktivitas koperasi. Semakin banyak koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan, dan menurunnya jumlah pengangguran. Peran koperasi ini salah satunya melalui pemberian pinjaman modal dengan bunga kecil kepada pelaku UMKM. Oleh karena itu, keberadaan koperasi, terutama simpan pinjam sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Persentase koperasi aktif menggunakan formulasi banyaknya koperasi aktif dibandingkan jumlah total koperasi. Sebuah koperasi dikatakan sebagai koperasi aktif apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki kantor;
2. Kegiatan koperasi masih berjalan; dan
3. Anggota kepengurusan masih lengkap dan sesuai dengan peraturan.

Tabel 2.201 berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai koperasi aktif di Gorontalo Utara tahun 2015 sampai dengan 2023.

Tabel 2.201
Koperasi Aktif

Tahun	Total Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif
2015	106	66	65,35
2016	109	63	63,35
2017	113	63	55,75
2018	115	65	57,35
2019	119	68	57,17
2020	121	80	66,12
2021	126	86	68,25
2022	130	90	69,23
2023	134	94	70,15

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2024

Dari 90 koperasi aktif di tahun 2022, 15 koperasi diantaranya telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun tersebut, berkurang 2 koperasi dibandingkan tahun sebelumnya. Setahun berikutnya justru hanya 13 koperasi yang melaksanakan RAT.

Tabel 2.202
Jumlah Koperasi Per Kecamatan

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tolinggula	8	8	8	8	8
2	Biau	4	4	4	4	4
3	Sumalata	9	9	9	9	9
4	Sumalata Timur	10	10	13	14	15
5	Monano	8	8	8	8	8
6	Anggrek	12	12	12	12	13
7	Kwandang	37	40	40	41	44
8	Ponelo Kepulauan	4	4	4	4	4
9	Tomilito	4	4	4	4	4
10	Gentuma Raya	8	8	9	11	12
11	Atinggola	15	15	15	15	14
Jumlah		**119**	**122**	**126**	**130**	**135**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2024

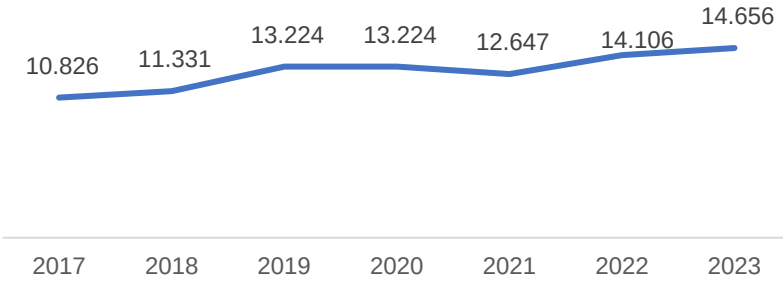
Tabel 2.203
Koperasi Menurut Jenis Per Kecamatan Tahun 2022

No.	Kecamatan	KUD	KSP	KSU	Lainnya	Jumlah
1	Tolinggula	1	-	2	5	8
2	Biau	-	1	2	1	4
3	Sumalata	1	1	1	6	9
4	Sumalata Timur	-	-	9	5	14
5	Monano	1	2	2	3	8
6	Anggrek	-	-	4	8	12
7	Kwandang	1	6	12	22	41
8	Ponelo Kepulauan	-	-	3	1	4
9	Tomilito	1	-	1	2	4
10	Gentuma Raya	1	-	1	9	11
11	Atinggola	-	3	5	7	15
Jumlah		**6**	**13**	**42**	**69**	**130**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2023

Sementara itu, gambaran kinerja koperasi dapat dilihat dari volume usaha koperasi yang digambarkan sebagai berikut.

Grafik 2.74
Volume Usaha Koperasi (Jutaan Rupiah)



Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2024

Secara umum, tren volume usaha koperasi terus meningkat seiring meningkatnya jumlah koperasi, yang menunjukkan bahwa koperasi masih dapat tumbuh meskipun perekonomian Gorontalo Utara sempat mengalami *downturn* pasca wabah Covid-19.

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Selain koperasi, usaha mikro dan kecil merupakan potensi ekonomi yang besar dan mempunyai peranan penting, karena memiliki daya serap terhadap angka pengangguran. Krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda Indonesia memberi pengalaman penting bahwa justru usaha kecil dan menengah adalah sektor yang mampu bertahan terhadap guncangan dan memberikan ketahanan ekonomi saat usaha-usaha besar mengalami kesulitan. Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Keberadaan UMKM dan koperasi merupakan potensi yang wajib dikembangkan dan perlu didorong agar memiliki peningkatan kapasitas. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah:

1. Usaha Mikro

   Kriteria kelompok Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

2. Usaha Kecil

   Kriteria Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

3. Usaha menengah

   Kriteria Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Jumlah Usaha Kecil Mikro dan Menengah setiap tahun mengalami peningkatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.204 berikut.

Tabel 2.204
Usaha Mikro, Kecil, Menengah

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tolinggula	205	402	405	395	506
2	Biau	144	144	153	148	245
3	Sumalata	144	493	501	491	508
4	Sumalata Timur	292	383	410	403	587
5	Monano	196	739	382	377	377
6	Anggrek	635	635	706	701	1.047
7	Kwandang	943	1.246	1.715	1.705	1.705
8	Ponelo Kepulauan	163	191	213	208	208
9	Tomilito	164	290	322	317	317
10	Gentuma Raya	172	242	303	298	298
11	Atinggola	537	537	661	651	651
Jumlah		**3.720**	**5.302**	**5.771**	**5.694**	**6.449**

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.204, terlihat bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan 8,85 persen dibandingkan setahun sebelumnya dan 42,53 persen di tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut disinyalir turut disumbangkan berkurangnya lapangan kerja formal selama masa pandemi, terbukti perubahan usaha mikro sangat signifikan. Sedangkan pada tahun 2023, peningkatan drastis 13,26 persen dengan peningkatan terbesar di Kecamatan Anggrek. Secara lebih detail, jumlah UMKM tahun 2021-2023 ditampilkan pada Tabel 2.205.

Tabel 2.205
UMKM Menurut Jenis dan Kecamatan Tahun 2021-2023

Kecamatan		Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023			
		Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah	Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Atinggola	609	46	6	661	599	46	6	651	599	46	6	651
2	Gentuma Raya	279	22	2	303	274	22	2	298	274	22	2	298
3	Tomilito	322	0	0	322	317	0	0	317	317	0	0	317
4	Kwandang	1.666	39	10	1.715	1.656	39	10	1.705	1.656	39	10	1.705
5	Ponelo Kepulauan	213	0	0	213	208	0	0	208	208	0	0	208
6	Anggrek	698	8	0	706	693	8	0	701	1.039	8	0	1.047
7	Monano	375	7	0	382	370	7	0	377	370	7	0	377
8	Sumalata Timur	410	0	0	410	403	0	0	403	587	0	0	587
9	Sumalata	450	51	0	501	440	51	0	491	457	51	0	508
10	Biau	151	2	0	153	146	2	0	148	243	2	0	245
11	Tolinggula	365	38	2	405	355	38	2	395	466	38	2	506
Gorontalo Utara		**5.538**	**213**	**20**	**5.771**	**5.461**	**213**	**20**	**5.694**	**6.216**	**213**	**20**	**6.449**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2024

Peningkatan jumlah usaha tersebut diamini sangat berpengaruh terhadap pemberian bantuan, baik bantuan langsung tunai maupun barang yang berasal dari anggaran pemerintah pusat, provinsi maupun dari pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, terutama terhadap mikro kecil. Dalam proses perkembangan UMKM dan koperasi di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat beberapa hambatan: (a) Masih banyak rentenir yang berkedok koperasi; (b) Masih banyak koperasi dalam menjalankan aktivitas yang tidak sejalan dengan jati diri, prinsip, dan azaz sebuah organisasi koperasi; dan (c) Masih kurangnya akses permodalan.

12. Urusan Penanaman Modal

Fokus dalam urusan penanaman modal yaitu pertumbuhan investasi, yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah atau negara. Melalui investasi, akan tersedia lapangan kerja dan berbagai sarana produksi yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengingat peran investasi yang begitu penting, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terus berupaya menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif guna menarik minat investor, karena daerah ini memiliki potensi untuk tumbuh dijadikan tempat menanam modal. Wilayah yang belum banyak teroptimalkan sehingga peluang untuk berinvestasi jangka panjang sangat terbuka lebar, khususnya peluang untuk membuka destinasi wisata, serta pengembangan sektor primer.

Sebagian instansi Pemerintah Pusat diproyeksikan akan mulai berkantor di Ibukota Negara (IKN) pada tahun 2024. Gorontalo Utara dapat menangkap peluang untuk menjadi salah satu daerah yang berperan dalam pembangunannya. Selain sebagai penyangga bagi ketersediaan pangan, tenaga kerja, dan material bahan bangunan; Gorontalo Utara juga dapat berperan lebih dalam sebagai jembatan penghubung antara IKN dengan Kawasan Timur Indonesia, melalui Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua melalui integrasi tol laut; dapat menjadi daerah penunjang perdagangan IKN, berupa pintu ekspor-impor dan kawasan industri karena memiliki Pelabuhan Anggrek sebagai pelabuhan peti kemas bertaraf internasional; dan menjadi alternatif provider bagi kebutuhan wisata penduduk IKN yang diperkirakan akan mencapai 8 juta jiwa. Seluruh prospek tersebut sangat mungkin terealisasi menimbang letak geografis yang relatif dekat dengan IKN, keunggulan bentangan alam indah yang memanjang di utara Sulawesi, dan lahan tidur yang sangat besar potensi pengembangannya bagi para investor.

Ke depan, jika para investor telah menanamkan modalnya di Gorontalo Utara, pemerintah harus memastikan investasi yang dilaksanakan dilandaskan kepada semangat ekonomi Pancasila/kerakyatan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak terjadi hanya pada skala makro, tetapi juga kepada skala mikro, sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Pemerintah Pusat menunjukkan komitmennya untuk mempercepat proses perizinan berinvestasi dan meningkatkan nilai investasi di pusat maupun daerah. *Online Single Submission* (OSS) dilaksanakan bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan berusaha. Aturan pelaksanaan OSS ini dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, yang berusaha mengintegrasikan secara elektronik dengan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) negara hingga pemerintah daerah. Harapan Pemerintah Pusat, perekonomian nasional dapat meningkat melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha. Dengan adanya OSS, calon investor tidak perlu lagi mendatangi berbagai K/L atau Organisasi Perangkat

Daerah untuk mengurus izin berlapis-lapis yang sebelumnya harus diperoleh secara satu-persatu secara bertahap.

Bentuk dari terselenggaranya OSS berupa SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik), berupa sistem elektronik pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan. Tujuan dari sistem ini yaitu proses pelayanan perizinan investasi langsung dapat diakses dan terpantau oleh pemerintah.

Berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan investasi/penanaman modal baik PMDN maupun PMA telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, dengan cara melakukan pembenahan mekanisme pelayanan perizinan dan penanaman modal sehingga lebih efektif dan efisien dalam melayani calon investor maupun masyarakat umum. Salah satu upaya yang sedang dan *continue* diupayakan adalah peningkatan kualitas SDM pelayanan, baik *frontliner*, maupun *back office*. Dengan SDM yang mumpuni, diharapkan keseluruhan proses pelayanan semakin meningkat.

Lahan yang masih potensial dan letaknya yang strategis untuk kepentingan komersial menjadikan Gorontalo Utara menjadi salah satu destinasi untuk investasi di Provinsi Gorontalo. Namun, Kabupaten Gorontalo Utara sampai RPJPD ini disusun belum memiliki gedung khusus dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu. Ketersediaan gedung/fasilitas bangunan perizinan akan sangat membantu dalam kecepatan dan kemudahan akses bagi calon investor maupun para pemohon perizinan, sehingga upaya pembangunan tersebut sebaiknya diupayakan agar mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

A. Realisasi Investasi PMA/PMDN

Sejak tahun 2020, seluruh izin OSS sudah tidak lagi dipisahkan dengan Provinsi Gorontalo sehingga pada Tabel 2.204 di bawah ini “Non SPIPISE Izin diproses melalui OSS Provinsi” nilainya 0 (nol). Penggunaan SPIPISE hanya sampai tahun 2019, setelahnya menggunakan sistem OSS.

Tabel 2.206
Realisasi Investasi Melalui OSS 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Izin diproses melalui OSS Gorontalo Utara	1.173.185.539.854	959.219.486.867	671.359.461.367	235.233.102.234	509.658.157.615
2	Izin diproses melalui OSS Provinsi	-	-	-	-	-
Jumlah		1.173.185.539.854	959.219.486.867	671.359.461.367	235.233.102.234	509.658.157.615

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Berdasarkan Tabel 2.206, terlihat realisasi investasi melalui OSS menurun drastis di 2022, diakibatkan karena lanjutan lesunya ekonomi saat pandemi. Selain itu kelesuan juga mengakibatkan jumlah pelaporan yang masuk pada LKPM berkurang drastis selain karena ada perubahan regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang salah satunya mengatur kewajiban pelaporan LKPM dilakukan bagi usaha yang rencana investasinya mulai 1 miliar ke atas. Terlepas dari hal tersebut, Pemerintah Daerah terus mencari calon investor baru untuk mengisi potensi investasi sehingga setahun berselang investasi kembali terlihat naik dengan Rp3.730.617.933,17 diantaranya disumbang oleh PMA.

Sedangkan pada realisasi investasi sektoral, pada tahun 2021, investasi terbesar disumbangkan dari sektor tersier dengan serapan lebih dari 1.000 tenaga kerja, pun pada tahun 2020 sektor inipun menjadi penyumbang realisasi investasi terbesar. Hal ini merupakan suatu kemajuan yang signifikan dimana sektor jasa mulai berperan dalam pembangunan setelah selama ini diperankan oleh sektor primer. Secara detail, informasi tersebut disajikan pada Tabel 2.207 dan 2.208 berikut.

Tabel 2.207
Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral Non-UMK Non-SPIPISE
dan Serapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui *Online Single Submission* (OSS)

No.	Sektor	2020				2021			
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja
I	**SEKTOR PRIMER**								
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, & Peternakan	6	12	6.718.200.000	143	7	9	12.175.000.000	164
2	Kehutanan	-	-	-		1	2	800.000.000	4
3	Kelautan & Perikanan	6	12	805.750.000	55	7	8	3.981.100.060	252
4	Pertambangan	1	1	1.700.000.000	12	2	2	4.500.000.000	17
5	Energi & Sumber Daya Mineral	1	1	150.000.000	3				
II	**SEKTOR SEKUNDER**								
1	Industri Makanan					2	2	477.250.000	14
2	Industri Tekstil	1	1	10.000.000	2				
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki								
4	Industri Kayu	1	1	95.000.000	3	2	6	1.215.000.000	10
5	Industri Kertas & Percetakan					3	4	33.750.000	15
6	Industri Kimia & Farmasi								
7	Industri Karet & Plastik					1	1	400.000.000	2
8	Industri Mineral Non-Logam					1	1	2.250.000.000	15
9	Industri Logam, Mesin, & Elektronik					1	1	400.000.000	2
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik, & Jam								
11	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain					1	1	25.000.000	3
12	Industri Lainnya	7	14	2.865.000.000	200	1	6	309.000.000	21
III	**SEKTOR TERSIER**								
1	Listrik, Gas, & Air	1	1	100.000.000	2				
2	Konstruksi	36	153	407.859.000.000	858	14	69	26.069.500.000	267
3	Perdagangan & Reparasi	85	268	316.007.915.148	1.602	43	205	19.236.031.837	705
4	Hotel & Restoran	13	23	3.403.000.000	179	12	4	5.023.500.000	19
5	Transportasi, Gudang, & Komunikasi	11	15	76.600.000.000	238	6	16	4.952.000.000	37
6	Perumahan, Kawasan Industri, & Perkantoran	0	-	-	-				
7	Jasa Lainnya	6	12	1.597.000.000	94	3	4	420.500.000	11
IV	**SEKTOR KEUANGAN**								
1	Koperasi Simpan Pinjam	5	5	1.442.640.450.000	272	12	2	303.000.000	2
V	**SEKTOR PENDIDIKAN**								
1	Pendidikan					1	2	298.000.000	22
2	Kebudayaan								
Jumlah		**180**	**519**	**2.260.551.315.148**	**3.663**	**120**	**345**	**82.868.631.897**	**1.582**
Jumlah NIB					**109**				**55**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Tabel 2.208
Perkembangan Realisasi Investasi Sektoral IUMK Non-SPIPISE
dan Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor melalui *Online Single Submission* (OSS)

No.	Sektor	2020				2021			
		Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp)	Tenaga Kerja
I	**SEKTOR PRIMER**								
1	Tanaman Pangan, Perkebunan, & Peternakan	7	7	560.000.000	14	13	14	647.190.000	14
2	Kehutanan	3	3	54.000.000	11	1	1	75.000.000	15
3	Kelautan & Perikanan	13	13	2.877.000.000	234	17	19	2.295.000.000	74
4	Pertambangan	1	1	10.000.000	-	5	18	570.000.000	18
5	Energi & Sumber Daya Mineral								
II	**SEKTOR SEKUNDER**								
1	Industri Makanan	22	24	1.813.655.000	84	50	57	2.809.500.000	46
2	Industri Tekstil	3	3	105.000.000	2	4	4	165.000.000	17
3	Industri Barang dari Kulit & Alas Kaki								
4	Industri Kayu	4	4	470.000.000	11	5	8	372.500.000	3
5	Industri Kertas & Percetakan	2	2	70.000.000	6	5	5	155.000.000	7
6	Industri Kimia & Farmasi					1	6	60.000.000	-
7	Industri Karet & Plastik								
8	Industri Mineral Non-Logam	1	1	30.000.000	2	3	3	55.000.000	4
9	Industri Logam, Mesin, & Elektronik					2	3	14.000.000	2
10	Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik & Jam								
11	Industri Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain					2	4	30.000.000	-
12	Industri Lainnya	5	5	675.000.000	16	12	13	805.000.000	23
III	**SEKTOR TERSIER**								
1	Listrik, Gas & Air	13	13	475.000.000	15	2	2	150.000.000	2
2	Konstruksi					2	26	255.000.000	1
3	Perdagangan & Reparasi	183	330	28.406.748.000	562	146	280	110.859.329.150	1.158
4	Hotel & Restoran	43	107	4.356.000.000	133	23	41	2.655.538.000	39
5	Transportasi, Gudang, & Komunikasi	19	27	2.279.250.000	32	8	15	170.200.450	8
6	Perumahan, Kawasan Industri, & Perkantoran	1	1	300.000.000	2				
7	Jasa Lainnya	24	25	1.174.000.000	35	13	40	1.073.500.000	24
Jumlah		**344**	**566**	**3.655.653.000**	**1.159**	**314**	**559**	**23.216.757.600**	**1.455**
Jumlah NIB					**277**				**257**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023

Sebelum tahun 2021, sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017, mulai tahun 2018 semua jenis usaha sampai UKM (termasuk kios, warung, perbengkelan, rumah makan, dan lain sebagainya) sudah termasuk dalam investasi penanaman modal, sehingga jumlahnya meningkat drastis. Dari rencana investasi yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), rencana investasi masih fluktuatif.

Serapan tenaga kerja selama tahun 2022 meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang menggambarkan upaya pengurangan tingkat pengangguran telah membuahkan hasil dengan upaya peningkatan investasi. Izin yang dikeluarkan selama tahun 2022 terdapat kenaikan Nomor Induk Berusaha (NIB) maupun Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia.

Tabel 2.209
Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal

No.	Indikator	Tahun (Rupiah)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi investasi	446.083.716.965	616.465.122.174	1.173.185.539.854	959.219.486.867	671.359.461.367	235.233.102.234	509.658.157.615

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Tabel 2.210
Rencana Nilai Investasi Menurut Sumber Investasi

No.	Jenis	Nominal (Rupiah)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Investasi PMA	23.385.600.000	2.832.413.500.000	-	-	-	17.000.000.000	11.000.000.000
2	Investasi PMDN	62.500.000.000	1.442.455.008.557	98.660.176.000	57.001.371.483	32.663.613.002	274.484.322.838	216.256.477.001
Total		**85.885.602.017**	**4.274.868.510.575**	**98.660.176.000**	**57.001.371.483**	**32.663.613.002**	**291.484.322.838**	**227.256.477.001**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Tabel 2.211
Kumulasi Investasi Sektoral Tahun 2023

No.	Sektor	NIB Proyek	KBLI	Tenaga Kerja	Nilai Rencana Investasi (Rp)
1	Kelautan & Perikanan	112	151	297	4.571.750.000
2	Pertanian	69	98	323	7.052.750.000
3	Lingkungan Hidup & Kehutanan	6	10	19	632.500.000
4	Energi & Sumber Daya Mineral	294	315	840	279.130.349.102
5	Ketenaganukliran	-	-	-	-
6	Perindustrian	589	650	1.257	1.284.410.750.000
7	Perdagangan	1.264	1.639	2.340	52.352.972.910
8	Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	46	130	593	52.716.500.003
9	Transportasi	10	15	65	423.500.001
10	Kesehatan, Obat, & Makanan	20	21	65	3.938.500.000
11	Pendidikan & Kebudayaan	1	1	1	1.000.000
12	Pariwisata	943	1.013	1.236	10.390.460.000
13	Keagamaan				
14	Pos, Telekomunikasi, Penyiaran, Sistem & Transaksi	9	9	22	126.000.000
15	Pertahanan & Keamanan				
16	Ketenagakerjaan	3	5	56	120.000.000
17	Keuangan	3	3	7	30.500.000
	Jumlah	**3.369**	**4.060**	**7.121**	**1.695.897.532.016**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

B. Perizinan Berusaha

Tabel 2.212
Realisasi Perizinan Berusaha

No.	Nama Dokumen	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		NIB	KBLI	NIB	KBLI	NIB	KBLI
1	SPPL	43	88	691	711	2.495	2.517
2	PKKPR Darat	2	2	13	21	11	21
3	Persetujuan PKPLH	0	0	23	24	74	85
4	Sertifikat Standar	18	26	50	65	102	132
5	Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)	2	2	14	24	7	13
6	Sertifikat Standar Toko Alat Kesehatan	0	0	2	2	3	3
7	Sertifikat Standar Toko Kosmetika	0	0	2	2	5	5
8	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional	0	0	2	2	0	0
9	Sertifikat Standar Toko Obat Tradisional Pedagang Los Pasar	0	0	1	1	0	0
10	Persetujuan SKKL	7	7	2	2	1	1
11	Izin Apotek	0	0	3	3	6	6
12	Tanda Daftar Gudang	1	1	2	2	5	7
13	Pemenuhan Standar Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	0	0	0	0	1	1
	Jumlah	**73**	**126**	**805**	**859**	**2.710**	**2.791**
	Jumlah NIB						**2.551**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

Sementara realisasi non perizinan berusaha yang terdiri dari 23 jenis perizinan secara tren juga meningkat yang disajikan pada Tabel 2.213.

Tabel 2.213
Realisasi Non Perizinan Berusaha

No.	Nama Izin	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
1	IMB/PBG	60	85	60	70	70	53	63	461
2	Sertifikat Laik Fungsi	0	0	0	0	0	0	30	30
3	Tanda Daftar Gudang	1	2	0	0	0	1	0	4
4	Surat Izin Reklame	0	2	2	0	3	0	0	7
5	Surat Izin Usaha Toko Modern	0	0	0	0	18	0	0	18
6	Surat Izin Operasional Rumah Sakit	0	0	0	1	0	0	0	1
7	Surat Izin Praktek Dokter	0	16	19	73	49	61	48	266
8	Surat Izin Praktek Perawat	0	56	54	38	30	96	138	412
9	Surat Izin Praktek Bidan	0	54	79	4	44	95	172	448
10	Surat Izin Praktek Apoteker	0	1	12	2	10	13	19	57
11	Surat Izin Apotek	0	3	1	6	2	1	1	14
12	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian	0	2	4	7	3	7	17	40
13	Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga	0	0	0	14	9	0	0	23
14	Surat Izin Praktek Tenaga Gizi	0	0	0	6	3	7	9	25
15	Surat Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik	0	1	0	1	4	5	5	16
16	Surat Izin Praktek Penata Anestesi	0	1	1	0	1	1	0	4
17	Surat Izin Kerja Perekam Medis	0	0	0	0	1	0	0	1
18	Surat Izin Kerja Radiographer	0	4	0	0	1	0	0	5
19	Izin Praktek Fisioterapi	0	0	0	0	0	1	0	1
20	Izin Klinik	0	0	0	0	0	2	1	3
21	Surat Izin Praktek Gigi dan Mulut	0	0	0	0	0	0	1	1
22	Surat Izin Praktek Radiologi	0	0	0	0	0	0	2	2
23	Surat Izin Pencabutan Praktek Apoteker	0	0	0	0	0	0	1	1
Jumlah		**61**	**227**	**232**	**222**	**248**	**343**	**507**	**1.840**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2024

C. Perizinan Mendirikan Bangunan

Selang tahun 2017 hingga 2023 total bangunan yang sudah mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB, sejak tahun 2021 menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) sebanyak 461 unit. Kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB/PBG masih rendah, ditambah dengan pengawasan penegakan regulasi yang lemah, sehingga berdampak pada rendahnya kinerja aspek ini.

Tabel 2.214
Pengajuan IMB/PBG per Satuan Rumah

Uraian	Tahun							Total
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Pengajuan IMB/PBG	60	85	60	70	70	53	63	461

Sumber: Dinas Penanaman Modal PTSP dan Dinas Pekerjaan Umum, 2024

13. Urusan Pemuda dan Olahraga

Kegiatan kepemudaan di Gorontalo Utara diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Jenis kegiatan kepemudaan yang telah dilaksanakan antara lain kegiatan keolahragaan dan kegiatan keorganisasian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Olahraga mengamanatkan bahwa kegiatan keolahragaan harus didukung oleh pembinaan dan pelatihan yang mumpuni. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab serta bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan. Hal tersebut dalam bentuk mengatur serta mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah yang meliputi:

0 unit

Jumlah gelanggang olahraga bersama milik pemerintah

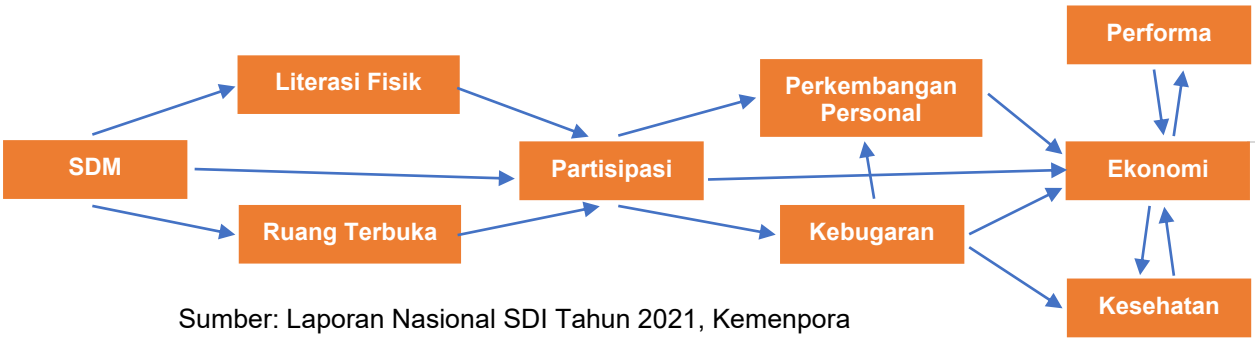


- Olahraga pendidikan yang diselenggarakan sebagai proses pendidikan;
- Olahraga rekreasi yang diselenggarakan sebagai pemulihan kesehatan; dan
- Olahraga prestasi yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi olahraga dalam rangka meningkatkan kualitas dan martabat bangsa.

Perkembangan olahraga di level dunia sendiri sudah demikian jauh, terutama kontribusinya terhadap pembangunan, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, kesejahteraan psikis, dan sosial. Demikian juga, ukuran keberhasilan pun

telah bergeser dari hal-hal yang bersifat instan seperti kemenangan, menuju hal-hal yang bersifat jangka panjang seperti kesejahteraan fisik dan psikis. Karena itu, upaya perbaikan perlu terus dilakukan guna mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari aktivitas olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah mengimplementasikan sebuah ukuran keberhasilan pembangunan olahraga yang kemudian disebut dengan *Sport Development Index* (SDI), yang mencakup sembilan dimensi: ketersediaan SDM olahraga, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, performa, dan ekonomi.

Gambar 2.28
Interelasi Struktural Dimensi SDI



Sumber: Laporan Nasional SDI Tahun 2021, Kemenpora

Penjelasan dari setiap dimensi dapat diuraikan sebagai berikut.

1. SDM olahraga merujuk pada pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga yang merupakan komponen utama dalam sistem pembinaan dan pengembangan olahraga. Indikator SDM olahraga di suatu wilayah adalah rasio jumlah pelatih, guru pendidikan jasmani, instruktur, dan relawan olahraga dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.
2. Ruang terbuka olahraga adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik *indoor* maupun *outdoor*, yang merupakan tempat yang menjadi kebutuhan dasar bagi siapa pun untuk melakukan aktivitas olahraga. Ruang terbuka yang memadai menjadi syarat terbentuknya partisipasi dalam aktivitas olahraga. Indikator ruang terbuka di suatu wilayah adalah rasio antara ketersediaan ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.

3. Literasi fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat. Indikator utama dari literasi fisik adalah pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu. Individu yang memiliki literasi fisik yang bagus akan melibatkan diri dalam aktivitas fisik lebih intens dan berkelanjutan.
4. Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10-60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga minimal tiga kali per minggu.
5. Kebugaran didefinisikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Indikator kebugaran adalah angka kebugaran yang ditunjukkan dengan $V0_2max$, yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum. Semakin tinggi $V0_2max$, semakin tinggi pula tingkat kebugaran seseorang.
6. Kesehatan mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Seseorang dinyatakan sehat secara fisik jika terbebas dari penyakit dan mampu bekerja secara produktif. Sementara itu, sehat secara psikis mengacu pada kesejahteraan psikis, yakni suatu kondisi di mana individu dapat bertindak secara otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas.
7. Perkembangan personal adalah aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif, baik sebagai pribadi maupun anggota masyararakat. Ada dua aspek yang diukur dalam perkembangan personal, yakni resiliensi dan modal sosial. Resiliensi adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, modal sosial adalah perasaan bersama sebagai warga bangsa yang memungkinkan mereka percaya satu sama lain.
8. Ekonomi adalah pengeluaran individu terkait aktivitas olahraga, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam satu tahun. Belanja barang dapat berupa peralatan atau perlengkapan olahraga. Peralatan olahraga

dapat berupa raket, *stick* atau pemukul, *glove*, dan bola. Sedangkan perlengkapan olahraga dapat berupa pakaian olahraga dan sepatu. Sementara itu, jasa olahraga bisa berupa pembayaran tiket, konsultan, dan/atau jasa pelatihan. Kemampuan membayar terhadap barang atau jasa merupakan indikator penting dari ekonomi seseorang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

9. Performa adalah capaian olahragawan atau sekelompok olahragawan sebagai hasil dari pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah. Performa dalam konteks ini diukur dengan dua hal, yakni perolehan medali dalam suatu kejuaraan dan populasi atlet elit di suatu daerah.

A. Organisasi Olahraga dan Kepemudaan

Mengingat besarnya populasi pemuda sesuai data demografi penduduk, kedudukan pemuda merupakan faktor strategis dalam pembangunan. Keberadaan pemuda menjadi harapan bangsa, karena di masa yang akan datang para pemudalah yang akan menggantikan kepemimpinan yang ada sekarang. Untuk memaksimalkan peran pemuda, perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan baik secara individu maupun kelembagaan/keorganisasian.

Perkembangan organisasi olahraga dan pemuda dalam rangka mendidik dan membina pemuda kurun waktu 2015-2023 disajikan pada Tabel 2.215 berikut.

Tabel 2.215
Organisasi Olahraga dan Pemuda

No.	Indikator	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Jumlah organisasi kepemudaan	n/a	n/a	16	19	20	22	22	22	25
2	Jumlah kegiatan/turnamen olahraga	n/a	n/a	22	33	30	-	44	44	6
3	Jumlah kegiatan organisasi pemuda	n/a	n/a	-	-	1	1	-	-	3

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Dengan mempertimbangkan karakteristik pemuda, organisasi sebagai wadah berkumpulnya sekumpulan orang untuk mencapai tujuan bersama merupakan pendekatan yang lebih tepat bagi pemuda. Daftar organisasi kepemudaan aktif yang berhasil dicatat oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gorontalo Utara seperti tertera pada Tabel 2.216 berikut.

Tabel 2.216
Organisasi Kepemudaan Aktif

No.	Nama Organisasi					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
1	KNPI	KNPI	KNPI	KNPI	KNPI	Komite Nasional Pemuda Indonesia
2	PPI	PPI	PPI	PPI	PPI	Purna Paskibraka Indonesia
3		FKPPI	FKPPI	FKPPI	FKPPI	Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia
4	PPMI	PPMI	PPMI	PPMI	PPMI	Purna Prakarya Muda Indonesia
5		Kwarcab	Kwarcab	Kwarcab	Kwarcab	Kwartir Cabang Pramuka
6		GP Anshor	GP Anshor	GP Anshor	GP Anshor	Gerakan Pemuda Anshor
7		HIPMI	HIPMI	HIPMI	HIPMI	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
8		IPM	IPM	IPM	IPM	Ikatan Pelajar Muhammadiyah
9	Karang Taruna	Karang Taruna	Karang Taruna	Karang Taruna	Karang Taruna	Karang Taruna
10	PMR	PMR	PMR	PMR	PMR	Palang Merah Remaja
11	Pramuka	Pramuka	Pramuka	Pramuka	Pramuka	Praja Muda Karana
12	OSIS	OSIS	OSIS	OSIS	OSIS	Organisasi Siswa Intra Sekolah
13	BEM	BEM	BEM	BEM	BEM	Badan Eksekutif Mahasiswa
14	Huyula	Huyula	Huyula	Huyula	Huyula	
15	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	Forum Pemuda Tani
16	Remaja Masjid	Remaja Masjid	Remaja Masjid	Remaja Masjid	Remaja Masjid	
17	PDPM	PDPM	PDPM	PDPM	PDPM	Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah
18	Peduli Kasih	Peduli Kasih	Peduli Kasih	Peduli Kasih	Peduli Kasih	
19	Bultim FC	Bultim FC	Bultim FC	Bultim FC	Bultim FC	
20		Kel (AKT)	Kel (AKT)	Kel (AKT)	Kel (AKT)	
21	*Green Youth*	*Green Youth*	*Green Youth*	*Green Youth*	*Green Youth*	
22		Remaja Basis Masyarakat	Remaja Basis Masyarakat	Remaja Basis Masyarakat	Remaja Basis Masyarakat	
23					PPA	Pemuda Pecinta Alam
24					Pusat Informasi Konsultasi	
25					Barisan Pemuda Nusantara	

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024



Pembangunan daerah juga tak lepas dari pembangunan keolahragaan, karena olahraga terkait dengan pembangunan mental dan karakter individu yang sportif, jujur, semangat kerjasama, serta bekerja keras. Pembangunan keolahragaan harus dimulai dari pembangunan organisasi

keolahragaan, dan pengelolaan organisasi olahraga dan tidak lepas dari atensi dan peran masyarakat. Penilaian masyarakat cenderung berdimensi prestasi sementara banyak parameter yang harus dijalankan suatu organisasi dalam upaya mengejar prestasi tersebut.

Tabel 2.217
Organisasi/Persatuan Olahraga Aktif

No.	Nama Organisasi					Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023	
1	PASI	PASI	PASI	PASI	PASI	Persatuan Atletik Seluruh Indonesia
2	IPSI	IPSI	IPSI	IPSI	IPSI	Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia
3	PSSI	PSSI	PSSI	PSSI	PSSI	Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia
4	PBSI	PBSI	PBSI	PBSI	PBSI	Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia
5	PBVSI	PBVSI	PBVSI	PBVSI	PBVSI	Persatuan Bola Volley Seluruh Indonesia
6	PTMSI	PTMSI	PTMSI	PTMSI	PTMSI	Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia
7	PERCASI	PERCASI	PERCASI	PERCASI	PERCASI	Persatuan Catur Seluruh Indonesia
8	PERTINA	PERTINA	PERTINA	PERTINA	PERTINA	Persatuan Tinju Indonesia
9	PERBASI	PERBASI	PERBASI	PERBASI	PERBASI	Persatuan Basket Seluruh Indonesia
10	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia	Taekwondo Indonesia
11	PSTI	PSTI	PSTI	PSTI	PSTI	Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia
12	FORKI	FORKI	FORKI	FORKI	FORKI	Federasi Olahraga Karate DO Indonesia
13	POSSI	POSSI	POSSI	POSSI	POSSI	Persatuan Olahraga Senam Seluruh Indonesia
14	PELTI	PELTI	PELTI	PELTI	PELTI	Persatuan Tenis Lapangan Indonesia
15	BAPOR KORPRI	BAPOR KORPRI	BAPOR KORPRI	BAPOR KORPRI	BAPOR KORPRI	Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia
16		PERGATSI	PERGATSI	PERGATSI	PERGATSI	Persatuan *Gateball* Seluruh Indonesia
17		E-Sport	E-Sport	E-Sport	E-Sport	
18					Paralayang	
19					POBSI	Persatuan Olahraga Billiar Seluruh Indonesia

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Berdasarkan Tabel 2.217, organisasi/persatuan olahraga telah banyak terbentuk, namun prestasinya relatif belum berbicara banyak di level nasional bahkan provinsi. Kendala yang selama ini disinyalir menjadi faktor penghambat prestasi seperti tidak adanya pola pembinaan olahraga yang jelas di setiap level, keterbatasan sarana pendukung olahraga, serta dukungan dana dan kualitas SDM yang minim. Solusi yang mungkin bisa ditempuh seperti pembinaan yang berjenjang dimulai dari level sekolah dasar, hingga kegiatan kompetisi olahraga rutin. Selain itu, sarana olahraga yang representatif dan terintegrasi dalam satu area juga diperlukan bagi pengembangan olahraga dan meningkatkan kemudahan pemantauan prestasi olahraga masyarakat. Dengan demikian, mimpi untuk memiliki Gelanggang Olahraga (GOR) sendiri merupakan cita-cita yang diupayakan dalam mendorong pembangunan olahraga dan pemuda di Gorontalo Utara.

B. Cakupan Pembinaan Atlet

Pada cakupan pembinaan atlet muda, indikator ini bertujuan untuk melihat sejauh mana atlet pelajar yang dibina jika dibandingkan dengan seluruh atlet pelajar. Saat ini, sudah seluruh atlet muda binaan yang terdata dilakukan pembinaan dengan maksud untuk meningkatkan prestasinya.

Tabel 2.218
Pembinaan Atlet Muda

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah atlet pelajar yang dibina	40	40	40	40	45	58	25
2	Jumlah seluruh atlet pelajar	80	75	70	65	60	58	25
3	Persentase cakupan pembinaan atlet muda	50	53,33	57,14	61,54	75	100	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

Agar prestasinya meningkat, para atlet muda diupayakan untuk dilatih pelatih yang telah bersertifikasi, baik sertifikat A, B, atau C, yang biasanya merupakan mantan atlet ataupun lulusan bidang olahraga.

Tabel 2.219
Pelatih Bersertifikat

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pelatih bersertifikasi	24	25	28	29	30	30	30
2	Jumlah seluruh pelatih	24	25	28	29	30	31	34
3	Cakupan pelatih bersertifikasi	100	100	100	100	100	96,77	88,23

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga, 2024

14. Urusan Statistik

Statistik merupakan basis dasar yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah. Tentunya semua bentuk perencanaan akan bertolak dari kondisi statistik pembangunan yang disajikan dalam data yang terstruktur. Oleh karena itu, buku statistik harus selalu diinformasikan secara progresif dan kontinyu. Dengan kolaborasi bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, buku Daerah Dalam Angka (Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka) selama periode 2018-2023 selalu tersedia. Jenis data yang ditampilkan meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, dan tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri, ekonomi, keuangan, dan sebagainya. Buku ini merupakan sumber data dan informasi terkait Kabupaten Gorontalo Utara serta komparasi dari kota/kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, yang dapat digunakan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai bahan informasi yang akurat atau acuan dalam perencanaan pembangunan. Demikian juga ketersediaan buku PDRB Kabupaten Gorontalo Utara selama periode 2017-2023 yang dapat memberikan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi. Pada akhir bulan Desember 2023 saat dokumen ini disusun, seluruh dokumen laporan statistik tahun 2022 telah paripurna terpublikasi sehingga memudahkan dalam proses perencanaan pembangunan. Informasi lebih lanjut dapat disimak pada Tabel 2.220 berikut.



1,58 (kategori “Kurang”)

Nilai IPS Gorontalo Utara (2023) – Peringkat 2 se-Provinsi Gorontalo

Tabel 2.220
Ketersediaan Dokumen Statistik

No.	Dokumen	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daerah Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Indikator Makro Sosial Ekonomi	ada	ada	belum	ada	ada	ada
3	Statistik Ketenagakerjaan	belum	belum	ada	ada	ada	ada
4	Statistik Kesejahteraan Rakyat	ada	ada	ada	ada	ada	ada
5	Indikator Kesejahteraan Rakyat	belum	belum	belum	ada	ada	ada
6	Statistik Daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada
7	Statistik Pertanian	belum	belum	belum	ada	ada	ada
8	Kecamatan Dalam Angka	ada	ada	ada	ada	ada	ada
9	PDRB Pengeluaran	ada	ada	ada	ada	ada	ada
10	PDRB Lapangan Usaha	ada	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: BPS Gorontalo Utara, 2024

Dalam penggunaan dan penyelenggaraan (tingkat kematangan) statistik sektoral, setiap tahun dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) oleh Badan Pusat Statistik, dengan keluaran berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang terbagi dalam 5 tingkat kematangan (Rintisan, Terkelola, Terdefinisi, Terpadu dan Terukur, serta Optimum). IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) *General* untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah. Pada penyelenggaraan EPSS seri pertama tahun 2023, Kabupaten Gorontalo Utara memperoleh skor 1,58. Meskipun masih masuk pada kategori/predikat "Kurang" karena masih di bawah 1,8, namun berhasil menjadi terbaik II se-Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.221
Nilai IPS Tahun 2023 dan Indeks Domain

No.	Domain	Bobot (%)	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
1	Domain prinsip SDI	28	2,60	1,81	1,75
2	Domain kualitas data	24	2,60	1,70	1,26
3	Domain proses bisnis statistik	19	2,60	1,82	1,47
4	Domain kelembagaan	17	2,60	1,85	1,74
5	Domain statistik nasional	12	2,60	1,74	1,79
Indeks Pembangunan Statistik		100	2,60	1,78	1,58

Sumber: BPS Gorontalo Utara, 2024

15. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Perkembangan seni dan budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Kekayaan budaya yang dimiliki Gorontalo Utara harus terus digali dan dilestarikan. Untuk itu, pengarusutamaan kebudayaan dalam berbagai aspek pembangunan dinilai penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Sebagai daerah yang sangat menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai adat, festival seni dan budaya rutin dilaksanakan, baik yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah maupun inisiatif masyarakat. Bermacam kegiatan seni budaya di wilayah yang berfalsafahkan ‘adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah’ sebagian besar merupakan budaya-budaya dan seni yang memiliki nilai agama yang tinggi seperti Festival Mandi Safar, Festival Beduk dan Tumbilotohe, serta Tulude.

Festival pariwisata dan budaya yang paling dinanti oleh masyarakat Gorontalo yaitu Festival Pesona Saronde, yang dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2007 ini menggelar berbagai kegiatan, seperti pemilihan Putra-Putri Saronde, lomba adu cepat perahu ketinting, festival kuliner, atraksi beladiri Langga, dan lain sebagainya.

Setiap tahun dilaksanakan dua festival budaya yang dikoordinisasikan oleh Pemerintah Daerah, yakni Festival Adat Tulude di Kecamatan Gentuma Raya dan Ritual Mandi Shafar di Kecamatan Atinggola. Ke depan seiring

dengan kondisi fiskal yang lebih baik, pergelaran seni dan budaya akan lebih intens dilaksanakan.

Dengan dilaksanakannya festival seni dan budaya, diharapkan dapat memberikan beberapa keuntungan, yang bersifat langsung dan tidak langsung. Manfaat pertama yakni memperkenalkan destinasi; kedua, dapat menjadi ikon untuk mendatangkan wisatawan yang selanjutnya memacu masyarakat lokal dalam mengembangkan kreativitas dan terlibat dalam kepariwisataan; dan terakhir menciptakan efek pengganda bagi ekonomi wilayah. Untuk mencapai seluruh tujuan tadi, pelaksanaan festival harus selalu memiliki standar yang baik, dan harus dikurasi dengan pendekatan suguhan yang menarik. Begitu pula dengan promosi, harus berjalan dengan baik agar minat masyarakat dan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara semakin besar.

B. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Sebagai salah satu wilayah yang strategis secara komersial dan pertahanan keamanan, wilayah Kabupaten Gorontalo Utara secara historis memiliki berbagai situs peninggalan Belanda dan Jepang. Pemerintah Daerah telah mendata berbagai situs yang memiliki nilai historis, seperti:

- Cagar budaya *pillbox defense* di Kwandang;
- Benteng Orange di Kwandang;
- Benteng Mas di Kwandang;
- Rumah instalasi dan menara suar;
- Bekas komplek pertambangan Maatschappy;
- Makam C. Knappert (orang Belanda);
- Makam Bangsa Cina;
- Ota Lo Jin;
- Bangkai kapal di Perairan Sumalata Timur;
- Makam Jubalo Blongkod (bangsawan Kerajaan Atinggola);
- Makam Bing Bing Sunge (Raja Atinggola terakhir).

Pada tahun 2021, Tim Ahli cagar Budaya (TACB) telah memetakan 8 cagar budaya daerah, namun baru 4 cagar budaya daerah yang dapat mulai dikembangkan. Dan di tahun 2023 terdapat tambahan satu lokasi berupa

makam aulia untuk dijadikan cagar budaya terletak di Sumalata Timur. Data pemanfaatan Cagar Budaya Daerah di Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.222 berikut.

Tabel 2.222
Pemanfaatan Cagar Budaya KabupatenTahun 2023

No.	Pemanfaatan Cagar Budaya Daerah	Tahapan Pemanfaatan
1	Situs Benteng Orange	Penetapan Cagar Budaya
2	Situs Benteng Mas	Penetapan Cagar Budaya
3	Situs *Pillbox Defense*	Penetapan Cagar Budaya
4	Situs Makam Knappert	Penetapan Cagar Budaya
5	Bulonggo	-
6	Situs rumah peninggalan Belanda	-
7	Situs Bangkai Kapal	-
8	Situs Kuburan/Makam Cina	-
9	Situs Makam Aulia	-

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2023

16. Urusan Perpustakaan

Dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan, yang merupakan wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, mengoleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional yang disusun menurut sistem tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.

Selain itu, perpustakaan merupakan bagian integral dalam menunjang kualitas pendidikan di Gorontalo Utara. Guna mendukung hal tersebut, saat ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sedang giat-giatnya mendorong optimalisasi operasionalisasi dan pelayanan dari Perpustakaan Daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga mengembangkan perpustakaan di sekolah-sekolah baik di tingkat dasar maupun lanjutan.

A. Pengunjung dan Koleksi Buku

Indikator efektivitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan, yang dapat menggambarkan tingkat budaya baca di daerah. Perkembangan literasi untuk membangun kualitas manusia sangat bergantung pada kegemaran membaca masyarakat. Namun, akibat pendemi Covid-19, menyebabkan

jumlah kunjungan perpustakaan mengalami penurunan lebih dari 50 persen selama tahun 2020.

Pada tahun 2020 koleksi buku meningkat seiring adanya bantuan buku dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan juga dari Bank Indonesia (BI) *Corner*. Banyaknya koleksi buku yang tersedia pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.



Tabel 2.223
Daftar Perpustakaan, Pengunjung, dan Koleksi Buku

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah perpustakaan desa	45	45	45	45	45
2	Jumlah perpustakaan sekolah	165	165	165	165	165
3	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun (orang)	44.097	16.096	44.197	44.504	57.810
4	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	6.074	6.074	6.108	6.858	7.395
5	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan seluruh kabupaten	28.074	84.543	84.577	85.327	86.464

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2024

B. Tenaga Pustakawan

Dalam hal tata kelola perpustakaan, dibutuhkan petugas yang andal dan dapat mengatur segala kepentingan dan kebutuhan perpustakaan agar berjalan dengan baik. Hal yang dapat mengindikasikan kompetensi petugas perpustakaan adalah dengan melihat jumlah pustakawan, tenaga teknis,

dan penilai yang bersertifikat. Namun, saat ini masih merupakan hal yang berat, karena Pustakawan pada tahun 2023 hanya 3 orang, 2 tenaga lebih banyak dibandingkan setahun sebelumnya.

C. Pembangunan Literasi Masyarakat

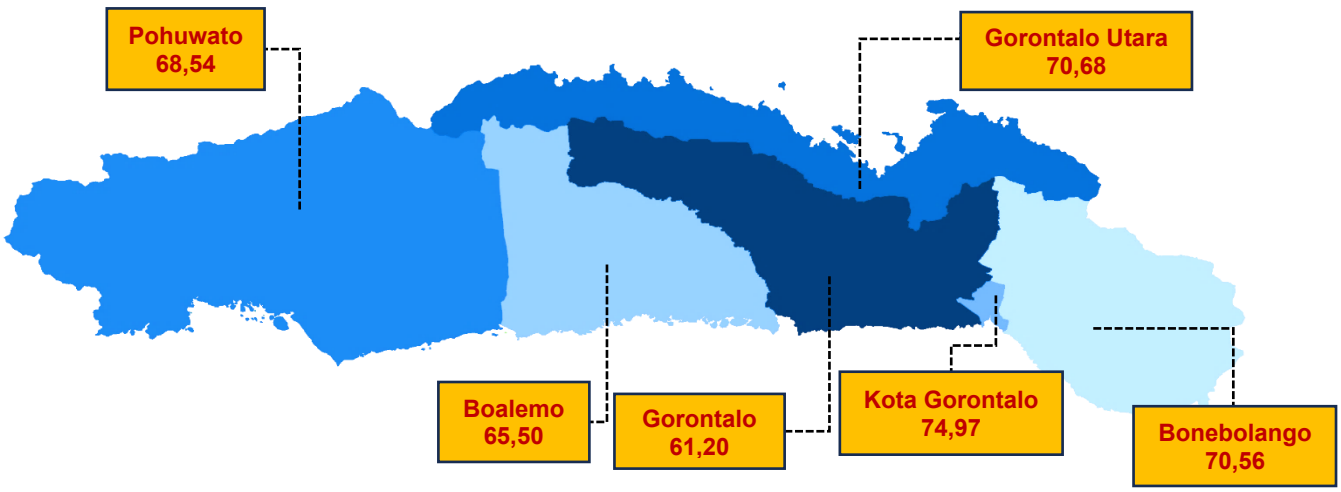
Rangkaian pelaksanaan Urusan Perpustakaan bertujuan untuk mendorong Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Capaian kinerja IPLM Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.224.

Tabel 2.224
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023

No.	Komponen	Nilai Kabupaten Gorontalo Utara	Nilai Provinsi Gorontalo
1	Pemerataan layanan perpustakaan	0,463	0,432
2	Pemerataan koleksi perpustakaan	0,447	0,430
3	Pemerataan tenaga perpustakaan	0,991	1,000
4	Tingkat kunjungan pemustaka	0,045	0,064
5	Perpustakaan ber-SNP	1	1
6	Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan	1	1
7	Jumlah pemustaka	1	1
NILAI IPLM		**70,6889**	**70,3927**

Sumber: Perpustakaan Nasional RI, 2024

Gambar 2.29
IPLM Kabupaten/Kota Tahun 2023 di Provinsi Gorontalo



Sumber: https://ckan.perpusnas.go.id/dataset/indeks-pembangunan-literasi-masyarakat-iplm/resource/, Perpustakaan Nasional (2024)

17. Urusan Kearsipan

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam penyelenggaraan urusan kearsipan berusaha untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan, sehingga arsip dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Arsip-arsip yang tercipta tersebut, apabila memiliki nilai guna kesejarahan maka Pemda wajib untuk menyelamatkan dan mengamankan arsip-arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya yang dilakukan melalui *workshop*, bimbingan teknis, pengawasan internal kearsipan, pengelolaan arsip melalui intensifikasi kegiatan penyusutan arsip pada perangkat daerah, inovasi pengelolaan arsip berbasis TIK, peningkatan penyelamatan dan pelestarian arsip, alih media arsip, digitalisasi arsip, penyelamatan arsip perangkat daerah yang dibubarkan, digabung, serta penyelamatan arsip pasca bencana. Ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sangat bergantung pada standar pengelolaan arsip secara baku yang telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah.



hanya 11 dari 43
OPD yang telah mengelola arsip secara baku

A. Pengelolaan Kearsipan

Pengelolaan arsip secara baku penting untuk dilaksanakan agar dokumen arsip terjamin keamanan serta memudahkan ketika suatu saat dokumen arsip tersebut dibutuhkan. Perangkat daerah yang menerapkan arsip secara baku merupakan OPD yang memiliki tenaga arsip dan telah mengikuti pembekalan serta pelatihan sistem kearsipan pola baru, menggunakan kartu kendali dengan sistem dosir (berdasarkan kegiatan), sistem rubrik (berdasarkan permasalahan), sistem seri (berdasarkan kesamaan jenis), penataan arsipnya telah berdasarkan kode klasifikasi, memiliki sarana dan prasarana antara lain meliputi: almari katalog, *filing*

cabinet, map gantung, lembar disposisi, lembar pengantar, daftar pengendali, serta kartu kendali masuk dan keluar.

Pengelolaan arsip yang baik harus dapat menjamin ketersediaan arsip yang memberikan kepuasan bagi pengguna, serta dapat menjamin arsip itu sendiri. Perkembangan pengelolaan arsip secara baku capaiannya belum seperti harapan. Ketersediaan sumber daya manusia pengelola kearsipan yang handal dan profesional dapat ditingkatkan agar arsip dapat dijamin keselamatannya, baik secara fisik maupun informasinya. Gambaran pengelolaan arsip selengkapnya pada Tabel 2.225 berikut.

Tabel 2.225
Pengelolaan Arsip Baku

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah OPD yang telah menerapkan arsip secara baku	9	9	9	9	10	11	11
2	Jumlah OPD	43	43	43	43	43	43	43
3	Persentase pengelolaan arsip secara baku	20,93	20,93	20,93	20,93	23,26	25,58	25,58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2024

B. SDM Pengelola Kearsipan

Selanjutnya kualitas pengelolaan arsip juga perlu disesuaikan dengan ketentuan yang ada. Untuk itu persentase pengelolaan arsip baku juga perlu dioptimalkan hingga mencapai kondisi yang paripurna di masa mendatang. Guna meningkatnya kualitas pengelolaan arsip, maka secara gradual perlu diadakan pelatihan bagi SDM pengelola kearsipan, yang dilakukan oleh arsiparis, yang merupakan SDM kearsipan yang memang secara teknis melakukan kegiatan pengelolaan kearsipan baik statis maupun dinamis dan melakukan pembinaan. Arsiparis dituntut untuk selalu profesional sehingga kemampuan dan kualitas senantiasa selalu ditingkatkan melalui kegiatan sertifikasi. Pada tahun 2023, hanya terdapat tiga orang arsiparis, sehingga pengelolaan kearsipan kurang optimal. Meskipun kurang di sisi kuantitas, kualitas terus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan *re-skilling* dan *up-skilling* bagi arsiparis.

Tabel 2.226
Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan			2	1	4	3	20

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2024

Tabel 2.227
Jenis Kegiatan Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan

No.	Jenis Kegiatan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bimtek pengelolaan arsip			v				v
2	Sosialisasi pengelolaan arsip			v				v
3	Pendampingan pengelolaan arsip dinamis				v			v
4	Sosialisasi Perbup tata naskah dinas					v		v
5	Sosialisasi klasifikasi arsip					v		v
6	Sosialisasi Perbup tata cara akuisisi arsip					v		
7	Sosialisasi Perbup preservasi					v		
8	Sosialisasi tentang aplikasi Srikandi						v	v
9	*Zoom meeting* aplikasi Srikandi						v	v
10	Kegiatan pendampingan ke setiap OPD untuk aplikasi Srikandi						v	v

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, 2024

18. Urusan Persandian

Persandian bertujuan untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah berita atau dokumen pemerintah. Hal ini merupakan hal yang amat penting di era serba teknologi informasi saat ini. Guna menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki alamat email persandian https://mail.sanapati.net sebagai upaya penggunaan teknologi informasi. Penggunaan email tersebut digunakan untuk meminimalisir risiko diantaranya penyadapan, *hacking*, dan berbagai ancaman lainnya. Hadirnya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi krusial.

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Urusan Kehutanan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida

(*carbon dioxide sink*) untuk mengurangi efek gas rumah kaca, habitat hewan, modulator arus hidrologika, pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pada awalnya, penetapan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Gorontalo sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.65/Menhut-II/2010, wilayahnya meliputi area seluas ±581.500 Ha, yang terdiri dari 3 unit KPHL dengan luas ±240.759 Ha dan 4 unit KPHP dengan luas ±340.741 Ha. KPHP di Gorontalo Utara adalah KPHP Unit IV, yang kemudian ditetapkan sebagai KPHP Model dengan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.766/Menhut-II/2012 dengan luas ±105.808 Ha, terdiri dari Hutan Produksi (HP) dengan luas ±15.759 Ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ±71.417 Ha, dan Hutan Lindung (HL) seluas ±18.632 Ha. Letak geografis KPHP IV Gorontalo Utara tersebut di 121°59'12,907"-123°16'31,109"BT0°47'12,173"- 0°54'51,68"LU.

Kayu merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari kawasan hutan pada wilayah KPHP Unit IV Kabupaten Gorontalo Utara, dengan jenis kayu indah, kayu komersil kelas 1, dan kayu rimba campuran. Sedangkan potensi non kayu yang bisa dikembangkan meliputi getah pinus, sumber daya air, rotan, gaharu, dan potensi jasa lingkungan lainnya. Mengingat sebagian besar wilayah kelolanya merupakan kawasan hutan produksi, pemanfaatan dan pengembangan hasil hutan dititikberatkan pada potensi hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu sehingga identifikasi dan inventarisasi sangat penting untuk dilaksanakan.

Flora dan fauna yang ditemukan di kawasan hutan Gorontalo Utara merupakan flora fauna hutan dataran rendah. Untuk jenis vegetasi, hutan dataran rendah didominasi oleh *family*: *Dipterocarpaceae* terutama anggota genus *Shorea, Dipterocarpus, Hopea, Vatica, Dryobalonops*, dan *Cotylelobium*. Beberapa pakar menyebutkan hutan dataran rendah juga

sering disebut dengan hutan *Dipterocarpaceae*. Selain pepohonan *family* di atas, terdapat juga *Lauraceae, Myrtaceae, Miristicaceae,* dan *Ebenaceae* serta pohon-pohon anggota genus *Agathis, Kompassia, Altingia, Duabanga, Gosanepinus, Octomeles,* dan *Dyera.* Sedangkan jenis satwa yang bisa ditemukan antara lain *Dihe* atau Kera Hitam Sulawesi (*Macaca heckii*) yang juga salah satu jenis primata endemik Gorontalo. Jenis primata lain yang bisa ditemukan adalah, *Tarsius spectrum* atau oleh masyarakat setempat diberi nama *mimito*, Rusa (*Cervus timorensis*), Babi Rusa, Babi (*Sus celebensis*), Anoa (*Bubalus sp*.), Rangkong (*Rhyticeroscassidix*), *Trichoglossus ornatus*, Burung Punai, *Corvus advena.* Keanekaragaman hayati di KPHP Gorontalo Utara tidak lepas dari teori Alfred Russel Wallace yang mengatakan bahwa Pulau Sulawesi memiliki keanekaragaman hayati dan endemisitas flora fauna tertinggi. Kekayaan flora fauna ini dipengaruhi oleh keadaan pulaunya yang terisolir selama ribuan tahun.

Berdasarkan data terbaru yang disampaikan KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, areal penggunaan hutan di Gorontalo Utara secara lengkap disajikan pada Tabel 2.228 berikut.

Tabel 2.228
Luas Kawasan Hutan Wilayah Kerja KPH Wilayah IV Gorontalo Utara
Tahun 2022

Hutan Produksi (Ha)			Hutan Lindung (Ha)	Konversi (Ha)	Jumlah (Ha)
Terbatas	Tetap	Konversi			
64.326,20	15.540,04	5.554,01	7.894,38	16.207,93	109.522,60

Sumber: KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, 2022

Sedangkan berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2020 yang dimuat dalam Provinsi Gorontalo Dalam Angka 2023 (BPS), terdapat angka luasan yang sedikit berbeda. Hal tersebut disajikan bersama dengan luasan kawasan hutan masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo di Tabel 2.229 berikut.

Tabel 2.229
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Hutan Lindung (Ha)	Suaka Alam & Pelestarian Alam (Ha)	Hutan Produksi			Luas Hutan & Perairan (Ha)
				Terbatas (Ha)	Tetap (Ha)	Konversi (Ha)	
1	Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
2	Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
3	Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83,304,44	41.476,29	10.522,52	228.289,59
4	Bonebolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,1	-	140.144,13
5	Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
6	Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
	Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	169.358,86	90.092,02	23.254,95	681.576,83

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, 2020

Untuk hutan produksi, beberapa areal dimanfaatkan masyarakat untuk menghasilkan bahan-bahan baku yang memiliki nilai tambah (*value added*) yang dapat memberikan tambahan penghasilan dan dapat mendorong pada pengurangan angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran karena serapan tenaga kerjanya mencapai 241 orang. Data pada Tabel 2.230 menunjukkan data produksi hasil hutan pada komoditas gula aren, kemiri, dan getah pinus sekaligus serapan tenaga kerjanya.

109.522,60 Ha
Luas kawasan hutan KPH IV



Tabel 2.230
Data Produksi Kelompok Tani Hutan

No.	Kecamatan/Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Anggota (Orang)	Komoditas/ Kegiatan	Jumlah Pohon	Produksi (Ton/Bulan)
I	**Kec. Atinggola**						
	1. Desa Posono	Bibito		9	Gula Aren	1.952	2,5
	2. Sigaso	Aren I		10	Gula Aren	2.400	3
		Aren II		10	Gula Aren	2.382	3
		Buta Damba		7	Gula Aren	2.167	2,5
		Bendungan		7	Gula Aren	1.920	2,5
	3. Pinontoyonga	Pagangga		15	Gula Aren	2.849	4
	4. Ilomata	Karya Bersama		10	Gula Aren	2.100	3
		Intan Jaya		10	Gula Aren	1.853	3
		Makmur Bersama		10	Gula Aren	2.230	3

No.	Kecamatan/Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Anggota (Orang)	Komoditas/ Kegiatan	Jumlah Pohon	Produksi (Ton/Bulan)
	5. Buata	KUPS Aren Waolo Indah		15	Gula Aren	1.920	3
	6. Tombulilato	KUPS Aren Tombulilato Mandiri		22	Gula Aren	2.721	4
II	**Kec. Gentuma Raya**						
	1. Durian	Harapan I	15	14	Gula Aren	554	1,5
		Bihe Jaya II	15	15	Gula Aren	642	1,5
		Iloheluma	16	15	Gula Aren	683	1,5
III	**Kec. Kwandang**						
	1. Bualemo	Usaha Bersama		15	Gula Aren	2.348	2,5
		Sinar Lestari		27	Gula Aren	1.962	2,9
	2. Leboto	Aren Jaya		15	Gula Aren	542	1,8
	3. Botuwombato	Agrowilis	Kemiri 62,5 Ha & pinus 11 Ha	15	Kemiri & penyadapan getah pinus		Kemiri 60 Ton/tahun & getah pinus 2 Ton/bulan
Total						**31.225**	

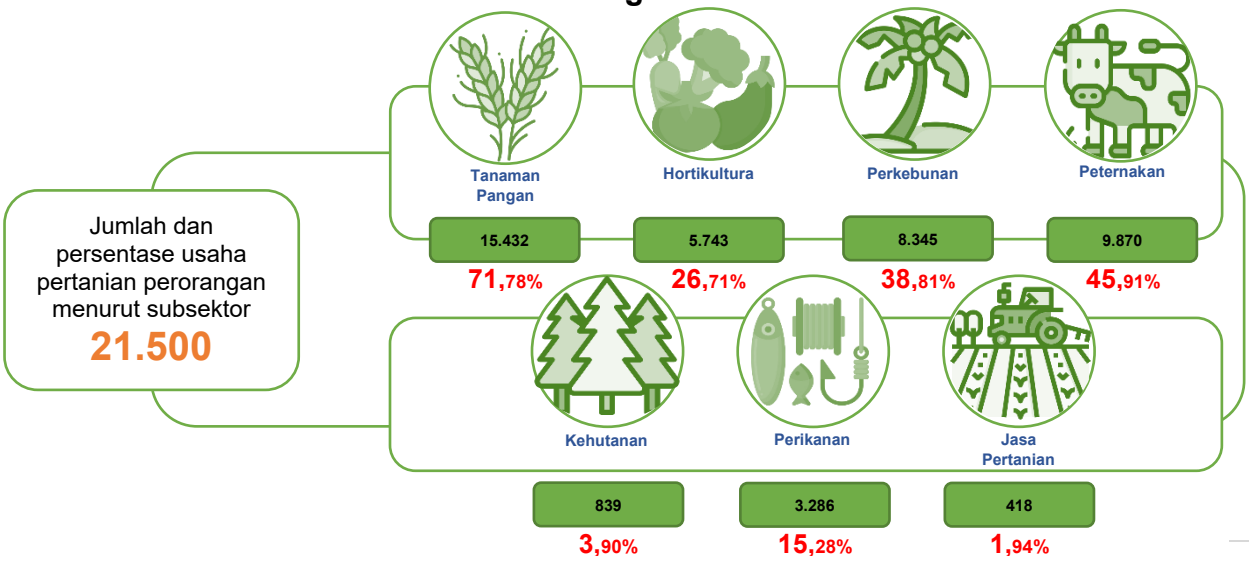
Sumber: KPH Wilayah IV Gorontalo Utara, 2022

Meskipun urusan kehutanan sudah beralih tanggungjawabnya pada Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2017, seiring dengan beralih statusnya Dinas Kehutanan, Energi, dan Sumber Daya dari Pemda Kabupaten Gorontalo Utara ke Provinsi Gorontalo, komitmen untuk menjaga lingkungan (menahan laju deforestasi) dan penghijauan (termasuk memperbaiki kondisi hutan yang terdegradasi) selalu menjadi pertimbangan utama melalui mekanisme izin lingkungan melalui Dinas Lingkungan Hidup yang berkolaborasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal kesesuaian peruntukan lahan. Selain itu, sektor kehutanan juga masih menjadi *driver* pertumbuhan ekonomi sektoral bersama dengan sektor primer lainnya seperti pertanian dan kelautan. Untuk itu, gerakan penghijauan selalu rutin dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui penanaman bibit pohon, maupun bantuan pohon bagi masyarakat.

Selain itu, berdasarkan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo Utara, Subsektor Kehutanan merupakan salah satu subsektor dari 7 subsektor pertanian yang dicacah dalam ST2023. Hasil dari pencacahan tersebut didapati 3 jenis usaha pertanian: Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan

Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Dari total 21.508 unit usaha pertanian, unit usaha subsektor kehutanan tidak melebihi angka 5 persen.

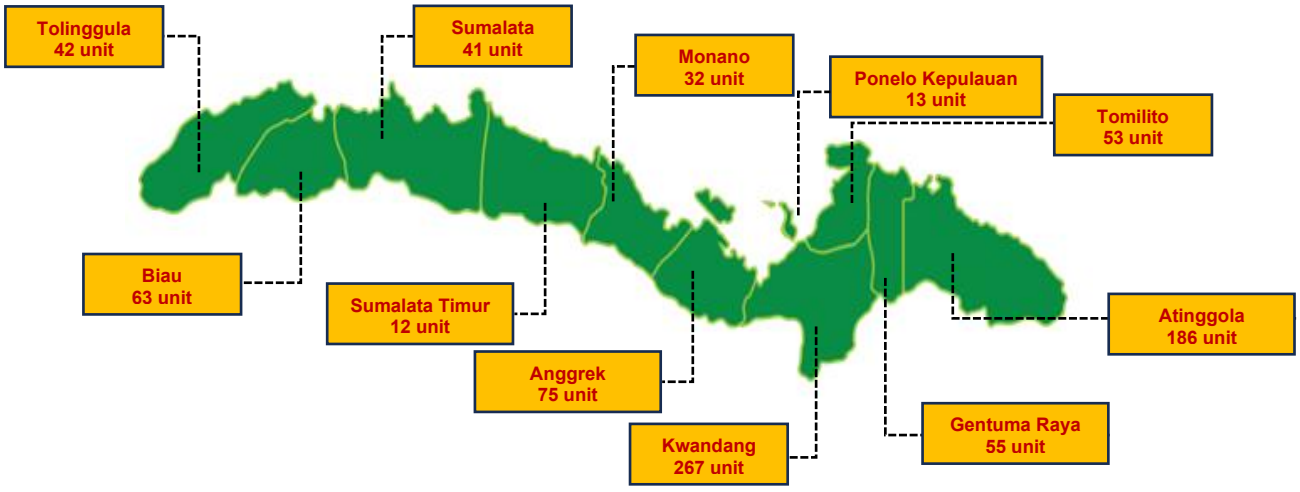
Gambar 2.30
Usaha Pertanian Perorangan Menurut Subsektor



Sumber: Hasil Pencacahan Lengkap ST2023 Kabupaten Gorontalo Utara (BPS), 2023

Sedangkan bila dirinci per kecamatan, entitas usaha pertanian subsektor kehutanan terbanyak didominasi Kecamatan Kwandang, dan paling sedikit di Kecamatan Sumalata Timur.

Gambar 2.31
Usaha Pertanian Perorangan Subsektor Kehutanan Per Kecamatan



Sumber: Hasil Pencacahan Lengkap ST2023 Kabupaten Gorontalo Utara (BPS), 2023

Pada luasan lahan kritis, data yang bersumber dari BP DAS Gorontalo dan KPH Unit IV menampilkan hasil berbeda. Menurut BP DAS terdapat sekitar 50.000 Ha lahan kritis yang terbagi pada lahan yang termasuk pada kawasan dan juga luar kawasan. Sedangkan data KPH Unit IV merinci per desa dengan

didapatkan angka lahan kritis pada hampir seluruh desa. Rincian luasan lahan tersebut bila dirinci per kecamatan disajikan pada Tabel 2.231 dan per desa pada Tabel 2.232.

Tabel 2.231
Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022

No.	Kecamatan	Dalam Kawasan (Ha)			Luar Kawasan (Ha)			Total
		Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	Kritis	Sangat Kritis	Jumlah	
1	Anggrek	2.283,41	4,84	2.288,25	4.771,66		4.771,66	7.059,91
2	Atinggola	1.279,41	-	1.279,41	2.097,27		2.097,27	3.376,68
3	Biau	1.710,97	-	1.710,97	1.581,25		1.581,25	3.292,22
4	Kwandang	3.346,36	9,06	3.355,41	3.653,11		3.653,11	7.008,53
5	Monano	1.171,82	44,99	1.216,80	4.434,82	75,50	4.510,31	5.727,12
6	Ponelo Kepulauan	34,42	-	34,42	379,78		379,78	414,20
7	Sumalata	4.771,07	6,62	4.777,69	5.224,79		5.224,79	10.002,48
8	Sumalata Timur	1.274,07	10,88	1.284,95	4.024,87		4.024,87	5.309,82
9	Tolinggula	727,40	-	727,40	3.588,33		3.588,33	4.315,72
10	Tomilito	237,81	-	237,81	4.014,16		4.014,16	4.251,97
Gorontalo Utara		**16.836,74**	**76,39**	**16.913,13**	**33.770,03**	**75,50**	**33.845,53**	**50.758,65**

Sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Bonebolango Gorontalo, 2023

Tabel 2.232
Lahan Kritis di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023 (Ha)

No.	Nama Desa	Kondisi					Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
1	Alata Karya	20,23	361,49		254,68		636,4
2	Biau	95,76	11,66	1,06	152,72	64,25	325,45
3	Bintana			20,45		20,21	40,66
4	Bohulo	8.264,3	288,43	8,84	751,52	8,13	9.321,22
5	Bohusami	49,63		103,78		21,15	174,56
6	Botungobungo	0,66	47,22		1.041,76		1.089,64
7	Botuwombato	252,46	133,37	6,73	472,93		865,49
8	Bualemo	4.601,34	776,82	1,15	1131,1		6.510,41
9	Bualo	54,49		1,85	85,7	7,67	149,71
10	Buata	14.356,55	33,76	9,98	630,72	1,78	15.032,79
11	Bubalango	1.006,22	55,4		757,43		1.819,05
12	Bubode	101,55	285,54		190,48		577,57
13	Buladu	903,65	0,12	13,96	202,26		1.119,99
14	Bulalo	392,31	4,06	213,6	6,79	185,75	802,51
15	Bulango Raya	168,28	143,35		56,08		367,71
16	Buloila	92,43	210,17	2,96	342,17	0,21	647,94
17	Bulontio Barat	5,5	3,08	50,31	774,46		833,35
18	Bulontio Timur	4.034,94	410,22	17,21	1.360,83	139,33	5.962,53
19	Buluwatu	57,37	4,44	22,65	47,18	0,68	132,32
20	Cempaka Putih	4.149,3	9,11	177,7	106,54	22,28	4.464,93
21	Cisadane	591,19	196,29		37,16		824,64
22	Dambalo	1.479,99	22,01		550,86	122,84	2175,7
23	Datahu	360,61	373,67	1,04	616,82		1.352,14
24	Deme Dua	3.327,39	244,65	11,62	1.043,81		4.627,47
25	Deme Satu	1.279,77	86,47	0,03	681,09		2.047,36
26	Didingga	76,3	6,48		469,81	1,71	554,3
27	Dudepo	556,5	37,84	16,98	253,39	111,35	976,06
28	Dulukapa	1.646,01	171,34	58,48	342,31	22,09	2.240,23
29	Dumolodo	514,63	5,42	2,12	5,52	13,44	541,13
30	Dunu	195,25	103,88		723,13		1.022,26
31	Durian	1.743,58	361,63		1.328,29		3.433,5
32	Garapia	151,77	10,6	75,02	563,35	45,78	846,52
33	Gentuma	0,3		68,38		13,66	82,34
34	Heluma	483,78	289,96	14,75	643,53		1.432,02
35	Hiyalooile	304,28	1,59		150,25		456,12

No.	Nama Desa	Kondisi					Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
36	Huidu Melito	179,03	34,33		269		482,36
37	Hulawa	448,97	4,11		168,21		621,29
38	Hutokalo	245,06	83,36	28,81	1.451,51	104,78	1.913,52
39	Ibarat	130,76	39,81		491,11	53,92	715,6
40	Ilangata	683,26	12,99	4,23	75,07	274,28	1.049,83
41	Ilodulunga	186,75	151,19	1,61	231,81		571,36
42	Iloheluma	434,16	392,02	27,38	914,97	9,6	1.778,13
43	Ilomangga	48,77	6,39		54,75	57,04	166,95
44	Ilomata	1.984,92	424,53		1260,5	1,59	3.671,54
45	Ilotunggulo	149,53	33,97	10,05	31,31	152,88	377,74
46	Imana	666,63	14,31		102,34	181,52	964,8
47	Ipilo	278,22	87,68		412,27		778,17
48	Jembatan Merah	205,35	7,62		411,43	48,48	672,88
49	Kasia	2.550,75	99,74		1.013,47		3.663,96
50	Katialada	524,64			10,29		534,93
51	Ketapang	6,28		1,7		27,49	35,47
52	Kikia	1.266,76	111,53		1.175,62		2.553,91
53	Koluwoka	1.384,35	60,26		756,48		2.201,09
54	Kotajin	14,11				38,98	53,09
55	Kotajin Utara	319,3	3,83		2,58	50,63	376,34
56	Langge	44,6	327,63		498,19		870,42
57	Langke	1.266,25	269,39	25,08	1.049,2	4,56	2.614,48
58	Leboto	627,57		1,96	80,56	242,54	952,63
59	Lelato	1.045,02	107,75	42,1	1.397,51	46	2.638,38
60	Leyao	131,02	181,35		265,23		577,6
61	Limbato	2.713,78	40,44	143,36	469,3	47,46	3.414,34
62	Luhuto	31,52			58,32	24,23	114,07
63	Malambe	254,79	4,37	8,2	34,37	24,57	326,3
64	Masuru	279,12	58,79	0,05	191,94	31,7	561,6
65	Mebongo	2.446,9	107,43		565,21		3.119,54
66	Milango	2,13	33,56		519,45		555,14
67	Mokonowu	90,51	24,88	7,79	152,15	37,78	313,11
68	Molangga	131,37	39,23	1,28	140,2	89,44	401,52
69	Molantadu	946,91	130,57	21,36	174,06	100,56	1.373,46
70	Molingkapoto	734,38		160,02	8,94	93,26	996,6
71	Molingkapoto Selatan	307,61	74,16	6,85	201,28		589,9
72	Molonggota	171,4	23	16,19	358,95	27,14	596,68
73	Moluo	89,84	2,61	25,14	55,2	288,14	460,93
74	Monano	118,8	5	0,32	37,79	68,7	230,61
75	Monas	192,11	28,37	26,9	207,86	20,91	476,15
76	Monggupo	86,12	1,07	4,04	51,62	107,4	250,25
77	Mootilango	912,64	181,23	38,63	622,01		1.754,51
78	Mootinelo	517,78			53,44	191,47	762,69
79	Motiheluma	865,6	93,18	9,6	216,95	39,47	1.224,8
80	Motomingo	172,8	26,17	15,42	177,81	60,89	453,09
81	Mutiara Laut	77,82	47,25		283,83		408,9
82	Nanati Jaya	22,9	3,98	24,96		16,9	68,74
83	Oluhuta	86,19	3,17			8,75	98,11
84	Ombulodata	364,78	186,76		480,76		1.032,3
85	Omuto	37,83	5,39	6,97	78,5	23,68	152,37
86	Otiola	140,26				4,57	144,83
87	Papulangi	3.299,01	53,07	325,93	488,12	53,57	4.219,7
88	Pasalae	3,33			3,27	24,42	31,02
89	Pilohulata	16,99	13,8	69,89	405,95	91	597,63
90	Pinontoyonga	105,77		6,4		56,75	168,92
91	Ponelo	100,27		3,71	13,03	33,2	150,21
92	Pontolo	1.093,22	2	36,82	3,26	66,42	1.201,72
93	Pontolo Atas	295,79	180,59	14,76	52,11		543,25
94	Popalo	249,74			43,74	134,23	427,71
95	Posono	411,82			81,9		493,72
96	Posso	263,81	6,97		202,14	13,66	486,58
97	Potanga	417,32	186,66	0,2	443,06		1.047,24
98	Pulohenti	850,57	58,15		133,18		1041,9
99	Puncak Mandiri	779,33	66,14	2,27	572,72		1.420,46
100	Putiana	503,69	69,78		362,41	79,75	1.015,63
101	Sembihingan	208,61	59,67	6,8	513,61	2,87	791,56
102	Sigaso	2.327,64	225,87	60,07	563	10,22	3.186,8

No.	Nama Desa	Kondisi					Total
		Agak Kritis	Kritis	Potensial Kritis	Sangat Kritis	Tidak Kritis	
103	Sogu	858,73	1.030,41	27,67	1.699,5	9,8	3.626,11
104	Tanjung Karang	504,68	124,55	9,09	1.203,33	84,35	1926
105	Tihengo	72,78				13,84	86,62
106	Titidu	730,85	553,68	2,19	786,92		2.073,64
107	Tolango	275,04	0,64	53,3	76,47	92,31	497,76
108	Tolinggula Pantai	418,64	22,78	27,17	371,46	385,96	1.226,01
109	Tolinggula Tengah	462,45	112,43	2,66	231,5	251,28	1.060,32
110	Tolinggula Ulu	1.745,95	119,55	29,31	460,06	62,51	2.417,38
111	Tolite Jaya	1.162,99		7,72			1.170,71
112	Tolitehuyu	1.562,89	419,26	2,37	818,21		2.802,73
113	Tolongio	722,37	6,74		45,97	134,13	909,21
114	Tombulilato	59,77	9,23		175,46		244,46
115	Topi	9,97	6,71	76,48	347,38	73,73	514,27
116	Tudi	50,08	22,18	8,53	857,95	22,5	961,24
117	Tumba	1.167,25	104,06		194,82		1.466,13
118	Tutuwoto	280,61	120,93		73,61		475,15
119	Wapalo	1.434,96	246,91		825,95		2.507,82
120	Windu	50,98	6,14	24,72	90,32	85,8	257,96
121	Wubudu	2.405,77	15,84		798,5		3.220,11
122	Zuriyati	386,76	89,72	4,92	461,96	1,33	944,69
		103.226,7	**12.198,93**	**2.363,63**	**46.438,89**	**5.187,25**	**169.415,4**

Sumber: KPH Unit IV Gorontalo Utara, 2024

2. Urusan Pariwisata

Sektor pariwisata Gorontalo Utara memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata yang tersebar di 11 kecamatan. Melalui *multiplier effect*-nya, pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dapat dilakukan dengan mempromosikan pengembangan pariwisata.

Selain itu, peran strategis pariwisata dalam pencapaian target tersebut tidak hanya sebatas sebagai mesin pertumbuhan semata, tetapi diharapkan juga menjadi lokomotif distribusi modal, akses, keterampilan, pendapatan, dan daya tawar bagi masyarakat. Pembangunan pariwisata termasuk dalam satu diantara tujuh belas target pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals* - SDGs). Disebutkan dalam target nomor 8 dari SDGs bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan akan tercapai salah satu caranya melalui berkelanjutannya kontribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi/PDB.

Penguasaan modal pariwisata yang tidak menumpuk di segelintir orang dan menyingkirkan masyarakat lokal merupakan peran pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk memastikannya. Kebijakan dan tindakan mencegah atau bahkan membatasi alih-kepemilikan modal tak bergerak milik masyarakat di destinasi wisata harus lebih ditingkatkan guna menjamin mekanisme distribusi dan keseimbangan modal berjalan efektif dan efisien. Dengan demikian, sektor pariwisata menjadi sektor yang inklusif dan anti pemiskinan massal. Masyarakat yang semakin berdaya dan otonom untuk menentukan pilihan atas peluang ekonomi pariwisata adalah bukti nyatanya.

Pembangunan dan pengelolaan pariwisata yang baik dan bertanggungjawab dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme kewirausahaan sehingga produk wisata milik masyarakat semakin mudah untuk diorbitkan oleh para wisatawan. Tak lupa pula guna membantu masyarakat lokal pelaku usaha pariwisata untuk mendapatkan akses terhadap pasar, pendampingan secara intensif, berjenjang, dan dalam jangka panjang dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sejak tahun 2019 telah memulai persiapan pembangunan destinasi pariwisata baru yang terintegrasi dengan lokasi atau layanan pariwisata lainnya dan mengusung konsep berkelanjutan seperti *Sumalata Water Park* dan *Kwandang Waterfront City*. Melalui konsep *integrated* dan *sustainable tourism* tersebut, setidaknya ada 3 hal penting dalam membangun industri pariwisata: *related to green economy* (ekonomi yang ramah lingkungan) seperti penggunaan transportasi antar lokasi wisata yang ramah lingkungan; *digitalized economy* (layanan pariwisata dan transportasi harus terdigitalisasi dan mudah diakses) sehingga calon wisatawan terutama yang sudah teredukasi digital merasakan kenyamanan; *longevity* (berumur panjang) sehingga perlu dipastikan infrastruktur fisik sudah cukup mumpuni sehingga dapat digunakan dalam jangka yang panjang, juga mendukung faktor kesehatan dan kebersihan.

A. Kunjungan Wisata

Secara statistik, kunjungan wisata terjadi fluktuasi. Fenomena paling menonjol ketika pandemi di tahun 2020 dan 2021, justru terjadi anomali

kunjungan wisatawan yang meningkat drastis, meskipun masih tetap didominasi oleh kunjungan wisatawan lokal/domestik. Tabel 2.233 berikut memuat data kunjungan wisatawan ke Gorontalo Utara rentang tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 2.233
Kunjungan Wisatawan

No.	Asal Wisatawan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Domestik	20.056	33.986	39.259	35.180	29.587
2	Mancanegara	92	14	2	56	14
Total		**20.148**	**34.000**	**39.261**	**35.236**	**29.716**

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024

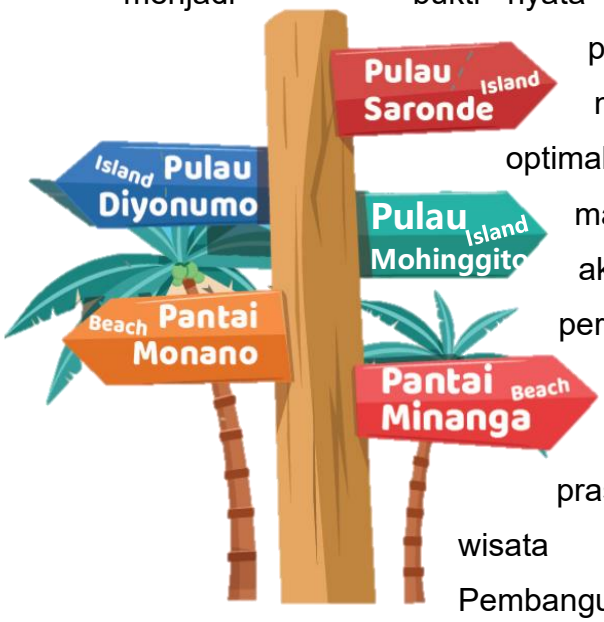
Kemunculan objek wisata baru, biasanya diikuti kunjungan wisata yang meningkat. Seperti misalnya di penghujung tahun 2019, objek wisata Pantai Botudidingga di Desa Botudidingga Kecamatan Tomilito muncul, diikuti dua objek wisata baru yang tidak kalah indah dan menarik di tahun 2020, yakni Wisata Pantai Minanga di Desa Kota Jin Utara Kecamatan Atinggola dan Wisata Arung Jeram di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula yang mendorong terkereknya angka kunjungan wisata. Kemiripan yang dimiliki oleh tiga objek wisata tersebut adalah terkait pengembangan, perawatan dan promosinya menggunakan transfer Dana Desa. Selanjutnya objek ini dikelola oleh BUMDES setempat bersama dengan Kelompok Sadar Wisata di masing-masing desa. Dengan bertambahnya koleksi objek wisata diharapkan pendapatan masyarakat dari sektor wisata dapat meningkat dan meningkatkan ekonomi wilayah secara keseluruhan. Pada tahun 2023,



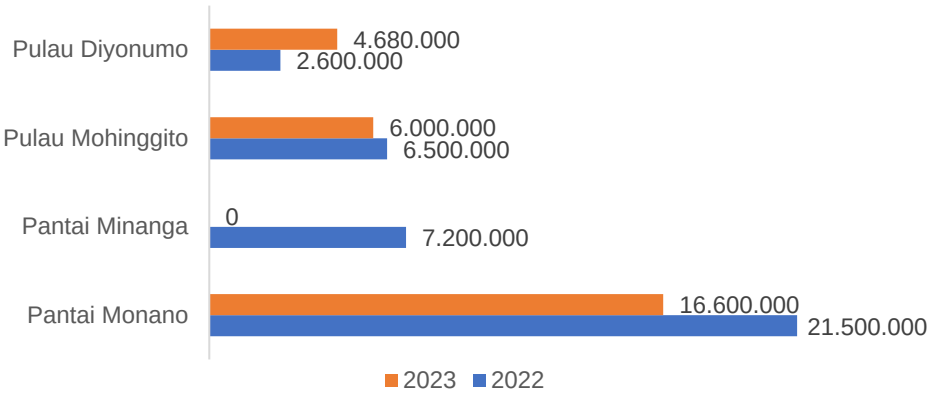
hadir atraksi baru yang terletak di Desa Dunu Kecamatan Sumalata Timur, berupa atraksi paralayang di sekitar perbukitan yang kemudian dikenal dengan Bukit Dunu Ceria yang berhasil menarik wisatawan sebanyak 4.647 kunjungan, sehingga diproyeksikan di masa depan Bukit Dunu Ceria sebagai penyumbang kunjungan wisatawan yang cukup dominan.

B. Kontribusi Sektor Wisata Terhadap PAD

Jumlah kunjungan wisatawan yang naik signifikan pada tahun 2021 menjadi bukti nyata bahwa sektor pariwisata merupakan primadona yang berpotensi mampu meningkatkan PAD jika dikelola secara optimal dan berkesinambungan. Diperkirakan di masa depan, jumlah kunjungan wisatawan akan terus meningkat seiring dengan pertambahan populasi penduduk, serta proses peningkatan, pengembangan, dan pemenuhan berbagai sarana prasarana dan amenitas di seluruh objek wisata di Kabupaten Gorontalo Utara. Pembangunan berbagai sarana seperti *shelter*, lesehan, kamar mandi, kamar bilas, serta wahana bermain bagi anak-anak yang bersifat tematik akan dilaksanakan, mulai dari Kecamatan Atinggola hingga Tolinggula. Tak lupa, pembangunan berbagai prasarana seperti penginapan atau *cottage* sangat diperlukan di beberapa objek wisata.



Grafik 2.75
Retribusi Objek Wisata



Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024

C. Akomodasi Wisata

Sebagai salah satu penentu keberhasilan suatu destinasi pariwisata, komponen produk wisata harus dimiliki oleh suatu daerah dalam mengembangkan sektor kepariwisataannya. Komponen produk pariwisata yaitu *attraction, amenities,* dan *accessibility* menjadi komponen yang sangat penting untuk dikembangkan dalam menarik minat wisatawan. Seluruh objek wisata yang ada, baik yang sudah dikembangkan maupun yang masih berupa potensi, harus didukung juga dengan penyediaan akomodasi yang memadai. Ketersediaan tempat menginap/beristirahat serta restoran/tempat makan menjadi komponen krusial. Berikut Tabel 2.234 memuat jumlah hotel, kamar, dan tempat tidur, dan juga Tabel 2.235 yang memuat jumlah rumah makan yang tersedia di setiap kecamatan.

Tabel 2.234
Hotel, Kamar, dan Tempat Tidur

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah hotel/penginapan (unit)	4	4	6	7	7
2	Jumlah kamar (unit)	35	58	64	85	85
3	Jumlah tempat tidur (unit)	43	69	105	95	95

Sumber: Survei Hotel Tahunan (BPS), diolah

Tabel 2.235
Restoran/Rumah Makan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Atinggola	3	3	3	3	3
2	Gentuma Raya	3	3	3	3	3
3	Tomilito	2	2	2	2	2
4	Kwandang	31	31	31	31	31
5	Ponelo Kepulauan	1	1	1	1	1
6	Anggrek	2	2	2	2	2
7	Monano	2	2	2	2	2
8	Sumalata Timur	1	1	1	1	1
9	Sumalata	1	1	1	1	1
10	Biau	1	1	1	1	1
11	Tolinggula	6	6	6	6	6
Gorontalo Utara		53	53	53	53	53

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2024

Penentuan tingkat kecukupan hotel/kamar/tempat tidur perlu mempertimbangkan angka keterisian/hunian hotel yang tersedia. Okupansi pernah sangat rendah saat pandemi mendera, sehingga menekan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tabel 2.236 berikut menunjukkan tingkat okupansi hotel di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.236
Tingkat Okupansi Hotel

No.	Bulan	Tingkat Hunian Hotel (%)		
		2019	2020	2021
1	Januari	7,10	6,58	3,52
2	Februari	9,46	8,00	-
3	Maret	17,10	10,11	20,43
4	April	14,17	8,00	23,67
5	Mei	0,61	1,00	13,44
6	Juni	10,79	1,05	18,39
7	Juli	14,29	1,01	18,49
8	Agustus	72,27	9,07	26,56
9	September	17,05	15,01	19,39
10	Oktober	12,49	5,04	22,04
11	November	10,19	8,90	17,89
12	Desember	9,15	11,08	14,95

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2022

D. Kontribusi Pariwisata dalam Pertumbuhan Ekonomi

Cukup sulit untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap PDRB dan pertumbuhan ekonomi bila hanya mengandalkan data PDRB pengeluaran dan lapangan usaha, karena BPS tidak memberikan data sektoral khusus pariwisata. Jika kita melihat pembagian sektoral dalam PDRB Kabupaten Gorontalo Utara, sektor Akomodasi dan Makan Minum adalah sektor terdekat dengan pariwisata. Namun, jika kita menerapkan data tersebut untuk memperkirakan sumbangsih sektor pariwisata, dikhawatirkan akan muncul analisa yang bias. Jika kita melihat tingkat okupansi yang rendah dan jumlah restoran yang masih sedikit, disinyalir sumbangsih dari kedua indikator tersebut masih sangat rendah komposisinya terhadap data sektor Akomodasi dan Makan Minum, sehingga besarannya lebih dipengaruhi oleh makan minum yang berasal dari kegiatan pemerintahan. Selain itu, kita harus menyadari bahwa *output* kegiatan pariwisata tidak hanya dalam akomodasi dan makan minum, sektor lainnya seperti Transportasi, Jasa Lainnya, dan sektor lainnya juga dapat terpengaruh. Meski demikian, dalam laporan PDRB tahunan, sumbangsih sektor akomodasi dan makan minum selalu meningkat meski secara komposisi masih sangat rendah.

Tabel 2.237
Kontribusi Sektor Makan Minum dalam PDRB

No.	Tahun	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Nominal Sektoral Akomodasi dan Makan Minum ADHB (miliar rupiah)	63,08	66,04	70,13	74,92
2	Nominal Sektoral Akomodasi dan Makan Minum ADHK (miliar rupiah)	41,67	43,27	45,05	47,58
3	Kontribusi Sektoral Akomodasi dan Makan Minum (persen)	1,84	1,84	1,82	1,81
4	Laju Pertumbuhan (persen)	-0,72	3,84	4,10	5,62

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

3. Urusan Pertanian

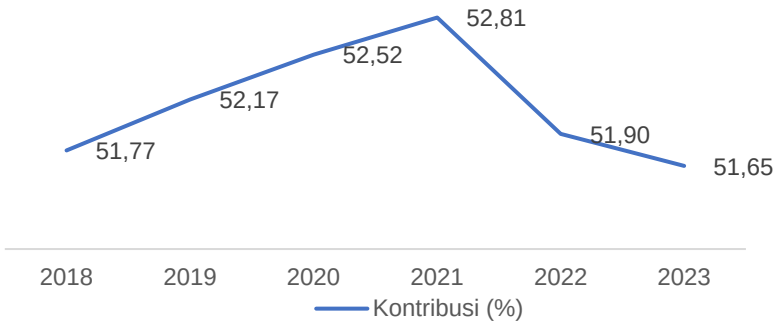
Sektor pertanian adalah salah satu sub sektor ekonomi yg peranannya sangat krusial dalam memberikan sumbangan terhadap ketahanan pangan suatu wilayah, khususnya bagi wilayah yang sektor agrarisnya cukup tinggi. Selain itu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi baik dari segi penyerapan tenaga kerja, penyumbang PDRB, pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan, sumber devisa, bahan baku industri, sumber bahan pangan dan gizi, serta pendorong bergeraknya sektor-sektor ekonomi lainnya. Pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berjalan secara berkesinambungan dalam mewujudkan (memenuhi) kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk mewujudkan kebutuhan hidupnya, sekaligus dipandang penting mengingat jumlah penduduk Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara terus bertambah dan diprediksi masing-masing akan mencapai 1,37 juta jiwa dan 153 ribu jiwa pada tahun 2035.

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk keempat tertinggi di dunia, sektor ketahanan pangan menjadi salah satu fokus perhatian kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dengan fluktuasi harga pangan dunia, berbagai kebijakan, program, dan investasi mulai lebih banyak diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan. Di Gorontalo Utara, produksi tanaman pangan berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas, sub sektor tanaman pangan mempunyai peran strategis dalam menjaga stabilitas suatu wilayah bahkan negara melalui ketersediaan dan ketahanan pangan.

A. Kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB

Peranan lapangan usaha pertanian, bersama kehutanan, dan perikanan dalam laporan perekonomian/PDRB Kabupaten Gorontalo Utara menduduki posisi terpenting, bahkan di atas 50 persen, meskipun dalam rentang enam tahun kontribusinya fluktuatif.

Grafik 2.76
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dalam PDRB



Sumber: PDRB Kabupaten Gorontalo Utara Menurut Lapangan Usaha 2018-2023 (BPS)

B. Tanaman Pangan

Sektor tanaman pangan merupakan potensi besar yang perlu terus dikembangkan, mengingat sektor ini adalah salah satu penyumbang terbesar komposisi PDRB dengan komoditas pangan utamanya padi dan jagung. Komoditas padi terdiri dari jenis padi sawah dan padi ladang. Padi sawah adalah padi yang ditanam di lahan sawah/basah, sebaliknya padi ladang ditanam di lahan kering. Berdasarkan data statistik pangan, luasan tanam yang dikelola menjadi lahan basah sejak tahun 2015 s.d. 2019 secara umum terus mengalami perluasan, namun pada tahun 2020 dan 2022 terjadi penurunan yang cukup signifikan. Penyebabnya perubahan sistem perhitungan oleh BPS yang sudah menggunakan metode KSA (Kerangka Sampel Area), dan beberapa lahan sawah tidak ditanami lagi karena kering (sebagian karena hanya sawah tadah hujan atau saluran irigasi yang rusak) sedangkan untuk komoditas jagung trennya mengalami peningkatan produksi, sejalan angka produktivitas. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, penyediaan lahan sawah sangat penting karena sebagian besar produksi beras yang merupakan bahan pangan pokok dihasilkan dari lahan sawah.

Terlepas dari hal tersebut, berbagai faktor dapat mempengaruhi jumlah produksi tanaman pangan, misalnya terutama ketersediaan bibit dan pupuk, pengaruh cuaca, perubahan alam, dan sebagainya. Namun faktor-faktor tersebut dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat sehingga tidak mengganggu jumlah produksi agregat wilayah untuk komoditas padi. Tabel 2.238 berikut adalah data terkait luas panen dan produksi padi sawah dan ladang serta jagung.

Tabel 2.238
Luas Panen, Produksi Padi Sawah dan Ladang, serta Jagung

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	*2023
1	Luas panen padi (Ha)	20.775	15.190	11.446	12.876	8.473	6.453
2	Produksi padi (Ton)	72.077	62.584	43.460	56.968	31.814	26.252
3	Produktivitas padi (Ton/Ha)	3,47	4,12	3,79	4,42	3,75	4,07
4	Luas panen jagung (Ha)	28.524	38.382	42.494	50.946	37.680	33.391
5	Produksi jagung (Ton)	127.948	202.874	201.642	259.451	190.135	169.059
6	Produktivitas jagung (Ton/Ha)	4,49	5,29	4,75	5,09	5,05	5,06

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2024
*data sementara

Permasalahan produksi hasil pertanian bukan saja bersumber dari ketersediaan lahan secara kuantitas namun juga kualitas. Pergeseran pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup menyebabkan menurunnya kualitas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya. Selain itu, penggunaan pupuk kimia pada lahan dalam jangka panjang juga akan mengurangi unsur hara dalam tanah yang berpengaruh pada penurunan angka produksi.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan serta digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya.

Dalam konteks Gorontalo Utara, bantuan benih unggul yang memiliki daya tahan minimal 90 persen dan tahan terhadap hama penyakit, sangat mempengaruhi produktivitas. Namun, terlepas dari hal tersebut perlu diperhatikan bahwa faktor manusia dan faktor alam tetap menjadi faktor terbesar dalam permasalahan sektor pertanian. Faktor manusia yaitu

karena masih rendahnya pengetahuan, maupun pola pikir masyarakat yang masih konvensional. Sedangkan dari sisi sumber daya alam dan lingkungan hidup umumnya disebabkan oleh pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak berwawasan lingkungan. Selain itu pemupukan yang tidak berimbang juga akan menjadi pemicu menurunnya produktivitas tanaman yang akan berdampak pada penurunan produksi tanaman pertanian.

Selain dua faktor diatas, faktor pelemahan juga muncul dari sulitnya kaum petani untuk mendapatkan akses permodalan serta dalam usaha pengolahan hasil pertanian. Petani Gorontalo Utara yang sebagian besar masih sebagai penggarap menyebabkan petani tidak memiliki jaminan sebagai prasyarat mendapatkan pinjaman. Pemerintah Daerah telah berusaha untuk membantu memediasi para petani dengan perbankan untuk memperoleh bantuan pinjaman modal, namun banyak yang memiliki catatan kredit di masa lalu.

Berdasarkan RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat program untuk pengembangan dan pengendalian kawasan untuk sektor pertanian pada kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah. Kecamatan Sumalata merupakan kecamatan yang memiliki luasan lahan panen terluas dibandingkan 10 kecamatan lainnya sehingga di masa depan, perlu dilakukan usaha intensifikasi dan program prioritas pengembangan pertanian. Secara lengkap data mengenai luasan lahan sawah dan jenis pengairan per kecamatan disajikan pada Tabel 2.239.

Ponelo Kepulauan,

satu-satunya kecamatan yang tidak memiliki lahan sawah



Tabel 2.239
Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan

No.	Nama Kecamatan	2022			2023		
		Irigasi (Hektar)	Non-Irigasi (Hektar)	Jumlah	Irigasi (Hektar)	Non-Irigasi (Hektar)	Jumlah
1	Atinggola	117	145	262	88	94	182
2	Gentuma Raya	369	40	409	316	30	346
3	Tomilito	158	24	182	127	24	151
4	Ponelo Kepulauan	0	0	0	0	0	0
5	Kwandang	676	167	843	673	164	837
6	Anggrek	285	15	300	258	15	273
7	Monano	5	33	38	5	70	75
8	Sumalata Timur	147	16	163	97	14	111
9	Sumalata	1.192	66	1.258	705	46	751
10	Biau	849	0	849	689	0	689
11	Tolinggula	1.010	50	1.060	763	36	799
Jumlah		**4.808**	**556**	**5.364**	**3.721**	**493**	**4.214**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2024

Secara umum, lahan produksi padi masih didominasi oleh hasil produksi dari sawah yang beririgasi. Hampir 90 persen lahan produksi padi berasal dari lahan teririgasi.

C. Tanaman Hortikultura

Berbeda dengan tanaman pangan, produksi komoditas hortikultura unggulan belum maksimal. Komoditas tanaman hortikultura yang ada di Gorontalo Utara seperti bawang merah, cabai rawit, tomat, cabai besar, dan durian sebagai komoditas yang paling banyak diproduksi. Durian banyak terdapat di wilayah Kecamatan Tolinggula dan Atinggola. Tabel 2.240 berikut menunjukkan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.240
Produksi Tanaman Hortikultura

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	*2023
1	Cabe rawit (Ton)	2.3924	2.846,8	2.057,5	1.775,5	2.104,5	2.314,9	2.034,9
2	Cabe besar (Ton)	7,6	76,1	17,1	0	63,3	28,8	1,8
3	Tomat (Ton)	11,5	164,2	2,5	7,4	3,3	8,8	69
4	Bawang merah (Ton)	89,8	41	118,1	0	1,1	0	0
5	Durian (Ton)	318,8	148	334,4	289,1	655,3	596,9	1.095,1
6	Mangga (Ton)	284,2	129,6	99,0	105,1	305,7	295	589,9

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2024
*Data sementara

Di tahun 2020, angka produksi cabai rawit turun karena penurunan lahan tanamnya. Penurunan produksi durian di tahun 2020 disebabkan curah

hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun 2020, sehingga banyak tanaman durian yang tidak menghasilkan buah, walaupun pohonnya dalam kondisi tanaman produktif. Seiring dengan bantuan bibit yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, hasil panen di 2021 jauh meningkat ditunjang oleh kondisi cuaca yang relatif kondusif bagi perkembangan durian.

Beberapa faktor yang menyebabkan fluktuatifnya angka produksi tanaman hortikultura unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah:

- Faktor cuaca, terutama jika curah hujan yang terlampau tinggi akan sangat mempengaruhi penurunan angka produksi sekalipun tanaman dalam usia produktif;
- Jumlah tanaman tua yang cukup tinggi sehingga perlu peremajaan tanaman dengan melaksanakan reboisasi;
- Budidaya tanaman hortikultura yang belum sesuai teknis karena masyarakat masih banyak yang menggunakan budidaya konvensional; dan
- Pemupukan yang belum berimbang.

Guna menyikapi hal tersebut, Pemerintah Daerah berusaha untuk merubah *mindset* petani tentang pengembangan tanaman hortikultura, namun terasa berbagai usaha tersebut masih membutuhkan waktu. Solusi jangka pendek telah diambil sebagai jawaban atas permasalahan yang ada, yaitu:

- Melakukan pembinaan terhadap petani tentang budidaya tanaman hortikultura yang memiliki nilai ekonomi;
- Memberikan bantuan benih untuk pengembangan tanaman hortikultura;
- Promosi terhadap hasil pertanian khususnya hortikultura sehingga masyarakat lebih mengenal hasil tanaman hortikultura sekaligus diharapkan akan meningkatkan angka produksi tanaman hortikultura.

Selain upaya-upaya diatas, pemerintah juga perlu mendorong upaya-upaya pertanian yang ramah lingkungan sebagai upaya mendukung *green economy*, baik alat pertanian, maupun metode pengolahannya. Kabupaten Gorontalo Utara termasuk dalam wilayah yang rentan terhadap bencana alam, dibuktikan dengan sering terjadinya banjir, yang dipengaruhi selain oleh curah hujan, juga karena tutupan lahan yang semakin berkurang

karena alih fungsi ke lahan pertanian. Penanaman jagung di lahan kemiringan di atas 15 derajat juga turut bersumbangsih dalam kondisi tersebut. Pemerintah Daerah harus memikirkan insentif yang tepat agar para pengelola lahan tani dapat turut pula memikirkan efek jangka panjang dari penggunaan metode dan alat pertanian yang tidak ramah lingkungan.

D. Tanaman Perkebunan

Ada 3 komoditas perkebunan unggulan yang dikembangkan, yaitu kelapa dalam, kakao dan cengkeh. Tabel 2.241 hingga 2.243 berikut menyajikan kinerja sub-sektor perkebunan di Gorontalo Utara.

Tabel 2.241
Luas Panen dan Produksi Kelapa Dalam

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas panen (Ha)	5.847	5.857	6.121,82	6.133,82	6.135,82
2	Produksi (Ton)	8.743,0	8.749,04	9.121,51	9.133,24	9.138,9
3	Produktivitas (Ton/Ha)	1,495	1,494	1,490	1,489	1,489

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.241 di atas, produksi tanaman kelapa mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan karena saat ini sudah banyak tanaman kelapa yang berusia tua. Sedangkan tanaman yang berusia muda belum optimal dengan tingkat produksi yang masih rendah. Usaha peremajaan melalui bantuan bibit terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan produktivitas kelapa dalam. Kendala lainnya yakni usaha untuk memberikan *economic value added* yang masih rendah, karena kelapa tersebut hanya dijual dalam bentuk kopra, bahkan utuh. Minimnya alat pengolahan hasil perkebunan kelapa dan rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya *value added creation* dianggap sebagai faktor penyebab hal tersebut. Jaminan perlindungan harga jual, kualitas, dan kuantitas produksi tanaman kelapa yang masih belum maksimal oleh Pemerintah Daerah menambah tekanan terhadap belum memuaskannya pencapaian produksi tanaman kelapa dalam. Lokasi perkebunan kelapa sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Ponelo Kepulauan, Gentuma Raya, dan Atinggola.

Kakao adalah salah satu komoditas perkebunan terpenting di Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia pernah menjadi produsen kakao nomor tiga di dunia. Sejak saat itu, produksi kakao terus mengalami penurunan meskipun lahan kakao terus meningkat. Tabel 2.242 berikut menunjukkan fenomena di Gorontalo Utara yang memiliki similaritas dengan fenomena nasional.

Tabel 2.242
Luas Panen dan Produksi Kakao

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas panen (Ha)	345	431,5	430,25	424,25	424,25
2	Produksi (Ton)	111,78	111,81	112,59	93,26	92,17
3	Produktivitas (Ton/Ha)	0,324	0,259	0,262	0,220	0,217

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2024

Untuk komoditas kakao Kabupaten Gorontalo Utara, jika dilihat baik dari luas panen produksi dan produktivitas mengalami tren penurunan. Hal tersebut dikarenakan kondisi tanaman yang sudah mulai tua serta petani yang enggan untuk melakukan peremajaan tanaman kakao.

Luas tanam kakao masih relatif kecil jika dibandingkan dengan komoditas kelapa dalam. Potensi pengembangan lahan untuk kakao sebenarnya masih sangat luas, namun lahan yang tertanami masih sangat sedikit. Selain itu masih banyak tanaman kakao yang masih muda sehingga masih terbilang prematur untuk berbuah. Masih belum optimalnya luas tanaman kakao diakibatkan minat masyarakat yang kurang terhadap komoditas ini. Lemahnya pengelolaan pasca panen menjadikan harga kakao dari petani di Gorontalo Utara kurang baik, padahal di perdagangan dunia, harga kakao berada pada tren positif. Pada awal Desember 2018 lalu misalnya, menurut data di bursa *London Intercontinental Exchange* (ICE), harga berada di angka US$2.136,5 per Ton. Sebagai perbandingan, pada 13 Maret 2021, harga kakao di bursa ICE New York terpantau berada di angka US$2.581,50 per Ton, sedikit turun dari sehari sebelumnya yang berkisar US$2.593 per Ton, sedangkan pada tanggal 2 Januari 2024 telah mencapai US$5.065,49 per Ton.

Pengelolaan pasca panen belum dapat dilakukan secara optimal karena selain kurangnya peralatan, keterampilan petani juga belum baik. Lahan perkebunan kakao sebagian besar berada di wilayah Kecamatan

Tolinggula, Biau, Sumalata, Sumalata Timur, Monano, Anggrek, Tomilito, Gentuma Raya, dan Atinggola.

Tabel 2.243
Luas Panen dan Produksi Cengkeh

No.	Uraian	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Luas panen (Ha)	666	682	725	664	664	676	710,70	739,20	744,20
2	Produksi (Ton)	236	196	230	200,95	201,19	203	230	233	208,14
3	Produktivitas (Ton/Ha)	0,28	0,28	0,317	0,302	0,303	0,30	0,324	0,315	0,280

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2024

Tabel 2.243 di atas menunjukkan pencapaian yang kurang menggembirakan pada komoditas cengkeh, padahal di *market*, harga cengkeh telah menyentuh di atas US$10 per Kilogram. Lahan cengkeh sebagian besar berada di wilayah Kecamatan Monano, Sumalata, Sumalata Timur, Biau, Tolinggula, dan Atinggola. Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan/stagnansi angka produksi tanaman cengkeh adalah:

- Banyak tanaman cengkeh yang sudah berusia tua;
- Curah hujan tinggi;
- Kebakaran lahan cengkeh di beberapa kecamatan pada beberapa tahun lalu.

Secara umum, tanaman perkebunan belum memberikan pengaruh besar terhadap pendapatan petani di Kabupaten Gorontalo Utara, namun tanaman perkebunan ini menjadi salah satu komoditas yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan karena nilai jualnya yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan tanaman pangan maupun tanaman hortikultura asalkan dapat dikelola dengan baik.

E. Kebijakan Alih Fungsi Lahan Pertanian

Lahan pertanian adalah lahan yang ditujukan atau cocok untuk dijadikan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian maupun hewan ternak. Dalam konteks penyediaan pangan, dampak konversi lahan sawah cenderung bersifat permanen karena lahan sawah yang telah dikonversi ke penggunaan non pertanian tidak pernah berubah kembali menjadi lahan sawah. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian alih fungsi lahan

sawah untuk menjamin produksi padi secara nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menetapkan beberapa kebijakan alih fungsi lahan antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan.

Rangkaian peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan tugas wajib pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Luas lahan pertanian di Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara terus terdegradasi yang disebabkan oleh pembangunan dan kegiatan alih fungsi lahan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Saat ini Perda LP2B Kabupaten Gorontalo Utara masih tahap penyelesaian, meskipun berprogres, namun perlu diakselerasi karena penyusutan lahan pertanian semakin besar.

Tabel 2.244
Perbandingan Luasan Sawah Pra dan Pasca Inventarisasi LP2B

No.	Kecamatan	Luas Inventarisasi (Ha)		Selisih (Ha)
		Sebelum	Sesudah	
1	Anggrek	355,49	234,92	-120,57
2	Atinggola	193,62	168,689	-24,931
3	Biau	721,30	688,414	-32,886
4	Gentuma Raya	401,31	346,282	-55,028
5	Kwandang	910,33	809,038	-101,292
6	Monano	120,80	102,462	-18,338
7	Ponelo Kepulauan	4,77	0,00	-4,77
8	Sumalata	836,08	752,666	-83,414
9	Sumalata Timur	148,70	142,181	-6,519
10	Tolinggula	888,55	576,224	-312,326
11	Tomilito	180,04	152,993	-27,047
Gorontalo Utara		**4.761,00**	**3.973,868**	**-787,132**

Sumber: Hasil Pengolahan ArcGIS pada dokumen Laporan Akhir LP2B Provinsi Gorontalo, 2020

Sedangkan sebagai pembanding, berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.327.XI.2023 tentang Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B), dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Tahun 2023 didapatkan luasan yang berbeda dengan data sebelumnya.

Tabel 2.245
Luasan dan Sebaran LP2B, LCP2B, dan KP2B Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (Ha)		
		LP2B	LCP2B	KP2B
1	Atinggola	165,34	122,93	288,27
2	Gentuma Raya	336,23	41,21	377,44
3	Tomilito	151,06	575,34	726,40
4	Ponelo Kepulauan	0	0	0
5	Kwandang	836,77	32,88	869,66
6	Anggrek	283,12	56,98	340,10
7	Monano	91,75	15,73	107,48
8	Sumalata Timur	110,76	23,37	134,13
9	Sumalata	751,20	143,53	894,73
10	Biau	688,60	91,21	779,81
11	Tolinggula	798,93	240,56	1.039,48
Gorontalo Utara		**4.213,76**	**1.343,75**	**5.557,51**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2024

Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan pertanian: (a) secara langsung konversi lahan pertanian ke non pertanian telah menurunkan kapasitas produksi pertanian; (b) rusaknya sistem pengairan di daerah produksi yang sudah dibangun; dan (c) hilangnya investasi yang telah ditanamkan dalam membangun waduk, jaringan irigasi, dan pencetakan sawah.

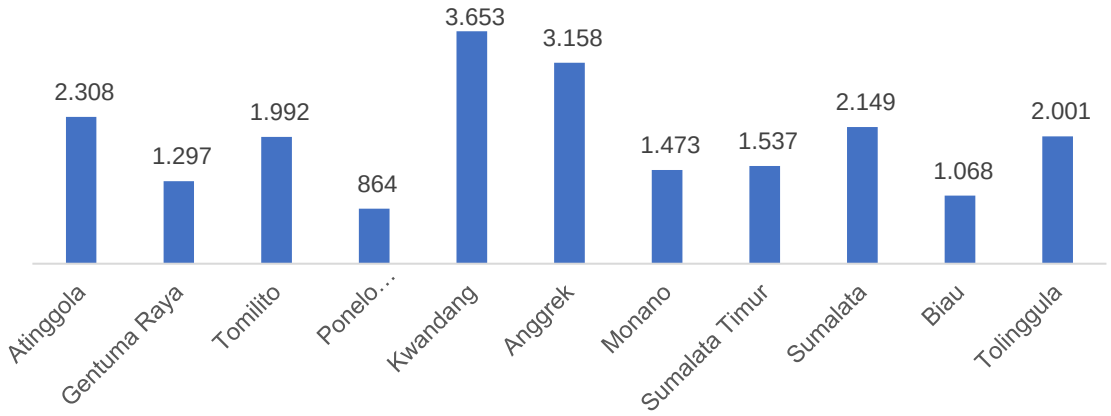
F. Usaha Pertanian

Usaha pertanian mencakup tiga jenis unit usaha yang berperan penting dalam ketersediaan dan ketahanan pangan, yakni Usaha Pertanian Perorangan (UTP), Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum (UPB), dan Usaha Pertanian Lainnya (UTL). Sinergi antara ketiga jenis unit usaha ini menjadi kunci dalam penyediaan dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Efektivitas kebijakan pertanian membutuhkan data jumlah usaha pertanian sebagai dasar penentuan berbagai program, seperti subsidi, insentif, bantuan/penyuluhan petani, dan program pertanian lainnya. Jumlah usaha

pertanian hasil sensus pertanian tahun 2023 (ST2023) mengalami peningkatan 15,56 persen dibanding dekade sebelumnya berdasarkan sensus pertanian 2013, dengan didominasi oleh UTP sebesar 99,96 persen dari total usaha pertanian. Berdasarkan ST2023, Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Atinggola merupakan 3 kecamatan dengan jumlah UTP terbanyak.

Grafik 2.77
Entitas Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Menurut Kecamatan

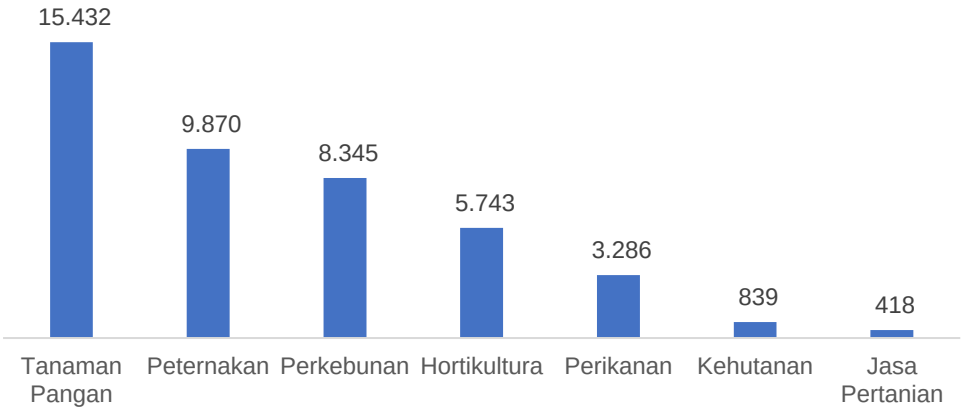


Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Berdasarkan keberadaan UPB hasil ST2023, Kecamatan Monano dan Sumalata Timur merupakan kecamatan dengan masing-masing 2 unit. Sedangkan satu-satunya kecamatan yang memiliki UTL yakni Gentuma Raya dengan jumlah 4 unit.

Selain itu, jumlah usaha pertanian per subsektor juga bermanfaat sebagai indikator peran dan potensi ekonomi pertanian. Tujuh subsektor hasil ST2023 yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian, dengan yang paling banyak diusahakan oleh UTP adalah tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. Penurunan terbanyak UTP terjadi pada subsektor kehutanan dan hortikultura masing-masing sebesar 72,93 persen dan 32,36 persen.

Grafik 2.78
Entitas Usaha Pertanian Perorangan (UTP) Menurut Subsektor

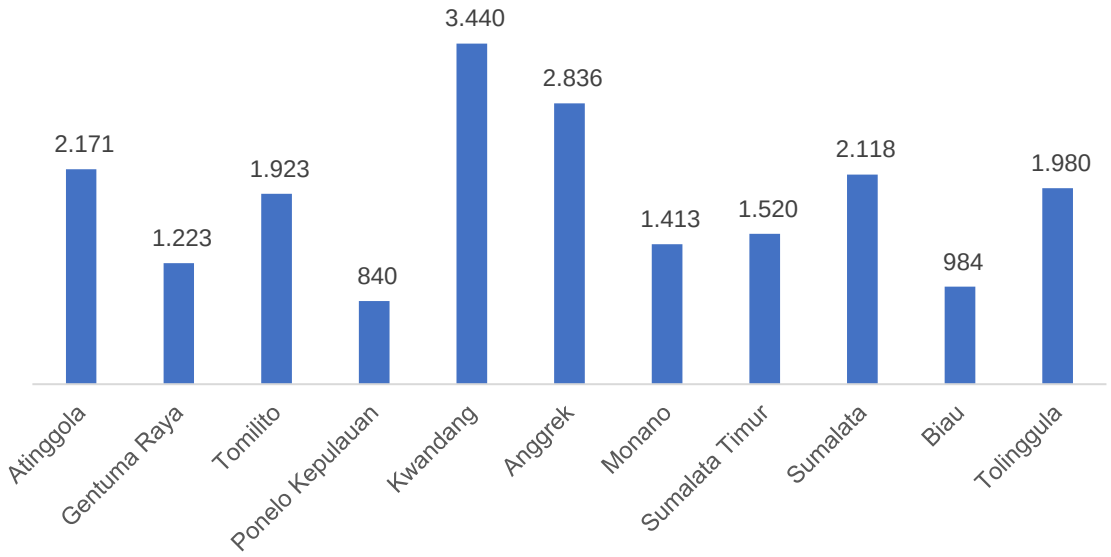


Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Sedangkan subsektor yang paling banyak diusahakan oleh UPB adalah kehutanan dan perkebunan masing-masing sebesar 2 unit. Jumlah UTL subsektor yang paling banyak diusahakan adalah hortikultura dengan 2 unit, sisanya tanaman pangan, perikanan, perkebunan, dan jasa pertanian masing-masing sebanyak 1 unit.

Pada Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), yang merupakan rumah tangga yang memelihara/menguasai/melakukan kegiatan pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual/ditukar (khusus tanaman pangan termasuk yang seluruhnya dikonsumsi sendiri), pada ST2023 menunjukkan kenaikan 15,53 persen jika dibandingkan edisi ST2013, dari 17.700 rumah tangga menjadi 20.448 rumah tangga, dengan Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Atinggola sebagai kecamatan dengan entitas RTUP terbanyak.

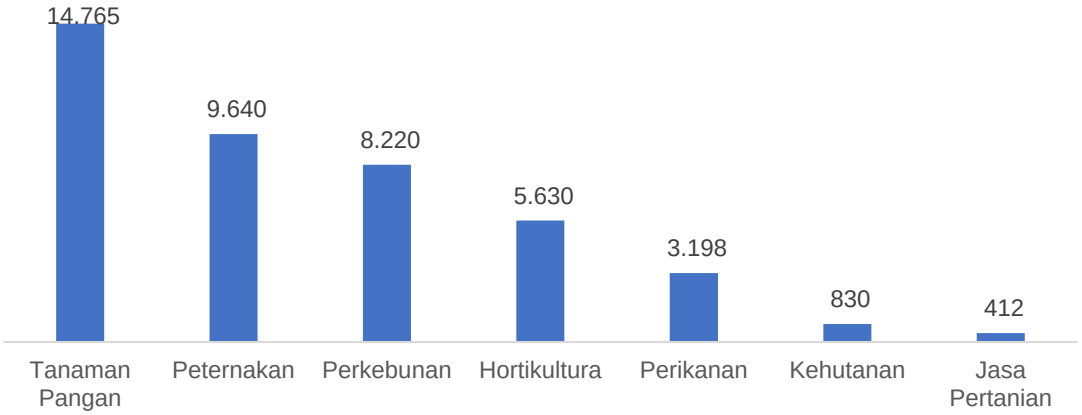
Grafik 2.79
Entitas RTUP Menurut Kecamatan



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Subsektor yang paling banyak diusahakan oleh RTUP adalah tanaman pangan, disusul peternakan dan perkebunan, dengan kelompok umur kepala rumah tangga yang bervariasi.

Grafik 2.80
Entitas RTUP Menurut Subsektor



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

RTUP di Kabupaten Gorontalo Utara mayoritas adalah kepala rumah tangga dalam rentang umur 45–54 tahun (28,66 persen). Jika ditinjau lebih dalam, sekitar 57,25 persen RTUP berkepala rumah tangga umur 45 tahun ke atas, sisanya sekitar 42,75 persen umur di bawah 45 tahun.

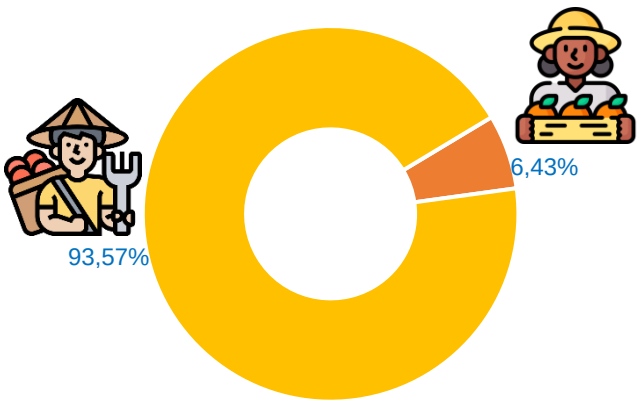
Tabel 2.246
Entitas RTUP Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga

No.	Kecamatan	Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga							Jumlah
		<15	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	
1	Anggrek	0	41	542	750	763	512	228	2.836
2	Atinggola	0	34	322	551	665	390	209	2.171
3	Biau	0	7	134	234	310	212	87	984
4	Gentuma Raya	0	16	180	305	384	241	97	1.223
5	Kwandang	0	44	472	844	1.012	705	363	3.440
6	Monano	0	51	266	316	403	261	116	1.413
7	Ponelo Kepulauan	0	27	143	209	241	138	82	840
8	Sumalata	0	52	324	507	596	434	205	2.118
9	Sumalata Timur	0	38	255	376	437	288	126	1.520
10	Tolinggula	0	56	322	471	538	401	192	1.980
11	Tomilito	0	47	365	440	511	349	211	1.923
Gorontalo Utara		**0**	**413**	**3.325**	**5.003**	**5.860**	**3.931**	**1.916**	**20.448**
Persentase		**0**	**2,02**	**16,26**	**24,47**	**28,66**	**19,22**	**9,37**	

Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Untuk membandingkan dari sisi kesetaraan gender, penting pula melihat jumlah rumah tangga usaha pertanian berdasarkan jenis kelamin kepala rumah tangga, karena hal ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi ketidaksetaraan gender serta memaksimalkan potensi kontribusi masing-masing gender dalam sektor pertanian, yang sekaligus menunjukkan kepala rumah tangga usaha pertanian didominasi oleh laki-laki.

Grafik 2.81
Persentase RTUP Menurut Jenis Kelamin KRT



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Tabel 2.247
Entitas RTUP Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga

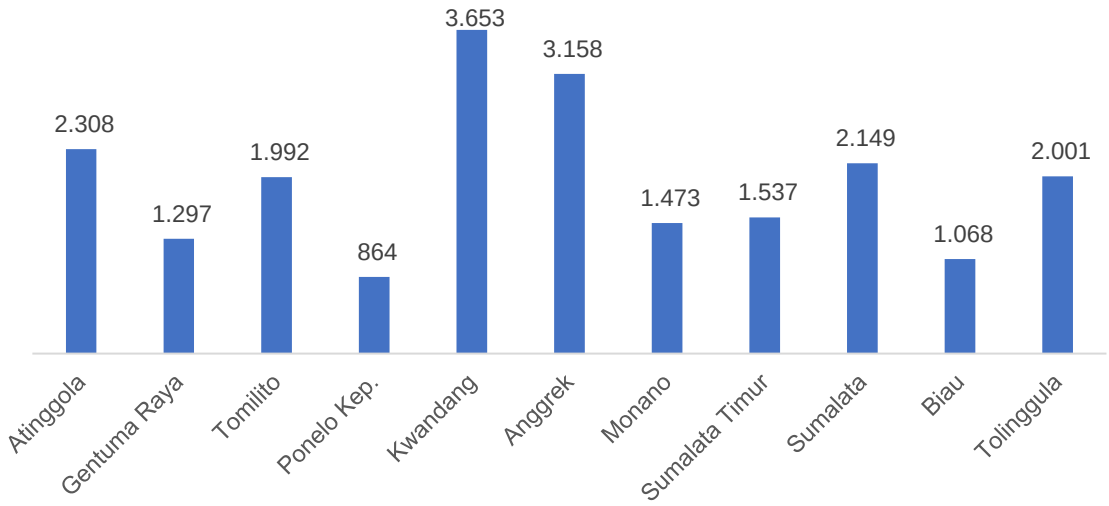
No.	Kecamatan	Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Anggrek	2.692	144	2.836
2	Atinggola	2.042	129	2.171
3	Biau	929	55	984
4	Gentuma Raya	1.147	76	1.223
5	Kwandang	3.192	248	3.440
6	Monano	1.329	84	1.413
7	Ponelo Kepulauan	767	73	840
8	Sumalata	2.006	112	2.118
9	Sumalata Timur	1.415	105	1.520
10	Tolinggula	1.841	139	1.980
11	Tomilito	1.774	149	1.923
Gorontalo Utara		**19.134**	**1.314**	**20.448**

Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

RTUP erat hubungannya dengan penggunaan lahan dalam pengusahaan komoditas pertaniannya. Satu dekade terakhir, RTUP yang menggunakan lahan mengalami peningkatan dari 16.998 unit (ST2013) menjadi 19.375 unit (ST2023), meningkat sekitar 13,98 persen. Sementara itu, RTUP Gurem, yakni rumah tangga pertanian pengguna lahan selama setahun yang lalu dan menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar pada saat pencacahan, mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari 4.666 unit (ST2013) menjadi 2.311 unit (ST2023), atau turun sebesar 50,47 persen.

Pada usaha pertanian perorangan, lima kecamatan yang memiliki jumlah pengelola usaha pertanian perorangan terbanyak yaitu Kecamatan Kwandang, Anggrek, Atinggola, Sumalata, dan Kecamatan Tolinggula.

Grafik 2.82
Entitas Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Karakteristik demografi petani dan pengelola usaha pertanian sangat diperlukan dalam pengambilan kebijakan. Informasi-informasi yang dibutuhkan antara lain informasi umur petani diperlukan dalam kebijakan insentif dan bantuan pertanian. Informasi data gender juga diperlukan dalam program pemberdayaan perempuan di bidang pertanian.

Jika ditinjau menurut kelompok umur, ST2023 menunjukkan usaha pertanian perorangan lebih banyak dikelola oleh petani yang berusia di atas 45 tahun atau sekitar 55,01 persen dari seluruh pengelola usaha pertanian perorangan di Indonesia. Tantangan pertanian secara umum di Indonesia saat ini memang berkaitan dengan regenerasi petani, yaitu upaya untuk membarui dan memperkuat sektor pertanian dengan melibatkan generasi muda dalam praktik-praktik pertanian.

Regenerasi di sektor pertanian sangat penting karena sektor ini adalah sektor kunci dalam pemenuhan kebutuhan pangan global. Namun saat ini petani mayoritas sudah lanjut usia, dan generasi muda kurang tertarik menekuni sektor ini, ditunjukkan dengan persentase kaum muda berusia kurang dari 25 tahun yang menjadi pengelola pertanian tidak lebih dari 3,16 persen.

Tabel 2.248
Entitas Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Kecamatan dan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga

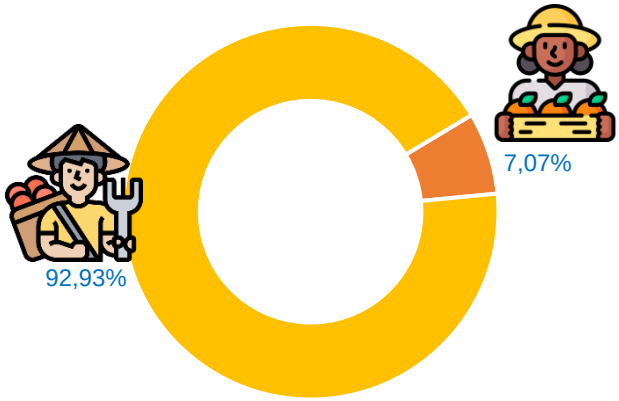
No.	Kecamatan	Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga							Jumlah
		<15	15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	≥65	
1	Anggrek	0	102	705	787	781	528	255	.3.158
2	Atinggola	0	65	406	569	666	395	207	2.308
3	Biau	0	29	178	244	315	212	90	1.068
4	Gentuma Raya	0	47	210	316	386	240	98	1.297
5	Kwandang	0	98	568	877	1.025	711	374	3.653
6	Monano	0	68	287	317	403	272	126	1.473
7	Ponelo Kepulauan	1	35	151	208	251	135	83	864
8	Sumalata	0	63	345	511	598	430	202	2.149
9	Sumalata Timur	0	44	272	380	437	286	118	1.537
10	Tolinggula	0	66	334	475	539	397	190	2.001
11	Tomilito	0	63	395	454	519	353	208	1.992
Gorontalo Utara		**1**	**680**	**3.851**	**5.138**	**5.920**	**3.959**	**1.951**	**21.500**
Persentase		**0,00**	**3,16**	**17,91**	**23,90**	**27,53**	**18,41**	**9,07**	

Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Apabila dilihat menurut gender, pengelola usaha pertanian perorangan (UTP) didominasi oleh pengelola berjenis kelamin laki-laki sebesar 92,93 persen, sisanya 9,07 persen pengelola perempuan. Tidak jauh berbeda

dengan kondisi sepuluh tahun lalu, petani pada ST2013 juga didominasi oleh laki-laki dengan 90,32 persen, sisanya 9,68 persen petani perempuan.

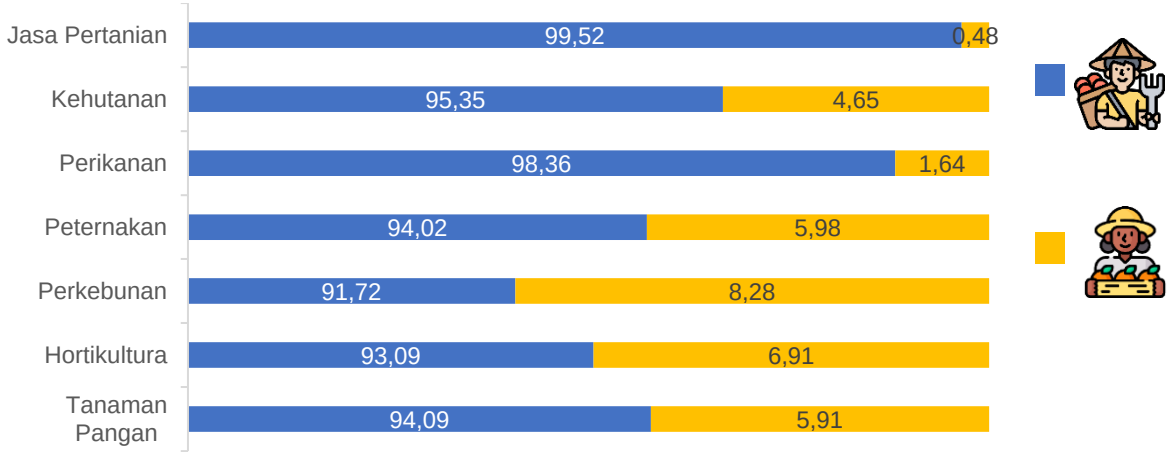
Grafik 2.83
Persentase Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Jika dilihat menurut subsektor, pengelola UTP di seluruh subsektor juga didominasi oleh pengelola laki-laki, yang menjadi bukti bahwa tantangan pertanian Indonesia saat ini salah satunya berkaitan dengan ketimpangan gender, dimana petani laki-laki lebih banyak dipekerjakan karena masih adanya anggapan bahwa sektor pertanian identik dengan maskulinisme dan dianggap pekerjaan yang membutuhkan kemampuan fisik yang berat.

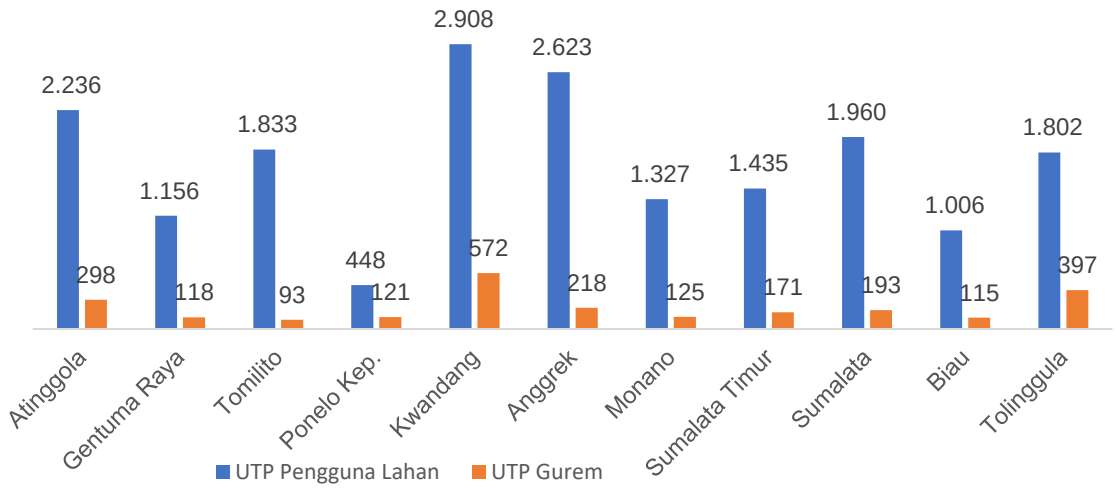
Grafik 2.84
Persentase Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Subsektor Menurut Jenis Kelamin



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Usaha pertanian perorangan pengguna lahan dan usaha pertanian gurem mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Jumlah UTP pengguna lahan paling banyak berada di Kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Atinggola. Sementara jumlah UTP gurem paling banyak berada di Kecamatan Kwandang, Tolinggula, dan Atinggola. Namun, jika dilihat persentase UTP gurem terhadap UTP pengguna lahan, Kecamatan Ponelo Kepulauan memiliki persentase tertinggi sebesar 27,01 persen. Hal ini menggambarkan bahwa cukup besar UTP pengguna lahan pada Kecamatan Ponelo Kepulauan yang merupakan UTP gurem.

Grafik 2.85
Entitas Usaha Pertanian Perorangan Pengguna Lahan dan Usaha Pertanian Gurem Menurut Kecamatan



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Petani pengguna lahan dan petani gurem mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Jika dilihat menurut kecamatan, jumlah petani pengguna lahan paling banyak berada di kecamatan Kwandang, Anggrek, dan Atinggola. Sementara jumlah petani gurem paling banyak berada di Kecamatan Kwandang, Tolinggula, dan Atinggola. Akan tetapi, jika dilihat persentase petani gurem terhadap petani pengguna lahan, kecamatan Ponelo Kepulauan memiliki persentase tertinggi yaitu sebesar 26,97 persen. Hal ini menggambarkan bahwa cukup besar petani pengguna lahan pada Kecamatan Ponelo Kepulauan yang merupakan petani gurem.

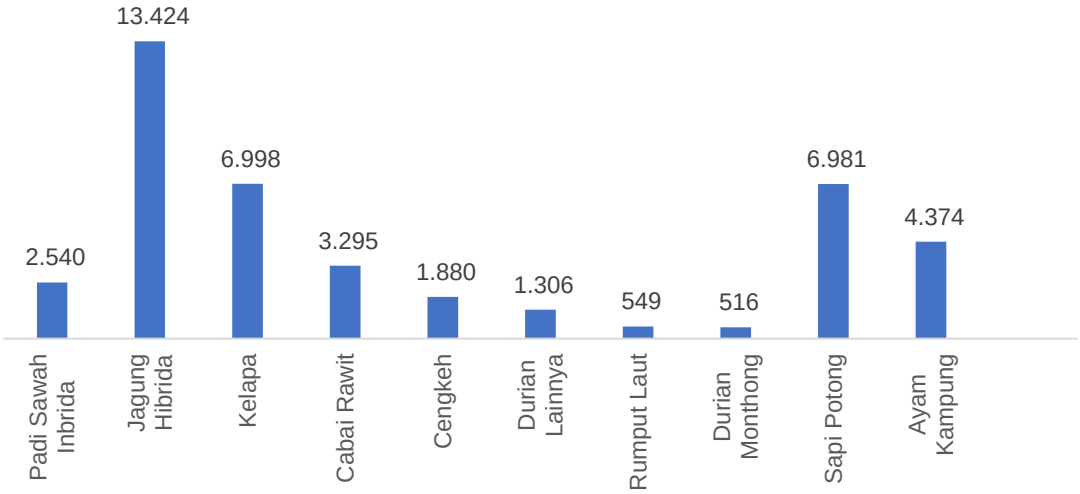
Tabel 2.249
Entitas Petani Pengguna Lahan Pertanian dan Petani Gurem Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Petani Pengguna Lahan	Petani Gurem	
			Jumlah	Persentase
1	Anggrek	2.617	218	8,33
2	Atinggola	2.231	295	13,22
3	Biau	1.003	112	11,17
4	Gentuma Raya	1.156	118	10,21
5	Kwandang	2.877	568	19,74
6	Monano	1.326	125	9,43
7	Ponelo Kepulauan	445	120	26,97
8	Sumalata	1.954	193	9,88
9	Sumalata Timur	1.433	171	11,93
10	Tolinggula	1.801	396	21,99
11	Tomilito	1.830	93	5,08
Gorontalo Utara		**18.673**	**2.409**	**12,90**

Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Sedangkan sepuluh komoditas yang paling banyak diusahakan UTP adalah jagung hibrida dan kelapa. Selain itu, terdapat sapi potong dan ayam kampung biasa dari subsektor peternakan.

Grafik 2.86
Entitas UTP Menurut 10 Komoditas Terbanyak yang Diusahakan UTP



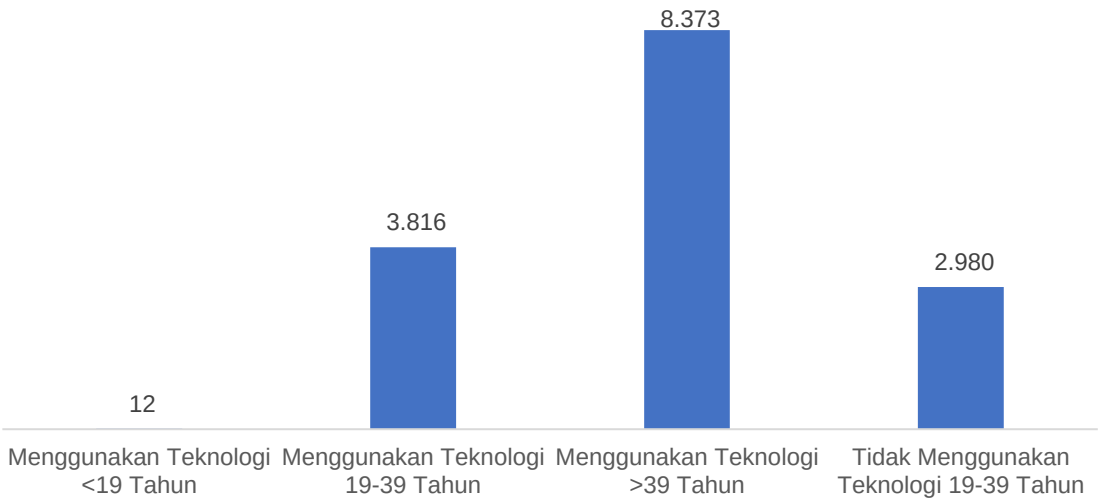
Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

G. Petani Milenial

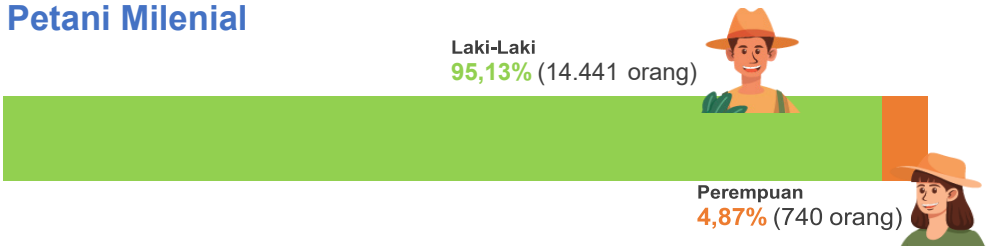
Data petani milenial dapat menjadi salah satu indikator tingkat regenerasi di sektor pertanian serta menunjukkan pemanfaatan teknologi digital yang diharapkan dapat menciptakan pertanian modern yang produktif dan berkelanjutan. Petani milenial adalah petani berusia 19–39 tahun, dan/atau petani yang adaptif terhadap teknologi digital. Teknologi digital mencakup penggunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan) modern, penggunaan

internet/telepon pintar/teknologi informasi, penggunaan *drone*, dan/atau penggunaan kecerdasan buatan. Cakupan subsektor petani milenial mengikuti konsep dan definisi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, yaitu subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Petani milenial tercatat sebanyak 15.181 orang. Untuk petani milenial berumur 19–39 tahun, baik menggunakan maupun tidak menggunakan teknologi digital, ada sebanyak 6.796 orang atau 33,77 persen dari total petani di Gorontalo Utara yang sebanyak 20.122 orang. Sementara itu, petani milenial yang berumur lebih dari 39 tahun dan menggunakan teknologi digital sebesar 41,61 persen. Selain itu, untuk petani yang berumur kurang dari 19 tahun dan menggunakan teknologi digital hanya sebesar 0,06 persen. Jumlah petani milenial berumur 19–39 tahun paling banyak berada di Kecamatan Anggrek, diikuti Kecamatan Kwandang dan Kecamatan Atinggola.

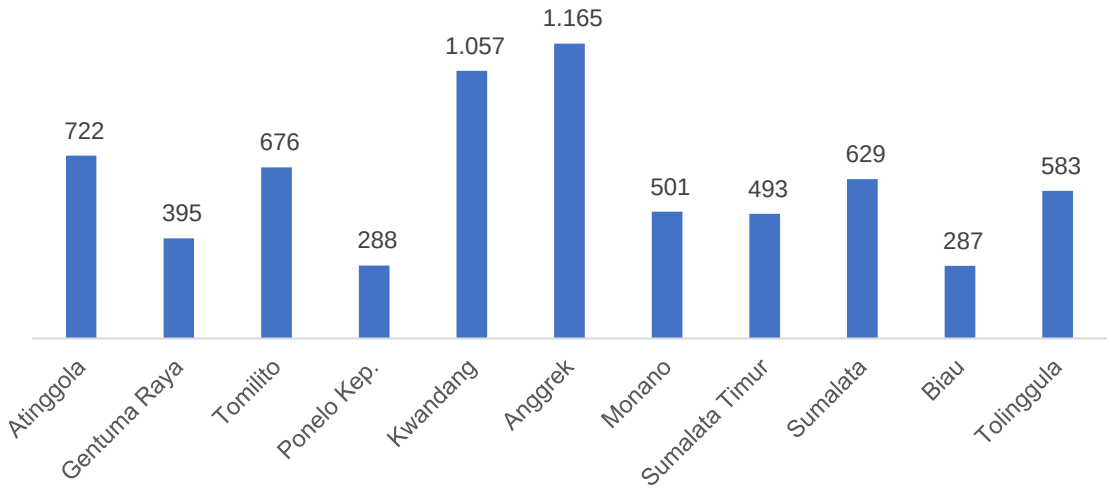
Grafik 2.87
Penggunaan Teknologi Digital Entitas Petani



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023



Grafik 2.88
Sebaran Petani Milenial Usia 19-39 Tahun



Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

Tabel 2.250
Entitas Petani Milenial Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, dan Klasifikasinya

No.	Kecamatan	Jumlah Petani	Klasifikasi				Jenis Kelamin	
			Menggunakan Teknologi			Tidak Menggunakan Teknologi Usia 19-39 Tahun	Laki-Laki	Perempuan
			<19 Tahun	19-39 Tahun	>39 Tahun			
1	Anggrek	2.938	0	527	903	638	1.983	85
2	Atinggola	2.274	2	654	1.377	68	2.002	99
3	Biau	1.034	1	259	699	28	932	55
4	Gentuma Raya	1.207	1	329	756	66	1.093	59
5	Kwandang	3.427	4	236	614	821	1.593	82
6	Monano	1.399	1	266	488	235	953	37
7	Ponelo Kepulauan	592	2	102	156	186	415	31
8	Sumalata	2.024	0	491	1.187	138	1.737	79
9	Sumalata Timur	1.453	0	355	825	138	1.241	77
10	Tolinggula	1.882	1	449	1.106	134	1.598	92
11	Tomilito	1.892	0	148	262	528	894	44
Gorontalo Utara		**20.122**	**12**	**3.816**	**8.373**	**2.980**	**14.441**	**740**

Sumber: Buklet Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2023 Tahap I (BPS), 2023

H. Cakupan Kelompok Tani (Poktan)

Kelompok Tani (Poktan) adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Kelompok tani merupakan pelaku utama dalam kelembagaan pertanian yang dijadikan sebagai ujung tombak dalam pembangunan pertanian dan pengembangan kawasan pertanian. Pada tahun 2023, laju pertumbuhan Poktan mencapai hampir 16 persen.

Tabel 2.251
Kelompok Tani Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Entitas Kelompok Tani	
		2022	2023
1	Anggrek	254	296
2	Atinggola	191	259
3	Biau	87	89
4	Gentuma Raya	98	98
5	Kwandang	290	307
6	Monano	92	98
7	Ponelo Kepulauan	26	30
8	Sumalata	157	188
9	Sumalata Timur	69	82
10	Tolinggula	121	132
11	Tomilito	117	131
Gorontalo Utara		**1.502**	**1.742**

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, 2023

I. Peternakan

Peternakan merupakan sub sektor pertanian yang memiliki peran besar pada pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap komoditas daging-dagingan/protein hewani. Meningkatnya daya beli serta kesadaran untuk konsumsi protein yang bervariasi berbanding lurus dengan meningkatnya produksi dan konsumsi hasil peternakan. Jenis hewan ternak yang ada di Gorontalo Utara yaitu sapi potong dan kambing sebagai komoditas unggulan, serta komoditas lainnya seperti babi dan kuda. Capaian populasi hewan ternak besar di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 dan 2022 dapat ditinjau dari Tabel 2.252.

2.858 ekor

Jumlah sapi yang dikapalkan melalui Pelabuhan Kwandang (2023)

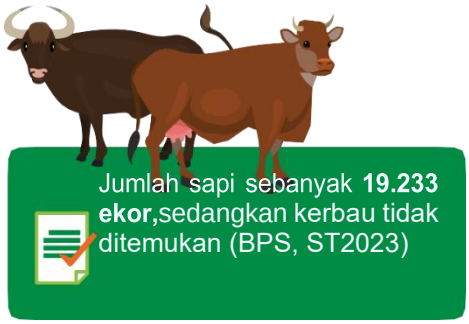


Tabel 2.252
Populasi Ternak Besar Menurut Kecamatan (Ekor)

Kecamatan	Sapi Potong		Kambing		Babi		Kuda	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Atinggola	3.130	3.312	715	730	85	65	8	6
Gentuma	1.765	1.843	741	777	415	350	-	-
Kwandang	6.860	6.978	415	425	-	-	-	-
Tomilito	3.389	3.442	747	777	70	50	-	-
Ponelo Kep.	913	959	603	575	-	-	-	-
Anggrek	5.340	5.406	780	755	140	120	-	-
Monano	2.481	2.531	735	750	120	95	-	-
Sumalata	2.397	2.434	600	630	110	80	-	-
Sumalata Timur	1.473	1.509	840	835	-	-	-	-
Tolinggula	3.731	3.779	670	510	-	-	-	-
Biau	1.500	1.533	510	520	-	-	-	-
Jumlah	**32.979**	**33.726**	**7.356**	**7.284**	**940**	**760**	**8**	**6**

Sumber: Kabupaten Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Secara umum, daerah yang menjadi penghasil hewan ternak non unggas terbesar jenis sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek. Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek. Babi di Gentuma; dan Kuda di Kecamatan Atinggola. Populasi hewan ternak besar Kabupaten Gorontalo Utara di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Khusus untuk ternak sapi potong, berbagai upaya intensif telah dilakukan seperti melalui peningkatan inseminasi buatan guna meningkatkan hormon reproduksi hewan ternak, selain itu upaya menjaga populasi sapi betina melalui kebijakan pelarangan dilakukan penjualan sapi betina produktif. Kebijakan asuransi hewan turut membawa dampak positif pada terjaganya populasi sapi, yang muncul karena tingginya kasus kematian ataupun hilangnya hewan ternak masyarakat, khususnya sapi. Berdasarkan data, selama tahun 2017-2022 telah disampaikan klaim atas kematian/kehilangan sapi oleh masyarakat sebanyak 174 ekor sapi, yang kemudian ternak yang mati/hilang diganti oleh yang baru sejumlah 151 ekor sapi. Hal tersebut menunjukkan bahwa program asuransi ternak relatif berhasil dalam upaya mempertahankan populasi ternak.



Pada jenis unggas-unggasan, yang terjadi pada jenis ternak besar, tidak terjadi pada jenis ternak ini. Dengan jenis ayam kampung sebagai unggas terdominan di Gorontalo Utara, populasi sebesar 380.900 ekor tersebar di

seluruh kecamatan dan Kecamatan Monano memegang peran penting sebagai kecamatan dengan populasi terbesar. Sedangkan jenis unggas ayam petelur, menjadi komoditas unggulan dari Kecamatan Kwandang. Pada tahun 2022 terdapat penurunan yang signifikan pada jenis ayam petelur. Detail informasi tersebut disampaikan pada Tabel 2.253 berikut.

Tabel 2.253
Populasi Ternak Unggas (Ekor) Menurut Kecamatan

Kecamatan	Ayam Kampung		Ayam Petelur		Itik/Itik Manila	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Atinggola	20.200	20.000	-	-	470	445
Gentuma	41.250	34.200	-	-	365	430
Kwandang	92.950	84.000	12.150	9.000	730	775
Tomilito	12.410	12.200	4.983	1.700	310	310
Ponelo Kepulauan	5.490	5.200	-	-	401	460
Anggrek	59.800	55.500	9.200	5.800	1.070	1.040
Monano	130.000	111.500	-	-	505	490
Sumalata	12.880	12.500	-	-	490	455
Sumalata Timur	15.510	15.200	-	-	983	970
Tolinggula	26.100	15.600	-	-	1.400	290
Biau	15.900	15.000	-	-	285	290
Jumlah	**432.490**	**380.900**	**26.333**	**16.500**	**7.009**	**5.955**

Sumber: Kabupaten Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2023

Dengan peningkatan jumlah populasi ternak yang terjadi sepanjang tahun 2022 (khususnya ternak besar), sejalan dengan jumlah produksi daging ternak pada tahun 2022. Secara keseluruhan jumlah produksi daging ternak di tahun 2022 mengalami peningkatan. Tabel 2.254 berikut merinci jumlah produksi daging ternak/Kilogram di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.254
Produksi Daging/Kilogram

No.	Jenis Ternak	Produksi Daging						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi potong	240.781,25	235.468,75	211.718,25	206.718,75	212.343,75	197.355	518.250
2	Kambing	468,05	478,55	189,75	22.048,95	26.931,85	25.292,25	
3	Ayam buras	21.197,74	12.453,80	12.453,80	13.598,20	10.895,50	7.472,08	7.340
4	Ayam pedaging	12.345,96	12.003,80	15.980,00	39.146,30	25.140,30	230.065	816.000
Total		**274.793,00**	**260.404,90**	**240.341,80**	**281.512,20**	**275.311,40**	**494.079,08**	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024

Jumlah produksi telur di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang sangat signifikan diakibatkan oleh naiknya populasi unggas, khususnya ayam petelur yang meningkat 3,47 persen. Namun pada tahun berikutnya populasi unggas jauh berkurang yang berimbas pada turunnya produksi telur. Berikut tabel yang menggambarkan produksi telur di Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 2.255
Produksi Telur (Kg)

No.	Jenis Ternak	Produksi Telur						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Ayam buras	233.810,40	235.334.80	317.078,90	211.917,65	211.920,10	186.827,2	21.790
2	Ayam petelur	189.756,00	199.545,00	216.864,00	134.034,00	191.638,50	124.245	1.861.880
3	Itik manila	10.839,66	13.334,71	14.296,81	12.860,07	13.225,67	23.771,7	
4	Itik	26.478,27	29.766,78	31.084,38	31.084,38	27.159,03	10.454,82	
Total		**460.884,33**	**477.981,29**	**579.324,09**	**389.896,10**	**443.943,30**	**345.298,72**	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2024

Keinginan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki sentra pembesaran hewan ternak di masa mendatang diharapkan dapat terwujud dengan rencana didirikannya sebuah *ranch* seluas 700 hektar di Desa Papualangi, Kecamatan Tolinggula, mendampingi *mini ranch* yang telah dibangun di Desa Dambalo, Kecamatan Tomilito. Hanya saja, peningkatan kualitas dan kapasitas di *mini ranch* perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi visi peningkatan populasi ternak seiring rencana ekspor ke beberapa daerah potensial, termasuk rencana besar sebagai penyangga ketersediaan pangan (*provider* utama) bagi Ibukota Negara (IKN).

Mempertimbangkan karakteristik wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, peluang dan potensi terbentuk satu atau lebih kawasan peternakan sapi sangat besar. Program Gertak Birahi yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara diharapkan dapat berhasil dicapai dengan pengembangan kawasan peternakan sebagai pemicunya. Perlu menjadi perhatian bersama, bahwa pengembangan tersebut membutuhkan integrasi antara sektor peternakan dengan sektor lainnya, seperti lahan yang luas untuk penyediaan lahan bagi pakan ternak, atau perubahan *mindset* masyarakat dalam cara beternak dari lepas liar menjadi dikandangkan. Lahan yang ada sendiri saat ini telah banyak terdistorsi dan digunakan untuk peruntukan lainnya seperti permukiman, pertambangan, industri, dan sebagainya. Pemerintah Daerah dapat melakukan optimasi limbah pertanian dan agroindustri untuk memperbaiki ketersediaan tanaman pangan dan penyediaan pakan ternak yang berkesinambungan.

4. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sektor perikanan baik tangkap maupun budidaya merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi utama di Gorontalo Utara, selain sektor pertanian. Namun, peranan sub sektor perikanan terhadap perekonomian seharusnya tidak hanya ditinjau dari aspek nilai produksi perikanan yang cenderung menggambarkan kondisi makro dari perekonomian. Produksi yang dimaksud adalah semua hasil yang diperoleh baik yang dijual maupun yang dikonsumsi rumah tangga atau yang dibayar sebagai upah. Namun demikian, peranan terhadap perekonomian perlu dilihat juga sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku yang terlibat dalam sub sektor perikanan.

Sebagai wilayah pesisir dengan lebih dari 50 pulau, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki berbagai potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah. Sehingga Pemda harus mampu terus menggali (eksplorasi) dan meningkatkan pemanfaatan perairan darat dan lautnya.

A. Produksi Perikanan

Tabel 2.256
Data Produksi Perikanan

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Total produksi ikan	53.822	42.046	38.727	35.516	40.422	43.679	42.119
2	Perikanan tangkap (Ton)	24.612	25.013	25.413	21.337	25.831	26.250	23.004
3	Perikanan budidaya (Ton)	29.210	17.033	13.314	14.179	14.591	17.429	19.115

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

Tabel 2.256 di atas menunjukkan kinerja yang baik di 3 tahun terakhir dengan meningkatnya tren volume penangkapan ikan, meski ada sedikit penurunan di tahun 2023. Begitu pula pada sektor budidaya yang menunjukkan perkembangan positif di periode yang sama. Namun, dikarenakan tidak adanya bantuan bibit rumput laut sejak tahun 2019, mengakibatkan petani rumput laut tidak memiliki bibit untuk produksi sehingga output perikanan budidaya turun drastis.

Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai instansi yang bertanggungjawab melakukan pembinaan terhadap masyarakat perikanan tangkap dan budidaya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan produktivitas perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 mengalami penurunan, diakibatkan

oleh pandemi Covid-19 saat nelayan cenderung tidak melaut yang juga berakibat pada harga pasar ikan hasil tangkap yang tidak stabil.

Tabel 2.257
Produksi Perikanan Tangkap per Komoditas

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun (Ton)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakalang	4.786,70	2.811	2.816	2.910	3.119	4.915	4.990	2.676
2	Tongkol	3.716,20	3.118	3.120	3.300	2.617	2.976	3.441	2.058
3	Tuna	619,30	74	85	114	84	97	181	631
4	Kembung	2.183,50	653	643	853	241	383	815	827
5	Selar	2.276,90	1.022	1.024	1.129	729	800	2.052	1.287
6	Layang	1.707,40	2.654	2.640	2.850	1.146	3.074	2.384	3.371
7	Lemuru	1.084,40	37	35	24	229	31	-	205
8	Tembang	1.083,10	381	372	393	263	711	226	-
9	Teri	1.397,50	2.422	2.511	2.607	675	769	1.194	1.470
10	Kuwe	1.323,00	744	742	751	723	1.477	1.241	834
11	Kerapu	193,80	625	643	655	387	582	376	206
12	Udang	1,50	-	-	-	-	-	54	-
13	Ikan lainnya	3.726,60	10.071	10.382	9.827	9.950	10.016	9.346	9.439
Total		**24.099,90**	**24.612**	**25.013**	**25.413**	**21.337**	**25.831**	**26.250**	**23.004**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

Berdasarkan Tabel 2.257 di atas, komoditas hasil tangkapan nelayan didominasi oleh jenis cakalang, tongkol, kembung, selar dan layang. Kurangnya hasil tangkapan ikan pada komoditas yang bernilai ekonomi tinggi seperti tuna dan kakap menyebabkan nilai produksi ikan masih belum optimal, padahal perairan utara Sulawesi merupakan jalur perlintasan jenis ikan pelagis besar yang saat ini menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia masih berkisar 0,63 persen dari potensi keseluruhan. Dibutuhkan restrukturisasi dan modernisasi armada, alat tangkap, teknologi penangkapan, serta peningkatan kapasitas awak kapal untuk menjangkau sasaran wilayah tangkapan yang maksimal untuk mencapai optimalisasi volume produksi perikanan tangkap baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, yang secara bertahap diupayakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan khususnya nelayan.

Kenaikan produksi perikanan tangkap yang terdata mulai tahun 2021 disebabkan pembatasan sosial sudah kembali dilonggarkan setelah setahun lamanya didera pandemi dan nelayan sudah tidak takut melaut. Produksi perikanan tangkap Kabupaten Gorontalo Utara menyumbang sekitar 16 persen dari total produksi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo.

Jika kita melihat dari luasan wilayah perairan (potensi) dan pemanfaatannya seharusnya angka produksi bisa jauh lebih besar. Tabel 2.258 menunjukkan pemanfaatan hasil laut dibandingkan potensinya yang baru tercapai sekitar 50-60 persen dari tingkat pemanfaatan optimalnya.

Tabel 2.258
Penyebaran Potensi dan Pemanfaatan Perikanan Budidaya

No.	Indikator	2020		2021		2022	
		Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)	Potensi (Ha)	Pemanfaatan (Ha)
1	Jaring apung laut	5,8	3,2	5,8	4,03	5,8	3,90
2	Jaring apung tawar	11,9	0,8	11,9	1,06	11,9	0,9
3	Kolam air tenang	17,4	14	17,4	12,9	17,4	14,8
4	Rumput laut	3.890	339	3.890	446	3.890	375
5	Tambak sederhana	2.350	1.896	2.350	2.221	2.350	2.060
6	Tambak semi intensif	2.580	2.565	2.580	2.477	2.580	2.340
Jumlah		**8.855,1**	**4.818**	**8.855,1**	**5.161,99**	**8.855,1**	**4.794,6**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Dengan melihat perbandingan kondisi pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap dan perikanan budidaya tersebut, terbuka peluang usaha yang masih sangat luas bagi masyarakat dan investor di bidang perikanan untuk mengelola sumberdaya yang ada. Jika memperhitungkan potensi perikanan WPP 716 yang merupakan wilayah dengan sumber daya pelagis besar dan kecil, serta demersal dan ikan karang, tingkat penangkapan ikan terhitung sangat kecil.

Tabel 2.259
Produksi Perikanan Budidaya per Komoditas

No.	Komoditas	Produksi Per Tahun (Ton)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Udang windu	95,5	64	159	223	221	233	180
2	Udang vanamae	400,5	1.489	1.940	2.683	2.687	2.664	1.783
3	Rumput laut	27.658	14.487	9.296	8.667	9.257	12.146	15.300
4	Kerapu	8,5	4	15	23	23,3	22	21
5	Bandeng	150,7	566	1.416	2.076	1.880	1.832	1.299
6	Kakap	-	-	-	-	-	-	-
7	Nila	495	199	245	227	235	236	248
8	Patin	-	5,5	6,5	16	17	25	13
9	Mas	380	180	167	138	144	145	144
10	Gurame	-	-	-	-	-	-	-
11	Lele	-	3,6	17,2	10	9	12	14
12	Ikan hias	-	-	-	-	-	-	-
13	Kuwe	20,2	3,3	14,3	20,5	20,3	18	18
14	Lobster	-	-	-	-	-	-	-
15	Ikan lainnya	16	32	38	95	97	96	94
	Total	**29.210**	**17.033**	**13.314**	**14.179**	**14.591**	**17.430**	**19.115**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

Secara garis besar, produksi perikanan budidaya di tahun 2019 lebih kecil nilainya dibandingkan 2018, dan 3 tahun terakhir mulai tumbuh positif. Peningkatan yang terjadi pada komoditas udang vanamae memang dikarenakan gencarnya bantuan dari Provinsi Gorontalo dalam penyediaan bibit serta adanya investor yang masuk dengan lokus di Kecamatan Kwandang dan Anggrek. Sedangkan pada komoditas bandeng dikarenakan pendampingan yang intensif terhadap kelompok-kelompok nelayan budidaya. Pada komoditas rumput laut, tahun 2022 kembali meningkat seiring bantuan bibit dan sarana prasarana sejumlah 7.500 Ton bibit.

Terlepas dari kesuksesan dalam peningkatan produksi beberapa komoditas, ada beberapa kendala yang dihadapi oleh nelayan dan Pemerintah, seperti ketersediaan benih dan pakan, berkurangnya daya dukung lahan untuk tambak, serangan penyakit, serta pemeliharaan yang masih tradisional.

Tabel 2.260
Penyebaran Potensi Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Potensi 2021				Potensi 2022			
		Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)
1	Anggrek	1.070	173	10	102	1.070	173	10	102
2	Monano	50	-	10	200	50	20	10	200
3	Kwandang	1.575	363	15	160	1.575	363	15	160
4	Ponelo Kepulauan	700	-	5	50	700	-	5	50
5	Tomilito	200	20	25	50	200	20	25	50
6	Sumalata	-	-	15	50	-	-	15	50
7	Sumalata Timur	50	20	15	50	50	20	15	50
8	Tolinggula	-	4	100	50	-	4	100	50
9	Biau	-	2	50	20	-	2	50	20
10	Atinggola	-	-	20	105	-	5	20	105
11	Gentuma Raya	-	25	10	30	-	25	10	30
Jumlah		**3.645**	**607**	**105**	**867**	**3.645**	**632**	**105**	**867**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

Tabel 2.261
Penyebaran Pemanfaatan Perikanan Budidaya

No.	Kecamatan	Pemanfaatan 2021				Pemanfaatan 2022			
		Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)	Rumput Laut (Ha)	Air Payau (Ha)	Air Tawar (Ha)	KJA Laut (Ha)
1	Anggrek	232	100	5	10	232	100	5	10
2	Monano	-	-	2	5	-	10	2	5
3	Kwandang	105	230	5	15	105	230	5	15
4	Ponelo Kepulauan	52	-	1	10	52	-	1	10
5	Tomilito	-	9	5	1	-	9	5	1
6	Sumalata	-	-	5	10	-	-	5	10
7	Sumalata Timur	-	-	5	10	-	-	5	10
8	Tolinggula	-	2	25	-	-	2	25	-
9	Biau	-	-	10	-	-	-	10	-
10	Atinggola	-	-	10	1	-	1	10	1
11	Gentuma Raya	-	-	1	-	-	-	1	-
Jumlah		**389**	**341**	**74**	**62**	**389**	**352**	**74**	**62**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

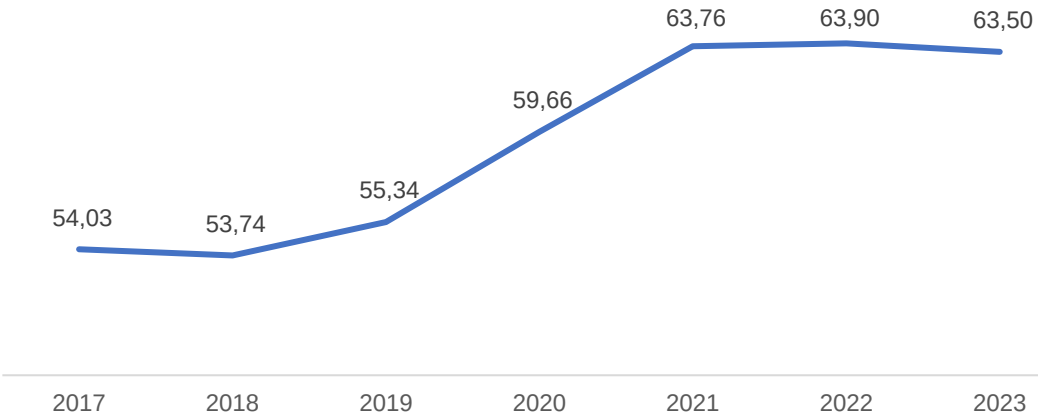
Berdasarkan Tabel 2.261 di atas, secara umum pemanfaatan lahan perikanan budidaya masih jauh dibawah potensi pemanfaatan sebenarnya. Peningkatan pemanfaatan lahan akan meningkat jika pemerintah melakukan ekstensifikasi lahan perikanan budidaya.

B. Tingkat Konsumsi Ikan (Kilogram/Kapita/Tahun)

Konsumsi ikan merupakan salah satu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan penduduk untuk mengkonsumsi ikan. Selain itu konsumsi ikan menunjukkan pula kemampuan daerah untuk menyediakan ikan untuk penduduknya. Konsumsi ikan (Kilogram/kapita/tahun) adalah nilai konsumsi ikan masyarakat per kapita per tahun atau lebih dikenal dengan jumlah produk perikanan yang dikonsumsi oleh masyarakat dalam satu tahun. Berdasarkan Grafik 2.89, konsumsi ikan di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2021 sebanyak 63,76 Kilogram/kapita/tahun. Nilai ini lebih tinggi dari target tingkat konsumsi ikan nasional sebesar 58,08 Kilogram/kapita/tahun dan target untuk tingkat konsumsi ikan Provinsi Gorontalo sebesar 58,40 Kilogram/kapita/tahun. Pada 2022, juga melewati target nasional yang hanya 59,53 Kilogram/kapita/tahun. Ini disebabkan salah satunya karena bukan hanya Kabupaten Gorontalo Utara saja yang menyumbang angka konsumsi ikan Provinsi Gorontalo, ada beberapa kabupaten/kota yang sama-sama merupakan penghasil perikanan tangkap seperti Kabupaten Pohuwato, Boalemo, dan Kota Gorontalo. Disamping itu

juga, hasil tangkapan ikan di Kabupaten Gorontalo Utara banyak yang dipasarkan di luar wilayah.

Grafik 2.89
Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2024

C. Rumah Tangga Perikanan

Data ST2023 mencatat jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) subsektor perikanan di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2023 sebanyak 3.286 UTP, yang mencakup sekitar 7,5 persen dari 43.933 UTP pertanian yang ada di Gorontalo Utara. Sedangkan pada Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), subsektor perikanan menyumbang 3.198 entitas dari 42.695 entitas RTUP Gorontalo Utara, setara 7,5 persen.

D. Pengembangan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Seperti sudah dikemukakan pada permulaan bab ini, bahwa karakteristik wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah wilayah pesisir dengan daratan yang memanjang secara horizontal sehingga memiliki garis pantai yang panjang. Karakteristik tersebut membawa berkah dengan banyaknya potensi maritim yang bisa digali dan dimanfaatkan. Berikut ini berbagai potensi maritim dari wilayah pesisir Kabupaten Gorontalo Utara:

1. Pulau yang memiliki potensi terumbu karang: P. Botu-Botu. P. Limboso, P. Manggala, P. Kampasa. P. Bohu, P. Otilade, P. Saronde, P. Mohinggito, P. Huha, dan P. Bogisa.
2. Kawasan mangrove: luas lahan mangrove ±1.117 Ha, dengan jenis yang paling dominan adalah *Xylocarpus sp.* dan *Rhizoporamucronata*.

3. Kawasan padang lamun: kondisi padang lamun masih tergolong cukup baik, terutama di daerah pulau-pulau kecil yang ada di sekitar pesisir dengan kualitas perairan yang baik. Misalnya di Pulau Saronde, ditemukan ada beberapa jenis vegetasi lamun yang termasuk dalam kondisi yang sangat baik, yang umumnya didominasi oleh *Enhalus* dan *Thallasia*. Di pulau ini juga ditemukan jenis *Cymodocea serrulata.*
4. Potensi wisata bahari dan mina bahari: P. Saronde, P. Lampu, Pantai Dunu, Pantai Minanga, dan Pantai Monano. Sedangkan untuk Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah perairan P. Mohinggito.

Dari 123 desa yang ada di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, sebanyak 69 diantaranya termasuk dalam wilayah pesisir. Lebih detail komposisi desa pesisir dan non pesisir per kecamatan tercantum pada Tabel 2.262.

Tabel 2.262
Desa Pesisir dan Non Pesisir

No.	Kecamatan	Desa			Luas Wilayah (Km^2)
		Jumlah	Pesisir	Non Pesisir	
1	Atinggola	14	3	11	264,55
2	Gentuma Raya	10	5	5	100,34
3	Tomilito	11	7	4	88,00
4	Ponelo Kepulauan	4	4	-	10,40
5	Kwandang	18	10	8	202,86
6	Anggrek	15	10	5	66,09
7	Monano	10	9	1	214,62
8	Sumalata Timur	10	9	1	254,92
9	Sumalata	11	9	2	249,67
10	Biau	10	2	8	85,85
11	Tolinggula	10	1	9	239,73
Jumlah		**123**	**69**	**54**	**1.777,03**

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023

5. Urusan Energi dan Sumber Daya Alam

A. Produksi Listrik

Di Gorontalo Utara saat ini terdapat 2 pembangkit listrik yang seluruhnya mengandalkan tenaga uap (PLTU), yakni PLTU Tomilito 2x50MW, dan PLTU Anggrek 2x25MW untuk mengaliri kebutuhan listrik di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Dengan sudah tersedianya 2 pembangkit dengan daya yang relatif besar tersebut, justru membuat pasokan listrik berlebih (*over supply*). Berdasarkan data yang diperoleh dari PT PLN Cabang Gorontalo Utara, masih terdapat selisih antara listrik terjual dengan listrik yang diproduksi, sehingga terjadi susut yang merugikan PLN karena

listrik yang dihasilkan oleh penyedia listrik dibayar penuh oleh PLN melalui skema *Take or Pay* (TOP). Rincian data tersebut pada Tabel 2.263 berikut.

Tabel 2.263
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PLN

Tahun	Daya Terpasang (VA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2022	34.873.700	57.359.259	53.987.645	551.548	3.398.237
2023	39.947.650	63.499.689	57.735.530	570.124	5.764.159

Sumber: PT PLN Cabang Gorontalo Utara, 2024

Dari Tabel 2.263 di atas, listrik yang susut/hilang berimbas pada pembebanan Biaya Pokok Produksi (BPP) listrik. Dampaknya, jika hal tersebut terus terjadi maka PLN akan terus *bleeding*. *Cashflow* yang terganggu akan menyebabkan pemerintah turun tangan dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) yang lebih besar atau risiko kontingensi terhadap APBN. Untuk itu Pemerintah Daerah dan Pusat harus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi agar terjadi penyerapan terhadap *supply* listrik.

B. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Saat ini, hampir 34 ribu rumah tangga menerima pasokan listrik di Gorontalo Utara dengan rasio elektrifikasi hampir 100 persen. Data pada Tabel 2.264 memuat informasi rumah tangga yang dialiri listrik PLN per kecamatan di Gorontalo Utara.

Tabel 2.264
Pelanggan Listrik PLN Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Atinggola	3.135	3.316	3.356	3.446
2	Gentuma Raya	2.416	2.532	2.594	2.666
3	Kwandang	7.903	8.148	8.572	8.684
4	Tomilito	2.280	2.331	2.665	2.700
5	Ponelo Kepulauan	1.004	1.057	1.080	1.107
6	Anggrek	3.633	3.580	3.609	3.765
7	Monano	1.630	1.790	1.816	1.887
8	Sumalata	2.424	2.877	3.013	3.019
9	Sumalata Timur	1.733	1.841	1.845	1.945
10	Tolinggula	2.595	2.630	2.933	2.943
11	Biau	1.533	1.434	1.490	1.740
Jumlah		**30.286**	**31.536**	**32.973**	**33.902**

Sumber: PT PLN Cabang Gorontalo Utara, 2024

Data di atas menunjukkan jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik PLN yang terus meningkat. Adapun faktor kenaikan tersebut yakni naiknya

pelanggan yang masuk kategori tarif rumah tangga. Namun dari jumlah rumah tangga di atas, tidak seluruhnya terkoneksi dengan jaringan PLN. Pada tahun 2022, masih ada sekitar 0,62 persen rumah tangga yang belum memiliki koneksi listrik dan 2,76 persen pemenuhan listriknya bukan bersumber dari PLN. Per bulan Maret 2021, desa yang masih belum teraliri listrik adalah Desa Dudepo di Kecamatan Anggrek. Pemenuhan listrik di Gorontalo Utara harus mampu menjangkau seluruh masyarakat, bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar, juga sebagai *enabler* industri dan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Bila tenaga listrik telah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pada suatu daerah atau wilayah, maka kegiatan ekonomi dan kesejahteraan pada daerah tersebut dapat meningkat.

C. Sumber Daya Energi Terbarukan

Selain bersumber dari PLTU, penting juga upaya untuk penyediaan listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan (EBT) untuk mendukung kebijakan *Carbon Neutral* 2060. Potensi bauran sumber energi dari panas matahari (*solar cell*) berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat menjadi salah satu jalan keluar dalam upaya mengurangi konsumsi energi yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan RTRW Gorontalo Utara 2024-2044, direncanakan dibangun PLTS di seluruh kecamatan karena di seluruh wilayah ini penyinaran terjadi sepanjang tahun sehingga pasokan energinya melimpah.

Selain berasal dari tenaga matahari, sumber EBT lainnya dapat juga mengandalkan dari energi kinetik yang dihasilkan oleh air. Di Gorontalo Utara terdapat beberapa air permukaan (*surface water*) yang dapat dijadikan sumber energi listrik, diantaranya berdasarkan RTRW akan dioperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Sumalata, dan Tolinggula. Berdasarkan studi awal yang dilakukan Pengkajian Energi Universitas Indonesia dalam *Energy Outlook and Statistic 2006*, potensi tenaga air skala kecil terdapat di Sumalata dengan potensi total 8MW.

Upaya peningkatan bauran energi terbarukan juga dilakukan melalui *co-firing* pada PLTU batubara dengan menggunakan biomassa di PLTU Anggrek. Terlepas hal tersebut, upaya penghematan energi juga perlu dioptimalkan, khususnya konsumsi energi oleh institusi pemerintah.

D. Penyediaan Air

Jumlah air bersih yang disalurkan dari Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) di Gorontalo Utara 2 tahun terakhir meningkat, searah dengan jumlah pelanggan yang juga meningkat. Kecamatan dengan konsumsi air terbanyak tentu saja Kecamatan Kwandang sebagai pusat pemerintahan, disusul oleh Kecamatan Tolinggula karena berkembangnya ekonomi dan populasi di ujung barat Gorontalo Utara.

Tabel 2.265
Penyediaan Air dan Nilainya Menurut Kecamatan

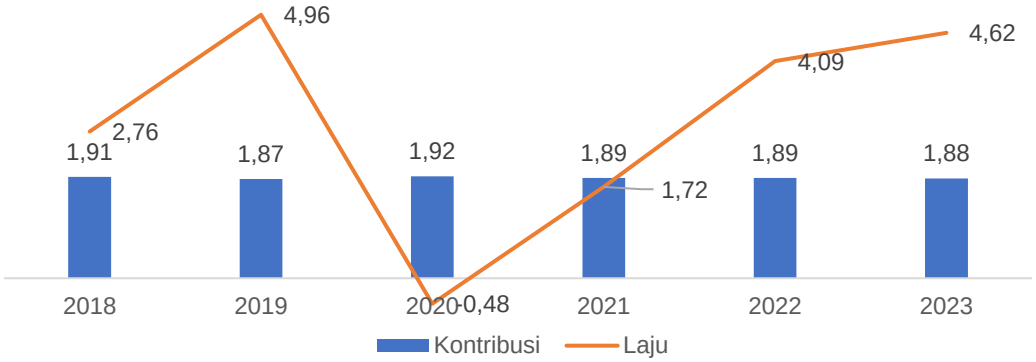
No.	Kecamatan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Pelanggan	Air Disalurkan (M^3)	Nilai (Rp)	Pelanggan	Air Disalurkan (M^3)	Nilai (Rp)
1	Atinggola	1.351	52.448	159.608.650	1.353	88.858	269.655.550
2	Gentuma Raya	1.086	58.191	117.533.950	1.098	59.434	181.251.300
3	Kwandang	2.724	340.128	1.232.711.800	2.833	326.449	
4	Tomilito						
5	Ponelo Kepulauan						
6	Anggrek	412	40.878	144.182.150	435	135.042	433.850.850
7	Monano	849	68.095	194.594.900	859	75.145	216.209.800
8	Sumalata	1.404	84.983	242.781.750	1.501	78.936	225.071.050
9	Sumalata Timur						
10	Tolinggula	1.673	166.770	445.175.150	1.677	257.786	782.938.500
11	Biau	552	93.559	253.797.350	547	147.437	452.278.750
Jumlah		**10.051**	**905.052**	**2.850.385.700**	**10.303**	**1.169.087**	**3.730.525.900**

Sumber: Perusahaan Umum Daerah Air Minum, 2023

E. Kontribusi Pertambangan dalam PDRB

Sumbangan sektor pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian Kabupaten Gorontalo Utara memang masih kecil, yang diakibatkan oleh skala penambangan yang tidak terlalu luas. Selain itu, pertambangan di Gorontalo Utara (pasir dan batu belah) secara ekonomi nilainya tidak terlalu tinggi. Ada beberapa pertambangan yang memiliki nilai ekonomi yang baik, seperti emas, namun skalanya tidak besar dan mayoritas masih ilegal. Meskipun secara ekonomi memiliki nilai yang tidak terlalu signifikan tetapi sektor pertambangan dan penggalian memiliki peran yang sangat strategis dalam kelancaran pembangunan infrastruktur daerah.

Grafik 2.90
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Pertambangan dan Penggalian (%)



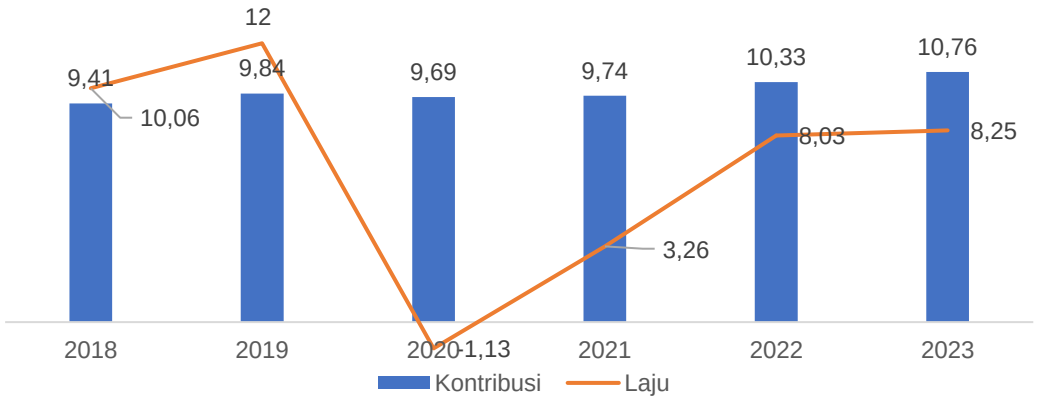
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

6. Urusan Perdagangan

A. Kontribusi Perdagangan dalam PDRB

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor dengan kontribusi tertinggi terhadap sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama kurun enam tahun terakhir, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi berkisar 10 persen dan menjadi sektor terbesar ketiga setelah sektor pertanian dan kontruksi.

Grafik 2.91
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Perdagangan Besar dan Eceran (%)



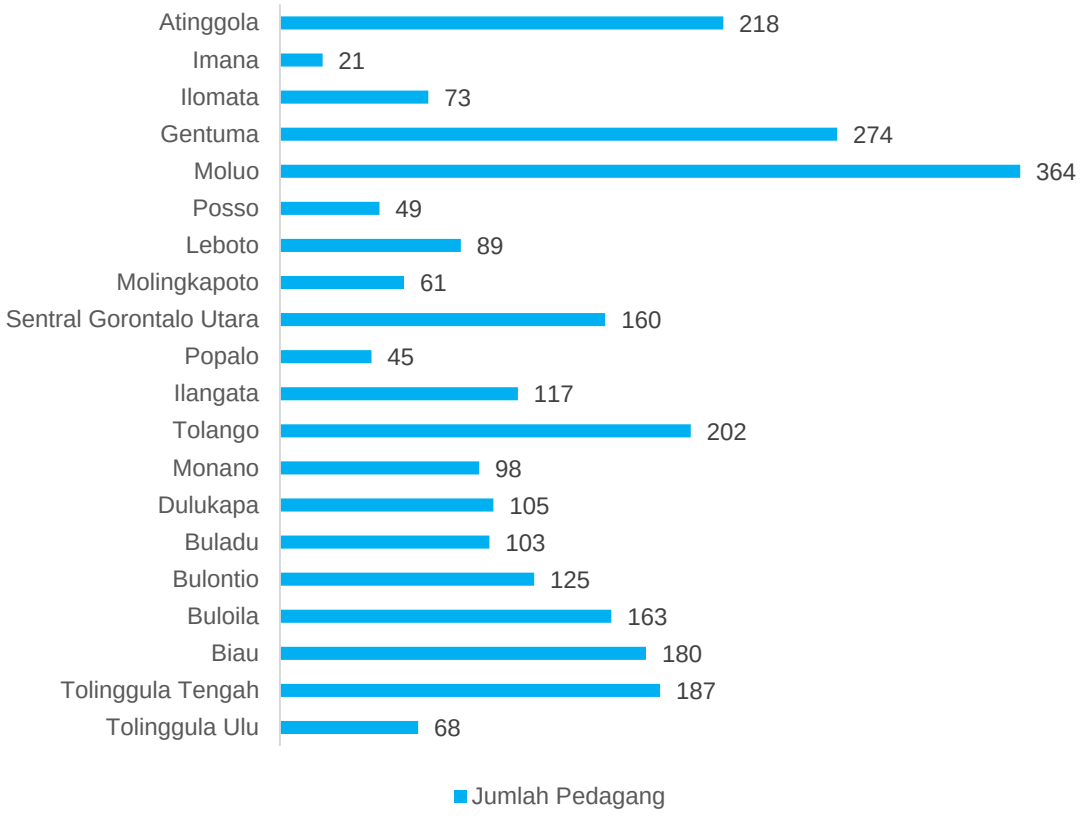
Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

B. Usaha Kecil dan Menengah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan diantaranya terkait dengan peningkatan dan pengembangan pasar dan sarana perdagangan lainnya, yang di Gorontalo Utara masih didominasi

oleh pedagang kecil/eceran, serta pedagang-pedagang yang berjualan di pasar tradisional yang tersebar di 9 dari total 11 kecamatan yang ada. Pasar tradisional saat ini masih menjadi penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat dalam kegiatan jual beli, meskipun telah ada minimarket modern yang beroperasi di beberapa kecamatan. Sepanjang tahun 2022, tercatat terdapat 20 lokasi pasar pada 9 kecamatan, dengan jumlah pedagang tradisional sebanyak 2.702 entitas. Pasar Moluo Kecamatan Kwandang merupakan pasar dengan jumlah pedagang terbanyak dengan 364 pedagang. Kecamatan Kwandang sendiri menjadi kecamatan yang memiliki pasar terbanyak dengan lima buah pasar. Lebih lengkap jumlah entitas pedagang tradisional dan lokasi pasar dapat diuraikan pada Grafik 2.92 berikut.

Grafik 2.92
Entitas Pedagang Menurut Pasar Tahun 2023



Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2024

Pada tahun 2020, ada dua tambahan pasar yang dioperasikan meskipun belum aktif, yaitu di Desa Ponelo Kecamatan Ponelo Kepulauan, dan pasar buah di kawasan wisata durian di Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula.

Dari total 22 pasar tersebut, sebanyak 17 pasar telah menyumbang retribusi pasar (PAD), sedangkan sisanya masih berusaha untuk dikembangkan agar geliatnya dapat segera memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Berbeda dengan pasar yang bertambah, sarana perdagangan yang terdaftar justru mengalami tren pertumbuhan negatif, meskipun sempat *rebound* di tahun 2020, seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.264. Angka yang rendah tersebut dikarenakan masih banyak perusahaan yang tidak mendaftarkan usahanya, peralihan status dari toko dan kios menjadi usaha dagang (UD), dan terbatasnya gerakan masyarakat selama masa pandemi, termasuk pada pendaftaran pada *dashboard Online Single Submission* (OSS). Untuk itu, dinas terkait diharapkan lebih proaktif dalam mendata perusahaan yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Tabel 2.266
Pasar dan Penambahan Sarana Perdagangan yang Terdaftar Menurut Jenisnya

No.	Sarana Perdagangan	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pasar	20	20	20	20	20	20
2	Toko	93	68	33	28	78	27
3	Kios dan warung	30	23	11	10	-	21
Jumlah		**114**	**143**	**64**	**58**	**98**	**68**

Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2021; dan DPMPTSP, 2022

Disamping pasar tradisional serta toko dan kios, perdagangan di Gorontalo Utara juga digerakkan oleh entitas minimarket. Minimarket berperan dalam penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus sebagai *pricemaker* karena barang yang disediakan di minimarket sangat variatif, yang seringkali tidak didapatkan di pasar tradisional. Hingga akhir tahun 2022, jumlah minimarket yang telah beroperasi di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berjumlah 22 unit yang tersebar di sembilan kecamatan.

Tabel 2.267
Minimarket dan Swalayan yang Berizin serta Lokasinya
Tahun 2022

No.	Lokasi	Jumlah		
		Alfamart	Indomaret	Swalayan
1	Kwandang	6	3	3
2	Atinggola	2	1	0
3	Gentuma Raya	2	1	0
4	Anggrek	2	0	0
5	Biau	1	0	0
6	Tolinggula	0	1	1
7	Sumalata	0	1	1
8	Monano	1	0	0
9	Sumalata Timur	1	0	0
Jumlah		**15**	**7**	**5**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2023

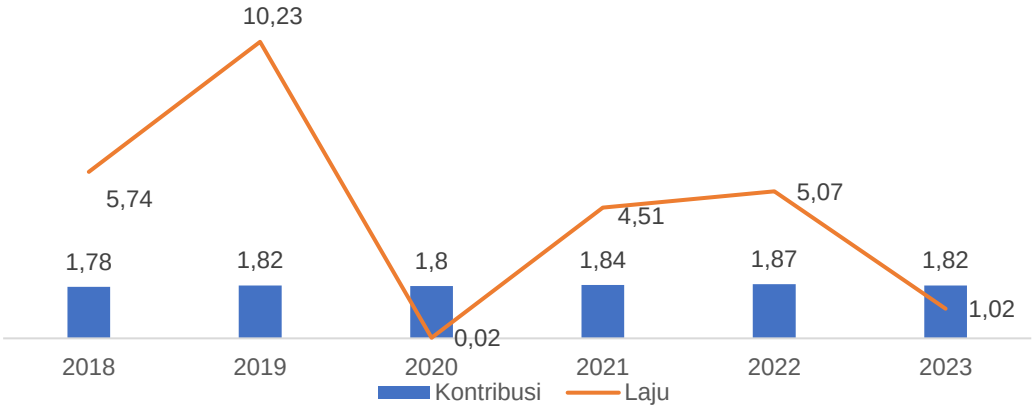
Selain itu, karena di Gorontalo Utara terdapat pelabuhan internasional, seharusnya menjadi salah satu senjata pamungkas dalam pembangunan dan pengembangan wilayah. Semenjak kerjasama antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan konsorsium pemenang proyek pembangunan Pelabuhan Anggrek *Anggrek Gorontalo International Terminal* (AGIT), kucuran anggaran KPBU senilai Rp1,4 Triliun dan biaya operasional sebesar Rp5,2 Triliun, volume bongkar muat akan meningkat, karena kapasitas terminal bongkar muat ditingkatkan yang dapat membawa pada peningkatan konektivitas rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Anggrek di Gorontalo, yang berfungsi sebagai penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan serta simpul distribusi, produksi, dan konsolidasi.

7. Urusan Perindustrian

A. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB

Sektor industri merupakan sektor yang belum banyak berperan dalam perekonomian Gorontalo Utara. Namun demikian, visi untuk meningkatkan penetrasi sektor ini sangat besar, karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu nilai kapitalisasi modal yang tertanam sangat besar, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Selama kurun enam tahun terakhir, sektor manufaktur ini hanya berkontribusi berkisar 1,8 persen dalam sektoral PDRB. Untuk itu Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Kawasan Ekonomi Ekslusif, mengandalkan keunggulan Pelabuhan Anggrek.

Grafik 2.93
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan LU Industri Pengolahan (%)



Sumber: Gorontalo Utara dalam Angka (BPS), 2024

B. Entitas, Nilai Tambah, dan Serapan Tenaga Kerja Industri Kecil Menengah

Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional pasca diterpa pandemi merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Namun, nyaris tidak terdapat industri sedang besar di Gorontalo Utara. Dalam 3 tahun berjalan hanya terdapat 1 entitas yang bergerak di bidang kimia dan bahan bangunan, sehingga sektor industri Gorontalo Utara bergantung pada kelas kecil menengah.

Pertumbuhan industri kecil menengah merupakan salah satu tolak ukur kemajuan suatu daerah. Dengan pertumbuhan industri kecil diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru untuk penyerapan tenaga kerja serta meningkatkan output industri daerah. Untuk meningkatkan sumbangsih sektor ini terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah, Pemerintah Daerah mendorong berbagai program fasilitasi terhadap IKM, yang merupakan salah satu upaya juga dalam pengentasan kemiskinan. Perkembangan unit usaha IKM disajikan pada Tabel 2.268, sedangkan perbandingan kondisinya selama 2 tahun terakhir digambarkan pada Tabel 2.269 dan 2.270. Untuk cakupan bina kelompok pengrajin, terlihat perlu untuk ditingkatkan karena cakupan pembinaannya masih rendah dan fluktuatif, yang disajikan pada Tabel 2.271.

Tabel 2.268
Pertumbuhan Industri Kecil

Indikator	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
Unit usaha industri kecil	Unit	102	514	697	766	926
Pertumbuhan	%	0	403,92	35,60	9,90	20,89

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

Tabel 2.269
IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi, Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2021

No.	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp000)	Kapasitas Produksi	Nilai Produksi (Rp000)	Nilai BB/BP (Rp000)
		Jumlah	L	P		Jumlah		
1	Anggrek	55	17	38	118.680	32.354	397.185	185.529
2	Monano	40	36	16	20.000	24.170	79.075	32.970
3	Sumalata	38	30	15	33.845	21.348	118.480	47.323
4	Sumalata Timur	163	20	143	74.530	113.143	301.241	92.332
5	Biau	21	5	17	15.800	27.197	56.635	24.276
6	Tolinggula	37	17	21	23.940	31.503	103.320	45.960
7	Atinggola	146	130	18	25.590	30.260	199.702	79.850
8	Gentuma Raya	72	23	51	42.695	34.915	206.495	86.023
9	Tomilito	18	8	14	11.800	3.180	48.880	27.609
10	Kwandang	116	61	83	77.350	41.843	352.425	116.570
11	Ponelo Kepulauan	60	16	48	35.295	54.422	145.785	68.025
JUMLAH		**766**	**363**	**464**	**479.525**	**414.335**	**2.009.223**	**806.467**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2022

Tabel 2.270
IKM Menurut Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Investasi, Kapasitas/Nilai Produksi dan Nilai BB/BP Tahun 2022

No.	Kecamatan	Unit Usaha	Tenaga Kerja		Nilai Investasi (Rp000)	Kapasitas Produksi	Nilai Produksi (Rp000)	Nilai BB/BP (Rp000)
		Jumlah	L	P		Jumlah		
1	Anggrek	55	17	38	118.680	32.354	397.185	185.529
2	Monano	40	36	16	20.000	24.170	79.075	32.970
3	Sumalata	45	38	17	389.345	22.431	151.880	58.896
4	Sumalata Timur	164	20	144	75.280	113.215	303.041	92.872
5	Biau	21	5	17	15.800	27.197	56.635	24.276
6	Tolinggula	37	17	21	23.940	31.503	103.320	45.960
7	Atinggola	146	130	18	25.590	30.260	199.702	79.850
8	Gentuma Raya	73	24	51	67.695	34.945	210.995	88.408
9	Tomilito	18	8	14	11.800	3.180	48.880	27.609
10	Kwandang	267	206	218	902.937	225.059	3.331.205	1.133.854
11	Ponelo Kepulauan	60	16	48	35.295	54.422	145.785	68.025
JUMLAH		**926**	**517**	**602**	**1.686.362**	**598.735**	**5.027.703**	**1.838.248**

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

Tabel 2.271
Bina Kelompok Pengrajin

No.	Indikator	Tahun					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kelompok pengrajin yang mendapatkan bantuan	4	-	3	2	1	-
2	Total kelompok pengrajin	7	7	10	12	13	14
3	Persentase bina kelompok pengrajin	57,14	0	30	16,67	7,69	0

Sumber: Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, 2023

Dari Tabel 2.269 dan 2.270 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah IKM, penyerapan tenaga kerja, sekaligus nilai investasi dibandingkan setahun sebelumnya. Menunjukkan bahwa industri yang masuk pada 2022 lebih merupakan kombinasi dari industri padat modal dan padat karya dibandingkan sebelumnya. Dimaknai positif karena penggunaan teknologi dan industri sarat modal mulai memberikan warna pada industri pengolahan di Gorontalo Utara namun juga dapat tetap sejalan dengan penyerapan tenaga kerja masyarakat lokal.

Untuk memperkuat basis industri kreatif, tengah dilakukan pendataan terhadap pelaku industri kreatif guna mengetahui berapa banyak industri kreatif yang sudah ada dan berkembang, dan diketahui sumbangan dan pengaruhnya terhadap pendapatan daerah. Fokus pengembangan IKM adalah pengembangan sentra-sentra subsektor yang diprioritaskan yakni di sektor pertanian, perikanan dan pariwisata.

Selanjutnya, berdasarkan dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Industri Anggrek, direncanakan lahan untuk industri seluas 284,57 Ha. Pemanfaatan lahan ini sudah termasuk pengalokasian fasilitas pendukung, seperti perumahan bagi para pekerja pabrik, jaringan jalan, sarana perkantoran, ruang terbuka hijau, sarana perdagangan dan jasa, serta sarana pendukung lainnya. Selain itu, Kecamatan Anggrek juga termasuk dalam proyeksi wilayah yang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Lokasinya yang dekat dengan Pelabuhan Anggrek meningkatkan tingkat kestrategisan wilayah kecamatan ini. Terlebih dengan beralihnya operasional Pelabuhan Anggrek menjadi KPBU/PPP dengan swasta dengan nilai investasi Rp1,4 Triliun.

8. Urusan Transmigrasi

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke area wilayah/pulau lain yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali, bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, pemerataan, serta persebaran penduduk. Perpindahan memberikan kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan

memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah atau mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada.

Jenis-jenis transmigrasi yaitu:

1. Transmigrasi umum, yakni program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pihak pemerintah melalui Kemenakertrans (Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).
2. Transmigrasi spontan/swakarsa, yakni transmigrasi yang didorong oleh keinginan diri sendiri namun masih mendapatkan bimbingan serta fasilitas penunjang dari pemerintah.

A. Transmigrasi Umum

Program transmigrasi yang dilaksanakan masih sebatas transmigrasi umum, dengan salah satu tujuannya dalam upaya mempersiapkan transmigran agar mampu mengembangkan berbagai program kegiatan produktif di lahan transmigrasi, para calon transmigran memerlukan beberapa pelatihan guna membekali dirinya dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan motivasi yang kuat dalam menjalankan program transmigrasi di daerah penempatan nantinya.



Dari total 66 potensi Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang ada di seluruh Sulawesi, terdapat empat diantaranya di Gorontalo Utara dengan komoditas yang dikelola dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya. Perkembangan jumlah transmigrasi secara umum digambarkan pada Tabel 2.272.

Tabel 2.272
Penempatan Transmigran Berdasarkan Jenis

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Transmigrasi Swakarsa**							
	Kepala Keluarga	-	-	-	-	-	-	-
	Individu	-	-	-	-	-	-	-
2	**Transmigrasi Umum**							
	Kepala Keluarga	50	25	25	-	9	11	-
	Individu	225	97	110	-	39	49	-
3	**Jumlah Total Transmigrasi**							
	Kepala Keluarga	50	25	25	-	9	11	-
	Individu	225	97	110	-	39	49	-

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

B. Lokasi Transmigrasi

Penduduk transmigrasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara sejak 2008/2009 dengan pelimpahan dari Kabupaten Gorontalo berlokasi di 6 lokus pada 4 kecamatan dengan luasan 54.299,87 Hektar di tahun 2023 yang telah dihuni 13.344 KK.

Tabel 2.273
Pelaku Transmigran Setiap UPT di Gorontalo Utara

No.	Lokasi UPT	Jumlah	
		KK	Jiwa
1	UPT Sumalata I Kecamatan Tolinggula	300	1.733
2	UPT Sumalata II Kecamatan Tolinggula	500	2.595
3	UPT Sumalata III Kecamatan Tolinggula	170	535
4	UPT Imana Kecamatan Atinggola	150	636
5	UPT Sumalata IV Kecamatan Sumalata	75	309
6	UPT Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur	145	550
Jumlah		**1.340**	**6.368**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

Wilayah Kawasan Transmigrasi di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Tahun 2009

1. UPT Sumalata I: Luas wilayah 2.000 Hektar, berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 62. Tahun 1985 tanggal 10 Maret 1985. UPT Sumalata I terdiri dari Sub A dan Sub B. Setelah diserahkan ke daerah, Wilayah Sub A menjadi dua desa yakni Desa Potanga dan Desa Bohulo di Kecamatan Biau, dan untuk Wilayah Sub B menjadi satu desa pula dengan nama Desa Limbato Kecamatan Tolinggula.
2. UPT Sumalata II: Luas wilayah 2.000 Hektar, berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 62. Tahun 1985 tanggal 10 Maret 1985. Setelah diserahkan ke daerah menjadi satu desa dengan nama Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula.
3. UPT Sumalata III: Luas wilayah 3.000 Hektar, berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1.19/HPL/BPN/89 tanggal 27 Mei 1989. Jumlah KK 170 KK. Setelah diserahkan ke daerah menjadi satu desa dengan nama Desa Cempaka Putih Kecamatan Tolinggula.
4. UPT Imana: Luas wilayah 1.000 Hektar, berdasarkan SK Kepala BPN Nomor: 90/HPL/BPN/98 tanggal 18 Agustus 1998. Setelah diserahkan

ke daerah menjadi satu desa dengan nama Desa Wopalo Kecamatan Atinggola.

- Tahun 2012

  UPT Sumalata IV: Luas wilayah 980 Hektar, berdasarkan SK Bupati Nomor: 223.A tanggal Desember 2009. Wilayah UPT Sumalata IV berlokasi di Desa Bulontio Timur Kecamatan Sumalata, ditempati oleh warga transmigran dengan jumlah 75 KK/307 jiwa.

- Tahun 2016

  UPT Motihelumo, dengan wilayah izin *site* 711 hektar, berdasarkan SK Gubernur Gorontalo Nomor: 370/02/VIII/2016 tanggal 25 Agustus 2016. Wilayah ini ditempati oleh 25 KK dengan jumlah 111 jiwa yang berlokasi di Desa Motihelumo Kecamatan Sumalata Timur.

- Tahun 2017

  Wilayah transmigrasi tahun 2017 adalah lanjutan penambahan daya tampung dari UPT Motihelumo sebanyak 50 KK, berjumlah 208 jiwa.

- Tahun 2018

  Penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 25 KK (152 jiwa), sehingga jumlah warga transmigran yang ditempatkan di UPT ini sampai dengan tahun 2018 berjumlah 100 KK (470 jiwa).

- Tahun 2019

  Pada tahun tersebut, penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 25 KK (110 jiwa), sehingga jumlah warga transmigrasi yang ditempatkan sampai dengan tahun 2019 berjumlah 100 KK (580 jiwa).

- Tahun 2020

  Tidak ada penempatan warga masyarakat transmigrasi.

- Tahun 2021

  Direncanakan penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 25 KK, tapi karena pandemi, pembangunan rumah warga masyarakat transmigrasi hanya bisa dibangun sebanyak 9 rumah dengan jumlah penempatan transmigran angka yang sama.

- Tahun 2022

Penambahan daya tampung transmigrasi UPT Motihelumo sebanyak 11 KK/rumah (49 jiwa).

- Tahun 2023

  Pemenuhan Sisa Daya Tampung (SDT) sebanyak 55 KK di SP Motihelumo belum terpenuhi, dari daya tampung 200 KK yang tersedia, karena pembangunan lebih difokuskan pada pemenuhan fasilitas sarana prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi seperti jalan, jembatan, tanggul, dan lain sebagainya.

C. Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi

Dalam pengelolaan kawasan transmigrasi, perlu ada sinergi program dan kegiatan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, sehingga Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi (IPKT) yang dinilai melalui komponen dimensi ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, jejaring sarana dan prasarana, serta kelembagaan di kawasan transmigrasi dapat meningkat.

Dimensi “ekonomi” meliputi: pengembangan komoditas unggulan kawasan perdesaan; pelibatan masyarakat dan usaha mikro kecil menengah dalam pengembangan komoditas unggulan (kelembagaan ekonomi); peran badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama mengembangkan komoditas unggulan; pengembangan jejaring kawasan perdesaan; promosi komoditas unggulan kawasan perdesaan; sertifikasi/standarisasi produk yang dihasilkan; tingkat melek keuangan masyarakat; dan kepemilikan dan/atau penguasaan lahan.

Dimensi “sosial-budaya” meliputi: kreativitas masyarakat; pelibatan pelaku seni dan budaya; pemanfaatan produk budaya masyarakat; migrasi penduduk keluar kawasan; governansi budaya; budaya dan pendidikan; budaya informasi dan pengetahuan; budaya dan perencanaan; budaya kesetaraan dan inklusi sosial; dan kerekatan sosial.

Sedangkan pada dimensi “lingkungan” melingkupi: pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada tata ruang kawasan perdesaan; ruang terbuka hijau; pemanfaatan *amenity resources* untuk kegiatan ekonomi dan sosial; regulasi dan edukasi terkait pengelolaan lingkungan; adaptasi

terhadap perubahan iklim; kapasitas mitigasi bencana; pengelolaan dan pemanfaatan sampah; dan pengelolaan dan pemanfaatan limbah.

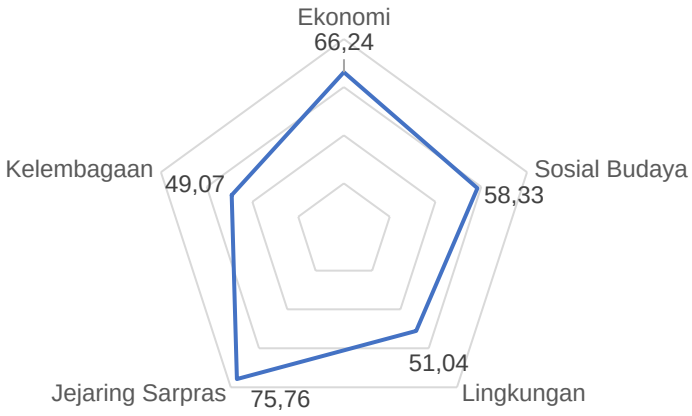
Pada dimensi “jejaring prasarana dan sarana”, hal yang dipertimbangkan yakni konektivitas antar desa dalam kawasan perdesaan; sekolah menengah kejuruan; pelayanan pendidikan vokasi dan keterampilan; aksesibilitas ke dan dari kawasan serta ke sentra komoditas unggulan; angkutan umum; elektrifikasi kawasan perdesaan; pemanfaatan alat komunikasi dan internet; sumber air minum dan mandi/cuci masyarakat di kawasan perdesaan; ketersediaan bahan bakar; kios sarana produksi pertanian; pasar kawasan perdesaan; dan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank untuk pengembangan komoditas unggulan.

Sedangkan hal yang melingkupi dimensi “kelembagaan” yaitu: kebijakan pemerintah kabupaten/kota dan/atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan; kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal; pengembangan kawasan perdesaan berbasis komoditas unggulan; insentif/kebijakan daerah tentang investasi di kawasan; forum pengembangan ekonomi daerah/kawasan perdesaan di aras kabupaten/kota; kebijakan daerah dalam pengembangan kawasan perdesaan yang telah ditetapkan; komitmen daerah untuk pembiayaan pembangunan kawasan perdesaan yang telah di tetapkan; kebijakan daerah tentang *corporate social responsibility* untuk kawasan perdesaan yang telah ditetapkan; pengembangan kerjasama antara pemerintah daerah, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dunia usaha, dan perguruan tinggi/lembaga penelitian setempat untuk meningkatkan inovasi pengembangan komoditas unggulan; dan kebijakan daerah tentang promosi kawasan perdesaan.

Dua tahun terakhir, IPKT Kawasan Sumalata menorehkan hasil yang progresif. Pada tahun 2022 skor yang ditoreh dari kelima dimensi mencapai 61,65 berstatus “Mandiri” saat rata-rata IPKT prioritas nasional mencapai 53,66. Setahun berselang, menjadi 64,71 juga dengan status “Mandiri” dengan rata-rata prioritas nasional mencapai 55,35. Pada tahun yang sama, kinerja kawasan transmigrasi lain di Provinsi Gorontalo seperti

Kawasan Pulubala mencapai 51,54; Kawasan Pawonsari 56,26; serta Kawasan Paguyaman Pantai 50,13. Rincian skor per dimensi pada IPKT Trans Sumalata tahun 2023 digambarkan pada Grafik 2.94.

Grafik 2.94
Nilai Dimensi IPKT 2023



Sumber: Evaluasi Kawasan Transmigrasi Kementerian Kemendes PDT dan Trans, 2023

D. Dokumen Kawasan Transmigrasi dan Potensi Daya Tampung

Untuk keberlangsungan program pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, perlu adanya *sharing* anggaran antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait dengan dokumen perencanaan yang dibutuhkan seperti Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RDKPB), Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP), dan dokumen perencanaan lainnya yang merupakan syarat untuk melaksanakan program transmigrasi tersebut. Adapun ketersediaan dokumen perencanaan dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Sumalata dapat dilihat pada Tabel 2.274 berikut.

Tabel 2.274
Dokumen Perencanaan Transmigrasi

No.	Jenis Dokumen Perencanaan	Kebutuhan Perencanaan	Keterangan
1	Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) Sumalata	Prasyarat penetapan kawasan transmigrasi	Disusun tahun 2016, ditetapkan menjadi kawasan tahun 2018 melalui SK MendesPDTT Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Transmigrasi
2	Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) C - Kasia	Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) C, wilayah Kecamatan Sumalata dan Sumalata Timur dengan Pusat SKP: Desa Kasia	Disusun tahun 2022, tetapi belum ekspos di Kementerian PDT Transmigrasi
3	Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) A – Tolinggula Tengah	Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) A, wilayah Kecamatan Tolinggula dan Biau dengan Pusat SKP: Desa Tolinggula Tengah	Belum tersedia
4	Rencana Detail Kawasan Perkotaan Baru (RDKPB) Bulontio Timur	Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) B, wilayah Desa Bulontio Timur dan Desa Bulontio Barat dengan Pusat SKP: Desa Bulontio Timur, sekalius sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB)	- Belum tersedia - Syarat penyusunan harus ada 2 dokumen RSKP dan *review* atas RKT dan minimal 1 dokumen RSKP
5	Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) D – Ilangata	Perencanaan Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) D, wilayah Kecamatan Anggrek dan Monano dengan Pusat SKP: Desa Ilangata	Belum tersedia
6	Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP)	Perencanaan pembangunan dan pengembangan satuan permukiman	Yang sudah tersedia, RTSP Motihelumo (2015), RTSP Dudepo (2018), dan RTSP Cempaka Putih (2019)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Transmigrasi, dalam pembangunan dan pengembangan sebuah Satuan Permukiman, disyaratkan tiga dokumen perencanaan yakni RKT, RSKP, dan RTSP calon lokasi Satuan Permukiman (SP) tersebut. Dalam satu SKP minimal terdapat 3 SP hingga maksimal 6 SP.

Dalam pembangunan satuan permukiman, dikenal 3 model, yakni SP Pugar, SP tempatan, dan PTB atau Permukiman Transmigrasi Baru/SP baru. Satuan Pemugaran yang selanjutnya disebut SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan dengan permukiman baru berdaya tampung 300 s.d. 500 keluarga. Sedangkan Satuan Permukiman Baru atau disebut dengan

SP-baru adalah bagian dari SKP, yang berupa satu kesatuan permukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300 s.d. 500 keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru. Serta Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam delineasi Kawasan Transmigrasi yang diperlakukan sebagai SP.

Berdasarkan RKT Sumalata, terdapat beberapa potensi SP sebagaimana Tabel 2.275.

Tabel 2.275
Potensi Satuan Permukiman Transmigrasi Sumalata

No.	SKP	Potensi SP	Potensi Daya Tampung	Keterangan
1	SKP A – Tolinggula Tengah	Tolinggula Tengah	100 KK	SP Pugar – Pusat SKP
		Limbato	-	SP Tempatan
		Cempaka Putih	-	SP Tempatan
		Potanga	-	SP Tempatan
2	SKP B – Bulontio Timur	Bulontio Timur	200 KK	Pusat KPB (Kawasan Perkotaan Baru)
3	SKP C – Kasia	Pulohenti	200 KK	SP Pugar
		Tumba	100 KK	SP Pugar
		Dulukapa	250 KK	PTB (Permukiman Transmigrasi Baru)
		Motihelumo	200 KK	PTB
		Kasia	100 KK	SP Pugar – Pusat SKP
4	SKP D - Ilangata	Tolitehuyu	200 KK	Pugar
		Tudi	250 KK	PTB
		Mootilango	200 KK	Pugar
		Langge	200 KK	Pugar
		Ilangata	100 KK	Pugar – Pusat SKP
		Dudepo	200 KK	PTB
Jumlah Potensi		**16 SP**	**2.300 KK DT**	

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2024

2.4.4 Fokus Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan yang baik didukung dengan penerapan manajemen strategis melalui penjabaran rencana strategis menjadi rencana operasional yang dapat dilaksanakan oleh OPD, yang dituangkan dalam

dokumen RPJPD, RPJMD/RPD, dan RKPD yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan pendek/tahunan. Program lima tahunan/tiga tahunan tersebut merupakan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sebagai bentuk pengendalian dan evaluasi terhadap keberhasilan perencanaan pembangunan, kinerja program dan kegiatan diukur secara periodik untuk memastikan kegiatan yang direncanakan secara efektif menunjang pencapaian keberhasilan program.



RPD 2024-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah terakhir di masa RPJPD 2009-2029

Pada tahun 2009 telah dilakukan penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011. Sedangkan di tahun 2019 telah dilakukan penyusunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Gorontalo Utara 2018-2023. Selanjutnya RPJMD tersebut disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, sehingga segenap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum. Pada periode jangka menengah berikutnya, RPD yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024-2026 yang menjadi rumah bagi perencanaan program dan kegiatan selama masa transisi pemerintahan Pilkada tahun 2024.

Sejak pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021, pemerintah daerah telah mengadopsi nomenklatur program berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimuat dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sehingga perbedaan nomenklatur yang termuat dalam RPJMD dengan RKPD berusaha dijembatani dengan melakukan pemetaan nomenklatur berdasarkan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses perencanaan di Kabupaten Gorontalo Utara sudah menerapkan konsep *top-down* dan *bottom-up planning process*. Perencanaan *bottom-up* dimulai dari level terendah di tingkat desa melalui Musrenbang Desa dan peran *top-down* pemerintah daerah yakni pendistribusian kegiatan dan nomenklatur program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Seluruh prinsip perencanaan tersebut telah dilaksanakan oleh Bapppeda.

Tabel 2.276
Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

No.	Uraian Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	1	1	1	1	1	1
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD dan RKPD-P yang telah ditetapkan dengan Perda (Dokumen)	2	2	2	2	2	2

Sumber: Bapppeda Gorontalo Utara, 2024

2. Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara setiap tahun menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Tabel 2.277
Tingkat Serapan Anggaran APBD

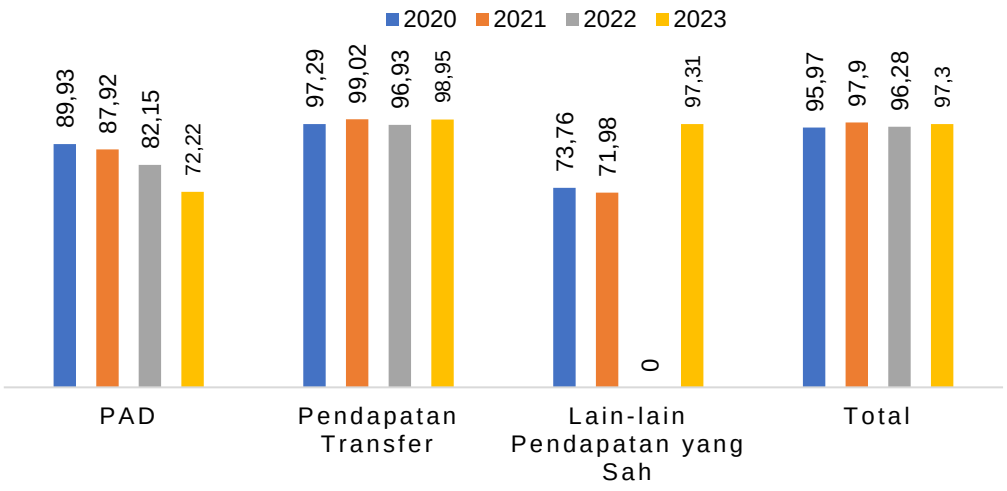
No.	Tahun	Persentase Serapan (%)
1	2017	92,55
2	2018	94,19
3	2019	95,29
4	2020	91,98
5	2021	94,83
6	2022	89,04
7	2023	95,37

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2024

Kemudian, seiring dengan perbaikan dan perubahan sistem pendukung penganggaran, Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sedangkan pada tingkat realisasi pendapatan daerah, selama 3 tahun terakhir menunjukkan angka yang fluktuatif. Uraian mendetail mengenai capaian pendapatan daerah empat tahun terakhir disajikan pada Grafik 2.95.

Grafik 2.95
Capaian Target Tiap Komponen Pendapatan
Tahun Anggaran 2020 Hingga 2023

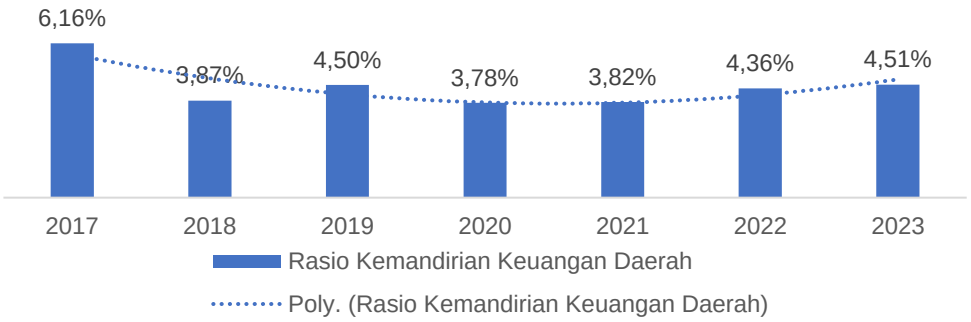


Sumber: Badan Keuangan Gorontalo Utara, 2024

Dalam hal tingkat kemandiriannya, yang tergambar pada Rasio Kemandirian Keuangan daerah, Gorontalo Utara masih tergolong sangat rendah (instruktif), karena realisasi PAD dibandingkan dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, transfer pemerintah provinsi, dan pinjaman yang berada di

bawah 5 persen, meski di tahun 2023 sempat meningkat. Gambaran kinerjanya selama tujuh tahun terakhir digambarkan pada Grafik 2.96.

Grafik 2.96
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah



Sumber: Badan Keuangan, 2024

Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara telah menetapkan 9 jenis mata pajak daerah yang menjadi bagian pendapatan asli daerah, jenis-jenis pajak tersebut meliputi: pajak hotel; pajak restoran; pajak hiburan; pajak reklame; pajak penerangan jalan; pajak sarang burung walet; pajak mineral bukan logam dan batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Rincian hasil pajak daerah dapat dilihat pada Tabel 2.278 berikut.

Tabel 2.278
Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian Pajak Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	Pajak Hotel	111.000.000,00	123.037.500,00	110,84
2	Pajak Restoran	1.625.000.000,00	1.032.328.958,00	63,53
3	Pajak Hiburan	5.000.000,00	0,00	0,00
4	Pajak Reklame	960.000.000,00	178.492.852,00	18,59
5	Pajak Penerangan Jalan	4.543.150.126,00	4.174.491.870,00	91,89
6	Pajak Sarang Burung Walet	100.000.000,00	3.967.000,00	3,97
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.737.580.000,00	906.719.375,00	24,26
8	PBBP2	1.600.000.000,00	1.109.536.867,00	69,35
9	BPHTB	800.000.000,00	351.328.535,00	43,92
Total		**13.481.730.126,00**	**7.879.902.957,00**	**58,45**

Sumber: Badan Keuangan, 2024
(Sebelum Audit BPK-RI)

Sedangkan jenis-jenis retribusi daerah yang menjadi sumber penerimaan pada tahun 2023 terdiri dari 18 jenis dengan rincian sebagaimana Tabel 2.279 berikut.

Tabel 2.279
Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023

No.	Uraian Retribusi Daerah	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
A	**Retribusi Jasa Umum**	**16.039.920.000,00**	**12.122.008.874,00**	**75,57**
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	14.872.500.000,00	11.429.161.642,00	76,85
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	56.174.333,00	37,45
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	45.000.000,00	72.556.000,00	161,24
4	Retribusi Pelayanan Pasar	540.000.000,00	292.682.000,00	54,20
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	195.000.000,00	212.399.500,00	108,92
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	10.000.000,00	3.503.625,00	35,04
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	177.420.000,00	55.531.774,00	31,30
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**395.000.000,00**	**261.491.000,00**	**66,20**
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	96.000.000,00	79.450.000,00	82,76
9	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	74.000.000,00	44.726.000,00	60,44
10	Retribusi Tempat Pelelangan	120.000.000,00	110.035.000,00	91,70
11	Retribusi Terminal	10.000.000,00	0,00	0,00
12	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	20.000.000,00	0,00	0,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	27.280.000,00	36,37
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**100.000.000,00**	**256.347.069,60**	**256,35**
14	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	**100.000.000,00**	256.347.069,60	256,35
Total		**16.534.920.000,00**	**12.639.846.943,60**	**76,44**

Sumber: Badan Keuangan, 2024
(Sebelum Audit BPK-RI)

Pada bidang pengelolaan aset daerah, selama tiga tahun terakhir, nilai aset semakin meningkat yang dialokasikan dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; serta aset tetap lainnya. Pada tahun 2019, nilai aset masih senilai Rp1.751.689.583.600,09. Pada tahun 2020 dan 2021 kembali meningkat dengan masing-masing senilai Rp1.890.001.988.704,09; dan Rp2.021.632.996.992,41. Tahun 2022 mencapai Rp2.259567.755.053,99. Terakhir, pada tahun 2023 nilai aset sebelum audit mencapai Rp1.264.070.266.827,26; secara sepintas turun dibandingkan setahun lalu, namun jika ditilik dari aset tetap nominalnya naik.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Secara umum, jumlah aparatur sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Gorontalo Utara lebih banyak yang berasal dari jenis kelamin perempuan dan populasinya terus berkurang sejak tiga tahun terakhir. Sedangkan menurut pendidikan, sekitar 75,01 persen ASN berjenis kelamin perempuan, dan sekitar 81,72 persen ASN laki-laki dari total 2.311 orang telah minimal mengenyam pendidikan kesarjanaan. Detail populasi berdasarkan gender

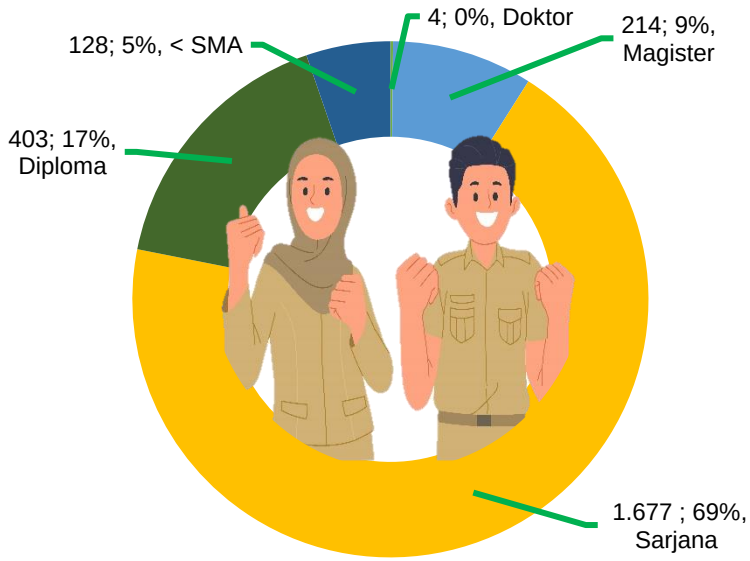
disajikan pada Tabel 2.280 dan latar belakang pendidikan ASN disajikan pada Grafik 2.97 berikut.

Tabel 2.280
ASN Berdasarkan Gender

Uraian	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jumlah	881	1.558	2.439	879	1.547	2.426	831	1.480	2.311
Persentase	36,12	63,87	100	36,23	63,77	100	35,96	64,04	100

Sumber: Badan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Daerah, 2024

Grafik 2.97
Latar Belakang Pendidikan ASN



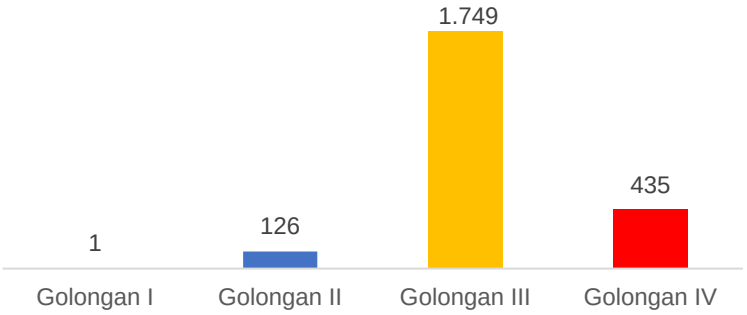
35,96%
Komposisi PNS Gorontalo Utara berjenis kelamin laki-laki



Sumber: Badan Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan Daerah, 2024

Sedangkan bila dilihat dari pembagian golongan, sebagian besar ASN yang ada berada pada jenjang kepangkatan golongan III, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 2.98.

Grafik 2.98
Pembagian Golongan ASN Tahun 2023



Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah, 2024

Penurunan jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2022 dan 2023, disebabkan karena terdapat pegawai yang memasuki masa purna bakti (pensiun) maupun yang mutasi ke daerah lainnya. Sehingga, untuk menutupi kekurangan tersebut, secara berturut-turut pada tahun 2019, 2020, 2021, dan terakhir 2022 telah dilaksanakan penerimaan Aparatur Sipil Negara. Selain itu, telah dilaksanakan juga penerimaan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejak tahun 2020.

Selain membidangi pelayanan terhadap kepegawaian, perangkat daerah pelaksana Urusan Kepegawaian, serta Pendidikan, dan Pelatihan berupaya mendorong tercapainya profil ASN yang *smart,* yang digambarkan sebagai ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT, mampu berbahasa asing, berjiwa melayani, berjiwa *entrepreneurship*, serta memiliki jaringan yang luas (KemenPAN RB, 2019). Untuk mengukur hal tersebut, salah satunya menggunakan Indeks Profesionalitas ASN. Gambaran capaian terhadap indikator tersebut di Gorontalo Utara masih rendah, sebagaimana Tabel 2.281 hingga 2.283.

Tabel 2.281
Indeks Profesionalitas ASN 2021

No.	Pemda	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai
1	Kota Gorontalo	3.614	13,07	13,59	22,81	4,99	54,46
2	Gorontalo	4.582	13,11	11,82	24,40	4,99	54,32
3	Bonebolango	3.591	12,84	10,42	22,77	4,98	51,02
4	Boalemo	2.896	12,50	8,34	18,91	4,99	44,74
5	Prov. Gorontalo	5.268	14,19	7,71	15,64	5,00	42,54
6	Pohuwato	3.307	12,73	8,83	9,46	5,00	36,02
7	Gorontalo Utara	2.283	13,97	10,07	6,90	5,00	35,93

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado, 2022

Tabel 2.282
Indeks Profesionalitas ASN 2022

No.	Pemda	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai
1	Kota Gorontalo	3.678	13,00	13,21	22,89	4,99	54,10
2	Gorontalo	4.645	12,99	11,05	24,41	4,99	53,44
3	Bonebolango	3.636	12,81	7,99	22,50	4,99	48,29
4	Boalemo	2.922	12,44	8,20	18,92	4,99	44,54
5	Gorontalo Utara	2.326	13,91	10,10	6,78	5,00	35,79
6	Pohuwato	3.334	12,70	8,38	8,15	5,00	34,23
7	Prov. Gorontalo	5.291	14,17	7,60	4,44	5,00	31,21

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado, 2023

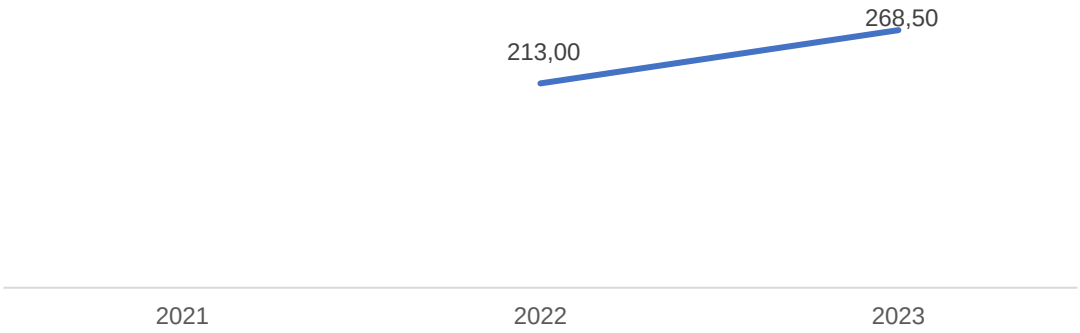
Tabel 2.283
Indeks Profesionalitas ASN 2023

No.	Pemda	Jumlah ASN	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai
1	Kota Gorontalo	3.646	20,87	11,98	25,04	5	62,89
2	Gorontalo	4.539	21,25	14,27	25,01	5	65,53
3	Bonebolango	3.461	21,14	15,43	24,94	4,99	66,51
4	Boalemo	2.843	21,06	9,05	24,88	5	59,99
5	Gorontalo Utara	2.254	21,38	9,25	24,99	5	60,62
6	Pohuwato	3.224	21,23	8,35	24,95	5	59,54
7	Prov. Gorontalo	5.149	21,57	8,36	25,16	5	60,08

Sumber: Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado, 2024

Selain itu, dalam upaya meningkatkan kinerja manajemen ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, diberlakukan sistem merit sebagai ejawantah dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam 3 tahun terakhir evaluasi sistem merit Gorontalo Utara oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), tren nilai yang diperoleh terus meningkat dan telah masuk pada kategori “Baik”.

Grafik 2.99
Indeks Sistem Merit



Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, diolah

Perbandingan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo disajikan pada Tabel 2.284 berikut.

Tabel 2.284
Indeks Sistem Merit Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No.	Pemda	Nilai Verifikasi	Kategori Penilaian
1	Kota Gorontalo	300	Baik
2	Gorontalo	326	Sangat Baik
3	Bonebolango	258	Baik
4	Boalemo	264	Baik
5	Gorontalo Utara	268,5	Baik
6	Pohuwato	278,5	Baik
7	Prov. Gorontalo	327	Sangat Baik

Sumber: Komisi Aparatur Sipil Negara, diolah

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan berperan penting sebagai pendukung dalam pembangunan suatu daerah. Hasil dari penelitian dan pengembangan tersebut dapat menjadi dasar/pondasi diambilnya suatu kebijakan strategis, untuk itu penelitian dan pengembangan diupayakan berangkat dari isu/permasalahan yang sedang/akan dihadapi oleh daerah.

Selain sebagai penuntun arah/acuan, ke-Litbang-an juga berguna untuk meminimalisir ketidakpastian dan inefisiensi. Dengan demikian, dokumen maupun *output* dari suatu penelitian pembangunan akan menjadi acuan dan bahan pijakan bagi pelaksanaan pembangunan di masa mendatang. *Output* penelitian yang aplikatif menjadi limitasi utama dalam mewujudkan suatu perencanaan yang kredibel. Syarat inilah yang harus dipenuhi dalam memproduksi suatu *brand* penelitian, baik berupa dokumen maupun *output* perencanaan pembangunan lainnya.

Tabel 2.285
Judul dan Lembaga Pengampu Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Lembaga Pengampu
1	2018	- *Blueprint* Pengembangan Sapi Potong di Kabupaten Gorontalo Utara	Fakultas Pertanian - UNG
2	2019	- Penguatan Kelembagaan Masyarakat Pesisir Pasca Program *Coastal Community Development Project* (CCDP) – *International Fund Agriculture Development* (IFAD) di Gorontalo Utara	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Komputer (LP2EMAK) – UNG
		- *Masterplan* Pembangunan Kawasan Budidaya Terpadu (Sumalata-Biau-Tolinggula) Kabupaten Gorontalo Utara	Lembaga Pengkajian Teknik Sipil, Lingkungan, dan Perencanaan Wilayah Fakultas Teknik - UNG
		- Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Penyelenggaraan Puskesmas di Kabupaten Gorontalo Utara	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Komputer (LP2EMAK) - UNG
		- Faktor Risiko Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan di Kabupaten Gorontalo Utara	Fakultas Olahraga dan Kesehatan - UNG
		- Evaluasi Implementasi Kebijakan *Blueprint* Sapi Potong dan Rencana Pengembangan Kerjasama Utara-Utara	Universitas Negeri Gorontalo
		- Analisis Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten Gorontalo Utara	Fakultas Olahraga dan Kesehatan - UNG
3	2020	- Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	LPPM Arta Zudayu Gorontalo
		- Pemetaan Potensi Destinasi Budaya di Kabupaten Gorontalo Utara	Pusat Penelitian dan Pengembangan Agama dan Budaya - IAIN Sultan Amai Gorontalo
		- Pengembangan Masyarakat Pesisir Kabupaten Gorontalo Utara	Pusat Studi Agropolitan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Fakultas Pertanian – Universitas Ichsan Gorontalo
		- Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa pada 123 Desa di Kabupaten Gorontalo Utara	Fakultas Ilmu Sosial – UNG
4	2021	- Lingkungan Tempat Tinggal dan Perilaku Penderita Tuberkulosis Paru pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Gorontalo Utara	Pusat Studi Ilmu-ilmu Kesehatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan – UNG

No.	Tahun	Judul Penelitian		Lembaga Pengampu
		-	Mata Pencaharian Alternatif Nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara	Pusat Studi Pembangunan dan Pemberdayaan – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
		-	Analisis Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Umar Sidiki	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Komputer (LP2EMAK) - UNG
		-	Budidaya Ikan Kerapu terkait Penentuan Status Stok dan Keragaman Jenis Ikan Kerapu di Teluk Kwandang	Pusat Studi Perikanan, Peternakan, dan Pertanian – Universitas Muhammadiyah Gorontalo
5	2022	-	Faktor Risiko Tingginya Kematian Ibu dan Anak di Kabupaten Gorontalo Utara	Pusat Studi Ilmu-ilmu Kesehatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan – UNG
		-	Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Gorontalo Utara	Pusat Studi Humaniora dan Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial – UNG
		-	Aspek-aspek Adat Gorontalo: Pemahaman, Kepatuhan, dan Perubahan Tata Aturan Adat di Gorontalo Utara	Pusat Pengkajian dan Analisis Otonomi Daerah Gorontalo
6	2023	-	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2023	Pusat Studi Sosial dan Politik - IAIN Sultan Amai Gorontalo

Sumber: Bapppeda, 2024



Tingkat pemanfaatan dokumen hasil penelitian pembangunan menjadi indikator kinerja kedua Bappeda Gorontalo Utara yang dilatarbelakangi oleh tuntutan dan kebutuhan terhadap eksistensi dokumen perencanaan dan penelitian yang berkualitas serta aplikatif. Namun sayangnya, karena berbagai keterbatasan, setiap hasil penelitian yang dihasilkan oleh Bapppeda tidak bisa serta merta diaplikasikan pada tahun berikutnya oleh perangkat pengusul. Namun, hasil ke-Litbangan tersebut menjadi informasi awal yang menjadi pondasi terhadap suatu isu atau fenomena yang terjadi di masyarakat maupun lingkungan pemerintahan untuk diambil kebijakan di waktu mendatang.

5. Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial. Peningkatan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah agar kinerja pelaksanaan program-program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada pengawasan internal secara berkala pada

semua obyek pemeriksaan di Kabupaten Gorontalo Utara. Gambaran pengawasan internal yang dilakukan instansi Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.286 berikut.

Tabel 2.286
Pengawasan Internal Inspektorat

No.	Kegiatan Pengawasan Internal	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**							
I	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal**							
A	**Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah**							
1	Reviu LPPD	-	-	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
2	Reviu RKPD	-	-	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
3	Audit Kinerja	-	-	1 LHA	I LHA	-	-	-
B	**Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah**							
1	Pemeriksaan Penutupan Kas	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	15 LHP	6 LHP
2	Audit Dana Bos	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA
3	Audit Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	42 LHA	42 LHA	42 LHA	40 LHA	6 LHA	10 LHA	-
4	Audit Puskesmas	15 LHA	15 LHA	15 LHA	15 LHA	15 LHA	15 LHA	-
5	Reviu Penganggaran Responsif Gender (PUG)	-	-	-	1 LHR	-	1 LHR	-
6	Reviu DAK	-	-	-	3 LHR	15 LHR	18 LHR	18 LHR
7	Audit PAD	-	-	1 LHA	1 LHA	1 LHA	-	-
8	Reviu RKA Covid	-	-	-	1 LHR	1 LHR	-	-
9	Reviu Pengadaan Barang dan Jasa	-	4 LHR	-	-	4 LHR	4 LHR	4 LHR
10	Monitoring Barang Jasa Puskesmas	15 LHM	-	-	15 LHM	-	-	-
11	Monitoring Fisik Barang dan Jasa OPD	-	-	15 LHM	-	-	-	-
12	Reviu RKA	-	-	1 LHR	-	-	-	-
C	**Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja**							
1	Reviu Lakip	-	-	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
2	Evaluasi Lakip	15 LHE	15 LHE	15 LHE	15 LHE	15 LHE	15 LHE	51 LHR
D	**Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan**							
1	Reviu Laporan Keuangan	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
E	**Sub Kegiatan Pengawasan Desa**							
1	Audit Dana Desa	-	11 LHA	-	11 LHA	11 LHA	11 LHA	11 LHA
2	Monitoring Dana Desa	-	11 LHM	-	11 LHM	-	-	-
3	Evaluasi Dana Desa	22 LHE	-	11 LHE	-	-	-	-
4	Sosialisasi Dana Desa	11 LHS	-	-	-	-	-	-
F	**Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal**							
1	Sosialisasi Saber Pungli	-	1 LHM	1 LHM	1 LHS	1 LHS	1 LHS	1 LHS
G	**Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**							
1	Monitoring Tindak Lanjut	4 LHM	4 LHM	4 LHM	4 LHM	4 LHM	2 LHM	2 LHM
H	**Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara**							
1	Evaluasi Tidak Lanjut	2 LHE	2 LHE	2 LHE	2 LHE	2 LHE	2 LHE	2 LHE

No.	Kegiatan Pengawasan Internal	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	**Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**							
1	Audit Pengaduan Masyarakat (Ritsus)	3 LHA	3 LHA	3 LHA	5 LHA	5 LHA	5 LHA	3 LHA
2	Reviu Perkada	-	-	-	-	-	1 LHR	-
3	Probity Audity	1 LHA	1 LHA	1 LHA	1 LHA	-	-	2 LHA
4	Audit PBJ Covid	-	-	-	1 LHA	1 LHA	-	-
5	Monitoring Pengawasan CPNS	-	-	-	-	3 LHM	-	-
6	Reviu Penyerapan Anggaran dan Kualitas Belanja	-	-	4 LHR	-	-	-	-
2	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**							
A	**Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**							
I	**Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**							
1	Peningkatan Kapabilitas APIP	-	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE
II	**Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan**							
1	**Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**							
III	**Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah**							
1	Evaluasi SPIP	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE
IV	**Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi**							
1	Evaluasi Reformasi Birokrasi	-	-	1 LHE	1 LHE	15 LHE	15 LHE	1 LHE
V	**Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi**	-						
1	Evaluasi Pencegahan Korupsi	-	-	2 LHE	2 LHE	2 LHE	1 LHE	2 LHE
VI	**Sub Kegiatan Pendampingan Dan Asistensi Verifikasi Penegakan Integritas**							
1	Verifikasi Data LHKPN	-	-	1 LHE	1 LHE	1 LHE	1 LHE	-
2	Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	1 LHE	1 LHE	2 LHE	1 LHE	1 LHE

Sumber: Inspektorat Daerah, 2023

Indikator yang melekat pada OPD Inspektorat yaitu tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). SPIP yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dapat dijadikan alat ukur pada kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam mengukurnya,



APIP berperan besar dalam menyukseskan usaha pengawasan pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2021, capaian nilai maturitas SPIP Kabupaten Gorontalo Utara mengalami peningkatan dari 2,7 menjadi 2,9, namun setahun berselang kembali turun di 2,841; yang kemudian malah tembus 3,02 di tahun berikutnya. Pada indikator temuan hasil pemeriksaan Auditor APIP dan APEP, tercapai hasilnya 5 persen juga sehingga kapabilitas APIP sudah tercapai di level 3. Hal ini disebabkan setiap OPD secara umum telah memahami sistem pengendalian dan pemahaman dalam pengelolaan keuangan organisasi perangkat daerah, khususnya di desa–desa.

Dalam proses kinerja pemerintah diperlukan adanya sistem pengawasan yang dapat menindaklanjuti pelanggaran maupun ketidaksesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan. Pengawasan yang dilakukan salah satunya adalah dengan memeriksa temuan pelanggaran dan menindaklanjuti temuan tersebut. Namun demikin, temuan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat masih terbatas dan capaiannya fluktuatif. Gambaran kinerja indikator tersebut disampaikan pada Tabel 2.287.

Tabel 2.287
Tindak Lanjut Temuan

No.	Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti	48	57	106	23	33	359	185
2	Jumlah total temuan	72	86	161	28	144	389	261
3	Persentase temuan yang ditindaklanjuti	66,67	66,28	65,84	82,14	22,92	92,29	70,88

Sumber: Inspektorat Daerah, 2024

6. Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja kesatuan bangsa dan politik dalam memastikan warna Pancasila dalam kehidupan masyarakat tercermin pada beberapa indikator.

Tabel 2.288
Kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

No.	Kegiatan	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam bentuk sosialisasi	-	-	-	1 kali	-	-	2 kali
2	Pembinaan politik daerah	2 kali	2 kali	2 kali	4 kali	-	-	1 kali

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Pembinaan terhadap LSM, Ormas, dan OKP dalam bentuk sosialisasi mulai dilaksanakan sejak tahun 2015. Kegiatan pembinaan politik daerah selalu intensif dilakukan menjelang pemilihan kepala daerah untuk suksesnya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Khusus pada perhelatan serentak 2024 perlu ada sosialisasi dan pendekatan yang masif dan humanis kepada masyarakat agar perhelatan pesta demokrasi tidak dicederai oleh tindakan-tindakan anarkis dan isu-isu yang bertujuan untuk membuat suasana daerah tidak kondusif. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, organisasi masyarakat, dan OKP perlu dilakukan guna lebih meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah dapat lebih meningkat, meskipun sempat terganggu karena pembatasan sosial saat pandemi, seperti terlihat pada Tabel 2.289.

Tabel 2.289
Organisasi Kemasyarakatan yang Mendaftar

No.	Jenis Organisasi	Tahun								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	LSM	2	-	4	-	-	1	2	-	-
2	Ormas	1	4	2	-	-	-	-	-	-
3	OKP	2	-	1	-	-	2	-	1	1
4	Ormas Islam	2	1	-	-	-	2	1	2	2
5	Yayasan	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Total		**7**	**6**	**7**	**1**	**-**	**6**	**3**	**3**	**3**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Peran aktif pemerintah dalam dalam melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat secara optimal dengan melakukan kegiatan penanganan konflik secara komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi telah diupayakan untuk dilaksanakan. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan saling menjaga kerukunan umat beragama serta terus memberikan pemahaman tentang wawasan kebangsaan terhadap masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan rapat sosialisasi rutin yang dilaksanakan setiap tahun.

Tabel 2.290
Rapat Sosialisasi Forum Pencegahan Konflik

No.	Nama Kegiatan	Tahun (Kali)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	2	2	2	1	2	3	-	-	2
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	2	2	2	2	2	1	2	2	2
3	Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	2	2	2	2	1	1	1	-	2
Total		**6**	**6**	**6**	**5**	**5**	**5**	**3**	**2**	**6**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Dibutuhkan tim kerja yang handal serta keterpaduan pemangku kepentingan terkait di daerah yang mampu bergerak cepat melakukan deteksi dini dan cegah dini setiap indikasi potensi konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat guna mewujudkan peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik sosial. Pemerintah Daerah telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) yang rutin melaksanakan rapat membahas tentang konflik yang terjadi di daerah yang nantinya akan diteruskan kepada Instansi/OPD yang bertanggung jawab.

Tabel 2.291
Penanganan Gangguan Keamanan

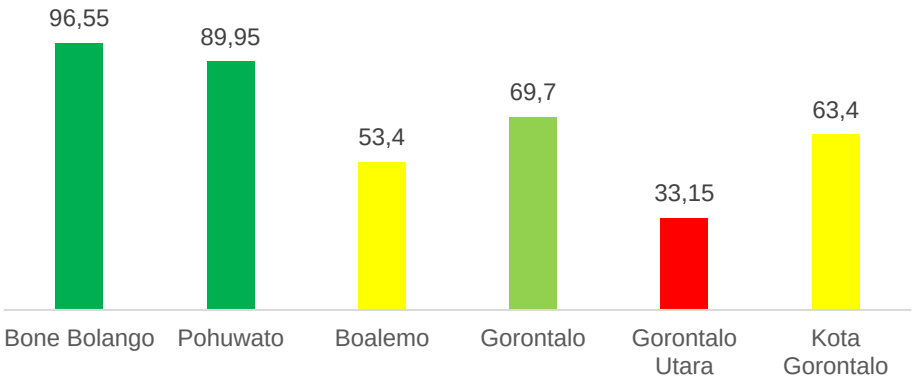
No.	Kegiatan Koordinasi	Tahun (Kali)								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	KOMINDA/ FORKOPIMDA	4	4	4	4	4	12	4	4	4
2	Tim Terpadu Penanganan Konflik	3	5	5	5	5	1	1	-	2
Total		**7**	**9**	**9**	**9**	**9**	**13**	**5**	**4**	**6**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2024

Selain itu, dalam upaya meningkatkan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM) di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025. Implikasi dari adanya Perpres tersebut, program dan kegiatan yang dilaksanakan di daerah agar melakukan afirmasi dan prioritas terhadap 4 kelompok prioritas, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang kemudian dinilai oleh Kemenkumham.

Daerah yang dianggap peduli HAM jika memiliki skor di atas 75, skor 65 hingga 75 dianggap cukup peduli, 50 hingga 65 dianggap mulai peduli, dan dibawahnya dianggap kurang peduli HAM. Saat ini, Kabupaten Gorontalo Utara masih masuk pada tataran "Kurang Peduli HAM" dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, dimana untuk indikator "Hak atas bantuan hukum", "Hak atas informasi", "Hak turut serta dalam pemerintahan", dan "Hak atas keberagaman dan pluralisme" Kabupaten Gorontalo Utara dianggap belum memiliki skor. Komparasi kabupaten/kota tersebut ditampilkan pada Grafik 2.100.

Grafik 2.100
Skor Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2022



Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, 2023

7. Sekretariat Dewan

DPRD Gorontalo Utara pada tahun 2022 beranggotakan 25 anggota (19 laki-laki dan 6 perempuan) dari 8 partai politik yang ada sebagaimana Tabel 2.292 Kinerja dewan legislatif sepanjang 2019 hingga 2023 digambarkan pada Tabel 2.293.

Tabel 2.292
Anggota DPRD Menurut Partai Politik

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	2	2	4
2	Partai Amanat Nasional	4	-	4
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4	2	6
4	Partai Hati Nurani Rakyat	1	-	1
5	Partai Persatuan Pembangunan	1	1	2
6	Partai Keadilan Sejahtera	1	-	1
7	Partai Gerindra	1	1	2
8	Partai Nasional Demokrat	5	-	5
Total		19	6	25

Sumber: Sekretariat Dewan, 2024

Tabel 2.293
Keputusan dan Kegiatan DPRD

No.	Jenis Keputusan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Peraturan Daerah	6	5	6	3	1
2	Keputusan DPRD	15	13	24	17	23
3	Pernyataan	-	-	-	-	-
4	Resolusi	-	-	-	-	-
5	Keputusan Pimpinan DPRD	5	4	24	1	1
6	Rapat Panitia Musyawarah	8	17	16	12	9
7	Memorandum	-	-	-	-	-
8	Rapat anggaran	38	37	21	16	24
9	Seruan	-	-	-	-	-

Sumber: Sekretariat Dewan, 2024

8. Sekretariat Daerah

Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, nilai LPPD, kinerja reformasi birokrasi, maturitas pengadaan barang dan jasa, serta kepuasan masyarakat yang sebenarnya menjadi kinerja dari seluruh OPD pelaksana pelayanan publik, menjadi kinerja yang diharapkan dapat dicapai atau diorkestrasi oleh Sekretariat Daerah Gorontalo Utara.

A. Predikat SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk rangkaian upaya untuk mewujudkan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Kinerja pemerintah daerah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan gambaran keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK). Adapun hasil penilaian dari laporan LKIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang umumnya disebut SAKIP beberapa tahun terakhir mengalami stagnansi. Pada tahun 2015, nilai SAKIP Pemerintah Daerah Gorontalo Utara masih “CC”, mulai tahun 2016 sampai dengan 2023 masih di posisi “B”. Prestasi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya kinerja pemerintah daerah Gorontalo Utara sudah baik, akuntabel, dan program yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran, namun perlu ditingkatkan agar lebih baik hingga mencapai predikat “A”.

B. Peringkat, Skor, dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri setiap tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut, diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Capaian LPPD Gorontalo Utara di 2022 mencapai status "Sedang".

Tabel 2.294
Peringkat, Skor, dan Status LPPD

No.	Jenis Keputusan	2019	2020	2021	2022
1	Nilai LPPD	2,8999	3,2783	2,69	2,9795
2	Predikat	Tinggi	Sangat Tinggi	Sedang	Sedang

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

Jika dibandingkan kinerjanya dengan kabupaten/kota lainnya, Gorontalo Utara bersama Kabupaten Gorontalo dan Boalemo sama-sama predikat "Sedang" dengan nilai hampir mencapai 3,00. Hanya Kota Gorontalo dan Kabupaten Bonebolango yang memperoleh skor di atas 3,00 tahun 2022.

Tabel 2.295
Nilai LPPD Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/Kota	Nilai	Predikat
1	Gorontalo	2,9925	Sedang
2	Boalemo	2,9639	Sedang
3	Bonebolango	3,1362	Sedang
4	Pohuwato	2,5906	Rendah
5	Gorontalo Utara	2,9795	Sedang
6	Kota Gorontalo	3,2533	Sedang

Sumber: Sekretariat Daerah, 2023

C. Kinerja Reformasi Birokrasi

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Untuk menilai sejauh mana kinerja reformasi birokrasi, dilakukan sebuah mekanisme penilaian mandiri. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip *Total Quality Management* (TQM) dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

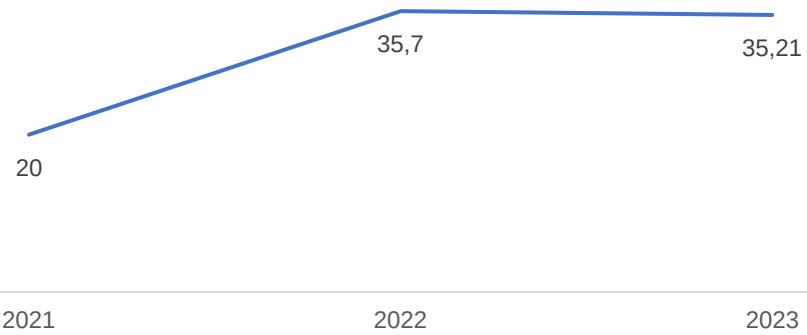
Selama 2 tahun masa penilaian PMPRB, Kabupaten Gorontalo Utara belum menunjukkan hasil yang menggembirakan pada tahun pertama, karena masih ada di predikat “D”, pada tahun 2020. Kinerjanya meningkat pada dua tahun berikutnya, sehingga berhasil meraih predikat “B” pada penilaian tahun 2023. Hal tersebut merupakan buah peningkatan komponen hasil dan komponen pengungkit yang meningkat sangat signifikan.

D. Tingkat Maturitas Pengadaan Barang dan Jasa

Tingkat Maturitas UKPBJ adalah gambaran tentang tingkat kematangan proses pelaksanaan aktivitas dalam organisasi yang bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan proses produksi. Dalam penjabarannya, Level Maturitas dibagi menjadi 4 domain (Proses, Kelembagaan, SDM dan Sistem Informasi) yang dibagi lagi dalam 9 variabel (Manajemen Risiko, Manajemen Kinerja, Manajemen Penyedia dan Manajemen Pengadaan, Pengorganisasian Kelembagaan, Tupoksi Kelembagaan, Perencanaan SDM, Pengembangan SDM, dan Sistem Informasi). Realisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara terhadap Level Kematangan/Maturitas PBJ tahun 2021 masih berada pada tingkat kematangan level 1 (Inisiasi), dan menjadi 2 (Esensi) setahun berikutnya. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas kinerja dari pemerintah daerah Gorontalo Utara agar minimal bisa menginjak level 3 (proaktif).

Sedangkan pada Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP), dari 625 K/L/D yang dinilai, Kabupaten Gorontalo Utara masih berada predikat tahap "Kurang" yang dinilai dari 5 indikator (SIRUP, e-*Purchasing*, e-*Tendering*, SDM PBJ, serta Tingkat kematangan UKPBJ). Dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, capaian tersebut pun termasuk terendah sehingga perlu upaya yang lebih serius untuk meningkatkan capaian tersebut.

Grafik 2.101
Indeks Tata Kelola Pengadaan



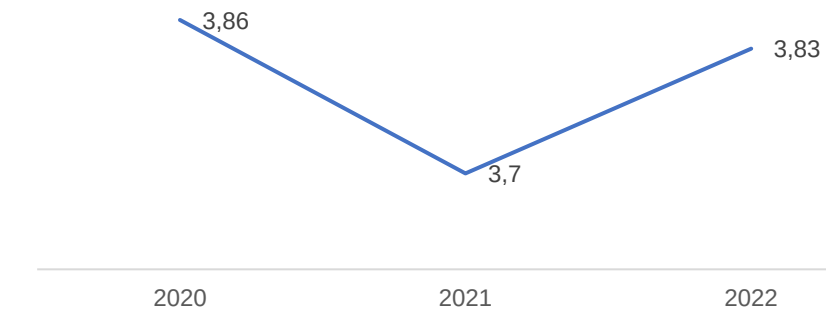
Sumber: https://siukpbj.lkpp.go.id/, diolah

E. Indeks Kepuasan Masyarakat

Salah satu tugas utama pemerintah adalah pelayanan umum (*public service*), selain tugas pembangunan (*development*) dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Meski demikian, sering kali layanan publik dikeluhkan warga karena tidak memenuhi ekspektasi dan kepuasan pengguna layanan.

Pada dasarnya pelaksanaan survey IKM sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, sehingga KemenPAN RB menghitung kinerja instansi pelayanan publik yang dilaporkan setiap tahun, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Kabupaten Gorontalo Utara pada indikator ini fluktuatif, namun membaik di setahun terakhir. Grafik 2.102 menampilkan kinerja kepuasan masyarakat.

Grafik 2.102
Indeks Kepuasan Masyarakat



Sumber: KemenPAN RB, 2023

2.5 EVALUASI RPJPD GORONTALO UTARA 2009-2029

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Pasal 250 ayat 3 mengamanatkan bahwa hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya perlu digunakan sebagai bahan basis data bagi penyusunan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara untuk periode berikutnya (RPJPD 2025-2045). Hasil penelaahan terhadap dokumen evaluasi RPJPD ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis selain sumber-sumber lainnya. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau sebaliknya, tantangan bagi daerah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 tertuang visi pembangunan daerah, **"**Kabupaten Gorontalo Utara sebagai Daerah yang Tangguh, Maju, Mandiri, Berpendidikan, Sejahtera dan Berkeadilan**"**. Terdapat 6 kata kunci pada visi pembangunan Gorontalo Utara diatas yang merupakan perwujudan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai kabupaten yang diperhitungkan tidak hanya di Provinsi Gorontalo, melainkan juga di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kondisi pembangunan dan kesejahteraan yang unggul dan progresif yang konkrit dalam segala bidang dengan tetap mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara, ditetapkan Misi Pembangunan sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut. Adapun Misi Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2009-2029 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Memperbaiki Kualitas Lingkungan Hidup;

3. Membangun Infrastruktur dan Perekonomian yang Kuat;
4. Menciptakan Masyarakat yang Demokratis;
5. Menghapus Kemiskinan dan Ketertinggalan Wilayah.

RPJP Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dilaksanakan melalui beberapa tahapan dan skala prioritas pembangunan. Setiap tahapan dalam RPJPD dilakukan selama 5 tahun sekali dan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, karena terdapat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 600.2.1/1570/Sj Tahun 2023, yang dilanjutkan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, periodisasi RPJPD Gorontalo Utara, disesuaikan dengan periodisasi RPJPN 2005-2025.

Tahap pertama dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara (2008-2013) sebagai tahap awal terbentuknya Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat berbagai permasalahan khususnya terkait perbaikan sosial dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu masih dihadapkan juga dengan persoalan proses penataan kelembagaan dan keterbatasan sumber daya aparatur dan anggaran daerah. Oleh karena itu pada tahap awal ini diarahkan pada proses untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya mengakselerasi pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara di masa yang akan datang. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah pemenuhan cakupan pelayanan prasarana dan sarana wilayah/infrastruktur, termasuk peningkatan peran swasta karena kemampuan fiskal daerah masih sangat terbatas; peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui jalur formal dan non-formal, pemenuhan tenaga pengajar di sekolah-sekolah dan tenaga pendukung kesehatan di Puskesmas yang tersebar di kecamatan, pemenuhan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan; peningkatan kelembagaan serta keahlian masyarakat petani, nelayan, dan peternak; pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup yang baik dan terjaga melalui pengendalian pencemaran dan lingkungan dengan mendorong partisipasi masyarakat; penyusunan rencana tata ruang sehingga meningkatkan resiliensi dan penanggulangan bencana dan fungsi lahan; mendorong pertumbuhan ekonomi selaras dengan penanggulangan kemiskinan

dan pengangguran; serta penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih.

Periode 2013-2018 menjadi tahapan kedua dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara. Pada tahap ini berfokus pada revitalisasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dengan berlandaskan/berefleksikan pada pencapaian pembangunan pada periode/tahap sebelumnya. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah; penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan kesejahteraan sosial; peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya peningkatan pemahaman dan profesionalisme aparatur melalui intrusi penggunaan teknologi serta peningkatan status gizi dan derajat kesehatan masyarakat; pemulihan dan peningkatan daya saing dan kemandirian lokal ekonomi daerah; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; percepatan pengembangan pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Tahap berikutnya pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara masuk pada periode 2019-2023. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan dari tahap sebelumnya, pada tahap ketiga ini diarahkan pada pemantapan pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara melalui percepatan atau akselerasi pembangunan di segala bidang. Adapun prioritas pembangunan pada tahap ini adalah penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial melalui penciptaan iklim usaha produktif berbasis kerakyatan, penyediaan lapangan kerja yang berkelanjutan, serta penguatan sektor pertanian yang menjamin ketahanan pangan lokal; pemantapan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan partisipasi sekolah di segala jenjang, serta pemenuhan keadilan gender; pemantapan kualitas dan pemerataan perekonomian dalam peningkatan pendapatan per kapita; pemantapan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah termasuk akses terhadap air bersih yang mudah dan murah dan akses sarana dan prasarana kesehatan yang murah dan cepat; pengelolaan dan revitalisasi tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih termasuk penciptaan iklim pelayanan publik yang berkualitas dan pemenuhan standar pelayanan

minimal; pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, teknologi informasi, energi ramah lingkungan untuk kelistrikan, serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Pada periode inilah dilaksanakan evaluasi pembangunan RPJPD 2009-2029 sebagai bahan pertimbangan terhadap penyusunan RPJPD 2025-2045, setelah disepakati bersama berdasarkan SE Menteri Dalam Negeri bahwa RPJPD periode tersebut disesuaikan dengan periodisasi RPJPN 2005-2025.

Laporan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029 dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok serta identifikasi faktor-faktor penghambat/pendorong yang mempengaruhi tingkat capaian pembangunan jangka panjang daerah. Selain itu, pelaksanaan evaluasi RPJPD dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi RPJMD selama periodisasi RPJPD.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD selama 3 periode pertama terhadap capaian indikator makro diperoleh hasil kinerja yang baik dan cukup progresif untuk indikator peningkatan indeks pembangunan manusia, persentase penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, perolehan PDRB Perkapita dan serta nominal PDRB ADHK dan PDRB ADHB. Namun, laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang signifikan terutama saat pandemi Covid-19, serta peningkatan indikator Indeks Gini yang menunjukkan stagnansi ketimpangan. Rincian evaluasi capaian makro dijabarkan pada Tabel 2.296 berikut.

Tabel 2.296
Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Periode 2009-2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Periode Awal Perencanaan (2008)	Capaian Tahun Berjalan (2023)	Pertumbuhan/ Penurunan	Gambaran Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,14	68,00	-0,2% (karena perubahan metode hitung dan metadata yang digunakan sehingga hasil menjadi bias)	▽
2	Angka kemiskinan	%	23,94	17,03	-40,57%	▼
3	Angka pengangguran	%	2,82	2,77	-1,8%	▼
4	Pertumbuhan ekonomi	%	7,35	4,31	-41,36% (*shock* saat pandemi, namun LPE kembali *rebound* meski belum menyentuh *trajectory*)	▼
5	Pendapatan perkapita	Rp000	N/A	10.037		▲
6	Indeks gini	Indeks	0,413	0,424		▲
7	PDRB ADHK	Rp000	183,157	2.560,60	1.295,11%	▲
8	PDRB ADHB	Rp000	372,608	4.145,15	1.012,46%	▲
9	PDRB perkapita	Rp000	3,5	31,71	806%	▲

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2009-2025

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut juga terdapat berbagai rekomendasi penyusunan visi, misi, sasaran, dan arah kebijakan untuk RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, yaitu:

1. Keselarasan visi, misi, sasaran, arah kebijakan, dan indikator kinerja RPJPD dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
2. Perlu perhatian khusus dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan stunting, penurunan kesenjangan pendapatan antar penduduk, dan pemenuhan kebutuhan dasar yang berkeadilan;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, pemanfaatan sumber daya alam, kemudahan dan kemandirian berusaha bagi UMKM, serta peningkatan investasi;
4. Peningkatan kualitas SDM dengan penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan;
5. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang;
6. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah;
7. Penguatan strategi pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan bencana; dan
8. Penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pembangunan.

Selain itu, dalam dokumen tersebut juga memuat kesimpulan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD Tahun 2009-2029 yang secara umum dijabarkan melalui Tabel 2.297 berikut.

Tabel 2.297
Kesimpulan Evaluasi Pelaksanaan
RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi Arah Kebijakan
- Belum optimalnya pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan - Rendahnya kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) - Tingginya angka kematian ibu dan stunting - Tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya jaminan kesehatan - Belum optimalnya pengembangan olahraga, pemuda, dan keluarga	- SDM di bidang pendidikan banyak tersedia - Dorongan pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan tinggi - Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan sudah ada, namun belum memadai - Komitmen pembiayaan pembangunan untuk layanan pendidikan dan kesehatan - Penguatan peran kewilayahan dalam penyelenggaraan pembangunan	- Peningkatan kualitas SDM untuk akselerasi pendidikan dan kesehatan - Peningkatan dan percepatan layanan publik sektor pendidikan dan kesehatan - Peningkatan perilaku PHBS - Mengurangi kemiskinan dengan pengembangan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat - Mendorong kehidupan masyarakat yang agamis dan berkebudayaan, serta penguatan pembinaan keluarga berkualitas
- Alih fungsi lahan dan penataan ruang konsisten karena penurunan daya dukung lingkungan - Peningkatan perdagangan hasil hutan dan dinamisnya kondisi investasi di daerah - Belum optimalnya investasi dan peluang investasi - Minimnya inovasi dan pengembangan sektor strategis - Daya saing tenaga kerja rendah - Belum optimalnya pengelolaan perdagangan, peran koperasi-UMKM, dan BUMD - Belum optimalnya pemasaran produk IKM - Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta sektor perikanan-pertanian - Kawasan Anggrek belum optimal memberikan efek ekonomi - Generasi muda minim minat untuk bekerja di sektor agraris	- Peningkatan daya saing produk pertanian dan pengembangan komoditas - Optimalisasi lahan dan kelembagaan pertanian - Ada usaha kemudahan perizinan dan investasi - Kawasan Anggrek pasca KPBU mulai terlihat menggeliat - Keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kawasan dan sarana prasana - Pertumbuhan PDRB relatif di atas nasional (kecuali saat pandemi dan pemulihan pasca pandemi) - Letak geografis strategis serta dekat dengan IKN - Dukungan kebijakan kawasan strategis baik level pusat maupun provinsi - Akses masyarakat terhadap internet dan *marketplace* sudah tinggi - Pengembangan wisata mulai menunjukkan gairah di masyarakat	- Pengendalian alih fungsi lahan pertanian - Mendorong hilirisasi industri pertanian berbasis pemanfaatan teknologi dan inovasi - Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan - Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kelembagaan - Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kelembagaan - Meningkatkan efektivitas KPBU untuk men-*trigger* ekonomi kawasan - Mendukung RnD sektor pertanian, memberikan insentif dan kebijakan pro petani, serta aktif mendorong inovasi
- Belum optimal dan meratanya layanan infrastruktur dasar - Belum optimalnya penanggulangan risiko bencana - Penanganan kawasan permukiman kumuh masih parsial	- Potensi kerjasama energi terbarukan dan sarana prasarana transportasi - Terbukanya sinergi penanggulangan bencana - Ada usaha peningkatan layanan persampahan dengan mendorong perolehan PAD - Terdapat upaya optimalisasi pemanfaatan pengelolaan SDA	- Mendorong perilaku dan gaya hidup yang berkelanjutan - Reformasi pengelolaan sampah - Peningkatan luas konservasi daratan dan perairan serta infrastruktur penanggulangan bencana

Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Rekomendasi Arah Kebijakan
- Permasalahan timbulan sampah, banjir, dan kurangnya sarana perhubungan - Belum optimalnya pengendalian kerusakan lingkungan hidup - Belum optimalnya efisiensi-efektivitas nilai tambah pengelolaan SDA dan lingkungan hidup		
- Belum ada rencana induk dan masterplan SPBE - Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan kompetensi SDM aparatur - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan manajemen pelayanan publik	- Efisiensi penggunaan anggaran - Perkembangan teknolgi informasi yang mendukung layanan publik - Pengelolaan keuangan dan aset daerah mendapat predikat WTP	- Peningkatan kinerja birokrasi dan digitalisasi layanan publik - Penguatan pencegahan korupsi - Peningkatan kinerja birokrasi dan digitalisasi layanan publik
- Sarana transportasi antar kecamatan belum ada - Kapasitas jalan banyak belum memenuhi standar mantap - Belum adanya terminal	- Dukungan kebijakan kawasan strategis baik level pusat maupun provinsi	- Meningkatkan kapasitas jalan dan jembatan yang berkualitas dan sesuai standar - Pengembangan transportasi murah dan ramah lingkungan

Sumber: Evaluasi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2009-2025

2.6 PROYEKSI DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA

Demografi merujuk pada suatu studi yang mempelajari tentang struktur yang meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi, serta proses penduduk yang dipengaruhi oleh natalitas, mortalitas, dan mobilitas sosial, di suatu wilayah. Artinya ilmu ini tak hanya mencakup data statistik tentang jumlah penduduk, tetapi juga menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut.

Adanya demografi juga memiliki tujuan tertentu, seperti:

a. Untuk menjelaskan tentang perkembangan penduduk yang ada di suatu wilayah, entah itu pertumbuhan yang pernah terjadi di masa lalu, tingkat perkembangannya, tingkat persebaran, dan lain sebagainya.
b. Supaya bisa mempelajari tentang tingkat kuantitas dan distribusi penduduk di suatu wilayah tertentu.
c. Agar bisa memprediksikan tingkat pertumbuhan penduduk yang ada di suatu wilayah di masa mendatang dan berbagai kemungkinan konsekuensinya.
d. Supaya dapat menemukan keterkaitan antara sebab dan akibat dari pertumbuhan penduduk dan aspek-aspek organisasi sosial yang ada di dalam masyarakat.

Demografi memiliki peran yang sangat krusial, khususnya dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan, salah satunya dalam pengembangan sarana dan prasarana kewilayahan. Dalam keseharian, berbagai sarana dari mulai pendidikan, kesehatan, konektivitas antar wilayah, hingga sarana ekonomi sangat mempengaruhi warna dan aktivitas masyarakat. Dengan urgensi tersebut, perencanaan pengembangan sarana prasarana dengan melibatkan proyeksi demografi memiliki porsi khusus dalam pembahasan perencanaan daerah dalam jangka panjang.

2.6.1 Proyeksi Demografi

Paradigma pembangunan modern menempatkan manusia sebagai subjek sekaligus objek dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pengetahuan terhadap tren dan perubahan demografi sangat diperlukan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Perkiraan besaran, komposisi, dan sebaran populasi di masa depan dapat dijadikan acuan pengambilan kebijakan pemerintah, misalnya untuk menjamin pendidikan bagi anak, menyediakan kesempatan kerja bagi kaum muda, dan menyiapkan jaminan sosial bagi penduduk lanjut usia.

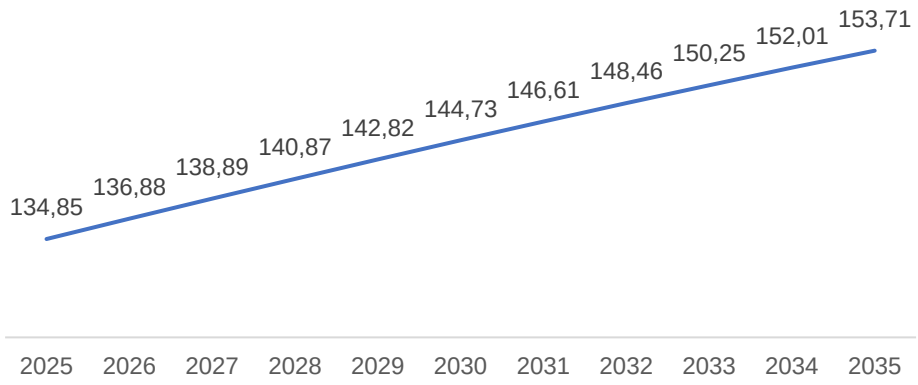
Proyeksi demografi kependudukan memberikan gambaran mengenai ukuran dan struktur umur penduduk di masa depan yang didasarkan pada asumsi tertentu baik ketika mengikuti tren dari masa lalu maupun ketika ada kebijakan yang diterapkan. Dengan mengetahui struktur usia penduduk, pemerintah dapat merencanakan pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, air minum, sanitasi, atau jalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Atau misalnya dengan mengetahui tingkat pendidikan penduduk, pemerintah dapat merencanakan program pelatihan dan pengembangan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara adalah kabupaten termuda, dengan estimasi jumlah penduduk pada tahun 2023 berdasarkan Sensus Penduduk 2020 sejumlah 130,72 ribu jiwa, sekaligus menjadikan Gorontalo Utara sebagai daerah “tersepi” di Provinsi Gorontalo karena hanya terdapat sekitar 70 hingga 75 orang dalam setiap Kilometer perseginya.

Baik berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun Badan Pusat Statistik, populasi setiap tahun di Gorontalo Utara selalu meningkat, yang menunjukkan ada peran yang positif secara kolektif dari upaya penekanan tingkat mortalitas, mendorong kesehatan masyarakat sehingga natalitas meningkat, atau daya tarik ekonomi daerah semakin baik yang mendorong migrasi masuk ke Gorontalo Utara. Di masa depan, proyeksinya populasi penduduk terus meningkat, sehingga membutuhkan analisa kependudukan secara komprehensif.

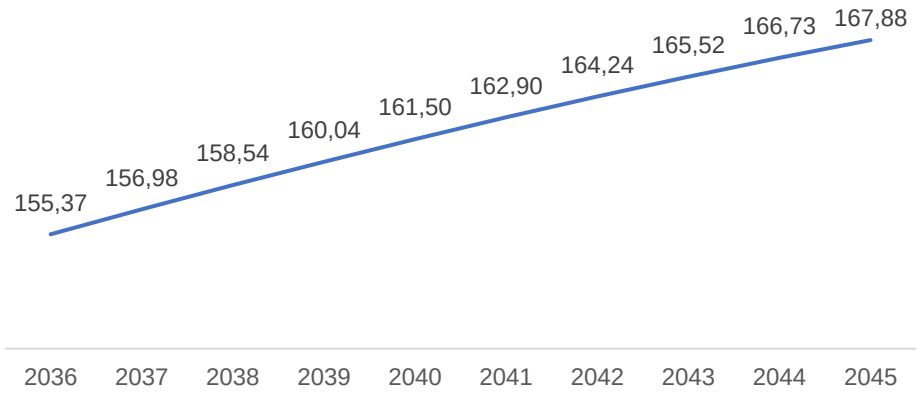
Grafik 2.103
Proyeksi Populasi Penduduk 2025-2035 (Ribuan Jiwa)



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2020-2035 (BPS), 2023

Proyeksi penduduk pada Grafik 2.103 hingga tahun 2035 merupakan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik, sedangkan untuk mencapai masa perencanaan jangka panjang hingga 2045, Bapppeda mencoba memperpanjang masa proyeksi hingga tahun 2045 dengan menggunakan tren pertumbuhan yang sama dengan proyeksi penduduk dari BPS.

Grafik 2.104
Proyeksi Populasi Penduduk 2036-2045 (Ribuan Jiwa)



Sumber: Proyeksi Bapppeda, 2023

Dibandingkan proyeksi saat tahun *baseline* 2023, hingga tahun 2045 telah bertambah populasi sebanyak 37,16 ribu jiwa, atau setara 28,4 persen, dengan tingkat kepadatan baru mencapai sekitar 95 orang per Kilometer persegi. Pertambahan populasi dan kepadatan penduduk yang demikian menjadi modal dasar pembangunan, pendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi, hingga menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perencanaan matang dalam pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar.

37,16 ribu jiwa
selisih jumlah penduduk tahun 2045 dibandingkan 2023



Sedangkan pada laju pertumbuhan penduduk, sesuai tren yang ditunjukkan dalam proyeksi BPS, menunjukkan *slope* yang menurun. Jika pada tahun 2025 lajunya masih sekitar 1,51 persen, pada tahun 2035 menjadi 1,08 persen, dan diproyeksikan oleh Bapppeda terus turun hingga mencapai 0,65 persen pada tahun 2045. Penurunan laju ini salah satunya disinyalir akibat perubahan gaya hidup masyarakat dan program keluarga berencana yang telah berjalan sejak tahun 1980. Dari segi demografis, penurunan laju pertumbuhan penduduk ini adalah hal yang positif untuk mengendalikan populasi. Kepadatan penduduk yang bisa dikendalikan akan membuka peluang untuk menciptakan situasi sosial ekonomi yang lebih baik.

2.6.1.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jika populasi dilihat dari jenis kelamin, gender laki-laki secara umum lebih banyak dibandingkan perempuan, namun dengan berjalannya tahun rasio jenis kelamin semakin mengecil. Dengan kesetaraan populasi jenis kelamin di masa depan berimplikasi pada angkatan kerja (dan mungkin angka pengangguran), sektor lapangan usaha, sarana prasarana, serta kepentingan lansia yang perlu lebih mempertimbangkan kepentingan perempuan.

Sedangkan dari segi kelompok umur, terlihat bahwa komposisi penduduk senior usia di atas 60 tahun semakin meningkat yang menunjukkan Kabupaten Gorontalo Utara akan menghadapi fase struktur umur penduduk menua (*ageing population*), yang ditandai dengan porsi penduduk usia di atas 60 tahun semakin mendekati 10 persen, sehingga untuk mewujudkan Lansia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan perlu integrasi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, LSM, mitra kerja, perguruan tinggi, sektor privat, serta partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup Lansia. Dalam upaya tersebut, tidak cukup hanya memanfaatkan Program Bina Keluarga Lansia saja, perlu juga "vitamin" tambahan berupa infrastruktur ramah Lansia modern (pesantren Lansia, komunitas Lansia, rumah Lansia, dan sebagainya), pemberian pelatihan pengasahan bakat atau mendirikan sekolah khusus Lansia agar pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan para Lansia bertambah karena indikasi Lansia di Gorontalo Utara relatif masih berpendidikan rendah, berada di lingkaran kemiskinan, bahkan banyak diantaranya yang menjadi orang tua tunggal yang menjadi kepala keluarga. Dengan berbagai upaya demikian, diharapkan kondisi penduduk menua yang tangguh justru dapat memberikan efek bonus demografi kedua.

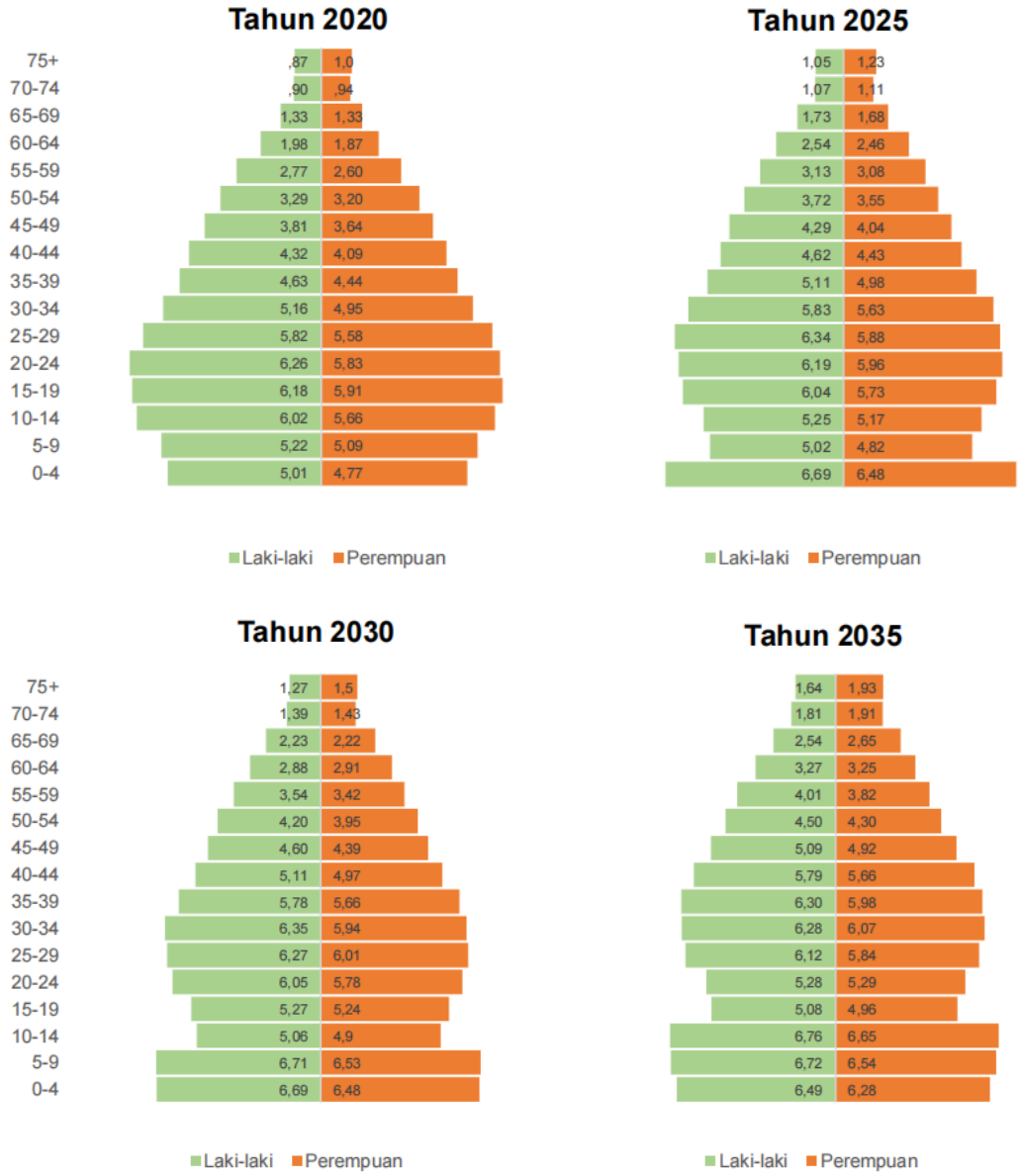
Tabel 2.298
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk

No.	Parameter	Tahun			
		2020	2025	2030	2035
1	**Penduduk**				
	Laki-laki (000)	63,56	68,63	73,39	77,68
	Perempuan (000)	60,88	66,23	71,34	76,03
	Total (000)	124,44	134,85	144,73	153,71
	Sex ratio (%)	104,39	103,62	102,88	102,18
	Komposisi umur (%)				
	0-4 tahun	25,53	24,79	25,12	25,65
	15-64 tahun	69,36	69,38	67,94	66,24
	65+ tahun	5,11	5,83	6,94	8,12
	Dependency ratio (%)	44,18	44,13	47,19	50,97
2	**Fertilitas**				
	Total Fertility Rate (TFR)	2,49	2,39	2,30	2,25
3	**Mortalitas**				
	Infant Mortality Rate (IMR)	32,81	29,17	26,31	23,90

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2020-2035 (BPS), 2023

Rincian data komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dari Tabel 2.298 di atas disajikan pada Grafik 2.105 berikut.

Grafik 2.105
Proyeksi Piramida Penduduk 2020-2035
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Ribuan Jiwa)



Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo 2020-2035 (BPS), 2023

Dari segi tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) hingga tahun 2035 terlihat persentasenya terus naik, yang menandakan beban usia produktif harus menanggung penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi semakin bertambah. Dengan *shifting* tersebut, beberapa dampak akan dihadapi oleh Kabupaten Gorontalo Utara di masa depan, seperti mengurangi pertumbuhan produktivitas/pertumbuhan ekonomi, juga jika bebannya

semakin tinggi dan tidak terkendali akan menyebabkan daerah sulit untuk maju karena turunnya komposisi usia produktif, dan sekaligus dapat meningkatkan tekanan terhadap pengentasan kemiskinan karena pendapatan keluarga yang ada tidak cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari alih-alih dibelanjakan untuk pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup. Dengan kombinasi meningkatnya angka ketergantungan dan turunnya rasio jenis kelamin, di masa depan pemerintah sangat perlu untuk mendorong produktivitas perempuan usia produktif meningkat, misalnya sedari dini memberikan insentif khusus pendidikan bagi siswa perempuan atau meningkatkan pembukaan lapangan pekerjaan bagi pemudi usia Gen Z atau Post Gen Z.

Pada angka kelahiran total (TFR) yang merupakan indikator penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program keluarga berencana (KB), menunjukkan arah yang semakin mendekati 2. Angka standar pencapaian ideal angka kelahiran total adalah 2,1; berarti dua orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya (*replacement level*). Capaian tersebut juga mengasumsikan atau menunjukkan *baby boom* yang diprediksi akan terjadi saat pandemi Covid19 tidak terbukti, yang justru terjadi penundaan kelahiran karena kekhawatiran terjadi resesi ekonomi pasca Covid-19. Yang menjadi kekhawatiran justru pada jangka sangat panjang terjadi resesi seks yang secara norma sosial dan agama mengarah ke negatif, belum lagi jika dibandingkan dengan efek negatif terhadap ekonomi.

Anak usia sekolah SD yang seharusnya secara rata-rata digambarkan oleh kelompok usia 7-12 tahun, karena tidak terdapat dalam kelompok proyeksi, digunakan kelompok usia 5-9 tahun. Data yang ditunjukkan pada tahun 2020 menunjukkan 5,22 ribu pada jenis kelamin laki-laki dan 5,09 ribu jiwa pada jenis kelamin perempuan. Pada tahun 2035 cakupan pada kelompok usia yang sama menjadi 6,72 pada jenis kelamin laki-laki dan 6,54 di jenis kelamin perempuan. Sedangkan pada usia SMP yang seharusnya digambarkan berusia rentang 13-15 tahun, digunakan rentang usia 10-14 tahun. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 rasio setiap jenis kelaminnya 6,02

ribuan jiwa : 5,66 ribuan jiwa, dan pada tahun 2035 rasionya menjadi 6,76 ribuan jiwa : 6,65 ribuan jiwa. Dua kelompok usia tersebut menunjukkan perkembangan jumlah populasi di tahun 2035 dibandingkan tahun 2020, sehingga di masa depan perlu diperhitungkan kembali ketersediaan tenaga pengajar serta rombongan belajar, atau bahkan ketersediaan sekolah.

Pada tahun 2023, tingkat kematian bayi (IFR) memang semakin berkurang yang menunjukkan perbaikan derajat kesehatan, seperti peningkatan kualitas layanan kesehatan awal, peningkatan tingkat imunisasi lengkap, atau peningkatan rata-rata lama pemberian ASI atau cakupan bayi bawah enam bulan yang mendapat ASI ekslusif yang membuat bayi semakin mampu bertahan hidup, namun masih tergolong tinggi. Upaya untuk mendorong penurunan IFR tidak jauh dari peningkatan tenaga kesehatan baik kualitas maupun kuantitas, khususnya di wilayah terpencil serta melengkapi fasilitas kesehatan baik pada tahap dasar maupun rujukan, perbaikan sistem layanan kesehatan, dan lain sebagainya.

2.6.1.3 Bonus Demografi

Bonus demografi adalah kondisi ketika masyarakat berusia produktif lebih banyak daripada masyarakat berusia non-produktif. Berdasarkan Tabel 2.298, Gorontalo Utara masih mengalami bonus demografi (tahap transisi sedang) hingga tahun 2034, karena pada tahun 2035, dilihat dari angka ketergantungan setiap 100 orang penduduk usia produktif telah menanggung 50 orang penduduk usia non-produktif.

Karena hanya terjadi satu kali sepanjang waktu, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara harus mampu memanfaatkan momentum yang ada sebelum mencapai tahun 2035 untuk akselerasi pembangunan. Bonus demografi yang masih terjadi hingga 2034 harus menjadi bonus ekonomi, syaratnya penduduk usia produktif terampil dan dapat terserap di dunia kerja, terdapat tabungan hari tua, serta ketersediaan dana untuk investasi. Berbagai alternatif kebijakan dapat dilakukan untuk optimalisasi bonus demografi, seperti mendorong budaya menabung dan berinvestasi, masyarakat memiliki usaha atau minimal *mindset* wirausaha, penyediaan lapangan kerja, atau edukasi ke masyarakat tentang sisi positif JHT mandiri dan BPJS tenaga kerja

mandiri. Selain itu, investasi dalam pendidikan dan kesehatan pun harus terus didorong untuk meningkatkan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas daya saing SDM, inklusivitas sektor ekonomi dan pengembangan SDM, dan produktivitas tenaga kerja.

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana suatu wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, dan tentu saja proses perencanaan pembangunan. Dalam prosesnya, setiap perencana mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana dan potensi kebutuhan tambahan jika diperlukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, proyeksi jumlah penduduk, dan pergerakan pertumbuhan penduduk, sebagai hal yang sangat berpengaruh.

Sarana prasarana dalam perencanaan pembangunan mencakup berbagai elemen: kelistrikan, perumahan dan permukiman, transportasi, sanitasi, air minum, kebutuhan rombongan belajar dan sekolah, fasilitas layanan kesehatan pertama dan rujukan, dan lain sebagainya. Dalam perencanaan pembangunan 20 tahun hingga 2045, peningkatan sarana prasarana merupakan keniscayaan karena bertambahnya populasi, potensi perkembangan wilayah, dan peningkatan ekonomi daerah. Ketersediaan sarana prasarana yang cukup dan baik akan menciptakan kondisi ideal dalam mendukung pertumbuhan wilayah, baik dari segi SDM maupun kenyamanan dalam menikmati hasil pembangunan.



Kebutuhan sarana prasarana dilihat dari: kebutuhan rumah, air bersih, listrik, sampah, sekolah/pendidikan, dan kesehatan.

A. Rumah/Tempat Tinggal dan Permukiman

Dalam mengembangkan perumahan dan permukiman, bukan hanya memenuhi ketersediaan dalam hal jumlah atau ada tidaknya, yang lebih penting dalam upaya menciptakan permukiman yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing adalah memenuhi kaidah keberlanjutan, meningkatkan

kualitas hidup masyarakat, pengelolaan sumber daya yang efisien, mendorong partisipasi masyarakat, adaptabilitas, dan implementasi yang baik. Dengan terpenuhinya berbagai kaidah di atas, berbagai hal positif bisa diperoleh yakni pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengelolaan sumber daya efisien, pertumbuhan yang terkendali, dan peningkatan nilai properti. Untuk optimalisasi desain kawasan permukiman, perlu ada *masterplan* perumahan yang hingga dokumen ini disusun belum tersedia, yang merinci tata ruang, infrastruktur, serta pengembangan wilayah perumahan dalam jangka panjang.

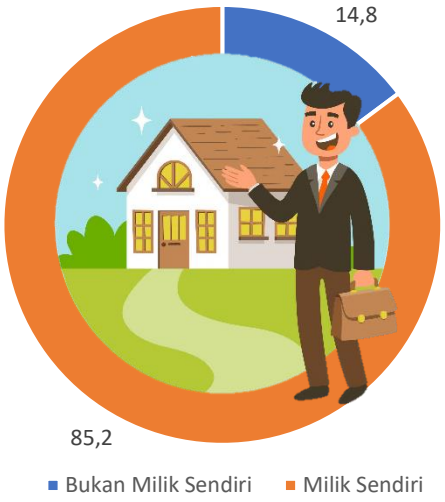
Saat tahun 2022 tersedia 29.224 unit rumah (sumber data aparat desa dalam KCDA 2023) dengan berbagai status kepemilikan dan kondisi fisik rumah. Sebagian besar kepemilikan rumah adalah milik sendiri, namun ternyata ditemukan fakta bahwa status kepemilikan tersebut justru didominasi oleh 40 persen kelompok pengeluaran terbawah dan dengan pendidikan sekolah dasar ke bawah.

Tabel 2.298
Rumah Tangga Menurut Karakteristik
Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2022

No.	Karakteristik	Status Kepemilikan Bangunan		Jumlah
		Sendiri	Bukan Milik Sendiri	
1	**Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga**			
	Laki-laki	86,25	13,75	100
	Perempuan	73,61	26,39	100
2	**Kelompok Pengeluaran**			
	40 persen terbawah	90,29	9,71	100
	40 persen menengah	81,74	18,26	100
	20 persen teratas	83,75	16,25	100
3	**Pendidikan Tertinggi Kepala Rumah Tangga**			
	SD ke bawah	92,76	7,24	100
	SMP ke atas	70,87	29,13	100

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara (BPS), 2023

Grafik 2.106
Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan
Bangunan Tempat Tinggal yang Ditempati Tahun 2023 (%)



Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara (BPS), 2023

Dengan mempertimbangkan proyeksi populasi penduduk di masa depan, dengan asumsi rata-rata terkecil 1 rumah dihuni oleh 5 orang (2 orang tua dan 3 anak) berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), maka kebutuhan perumahan digambarkan sesuai Tabel 2.300 berikut.

Tabel 2.300
Proyeksi Kebutuhan Perumahan 2025-2045

No.	Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Tahun-				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	128,56	134,85	144,73	153,71	161,50	167,88
2	Kebutuhan rumah (unit)	29.224	26.970	28.946	30.742	32.300	33.576

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

Berdasarkan data awal ketersediaan rumah tahun 2022 dengan kebutuhan rumah tahun 2030 yang justru masih surplus, perlu diperdalam lagi karena banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi munculnya data tahun 2022 yang demikian tinggi. Namun dengan fakta bahwa semakin tahun kebutuhan rumah semakin tinggi, sedangkan kapasitas masyarakat dalam membangun rumah masih rendah karena tingkat kemiskinan masih tinggi, kebijakan alternatif jangka pendek jika tidak dilakukan intervensi bantuan pembangunan perumahan, adalah dengan meningkatkan kualitas perumahan yang sudah ada pada kualitas sanitasi rumah, akses air bersih, dan lain sebagainya.

B. Ketersediaan Air Bersih

Ketersediaan akses air bersih bersama sanitasi merupakan syarat untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 karena berpengaruh terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia. Aspek ini merupakan indikator *sustainable development goals* (SDGs) sekaligus prioritas dalam penyediaan infrastruktur layanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2025-2045.

Namun penyediaan air bersih di Gorontalo Utara seringkali menghadapi tekanan dan mempengaruhi ketersediaan dan distribusinya:

- Perubahan iklim. Akibat pola hujan yang tidak stabil dapat menyebabkan kekeringan, dan perubahan suhu dapat memengaruhi sumber daya air alami. Gorontalo Utara memiliki iklim tropis yang mayoritas bulan yang dilalui dalam setahun bercuaca panas sehingga berpengaruh kepada curah hujan yang rendah.
- Pertambahan penduduk. Penduduk Gorontalo Utara terus tumbuh sekitar 1,5 persen per tahun yang mengakibatkan permintaan air bersih terus meningkat.
- Kerusakan lingkungan. Beberapa sumber mata air yang mengalir ke Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPA) berada di kawasan yang mulai mengalami tekanan degradasi lahan, sehingga perlu diupayakan pelestarian dan perlindungan kawasan tangkapan air.
- Polusi. Beberapa sumber air permukaan di Gorontalo Utara seperti sungai statusnya sudah cemar ringan bahkan ada yang sedang, sehingga beberapa sudah tidak bisa dipakai untuk keperluan sehari-hari.
- Kondisi hidrologi. Potensi air tanah yang rendah karena Gorontolo Utara bukan daerah cekungan air, sehingga membutuhkan rekayasa dan alternatif-alternatif teknologi dalam meningkatkan ketersediaan air tanah.
- Infrastruktur. Beberapa kecamatan belum terakses air bersih yang bersumber dari Perusahaan Daerah Air Minum (PUDAM), seperti Kecamatan Ponelo Kepulauan, Tomilito, dan Sumalata Timur, meskipun penduduknya telah mampu secara swadaya mengusahakan ketersediaan air bersih lewat sumber air permukaan lainnya. Selain itu, pompa dan pipa diperlukan untuk mengalirkan air ke rumah penduduk pada beberapa

kecamatan yang bahkan telah dimasuki jaringan PUDAM, sehingga beberapa daerah yang tidak memiliki infrastruktur tersebut sering terjadi krisis air. Pada beberapa lokasi terjadi kerusakan infrastruktur akibat bencana alam, dan rendahnya pemeliharaan infrastruktur jaringan air baku serta air bersih.

- Kemiskinan. Ketiadaan biaya menyebabkan beberapa penduduk tidak bisa membangun akses air bersih, dan memilih langsung memanfaatkan air sungai untuk keperluannya, sehingga berisiko terpapar bakteri dan bahan cemar lain yang berbahaya terhadap kesehatan.

Berdasarkan keterdapatan, air tawar di daratan digolongkan menjadi dua yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan merupakan air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa, atau badan air lain, yang tidak mengalami infiltrasi ke bawah tanah. Sedangkan air tanah merupakan air yang berada di bawah permukaan tanah. Ketersediaan air bagi makhluk hidup merupakan manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Selain itu air hujan juga dapat digunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri, maupun jasa. Jasa penyediaan air bersih oleh ekosistem sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan.

Jasa ekosistem penyediaan air dibagi menjadi lima kelas: Sangat Rendah, Rendah, Sedang, Tinggi, dan Sangat Tinggi. Wilayah dengan jasa ekosistem penyedia air tinggi menunjukkan bahwa ekosistem pada wilayah tersebut memiliki daya dukung atau kemampuan menyediakan air yang tinggi. Distribusi serta luas jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Gorontalo Utara disajikan pada Tabel 2.301.

Tabel 2.301
Distribusi dan Luas Kelas Jasa Penyediaan Air

No.	Tutupan Lahan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Total	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
1	Belukar rawa	-	0	146,25	0,09	56,43	0,03	-	0	-	0	202,68	0,12
2	Hutan lahan kering primer	-	0	-	0	25.799,96	15,01	-	0	-	0	25.799,96	15,01
3	Hutan lahan kering sekunder	-	0	26.551,77	15,45	25.173,31	14,65	-	0	-	0	51.725,08	30,10
4	Hutan mangrove primer	-	0	13,85	0,01	-	0	-	0	-	0	13,85	0,01

No.	Tutupan Lahan	Sangat Rendah		Rendah		Sedang		Tinggi		Sangat Tinggi		Total	
		Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
5	Hutan mangrove sekunder	336,68	0,20	2.367,03	1,38	-	0	-	0	-	0	2.703,71	1,57
6	Hutan tanaman	-	0	4.165,24	2,42	-	0	-	0	-	0	4.165,24	2,42
7	Pelabuhan udara/laut	-	0	3,28	0,01	-	0	-	0	-	0	3,28	0,01
8	Perkebunan	102,23	0,06	181,41	0,11	-	0	-	0	-	0	283,64	0,17
9	Permukiman	228,07	0,13	1.006,25	0,59	-	0	-	0	-	0	1.234,32	0,72
10	Pertanian lahan kering	-	0	7.302,24	4,25	4.353,70	2,53	-	0	-	0	11.655,94	6,78
11	Pertanian lahan kering campur semak	-	0	-	0	49.183,99	28,62	399,99	0,23	-	0	49.583,97	28,85
12	Sawah	-	0	1.915,08	1,11	896,73	0,52	-	0	-	0	2.811,82	1,64
13	Semak/belukar	-	0	10.062,53	5,86	10.369,99	6,03	-	0	-	0	20.432,52	11,89
14	Tambak	23,74	0,01	550,44	0,32	-	0	-	0	-	0	574,18	0,33
15	Tanah terbuka	6,10	0,01	384,39	0,22	-	0	-	0	-	0	390,49	0,23
16	Tubuh air	-	0	-	0	-	0	67,51	0,04	203,73	0,12	271,23	0,16
Total		**696,81**	**0,41**	**54.649,77**	**31,80**	**115.834,10**	**67,40**	**467,49**	**0,27**	**203,73**	**0,12**	**171.851,90**	**100**

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, 2024

Tabel 2.301 menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan air dididominasi oleh jasa ekosistem dengan kelas “Sedang” yaitu sebesar 67,40 persen dari total wilayah dengan fokus di jenis tutupan lahan pertanian lahan kering campur semak. Di lain sisi, lahan yang berpotensi “Tinggi” dan “Sangat Tinggi” dalam menyediakan air memiliki luasan yang sangat kecil yaitu masing-masing sebesar 0,27 persen dan 0,12 persen.

Hasil analisis status daya dukung air indikatif disajikan pada Tabel 2.302, yang dapat dilihat bahwa semua wilayah di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki status daya dukung air yang belum terlampaui, yang menunjukkan kebutuhan air belum melampaui ketersediaan air nya.

Tabel 2.302
Status Daya Dukung Air Indikatif

No.	Kecamatan	Ketersediaan Air (M^3/Tahun)	Kebutuhan Air untuk Lahan (M^3/Tahun)	Kebutuhan Air untuk Domestik (M^3/Tahun)	Kebutuhan Air Total (M^3/Tahun)	Selisih (M^3/Tahun)	Ambang Batas Penduduk (Jiwa)	Selisih Ambang Batas (Jiwa)	Keterangan
1	Anggrek	49.893.393	48.284.630	1.513.382	49.798.013	95.380	18.615	1.099	Belum terlampaui
2	Atinggola	82.133.482	36.354.517	1.048.810	37.403.327	44.730.156	529.876	517.737	Belum terlampaui
3	Biau	46.751.288	26.731.546	496.195	27.227.741	19.523.546	231.676	225.933	Belum terlampaui
4	Gentuma Raya	35.811.145	25.330.152	867.024	26.197.176	9.613.969	121.288	111.253	Belum terlampaui
5	Kwandang	65.016.527	52.429.706	2.516.486	54.946.192	10.070.335	145.645	116.519	Belum terlampaui
6	Monano	43.322.276	33.382.424	612.490	33.994.913	9.327.363	115.041	107.952	Belum terlampaui
7	Ponelo Kepulauan	5.327.906	2.195.856	362.362	2.558.218	2.769.688	36.255	32.061	Belum terlampaui
8	Sumalata	107.188.565	59.065.878	995.501	60.061.379	47.127.186	556.974	545.452	Belum terlampaui
9	Sumalata Timur	54.773.586	23.031.173	667.267	23.698.440	31.075.146	367.487	359.764	Belum terlampaui
10	Tolinggula	71.347.066	36.507.001	922.320	37.429.321	33.917.745	403.237	392.562	Belum terlampaui
11	Tomilito	35.726.606	34.666.199	845.165	35.511.364	215.242	12.206	2.424	Belum terlampaui
TOTAL		597.291.840	377.979.082	10.847.002	388.826.084	208.465.756	2.538.300	2.412.756	Belum terlampaui

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, 2024

Saat dokumen ini disusun tahun 2023, telah terdapat 10 lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) air permukaan dengan kapasitas produksi total

mencapai 120 liter/detik, serta beberapa sumber air permukaan lainnya yang diusahakan swadaya oleh masyarakat, sehingga jika dihitung dalam 1 hari, kapasitas air bersih yang diproduksi fasilitas IPA yang dikelola PUDAM yaitu:

1 hari = 24 jam = 1.440 menit = 86.400 detik

86.400 x 120 liter = 10.368.000 liter/hari

Dengan kapasitas produksi tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi hampir 170 ribu penduduk Gorontalo Utara di tahun 2045. Sebagai informasi, standar konsumsi air berdasarkan SNI yang direkomendasikan pada objek penggunaan gedung/bangunan yang tersedia di Gorontalo Utara pada Tabel 2.303 berikut.

Tabel 2.303
Standar Kebutuhan Air Bersih Per Hari

No.	Penggunaan Gedung	Kebutuhan Air	Satuan
1	Rumah tinggal	120	Liter/penghuni/hari
2	Rumah susun	100	Liter/penghuni/hari
3	Asrama	120	Liter/penghuni/hari
4	Rumah sakit	500	Liter/tempat tidur pasien/hari
5	Sekolah dasar	40	Liter/siswa/hari
6	SLTP	50	Liter/siswa/hari
7	SMU	80	Liter/siswa/hari
8	Ruko	100	Liter/penghuni/hari
9	Kantor/pabrik	50	Liter/pegawai/hari
10	Toserba	5	Liter/M^2
11	Restoran	15	Liter/kursi
12	Hotel berbintang	250	Liter/tempat tidur/hari
13	Hotel penginapan	150	Liter/tempat tidur/hari
14	Gedung pertunjukan	10	Liter/kursi
15	Gedung serbaguna	25	Liter/kursi
16	Stasiun/terminal	3	Liter/penumpang

Sumber: Puslitbang Permukiman Dep. Kimpraswil, 2000 dan Permenkes RI Nomor 986 Tahun 1992

Sedangkan sebagai informasi pembanding dengan asumsi yang lebih simpel, kebutuhan air bersih menurut UNESCO di wilayah perdesaan mencapai 60 Liter per kapita setiap harinya, dan di wilayah kota kecil 90 Liter per kapita setiap harinya. Dengan diasumsikan wilayah Kecamatan Kwandang sebagai kota kecil (dengan komposisi penduduk 23 persen dari total penduduk) dan kecamatan lainnya sebagai perdesaan sebagaimana Peraturan Kepala BPS Nomor 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia 2020, didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.304
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih 2025-2045

No.	Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Tahun-				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	128,56	134,85	144,73	153,71	161,5	167,88
2	Jumlah penduduk perkotaan (ribu jiwa)	29,56	31,02	33,29	35,35	37,15	38,61
3	Jumlah penduduk perdesaan (ribu jiwa)	99,00	103,83	111,44	118,36	124,36	129,27
4	Produksi air/hari (Liter)	10.368.000	10.368.000	10.368.000	10.368.000	10.368.000	10.368.000
5	Kebutuhan air perkotaan (Liter/hari)	2.660.400	2.791.395	2.995.911	3.181.797	3.343.050	3.475.116
6	Kebutuhan air perdesaan (Liter/hari)	5.940.000	6.230.070	6.686.526	7.101.402	7.461.300	7.756.056
7	Kebutuhan air total (Liter/hari)	8.600.400	9.021.465	9.682.437	10.283.199	10.804.350	11.231.172

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

Dengan perhitungan kasar di atas, diperkirakan infrastruktur air permukaan IPA yang hanya dimiliki PUDAM sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat pada rentang tahun 2035-2040. Dengan demikian, sebelum masuk tahun 2035 diharapkan sudah ada penambahan infrastruktur IPA baru, atau peningkatan kapasitas produksi air di masing-masing IPA dengan minimal penambahan kapasitas hingga 20 Liter/detik. Namun ada beberapa catatan terkait perhitungan di atas:

- Standar kebutuhan air bersih wilayah perdesaan/perkotaan oleh UNESCO merupakan standar global. Ketika standar global dibawa ke standar Gorontalo Utara maka hasilnya akan *overvalued*/terlalu besar.
- Selain IPA yang dikelola PUDAM, masih banyak sumber air permukaan lain yang dimanfaatkan masyarakat. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2023 oleh BPS, justru pemanfaatan sumber air bersih dari PUDAM hanya berkisar 25 persen, sumber lainnya: sumur bor 23,17 persen; sumur terlindung/tak terlindung 35,79 persen; mata air terlindung/tak terlindung 12,33 persen; dan lainnya 1,99 persen.
- Kapasitas IPA sering tidak mencapai kapasitas optimalnya, karena debit air dari sumber air berkurang terutama pada bulan-bulan kering.
- Klasifikasi wilayah masuk perkotaan/perdesaan sesuai Peraturan Kepala (Perka) BPS Nomor 120 Tahun 2020 menggunakan pendekatan penggolongan rata-rata status desa per kecamatan dan proyeksi perkembangan wilayah ke depan. Misalnya, dalam Perka BPS tersebut dari

29 desa di Kecamatan Kwandang, hanya 8 desa yang tergolong perkotaan, sisanya perdesaan. Namun mempertimbangkan kemungkinan ke depan Kwandang akan terus berkembang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi sehingga digolongkan sebagai perkotaan. Sedangkan Kecamatan Anggrek yang dalam Perka tersebut hanya 1 desa tergolong perkotaan dari 25 desa, karena secara rata-rata masih termasuk perdesaan, diproyeksikan beberapa tahun ke depan masih termasuk perdesaan.

Sedikit berbeda berdasarkan hasil perhitungan kebutuhan air minum Kabupaten Gorontalo Utara dalam dokumen RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 yang dihitung oleh tim penyusun KLHS Provinsi Gorontalo 2025-2045, hingga tahun 2045 ketersediaan air minum masih “Surplus”.

Tabel 2.305
Analisis Kebutuhan Air Minum Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo

No.	Kabupaten/ Kota	Ketersediaan (M^3)	Proyeksi Tahun- (M^3)					Status
			2025	2030	2035	2040	2045	
1	Boalemo	1.113.975.694	264.884.800	279.696.000	295.334.400	311.848.000	329.284.800	Lebih
2	Gorontalo	1.223.737.157	649.112.000	678.713.600	709.665.600	724.030.400	775.870.400	Lebih
3	Pohuwato	1.343.057.524	259.630.400	274.145.600	289.473.600	305.657.600	322.745.600	Lebih
4	Bonebolango	1.185.912.044	278.859.200	297.339.200	317.043.200	338.052.800	360.454.400	Lebih
5	Gorontalo Utara	2.607.144.422	210.028.800	228.336.000	248.238.400	269.876.800	293.400.000	Lebih
6	Kota Gorontalo	42.734.226	347.203.200	361.256.000	375.876.800	391.091.200	406.921.600	Kurang
Provinsi Gorontalo		**7.516.561.067**	**2.009.547.200**	**2.118.769.600**	**2.233.929.600**	**2.355.350.400**	**2.483.368.000**	**Lebih**

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045, 2024

Dalam meningkatkan ketersediaan air bersih di Gorontalo Utara perlu tindakan konkret dan kolaboratif dari berbagai pihak:

- Pelestarian sumber daya air. Hutan, sungai, dan sumber air permukaan lainnya adalah komponen penting siklus air, sehingga harus dijaga ekosistemnya dari kerusakan.
- Pengelolaan limbah yang bijak. Pengelolaan limbah rumah tangga penting untuk tidak langsung membuang limbah ke sumber air permukaan, serta industri harus mematuhi standar lingkungan yang ketat.
- Investasi dalam infrastruktur. Pemerintah daerah maupun pihak terkait seperti Balai Wilayah Sungai II Gorontalo penting untuk berinvestasi dalam infrastruktur untuk distribusi air, seperti sumur, pipa air bersih, atau instalasi pengolahan air.
- Solusi inovatif. Konsep *green economy* harus sudah diterapkan. Di masa depan, bukan tidak mungkin penggunaan teknologi ramah lingkungan

untuk menghasilkan air bersih diterapkan di Gorontalo Utara, seperti mesin desalinasi yang merubah air laut menjadi *drinkable*.

- Edukasi masyarakat. Masyarakat harus terus diberikan edukasi tentang pentingnya menghemat penggunaan air dan praktik-praktik yang berkelanjutan, seperti memperbaiki keran air yang bocor atau praktik pertanian ramah lingkungan yang memperkecil *carbon footprint*.
- Kolaborasi antar pihak. Kolaborasi sangat penting, karena dapat mengatasi tantangan yang dihadapi bersama dan menciptakan peluang investasi dan proyek penyediaan air bersih.
- Pengawasan dan pengaturan. Pemerintah harus memanfaatkan kedudukannya sebagai institusi pengatur masyarakat dalam hal pemanfaatan air, seperti penggunaan pajak pada penggunaan air berlebih, atau penerapan aturan ketat terhadap aktivitas yang berpotensi mengurangi kualitas lingkungan.

C. Ketersediaan Energi/Listrik

Energi adalah penggerak utama kehidupan. Akses terhadap energi akan memberikan keuntungan yang bukan hanya bermanfaat, juga memiliki nilai ekonomi tinggi dan memberikan *multiplier effect* yang luar biasa. Hingga saat ini, beberapa daerah masih menghadapi tantangan yang kompleks terkait akses energi, terutama energi listrik. Pemenuhan kebutuhan energi listrik berkaitan erat dengan prioritas nasional dalam era industri 4.0 atau *Making Indonesia* 4.0. Di sisi lain, ketersediaan energi listrik juga berkaitan erat dengan penerapan kebijakan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN). Tidak hanya mendukung daya saing industri dan menarik minat investasi, penyediaan energi listrik juga mendorong tumbuhnya industri komponen ketenagalistrikan di dalam negeri, hingga membuka lebih banyak lapangan kerja.

Ketersediaan energi listrik di Gorontalo Utara, dan wilayah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara pada umumnya, telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sejak beroperasinya pembangkit listrik bertenaga batubara di Kecamatan Tomilito dan Anggrek dengan masing-masing kemampuan produksi 2x50 dan 2x25 MW. Hingga akhir tahun 2022, rasio

elektrifikasi di Gorontalo Utara yang digambarkan oleh jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik telah mencapai 99,38 persen. Namun tingkat konsumsinya masih dibawah yang ditargetkan sehingga masih menghasilkan energi yang susut hampir 4.000.000 KwH pada tahun 2022.

1.637 KwH

Pemakaian rata-rata/pelanggan/tahun



Produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit yang ada di Gorontalo didistribusikan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di Gorontalo Utara atau Provinsi Gorontalo saja, namun juga untuk didistribusikan ke wilayah Sulawesi Utara, bahkan dalam waktu dekat juga ke wilayah Sulawesi Tengah dan Selatan. Dengan kondisi demikian, saat ini wilayah Gorontalo Utara mendapatkan jatah listrik sekitar 57 juta KwH per tahun, dan diasumsikan pada angka yang sama untuk kepentingan proyeksi di tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2045. Berdasarkan data konsumsi listrik yang terjual saat ini, dibandingkan dengan jumlah pelanggan, konsumsi listrik rata-rata per pelanggan per tahun yaitu:

Listrik terjual tahun 2022: 53.987.645 KwH

Jumlah pelanggan tahun 2022: 32.973 pelanggan

Konsumsi rata-rata per pelanggan per tahun: $\frac{53.987.645\ \text{KwH}}{32.973\ \text{pelanggan}}$ = 1.637,33 KwH

Angka yang dihasilkan dari perhitungan di atas menunjukkan konsumsi listrik per pelanggan di Gorontalo Utara ternyata lebih tinggi dibandingkan rata-rata perkapita nasional tahun 2022 yang hanya sebesar 1.173 KwH/kapita. Jika dibandingkan jumlah penduduk, dengan menggunakan metode di atas didapatkan konsumsi perkapita mencapai 419 KwH. Sedangkan berdasarkan Survey Sosial Ekonomi BPS, konsumsi listrik per kapita Gorontalo Utara mencapai masing-masing 59,54 dan 36,38 Kwh/kapita pada tahun 2022 dan 2023, yang menunjukkan bahwa konsumsi masih perlu digenjot agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Jika membandingkan antara proyeksi jumlah rumah tahun 2022 dengan jumlah pelanggan listrik, terdapat gap sekitar 3.700 rumah atau pelanggan, setara dengan selisih sekitar 12,83 persen. Selisih tersebut mungkin disebabkan bahwa tidak semua pelanggan listrik adalah rumah tinggal, melainkan dari pelanggan sosial, industri, bisnis, traksi, atau publik. Dengan demikian, setiap proyeksi jumlah pelanggan pada kelompok 5 tahunan akan dikalikan 12,83 persen dari hasil proyeksi ketersediaan rumah tinggal.

Tabel 2.306
Proyeksi Kebutuhan Listrik 2025-2045

No.	Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Tahun-				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	128,56	134,85	144,73	153,71	161,50	167,88
2	Distribusi listrik (KwH)	57.359.259	57.359.259	57.359.259	57.359.259	57.359.259	57.359.259
3	Proyeksi ketersediaan rumah tinggal (unit)	29.224	26.970	28.946	30.742	32.300	33.576
4	Jumlah pelanggan setelah diperhitungkan penggunaan non residensial (unit)	32.973	30.430	32.660	34.686	36.444	37.884
5	Proyeksi konsumsi listrik (KwH)	53.988.364	49.824.329	53.474.787	56.792.715	59.670.961	62.028.241

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

Sesuai proyeksi pada Tabel 2.306, konsumsi listrik akan melebihi produksi listrik pada rentang tahun 2035-2040, dan akan terjadi defisit sekitar 2,3 juta KwH di tahun 2040, sehingga perlu ada alternatif sumber pembangkit lain, atau peningkatan kapasitas produksi dari pembangkit yang sudah ada sebelum tahun 2035.

Namun perlu dicatat, listrik yang dihasilkan oleh PLTU Tomilito dan Anggrek adalah pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi dari fosil yang tidak terbarukan, yaitu batubara. Dengan semakin nyatanya dampak perubahan iklim, sangat diharapkan penyediaan energi listrik tidak ikut memperburuk perubahan iklim. Dengan perhitungan bahwa Gorontalo Utara akan mengalami defisit listrik di masa depan, justru menjadi *blessing in disguise* perlunya transisi dan transformasi penyediaan energi yang lebih hijau demi pencapaian *Carbon Neutral* 2060. Dalam jangka pendek, implementasi teknologi *co-firing* yang menggunakan biomassa sebagai bahan pembangkit

listrik dapat menjadi salah satu solusi, namun karena jumlahnya terbatas, di masa depan perlu menggunakan sumber energi lainnya yang lebih terjamin kontinuitasnya. Opsi yang muncul adalah pembangkitan energi yang berasal dari energi terbarukan yang sudah tersedia, bahkan *abundant* di Gorontalo Utara, seperti tenaga panas matahari, air, atau angin. Pembangkit listrik bertenaga panas matahari direncanakan dibangun di seluruh kecamatan di masa depan, sedangkan yang bersumber dari tenaga kinetik air permukaan/*surface water* (PLTMH) direncanakan di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Sumalata, dan Tolinggula.

Terdapat beberapa catatan mengenai perhitungan proyeksi konsumsi listrik di atas:

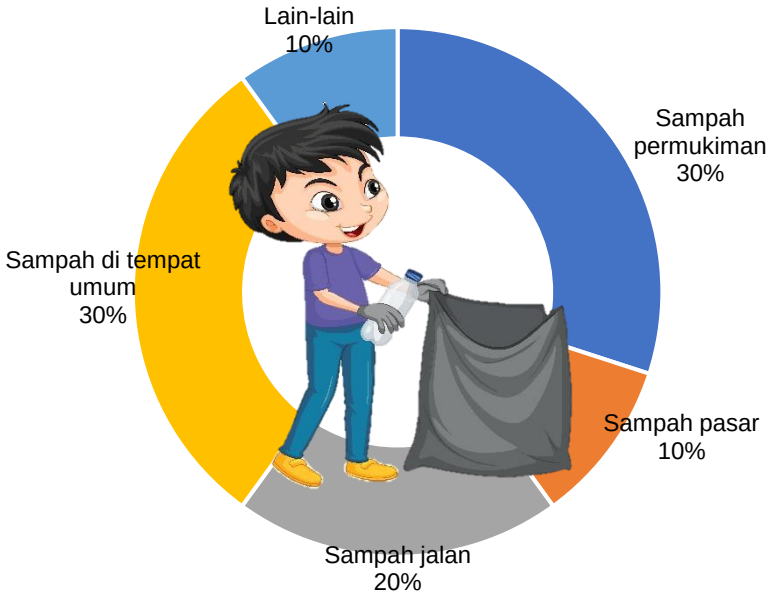
- Distribusi listrik pada asumsi perhitungan di atas adalah angka distribusi yang belum memperhitungkan distribusi listrik ke wilayah Sulawesi Tengah dan Selatan karena kebutuhan industri yang semakin tinggi.
- Konsumsi listrik di atas belum memperhitungkan efek pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif biasanya sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik, sehingga jika diperhitungkan, bisa jadi defisit listrik lebih cepat terjadi.
- Konsumsi listrik beberapa masyarakat Gorontalo Utara tidak hanya mengandalkan sumber energi yang berasal dari PLN. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional oleh BPS, ada sekitar 2,76 persen rumah tangga yang mengandalkan sumber listrik non-PLN.
- Faktor pengali pelanggan hanya 12,83 persen, pada kenyataannya pertumbuhan pelanggan bisa lebih tinggi sehingga defisit listrik bisa datang lebih cepat.

D. Pengelolaan Persampahan

Masalah persampahan merupakan isu lingkungan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat ekonomi suatu wilayah. Pertambahan populasi yang diikuti perubahan pola konsumsi dan gaya hidup telah meningkatkan kapasitas sampah dengan keberagaman jenis di lingkungan. Peningkatan konsumsi penduduk untuk melengkapi kebutuhan pokok dan kegiatan penunjang pertumbuhan ekonomi juga ikut berkontribusi terhadap

kualitas dan kuantitas sampah yang dihasilkan, yang menyebabkan masalah baru seperti polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, dan lain sebagainya. Beberapa penelitian menunjukkan sampah hasil rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar selain lokasi umum serta kegiatan ekonomi yang lain.

Grafik 2.107
Sumber Timbulan Sampah (%)



Sumber: Analisa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara, 2023

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 19-3983-1995, membagi besaran timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah dan klasifikasi kota. Jika dilihat dari kriteria klasifikasi kota, jumlah penduduk Gorontalo Utara termasuk pada “Kota kecil” (dengan pertimbangan skup ekonomi yang masih kecil, tidak dimasukkan ke kategori kota sedang meski secara jumlah di atas 100.000 jiwa). Klasifikasi yang masuk “Kota kecil” menggunakan asumsi volume sampah sebesar 2,5-2,75 Liter/orang/hari, dan berat sampah 0,625-0,700 Kilogram/orang/hari.

Jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 128,97 ribu jiwa, dengan kondisi tersebut diperkirakan volume sampah Gorontalo Utara mencapai 117.685,12 M^3/tahun dengan jumlah timbulan sampah tahun 2023 diperkirakan sebesar 51,58 Ton/hari. Kecamatan Kwandang diperkirakan sebagai kecamatan

dengan produksi sampah terbesar karena berperan sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan, sekaligus jumlah penduduk terbesar.

Tabel 2.307
Perkiraan Timbulan Sampah Per Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah			
			Volume (M^3/Hari)	Berat (Ton/Hari)	Volume (M^3/Tahun)	Berat (Ton/Tahun)
1	Atinggola	12.476	31,19	4,99	11,38	1.821,49
2	Gentuma Raya	10.374	25,94	4,15	9,46	1.514,60
3	Kwandang	29.500	73,75	11,8	26,92	4.307,00
4	Tomilito	10.059	25,15	4,02	9,18	1.468,61
5	Ponelo Kepulauan	4.205	10,51	1,68	3,83	613,93
6	Anggrek	17.665	44,16	7,06	16,11	2.579,09
7	Monano	7.631	19,08	3,05	6,96	1.114,12
8	Sumalata	11..843	29,61	4,73	10,80	1.729,07
9	Sumalata Timur	8.081	20,20	3,23	7,37	1.179,82
10	Tolinggula	11.203	28,01	4,48	10,22	1.635,63
11	Biau	5.933	14,83	2,37	5,41	866,21
Total		**128.970**	**322,43**	**51,58**	**117,68**	**18.829,62**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo Utara, 2024 (diolah)

Perhitungan di atas didapatkan dengan menggunakan persamaan:

$$Volume\ Sampah = jumlah\ penduduk\ x\ penghasil\ sampah\ kota\ kecil\ (\frac{Liter}{orang\ hari})$$

$$Berat\ Sampah = jumlah\ penduduk\ x\ penghasil\ sampah\ kota\ kecil\ (\frac{Kilogram}{orang\ hari})$$

Dalam menangani masalah persampahan, Pemerintah Daerah baru memiliki satu Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di bagian timur daerah Kecamatan Tomilito berjenis *sanitary landfill*, meskipun belum optimal penerapannya yang beroperasi sejak tahun 2017.

Berdasarkan proyeksi timbulan sampah dan jumlah penduduk di masa depan, Kabupaten Gorontalo Utara masih termasuk di kriteria “Kota kecil” sehingga diproyeksikan produksi sampah sebagaimana Tabel 2.308 berikut.

Tabel 2.308
Proyeksi Timbulan Sampah Tahun 2025-2045

No.	Uraian	Kondisi 2023	Proyeksi Tahun-				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	128,97	134,85	144,73	153,71	161,50	167,88
2	Volume timbulan sampah tahunan (M^3/tahun)	117.685,12	123.050,63	132.066,13	140.260,38	147.368,75	153.190,50
3	Berat timbulan sampah tahunan (Ton/tahun)	18.829,62	30.762,66	33.016,53	35.065,09	36.842,19	38.297,63

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

Sedikit berbeda dengan hasil perhitungan dalam KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 yang lebih moderat dalam memproyeksikan timbulan sampah Gorontalo Utara dengan data sebagaimana Tabel 2.309 berikut.

Tabel 2.309
Timbulan Sampah Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Tahun-					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Boalemo	391.965	413.882	437.024	461.460	487.262	514.508
Gorontalo	970.000	1.014.236	1.060.490	1.108.853	1.159.442	1.212.297
Pohuwato	384.193	405.672	428.353	452.302	477.590	504.291
Bonebolango	408.638	435.717	464.591	495.379	528.207	563.210
Gorontalo Utara	301.858	328.169	356.774	387.872	421.681	458.438
Kota Gorontalo	521.400	542.504	564.462	587.309	611.080	635.814
Provinsi Gorontalo	2.978.053	3.139.917	3.310.578	3.490.516	3.680.234	3.880.263

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Armada pengangkutan sampah saat ini minim, yang dapat beroperasi hanya dua *dumptruck*, *arm-roll truck* satu unit, dan gerobak motor delapan unit (meski beberapa unit masih dalam perbaikan) sehingga pengangkutan menuju TPA Tomilito sangat rendah penanganannya, dengan hanya sekitar 4.553 Meter^3/tahun sampah yang dihasilkan masyarakat dapat dibawa, setara dengan 3-4 persen produksi sampah.

Untuk menghitung proyeksi beban TPA di masa depan, dibutuhkan informasi mengenai kapasitas daya tampung TPA yang sudah ada saat ini, yang meliputi luas lahan untuk pemrosesan, tinggi timbunan rencana, umur rencana, serta faktor padat. Luas lahan untuk pengolahan TPA mencapai 0,56 Hektar atau seluas 5.600 Meter^2, dengan umur rencana 10 tahun, faktor padat 0,3 Ton/Meter^3, dan tinggi rencana mencapai 5 Meter. Dengan informasi demikian, kapasitas daya tampung TPA Molantadu:

$$Kapasitas\ daya\ tampung = luas\ TPA\ x\ tinggi\ rencana$$
$$= 560\ Meter^2\ x\ 5\ Meter$$
$$= 2.800\ Meter^3$$

Sehingga, kapasitasnya mencapai: 2.800 Meter^3.

Prediksi jumlah sampah yang sudah berada di TPA Molantadu Tomilito selama 2017 hingga proyeksi di tahun 2045, dengan asumsi 3-4 persen sampah yang tertangani sebagaimana Tabel 2.310.

Tabel 2.310
Proyeksi Kubikasi Kumulatif Sampah TPA Molantadu Tahun 2017-2045

No.	Uraian	Tahun 2017-2023	Proyeksi Tahun-				
			2024-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040	2041-2045
1	Volume kumulatif sampah di TPA Molantadu (Meter^3)	28.000	36.181	57.731	80.947	105.958	132.901
Akumulasi timbulan sampah yang ditangani 2017-2045 (Meter^3)							1.759.606

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

Perhitungan daya tampung TPA 2017-2045 $= \frac{\sum sampah\ tahun\ 2017-2045}{faktor\ padat}$

$= \frac{1.759.606}{0,3}$

$= 5.865.353$ Meter^3

Tinggi timbulan sampah TPA Molantadu $= \frac{daya\ tampung\ 2017-2045}{luas\ lahan\ pengolahan\ TPA}$

$= \frac{5.865.353}{2.800}$

$= 2.094,76$ Meter

Berdasarkan perhitungan, TPA Molantadu mengalami *overload* dan tidak mampu melayani tampungan sampah. Pengangkutan dan pengolahan sampah masih berpusat di Kecamatan Kwandang sebagai Ibukota Kabupaten, lima titik layanan berada di Kecamatan Anggrek, dua titik layanan di Kecamatan Tomilito, dan layanan *mobile* ke kecamatan lainnya meski dengan jadwal yang tidak tentu.

Dengan geografis daerah yang memanjang (tidak melingkar), daya jangkau armada yang terbatas karena jauhnya rentang layanan, serta daya tampung kawasan TPA yang semakin berkurang, opsi untuk menambah lokasi TPA bisa menjadi salah satu opsi yang relevan bisa direalisasikan di masa depan. Selain itu, dari enam TPST/TPS3R yang awalnya beroperasi, saat ini hanya tersisa satu unit, karena *revenue* yang dianggap kurang menarik serta tidak ada *vendor* yang mengolah hasil lanjutannya. Alternatif lainnya, bisa melalui operasionalisasi Stasiun Peralihan Antara (SPA) untuk mengurangi rentang jarak layanan dengan rasio 1 SPA: 3 kecamatan, sehingga dibutuhkan 3 hingga 4 SPA. Terlepas dari segala tantangan yang dihadapi, dengan

memperhitungkan daya dukung, serta potensi cakupan dan jangkauan layanan, Desa Molingkapoto Selatan dan Desa Bulalo menjadi kandidat lokasi pembangunan TPST/TPS3R di masa depan.

E. Sarana Prasarana Kesehatan

Hal yang harus diperhatikan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain ketersediaan SDM kesehatan, adalah dimulai dengan membangun sarana dan prasarananya. Titik berat dari ketersediaan sarana prasarana kesehatan adalah pembangunan fisik dan penyediaan sarana dan prasarana Puskesmas, layanan rujukan, hingga instalasi farmasi. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin tinggi kebutuhan layanan kesehatan. Terlebih beberapa tahun lagi Gorontalo Utara akan mulai memasuki *ageing population*, sehingga ketersedaan sarana kesehatan dan layanan paripurna menjadi keharusan.

Tidak hanya sisi jumlah, dari sisi pemerataan dan aksesibilitas sarana dan prasarana kesehatan pun setara pentingnya, termasuk dalam hal kualitas layanan dan pemenuhan SDM kesehatan. Berdasarkan standar *World Health Organization*/Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), meskipun tidak memiliki aturan mengenai rasio ideal, merekomendasikan *bed to population ratio* sebesar 1:1.000, atau 1 tempat tidur perawatan di rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Tahun 2023, di RS ZUS tersedia 123 tempat tidur, sedangkan di RS TM terdapat 40 tempat tidur, sehingga total ketersediaan tempat tidur sejumlah 163 unit, yang berarti rasionya sebesar 1,27 per 1.000 penduduk yang telah memenuhi standar WHO, saat rata-rata rasio di Provinsi Gorontalo sebesar 1,9 serta rata-rata nasional di 1,4 per 1.000 penduduk. Sedangkan dari sisi jumlah rumah sakit, dengan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045, dianggap lokasi dan jumlah rumah sakit yang tersedia saat ini masih bisa melayani. Dengan kondisi demikian, hingga 2045, layanan rumah sakit akan berfokus pada pemenuhan jumlah kebutuhan tempat tidur, tenaga medis, serta alat-alat kesehatan sehingga tipe rumah sakit yang ada dapat meningkat minimal kelas “B”, serta predikat akreditasi “Paripurna”.

Sedangkan pada ketersediaan Puskesmas, setiap kecamatan saat ini sudah tersedia, dan rasio yang terbentuk saat ini 1,36:1 kecamatan, sama dengan

rasio Puskesmas per kecamatan nasional. Dengan tidak adanya rencana untuk perubahan jumlah kecamatan hingga 2045 nanti, diyakini rasio ini akan stagnan hingga 2045. Bila dibandingkan dengan standar jumlah penduduk, rasio yang terbentuk sebesar 3,5 Puskesmas per 30.000 penduduk yang masih berada jauh di atas rata-rata nasional. Sedangkan pada tahun 2045 diproyeksikan rasionya menjadi 2,68 Puskesmas per 30.000 penduduk atau 1 Puskesmas melayani sekitar 11.194 jiwa penduduk. Jumlah tersebut masih masuk dalam kapasitas layan Puskesmas sehingga jika mempertimbangkan jumlah penduduk belum dibutuhkan penambahan Puskesmas lagi hingga 2045. Fokus Pemerintah Daerah terhadap kualitas layanan Puskesmas yakni pemenuhan layanan dasar, seperti rawat jalan tingkat pertama, rawat inap tingkat pertama, serta pemenuhan tenaga medis, terutama dokter umum di setiap kecamatan.

Sedangkan pada ketersediaan Puskesmas Pembantu (Pustu), saat ini terdapat 26 Pustu yang beroperasi, sehingga rasionya dibandingkan jumlah penduduk mencapai 2,02 per 10.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk pada tahun 2045 yang diproyeksikan mencapai 167,88 ribu jiwa, rasionya menjadi 1,54 Pustu per 10.000 penduduk atau 1 Pustu melayani 6.493 jiwa. Dengan rasio demikian, jumlah Pustu yang ada masih memungkinkan melayani penduduk yang ada. Fokus Pemerintah Daerah adalah mengupayakan kualitas bangunan Pustu terjaga serta tenaga medis yang terdiri dari perawat dan bidan masing-masing satu orang tersedia di setiap Pustu.

Dari analisis kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dibandingkan proyeksi populasi hingga tahun 2045, didapatkan gambaran kebutuhan fasilitas layanan kesehatan berupa tempat tidur bagi pasien rawat inap di rumah sakit.

Tabel 2.311
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di RS ZUS dan RS TM

No.	Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Tahun-				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	128,56	134,85	144,73	153,71	161,50	167,88
2	Rasio ideal tempat tidur RS per 1.000 penduduk	1:1.000	1:1.000	1:1.000	1:1.000	1:1.000	1:1.000
3	Target rasio tempat tidur RS per 1.000 penduduk (disamakan dengan rasio nasional saat ini)	1,27:1.000	1,3:1.000	1,4:1.000	1,4:1.000	1,4:1.000	1,4:1.000
4	Jumlah tempat tidur rumah sakit setelah dipertimbangkan target dan populasi penduduk (unit)	163	175	202	215	226	235

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

Dari sisi pemenuhan tenaga kesehatan, meskipun tidak termasuk pada bagian sarana prasarana, merupakan bagian integral untuk mencapai pelayanan kesehatan yang paripurna. Berdasarkan data Urusan Kesehatan yang dibahas pada bagian lain dari Bab II ini, rasio tenaga kesehatan pada tahun 2022 sebagaimana Tabel 2.312 berikut.

Tabel 2.312
Tenaga Medis dan Paramedis per Satuan Penduduk Tahun 2022

No.	Indikator	Jumlah	Rasio:100.000
1	Jumlah penduduk	128.560 (tahun 2022)	
2	Dokter (spesialis + umum)	42	32,66
3	Dokter gigi	5	3,88
4	Bidan	248	192,90
5	Perawat	310	241,13

Sumber: Dinas Kesehatan dan RS ZUS, 2024

Guna memenuhi standar kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan Kementerian Kesehatan RI yang dimuat dalam dokumen Target Rasio Tenaga Kesehatan disusun tahun 2022, diperoleh standar ideal rekomendasi tenaga kesehatan sebagai berikut:

- Rasio tenaga dokter 1 per 1.000 penduduk
- Rasio tenaga dokter gigi 0,2 per 1.000 penduduk
- Rasio tenaga perawat 2,4 per 1.000 penduduk
- Rasio tenaga bidan 2 per 1.000 penduduk

Tabel 2.313
Proyeksi Kebutuhan Tenaga Kesehatan

No.	Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Tahun-				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	128,56	134,85	144,73	153,71	161,50	167,88
2	Target rasio tenaga dokter		1:1.000	1:1.000	1:1.000	1:1.000	1:1.000
3	Jumlah ideal dokter (umum dan spesialis) mempertimbangkan target rasio dan jumlah penduduk		135	145	154	162	168
4	Target rasio tenaga dokter gigi		0,2:1.000	0,2:1.000	0,2:1.000	0,2:1.000	0,2:1.000
5	Jumlah ideal dokter gigi mempertimbangkan target rasio dan jumlah penduduk		27	29	31	32	34
6	Target rasio tenaga perawat		2,4:1.000	2,4:1.000	2,4:1.000	2,4:1.000	2,4:1.000
7	Jumlah ideal perawat mempertimbangkan target rasio dan jumlah penduduk		324	347	369	388	403
8	Target rasio tenaga bidan		2:1.000	2:1.000	2:1.000	2:1.000	2:1.000
9	Jumlah ideal bidan mempertimbangkan target rasio dan jumlah penduduk		270	290	307	323	336

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

F. Sarana Prasarana Pendidikan

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satunya diwujudkan melalui investasi dalam pendidikan melalui pembenahan sarana dan prasarananya. Dengan pemerataan, peningkatan kualitas, serta didukung dengan aksesibilitas pendidikan yang memadai merupakan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pelatihan. Keberhasilan pendidikan tidak saja meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, juga mendorong peningkatan daya saing serta peradaban dan kemajuan suatu bangsa.

Infrastruktur pendidikan dalam ruang lingkup wewenang pemerintah kabupaten sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yakni pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan kesetaraan. Yang termasuk dalam pendidikan dasar yaitu jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Pada tahun ajaran 2022/2023, jumlah sekolah setiap jenjang berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang masuk dalam wewenang Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara serta perbandingan dengan sekolah yang masuk pada wewenang Kementerian Agama, yaitu:

- Sekolah dasar: 135 sekolah
- Madrasah ibtidaiyah: 13 sekolah
- Sekolah menengah pertama: 46 sekolah
- Madrasah tsanawiyah: 8 sekolah
- Pendidikan kesetaraan: 9 sekolah

Untuk menilai kecukupan sekolah setiap jenjang dibandingkan jumlah penduduk, harus dilihat dari proyeksi populasi anak usia sekolah setiap jenjang hingga 2045. Berdasarkan piramida penduduk yang dijabarkan pada bagian lain dari Bab II ini, tidak secara tepat menggambarkan komposisi penduduk usia sekolah setiap jenjang. Usia sekolah SD yang seharusnya secara rata-rata digambarkan oleh kelompok usia 7-12 tahun, karena tidak terdapat dalam kelompok proyeksi, digunakan kelompok usia 5-9 tahun. Sedangkan pada usia SMP yang seharusnya digambarkan berusia rentang 13-15 tahun, digunakan rentang usia 10-14 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Jika asumsi jenjang SD/MI terdiri dari enam rombongan belajar dan SMP/MTS tiga rombongan belajar, maka setiap sekolah jenjang SD/MI dapat menampung:

$$32\ siswa\ x\ 6\ Rombel = 192\ siswa$$

Sedangkan setiap SMP/MTs dapat menampung:

$$36\ siswa\ x\ 3\ Rombel = 108\ siswa$$

Tabel 2.314
Proyeksi Kebutuhan Sekolah

No.	Uraian	Kondisi 2022	Proyeksi Tahun-				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah penduduk (ribu jiwa)	128,56	134,85	144,73	153,71	161,50	167,88
2	Penduduk usia 7-12 tahun dalam ribuan jiwa (usia 5-9 tahun)	10,17	9,84	13,24	13,25	13,26	13,27
3	Penduduk usia 13-15 tahun dalam ribuan jiwa (usia 10-14 tahun)	11,21	10,43	9,95	13,40	15,37	17,33
5	Jumlah ideal SD/MI	148	52	69	69	69	69
6	Jumlah ideal SMP/MTS	54	96	92	124	142	160

Sumber: Bapppeda, 2023 (diolah)

Data Tabel 2.314 menunjukkan bahwa jumlah sekolah jenjang SD/MI di Gorontalo Utara masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan. Sedangkan di jenjang SMP/MTs memerlukan penambahan menyesuaikan populasi usia sekolah jenjang SMP/MTs. Selain mempertimbangkan jumlah populasi usia sekolah, kriteria jumlah sekolah juga perlu mempertimbangkan aksesibilitas siswa mempertimbangkan cakupan area yang sangat luas dan kondisi belum tersedia transportasi umum. Hal lainnya yang menjadi tantangan, yaitu pemerataan sarana dan prasarana, tenaga pengajar yang memadai dan berkualitas, serta peningkatan kapasitas pendidikan khususnya pendidikan vokasi melalui peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang seperti laboratorium.

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Pengembangan wilayah merupakan sebuah usaha strategis untuk membangun dan memajukan sebuah wilayah melalui pembangunan infastruktur, pengembangan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan penyediaan layanan publik. Pengembangan wilayah dalam jangka panjang ditekankan pada pengenalan sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejateraaan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskiman, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah.

Dalam arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang kemudian disadur sebagai fungsi imperatif dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2025-2045,

Sasaran Visi Nasional 2045 nanti adalah kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Dengan Sasaran tersebut, diproyeksikan Kawasan Timur Indonesia (KTI), termasuk Gorontalo Utara di dalamnya berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 28,5 persen. Sehingga untuk mendorong tercapainya visi Indonesia Emas tersebut, ditentukan Tema Pembangunan Wilayah dan koridor ekonomi Pulau Sulawesi "Penunjang Superhub Ekonomi Nusantara dan Industri Berbasis SDA". Terjemah dari koridor pembangunan tersebut yakni menjadi wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral dan lumbung pangan nasional, dengan prioritas pembangunan:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi;
2. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai produksi dan rantai nilai, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, kawasan industri galangan kapal, kawasan ekowisata, kawasan perikanan tangkap dan budidaya serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan, serta kawasan perkebunan kakao, kelapa dan kopi;
3. Pembangunan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi hub dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan III serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan *good governance* dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan di wilayah Sulawesi khususnya kawasan perbatasan;
5. Peningkatan ketahanan sosial, budaya dan, ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana ruang wilayah dengan mempertimbangkan risiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berbudaya.

Sedangkan tema pembangunan wilayah Gorontalo dalam RPJPN:



No	Provinsi	Tema
1	Sulawesi Utara	Gerbang Perdagangan Asia Timur dan Pasifik, serta Pusat Pengolahan Hasil Perikanan dan Destinasi Ekowisata
2	Sulawesi Tengah	Sentra Tanaman Pangan dan Perkebunan, serta Pusat Pengolahan Hasil Pertambangan
3	Sulawesi Selatan	Gerbang Indonesia Timur dan Lumbung Pangan
4	Sulawesi Tenggara	Sentra Pengolahan Hasil Pertambangan, Perkebunan dan Destinasi Pariwisata Bahari
5	Gorontalo	Sentra Pengolahan Tanaman Pangan dan Perkebunan
6	Sulawesi Barat	Sentra Pengolahan Komoditas Perkebunan

Dalam kerangka implementasi, memuat agenda kewilayahan dan sarana prasarana berupa program strategis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah. Beberapa pembangunan proyek-proyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo antara lain:

1. Pengembangan pelabuhan sebagai simpul utama pembangunan di wilayah Sulawesi untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, seperti Pelabuhan Gorontalo/Anggrek, sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia;
2. Pembangunan dan pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas;
3. Pengembangan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara);
4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di beberapa wilayah yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang dan barang.

Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif dan menjangkau seluruh wilayah Sulawesi meliputi:

1. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah pesisir dan kelautan;
2. Pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan;

3. Penataan kawasan permukiman, terutama diwilayah perkotaan dan sekitar pertumbuhan;
4. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai dengan karakteristik daerah;
5. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman.
6. Eliminasi praktik BABS di seluruh rumah tangga melalui perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
7. Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari rumah tangga dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.

Agar selaras dengan arahan RPJPN di atas, dan mendukung pembangunan di masa mendatang, pengembangan potensi sebuah wilayah diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan, artinya pengembangan potensi wilayah pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada hasil revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020–2040 yang telah memuat arah kebijakan dan strategi penataan ruang yang meliputi struktur ruang, pola ruang dan kawasan-kawasan strategis daerah.

2.7.1 Pengembangan Struktur Ruang

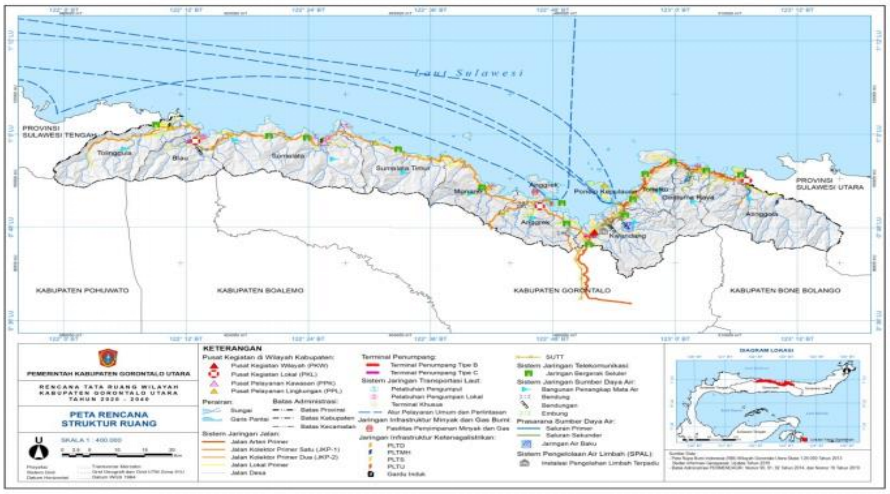
Mengacu pada kebijakan yang ada, kondisi wilayah, potensi dan permasalahan, kedudukan wilayah, serta tujuan penataan ruang di Kabupaten Gorontalo Utara, maka arahan sistem pusat kegiatan sebagai berikut:

a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) adalah perkotaan Moluo di Kecamatan Kwandang berfungsi sebagai pusat pelayanan ekspor-impor, kepabeanan, imigrasi, karantina, industri jasa kelautan dan perikanan, pertahanan dan keamanan negara, transportasi laut serta pelayanan fasilitas umum lainnya yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah perkotaan Molingkapoto berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, olahraga, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan

negara, serta pelayanan fasilitas umum lainnya berskala nasional atau provinsi yang didukung dengan infrastruktur perkotaan;

c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan perkotaan Ilangata di Kecamatan Anggrek berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, olahraga, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, serta pelayanan fasilitas umum lainnya berskala kabupaten atau kecamatan yang didukung dengan infrastruktur perkotaan;
d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, olahraga, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, serta pelayanan fasilitas umum lainnya berskala kabupaten atau kecamatan yang didukung dengan infrastruktur perkotaan, meliputi:
   - Perkotaan Tolinggula Tengah di Kecamatan Tolinggula;
   - Perkotaan Bulontio Timur di Kecamatan Sumalata;
   - Perkotaan Gentuma di Kecamatan Gentuma Raya; dan
   - Perkotaan Kota Jin di Kecamatan Atinggola.
e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, olahraga, transportasi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan negara, serta pelayanan fasilitas umum lainnya berskala lingkungan dan/atau kelurahan, meliputi;
   - Perkotaan Biau di Kecamatan Biau;
   - Perkotaan Buladu di Kecamatan Sumalata Timur;
   - Perkotaan Monano di Kecamatan Monano;
   - Perkotaan Ponelo di Kecamatan Ponelo; dan
   - Perkotaan Dambalo di Kecamatan Tomilito.

Gambar 2.32
Rencana Struktur Ruang Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

Dalam menunjang dan mengkoneksikan pusat-pusat kegiatan wilayah dibutuhkan sistem jaringan prasarana wilayah seperti:

a. Sistem jaringan jalan, meliputi:

1. Jaringan jalan nasional dalam wilayah Gorontalo Utara yang terdiri dari:

- Arteri primer:
  a) Ruas jalan Atinggola – Kwandang;
  b) Ruas jalan Kwandang – Molingkapoto;
  c) Ruas jalan Molingkapoto – Tolango;
  d) Ruas jalan Tolango – Bulontio;
  e) Ruas jalan Bulontio – Tolinggula;
  f) Ruas jalan Molingkapoto – Isimu;
  g) Ruas jalan Sp. Pelabuhan Anggrek – Pelabuhan Anggrek;
  h) Ruas jalan Tilamuta – Bulontio.
- Kolektor primer:
  a) Ruas jalan Kwandang – Pelabuhan Kwandang;
  b) Ruas jalan Tolango – Paguyaman;
  c) Ruas jalan Tolinggula – Desa Cempaka Putih;
  d) Ruas jalan Bogo-bogo – Taluditi.

2. Jaringan jalan Provinsi Gorontalo dalam wilayah Gorontalo Utara:
   a) Ruas jalan Tapa – Atinggola;
   b) Ruas jalan Pontolo – Ombulodata (*by-pass*);

c) Ruas jalan Posso – Pakuku;

d) Ruas jalan Labanu – Tolongio.

3. Jaringan jalan Kabupaten Gorontalo Utara mengacu pada Keputusan Bupati Gorontalo Utara Nomor 205.a Tahun 2012.

b. Sistem jaringan penyeberangan, terdiri dari:

- Lintas penyeberangan antar provinsi:

a) Kwandang – Tarakan – Balikpapan – Sebatik;

b) Anggrek – Buol – Toli-toli – Balikpapan – Pantoloan – Makasar – Jakarta;

c) Kwandang – Paleleh – Leok – Lokodidi – Buol – Toli-toli – Wani;

d) Kwandang – Tarakan – Balikpapan;

e) Kwandang – Samarinda – Surabaya;

f) Bitung – Anggrek – Surabaya – Semarang.

- Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan penyeberangan kelas II di Kecamatan Anggrek.

c. Sistem jaringan transportasi laut:

- Pelabuhan laut terdiri dari:

a) Pelabuhan pengumpul di Kecamatan Anggrek;

b) Pelabuhan pengumpan, meliputi:

- pelabuhan pengumpan regional terletak di Kecamatan Kwandang;
- pelabuhan pengumpan lokal terletak di Kecamatan Gentuma Raya, Biau, Monano, Sumalata, dan Sumalata Timur.

c) Pelabuhan terminal khusus, meliputi:

- terminal khusus PLTU Anggrek terletak di Kecamatan Anggrek;
- terminal khusus PLTU Tanjung Karang terletak di Kecamatan Tomilito;
- terminal khusus pertambangan mineral terletak di Kecamatan Sumalata Timur;
- terminal khusus pertambangan mineral Tanjung Karang terletak di Kecamatan Tomilito;
- terminal khusus pertambangan mineral terletak di Kecamatan Sumalata;
- terminal khusus pertambangan mineral Kasia terletak di Kecamatan Sumalata;
- terminal khusus perkayuan terletak di Kecamatan Monano.

d) Pelabuhan perikanan, meliputi:
- Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) di Kecamatan Kwandang;
- Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Gentuma Raya.

d. Sistem jaringan energi, terdiri dari:
- Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.
  a) Depo minyak dan gas bumi di Kecamatan Kwandang;
  b) Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi Kecamatan Kwandang dan Biau;
  c) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di setiap kecamatan.
- Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
  a) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terletak di Kecamatan Anggrek dan Tomilito;
  b) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) terletak di Kecamatan Atinggola, Gentuma Raya, Sumalata, dan Tolinggula;
  c) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di seluruh kecamatan;
  d) Gardu Listrik meliputi:
     - pengembangan gardu listrik terletak di Kecamatan Anggrek;
     - pemantapan dan pengembangan gardu listrik terletak di Kecamatan Tolinggula untuk menghubungkan sistem interkoneksi listrik Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo.
  e) Jaringan transmisi tenaga listrik 150 KV terletak di seluruh kecamatan.

e. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri dari:
- Pengembangan jaringan tetap.
  a) Jaringan telepon kabel (terestrial) yang menjangkau seluruh pusat kota kecamatan;
  b) Pemantapan sistem jaringan kabel mengikuti pola jaringan jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten.
- Jaringan bergerak, terdiri dari:
  a) Jaringan teresterial;
     - pemantapan serat optik yang menghubungkan setiap kantor pemerintahan dengan kawasan strategis lainnya serta ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten lainnya;

- pemantapan layanan internet gratis (*free hotspot*) di ibukota kecamatan;
- pengembangan dan peningkatan pelayanan transmisi penyiaran TV dan radio di setiap kecamatan.

b) Jaringan seluler berupa pembangunan dan penataan jaringan menara telekomunikasi (tower) bersama berupa tower BTS (*Base Transceiver Station*) berada di seluruh kecamatan;

c) jaringan satelit diarahkan melayani seluruh kecamatan dan wilayah pelosok yang sulit terjangkau jaringan kabel dan nirkabel bagi peningkatan pelayanan fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas privat, dan fasilitas bisnis.

f. Sistem jaringan sumber daya air, terdiri dari:

- Sistem jaringan irigasi, terdiri dari: (DI Abati 1, DI Abati II, DI Ilangata, DI Iloheluma, DI Leboto, DI Molingkapoto, DI Mootinelo, DI Motilango, DI Posso, DI Tolango, DI Sigaso, DI Monggupo, DI Tenilo, DI Didingga, DI Soklat, DI Monano, DI Bubode, dan DI Ipilo.
- Sistem pengendalian banjir meliputi pengendalian banjir dan pengamanan longsoran tebing sungai yang terjadi pada wilayah sungai tersebar di: Kecamatan Kwandang, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Biau, Kecamatan Sumalata Timur, dan Kecamatan Tolinggula.
- Bangunan sumber daya air, berupa bangunan sumber air permukaan dan air tanah yang tersebar di seluruh kecamatan.

g. Sistem jaringan prasarana lainnya.

2.7.2 Pengembangan Pola Ruang

a. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung didefinisikan sebagai kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Secara umum, pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung ditujukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kerusakan fungsi lingkungan hidup melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan upaya

pelestariannya, dengan demikian diharapkan penetapan alokasi peruntukan ruang dalam rangka pengembangan wilayah sesuai dengan kemampuan, daya dukung dan daya tampung wilayah. Kawasan lindung yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara adalah:

- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: hutan lindung, resapan air dan badan air;
- Kawasan perlindungan setempat, berupa: kawasan sempadan sungai, pantai dan patahan aktif;
- Kawasan konservasi, meliputi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan konservasi di wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil;
- Kawasan lindung geologi;
- Kawasan rawan bencana alam berupa: kawasan rawan bencana banjir, tanah longsor, gelombang pasang, dan gempa bumi;
- Kawasan cagar budaya;
- Kawasan ekosistem mangrove.

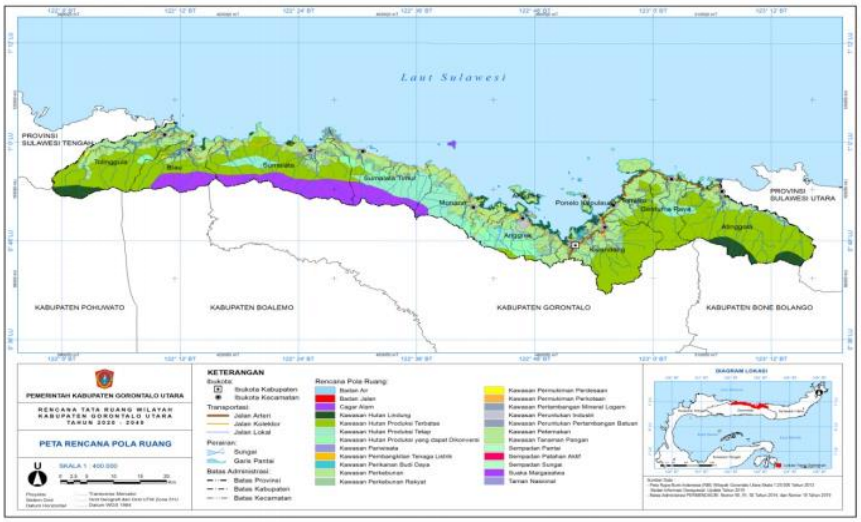
b. Kawasan Budidaya

Penetapan kawasan budidaya pada suatu wilayah dimaksudkan untuk mengoptimasi pemanfaatan sumberdaya, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya buatan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi tetap memperhatikan keserasian lingkungan atau tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Peruntukan kawasan budidaya Kabupaten Gorontalo Utara terdiri atas:

- Kawasan hutan produksi, berupa: kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi;
- Kawasan perkebunan rakyat, berupa tanaman kelapa, cengkeh, kakao, serta komoditi perkebunan lainnya, yang tersebar di hampir seluruh kecamatan;
- Kawasan pertanian, berupa: kawasan tanaman pangan, kawasan perkebunan, hortikultura, dan kawasan peternakan;
- Kawasan perikanan, meliputi: kawasan perikanan tangkap yang tersebar di sepanjang pesisir serta kawasan perikanan budidaya tersebar di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Monano, Sumalata Timur, Sumalata, dan Biau;

- Kawasan pertambangan dan energi, meliputi kawasan pertambangan mineral logam dan bebatuan yang tersebar di Kecamatan Anggrek, Sumalata, Sumalata Timur, Monano dan Tomilito. Kawasan pembangkitan tenaga listrik berupa kawasan PLTU yang terletak di Kecamatan Anggrek dan Tomilito;
- Kawasan peruntukan industri tersebar di setiap kecamatan dan terdapat aglomerasi industri pada Kecamatan Anggrek;
- Kawasan pariwisata berupa kawasan wisata alam;
- Kawasan permukiman berupa kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
- Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi kawasan militer dan kepolisian.

Gambar 2.33
Rencana Pola Ruang Kabupaten Gorontalo Utara



Sumber: Revisi RTRW Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2011-2031 (2020-2040)

2.7.3 Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis kota merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota di bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis yang ada di Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan sudut kepentingan, terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP), terdiri dari:
- Kawasan strategis kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:
  a) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KPET) tersebar di Kecamatan Kwadang, Anggrek, Tolinggula, dan Atinggola;

b) Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi Kawasan tersebar di Kecamatan Anggrek dan Kwandang.

- Kawasan strategis yang memiliki fungsi pendayagunaan SDA/teknologi tinggi adalah kawasan panas bumi yang tersebar pada seluruh kecamatan.

b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK), terdiri dari:

- Kawasan Strategis Kabupaten dari segi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo Utara dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Anggrek, Atinggola, dan Tolinggula.
- Kawasan Strategis Kabupaten dari segi kepentingan sosial budaya dikembangkan di Kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata Timur, Sumalata, dan Kecamatan Tolinggula.
- Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, terdapat di semua kecamatan.

2.7.4 Pengembangan Gorontalo Utara dalam RPJPD Provinsi Gorontalo

Berdasarkan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045, beberapa kebijakan pengembangan kewilayahan di Kabupaten Gorontalo Utara akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana dalam mendukung peran dan fungsi Kabupaten Gorontalo Utara sebagai sentra pertanian, perikanan, dan perdagangan internasional dalam mendorong ekonomi maritim, yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Minanga, KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek;
2. Fasilitasi Pengembangan PKSN Kwandang dan Anggrek, PKW Kwandang, PKL Atinggola, dan Tolinggula;
3. Pembangunan dan peningkatan Jalan Provinsi, seperti Labanu – Tolongio serta Tolinggula Ulu – Cempaka Putih;
4. Pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengumpan, pelabuhan terminal khusus, dan pelabuhan perikanan;
5. Fasilitasi pengembangan jaringan tol, jalur kereta api, dan stasiun kereta api;
6. Fasilitasi pengembangan sistem jaringan energi sumber energi baru terbarukan;

7. Fasilitasi dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air seperti Daerah Irigasi Tolinggula;
8. Pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), serta pengelolaan persampahan dan limbah B3;
9. Fasilitasi penyediaan air baku;
10. Fasilitasi perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi;
11. Pengembangan kawasan pencadangan konservasi di laut, kawasan perikanan, kawasan pertanian, kawasan permukiman, kawasan pariwisata, kawasan transportasi, kawasan pertahanan dan keamanan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
12. Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan termasuk penuntasan stunting;
13. Penguatan perlindungan sosial untuk pengurangan kemiskinan;
14. Optimalisasi pengelolaan persampahan dan sanitasi;
15. Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi/digital dalam penyelenggaraan pemerintahan;
16. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan.

Pengembangan kawasan Gorontalo Utara dan sekitarnya yang ditetapkan menjadi Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi sesuai RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 yaitu:

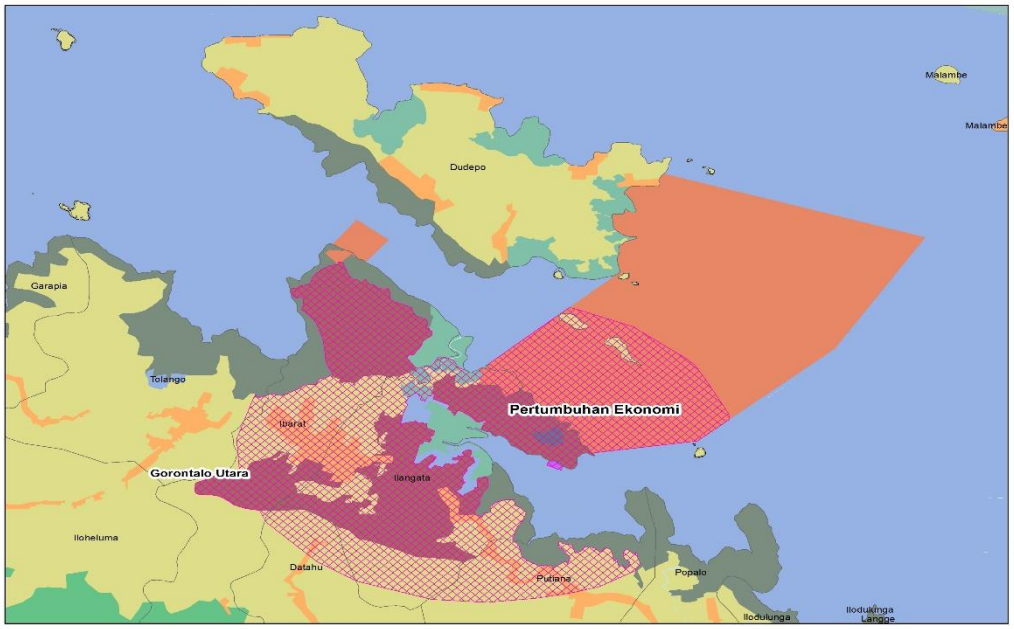
1. Kawasan Strategis Nasional:
   - Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Gorontalo – Paguyaman – Kwandang.
   - Sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup yaitu Kawasan Strategis Terintegrasi Ekoregion Laut Sulu – Sulawesi.
   - Sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu Kawasan Strategis Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Kawasan Strategis Provinsi:

a. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Minanga dan Laut; serta Kawasan Strategis Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut.

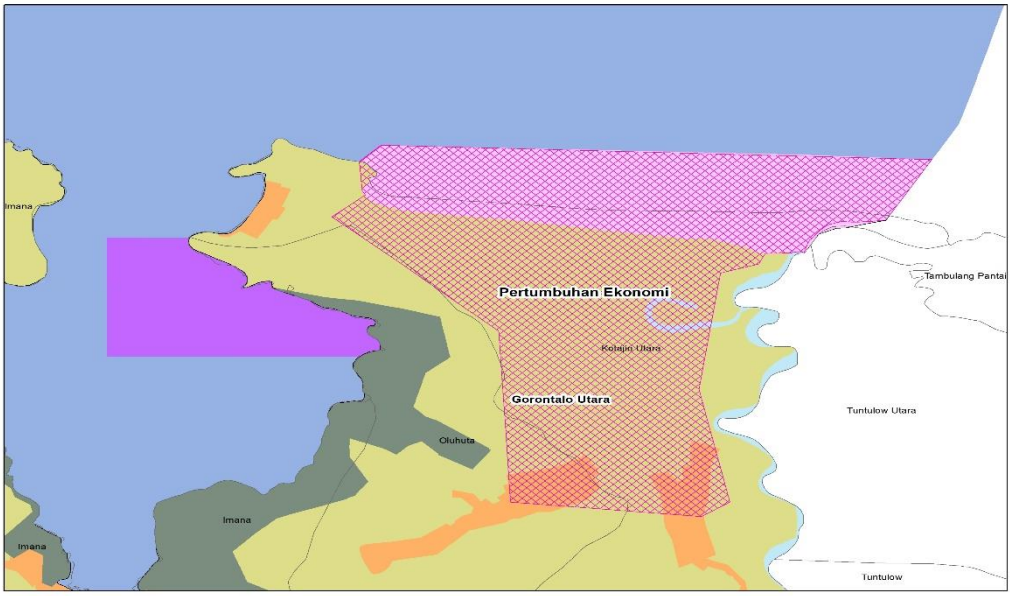
Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Terintegrasi Anggrek sangat strategis sebagai pendorong utama percepatan pembangunan Provinsi Gorontalo, berada di kawasan Pelabuhan Anggrek sebagai jalur transportasi laut, dengan akses jalur perdagangan internasional utama, yang ditunjang dengan potensi agribisnis yang kuat dengan produk unggulan pertaniannya. Pengembangan kawasan strategis Anggrek diupayakan melalui (1) Peningkatan sarana dan prasarana melalui skema pendanaan alternatif (KPBU), dan (2) Pengembangan aksesibilitas dalam menunjang konektifitas logistik.

Gambar 2.34
Kawasan Strategis Provinsi Terintegrasi Pelabuhan Anggrek



Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043, 2024

Gambar 2.35
Kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Minanga



Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043, 2024

2025

Bab III

Permasalahan dan Isu Strategis

2045

MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Pada bab ini diuraikan rangkaian isu strategis yang menjadi permasalahan pokok dalam pembangunan. Berbagai isu strategis tersebut merupakan hasil masukan dari berbagai pihak dengan berbagai latar belakang selama penyusunan dokumen, analisis dan telaah dari capaian pembangunan dan permasalahan pokok periode jangka panjang sebelumnya, pencapaian metadata Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's) di Kabupaten Gorontalo Utara atau Provinsi Gorontalo, maupun isu-isu faktual yang masih berlangsung saat ini di daerah. Tidak menutup kemungkinan juga terhadap berbagai perkembangan maupun isu Nasional dan regional yang bisa membawa pengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Gorontalo Utara.

3.1 GAMBARAN INDIKATOR MAKRO

Capaian pembangunan daerah diukur dengan indikator makro pembangunan, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase penduduk miskin, PDRB per kapita, indeks gini, dan tingkat inflasi. Tabel 3.1 di bawah ini menunjukkan capaian dan gambaran indikator pembangunan makro di Kabupaten Gorontalo Utara serta perbandingannya dengan Provinsi Gorontalo dan Nasional.

Tabel 3.1
Perbandingan Capaian Makro Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, dan Nasional

No.	Indikator Pembangunan	Wilayah	Kondisi Awal (2023)	Gambaran Kondisi
1	Indeks Pembangunan Manusia (poin)	Kabupaten Gorontalo Utara	68,00	IPM Gorontalo Utara termasuk terendah di Provinsi Gorontalo, terutama disumbang oleh komponen pendidikan yang terendah.
		Provinsi Gorontalo	71,25	
		Nasional	74,39	
2	Laju pertumbuhan ekonomi (persen)	Kabupaten Gorontalo Utara	4,31	Meskipun sudah *rebound* pasca pandemi, pertumbuhan belum kembali ke *trajectory* pra pandemi. Sektor yang memiliki *value added* terhadap LPE rendah.
		Provinsi Gorontalo	4,50	
		Nasional	5,05	
3	Tingkat pengangguran terbuka (persen)	Kabupaten Gorontalo Utara	2,77	Pengangguran sempat kembali naik karena elnino yang menekan tenaga kerja ber-*skill* rendah khususnya sektor pertanian. Pilihan sektor yang menyerap tenaga kerja ber-*skill* tinggi terbatas.
		Provinsi Gorontalo	3,06	
		Nasional (Agustus)	5,32	
4	Persentase penduduk miskin (persen)	Kabupaten Gorontalo Utara	17,03	Pengurangan penduduk miskin dalam 1 dekade terakhir stagnan. Perlu alternatif kebijakan *game changer* alih-alih *business as usual*.
		Provinsi Gorontalo (Maret)	15,15	
		Nasional (Maret)	9,36	
5	Indeks gini (poin)	Kabupaten Gorontalo Utara	0,424	Meski membaik, gini ratio sebenarnya masih tinggi. Jika dibandingkan kabupaten/kota lain maupun Provinsi, dan masih menjadi isu strategis dalam pembangunan.
		Provinsi Gorontalo (Maret)	0,417	
		Nasional (Maret)	0,388	
6	Tingkat inflasi (persen)	Kabupaten Gorontalo Utara	3,88 (Kota Gorontalo)	Secara umum, tingkat harga agregat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih bias karena perhitungan belum spesifik dilakukan di Gorontalo Utara.
		Provinsi Gorontalo	3,88	
		Nasional	2,61	
7	PDRB per kapita (jutaan Rupiah)	Kabupaten Gorontalo Utara	31,71	Secara umum, pendapatan masyarakat masih rendah dan jauh dibawah rata-rata Nasional.
		Provinsi Gorontalo	42,34	
		Nasional	75,00	

Sumber: BPS, diolah

3.2 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Analisis permasalahan pembangunan menjadi bagian penting dalam perumusan isu strategis yang kelak akan menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan desain program dan kegiatan untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan dalam setiap tahapannya. Suatu permasalahan daerah dianggap

memiliki nilai urgensi jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat *mandatory*. Selain itu, permasalahan pembangunan juga dapat dilihat berdasarkan *gap* yang terjadi antara target dan realisasi capaian pelaksanaan urusan pemerintah daerah serta memperhatikan isu publik yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, serta fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya pada bagian ini akan dibahas permasalahan pembangunan daerah dari berbagai aspek.

A. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Relatif Rendah dan Kesenjangan Ekonomi Tinggi

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang digambarkan oleh tingkat kemiskinan relatif tinggi, yang diindikasikan memburuk saat pandemi Covid-19. Angkanya juga bahkan masih berada jauh di atas angka Nasional (dibawah 10 persen) dan angka Provinsi Gorontalo (di kisaran 15 persen). Hal yang sama juga terjadi pada kemiskinan ekstrem yang saat dokumen disusun lebih tinggi dibandingkan angka Provinsi Gorontalo dan Nasional.

Tingkat keparahan kemiskinan dan kedalaman kemiskinan juga masih tinggi, menggambarkan tingkat ketimpangan yang terjadi pada masyarakat miskin tinggi. Melihat tren penurunan kemiskinan yang mulai melandai di 10 tahun terakhir, perlu adanya upaya-upaya “kreatif”, yang diawali dari upaya evaluasi terhadap program prioritas di dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang terutama program sektor pertanian yang menjadi kontributor terbesar dalam PDRB, dan perlu diseriusi untuk melakukan transformasi struktur ekonomi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kembali di atas 6 persen.

Pergeseran demografi yang merupakan salah satu isu utama global yang menunjukkan pergeseran komposisi penduduk ke usia lanjut perlu menjadi salah satu pertimbangan utama karena pertumbuhan populasi yang tidak terkendali mampu mengubah tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum. Rasio ketergantungan yang telah berada di atas 50 persen beberapa tahun ke depan perlu diantisipasi sejak dini dengan fokus program peningkatan kompetensi penduduk usia 40 tahun ke atas, agar ketika mencapai usia tidak

produktif lagi di 20 tahun ke depan tidak terlalu membebani usia produktif. Selain itu, program peningkatan kompetensi anak-anak muda dibawah 25 tahun juga perlu ditekankan agar ketika tiba saatnya angka rasio ketergantungan di atas 50 persen, kelompok usia produktif mampu memberikan produktivitas yang lebih agar mampu menopang usia tidak produktif.

Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBD, yang secara tren terus meningkat juga seharusnya dapat menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengejar ketertinggalan desa. Namun menimbang angka kemiskinan yang secara tren justru stagnan, perlu disikapi apakah selama ini dua sumber pendanaan tersebut masih *elite capture* dimana hanya segelintir masyarakat yang berada di lingkaran kekuasaaan pemerintah desa yang relatif lebih menikmati.

Proxy ketimpangan masyarakat secara makro digambarkan oleh rasio gini, yang digambarkan sebesar 0,424 tahun 2023 di Kabupaten Gorontalo Utara berbanding 0,417 di Provinsi Gorontalo, yang menunjukkan tingkat ketimpangan di Gorontalo Utara lebih tinggi. Selain menggunakan analisa makro, data mikro untuk melihat kesejahteraan dan ketimpangan juga bisa dilihat dari data kependudukan, perumahan, konsumsi, dan lain sebagainya. Di tahun 2023, pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah justru komposisi usia produktif jauh lebih kecil dibandingkan kelompok pengeluaran 20 persen teratas, yang menunjukkan kelompok 40 persen terbawah cenderung *dependency ratio*-nya lebih besar. Sedangkan tingkat perceraian justru relatif lebih besar komposisinya pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas dibanding kelompok pengeluaran 40 persen terbawah.

Ketimpangan dalam perumahan, di tahun 2023 kepemilikan rumah tinggal milik sendiri justru lebih tinggi pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah dibandingkan 20 persen teratas, namun status milik sendiri tersebut tidak sejalan dengan ketersediaan tempat buang air besar atau sanitasi yang sangat kecil pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang hanya 66,59 persen berbanding 85,86 persen pada kelompok pengeluaran 20 persen teratas. Selain itu kepemilikan aset yang menjadi fasilitas esensial dalam rumah

tangga, seperti lemari es, televisi, tabung gas, dan lain sebagainya hanya mencakup 67,10 persen rumah tangga di Gorontalo Utara, sejalan dengan rumah tangga yang memiliki aset alat transportasi hanya mencapai 73,46 persen.

Pada akses teknologi informasi melalui penggunaan ponsel atau komputer, ketimpangan sangat jelas terjadi di tahun 2023 karena pada kelompok pengeluaran 40 persen terendah tingkat aksesnya hanya 73,10 persen, timpang dengan kelompok teratas yang mencapai 92,21 persen. Searah dengan pengalaman penggunaan internet yang hanya 48,17 persen pada kelompok 40 persen terbawah dan hampir 70 persen pada kelompok 20 persen teratas.

Analisa kesejahteraan juga mencakup akses terhadap program perlindungan sosial berupa bantuan dan jaminan sosial. Persentase rumah tangga yang memiliki jaminan pensiun/hari tua hanya mencapai 5,54 persen, dan kepemilikan asuransi yang meng-*cover* jaminan kematian, kecelakaan kerja, dan kehilangan pekerjaan hanya mencapai 6,62 persen di tahun 2023.

Dalam hal kemampuan pemenuhan/konsumsi komoditas makanan, kesenjangan jelas terjadi karena pada kelompok pengeluaran 40 persen terendah rata-rata rupiah yang dibelanjakan dalam sebulan hanya mencapai Rp338.454,00, sangat jauh dibandingkan kelompok 20 persen teratas yang mencapai Rp1.218.131,00. Begitu pula pada komoditas non makanan setali tiga uang bahkan lebih ekstrem dengan Rp88.522,00 berbanding Rp1.517.245,00. Dalam hal pemenuhan kalori sebagai bahan baku energi untuk beraktivitas dan bekerja, kelompok pengeluaran 40 persen terendah hanya mengkonsumsi rata-rata sehari 1.735,22 Kkal berbanding 2.732,81 Kkal pada kelompok 20 persen teratas. Dan pemenuhan protein menunjukkan pola yang sama dimana pada kelompok terendah mencapai 47,02 Gram berbanding 81,80 Gram pada kelompok teratas.

Menimbang angka kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi, berbagai program gratis bagi perlindungan daya beli masyarakat dirasa masih menjadi primadona dalam upaya mengurangi kemiskinan. Selain itu, ketepatan intervensi kebijakan pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik desa

dalam Indeks Desa Membangun (IDM) juga bisa menjadi alternatif yang kreatif dalam penanggulangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan. Dengan memperhatikan indeks tersebut bisa dilihat perkiraan respon masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Meskipun sudah tidak ada desa dengan status “Tertinggal” namun hampir 50 persen desa bertahan di status “Berkembang”, selain itu beberapa kecamatan masih memiliki capaian indeks ketahanan ekonomi yang rendah. Diperlukan adanya *local knowledge* di tingkat daerah melalui pemberdayaan masyarakat, *local empowerment* secara bergotong royong untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri, selain dari berbagai upaya dan program langsung dari pemerintah melalui intervensi anggaran.

B. Rendahnya Kompetensi dan Daya Saing Tenaga Kerja

Kurang selarasnya kompetensi yang dimiliki masyarakat dengan pasar tenaga kerja serta *skill*/kemampuan yang terbatas disinyalir menjadi *constraint* dalam penyerapan tenaga kerja (khususnya formal) sehingga berimbas pada angka pengangguran terbuka. Berdasarkan data publikasi BPS, meskipun secara makro tingkat pengangguran terbuka membaik meskipun pasca pandemi di angka 2,77 dibandingkan capaian 5,21 di tiga tahun sebelumnya.

Ketergantungan sektoral yang terlalu besar di sektor primer hingga melebihi 50 persen juga mengakibatkan tenaga kerja sebagian besar terserap di sektor tersebut. Di satu sisi penduduk usia muda terutama yang berpendidikan kurang tertarik untuk mengelola sektor agraris, yang dapat berimplikasi banyak hal. Di masa depan, bisa jadi sektoral PDRB pertanian akan semakin tergerus oleh sektoral lainnya karena penduduk yang baru masuk usia produktif tidak berniat memasuki sektor primer. Selain itu, jika ternyata penduduk usia produktif tidak memiliki keahlian sehingga terpaksa mengelola lahan, ketika cuaca tidak mendukung, terjadi fenomena El Nino misalnya, aktivitas cocok tanam tidak bisa berjalan karena pola tanam berubah. Ketika tidak menanam, penduduk yang tidak memiliki keahlian tersebut akan menganggur dan mendorong angka pengangguran terbuka terkerek naik, seperti yang terjadi pada tahun 2023 ini. Namun di sisi lain sumber daya alam (sektor primer) yang banyak tersedia,

khususnya sektor perikanan dan kelautan menyebabkan masyarakat dapat beraktivitas menangkap ikan atau budidaya. Terlepas dari hal tersebut, pemerintah harus mampu meningkatkan kapasitas, daya produksi, dan pemasaran sektor perikanan agar pendapatan masyarakat meningkat, dengan tanpa meninggalkan upaya peningkatan daya serap sektor formal sehingga pendapatan masyarakat lebih menentu. Juga diperkuat dengan peningkatan SDM dan kemampuan manajerial dari pelaku usaha sektor primer sehingga nilai tambah yang dihasilkan semakin besar.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, hampir 50 persen penduduk Gorontalo Utara hanya berpendidikan SLTP ke bawah, dan hanya sekitar 3 persen yang berpendidikan minimal kesarjanaan yang semakin menegaskan rendahnya kapasitas pendidikan masyarakat. Untuk menutupi kelemahan dari jenjang pendidikan, sebenarnya peningkatan keahlian masyarakat dapat didorong melalui pendidikan/pelatihan vokasi baik formal atau non formal, namun hingga dokumen ini disusun masih belum terdapat Balai Latihan Kerja (BLK) di Gorontalo Utara.

C. Pembangunan Sumberdaya Manusia Belum Optimal

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia terlihat dari data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami perlambatan pertumbuhan pada tahun 2021, yang pertumbuhannya hanya mencapai 0,54 persen dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 0,72 persen, meskipun di saat yang bersamaan di tahun 2021 Nasional hanya mengalami pertumbuhan 0,35 dan Provinsi Gorontalo 0,47 persen. Sedangkan pada tahun 2022 justru mengalami perbaikan secara signifikan hingga mencapai pertumbuhan 1,22 persen saat Provinsi Gorontalo tumbuh 1,17 persen dan Nasional 0,86 persen. Secara absolut, angka IPM Provinsi Gorontalo di tahun 2023 sudah mencapai 71,25 dibandingkan 68,00 untuk Gorontalo Utara, masih jauh jika dibandingkan Kota Gorontalo yang sudah berhasil masuk pada tahap “Sedang” di angka 78,64, atau rata-rata Nasional

yang sudah mencapai 74,39. Yang miris, IPM Gorontalo Utara tahun 2023 kurang lebih sebanding dengan IPM Kota Gorontalo tahun 1990.

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup manusia sehingga termasuk salah satu bagian dari penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan sektor pendidikan (terutama pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan usia dini) bagi masyarakat difokuskan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin akses bagi seluruh lapisan masyarakat dan wilayah tanpa terkecuali. Berdasarkan publikasi statistik di tahun 2022, angka partisipasi sekolah di segala jenjang usia dan jenis kelamin masih menyisakan pekerjaan rumah. Pada jenjang usia SD, meskipun seluruh laki-laki mengenyam pendidikan, namun tidak halnya dengan perempuan yang hanya 98,4 persen. Begitupun pada jenjang SMP, baik perempuan maupun laki-laki, hanya sekitar 60-70 persen yang masih memiliki akses terhadap pendidikan. Pada tingkat partisipasi murni, jenjang SD saja hanya 98,89 persen yang tepat waktu, dan terus berkurang hingga di level menengah atas hanya 60,93. Pada ketersediaan tenaga pendidik, secara jumlah yang ditunjukkan dari rasio guru terhadap murid sebenarnya masih mencukupi, yang menjadi persoalan adalah problem distribusi yang tidak merata di seluruh kecamatan. Begitu pula capaian pada komponen IPM sektor pendidikan seperti angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang sangat lambat berprogres.

Semakin menurunnya APS seiring bertambahnya usia menunjukkan fenomena masih banyaknya penduduk yang tidak melanjutkan jenjang pendidikannya atau putus sekolah. Kondisi ini salah satunya tercermin dari persentase penduduk usia sekolah (7-24 tahun) yang tidak bersekolah lagi berdasarkan Susenas 2022. Sebanyak 34,45 persen penduduk tahun 2022 usia sekolah (7-24 tahun) sudah tidak bersekolah lagi. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, perempuan (32,25 persen) memiliki persentase lebih rendah dibandingkan laki-laki (36,44 persen). Nilai APS juga menunjukkan fenomena tersebut. Kondisi putus sekolah ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor

internal anak, faktor keluarga, faktor lingkungan, dan beberapa faktor lainnya yang perlu dianalisis dan dikaji lebih dalam.

Pendidikan juga harus dirasakan tanpa terkecuali oleh kalangan penyandang disabilitas yang merupakan salah satu hak mereka yang wajib dipenuhi oleh negara. Pada tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas sejumlah 493 orang, dari jumlah tersebut sejumlah 104 orang sedang mengenyam pendidikan di jenjang pendidikan luar biasa. Sekolah Luar Biasa hanya terdapat 1 unit di Kecamatan Kwandang, sehingga menyulitkan akses bagi penyandang disabilitas dari kecamatan lainnya karena kendala jarak. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang dilahirkan harus berbasis keadilan disabilitas dan seluruh penyandang disabilitas minimal mengenyam pendidikan level dasar sembilan tahun yang bermutu secara inklusif dan khusus.

Selain pembangunan karakter, budaya literasi juga merupakan kepingan penting dalam pendidikan. Untuk meningkatkan budaya literasi diperlukan akses yang seluas-luasnya terhadap bahan bacaan (ramah buku) untuk menanamkan budaya gemar baca, terutama sejak dini. Hal yang krusial salah satunya adalah akses terhadap perpustakaan dan koleksi buku yang dimilikinya. Saat ini hanya terdapat satu perpustakaan daerah yang memenuhi standar, terletak di dekat pusat pemerintahan dengan jumlah koleksi buku sejumlah 7.395 judul dengan 15.920 eksemplar koleksi buku dan jumlah kunjungan 25.032 kunjungan. Sedangkan berbagai perpustakaan di desa terkesan ‘hidup segan mati tak mau’ karena sarana prasarana yang tidak lengkap atau rusak, serta tidak adanya pengelola. Harapan untuk meningkatkan budaya literasi masih tersisa pada perpustakaan sekolah tingkat SD yang masih memiliki 16.828 judul dan 67.939 eksemplar, serta di tingkat SMP sejumlah 39.641 judul dan 130.605 eksemplar, namun sebagian besar koleksinya sudah rusak dan tidak layak. Ke depan, upaya meningkatkan literasi di tingkat *grass root* dapat dilakukan dengan misalnya mengembangkan kampung literasi di salah satu desa yang bertindak sebagai *pilot project* yang kemudian diramaikan dengan berbagai kompetisi atau festival literasi, seperti *story telling*, lomba mengarang, menulis puisi, diskusi buku cerita, dan sebagainya. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Gorontalo Utara di

tahun 2023 mencapai 70,68 saat capaian Provinsi Gorontalo 70,39 dan Nasional 68,19. Hal tersebut menunjukkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi, komunitas literasi, dan berbagai pihak lainnya dalam hal peningkatan kinerja literasi masyarakat perlu ditingkatkan meskipun sudah *on the track*. Meskipun demikian, beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan khususnya di desa, dukungan anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan, peningkatan intensitas aktivitas literasi, dan sebagainya.

Selain dibentuk oleh pendidikan, dimensi dasar dalam IPM juga dibentuk oleh pelayanan kesehatan untuk mendorong meningkatnya harapan hidup masyarakat. Usia Harapan Hidup (UHH) Gorontalo Utara pada laporan tahun 2023 mencapai 69,65, masih berada di bawah capaian Provinsi Gorontalo di 70,50. Upaya untuk mengatasi tantangan mendorong meningkatnya harapan hidup yang tersulit adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama di daerah perdesaan untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan baik secara rutin maupun insidental. Rendahnya kesadaran tersebut tergambar dari beberapa hal, jika dilihat dari tingkat capaian *Universal Child Immunization* (UCI), masih ada beberapa desa yang rendah capaiannya, seperti di Kecamatan Gentuma Raya, Kwandang, dan Kwandang, dan total masih ada 21 desa yang belum berstatus UCI di tahun 2023. Capaian imunisasi dasar juga masih menjadi kendala, dimana dari imunisasi wajib dan imunisasi tambahan, secara umum baru tercapai 92,8 persen di tahun 2023 yang merupakan kinerja yang belum optimal.

Dari capaian *Open Defecation Free* (ODF) hingga tahun 2022 hanya tercapai sekitar 22 persen atau sejumlah 28 desa, yang menggambarkan upaya komitmen pencegahan bibit penyakit berbasis lingkungan melalui budaya tidak buang air besar sembarangan masih sangat rendah. Hal tersebut sejalan dengan capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) yang juga masih sangat rendah dibawah 30 persen.

Tantangan berikutnya adalah kesiapan fasilitas dan jumlah dokter. Dari sisi kecukupan Posyandu meskipun sudah memenuhi standar, namun yang aktif tidak mencapai 80 persen. Ketersediaan tenaga medis dan paramedis juga

masih menjadi pekerjaan rumah. Rasio dokter saat ini hanya mencapai 29:100.000 penduduk; rasio dokter gigi hanya 3:100.000 penduduk; bidan 97:100.000 penduduk; dan perawat hanya 117:100.000 penduduk. Masalah ini telah banyak diupayakan oleh pemerintah daerah melalui pembangunan Rumah Sakit Pratama Tolinggula Melayani di ujung barat wilayah, pemenuhan Alkes dan sarana prasarana lainnya, serta upaya ketersediaan dokter dan tenaga kesehatan lainnya yang sekaligus bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan.

Jaminan layanan kesehatan bagi masyarakat dari pemerintah merupakan gambaran dari komitmen pelaksanaan keadilan dalam hal akses kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Hal tersebut tergambar pada cakupan perlindungan jaminan kesehatan/*Universal Health Coverage* (UHC) bagi masyarakatnya. Dalam RPJMN 2020-2024 target UHC sebesar 98 persen, namun di Gorontalo Utara tahun 2022 hanya sejumlah 86,6 persen (meski setahun berselang naik menjadi 96 persen). Kendala yang menjadi tantangan dalam pencapaian UHC seperti antara lain kelengkapan sarana prasarana di fasilitas kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, pemerataan distribusi SDM kesehatan, pemanfaatan data dan sistem informasi, kecukupan anggaran, kenaikan iuran serta regulasi-regulasi yang mendorong perbaikan penyelenggaraan Program JKN. Dalam kendala pemanfaatan data sistem informasi, masih menjadi pekerjaan rumah perihal kesesuaian data kependudukan pada sistem kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana sekitar 15.000 penduduk belum tervalidasi NIK-nya. Selain itu, perlu kolaborasi dan persandingan antara data NIK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan DTKS pada Dinas Sosial setelah data tersebut diverifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial sehingga potensi pembebanan anggaran pada pihak yang tidak prioritas dapat ditekan. Namun dengan adanya Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), potensi terjadinya permasalahan data sebenarnya bisa diminimalisir.

Angka Kematian Ibu (AKI) dan jumlah kematian Balita juga menjadi pekerjaan rumah yang krusial dalam upaya mendorong peningkatan kualitas hidup. Kasus AKI pada tahun 2021 masih terjadi sebanyak 13 kasus atau setara 612/100.000

kelahiran hidup, sedangkan jumlah kematian Balita terdiri dari 48 kasus yang sebagian besar kematiannya disebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia. Pada tahun berikutnya Angka Kematian Balita (AKB) justru meningkat meskipun AKI mengalami penurunan.

Isu stunting merupakan salah satu indikator SDG's untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi. Berdasarkan angka gelar timbang, prevalensi Balita yang mengalami stunting di Gorontalo Utara sebenarnya sudah berada di bawah standar WFO, 15,93 persen dari standar 20 persen, meskipun secara SSGI/SKI masih tinggi mencapai di atas 30 persen. Berbagai faktor disinyalir sebagai pendorong terjadinya stunting, diantaranya ketimpangan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, ketahanan pangan, sistem kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan permukiman dan urbanisasi yang mempengaruhi tumbuh kembang Balita serta kecukupan gizi dan kesehatan di semua siklus kehidupan.

Pada indikator morbiditas atau angka kesakitan yang menunjukkan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2022 mencapai 7,69 persen, meskipun telah terjadi penurunan dua kali lipat dibandingkan setahun sebelumnya di angka 15,81 persen. Angka tersebut dinilai masih terlalu tinggi, terutama pada jenis kelamin perempuan yang lebih tinggi daripada laki-laki 8,31 persen berbanding 7,09 persen pada tahun 2022.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia juga tidak bisa dilepaskan dari pembangunan komponen terkecil dari masyarakat, yaitu keluarga, termasuk responsif gender dan perlindungan terhadap anak-anak. Pembangunan keluarga yang komprehensif dan terpadu tercermin dalam skor Indeks Pembangunan Keluarga yang idealnya di atas 70 (kategori "Tangguh"). Berdasarkan perhitungan pada komponen kemandirian, ketentraman, dan kebahagiaan kualitas keluarga di Gorontalo Utara pada tahun 2023 masih berada pada skor 59,40, sehingga masih masuk di kategori "Berkembang", masih tertinggal jika dibandingkan dengan capaian Nasional di angka 61,43. Ketimpangan gender yang ditunjukkan oleh Indeks Ketimpangan Gender meskipun 5 tahun terakhir mengarah positif, namun *gender gap* masih cukup besar. Sedangkan pada kualitas perlindungan anak-anak yang digambarkan

pada Indeks Perlindungan Anak (IPA), pada tahun 2022 kinerjanya terendah di Provinsi Gorontalo, dengan capaian terendah pada klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, serta klaster Perlindungan Khusus, yang semakin memperkuat bagi urgensi tersedianya rumah singgah dalam upaya perlindungan khusus korban kekerasan.

D. Efektivitas Pemanfaatan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam yang Bernilai Ekonomis Masih Rendah

Berdasarkan laporan statistik terhadap kontribusi sektoral ekonomi dalam PDRB, sektor primer memegang peranan terbesar dengan komposisi di atas 50 persen. Merupakan *blessing in disguise* sekaligus tantangan bagaimana agar potensi tersebut bisa digunakan sebagai *driver* pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan kemiskinan dan ketimpangan yang masih tinggi. Fakta di lapangan, pada 15 tahun Kabupaten Gorontalo berdiri, pelaku ekonomi utama sektor primer di Gorontalo Utara, para petani dan nelayan, justru masih menjadi kaum marjinal di tengah hamparan sumber daya alam yang berlimpah. Berbagai permasalahan krusial yang menjadi faktor belum tingginya *value added* dari sumber daya alam terhadap pelaku ekonomi diantaranya faktor musim yang tidak stabil (terutama untuk sektor pertanian) karena pemanasan global/efek gas rumah kaca, akses faktor produksi dan penggunaan teknologi alat produksi yang masih rendah, kelengkapan dan reliabilitas sarana dan prasarana produksi terutama sarana pengairan/irigasi dan alat tangkap, pengelolaan pasca panen/tangkap belum optimal termasuk dalam hal ini upaya *packaging* produk dan pemasaran yang masih konvensional, serta akses Perbankan dan inklusi keuangan yang rendah.

Indikator untuk menggambarkan nilai tambah dari hasil sumber daya alam bagi pelaku ekonomi adalah Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Petani (NTP). Skor kedua indikator ini untuk skup Provinsi Gorontalo masing-masing berada pada angka 95,94 dan 111,32 per Desember 2023. Makna dari skor tersebut yakni nilai tambah dari hasil produksi nelayan masih negatif, sedangkan produksi petani sudah positif. Namun demikian, kondisi nilai tukar yang positif tidak serta merta menggambarkan kondisi petani yang sejahtera dan lepas dari jerat kemiskinan (termasuk nelayan), beberapa faktor disinyalir

sebagai penyebab: yang paling fundamental adalah kepemilikan lahan yang kecil, selain itu kapasitas produksi yang terbatas, memiliki banyak hutang terutama di rentenir, dan tata niaga pertanian yang tidak adil. Untuk itu mengemuka untuk mempercepat reforma agraria sejati, redistribusi lahan untuk para petani tak bertanah dan yang hanya memiliki lahan di bawah 0,3 Ha. Dengan upaya tersebut, diharapkan kedaulatan pangan bisa dicapai, kemiskinan bisa diurai, dan terwujud keadilan sosial.

Manfaat dari suatu hasil alam diharapkan dapat memberikan keterjaminan kehidupan dasar manusia, salah satunya melalui ketersediaan pangan dan kecukupan gizi untuk mencapai sumber daya manusia yang sehat, aktif, dan produktif. Skor Indeks Ketahanan Pangan Gorontalo Utara untuk tahun 2023 sebesar 79,07 (Ketahanan Pangan Baik), namun jika ditilik dari unsur komponen penyusunnya, masih ada komponen yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yaitu pada komponen “Pemanfaatan” pangan yang terdiri dari perbaikan pola konsumsi, penganekaragaman konsumsi, perbaikan gizi, serta keamanan dan mutu pangan, serta “Keterjangkauan” yang pada tahun sebelumnya sudah tinggi namun turun drastis di 2023. Selain itu, secara umum kendala dalam pencapaian IKP yang tinggi yakni prevalensi Balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi.

Berlokasi di sekitar pesisir juga sebenarnya membawa keuntungan tersendiri bagi Gorontalo Utara, karena potensi ekosistem lautan dan pesisir yang sangat produktif dan dinamis dalam hidup manusia melalui penyediaan makanan, air, pengaturan iklim dan erosi, nilai spritual dan rekreasi, produksi primer, dan lain sebagainya. Termasuk hutan mangrove yang memiliki peran sosial budaya, ekonomi, dan ekologis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa potensi ekonomi hutan mangrove Gorontalo Utara tahun 2017 memiliki nilai ekologi sekitar Rp18 Miliar/Hektar/tahun, nilai ekonomi sekitar Rp40 Juta/Hektar/tahun, dan nilai sosial budaya sekitar Rp20 Juta/Hektar/tahun, sehingga total nilai ekonominya mencapai Rp18.266.058.212/Hektar/tahun. Meskipun memiliki peran dan potensi ekonomi yang besar, permasalahan yang dihadapi saat ini oleh hutan tersebut seperti semakin berkurangnya luasan, kerusakan akibat

eksploitasi kayu oleh masyarakat, serta konversi lahan mangrove menjadi tambak.

Saat ini di Gorontalo Utara memang belum ditemukan barang tambang yang bernilai tinggi dalam perut buminya, namun tidak menutup kemungkinan di masa depan ditemukan cadangan minyak bumi dan gas alam, nikel karena bumi Sulawesi kaya dengan jenis tambang ini, maupun jenis tambang berharga lainnya. Terlepas dari tingginya nilai ekonomi barang tambang, Gorontalo Utara sebenarnya menyimpan potensi energi hijau yang mumpuni melalui pembangkit listrik tenaga hidro, tenaga surya karena cahaya matahari yang konstan setiap tahun, atau bahkan tidak menutup kemungkinan tenaga geotermal.

Selain itu, optimalisasi potensi pesisir yang menyimpan daya tarik wisata pun belum menunjukkan titik yang dapat dikatakan terkelola baik. Meski memiliki panjang pantai lebih dari 300 Km namun pengelolaan yang mengandalkan hal tersebut masih rendah. Pun dalam hal pengelolaan pulau-pulau kecil, meski memiliki lebih dari 50 pulau yang sebagian besar masih belum dihuni, hanya segelintir pulau yang telah dikelola atau dimanfaatkan sehingga tercermin dalam PDRB sektoral, penyediaan akomodasi dan makan minum berkontribusi tidak lebih dari 2 persen.

E. Pembangunan Ekonomi Belum Optimal dan Transformasi Struktural Ekonomi yang Lambat

Perekonomian Gorontalo Utara meskipun tidak memberikan sumbangsih yang besar terhadap perekonomian regional Provinsi Gorontalo, namun tetap memberikan warna tersendiri karena cakupan produksi sektor primernya mencapai di atas 50 persen. Secara rinci, PDRB Gorontalo Utara pada tahun 2023 hanya memenuhi sekitar 8 persen, komposisi yang sama dengan tahun sebelumnya, dari PDRB Provinsi Gorontalo. Bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki komposisi terkecil dalam hal sumbangsih PDRB terhadap PDRB regional.

Meskipun LPE Gorontalo Utara di tahun 2023 sudah positif (dimulai sejak tahun 2021), namun pembelajaran adanya permasalahan ekonomi di tahun 2020 menjadi pelajaran berharga dalam penyusunan kebijakan perencanaan.

Pertumbuhan ekonomi tidak mengalami banyak perubahan sepanjang tahun 2016-2019 sekitar 6-7 persen, sebelum kontraksi di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi. Pada tahun 2020, pandemi/wabah yang terjadi telah mematahkan seluruh prediksi pertumbuhan ekonomi lokal bahkan global dari yang diperkirakan akan positif, justru mengarah kepada resesi. Kontraksi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Gorontalo Utara masih rentan terhadap *shock* yang terjadi dalam perekonomian.

Seiring dengan membaiknya fundamental dan teknikal ekonomi di level regional dan Nasional, perekonomian Gorontalo Utara diharapkan terus membaik dan memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap PDRB Provinsi Gorontalo. Pekerjaan rumah utama adalah memulihkan perekonomian Gorontalo Utara agar LPE dapat kembali seperti kondisi di masa pra-pandemi yang dapat lebih tinggi dibandingkan rata-rata Nasional.

Selain itu, pemerintah perlu merumuskan sumber-sumber pembangunan ekonomi lainnya yang dapat meningkatkan kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap nilai perekonomian Provinsi dan Nasional secara keseluruhan. Fokus pemerintah untuk meningkatkan aktivitas perekonomian dapat terarah di masing-masing sektor perekonomian yang berdasarkan pada analisis *Location Quotient* (LQ). Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dapat mempertahankan pembangunan pada sektor-sektor yang sudah unggul, seperti sektor primer (namun dengan meningkatkan nilai tambahnya, diantaranya melalui hilirisasi). Namun, di masa mendatang, perekonomian daerah Kabupaten Gorontalo harus secepatnya didorong pada kemajuan sektor lainnya terutama sektor jasa atau industri, sehingga *level of dependency* kepada sektor primer semakin berkurang. *Shifting* perekonomian dari sektor primer ke sektor lainnya harus perlahan dan *by design* dilakukan karena sektor primer sesuai sifatnya bersifat rentan terhadap perubahan alam.

Sektor jasa/ekonomi kreatif harus terus didorong dan menyatu dengan identitas asli masyarakat Gorontalo Utara sebagai pengelola agraris, sehingga diharapkan menjadi *second driver* terhadap sinergitas perkembangan aktivitas ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif identitas lokal dari sektor kelautan/maritim yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan

mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual adalah harapan bagi ekonomi Nasional ataupun daerah untuk bangkit, bersaing, dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.

Terkait hubungannya dengan kemiskinan, secara tren, penurunan angka kemiskinan selama 10 tahun terakhir semakin melandai. Hal tersebut bisa bermakna bahwa segenap program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan telah berkurang efektivitasnya. Jika menggunakan skenario *business as usual*, menurut beberapa akademisi, tingkat kemiskinan di Provinsi Gorontalo tidak akan banyak berubah, yang menggambarkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus lebih "kreatif". Secara statistik menunjukkan, karakter penduduk miskin di Gorontalo mayoritas berada di perdesaan, dan tidak dapat dipungkiri bahwa mata pencaharian penduduk di perdesaan mayoritas sebagai petani (dalam definisi luas) dengan program unggulan yang dilaksanakan salah satunya mendorong produktivitas jagung. Timbul pertanyaan, sejauh mana efektivitas dari program pertanian jagung dalam relevansinya dengan upaya penurunan kemiskinan terutama di perdesaan karena di lapangan ditemukan fakta bahwa para petani ternyata hanya penggarap, atau jika memiliki lahan pun ukurannya tidak masuk skala ekonomis (dibawah 2 Ha). Untuk itu, jika ternyata disinyalir sudah berkurang efektivitasnya, perlu dicari *contingency plan* terhadap upaya penurunan kemiskinan, yang salah satunya sudah dikemukakan sebelumnya melalui upaya mendorong sektor jasa atau reformasi agraria agar para petani memiliki lahan yang cukup dan masuk skala ekonomis untuk digarap.

Sementara itu, indikator lain yang bisa dianalisa dari output ekonomi tahunan yaitu nilai PDRB perkapita. Secara nominal, PDRB per kapita tahun 2023 mencapai Rp31,71 (dalam jutaan). Berdasarkan perbandingan *year on year* (yoy), laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara mencapai 4,31 persen di tahun 2023, lebih rendah dibandingkan LPE Provinsi Gorontalo dan Nasional yang masing-masing 4,50 dan 5,04 persen. Meskipun PDRB per kapita terus meningkat seiring pertambahan tahun, namun hal tersebut termasuk rendah pun jika dibandingkan dalam skup Provinsi Gorontalo, dan sedikit banyak juga karena faktor pembagi (jumlah penduduk) yang tidak

banyak berkembang. Untuk itu, produktivitas dari mesin ekonomi Gorontalo Utara perlu dikembangkan, tidak hanya mengandalkan sektor primer, perlu juga menggunakan instrumen lainnya, seperti sektor industri. Rencana Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK) yang mulai digodok sejak tahun 2018 perlu dipercepat penyelesaian Perda-nya agar mampu mewujudkan pembangunan industri yang mandiri, berdaya saing, dan bisa memajukan kesejahteraan rakyat. Selain itu, agar lebih optimal, diperlukan langkah implementasi yang lebih intensif serta didukung oleh peningkatan intensitas promosi dan publikasi agar menarik investasi.

Dalam bidang pariwisata, pengembangan yang dilakukan selama ini lebih mengarah kepada ekstensifikasi objek wisata terutama pada perluasan peran dari desa melalui BUMDesa. Hal tersebut memang penting, namun yang lebih krusial adalah bagaimana objek-objek wisata yang telah ada sekarang ditingkatkan perannya melalui upaya revitalisasi atraksi dan sarana prasarana/amenitas wisata (seperti pembangunan jalan, misalnya di pantai berpasir putih yang berada di Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola yang belum terkoneksi jalan) serta penyusunan konsep kunjungan kawasan wisata yang lebih matang melalui inovasi yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut, dengan demikian, diharapkan kunjungan meningkat yang berimplikasi pada peningkatan PAD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya intensifikasi sektor pariwisata, perlu dilakukan juga pendampingan terhadap pelaku usaha, khususnya BUMDesa dan pelaku usaha ekonomi kreatif. Selain itu, harus didukung juga dengan kelembagaan yang kuat, jejaring informasi yang luas, penguatan kapasitas pelaku usaha, serta penghargaan terhadap kekayaan intelektual sebagai upaya menumbuhkan *spirit* untuk terus berkembang dan menghasilkan karya-karya baru.

Dalam peningkatan kinerja sektor wisata untuk pengembangan wilayah, dalam konteks Kabupaten Gorontalo Utara, perlu diselesaikan berbagai permasalahan yang biasanya menjadi *constraint*, terutama permasalahan

lahan yang terletak pada lokasi objek wisata. Bentang alam menyisir pantai menjadi potensi yang luar biasa, namun sia-sia dan tidak bisa menjadi objek intervensi jika permasalahan tersebut belum diselesaikan, seperti contohnya yang sempat mengemuka beberapa lokasi pantai di Kecamatan Tomilito. Pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan pemerintah desa (yang berperan aktif) untuk menyelesaikan berbagai permasalahan lahan tersebut, serta perlu disiapkan *masterplan* sesuai dengan kondisi dan keunikan masing-masing lahan objek wisata.

Selama satu dekade terakhir, kemampuan fiskal Gorontalo Utara yang digambarkan oleh kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD relatif berjalan di tempat, sehingga pilihan kebijakan dalam pembangunan sangat terbatas. Secara rata-rata, PAD yang diperoleh berkisar 4 persen per tahun dari total Pendapatan Daerah, sehingga terjadi ketergantungan yang sangat besar terhadap porsi transfer dari pusat. Selain itu ditinjau dari Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, kemampuan keuangan Gorontalo Utara termasuk rendah, dengan status “Sangat Perlu Perbaikan” pada hampir seluruh komponen indeks yang meliputi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengalokasian anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, dan kondisi keuangan daerah.

Tahun-tahun mendatang menjadi masa yang penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara untuk dapat memantapkan berbagai reformasi kebijakan dalam melaksanakan transformasi ekonomi menuju pertumbuhan berkelanjutan. Investasi menjadi kunci dalam upaya penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kemiskinan, karena investasi menjadi semacam *window of opportunity* bagi Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pengelolaan potensi ekonomi melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dan kerja sama mutualistik antara investor dengan pengusaha lokal. Pun juga, investasi diharapkan menjadi medium *transfer of knowledge*, manajerial, dan teknologi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah.

Upaya fundamental dalam meningkatkan investasi yakni perlu melakukan reorientasi dari peran-peran tradisional ke arah peran-peran entrepreneurial.

Dalam hal kegiatan usaha dan investasi, birokrasi perlu memiliki komitmen untuk menciptakan iklim bisnis yang suportif, dengan tidak membebani dunia usaha dan investasi dengan prosedur yang rumit, mengingat investor hanya tertarik berinvestasi jika daerah menawarkan peluang keuntungan yang lebih besar dengan sedikit risiko. Sebagai contoh, perlu meningkatkan kinerja institusional seperti melalui pembentukan tim akselerasi investasi, dengan agenda antara lain melakukan optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ikut serta dalam ekspo dan promosi penanaman modal, studi banding perihal inovasi pelayanan, berikut pula di dalamnya merumuskan masterplan investasi, penyempurnaan regulasi yang menunjang kemudahan, kepastian, dan insentif berbisnis, pengembangan sistem informasi tentang potensi investasi, dan pengembangan kerjasama pembangunan.

Aspek-aspek tersebut menjadi penting, sehingga bila Kabupaten Gorontalo Utara memiliki iklim bisnis yang kondusif, dimungkinkan menjadi primadona investasi di masa depan. Sebaliknya, kegagalan dalam mendesain sistem kelembagaan, politik, keamanan, dan sosial budaya, tidak hanya akan mengakibatkan kegagalan dalam menarik investasi baru, namun juga gagal mempertahankan investasi yang sudah ada. Selain itu, daya tarik investasi juga ditentukan oleh sebuah prakondisi daya dukung ekonomi makro yang baik. Sulit bagi investor untuk masuk jika pertumbuhan ekonomi tidak menjanjikan. Aspek tersebut kerap tak disadari bahwa kondisi ekonomi makro merupakan salah satu faktor prakondisi yang menentukan, misalnya daya tariknya ditentukan oleh sejauh mana tingkat pendapatan per kapita atau daya beli masyarakat, pertumbuhan PDRB, pertumbuhan sektor bisnis primer, sektor sekunder (industri dan produksi), dan tersier (perdagangan, jasa, akomodasi) dapat menjadi ladang strategis bagi investasi, termasuk dalam hal ketersediaan infrastruktur daerah dan stabilitas biaya konstruksi yang relatif terjangkau (*Cost Construction Index*).

F. Tantangan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan dan Pemenuhan Pelayanan Infrastruktur Dasar

Pemerataan pembangunan seharusnya memiliki orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan untuk meningkatkan daya saing menuju

kemakmuran yang berkeadilan. Namun, dengan berbagai tantangan, masyarakat menganggap bahwa berbagai program pembangunan masih belum menyentuh seluruh lapisan dan wilayah masyarakat, yang dapat dilihat dari kesenjangan kemiskinan, tingkat pengangguran, serta pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya konektivitas antar wilayah. Jika melihat kepada wilayah pelosok perbatasan, ketimpangan pemerataan jelas terlihat terutama di ujung barat Gorontalo Utara, disparitas harga yang jauh berbeda menjadi tantangan tersendiri yang perlu diatasi.

Dewasa ini, isu pemerataan pembangunan dianggap sebagai jawaban dari masalah ketimpangan, yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antarwilayah, sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal. Untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai, yang juga merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah, karena penyediaan infrastruktur yang baik dapat berperan sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir, serta memiliki peranan sebagai *social overhead capital* yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Merujuk pada publikasi *World Development Report* (World Bank, 1994), infrastruktur berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Studi yang sama juga melaporkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7 persen sampai dengan 44 persen, variasi angka yang cukup signifikan.

Dalam upaya meningkatkan daya saing, selain upaya di atas, juga tantangannya dihadapkan pada meningkatkan *competitive advantage* dari berbagai kawasan atau pusat-pusat pertumbuhan di daerah. Di Gorontalo Utara berbagai kawasan khusus sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi bukan

hanya lokal, tapi juga regional dan provinsi, seperti kawasan Anggrek yang difungsikan sebagai lokasi pusat kegiatan wilayah dan strategis provinsi (KSP) karena terletak Pelabuhan Peti Kemas Anggrek dan kawasan pergudangan, Kawasan Kwandang sebagai PKSN, Kawasan Tolinggula yang akan diarahkan menjadi pusat kegiatan wilayah karena menjadi Kawasan Strategis Provinsi Gorontalo untuk sektor pertanian, begitu pula Kecamatan Atinggola yang merupakan Kawasan Strategis Perbatasan. Berbagai kawasan tersebut karena strategis diperlukan perencanaan pengembangan dan pemanfataan wilayah dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan dalam perizinan dan pengendalian tata ruang, juga diperlukan sarana pendukung konektivitas wilayah yang baik.

Dalam hal pemenuhan dan ketersediaan sarana prasarana terkait infrastruktur dasar yang meliputi infrastruktur listrik, infrastruktur telekomunikasi, penyediaan jalan, permukiman atau perumahan layak huni, penyediaan air bersih, serta sistem drainase, di wilayah Gorontalo Utara masih belum optimal, terutama di wilayah perbatasan. Dalam hal pemenuhan penyelenggaraan jalan, dari total 532,16 Km jalan kabupaten yang ada di Gorontalo Utara (berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor SK.364.IX.2022), hanya sekitar 50 persennya yang sudah dikategorikan berkondisi mantap berdasarkan evaluasi tahun 2023. Sedangkan dalam pelayanan ketersediaan sanitasi dan akses air minum layak, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak di Gorontalo Utara berdasarkan Susenas 2022 (BPS) baru mencapai 81,80 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan capaian Provinsi Gorontalo di angka 79,82 persen. Sedangkan pada akses sumber air minum layak, sudah mencapai angka 89,47 persen, masih jauh dibawah capaian Provinsi Gorontalo yang sudah mencapai 96,16 persen, bahkan capaian Kabupaten Gorontalo Utara pun masih terpusat di wilayah Kecamatan Kwandang dan sekitarnya. Pada sektor penyediaan rumah layak huni, kondisi rumah layak hanya mencapai 63,03 persen masih lebih rendah dibandingkan 69,48 capaian Provinsi Gorontalo. Luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati Gorontalo Utara Nomor 47/III/2022, di Gorontalo Utara masih terdapat 12 kawasan kumuh dengan mencakup luasan 123,67 Ha. Pada penyelenggaraan Cipta Karya atau pengairan, cakupan daerah irigasi dengan kondisi baik hanya mencakup sekitar 36 persen area, sehingga saat

musim kemarau terjadi kekeringan lahan yang tinggi. Pada pemenuhan energi listrik, bangunan/residensial yang sudah diterangi sudah hampir mencapai 33.000 rumah/sambungan atau hampir mencapai 100 persen dari seluruh bangunan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan pada capaian Provinsi Gorontalo angka yang dicapai sudah berada pada 98,43 persen. Pemenuhan energi listrik sebagai salah satu komponen dalam mendorong kemampuan konsumsi dan investasi juga dipenuhi dengan telah beroperasinya PLTU yang melayani kebutuhan listrik di Kawasan Sulbagut sebesar 2x50 MW. Proyek PLTU Sulbagut-1 merupakan bagian dari Program Listrik Nasional 35.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong peningkatan rasio elektrifikasi.

Beberapa capaian pemenuhan layanan infrastruktur dasar di atas menunjukkan pekerjaan rumah bagi pemerintah masih sangat banyak. Diharapkan di masa depan, pembangunan infrastruktur dasar lebih masif, fokus, terukur, dan terstruktur, sehingga diharapkan dapat mengakselerasi pemerataan pembangunan dan bergeraknya ekonomi produktif rakyat, memperlancar pertukaran barang dan jasa, sehingga seluruh wilayah dapat menjadi bagian penting dari rantai produksi lokal dan regional (*local and regional production chain*).

G. Meningkatnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan serta Potensi Bencana

Perencanaan dan implementasi pembangunan saat ini harus dapat menjamin keberlanjutan proses pembangunan bagi generasi yang akan datang. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan perlu dikedepankan untuk meminimalisir degradasi mutu lingkungan yang akan dan sudah terjadi saat ini. Gambaran kondisi dan permasalahan bidang lingkungan berupa terbatasnya daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) dan belum optimalnya pengelolaan sumber daya hutan serta penanganan ketahanan iklim dan pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Permasalahan lainnya yang membutuhkan penanganan yaitu belum optimalnya mitigasi risiko bencana, yang disebabkan oleh penurunan kualitas air, udara, air laut, serta akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut bisa dilihat dari capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten

Gorontalo Utara yang terus menurun, dari kisaran 76 persen, hingga terakhir sudah berada di kisaran 75 persen. Capaian terendah dari komponen nilai IKLH berada pada tutupan lahan dan air, sehingga perlu upaya yang serius dari pemerintah daerah untuk meminimalisir degradasi pada kedua komponen tersebut. Pembangunan fisik juga harus terus mempedomani RTRW dan melihat daya dukung lingkungan sehingga potensi bencana yang melibatkan kerusakan alam dan ekosistem dapat ditekan.

Dari 35 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Gorontalo Utara, pemantauan kualitas air sungai hanya dilakukan pada 6 (enam) sungai karena keterbatasan anggaran dan untuk kepentingan perkembangan cemarnya, yakni Sungai Motomingo, Sungai Poso, Sungai Ilangata, Sungai Monano, Sungai Biau, dan Sungai Wubudu. Dari hasil uji yang dilaksanakan pada tahun 2020, keenam sungai tersebut masuk dalam kategori “Cemar Sedang”. Penyebab cemar dari 6 sungai tersebut diketahui karena banyak terdapat kegiatan manusia, baik pembangunan maupun kegiatan industri lainnya, bahkan kegiatan pengambilan material galian yang dilakukan di sepanjang aliran sungai. Di masa mendatang, pengujian status mutu air sungai ini perlu dilakukan pada sungai-sungai lainnya agar setiap wilayah dapat dipantau tingkat pencemarannya.

Seiring dengan tekanan pembangunan dan tuntutan praktek pertanian yang tidak berkelanjutan, luasan lahan kritis dan laju deforestasi setiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2022 sekitar 50 ribu Hektar lebih atau setara 30 persen lahan di Gorontalo Utara termasuk kritis, baik yang terletak di dalam maupun luar kawasan, yang menunjukkan upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan semakin krusial karena hutan merupakan komponen penting dalam memerangi perubahan iklim dan pencegahan bencana alam, serta mampu berkontribusi pada kemakmuran dan kesejahteraan generasi sekarang dan masa depan.

Hal lainnya adalah belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana. Risiko bencana harus tetap menjadi perhatian dalam pembangunan wilayah dan harus dilakukan identifikasi karena Gorontalo Utara termasuk dalam wilayah yang *disaster prone area*. Indeks Risiko Bencana di

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki ancaman bencana yang beragam, diantaranya tsunami dan gempa bumi karena berada di tepian Samudra Pasifik dan jalur patahan/sesar Gorontalo. Sesar Gorontalo terdiri dari 2 patahan, Utara dan Selatan, khususnya segmen utara melintasi 11 desa dari 2 kecamatan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki indeks risiko "Sedang" namun dengan komponen penyusun risiko bencana yang berkategori "Tinggi" maka diperlukan partisipasi dari masyarakat. Diperparah dengan kemampuan resiliensi yang rendah tercermin dari Indeks Ketahanan Daerah yang rendah. Setiap masyarakat berkewajiban untuk: a) Menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. b) Melakukan kegiatan penanggulangan bencana. c) Memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Terkait dengan isu dan permasalahan GRK atau *carbon footprint*, hal tersebut tanpa kita sadari telah banyak mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk di Gorontalo Utara. Jejak karbon yang kita hasilkan sendiri akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakat, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, perubahan ekosistem laut, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Upaya pengendalian jejak karbon merupakan hal yang serius, hingga diterjemahkan pada beberapa tujuan dalam SDG's, seperti tujuan 11 "Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan", tujuan 14 "Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Ekosistem Lautan", dan tujuan 15 "Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan". Isu ini menjadi isu Nasional bahkan dunia karena berhubungan dengan ancaman kerusakan lingkungan di masa depan.

Berbagai upaya bisa dilakukan untuk mengurangi jejak karbon, terutama menerapkan *zero waste style,* yakni secara bijak menggunakan produk kemasan sekali pakai agar tidak menumpuk menjadi sampah yang dibuang di TPA. Namun upaya pengelolaan sampah tersebut tidak optimal, selain karena minimalnya fasilitas pengelolaan sampah, juga kesadaran masyarakat yang

rendah. Fasilitas TPA saat ini hanya terdapat di 1 lokasi, dan daya layannya pun terbatas dan belum menerapkan *sanitary landfill*. Ke depan Pemerintah Daerah harus mampu mendorong pemilahan sampah dari mulai rumah tangga dan perkantoran serta entitas usaha sehingga memberikan peluang untuk menerapkan ekonomi sirkular (*circular economic*) berupa pemanfaatan sampah-sampah dari bahan tertentu untuk didaur ulang menjadi bahan kerajinan tangan atau bahan baku industri, bahan baku pupuk pertanian, maupun peruntukan lainnya.

Upaya pengendalian GRK di Gorontalo Utara belum optimal, seperti masyarakat yang bahkan belum memahami penyebab dan dampaknya, atau bagaimana cara meminimalisirnya, begitu pula terjadi pada tataran Pemerintah Daerah yang pelaksanaan program dan kegiatan belum optimal mendukung penurunan dampak GRK. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara sudah pernah menyusun dokumen kajian penurunan GRK, namun hal tersebut dilakukan pada tahun 2012 sehingga membutuhkan kajian baru sebagai upaya mendukung pencapaian indikator SDG's nasional pada penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Kemudian dapat dilakukan beberapa upaya kecil lainnya seperti: menghemat penggunaan energi listrik, penggunaan air bersih seefektif mungkin, penggunaan kendaraan bermotor yang hemat bahan bakar, mengurangi penebangan pohon yang tidak perlu, perbanyak makanan sayuran dan buah, dan lain sebagainya.

H. Tantangan untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pelayanan Publik Belum Prima

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good govenance*) merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB). Pada tahap ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Dilihat dari capaian nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, membutuhkan berbagai upaya akselerasi pada tahun-tahun berikutnya. Poin-poin yang masih menjadi pekerjaan rumah yang substansial

yaitu pelaksanaan sistem merit, SPBE, prefesionalisme ASN, kualitas pengadaan barang dan jasa, maturitas SPIP, kualitas pelayanan publik, dan kualitas pengelolaan kearsipan. Selain itu, sebagai bagian dari reformasi birokrasi, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Gorontalo Utara masih menyisakan permasalahan. Stagnannya capaian nilai SAKIP menggambarkan perbaikan secara sistematis dan struktural terhadap upaya pencapaian tujuan dan sasaran daerah belum optimal. Upaya peningkatan akuntabilitas juga seharusnya digambarkan pada kualitas manajemen aset yang masih belum optimal. Saat ini, kendala dalam pengelolaan aset tersebut masih jauh dari ideal karena tantangan yang dihadapi terkait aset masih belum jelas keberadaannya serta peruntukan yang tidak jelas, yang paling substantif hal-hal tersebut mengakibatkan aset masih menjadi beban anggaran untuk pemeliharaan ketimbang menjadi objek yang produktif bagi daerah dalam bentuk PNBP sehingga peran APIP menjadi krusial.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara juga berkomitmen untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), namun berdasarkan penilaian maturitas SPIP masih berada di area batas minimal 3, sehingga dianggap kinerja pengendalian intern masih belum terlalu dewasa. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang terpercaya upaya lainnya bisa dilakukan dengan menerapkan digitalisasi pada sektor pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Melalui evaluasi SPBE, diharapkan dapat melihat capaian kemajuan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas penerapan SPBE yang saat ini tingkat kedewasaan penerapan sistem dalam pelaksanaan pelayanan publik di Gorontalo Utara yang pada tahun 2022 masih kategori “Kurang”. Sejalan dengan kedewasaan dalam penggunaan teknologi informasi, kategori inovasi Gorontalo Utara pun masih belum optimal, meski pada tahun 2022 masuk pada kategori “Inovatif” pada Indeks Inovasi Daerah, posisinya di Provinsi Gorontalo relatif lebih rendah dibandingkan

kabupaten/kota lainnya. Yang lebih krusial sebenarnya adalah sumbangsih dari hasil inovasi yang belum memberikan warna dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pemanfaatan hasil riset dan kajian yang masih rendah.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi, pelaksanaan sistem merit masih sangat rendah, sehingga dianggap pengelolaan sumber daya manusia masih secara parsial atau belum memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, penggajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Untuk itu, di masa mendatang, pelaksanaan sistem merit harus dilaksanakan secara konsisten mulai dari proses rekrutmen ASN, penggajian dan *reward*, pengukuran kinerja, promosi jabatan, hingga pengawasan.

Dalam hal tingkat profesionalisme ASN yang digambarkan pada Indeks Profesionalitas ASN, capaiannya masih sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan kualitas ASN di Gorontalo Utara yang digambarkan oleh kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya masih sangat rendah. Bagi masyarakat, hal tersebut dapat menjadi instrumen kontrol sosial agar ASN yang ada bertindak profesional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dalam hal tingkat pendidikan, saat ini SDM ASN di Gorontalo Utara hanya sebesar 8 persen yang sudah memiliki gelar Master atau Doktor, bahkan lebih kecil lagi yang berasal dari universitas ternama. Hal tersebut menyebabkan upaya transformasi pemerintahan dan pelayanan publik yang digerakkan oleh kalangan ASN terdidik dan yang berkeahlian tinggi tidak optimal. Untuk itu perlu insentif khusus agar ke depan ASN di Gorontalo Utara termotivasi dalam mengejar level pendidikan setinggi-tingginya, seperti mendorong perolehan beasiswa melalui tugas belajar (baik sumber pendanaan internal atau eksternal) dengan tanpa mengurangi penghasilannya, atau dana bantuan penelitian bagi ASN Tugas Belajar.

Inti dari hadirnya tata kelola pemerintahan yang baik akan bermuara pada tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan berbagai sektor pelayanan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan kepada seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Di Kabupaten Gorontalo Utara, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan kaidah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 belum dilakukan secara holistik pada seluruh perangkat daerah yang terutama bersentuhan langsung dengan masyarakat.

I. Upaya Pelestarian Warisan Budaya dan Sejarah Kurang Optimal

Provinsi Gorontalo (dan Kabupaten Gorontalo Utara) merupakan daerah yang sangat kental aroma budayanya. Tidak kurang dari mulai manusia lahir, hidup, hingga meninggalnya, seluruhnya memiliki ritual budaya khusus yang unik dan mengandung unsur agama, khususnya Islam. Bahkan hingga muncul falsafah yang dijunjung masyarakat Gorontalo yaitu: "*adati hula-hula'a to sara'a, sara'a hula-hula'a to kuru'ani*", adat bersendikan syariat, dan syariat didasarkan pada Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa segala sesuatu pekerjaan/aktivitas hendaklah selalu mengingat aturan adat dan agama (tidak bertentangan satu dengan lainnya).

Karena besarnya pengaruh adat (dan agama) pada setiap aktivitas masyarakat, peran kebudayaan tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan. Pemerintah harus menyadari bahwa di masa (terutama resesi) pemulihan ekonomi, ekonomi lokal masyarakat yang masih diwarnai unsur adat adalah aset pembangunan. Saat pandemi, ekonomi yang bertumpu pada kapital-kapital besar runtuh, tak cukup elastis untuk bisa diguncang krisis saat masyarakat perdesaan yang masih menggunakan kaidah budaya justru dapat memenuhi kebutuhan dasarnya terutama pangan.

Dalam RPJPD Gorontalo Utara 2009-2029, disebutkan dalam penjelasan dari Visi Jangka Panjang Daerah yaitu pembangunan dilaksanakan salah satunya untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya dan religius, sehingga dalam

setiap tahapan pembangunan perlu dilakukan upaya-upaya pendorong sekaligus pelestarian budaya dengan cara membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan dalam upaya melestarikan dan memajukan budaya. Di RPJPD periode berikutnya, upaya-upaya dalam melanjutkan pembangunan ini patut dilanjutkan dan dilestarikan.

Secara umum, kendala dalam pelestarian budaya dan sejarah adalah perubahan bentuk budaya karena kehadiran globalisasi. Globalisasi yang saat ini berkembang pesat tidak bisa dihindari karena merupakan suatu tuntutan zaman, namun pengaruh budaya luar yang masuk melalui media, teknologi, dan interaksi antarbudaya jika tidak disikapi secara bijak membawa perilaku hidup yang tidak cocok dengan falsafah hidup masyarakat, yang dapat mengikis dan menggeser nilai-nilai tradisi dan kearifan daerah. Untuk itu masyarakat kita wajib, dan dinaungi oleh pemerintah, dalam hal melestarikan budaya daerah. Peran masyarakat penting sebagai pembawa warisan budaya yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang tradisinya, serta penjaga tradisi yang dapat meneruskan pengetahuan, praktik, dan nilai-nilai budaya kepada generasi berikutnya.

Dalam era globalisasi, interaksi antarbudaya semakin meningkat. Hal ini dapat membawa manfaat dalam hal pertukaran budaya dan pemahaman yang lebih luas. Namun, dalam proses tersebut, ada risiko homogenisasi budaya, di mana praktik dan nilai-nilai lokal menjadi terpinggirkan oleh budaya dominan yang berasal dari tempat lain. Dengan menjaga warisan budaya, masyarakat dapat mempertahankan keberagaman budaya yang kaya, menjaga keseimbangan antara adopsi budaya baru dan pelestarian budaya lokal.

Berdasarkan data dari perangkat daerah pengampu Urusan Kebudayaan, saat ini terdapat beberapa perayaan religius budaya di Gorontalo Utara, seperti *Tulude* dan Mandi Syafar. Pelaksanaan budaya tersebut selain sebagai bentuk rasa syukur atas hasil alam dan mengharapkan berkah dari Tuhan YME, juga menggiatkan pariwisata dan membina kerukunan umat beragama, karena perayaan budaya tersebut terbuka untuk semua kalangan dan berbagai latar belakang agama. Berbagai kegiatan budaya yang dilaksanakan sebagai ejawantahan dari upaya meningkatkan kerukunan umat beragama. Indeks

Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebagai enumerasi dari tingkat hubungan sosial antar umat beragama berada pada taraf "Kurang" yang disusun dari 3 komponen Toleransi, Kerjasama, dan Kesetaraan. Melihat capaian tersebut perlu didorong peran aktif yang lebih besar dan serius dari Kantor Wilayah Kementerian Agama bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meningkatkan iklim saling menghargai dan menghormati antar pemeluk agama di Provinsi Gorontalo.

Pada dimensi *heritage*, sedikitnya ada 10 situs bernilai sejarah di Gorontalo Utara yang dipersiapkan menjadi bagian Cagar Budaya. Saat ini, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) telah mendorong 8 lokasi untuk diakui secara Nasional sebagai bagian dari warisan, namun baru 2 lokasi yang sudah diusulkan sebagai Cagar Budaya Nasional, yaitu Situs Benteng Orange dan Situs *Defense Pillbox*. Sedikitnya situs sejarah di Gorontalo Utara yang diajukan oleh TACB menjadi preseden kurang optimalnya pemeliharaan atas warisan situs sejarah di Gorontalo Utara.

Rangkaian pemeliharaan dan pelestarian situs sejarah dan upaya pemajuan budaya relevan dengan target Provinsi Gorontalo untuk menjadi salah satu daerah yang memiliki jaringan *geopark*. Lokasi yang didorong menjadi *geo and cultural tourism* di Gorontalo Utara yaitu situs sedimentasi formasi Dolokapa, lava dasit Koluwoka, Air Terjun Zuriati, bangunan mercu suar di Pulau Lampu, batu pasir Lokodidi, batu gamping Otajin, Pantai Lokpon, Benteng Orange, dan Benteng Maas. Rangkaian *geosite* tersebut bukan hanya bernilai sejarah, tapi juga bernilai ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya sehingga harus dipelihara dan dirawat.

J. Iklim keamanan dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan

Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas diantaranya adalah terpenuhinya rasa aman, damai, dan tentram dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakan peraturan dan adanya kepastian hukum. Tingkat keamanan dan ketertiban daerah dapat digambarkan oleh indikator angka kejahatan. Di Gorontalo Utara, angka kejahatan sepanjang tahun 2023 telah menyentuh angka yang sangat tinggi. Terdapat 203 kasus kejahatan selama setahun yang dilaporkan dalam ranah

hukum Polres Gorontalo Utara, yang berarti risiko kejahatan telah mencapai skor 155/100.000 penduduk dan dengan tingkat penyelesaian yang rendah di 51 persen. Angka yang tinggi tersebut perlu ditekan melalui peran aktif masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum dan berusaha mentaati norma yang berlaku di masyarakat.

3.3 ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan baik skala lokal, regional, nasional, maupun global karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis yaitu kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, akan berdampak pada masa depan, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Rumusan dari isu strategis Kabupaten Gorontalo Utara rentang tahun 2025 hingga 2045 mencakup isu global, isu nasional, isu regional, dan lokal yang memiliki keterkaitan dan integrasi, yang disusun dengan mempertimbangkan serangkaian konsideran sebagai berikut:

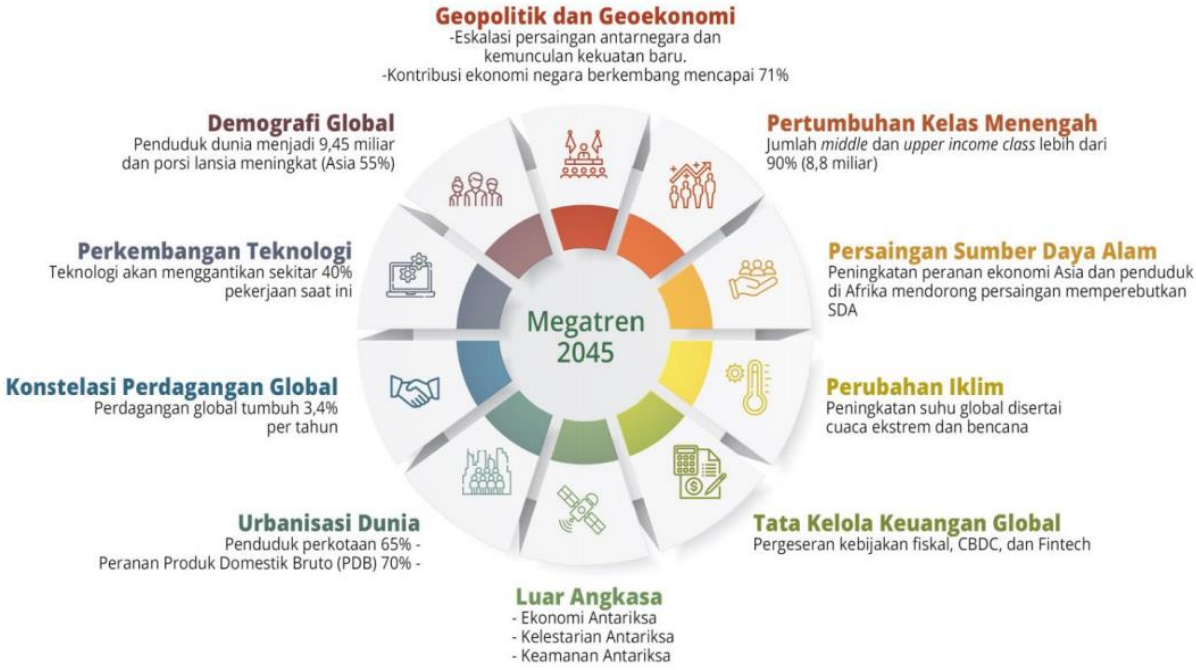
- Permasalahan strategis dan substansial berdasarkan hasil analisa kinerja pembangunan di RPJPD sebelumnya;
- Agenda Pembangunan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045;
- Kebijakan pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW Gorontalo Utara;
- Berbagai Agenda Pembangunan Pemerintah Pusat dalam RPJPN 2025-2045, Visi Indonesia Emas 2045 yang memiliki koneksi dengan pembangunan di Gorontalo Utara;
- Kebijakan dalam RPJPD kabupaten tetangga;
- Hasil evaluasi capaian SDG’s;

- Telaah isu-isu aktual di tingkat lokal, regional, nasional, hingga global.

3.3.1 Isu Strategis Global yang Dihadapi Indonesia

Tantangan global ke depan akan semakin kompleks, karena terjadi perubahan yang cepat di semua bidang, atau yang disebut dengan megatren global. Perubahan global tersebut merupakan kondisi transformasi berskala besar, dalam jangka panjang, dan bersifat masif yang diakibatkan terutama oleh pergeseran gaya hidup manusia dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital dan teknologi komputasi, termasuk di dalamnya penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*).

Dalam menyongsong tahun 2045, terdapat beberapa tantangan global/megatren yang akan dihadapi dunia. Megatren tersebut terdapat dua sisi mata uang, akan menghasilkan hal positif pada potensi peningkatan kemajuan sosial ekonomi, dan sisi negatif dalam hal menghasilkan disrupsi, seperti dalam hal perkembangan demografi, geopolitik dan geoekonomi, perkembangan teknologi, urbanisasi global, perdagangan global, tata kelola keuangan, pertumbuhan kelompok penduduk kelas menengah, peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan luar angkasa.



Dalam hal perkembangan demografi global, ditenggarai penduduk dunia diproyeksikan akan berjumlah 9,45 Miliar jiwa, dengan 55 persen diantaranya akan berada di Benua Asia. Jumlah yang masif tersebut akan memberikan

tantangan dalam hal pemenuhan sumber daya alam dan ketersediaan lahan. Disamping itu dunia dihadapkan pada meningkatnya penduduk usia tua karena berkurangnya tingkat kematian dan penurunan tingkat kelahiran terutama di negara-negara maju.

Dalam hal geopolitik dan geoekonomi, ditandai dengan eskalasi persaingan antar negara terutama negara adidaya dan kemunculan kekuatan baru, dan di saat yang bersamaan kelompok negara berkembang akan berkontribusi hingga 71 persen terhadap ekonomi dunia. Kawasan Indopasifik sebagai zona maritim diproyeksikan akan menjadi zona baru pertumbuhan ekonomi dunia sehingga kestabilan kawasan menjadi hal yang krusial. Peranan sektor yang mengandalkan komoditas sudah tidak lagi dominan sebagai pendorong ekonomi di negara berkembang, sehingga perbaikan kelembagaan yang mendorong investasi yang berjangka panjang akan menjadi pilar utama mempengaruhi kemajuan.

Dalam hal perkembangan teknologi, saking cepatnya akan menimbulkan disrupsi teknologi sehingga beberapa jenis pekerjaan akan tergantikan oleh penggunaan teknologi, hingga mencapai 40 persen. Hal tersebut akan sangat mengganggu jika masyarakat tidak memiliki kemampuan adaptif yang baik, yang perlu ditopang oleh kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Saat pandemi, disrupsi teknologi sudah mulai terlihat dan diakselerasi hingga masuk pada tataran dunia usaha seperti UMKM dan koperasi di Indonesia. Yang paling krusial, di masa depan juga disrupsi akan sangat mempengaruhi dunia manufaktur termasuk dalam hal penggunaan teknologi hijau, dunia pendidikan dalam hal penggunaan teknologi AI dalam transfer ilmu pengetahuan, dunia pemerintahan dalam mendorong pemerintah untuk mendesain ulang proses bisnis pelayanan publik dan mengubah pola interaksi antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah termasuk dalam hal penyusunan regulasi dan kebijakan.

Dalam hal urbanisasi dunia, di tahun 2045 diproyeksikan penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan mencapai 65 persen, dan 95 persen diantaranya akan berada di negara berkembang. Namun kondisi tersebut membawa tantangan bagi negara berkembang karena bersamaan tekanan penduduk

tersebut pembangunan perkotaan di *emerging economies* umumnya kurang memadai dan kurang terencana baik yang berpotensi berdampak terhadap pelayanan secara umum, seperti pelayanan kelistrikan, air, sanitasi, drainase, dan jalan/transportasi. Perkembangan pada kota yang tidak terencana baik akan mendorong perkembangan di sekeliling kota tersebut dan berakibat pada konflik tata guna lahan dari lahan pertanian ke keperluan permukiman, industri, jasa/perdagangan, maupun penggunaan ekonomi lainnya. Peningkatan penduduk perkotaan juga mendorong penggunaan teknologi pintar, dan penggunaan mahadata bagi pengelolaan kota dan memudahkan kolaborasi lintas ruang dan waktu. Pengarusutamaan penggunaan teknologi hijau juga menjadi ruang dalam pembangunan kota yang bukan hanya bersifat humanis, juga ramah lingkungan.

Dalam hal konstelasi perdagangan global, di masa depan akan tumbuh 3,4 persen/tahun. Terjadi pergeseran peranan negara berkembang dalam ekonomi global yang mendorong perdagangan berpusat di Asia-Afrika. Negara-negara seperti India, Cina, dan negara-negara ASEAN menjadi motor perdagangan internasional intra Asia ditopang oleh pertumbuhan demografi di negara-negara tersebut dan kawasan Afrika. Peluang kawasan yang demikian mendorong kolaborasi produksi bersama dan rantai pasok global semakin menguat dan terdiversifikasi yang akan berpusat di kawasan ASEAN karena infrastruktur yang memadai, pangsa pasar yang substansial, dan kompetensi SDM yang berkualitas. Diversifikasi dan kompleksitas produksi akan ditopang oleh perkembangan teknologi digital. Teknologi juga akan mengurangi *transaction cost* dan mempercepat perubahan struktur perdagangan seperti dalam hal peningkatan pemanfaatan hilirisasi sumber daya alam dan mineral.

Dalam hal tata kelola keuangan global, desain kebijakan fiskal global dan nasional akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan demografi. Belanja pemerintah komposisinya akan meningkat pada komponen belanja perlindungan sosial dan pensiun, di saat bersamaan potensi penerimaan juga meningkat karena produktivitas dan jumlah penduduk yang meningkat. Penggunaan uang digital seperti *crypto-currency* akan meningkat yang akan

meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan namun membawa potensi stabilitas makro, moneter, dan sistem keuangan.

Dalam hal kondisi kelompok berpendapatan menengah, jumlah kelompok *middle* dan *upper class* akan berjumlah 8,8 Miliar, atau setara lebih dari 90 persen populasi dunia. Pergeseran kelompok tersebut terjadi dari yang sebelumnya berpusat di Amerika dan Eropa ke kawasan Asia terutama di India dan Tiongkok yang menimbulkan tantangan aspek sosial dan politik. Peningkatan proporsi tersebut mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru yang terkait dengan teknologi, fleksibilitas, dan mobilitas yang tinggi serta kebutuhan konsumsi yang lebih beragam.

Dalam hal persaingan pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan demografi di Afrika dan peranan ekonomi di Asia mendorong persaingan penguasaan dan pemanfaatan SDA seperti air, pangan, dan energi. Tingkat persaingan tersebut akan bergantung pada faktor permintaan dan penawaran, seperti efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, inovasi baru, serta perubahan pola konsumsi dan produksi.

Dalam hal perubahan iklim, peningkatan suhu global, cuaca ekstrem, dan bencana akan terus mewarnai aktivitas manusia. *Triple planetary crisis* (perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan kehilangan keanekaragaman hayati) akan mendorong perubahan tren dalam dinamika pembangunan global, seperti meningkatnya urgensi perubahan pola pembangunan lama yang konvensional ke praktik yang lebih berkelanjutan seperti aktivitas yang menghasilkan gas rumah kaca lebih rendah atau penerapan ekonomi sirkuler. Pelaksanaan ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon, dan paket-paket stimulusnya merupakan kebijakan dan strategi global di masa depan. Termasuk di dalamnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama karena tenaga air, matahari, dan nuklir akan semakin murah dan berkurang skala ekonominya.

Dalam hal pemanfaatan keluarangkasaan, trennya akan semakin meningkat karena pandangan bahwa luar angkasa merupakan warisan bersama umat manusia, sehingga kesepahaman tersebut membawa pada tiga isu utama: ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa. Untuk itu di

masa mendatang, negara-negara akan mendorong kapasitasnya masing-masing untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal kemampuan SDM dan pengembangan teknologi tingkat lanjut.

3.3.2 Telaahan RPJPN 2025-2045 terkait Isu dan Tantangan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Nasional dalam jangka panjang. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa telah banyak kemajuan yang dicapai selama masa tahun 2005 hingga 2025, namun Indonesia masih terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (*middle income trap*) selama 30 tahun yang diwarnai oleh tingkat kemiskinan tinggi serta kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Indonesia juga dihadapkan tantangan baru yang bersifat global yang diakibatkan oleh pergeseran demografi, perubahan teknologi yang sangat cepat, perubahan geopolitik dan geoekonomi, serta perubahan iklim. Dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, berbagai tantangan muncul yang meliputi aspek ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur, serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Isu dan tantangan tersebut yakni:

A. Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Tergambar pada TFP Indonesia yang hanya 0,66 selama periode 2005-2019. Dibandingkan Korea Selatan saat menuju negara maju periode 1971-1995 yang mencapai 1,61, dan Tiongkok sebesar 1,60 periode 2005-2019, Indonesia jelas tertinggal yang disebabkan oleh kualitas SDM terutama perempuan jauh tertinggal, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi potensial melambat.
B. Lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Kemampuan pada tiga bidang ini sangat penting dalam pencapaian Visi Indonesia Emas untuk memiliki daya saing bangsa. Kendala pencapaiannya terdapat pada komitmen pemerintah dalam hal anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen

dari PDB, jauh dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (1,31 persen) dan Malaysia (1,04 persen) pada tahun 2020.

C. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai. Jumlah peneliti per sejuta penduduk di Indonesia hanya mencapai 388, yang jauh lebih rendah dibandingkan negara lainnya, seperti Thailand (1.790), Singapura (7.287), dan Korea Selatan (8.408) di tahun 2019. Ekosistem riset juga masih lemah ditunjukkan oleh hasil riset yang tidak aplikatif. Dalam hal jumlah paten juga masih tertinggal jauh (1.445) dibandingkan Malaysia (1.863), Singapura (9.766), Korea Selatan (267.527) pada tahun 2021. H-Index Indonesia baru mencapai 284, relatif tertinggal dibandingkan Malaysia (415), Singapura (697), dan Korea Selatan (810). Selain itu juga tercermin pada rendahnya jiwa/kesadaran ilmiah masyarakat Indonesia.

D. Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah. Sektor manufaktur yang diharapkan sebagai motor pembangunan justru kontribusinya dalam PDB bertren menurun yang diakibatkan pelemahan sektor manufaktur, produktivitas faktor produksi yang rendah, kemampuan adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi yang terbatas, dukungan ekosistem industri yang terbatas di luar Jawa, serta ekonomi biaya tinggi akibat tingginya suku bunga dan biaya logistik. Sedangkan produktivitas pertanian rendah disebabkan lambatnya regenerasi, kekurangan keterampilan, keterbatasan dalam akses teknologi dan jasa keuangan, belum adanya standar proses, kelembagaan ekonomi yang lemah, serta daya dukung lahan yang berkurang.

E. Pemanfaatan potensi wisata belum optimal. Kinerjanya tidak optimal karena keterbatasan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, serta kapasitas pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan masih rendah. Hal lainnya preferensi pasar dan disrupsi teknologi dan digitalisasi. Pemanfaatan ekonomi kreatif juga belum memadai karena kekurangan dukungan dan kebijakan serta transformasi digital yang belum merata, inovasi dan pengembangan produk masih lemah, ekosistem komersilnya belum terbentuk, serta rendahnya akses ke pasar internasional.

F. Pemanfaatan potensi ekonomi laut belum optimal. Optimalisasi ekonomi biru dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta belum

berkembangnya SloC dan ALKI sehingga komposisi PDB kemaritiman masih dibawah 8 persen, diakibatkan oleh rendahnya pemanfaatan WPP dan pengembangan budaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan industri turunan yang memanfaatkan sumber daya laut, riset dan teknologi kelautan yang terbatas, kegiatan *illegal fishing* yang tinggi, serta regulasi dan tata kelola pemanfaatan ruang laut belum optimal.

G. Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi. Kontribusi yang tinggi pada penyerapan tenaga kerja tidak sejalan dengan kontribusi nilai tambah ekonomi. Tantangan yang dihadapi yakni sebagian besar tenaga kerjanya berkeahlian rendah dan bergerak di sektor yang bernilai tambah rendah; rendahnya penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha; kapasitas pengelolaan yang rendah; partisipasi yang rendah dalam rantai nilai produksi; serta rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil.

H. Produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, rata-rata hanya sebesar US$7.274,9 per pekerja, tertinggal dibandingkan rata-rata ASEAN sebesar US$8.449 per pekerja. Kendalanya kualitas SDM yang rendah (56,3 persen tenaga kerja masih didominasi pendidikan SMP ke bawah), *missmatch* antara lulusan jalur pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja, informasi tenaga kerja belum memerankan sebagai intelijen pasar tenaga kerja, respons pasar tenaga kerja Indonesia masih lambat terhadap perubahan cepat dalam hal jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

I. Pembangunan belum optimal menerapkan prinsip berkelanjutan. Untuk melaksanakan hal ini pembangunan perlu menerapkan ekonomi hijau secara menyeluruh, namun kendalanya ketergantungan terhadap energi fosil masih sangat tinggi.
   a. Hal tersebut dikarenakan akses energi yang belum merata dan berkualitas seperti pada akses listrik, rendahnya penggunaan energi terbarukan yang baru mencapai 12,30 persen di tahun 2022 dalam bauran energi Nasional, dan rendahnya efisiensi energi.
   b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pencemaran air, udara, dan tanah terjadi dampak dari *brown economy*. Timbulan sampah B3 telah mencapai

74 Juta Ton pada tahun 2022. Hanya 1 persen rumah tangga yang terlayani IPAL terpusat. Tantangan lainnya pemanfaatan SDA cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan yang eksploitatif, peningkatan penggunaan lahan untuk pertanian yang menyebabkan lahan kritis dan berkurangnya hayati, serta regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif pelaksanaan ekonomi hijau yang masih lemah.

J. Di tengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas. Kapasitas dan kapabilitas infrastruktur digital belum memadai baik dari sisi penawaran maupun permintaan dalam upaya mempercepat peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

K. Belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga integrasi ekonomi antarwilayah relatif terbatas. Pusat-pusat pertumbuhan masih berpusat di Jawa dengan kontribusi 57,8 persen PDB (2022). Infrastruktur konektivitas belum memadai dan belum optimal terintegrasi menyebabkan biaya logistik tinggi, banyak regulasi menghambat, dan kualitas kuantitas SDM yang tidak merata terutama di luar Jawa.

   a. Rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi, ditunjukkan oleh elastisitas pertumbuhan penduduk perkotaan terhadap pertumbuhan PDB per kapita perkotaan hanya mencapai 1,4; sedangkan di Tiongkok mencapai 3,00. Tingkat urbanisasi satu dekade terakhir mencapai 0,67 persen per tahun; sedangkan Tiongkok 1,21 persen. Hal demikian disebabkan keterbatasan keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan yang masih tinggi di kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan yang masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

L. Akses dan kualitas yang belum merata pada sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Pembangunan kesehatan dihadapkan pada transisi demografi yang menghasilkan peningkatan mobilitas penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi, serta perilaku hidup tak sehat. Sementara di sektor pendidikan, pembangunan dihadapkan pada mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan. Kendala dalam pencapaian

pembangunan pendidikan yakni layanan pendidikan belum merata karena disparitas partisipasi pendidikan antar wilayah dan sosial ekonomi yang masih tinggi.

a. Kualitas pendidikan yang masih rendah. Capaian PISA siswa untuk semua aspek sebesar 382,00; jauh tertinggal dibandingkan OECD lainnya 488,33. Kualitas pendidikan yang rendah diakibatkan sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran belum memadai, jumlah guru profesional berkompetensi tinggi terbatas dan belum terdistribusi merata. Kuantitas, kualitas, dan distribusi guru terbatas ditunjukkan kurang dari 50 persen guru yang memiliki sertifikat pendidik, serta pendidikan nonformal yang berkualitas belum memadai. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global rendah. Baru ada lima perguruan tinggi yang masuk pada top 500 dunia, yang tantangannya berada pada produktivitas riset dan inovasi perguruan tinggi. Meskipun kinerja publikasi meningkat selama periode 2011-2021, kuantitas publikasi belum diimbangi kualitas, ditunjukkan oleh rasio sitasi per publikasi yang masih rendah (0,39) di tahun 2021. Keterserapan ketenagakerjaan yang rendah juga sebagai akibat kualifikasi pendidikan yang rendah. Usia 15 tahun ke atas 59,98 persen diantaranya berpendidikan SMP ke bawah, di lain pihak hanya 40,49 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.
b. Akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan belum merata, pemahaman manfaat jaminan sosial tenaga kerja rendah. Pelaksanaan bantuan sosial masih terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, yang disebabkan data yang masih terfragmentasi dan belum termutakhirkan secara sistematis, pelaksanaan bantuan sosial belum adaptif dan mampu mendorong ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, daya ungkitnya rendah dan lingkungan yang belum inklusif terhadap kelompok rentan.

M. Tata kelola pemeritahan belum optimal. Terkait *hyper regulation* dan kualitasnya yang rendah telah menyebabkan tumpang tindih dan disharmoni regulasi, yang diakibatkan masih kuatnya ego sektoral, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, pemantauan dampak keberlakuan

regulasi lemah, kualitas dan kuantitas SDM belum memadai, serta partisipasi dalam penyusunan regulasi belum optimal.

a. Kelembagaan instansi publik masih terfragmentasi dan tidak efektif. Menyebabkan tumpang tindih pelaksanaan tupoksi organisasi serta melanggengkan ego sektoral.
b. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif, terutama pada kementerian/lembaga.
c. Belum terimplementasinya manajemen talenta di seluruh K/L/D, mengakibatkan suksesi pengisian jabatan strategis terhambat, talenta terbaik tidak terpetakan, kinerja dan kompetensi ASN rendah, mentalitas silo kuat, budaya dan etos kerja rendah, serta sistem penghargaan ASN berbasis kinerja belum terwujud.
d. ASN berada di posisi yang rentan terhadap intervensi politik, terutama di lingkungan pemerintah daerah.
e. Kualitas pelayanan publik belum merata. Standar pelayanan belum diterapkan merata, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih terdapat pungli. Proses digitalisasi terhambat disebabkan pembangunan infrastruktur digital belum merata, SDM yang terbatas, serta interoperabilitas data dan layanan belum terbangun.
f. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat. Ditandai masih terdapat persoalan tata kelola.
g. Transformasi digital di penyelenggara pemerintahan masih menghadapi tantangan. Diantaranya disparitas dukungan infrastruktur telekomunikasi dan informasi antar daerah, rendahnya literasi digital, tingkat kematangan instansi pusat dan daerah belum merata, dan lain sebagainya.

N. Demokratisasi belum optimal.

a. Salah satunya ditandai dengan permasalahan integritas yang masih terjadi pada partai politik, seperti banyak kader masih mengalami permasalahan hukum, melanggar standar etik, kesulitan mendapatkan calon pemimpin dan calon anggota legislatif, pengelolaan keuangan partai belum transparan dan akuntabel, serta pendanaan dari negara belum memadai.

b. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal. Disebabkan kesenjangan kapasitas SDM dan kelembagaan masyarakat sipil pada tingkat nasional dan daerah, kemampuan keuangan yang kurang, serta lingkungan yang kurang kondusif bagi masyarakat.
c. Prinsip keterbukaan pemerintah belum terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiadaan ko-kreasi antara aktor pemerintah dan masyarakat sehingga partisipasi masyarakat kurang optimal.

O. Kepastian dan penegakan hukum masih lemah. Pemulihan aset tindak pidana belum optimal, potensi pelanggaran HAM masih tinggi, pengawasan institusi penegak hukum di internal maupun eksternal masih lemah; budaya hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah. Dalam aspek politik, demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural sehingga berakibat pada *money politics,* kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi kurang, transparansi penggunaan dana publik kurang, sistem Pemilu dan kemerdekaan pers belum optimal, kebebasan sipil kurang, perilaku diskriminatif dan intoleransi meningkat.

P. Ketimpangan antara wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi. Pada tahun 2022, kontribusi KTI telah mencapai 20,6 persen dibandingkan 18,8 persen di tahun 2000. Daerah tertinggal pada tahun 2020 hanya sebanyak 62 kabupaten, jauh berkurang dibandingkan 2015 yang masih 122 kabupaten. Namun ketimpangan masih tinggi yang diakibatkan ketersediaan SDM yang berkualitas masih kurang serta tidak merata, infrastruktur belum merata dan memadai khususnya di wilayah KTI, anggaran pemerintah daerah terbatas dan belum optimal pemanfaatannya, permasalahan pertanahan masih banyak terjadi, RDTR tingkat kabupaten belum banyak tersedia, produktivitas perkotaan rendah karena desain kota yang tidak optimal, risiko bencana tinggi, tata kelola kebencanaan lemah, pembangunan perdesaan dan afirmasi belum optimal karena kebijakan yang belum asimetris dan afirmatif, serta desentralisasi dan otonomi daerah belum memberikan hasil yang diharapkan.

Rangkaian isu dan tantangan diatas akan dihadapi oleh modalitas dasar bangsa Indonesia berupa:

A. Kependudukan. Jumlah penduduk terus meningkat hingga 324 Juta jiwa di tahun 2045 meskipun lajunya melambat dari 1,08 persen ke 0,43 persen.

Kondisi demikian dapat menjadi peluang di saat bersamaan dapat menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan masyarakat. Jika pertambahan penduduk disertai peningkatan proporsi penduduk usia produktif maka akan berdampak luas terhadap pembangunan. Indonesia harus menerapkan strategi pembangunan SDM yang unggul, belajar dari Jepang, Korea, Tiongkok, dan negara maju lain yang memanfaatkan usia produktif secara efektif. Selain itu, karena komposisi penduduk berpendapatan menengah terus naik, daya beli penduduk Indonesia pun terus meningkat.

B. Modalitas sosial dan budaya, yang merupakan kekuatan untuk menggerakkan aksi kolektif, serta mendorong proses transformasi masyarakat, seperti karakter guyub, gotong royong, musyawarah, serta jiwa berdikari, termasuk kekerabatan, adat istiadat, dan tradisi, serta nilai agama dan sosial.
C. Kekayaan alam. SDA yang bersifat ekstraktif sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional dalam kegiatan ekonomi dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu hutan tropis yang ada seluas 125,57 Juta Hektar berfungsi sebagai penyangga kehidupan pengatur tata air, penggerak aktivitas ekonomi, serta aktivitas sosial budaya masyarakat, serta keanekaragaman hayati, termasuk sumber daya perikanan dan *bioprospecting* sebagai modal dasar pembangunan berkelanjutan dan mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Termasuk di dalamnya cadangan sumber daya energi dan mineral yang melimpah dengan cadangan batu bara sebesar 36,30 Miliar Ton, nikel dengan cadangan bijih 5,24 Miliar Ton, dan 3.716 GW potensi energi terbarukan. Selain itu, dengan adanya kemajuan teknologi, energi terbarukan memiliki potensi yang sangat besar pada energi surya, biomassa, air, panas bumi, air laut, bayu, dan EBT lainnya termasuk energi nuklir dan hidrogen hijau.
D. Kekuatan maritim yang nyata karena letak geografis dan karakteristik wilayahnya. Terumbu karang dunia saat ini 16 persennya berada di perairan nusantara, dan potensi perikanan tangkap 12 Juta Ton. Spesies tumbuhan berbunga sekitar 10 persennya tumbuh di tanah Indonesia, serta hutan mangrove terluas di dunia ada di kawasan pesisir Indonesia dengan luasan 3,36 Juta Hektar. Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) menjadi potensi besar sebagai jalur perlintasan kapal dan pesawat asing yang melintas utara-selatan

maupun sebaliknya. Kekuatan maritim di tengah dinamika geopolitik juga ditopang oleh kerangka kerjasama, dan ditunjukkan dari aspek sosiokultural untuk mendukung perwujudan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

3.3.3 Telaahan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 terkait Isu Strategis dan Tantangan Provinsi Gorontalo

Permasalahan yang ada di Provinsi Gorontalo dikelompokkan dalam 4 aspek pembangunan, yaitu Aspek Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola Pemerintahan, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Aspek Ekonomi

a. **Rendahnya produktifitas ekonomi daerah,** yang ditandai dengan kontribusi PDRB hanya 0,12 persen terhadap PDB Nasional dan terendah baik secara Nasional maupun Regional Sulawesi. PDRB Provinsi Gorontalo kurang lebih mencapai Rp47.574,4 Miliar (2022). Produktivitas sektor perekonomian yang relatif rendah diantaranya disebabkan karena kualitas SDM, inovasi dan pemanfaatan teknologi yang masih lemah. Proses produksi masih bersifat parsial dan masih rendahnya upaya hilirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian. Produktifitas rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang cenderung mengalami perlambatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada periode 2017-2022 sebesar 4,34 persen, tumbuh melambat dibanding periode 2012-2017 yang pertumbuhannya di atas 7 persen.

b. **Transformasi ekonomi berjalan lambat.** Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi rata-rata 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-rata 4 persen terhadap PDRB. Dari sisi produksi, permasalahan yang dihadapi sektor industri berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan adaptasi teknologi yang berimplikasi terhadap kualitas dan daya saing produk. Hal lainnya terkait dengan manajemen kemitraan dan distribusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang relatif belum optimal.

c. **Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM pada penciptaan nilai tambah.** Permasalahan yang dihadapi dari sisi permodalan, perizinan, literasi digital, manajemen koperasi, SDM, pemasaran dan perluasan bidang usaha koperasi, serta belum masifnya penerapan koperasi berbasis syariah.

d. **Produktifitas tenaga kerja dan pendapatan perkapita masyarakat masih relatif rendah,** yang diantaranya dipengaruhi oleh serapan tenaga kerja lebih besar disumbang dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD/SMP sebesar 34,60 persen, dan pekerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebesar 28,12 persen (tahun 2022). Selain itu ketidaksesuaian keahlian *(mismatch)* antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi tenaga kerja belum mampu menjadi sarana pasar kerja yang baik dalam merespons cepat kebutuhan dan jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, dan pola budaya kerja. Persoalan lainnya tingkat serapan tenaga kerja masih cenderung rendah karena kesempatan kerja yang terbatas.

e. **Deindustrialisasi dini dan tingkat produktivitas dan daya saing produk pertanian masih cenderung rendah.** Kontribusi manufaktur terhadap PDRB stagnan di angka 4 persen selama satu dekade terakhir, diantaranya diakibatkan rendahnya produktifitas faktor-faktor produksi dan adaptasi teknologi, serta keterbatasan dukungan ekosistem industri, serta biaya logistik yang sangat tinggi. Di sisi lain, tingkat produktivitas pertanian masih rendah, serta didominasi oleh padi dan jagung. Hal ini disebabkan oleh regenerasi petani relatif lambat, tingkat keterampilan petani dan nelayan kurang, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, serta belum adanya standar proses dan lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum. Permasalahan jangka panjang lainnya yang perlu diantisipasi yakni semakin turunnya daya dukung lahan pertanian, dari sisi kualitas lahan maupun luasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani juga memberikan pengaruh terhadap produktifitas pertanian. Tahun 2022, NTP umum pada angka 103,62 poin. Jika ditinjau dari NTP di beberapa sub sektor,

khususnya sektor tanaman pangan dalam 10 tahun terakhir rata-rata berada di angka 98 poin.

f. **Sektor pariwisata cukup potensial namun masih belum berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah**. Disebabkan belum optimalnya pengelolaan kawasan-kawasan wisata strategis, ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, amenitas, atraksi, dan aksesibilitas, pun SDM pariwisata masih belum memadai. Pengembangan kawasan wisata dan promosi sektor pariwisata masih digarap konvensional dan parsial. Akselerasi investasi sektor pariwisata serta penciptaan *branding* lokal masih belum optimal.

g. **Infrastruktur seperti jalan dan irigasi belum optimal**. Dilihat dari kondisi mantap jalan yang masih berada pada angka 60,05 persen. Berdasarkan kategori jalan, panjang jalan dengan kondisi rusak berat sepanjang 33,41 Km, dan rusak ringan sepanjang 6,55 Km. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang tumbuh rata-rata 0,12 persen/tahun. Di sisi lain, kondisi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dengan panjang 137.713,58 Meter dalam kondisi “Baik” 59,45 persen, sementara “Rusak” 40,54 persen. Selain itu rendahnya konektivitas antar wilayah, belum terbukanya beberapa ruas jalan diantaranya Marisa – Tolinggula, Tapa – Atinggola, dan beberapa jalur strategis dalam mendorong pengembangan ekonomi.

h. **Tingkat partisipasi angkatan kerja relatif rendah.** Tingkat pengangguran terbuka cenderung rendah dengan rata-rata 10 tahun terakhir sebesar 3,9 persen. Tingkat setengah penganggur masih mendominasi dengan angka sebesar 6,10 persen tahun 2022. Selain itu, tingkat produktifitas relatif rendah, disebabkan menurut kondisi tingkat pendidikan, tenaga kerja didominasi oleh pendidikan menengah kebawah sebesar 86,59 persen tahun 2022. Menurut status pekerjaan utama, tenaga kerja masih didominasi sektor informal sebesar 64,97 persen. Sedangkan menurut lapangan pekerjaan utama, serapan tenaga kerja masih didominasi sektor

pertanian sebesar 33,3 persen, dengan tingkat upah yang relatif kecil. Fenomena lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi. TPAK laki-laki sebesar 85,30 persen, sedangkan TPAK perempuan 52,64 persen. Sementara persentase usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan atau NEET (Not Employment, Education and Training) masih cukup tinggi sebesar 28,03 persen.

i. **Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat.** Data menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 9,27 persen tahun 2017 menjadi 14,84 persen tahun 2021, mengindikasikan bahwa terdapat 14 sampai 15 dari 100 orang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi untuk hidup aktif dan sehat. Ketidakcukupan konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperoleh dan mengkonsumsi makanan sehat. Tahun 2022, total ketersediaan pangan Provinsi Gorontalo sebesar 3.219.492.120.142 Kkal, sedangkan kebutuhan pangannya 916.489.121.500 Kkal. Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato, sedangkan terkecil di Kota Gorontalo. Kebutuhan pangan terbesar di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294.134.501.750 Kkal. Hal ini menunjukkan beberapa wilayah memiliki kebutuhan pangan terbesar, dengan ketersediaan pangan yang tidak cukup.

j. **Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.** Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang cukup potensial sektor kelautan dan perikanannya, memiliki garis pantai yang cukup panjang, serta berada di kawasan Teluk Tomini, namun belum dimanfaatkan optimal untuk penciptaan nilai tambah ekonomi. Implementasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, serta belum adanya observasi dalam pengelolaan tentang potensi *blue carbon* di pesisir. Tantangan lainnya masih belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sarana prasarana perikanan masih belum memadai dan belum dikelola dengan baik. Masih tingginya *illegal* dan *over fishing* karena rendahnya sistem pengawasan kelautan. Tingkat

kesejahteraan nelayan yang diukur dengan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga masih rendah.

k. **Masih rendahnya energi terbarukan dan relatif rendahnya efisiensi energi.** Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer tahun 2021 baru mencapai 11,08 persen, terjadi peningkatan dari tahun 2015 sebesar 3,45 persen, namun masih jauh dari target 42 persen.

l. **Perkembangan infrastruktur, teknologi dan literasi digital masih terbatas.** Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah. Selain itu kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TIK berupa jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas *data center*, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan TIK juga dihadapkan pada tantangan dalam mengadopsi teknologi, serta penerapan teknologi berbasis *Artificial Intelligence*. Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi riset dan inovasi serta keamanan siber belum memadai. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika, skor indeks literasi digital hanya sebesar 3,61 atau pada level "Sedang". Pengukuran indeks ini merupakan survei kepada pengguna internet berusia 13-70 tahun. Meskipun demikian, penggunaan internet masih terbatas pada sektor-sektor tertentu yang kurang produktif, serta relatif tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada ekonomi daerah.

m**. Masih rendahnya peranan wilayah perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi**. Disebabkan karena terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan masih tinggi baik intra maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

B. Aspek Ekonomi

a. **Perubahan atau transisi struktur demografi.** Penduduk sebagai modal pembangunan memiliki dampak positif dan negatif yang perlu disikapi dan diantisipasi pertumbuhannya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi maupun

lingkungan. Data menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir *Total Fertility Rate* sebesar 2,3 dan diproyeksikan terus turun. Provinsi Gorontalo akan mencapai *replacement level* atau kondisi penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR sebesar 2,07 tahun 2045. Sejalan dengan perbaikan derajat dan layanan kesehatan, angka Usia Harapan Hidup terus meningkat, dari 68,51 tahun pada 2022, diproyeksikan meningkat hingga 73,13 tahun pada 2045. Sementara rasio ketergantungannya sebesar 43,67 persen pada tahun 2022. Kondisi ini perlu diantisipasi bahwa Indonesia dan beberapa wilayah, termasuk Provinsi Gorontalo, akan mengalami *ageing* populasi tahun 2045, dimana dalam jangka panjang diproyeksikan proporsi jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat. Sehingga rasio ketergantungan diproyeksikan meningkat 50,61 tahun 2045. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk usia non produktif akan semakin tinggi dibanding penduduk usia produktif.

b. **Kualitas SDM masih cenderung rendah**, berada dibawah rata-rata Nasional. Tahun 2022, IPM masih berada pada angka 69,81 persen. Jika dilihat dari ketiga dimensi pembangunan manusia, masih relatif rendah.

   Di sektor pendidikan, kualitas mutu dan layanan pendidikan masih belum optimal. Angka harapan lama sekolah masih berada pada angka 13,10 tahun, dan rata-rata lama sekolah pada angka 8,02 tahun, mengindikasikan tingkat partisipasi sekolah relatif masih rendah. Tantangan terbesar terjadi pada kelompok umur 16-18 tahun, dimana APS hanya 71,68 persen, walaupun angka ini terus membaik. Permasalahan di sektor pendidikan masih berkaitan dengan akses dan kualitas pendidikan diantaranya ketersediaan daya tampung, ketersediaan guru yang profesional dan kompeten, kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi, advokasi kepada masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak yang masih rendah, serta intervensi terhadap masyarakat, khususnya rumah tangga miskin yang memiliki anak usia sekolah belum optimal.

   Derajat dan sistem layanan kesehatan masih rendah. Angka harapan hidup berada pada 68,51 tahun. Data lainnya menunjukkan bahwa Angka

Kematian Ibu, Bayi dan Balita cukup tinggi dan fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2022 Angka Kematian Ibu sebesar 195 per 100.000 KH, sementara Angka Kematian Bayi 11 per 1.000 KH. Di sisi lain, prevalensi kekurangan gizi tahun 2022 sebesar 7,6 persen, turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 10,2 persen. Demikian juga dengan prevalensi stunting, berdasarkan Hasil Survei Status Gizi Indonesia tahun 2022, turun menjadi 23,8 persen dari 29 persen di tahun 2021, masih jauh dari target Nasional 14 persen tahun 2024. Beberapa indikator tersebut menunjukkan adanya perbaikan, namun permasalahan sektor kesehatan masih menjadi perhatian terutama yang berkaitan dengan perilaku hidup tidak sehat, akses dan kualitas layanan kesehatan, salah satunya status Rumah Sakit Provinsi yang saat ini masih berada pada “Tipe C”, selain itu belum ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai. Berdasarkan data Profil Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa rasio Puskesmas Provinsi Gorontalo berada pada angka 1,21 di bawah rata-rata Nasional, dan terendah ke-empat Nasional. Selain itu, kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan masih cenderung rendah. Data menunjukkan bahwa tingkat sebaran tenaga medis kurang merata dan masih terkonsentrasi di wilayah Kota Gorontalo. Selain itu intervensi terhadap jaminan kesehatan cenderung masih rendah.

c. **Kemiskinan masih tinggi.** Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan dan tantangan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tahun 2023 tingkat kemiskinan masih berada pada angka 15,15 persen, urutan ke-lima tertinggi Nasional, mengindikasikan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diantaranya disebabkan oleh tingkat partisipasi sekolah yang masih cenderung rendah. Selain itu, pendapatan sektor pertanian yang menjadi salah satu penyumbang tertinggi kemiskinan di relatif rendah. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya cakupan sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat rentan.
d. **Kesenjangan pendapatan cukup tinggi** yang diukur berdasarkan indeks gini di angka 0,423, diatas rata-rata Nasional dan tertinggi di Sulawesi. Dengan ketimpangan terbesar berada di daerah perkotaan sebesar 0,406.

Hal ini karena rata-rata pengeluaran perkapita perbulan wilayah perkotaan sebesar 11,63 persen, sementara peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di wilayah perdesaan tidak sebesar perkotaan yaitu hanya sebesar 4,40 persen. Tingginya kesenjangan pendapatan dapat disebabkan antara lain ketidakmerataan pembangunan, aktivitas ekonomi, aksesibilitas, kualitas SDM, tingkat produktifitas.

e. **Belum optimalnya layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Provinsi, serta cakupan layanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masih rendah.

f. Pelestarian budaya dan kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu tantangan pembangunan jangka panjang yang sangat penting untuk diambil langkah antisipatif dalam rangka menghadapi ancaman negatif budaya asing dan **kemerosotan nilai-nilai agama dan budaya di masyarakat**. Hasil indeks pembangunan kebudayaan Provinsi Gorontalo menunjukkan tahun 2022 sebesar 47,14 dibawah rata-rata Nasional yang telah mencapai 51,90. Dari hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan, terdapat beberapa dimensi yang pencapaiannya belum maksimal antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, sedangkan untuk dimensi budaya literasi dan gender pencapaiannya lebih tinggi dari Nasional.

C. Aspek Ekonomi

a. **Kualitas Lingkungan Hidup cenderung rendah** yang ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2022 berada pada 79,27. Jika dilihat dari ke-4 Indikator IKLH, Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada pada angka 58,07 atau kategori “Kurang”, sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 94,47, Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 85,45 atau berada dalam kondisi “Sangat Baik”. Sedangkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 84,08 kondisi “Sangat Baik”. Penurunan kualitas air disebabkan karena aktifitas masyarakat di hulu sungai yang seiring pertambahan tahun semakin tidak terkendali. Aktifitas pertambangan dan limbah industri, rumah tangga dan pertanian yang jika tidak dilakukan pengendalian menjadi faktor utama penyebab penurunan kualitas air.

b. **Pengurangan luasan dan pendangkalan Danau Limboto.** Danau Limboto telah ditetapkan menjadi salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Berdasarkan data selang tahun 2000-2015, luasannya berkurang 1.076 Ha atau rata-rata penyusutan sebesar 71,73 Ha setara 1,79 persen per tahun. Selain itu terjadi penurunan kualitas air di danau yang disebabkan tingginya sedimentasi dan eutrofikasi yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi, termasuk nitrogren dan fospor dalam air. Hal lainnya, pertumbuhan eceng gondok yang tidak terkendali menyebabkan pendangkalan danau. Aktifitas masyarakat di hulu sungai dan wilayah sekitar yang memanfaatkan danau sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan kondisi danau terus mengalami degradasi.
c. **Lahan kritis Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi** tersebar di luar kawasan dan di dalam kawasan sebesar 217.177 Ha. Luasan luar kawasan seluas 144.983 Ha, dan di dalam kawasan sebesar 72.194 Ha. Luasan lahan kritis terbesar berada pada wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Boalemo. Aktifitas pemanfaatan lahan pertanian lahan miring yang tidak terkendali, berdampak pada kondisi dan struktur lahan yang jika tidak diantisipasi menyebabkan kerusakan lahan, erosi, dan sedimentasi yang terus meningkat.
d. **Cakupan sanitasi dan air bersih masih rendah**. Data menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak masih sebesar 78,58 persen, menunjukkan bahwa masih tersisa 21,41 persen masyarakat belum memiliki berakses sanitasi layak. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak secara tren terus mengalami penurunan, dari sebelumnya 32,04 persen menjadi 31,69 persen tahun 2021.
e. **Pengelolaan Sampah dan limbah masih belum optimal**. Implementasi pelaksanaan kebijakan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga masih belum optimal. Volume timbulan sampah perharinya semakin tidak terkendali, pengolahan sampah belum terintegrasi dari hulu ke hilir, juga disebabkan karena kurangnya sarana prasarana pemilahan sampah, peran

TPS3R dalam pemilahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan limbah B3 belum tersedia.

f. **Penataan perkotaan dan penanganan kawasan perumahan dan permukiman belum optimal.** Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan tanah, Prasarana Sarana Umum (PSU), serta penanganan kawasan kumuh dan kondisi permukiman belum memenuhi syarat. Akibatnya di satu sisi telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi, di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh dan tidak layak huni juga meningkat.

g. **Daya dukung lahan menurun** seiring alih fungsi lahan yang terus terjadi, aktifitas pertambangan dan dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat keanekaragaman hayati.

h. **Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan** seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut disebabkan karena pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Kerusakan ekosistem terumbu karang dan berkurangnya luasan kawasan mangrove dalam jangka panjang berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya kelautan.

i. **Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi.** Berdasarkan hasil kajian resiko bencana dan kecenderungan bencana 10 tahun terakhir, Provinsi Gorontalo termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana dengan kelas risiko bencana kategori “Sedang”, dengan Indeks Risiko Bencana 120,61. Sementara berdasarkan hasil perhitungan kerentanan terhadap perubahan iklim menggunakan SIDIK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Gorontalo termasuk kategori daerah yang relatif rentan terhadap perubahan iklim. Dari hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca menunjukkan bahwa emisi GRK wilayah Gorontalo cenderung naik. Jumlah emisi GRK pada tahun 2022 sebesar 1.407,27 Gg CO2e. Sumber utama emisi GRK Gorontalo tahun 2022 adalah pertanian, energi, dan limbah yang menghasilkan emisi 2.382,1 Gg CO2e. Emisi GRK dari sektor pertanian mencapai 47,8 persen diikuti dengan penggunaan energi 43,21 persen. Sektor limbah berkontribusi 8,3 persen terhadap agregat emisi GRK. Sementara itu sektor

kehutanan memberikan rosot atau penyerapan GRK sebesar -974,8 Gg CO2e, atau setara penyerapan 40,9 persen emisi dari sektor lain.

D. Aspek Ekonomi

a. **Kapasitas fiskal daerah masih rendah.** Data Kementerian Keuangan RI, indeks kapasitas fiskal daerah berada pada 1,350 kategori “Sangat Rendah”. Hal ini sejalan dengan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 78 atau berada pada kategori “Perlu Perbaikan”. Dari hasil pengukuran tersebut, dimensi yang pencapaiannya belum maksimal adalah kondisi keuangan daerah dengan beberapa indikator antara lain kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, dan solvabilitas layanan.

b. **Tata kelola pemerintahan belum optimal.** Aspek akuntabilitas kinerja pemerintah dan reformasi birokrasi masih berada pada kategori B dengan capaian SAKIP 68,27 dan Reformasi Birokrasi 63,73. Dari beberapa indikator reformasi birokrasi, kinerja yang belum optimal berasal dari sisi Kualitas Kebijakan, Profesionalitas ASN, SPBE, dan Indeks Sistem Merit.

c. **Pelayanan Publik dan tingkat kepuasan masyarakat perlu didorong.** Kualitas pelayanan publik terlihat dari capaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2022 mencapai nilai 72,65, meningkat 5,07 poin dari capaian tahun 2021, Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 sebesar 4,34 dengan kategori “Sangat Baik” meningkat 0,3 poin dari capaian tahun 2021, serta capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai 94,9. Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,05. Meskipun terjadi peningkatan dari sisi kepatuhan layanan dan indeks kepuasan masyarakat, namun tingkat pelayanan publik perlu terus didorong, perbaikan tata kelola dan kualitas layanan masih menjadi tantangan karena sejauh ini Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki *Mall* Pelayanan Publik.

d. **Inovasi pembangunan daerah belum optimal.** Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo masih kategori “Kurang Inovatif”. Selain itu, daya saing inovasi pembangunan daerah belum berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Persoalannya belum

menjadi perhatian dari sisi pendanaan dan kualitas sumber daya manusia, serta kerja sama multipihak dalam pengkajian dan implementasi hasil riset masih rendah.

e. **Penerapan digitalisasi pemerintahan belum optimal.** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 masih rendah hanya 2,48.

Dari rangkaian permasalahan dan tantangan Provinsi Gorontalo, dirumuskan isu strategis pembangunan, yaitu:

A. Ketahanan dan transformasi ekonomi berjalan lambat;
B. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi;
C. Kualitas sumber daya manusia masih rendah;
D. Pembangunan belum berwawasan lingkungan;
E. Rendahnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah;
F. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal.

3.3.4 Telaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs di Gorontalo Utara

Tujuan pembangunan dalam *Millennium Development Goals* (MDGs) tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda global bersama berikutnya dalam melanjutkan MDGs adalah dikembangkannya konsepsi yang disebut *Sustainable Development Goals* (SDGs). Perbedaan antara MDGs dan SDGs adalah permasalahan isu lingkungan global lebih ditekankan dan diprioritaskan pada SDGs, sehingga SDGs merupakan hasil evaluasi terhadap perubahan selama kurun waktu 15 tahun program MDGs berjalan.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs, terutama



berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu *depletion* sumberdaya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial,

perlindungan sosial, *food and energy security*, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Setelah dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, segenap dokumen perencanaan disusun dengan mempertimbangkan 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dengan target berbagai yang harus tercapai pada tahun 2030.

Tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu:

(1) Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (*human development*), diantaranya: pendidikan dan kesehatan;
(2) Indikator yang melekat pada lingkungan sosial *(social economic development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi; dan
(3) Indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (*environmental development*), berupa ketersediaan sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator dalam konsep SDGs, selain memikirkan standar global dalam mengedepankan suatu konsep pembangunan yang berkelanjutan, juga harus memperhatikan keterukurannya yang tidak lepas dari prinsip *environmental sustainability, economic sustainability,* dan *social sustainability*.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam empat kategori:

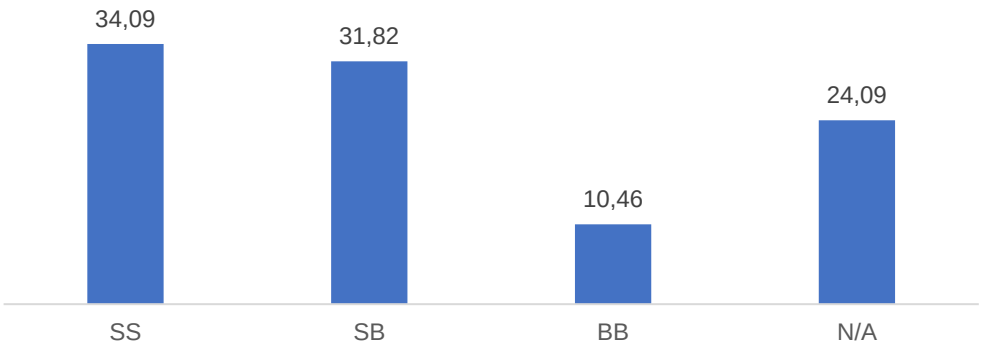
a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS;
b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB;
c. Indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target/BB;
d. Indikator TPB yang tidak ada datanya N/A.

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14 “Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)”). Sedangkan jumlah indikator

dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten sebanyak 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat delapan indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Gorontalo Utara.

Jumlah TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target Nasional (SS) berjumlah 75 indikator. Indikator yang telah dilaksanakan dan belum mencapai target Nasional (SB) sejumlah 70 indikator. Indikator yang belum dilaksanakan (BB) sejumlah 22 indikator, dan indikator yang belum tersedia data (N/A) berjumlah 53 indikator.

Grafik 3.1
Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (%)



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045, 2023

3.3.5 Telaahan Isu Lingkungan Dokumen KLHS Gorontalo Utara

Isu lingkungan yang didasari oleh analisis 6 muatan KLHS, yang terdiri dari:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
3. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Analisis 6 muatan KLHS berdasarkan *ecoregion*, perubahan penggunaan lahan, vegetasi, dan bentang alam yang terdapat di Gorontalo Utara, diperoleh isu lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Ketersediaan air bersih;
2. Penurunan kualitas lingkungan hidup;
3. Kerusakan hutan dan degradasi lahan;

4. Penurunan debit sungai;
5. Pencemaran air sungai dan laut serta ekosistem pesisir;
6. Kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang;
7. Banjir, longsor, dan kekeringan.

3.3.6 Telaahan Isu Pembangunan dalam Dokumen RTRW Gorontalo Utara

Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Gorontalo Utara, isu penataan ruang Gorontalo Utara yaitu:

1. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi, jasa, dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.3.7 Isu Strategis Pembangunan Daerah Gorontalo Utara 2025-2045

Gorontalo Utara dalam konteks modalitas menyimpan keunggulan baik dari sisi strategis maupun karakteristik wilayahnya. Modalitas dasar tersebut dalam jangka panjang dapat menjadi salah satu alat utama dalam mendukung pembangunan.

A. Alam. Wilayah Gorontalo Utara terletak paling utara Pulau Sulawesi, seluruh kecamatannya berada di wilayah pesisir dan memiliki sekitar 50 pulau, dengan beberapa *spot* pantai berpasir putih, sehingga pengembangan pariwisata pesisir dan bahari dapat menjadi unggulan di masa depan. Relief dataran rendahnya yang sempit karena diapit laut dan gunung/bukit sehingga wisata alam dataran tinggi dan pesisir dapat dinikmati sekaligus. Ternak hewan besar didominasi oleh sapi karena banyak tersedia lahan yang menyediakan pakan rumput. Wilayah WPP Perikanan 716 di perairan Gorontalo Utara merupakan wilayah dengan potensi perikanan tangkap yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti Tuna, karena berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Begitu pula dengan hasil pertanian terutama komoditas jagung dan durian yang merupakan unggulan daerah.

B. Pengembangan wilayah ekonomi dan industri. Meskipun bukan daerah berpenduduk banyak dan berkepadatan tinggi di Provinsi Gorontalo, karena posisi geografisnya yang diapit langsung oleh dua provinsi menjadikan daerah ini jalur perlintasan utama distribusi barang dan orang dari utara ke selatan maupun sebaliknya. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah untuk

memajukan kawasan Pelabuhan Peti Kemas Anggrek hingga berkembang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus akan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan industri bahkan aglomerasi di masa depan.

C. Adat istiadat. Adat istiadat di Gorontalo Utara menjadi salah satu kekuatan tersendiri karena masyarakatnya memegang teguh budaya dalam interaksi sehari-hari, ditambah muatan agama yang kuat sehingga adat istiadat dan agama menjadi tiang penopang kekuatan masyarakat dan pemerintah untuk menapak pembangunan.

Berdasarkan telaah permasalahan dalam konteks lokalitas daerah yang dipengaruhi berbagai isu baik internal maupun eksternal yang ditopang oleh modalitas dasar daerah dalam melaksanakan pembangunan di masa depan, diperoleh isu-isu pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2025-2045 sebagai berikut:

A. **Resiliensi dan transformasi ekonomi yang inklusif, bertumbuh, dan berkelanjutan**. Potensi maritim Gorontalo Utara yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun kontribusi sektor ekstraktif yang terlalu dominan juga berisiko terhadap tingkat resiliensi ekonomi daerah, terutama jika terjadi guncangan terhadap sektor primer saat sektor lain tidak mampu mengkompensasi. Untuk itu dibutuhkan transformasi ekonomi terhadap sektor lain agar mampu menjadi penyokong ekonomi daerah selain sektor primer yang akan menciptakan pertumbuhan dalam jangka panjang. Selain mampu menciptakan nilai tambah dan produktivitas, transformasi juga didorong untuk mampu menciptakan peluang lapangan pekerjaan baru, menciptakan peluang usaha dan investasi baru, mendorong perluasan inovasi dan penggunaan teknologi terutama teknologi digital untuk mendorong tumbuhnya ekonomi. Selain itu, transformasi tersebut harus berwawasan lingkungan dan memperhatikan warisan terhadap generasi mendatang, dengan optimalisasi ekonomi hijau dan ekonomi biru.

B. **Pembangunan sosial dan kesenjangan sosial ekonomi**. SDM merupakan motor penggerak sekaligus objek pembangunan. Untuk itu, perbaikan kualitas SDM berfungsi sebagai *enabler* dan akselerator pembangunan, yang mendorong urgensi transformasi sosial melalui peningkatan partisipasi dan

cakupan layanan pendidikan serta kapasitas dan status layanan kesehatan yang diharapkan akan mampu memutus rantai kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi karena akan meningkatkan daya beli dan meningkatkan perlindungan sosial. Selain itu SDM yang baik harus memiliki karakter yang baik, serta menjunjung tinggi norma agama dan budaya;

C. **Pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik**. Birokrasi pemerintah dan institusi publik perlu terus didorong sehingga menjadi institusi yang inovatif, adaptif, serta efektif, tidak hanya dalam menghasilkan regulasi juga dalam hal pelayanan publik demi pelayanan yang prima. Pengawasan dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan terus dioptimalkan. Tata kelola keuangan juga didorong untuk berkualitas dan bermanfaat, baik dalam kapabilitas meningkatkan pendapatan maupun efektivitas, efisiensi, dan inklusivitas dalam memanfaatkan anggaran belanja daerah. Rangkaian kondisi tersebut perlu dilakukan dengan cara transformasi tata kelola pemerintahan;

D. **Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim**. Tekanan ekologi akibat perubahan iklim dan manajemen kebencanaan akibat meningkatnya gas rumah kaca memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan karena dapat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekstrem dapat langsung berpengaruh pada ketersediaan pangan, kesehatan, bencana, serta aktivitas ekonomi lainnya. Untuk itu diperlukan rangkaian mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dalam sistem perencanaan pembangunan. Jika hal tersebut berhasil, daerah dapat mencapai kondisi lingkungan hidup yang berkualitas dan tahan bencana serta daerah yang berketahanan air, energi, dan pangan;

E. **Sosial budaya serta keamanan daerah tangguh.** Bukan hanya daerah secara wilayah administrasi yang harus memiliki ketahanan terhadap segala bentuk gangguan, juga termasuk aspek nonfisik daerah, seperti individu, keluarga, dan masyarakat. Ketangguhan dipupuk melalui pembangunan karakter dan budaya, serta dinaungi oleh nilai-nilai agama;

F. **Infrastruktur dasar dan strategis berkualitas, serta pengembangan wilayah yang merata**. Infrastruktur pembangunan sebagai salah satu kebutuhan esensial untuk beraktivitas, kegiatan distribusi barang dan

orang/ekonomi, dan pembangunan SDM. Kualitas infrastruktur yang tangguh akan sangat berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya standar kehidupan masyarakat dalam hal pemenuhan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau aspek lainnya, dan pembangunannya akan menjadi stimulus bagi lahirnya investasi fisik dan non-fisik, untuk itu pembangunan infrastruktur harus mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan masyarakat untuk maju dan berkembang sekaligus ramah lingkungan. Selain itu, pembangunan infrastruktur didorong untuk dirasakan manfaatnya di seluruh kawasan sehingga masyarakat dapat menikmati secara adil dan taraf hidupnya secara bersama meningkat.

2025

Bab IV

Visi dan Misi Gorontalo Utara

2045

MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

BAB IV VISI DAN MISI GORONTALO UTARA

Pembangunan daerah yang dilakukan dalam jangka panjang diarahkan untuk tercapainya suatu tatanan masyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Gambaran keadaan masa depan yang diinginkan lazim disebut sebagai visi jangka panjang. Jadi, visi merupakan kondisi yang menjadi cita-cita dan merupakan harapan dan keinginan bersama dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen RPJPD.

Tahap perumusan visi dan misi merupakan upaya keadaan yang menjadi muara dari berbagai penyelesaian permasalahan yang sering disebut sebagai isu strategis yang dirasakan sangat penting oleh masyarakat untuk diselesaikan. Sejalan dengan pemahaman bahwa visi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau *stakeholder* pembangunan daerah, yang mencerminkan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah, sehingga penyusunan visi dan misi pembangunan jangka panjang memerlukan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan metode pengolahan berbasis kuesioner.

4.1 VISI KABUPATEN GORONTALO UTARA

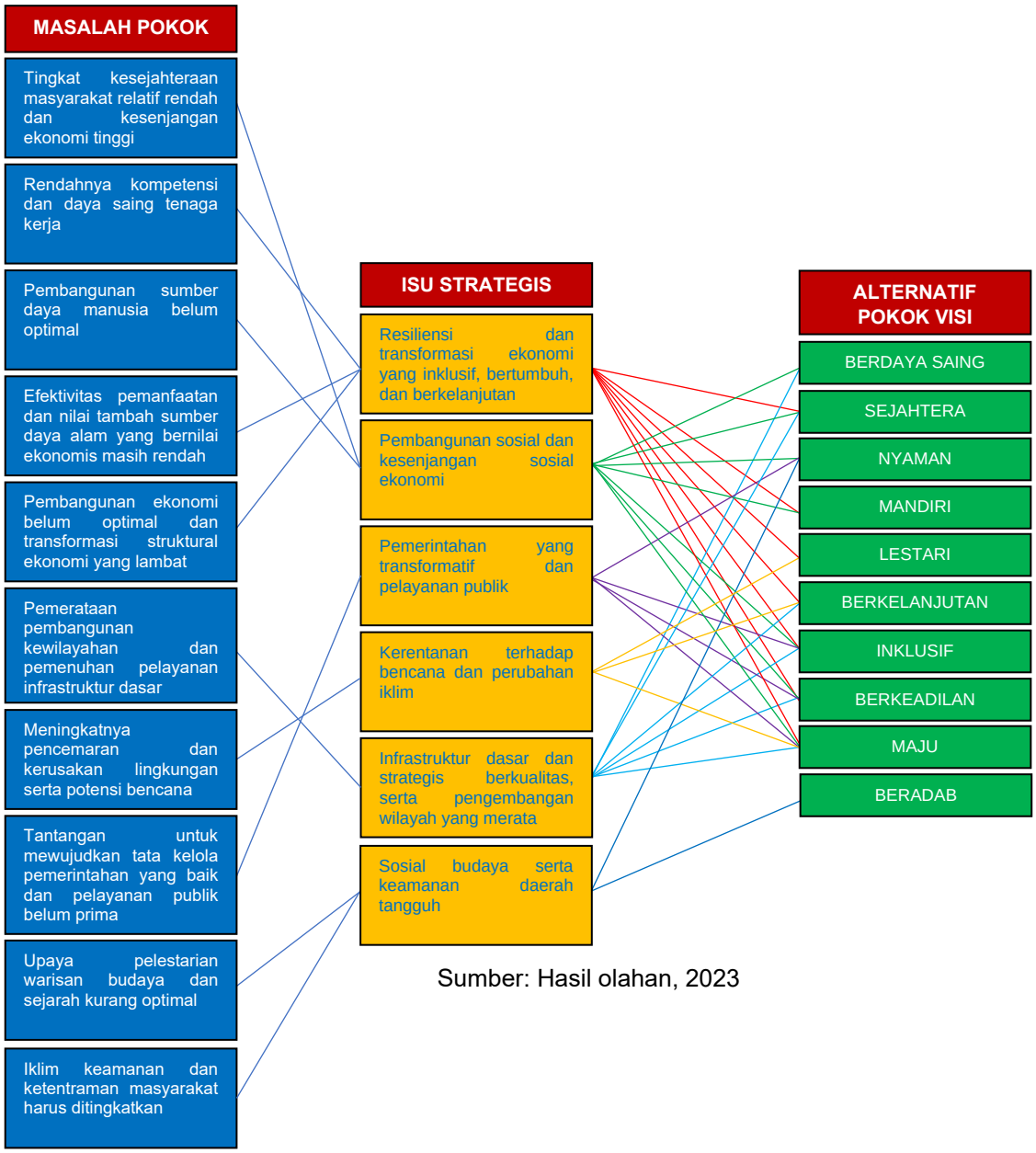
Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi dirumuskan sebagai cita-cita kondisi yang jauh lebih baik dari kenyataan yang ada saat ini. Dalam perumusannya, visi mempertimbangkan faktor internal (modal dasar dan kelemahan), faktor eksternal (peluang dan tantangan), serta menggambarkan nilai-nilai kunci yang perlu dilaksanakan. Faktor eksternal antara lain berupa perkembangan global yang pesat, arah pembangunan tingkat nasional

maupun regional, dan berbagai perkembangan eksternal lainnya yang terkait dan mempengaruhi kondisi dinamis masyarakat Gorontalo Utara.

Selain itu, visi didasarkan pada kondisi riil daerah dan lingkungan yang lebih luas, bukan pikiran berandai-andai (*wishful thinking*), tetapi dengan fokus pada masa depan. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah, dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (*stakeholders*) dalam melakukan pelaksanaan pembangunan daerah, serta menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visi selama periode lima tahun berkenaan dengan RPJMD yang dikembangkan pada tahap periode tersebut.

Dalam penyusunannya, Visi Gorontalo Utara 2045 tidak terlepas dari Visi Indonesia Emas 2045. Dalam Rancangan Undang-Undang RPJPN 2025-2045, Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Juga diwarnai oleh Visi Provinsi Gorontalo 2045: Gorontalo, Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan. Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, mewajibkan daerah untuk sekurang-kurangnya mencantumkan kata “Maju” dan “Berkelanjutan” dalam rumusan visi daerah. Sedangkan dalam perumusan pokok-pokok visi Gorontalo Utara didasarkan pada masalah utama dan/atau isu strategis pembangunan yang sudah diidentifikasi, yaitu: (1) resiliensi dan transformasi ekonomi yang inklusif, bertumbuh, dan berkelanjutan; (2) pembangunan sosial dan kesenjangan sosial ekonomi; (3) pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik; (4) kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim; (5) sosial budaya serta keamanan daerah tangguh; dan (6) infrastruktur dasar dan strategis berkualitas, serta pengembangan wilayah yang merata. Perumusan pokok-pokok visi digambarkan dalam skema berikut.

Gambar 4.1
Skema Perumusan Alternatif Pokok Visi



Sumber: Hasil olahan, 2023

Dengan berlandaskan pemikiran yang tertuang pada Gambar 4.1 serta kaidah yang tertuang pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 untuk memperhatikan Visi Nasional dan Provinsi Gorontalo, dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045:

> **GORONTALO UTARA MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA**

Kata kunci pada visi yang menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara dijelaskan maknanya agar terdapat kesamaan pandangan dan pemahaman kepada seluruh aktor pembangunan mengenai substansi filosofis, yaitu:

1. **Maju**: Masyarakat Gorontalo Utara memiliki keinginan dan kemampuan tinggi terhadap adaptasi teknologi dalam kehidupan, produktif dan mampu mencukupi kebutuhan diri sendiri sekaligus berperan bagi pihak lain, serta tingginya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
2. **Sejahtera**: Masyarakat Gorontalo Utara senantiasa dalam kondisi yang sehat serta terpenuhi kebutuhan dasarnya;
3. **Beradab**: Masyarakat Gorontalo Utara adalah masyarakat yang memiliki karakter dan etos kerja yang kuat, memiliki etika, serta menjunjung tinggi norma agama dan kehidupan, serta kearifan lokal;
4. **Berkelanjutan**: Masyarakat Gorontalo Utara adalah masyarakat yang mendorong pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, menjaga, mengelola, dan mengembangkan kualitas lingkungan hidup yang bertahan lintas generasi.

Dalam perjalanan hingga tercapainya tujuan pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2045, segenap hal tersebut harus dilandaskan pada jati diri masyarakat Gorontalo Utara yang relijius, yang menempatkan "**Iman dan Taqwa**" kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sebagai kehendak tertinggi sebagaimana lambang bintang yang ditempatkan teratas pada logo Kabupaten Gorontalo Utara. Peran iman dan taqwa sangat penting dalam membangun karakter masyarakat termasuk

generasi muda yang berperan aktif sebagai kekuatan moral serta agen perubahan dalam pembangunan. Terciptanya kondisi masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis, disertai dengan menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal akan sangat mendukung kinerja pembangunan.

Guna mendukung Visi dalam RPJPN Indonesia Emas 2045, Visi Pembangunan daerah diukur dan diselaraskan dengan Sasaran Visi Indonesia Emas, yaitu:

1. Mencapai pendapatan per kapita setara negara maju;
2. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
3. Meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional;
4. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia;
5. Menurunnya intensitas emisi Gas Rumah Kaca menuju *net zero emission*.

Dalam konteks daerah kabupaten/kota, Sasaran Visinya diselaraskan dengan Sasaran Visi Daerah Provinsi Gorontalo 2025-2045, sebagaimana Tabel 4.1, dan kemudian diterjemahkan dalam target lima tahunan agar mempermudah dalam pemantauan capaian kinerja tahun 2045 (Tabel 4.2).

Tabel 4.1
Sasaran Visi Gorontalo Utara Tahun 2045

No.	*RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045				RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045			
	Sasaran Visi	Indikator	*Baseline* 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	*Baseline* 2025	Target 2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita mendukung pendapatan negara setara negara maju	PDRB per kapita (Rpjuta)	46,05-46,25	177,62–223,84	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB ADHB per kapita (Rpjuta)	34,45-35,90	64,45-80,91
		Indeks ekonomi biru Indonesia	39,03	69,53		-	-	-
		Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	4,42–5,92	6,00–7,14		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	1,82-1,87	2,61-3,10
2	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan (%)	14,21-14,50	0,10–1,10	Kemiskinan dan ketimpangan berkurang	Persentase penduduk miskin (%)	16,85-16,25	11,50-9,75
		Rasio gini (indeks)	0,394-0,400	0,349–0,400		Rasio gini (poin)	0,411-0,420	0,349-0,400
		Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional (%)	0,25	0,18		Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo (%)	8,10	8,17-8,20
		Pertumbuhan ekonomi (%)	5,23-5,46	5,54-7,18		Pertumbuhan ekonomi (%)	4,51-5,21	5,65-6,25
3	Meningkatkan peran daerah dalam skala regional dan nasional	Indeks daya saing daerah (poin)	3,15	4,5-5,0	Peningkatan daya saing daerah	Indeks daya saing daerah (poin)	2,75-2,85	3,50-3,85
						Indeks inovasi daerah (poin)	41,30-41,75	60,00-62,50
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks modal manusia (poin)	0,50	0,66	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia (poin)	68,10-68,25	72,25-73,00
5	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net zero emission*	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	59,58	98,77	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	59,58	75,00
		Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	81,48	87,77		Indeks kualitas lingkungan hidup (poin)	75,90-76,00	75,00-80,00

*Sumber: Buku II Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 & Arah Kebijakan Provinsi Gorontalo

Tabel 4.2
Target Sasaran Visi 5 Tahunan

No.	Sasaran Visi	Indikator Sasaran Visi	Satuan	*Baseline* 2025	Target Periode			
					I	II	III	IV
1	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB ADHB per kapita	Rpjuta	34,45-35,90	37,4	43,4	53,9	64,45-80,91
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,82-1,87	1,90	2,06	2,34	2,61-3,10
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Persentase penduduk miskin	Persen	16,85-16,25	15,98	14,91	13,04	11,50-9,75
		Rasio gini	Poin	0,411-0,420	0,4074	0,3932	0,3684	0,349-0,400
		Kontribusi PDRB Gorontalo Utara terhadap Provinsi Gorontalo	Persen	8,10	8,10	8,11	8,14	8,17-8,20
		Pertumbuhan ekonomi	Persen	4,51-5,21	5,30	5,50	5,89	5,65-6,25
3	Peningkatan daya saing daerah	Indeks daya saing daerah	Poin	2,75-2,85	2,8875	3,0375	3,300	3,50-3,85
		Indeks inovasi daerah	Poin	41,30-41,75	42,69	46,43	52,96	60,00-62,50
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks pembangunan manusia	Poin	68,10-68,25	68,45	69,28	70,74	72,25-73,00
5	Intensitas emisi Gas Rumah Kaca menurun	Penurunan intensitas emisi GRK	Persen	59,58	60,35	63,43	68,82	75,00
		Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	75,90-76,00	75,00-80,00	75,00-80,00	75,00-80,00	75,00-80,00

4.2 MISI KABUPATEN GORONTALO UTARA

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Kriteria rumusan misi adalah menunjukkan dengan jelas upaya dalam mewujudkan visi daerah, disusun berdasarkan faktor-faktor lingkungan strategis eksternal-internal daerah, serta disusun dengan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Perumusan misi pembangunan mengacu pada visi pembangunan, masalah pokok, dan hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya.

Tabel 4.3
Perumusan dan Penjelasan Misi RPJPD

No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
1	Resiliensi dan transformasi ekonomi yang inklusif, bertumbuh, dan berkelanjutan	Gorontalo Utara Maju, Sejahtera, Beradab, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa	Efektivitas pemanfaatan dan nilai tambah sumber daya alam yang bernilai ekonomis masih rendah Rendahnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja Pembangunan ekonomi belum optimal dan transformasi struktural ekonomi yang lambat	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan	Perekonomian yang inklusif dan maju, serta optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan baru, termasuk peningkatan pengelolaan sumberdaya alam potensial yang berorientasi ekspor ditunjukkan dengan pertumbuhan yang stabil, meningkatnya kualitas tenaga kerja, produktivitas kuat, berdaya saing, dan nilai tambah tinggi. Hal tersebut didorong dengan inovasi dan penguasaan teknologi yang mendorong efisiensi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, akselerasi ekosistem UMKM, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, serta energi alternatif yang ramah lingkungan.

No.	Masalah Utama	Pernyataan Visi	Masalah Pokok	Misi	Penjelasan Misi
2	Pembangunan sosial dan kesenjangan sosial ekonomi		Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif rendah dan kesenjangan ekonomi tinggi Pembangunan sumber daya manusia belum optimal	Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi	Penguatan dan percepatan pembangunan manusia yang inklusif dan berkualitas melalui transformasi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan dalam bentuk peningkatan partisipasi dan cakupan layanan pendidikan serta kapasitas dan status layanan kesehatan untuk mencapai generasi manusia Gorontalo Utara yang sehat dan cerdas, dan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat yang adaptif.
3	Pemerintahan yang transformatif dan pelayanan publik		Tantangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik belum prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Mendorong transformasi tata kelola sehingga menghasilkan pemerintahan yang dapat memegang teguh prinsip *good governance* (*consensus oriented, accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, effective and efficient, follows the rule of law, participatory* dan *strategic visionary*) ditambah inovatif dan memanfaatkan teknologi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tanggap dan optimal, serta dilaksanakannya pembangunan secara berkesinambungan.
4	Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim		Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana	Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim	Pengendalian lingkungan hidup dan pengelolaan SDA yang seimbang dan berkelanjutan diupayakan dengan menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang untuk menjaga ketahanan energi-pangan-air, manajemen pengelolaan lingkungan yang sirkular, serta meningkatkan kapasitas resiliensi terhadap bencana dan krisis iklim baik secara mandiri maupun melalui kerjasama antar institusi. Selain itu juga menjalankan target global dan nasional untuk penurunan GRK dan transisi energi terbarukan.
5	Infrastruktur dasar dan strategis berkualitas, serta pengembangan wilayah yang merata		Pemerataan pembangunan kewilayahan dan pemenuhan pelayanan infrastruktur dasar	Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas	Pembangunan dan integrasi kawasan-kawasan strategis untuk mendorong perkembangan sosial dan ekonomi agar tumbuh merata, mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur dasar sosial dan umum, serta transportasi yang terintegrasi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah baik secara mandiri maupun melalui kerjasama antar institusi.
6	Sosial budaya serta keamanan daerah tangguh		Upaya pelestarian warisan budaya dan sejarah kurang optimal Iklim keamanan dan ketentraman masyarakat harus ditingkatkan	Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah	Rangkaian upaya transformasi pembangunan daerah perlu disokong oleh nilai-nilai agama, warna karakter lokal, dan budaya, termasuk di dalamnya meningkatkan kesetaraan gender, tercapainya kehidupan keluarga dan komunitas yang berkualitas, tercapainya keamanan dan kenyamanan bermasyarakat sebagai landasan pembangunan dalam kerangka hukum yang berkeadilan

Agar terjaga konsistensi perencanaan dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara, RPJPD Provinsi Gorontalo, dan RPJPN Tahun 2025-2045, rangkaian Misi Kabupaten Gorontalo Utara seluruhnya disandingkan dengan Misi Pembangunan dalam dokumen RPJPD Provinsi Gorontalo maupun RPJPN Tahun 2025-2045.

Tabel 4.4
Persandingan Misi RPJPD dan RPJPN Tahun 2025-2045

No.	Misi RPJPN	Misi RPJPD Provinsi Gorontalo	Misi RPJPD Gorontalo Utara
1	Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi
2	Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan
3	Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien
4	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah
5	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah
6	Mewujudkan Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas
			Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan
7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim
			Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas
8	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan
			Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien

2025

Bab V

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok

2045

MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Guna memberikan arah yang jelas terhadap pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai pedoman perencanaan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025 hingga 2045. Sasaran 20 tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok lima tahunan. Dalam proses perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 telah merujuk pada hasil evaluasi RPJPD Gorontalo Utara Tahun 2009-2029, RPJP Nasional 2025-2045, dan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045.

5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Lebih jauh, arah kebijakan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2009-2029, terdapat berbagai rekomendasi arah kebijakan untuk RPJPD periode berikutnya: (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi pada sektor yang relatif lebih mampu meningkatkan penciptaan lapangan kerja, memiliki nilai tambah lebih besar, peningkatan efektivitas pemanfaatan nilai tambah sumber daya alam, kemudahan dan kemandirian berusaha bagi UMKM, serta peningkatan investasi; (2) Peningkatan kualitas SDM dengan penguatan pelayanan kesehatan dan pendidikan; (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar dan penunjang; (4) Penguatan strategi pembangunan berkelanjutan dan

penanggulangan bencana; serta (5) Penguatan kerjasama antar daerah dan multipihak dalam pembangunan.

Fokus kebijakan dalam penentuan arah kebijakan adalah tema makro pembangunan setiap periode yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Sasaran pokok lima tahunan ini merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan pentahapan pembangunan. Guna menentukan tahapan dan prioritas pembangunan selama 20 tahun dalam pencapaian sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD, maka berikut arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045:



5.1.1 Tahapan Arah Kebijakan Setiap Periode

5.1.1.1 Arah Kebijakan Lima Tahun Pertama (2025-2029)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, arah kebijakan pembangunan lima tahun pertama diarahkan untuk melaksanakan penguatan modal dasar pembangunan. Penguatan ini diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial; pengembangan pusat-pusat perekonomian baru, hilirisasi berbasis sumber daya alam, serta penguatan riset dan inovasi; peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola konservasi lingkungan, sumber daya alam, dan kebencanaan; Pengembangan sinergi dan akuntabilitas pemerintahan, termasuk peningkatan kualitas ASN dan digitalisasi pelayanan publik; penguatan interaksi sosial budaya serta produktivitas tenaga kerja; dan

peningkatan fungsi pusat-pusat pelayanan melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan utilitas umum.

5.1.1.2 Arah Kebijakan Lima Tahun Kedua (2030-2034)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun pertama, arah kebijakan pembangunan lima tahun kedua diarahkan untuk melaksanakan peningkatan proses pembangunan. Peningkatan pembangunan diwujudkan melalui peningkatan inklusivitas dan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan serta penguatan kualitas perlindungan sosial; peningkatan investasi dan penanaman modal dan optimalisasi produktivitas UMKM daerah; penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru; pengembangan pemanfaatan energi; pengembangan kerjasama multipihak antar lembaga; dan penguatan fungsi infrastruktur di kawasan perkotaan dan perdesaan.

5.1.1.3 Arah Kebijakan Lima Tahun Ketiga (2035-2039)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun kedua, arah kebijakan pembangunan lima tahun ketiga diarahkan untuk melaksanakan pengembangan kapabilitas daerah. Pengembangan kapabilitas diwujudkan melalui pemantapan struktur perekonomian yang berbasis turunan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualifikasi digital daerah; penguatan daya saing komoditas hasil produksi untuk peningkatan ekspor; pengembangan kawasan *agrotechnopark*; optimalisasi kapasitas daerah dalam memberikan pelayanan publik dan kelembagaan yang adaptif; dan pengintegrasian pusat-pusat pelayanan wilayah, pengintegrasian transportasi darat dan laut, serta pengembangan kawasan perdesaan.

5.1.1.4 Arah Kebijakan Lima Tahun Keempat (2040-2045)

Berlandaskan pada pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahun ketiga, arah kebijakan pembangunan 5 lima tahun keempat diarahkan untuk melaksanakan pemantapan capaian pembangunan. Pemantapan capaian pembangunan diwujudkan melalui mantapnya kondisi lingkungan belajar sebagai buah upaya optimalisasi kualifikasi dan kompetensi pendidikan daerah; mantapnya inovasi yang berdaya saing tinggi; mantapnya

pengelolaan, pengembangan, dan perlindungan lingkungan hidup; mantapnya birokrasi dan kelembagaan daerah; mantapnya kualitas desentralisasi fiskal; dan mantapnya penataan permukiman serta kualitas infrastruktur.

5.1.2 Arah Kebijakan Strategis

Dalam menterjemahkan agenda utama/Misi pembangunan, dirumuskan arah kebijakan strategis dan sasaran pokok. Arah kebijakan strategis pembangunan jangka panjang daerah tidak lagi disusun dengan pendekatan bidang, namun mengedepankan tujuan dari agenda utama pembangunan yang lebih menjamin terlaksananya kolaborasi dalam pembangunan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

Tabel 5.1
Arah Kebijakan Strategis/Kebijakan Transformasi Daerah

No.	Agenda Utama/Misi Pembangunan	Arah Kebijakan Strategis/ Kebijakan Transformasi Daerah
1	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
		Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah.
		Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*).
		Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
		Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan potensi unggulan.
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif.
		Mendorong penumbuhan dan peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya).
		Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan.
		Peningkatan produktivitas BUMD.
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
		Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
		Mendorong pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industri.
		Pengembangan kawasan perkotaan dan ruang terbuka yang terintegrasi, berpotensi bernilai tambah ekonomi, berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
		Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
		Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya

No.	Agenda Utama/Misi Pembangunan	Arah Kebijakan Strategis/ Kebijakan Transformasi Daerah
		produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.
		Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.
		Penguatan pengendalian inflasi daerah.
		Mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Gorontalo dalam pembangunan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *co-firing* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
		Mendorong kolaborasi antar daerah dan antarinstansi dalam penerapan ekonomi sirkular terutama pada pengelolaan sampah, limbah domestik/industri disertai upaya konservasi TPA dan pembangunan limbah B3.
		Mendorong kolaborasi antar instansi dalam penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok.
		Mendorong kolaborasi antar instansi dalam peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran).
		Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
		Pengelolaan lahan pertanian dan kehutanan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan.
		Mendorong perwujudan investasi hijau di berbagai sektor.
		Mendorong inovasi dan membangun kemitraan antar pihak dalam pelaksanaan ekonomi hijau.
		Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang efisien seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata.
		Peningkatan pangsa ekspor barang komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah tinggi di pasar global.
		Mendorong perwujudan kota hijau melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial.
		Penguatan kerjasama untuk mendukung perluasan investasi dan ekspor.
		Penguatan dan perluasan kerjasama ekonomi skala regional, nasional, maupun international.
		Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang mendiami pulau-pulau terluar dan terpencil
2	Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.

No.	Agenda Utama/Misi Pembangunan	Arah Kebijakan Strategis/ Kebijakan Transformasi Daerah
		Percepatan penanganan stunting dan percepatan eliminasi penyakit menular melalui pendekatan integrasi multisektor.
		Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam.
		Penguatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses.
		Pengembangan sistem *telemedicine* yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).
		Perluasan cakupan layanan kuratif.
		Pengembangan sistem transformasi layanan kesehatan.
		Mendorong dan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya.
		Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara.
		Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan antar instansi dalam percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan Prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
		Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi guru minimal kualifikasi Strata-1 pada jenjang pendidikan dasar.
		Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahannya, serta ketertarikan dengan DUDI.
		Penyediaan afirmasi akses pendidikan, termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, dan penguatan sekolah terbuka.
		Mendorong berkembangnya ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk pengembangan lapangan kerja.
		Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
		Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
		Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
		Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.
		Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
		Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia dan penyandang disabilitas.

No.	Agenda Utama/Misi Pembangunan	Arah Kebijakan Strategis/ Kebijakan Transformasi Daerah
		Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.
		Pendidikan dan kesehatan berbasis akses pada *platform* pembelajaran digital dan akses *online* pada pelayanan kesehatan terpadu.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau.
		Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
		Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah.
		Peningkatan kualitas produk hukum daerah.
		Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.
		Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi.
		Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
		Pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
		Penguatan integritas partai politik.
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.
		Peningkatan akuntabilitas kinerja daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
		Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.
		Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.
		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
4	Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi.
		Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
		Penuntasan RDTR kabupaten.
		Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana.
		Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan.
		Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat.

No.	Agenda Utama/Misi Pembangunan	Arah Kebijakan Strategis/ Kebijakan Transformasi Daerah
		Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.
		Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.
		Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.
		Pengembangan *Flood Forecasting Warning System*.
		Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi.
		Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
		Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi.
		Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
		Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.
		Penerapan teknologi *climate smart agriculture* melalui penyediaan bibit berkualitas.
		Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.
		Peningkatan upaya pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim.
		Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu *Food, Energy-Water* (FEW) Nexus.
		Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.
		Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan.
		Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pascatambang.
5	Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas	Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, termasuk di dalamnya pemanfaatan ALKI yang melintas di perairan Gorontalo Utara sehingga dapat menghubungkan rantai pasok sekaligus berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia.
		Berkolaborasi dengan instansi vertikal dalam mendorong peningkatan layanan jalur Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara).
		Berkolaborasi dalam mendorong penggunaan dan pengembangan transportasi masyarakat termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dalam melayani mobilitas penumpang.
		Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif.
		Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim
		Berkolaborasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.
		Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
		Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
		Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau.
		Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif.
		Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat.
		Optimalisasi lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.

No.	Agenda Utama/Misi Pembangunan	Arah Kebijakan Strategis/ Kebijakan Transformasi Daerah
		Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
		Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman.
		Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
		Penguatan integrasi konektivitas antar kawasan pertumbuhan ekonomi.
		Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas darat dan laut.
		Menerapkan pembangunan kota yang inklusif, berkelanjutan dan berbudaya, dengan membangun perumahan layak huni, air minum siap konsumsi, transportasi multimoda, dan pengelolaan sampah dan limbah.
		Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan.
		Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
6	Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
		Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.
		Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.
		Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal dan warisan budaya berlandaskan falsafah "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah"* serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak.
		Mendorong kolaborasi antar instansi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan keamanan di wilayah perbatasan laut.
		Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan Pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan.
		Meningkatkan kerjasama dalam menjaga stabilitas daerah dan kawasan.

5.2 SASARAN POKOK

Penjabaran Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, diwujudkan dalam sasaran pokok dan indikator pembangunan daerah yang menjadi landasan dan ukuran ketercapaian pembangunan Visi Misi Pembangunan Daerah 2025-2045. Ukuran pencapaian yang tergambarkan dari indikator sasaran pembangunan daerah telah selaras dan mendukung pencapaian dalam Visi Misi Indonesia Emas 2045 yang terdiri dari 45 indikator utama pembangunan.

Tabel 5.2
Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan

No.	Misi	Arah Kebijakan Strategis	Sasaran Pokok
1	Mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif dan transformasi ekonomi yang berkelanjutan	1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. 2. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah. 3. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (*eco-tourism*). 4. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif. 5. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan potensi unggulan. 6. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. 7. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif. 8. Mendorong penumbuhan dan peningkatan kapasitas *emerging sectors* (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya). 9. Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan. 10. Peningkatan produktivitas BUMD. 11. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, diantaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. 12. Pelaksanaan afirmasi *re-skilling* dan *up-skilling* bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. 13. Mendorong pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industri. 14. Pengembangan kawasan perkotaan dan ruang terbuka yang terintegrasi, berpotensi bernilai tambah ekonomi, berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 15. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 16. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 17. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya. 18. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan. 19. Penguatan pengendalian inflasi daerah. 20. Mendukung dan berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Gorontalo dalam pembangunan ketenagalistrikan yang diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *co-firing* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi, dan inovasi, yang kolaboratif dan partisipatif Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengembangan wilayah sejalan dengan menjamin keberlanjutan Mewujudkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional, maupun internasional

No.	Misi	Arah Kebijakan Strategis	Sasaran Pokok
		teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 21. Mendorong kolaborasi antar daerah dan antarinstansi dalam penerapan ekonomi sirkular terutama pada pengelolaan sampah, limbah domestik/industri disertai upaya konservasi TPA dan pembangunan limbah B3. 22. Mendorong kolaborasi antar instansi dalam penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok. 23. Mendorong kolaborasi antar instansi dalam peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). 24. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital). 25. Pengelolaan lahan pertanian dan kehutanan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan. 26. Mendorong perwujudan investasi hijau di berbagai sektor. 27. Mendorong inovasi dan membangun kemitraan antar pihak dalam pelaksanaan ekonomi hijau. 28. Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang efisien seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Strategis Pariwisata. 29. Peningkatan pangsa ekspor barang komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah tinggi di pasar global. 30. Mendorong perwujudan kota hijau melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial. 31. Penguatan kerjasama untuk mendukung perluasan investasi dan ekspor. 32. Penguatan dan perluasan kerjasama ekonomi skala regional, nasional, maupun international. 33. Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang mendiami pulau-pulau terluar dan terpencil	
2	Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2. Percepatan penanganan stunting dan percepatan eliminasi penyakit menular melalui pendekatan integrasi multisektor. 3. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam. 4. Penguatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses. 5. Pengembangan sistem *telemedicine* yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan).	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing Mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan

No.	Misi	Arah Kebijakan Strategis	Sasaran Pokok
		6. Perluasan cakupan layanan kuratif. 7. Pengembangan sistem transformasi layanan kesehatan. 8. Mendorong dan berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya. 9. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara. 10. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi dan antar instansi dalam percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan Prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. 11. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi guru minimal kualifikasi Strata-1 pada jenjang pendidikan dasar. 12. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahannya, serta ketertarikan dengan DUDI. 13. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, dan penguatan sekolah terbuka. 14. Mendorong berkembangnya ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk pengembangan lapangan kerja. 15. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). 16. Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi Lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. 17. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. 18. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 19. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 20. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk Lansia dan penyandang disabilitas. 21. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif. 22. Pendidikan dan kesehatan berbasis akses pada *platform* pembelajaran digital dan akses *online* pada pelayanan kesehatan terpadu.	perlindungan sosial secara berkeadilan dan inklusif

No.	Misi	Arah Kebijakan Strategis	Sasaran Pokok
		23. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau. 24. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan. 25. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	
3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien	1. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai di daerah. 2. Peningkatan kualitas produk hukum daerah. 3. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat, dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 5. Pengembangan *smart government* serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 7. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. 8. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 9. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN, dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 10. Penguatan integritas partai politik. 11. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 12. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW. 13. Peningkatan akuntabilitas kinerja daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. 14. Penguatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 15. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 16. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*. 17. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan. 18. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif Mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah
4	Mewujudkan ketahanan lingkungan, kemampuan adaptasi dan mitigasi bencana, serta perubahan iklim	1. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi. 2. Berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). 3. Penuntasan RDTR kabupaten. 4. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana. 5. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan. 6. Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. 7. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.	Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Mewujudkan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air

No.	Misi	Arah Kebijakan Strategis	Sasaran Pokok
		8. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting. 9. Pengembangan *natural based solution* untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai. 10. Pengembangan *Flood Forecasting Warning System*. 11. Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi. 12. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. 13. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang). 14. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi. 15. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim. 16. Penerapan teknologi *climate smart agriculture* melalui penyediaan bibit berkualitas. 17. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim. 18. Peningkatan upaya pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim. 19. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu *Food, Energy-Water* (FEW) Nexus. 20. Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem. 21. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan. 22. Pengelolaan reklamasi dan kegiatan pascatambang.	
5	Mewujudkan pemenuhan kapasitas dan layanan sarana prasarana secara menyeluruh dan berkualitas	1. Berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, termasuk di dalamnya pemanfaatan ALKI yang melintas di perairan Gorontalo Utara sehingga dapat menghubungkan rantai pasok sekaligus berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia. 2. Berkolaborasi dengan instansi vertikal dalam mendorong peningkatan layanan jalur Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara). 3. Berkolaborasi dalam mendorong penggunaan dan pengembangan transportasi masyarakat termasuk sistem angkutan umum massal yang andal dalam melayani mobilitas penumpang. 4. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif. 5. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim 6. Berkolaborasi dengan instansi vertikal dan Pemerintah Provinsi dalam optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 7. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 8. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 9. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau. 10. Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif.	Meningkatnya infrastruktur yang mantap dan berkualitas

No.	Misi	Arah Kebijakan Strategis	Sasaran Pokok
		11. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat. 12. Optimalisasi lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 13. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 14. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman. 15. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman. 16. Penguatan integrasi konektivitas antar kawasan pertumbuhan ekonomi. 17. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas darat dan laut. 18. Menerapkan pembangunan kawasan yang inklusif, berkelanjutan dan berbudaya, dengan membangun perumahan layak huni, air minum siap konsumsi, transportasi multimoda, dan pengelolaan sampah dan limbah. 19. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan. 20. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berhubungan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	
6	Memantapkan ketahanan sosial dan budaya, serta keamanan daerah	1. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah. 2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 3. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 4. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 5. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. 6. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial. 7. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 8. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal dan warisan budaya berlandaskan falsafah "*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah"* serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak. 9. Mendorong kolaborasi antar instansi dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan keamanan di wilayah perbatasan laut. 10. Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan Pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan. 11. Meningkatkan kerjasama dalam menjaga stabilitas daerah dan kawasan.	Mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif yang berbudaya dengan penguatan peran agama dan pengembangan kearifan lokal Mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian yang menciptakan kondusivitas daerah

Tabel 5.3
Persandingan Sasaran Pokok Pembangunan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Sasaran Pokok Provinsi Gorontalo	Sasaran Pokok Gorontalo Utara
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua
2	Mewujudkan sumberdaya manusia Gorontalo yang unggul dan berdaya saing	Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing
3	Mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	Mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial secara berkeadilan dan inklusif
4	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi dan inovasi	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi, dan inovasi, yang kolaboratif dan partisipatif
5	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengembangan wilayah sejalan dengan menjamin keberlanjutan
6	Mewujudkan transformasi digital yang mendukung transformasi ekonomi	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi, dan inovasi, yang kolaboratif dan partisipatif
7	Mewujudkan peningkatan produktivitas perekenomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok nasional	
8	Mewujudkan pengembangan wilayah perkotaan sebagai sub ekonomi nasional dan transformasi perdesaan yang maju dan inklusif	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengembangan wilayah sejalan dengan menjamin keberlanjutan
		Meningkatnya infrastruktur yang mantap dan berkualitas
9	Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
10	Mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, menciptakan keamanan dan ketertiban daerah	Mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian yang menciptakan kondusivitas daerah
11	Mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah	Mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah
12	Mewujudkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional maupun internasional	Mewujudkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional, maupun internasional
13	Mewujudkan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal pembangunan pengembangan kearifan lokal	Mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif yang berbudaya dengan penguatan peran agama dan pengembangan kearifan lokal
14	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	
15	Mewujudkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
16	Mewujudkan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air	Mewujudkan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air
17	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

Tabel 5.4
Sasaran Pokok Pembangunan, Indikator Sasaran Pokok, dan Target Akhir RPJPD

No.	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Satuan	*Baseline* 2025	Target 2045
1	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi, dan inovasi, yang kolaboratif dan partisipatif	1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,82-1,87	3,10-3,35
		2. Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	10,80-11,10	16,40-18,75
		3. Pengembangan Pariwisata			
		- Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,81-1,83	3,00-3,25
		- Jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut kabupaten tujuan (Gorontalo Utara)	Kunjungan	193.750-194.860	260.000-275.000
		4. Produktivitas UMKM, IKM, dan BUMD			
		- Proporsi industri kecil dan mikro	Persen	98,00-99,00	85,00-90,00
		- Rasio kewirausahaan daerah	Persen	1,03-1,07	5,10-5,25
		- *Return on Asset* (RoA) BUMD	Persen	-0,0014 s.d. 0,0039	0,0234 s.d. 0,0626
		5. Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,10-2,40	1,50-1,75
		6. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	53,50-55,75	75,00-77,50
		7. Kontribusi pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan pada jenis kelamin perempuan	Persen	22,85-22,93	28,50-30,50
		8. Tingkat penguasaan IPTEK			
		- Indeks inovasi daerah	Poin	41,30-41,75	60,00-62,50
		- Indeks masyarakat digital	Poin	45,56-47,45	55,50-65,00
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengembangan wilayah sejalan dengan menjamin keberlanjutan	9. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi	Persen	8,10	8,17-8,20
		10. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB	Persen	29,70-29,90	32,25-32,75
		11. Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan			
		- Persentase status "Desa Mandiri" berdasarkan Indeks Desa	Persen	N/A	65,85-73,17
		12. Rasio elektrifikasi daerah	Persen	99,50-99,80	100
		13. Konsumsi listrik per kapita	KwH/kapita	59,70-61,90	94,78-100,34
		14. Nilai investasi	Rp	500.000.000-650.000.000	1.750.000.000.000-2.000.000.000
3	Mewujudkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional, maupun internasional	15. Jumlah kerjasama pengembangan daerah antar instansi dan antar daerah yang aktif	Kerjasama	30-50	150-200
		16. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin	N/A	85,50-90,00
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua	17. Umur harapan hidup (*Long Form*)	Tahun	66,75-66,85	71,25-72,35
		18. Indeks keluarga sehat	Poin	0,165-0,185	0,600-0,700
		19. Angka morbiditas	Persen	16,20-15,45	10,75-9,53
		20. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	94,5-96,5	100
5	Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing	21. Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas	Tahun	7,18-7,19	9,51-9,60

No.	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Satuan	*Baseline* 2025	Target 2045
		22. Harapan lama sekolah usia 7 tahun ke atas	Tahun	12,51-12,53	13,38-13,40
		23. Indeks kemampuan literasi SD	Poin	36,50-36,55	62,50-65,00
		24. Indeks kemampuan numerasi SD	Poin	27,05-27,25	62,50-65,00
		25. Indeks kemampuan literasi SMP	Poin	46,70-46,75	70,50-71,30
		26. Indeks kemampuan numerasi SMP	Poin	43,30-43,50	70,50-71,30
6	Mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial secara berkeadilan dan inklusif	27. Persentase penduduk miskin	Persen	16,85-16,25	11,50-9,75
		28. Persentase rumah tangga miskin yang dicakup oleh setidaknya satu manfaat perlindungan sosial	Persen	83,10-85,30	100
7	Mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	29. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,00-65,00	80,00-82,00
		30. Indeks Integritas Nasional	Poin	61,70-62,20	84,50-87,50
8	Mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah	31. Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,0460-0,0490	0,1530-0,1570
9	Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	32. Indeks Risiko Bencana	Poin	125,00-126,00	100,00-105,00
		33. Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,39-0,41	0,60-0,70
		34. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,90-76,00	75,00-80,00
		35. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	19,25-20,00	33,50-37,50
10	Mewujudkan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air	36. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Poin	22,34-18,23	9,53
		37. Indeks Ketahanan Air	Poin	N/A	4,0-4,2
		38. Kapasitas air baku IPA	M^3/detik	0,120	0,200
11	Meningkatnya infrastruktur yang mantap dan berkualitas	39. Persentase pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	72,35-75,00	90,00-92,50
		40. Cakupan akses air minum aman	Persen	2,25-3,00	13,25-15,00
12	Mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif yang berbudaya dengan penguatan peran agama dan pengembangan kearifan lokal	41. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	60,00-64,25	70,00-72,50
		42. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	55,50-57,00
		43. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	82,00-85,00
		44. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,228-0,225	0,150-0,170
13	Mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian yang menciptakan kondusivitas daerah	45. Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	Poin	160-150	120-105
		46. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	80,00-85,00

Tabel 5.5
Sasaran Pokok Pembangunan, Indikator, dan Target Per Periode RPJPD

No.	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Satuan	*Baseline* 2025	Target Periode			
					I	II	III	IV
1	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi, dan inovasi, yang kolaboratif dan partisipatif	1. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	1,82-1,87	1,94	2,19	2,64	3,10-3,35
		2. Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	10,80-11,10	11,38	12,5	14,46	16,40-18,75
		3. Pengembangan Pariwisata						
		- Kontribusi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	1,81-1,83	1,89	2,12	2,54	3,00-3,25
		- Jumlah perjalanan wisatawan nusantara menurut kabupaten tujuan (Gorontalo Utara)	Kunjungan	193.750-194.860	198.173	211.423	234.611	260.000-275.000
		4. Produktivitas UMKM, IKM, dan BUMD						
		- Proporsi industri kecil dan mikro	Persen	98,00-99,00	98,30	95,50	90,60	85,00-90,00
		- Rasio kewirausahaan daerah	Persen	1,03-1,07	1,27	2,09	3,51	5,10-5,25
		- *Return on Asset* (RoA) BUMD	Persen	-0,0014 s.d. 0,0039	0,0051	0,0101	0,0188	0,0234 s.d. 0,0626
		5. Tingkat pengangguran terbuka	Persen	2,10-2,40	2,07	1,95	1,74	1,50-1,75
		6. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	53,50-55,75	56,83	61,12	68,65	75,00-77,50
		7. Kontribusi pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan pada jenis kelamin perempuan	Persen	22,85-22,93	23,21	24,34	26,31	28,50-30,50
		8. Tingkat penguasaan IPTEK						
		- Indeks inovasi daerah	Poin	41,30-41,75	42,69	46,43	52,96	60,00-62,50
		- Indeks masyarakat digital	Poin	45,56-47,45	47,95	49,94	53,41	55,50-65,00
2	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan pengembangan wilayah sejalan dengan menjamin keberlanjutan	9. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi	Persen	8,10	8,10	8,11	8,14	8,17-8,20
		10. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB	Persen	29,70-29,90	30,03	30,54	31,43	32,25-32,75
		11. Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan						
		- Persentase status "Desa Mandiri" berdasarkan Indeks Desa	Persen	N/A	35,04	41,87	53,82	65,85-73,17
		12. Rasio elektrifikasi daerah	Persen	99,50-99,70	99,725	99,83	100	100
		13. Konsumsi listrik per kapita	KwH/kapita	59,70-61,90	63,65	70,67	82,95	94,78-100,34
		14. Nilai investasi	Rp000	500.000.000-650.000.000	712.500.000	962.500.000	1.400.000.000	1.750.000.000-2.000.000.000
3	Mewujudkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional, maupun internasional	15. Jumlah kerjasama pengembangan daerah antar instansi dan antar daerah yang aktif	Kerjasama	30-50	56	80	122	150-200
		16. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Poin	N/A	66,10	70,50	78,20	85,50-90,00
4	Terwujudnya pelayanan kesehatan untuk semua	17. Umur harapan hidup (*Long Form*)	Tahun	66,75-66,85	67,08	67,96	69,55	71,25-72,35
		18. Indeks keluarga sehat	Poin	0,165-0,185	0,2068	0,2936	0,4460	0,600-0,700
		19. Angka morbiditas	Persen	16,20-15,45	15,18	14,09	12,18	10,75-9,53
		20. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	94,5-96,5	96,75	97,75	99,50	100

No.	Sasaran Pokok	Indikator Sasaran Pokok	Satuan	*Baseline* 2025	Target Periode			
					I	II	III	IV
5	Mewujudkan sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing	21. Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun ke atas	Tahun	7,18-7,19	7,30	7,77	8,58	9,51-9,60
		22. Harapan lama sekolah usia 7 tahun ke atas	Tahun	12,51-12,53	12,57	12,74	13,05	13,38-13,40
		23. Indeks kemampuan literasi SD	Poin	36,50-36,55	37,85	43,05	52,15	62,50-65,00
		24. Indeks kemampuan numerasi SD	Poin	27,05-27,25	29,02	36,11	48,52	62,50-65,00
		25. Indeks kemampuan literasi SMP	Poin	46,70-46,75	47,94	52,70	61,03	70,50-71,30
		26. Indeks kemampuan numerasi SMP	Poin	43,30-43,50	44,86	50,30	59,82	70,50-71,30
6	Mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan perlindungan sosial secara berkeadilan dan inklusif	27. Tingkat kemiskinan	Persen	16,85-16,25	15,98	14,91	13,04	11,50-9,75
		28. Persentase rumah tangga miskin yang dicakup oleh setidaknya satu manfaat perlindungan sosial	Persen	83,10-85,30	86,15	89,53	95,44	100
7	Mewujudkan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	29. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	64,00-65,00	65,80	69,00	74,6	80,00-82,00
		30. Indeks Integritas Nasional	Poin	61,70-62,20	63,34	67,90	75,88	84,50-87,50
8	Mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah	31. Indeks Kemandirian Fiskal	Poin	0,0460-0,0490	0,0546	0,0758	0,1132	0,1530-0,1570
9	Mewujudkan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	32. Indeks Risiko Bencana	Poin	125,00-126,00	124,75	119,75	111,00	100,00-105,00
		33. Indeks Ketahanan Daerah	Poin	0,39-0,41	0,42	0,46	0,53	0,60-0,70
		34. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	75,90-76,00	75,00-80,00	75,00-80,00	75,00-80,00	75,00-80,00
		35. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah	Persen	19,25-20,00	20,78	23,93	29,45	33,50-37,50
10	Mewujudkan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air	36. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Poin	22,34-18,23	17,59	15,02	10,54	9,53
		37. Indeks Ketahanan Air	Poin	N/A	3,25	3,45	3,8	4,0-4,2
		38. Kapasitas air baku IPA	M^3/detik	0,120	0,124	0,140	0,168	0,200
11	Meningkatnya infrastruktur yang mantap dan berkualitas	39. Persentase pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan kewilayahan	Persen	72,35-75,00	75,88	79,41	85,59	90,00-92,50
		40. Cakupan akses air minum aman	Persen	2,25-3,00	3,55	5,75	9,6	13,25-15,00
12	Mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat inklusif yang berbudaya dengan penguatan peran agama dan pengembangan kearifan lokal	41. Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	60,00-64,25	64,75	66,75	70,25	70,00-72,50
		42. Indeks Pembangunan Kebudayaan	Poin	N/A	50,30	51,50	53,60	55,50-57,00
		43. Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	N/A	76,35	77,75	80,20	82,00-85,00
		44. Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,228-0,225	0,221	0,205	0,1780	0,150-0,170
13	Mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian yang menciptakan kondusivitas daerah	45. Risiko penduduk terkena kejahatan per 100.000 penduduk	Poin	160-150	147,25	136,25	117,00	120-105
		46. Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Poin	N/A	63	67	74	80,00-85,00

2025

Bab VI

Penutup

2045

MAJU, SEJAHTERA, BERADAB, DAN BERKELANJUTAN
BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA

BAB VI PENUTUP

6.1 IMPLEMENTASI PELAKSANAAN

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatan secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan, juga untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah daerah maupun pelaku pembangunan non-pemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluaran, guna memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses terutama dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi, sinergi, dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

6.1.2 Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah tingkat Kabupaten Gorontalo Utara yang selanjutnya menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang kemudian menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dengan mempertimbangkan dokumen perencanaan di atasnya.

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan sebagai berikut:

1. RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara secara periodisasi dan substansi sinkron dengan RPJPD Provinsi dan RPJMD Provinsi Gorontalo, dimana misi pembangunan yang ditunjang dengan seluruh proses transformasi di dalam RPJPD Provinsi Gorontalo menjadi bagian dari muatan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara.
2. RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara bersifat jangka panjang yang memberikan arah pembangunan dalam jangka panjang, serta memuat upaya transformatif untuk bersama-sama kabupaten/kota lainnya di Provinsi Gorontalo mendukung pencapaian Provinsi Gorontalo Madani 2045 dan Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Arah (tujuan) pembangunan dan indikator dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD serta bahan pertimbangan penyusunan RPJM Desa;
4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan dalam RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan dalam RKPD serta bahan pertimbangan dalam RKP Desa;
5. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang nantinya akan dipergunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja PD;
6. Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral daerah seperti rencana induk/*master plan/grand design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah;
7. Dokumen RPJPD menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta calon anggota DPRD kabupaten.

6.1.3 Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis

Penyusunan RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan, yang

pemanfaatannya ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif:

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan;
- Spasial adalah penjabaran program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah;
- Holistik yakni penjabaran tematik program pembangunan dalam perencanaan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup: pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, tranformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan;
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

KKL menggambarkan hubungan antara *input*-proses-*output-outcome-impact*. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD bersifat *impact-outcome*, yang harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level *input*. Pendetailan tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan digunakan indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator ini setidaknya menerapkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant,* dan *Time-Bound)*, sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan keselarasan pembangunan, indikator RPJPD harus menjadi bagian dari indikator pada RPJMD, dan kemudian indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

6.1.4 Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non-pemerintah, yang dilakukan secara inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan *creative financing* yakni pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman dan hibah, *blended finance*, serta sumber pendanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan untuk pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2 KERANGKA PENGENDALIAN

6.2.1 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, yang dapat dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian:

1. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun non-

pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) Penjabaran perencanaan RPJPD ke dalam RPJMD, dan RPJMD ke dalam Renstra PD, (ii) Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) Penjabaran perencanaan RPJMD ke dalam RKPD, dan dokumen RKPD ke dalam Renja PD; (ii) Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, yang mencakup: (i) Pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) Pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional; dan (iv) Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan efektif, yang mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja PD terkait yang akan menjadi satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah daerah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya berjalan baik, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Perangkat Daerah.

6.2.2 Sistem Insentif

Keberhasilan capaian sasaran pembangunan memerlukan partisipasi aktif seluruh aktor pembangunan, meliputi unsur pemerintah dan non-pemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Unsur mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik, yang diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan. Bagi pelaku pembangunan unsur pemerintah, sistemnya diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja dan manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja PD terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Kinerjanya diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non-pemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.2.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian terhadap faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan dalam pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Penggunaan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Gorontalo 2025-2045. Adapun tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.2.4 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Dengan komunikasi yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari 3 hal pokok: (i) Struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) Keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang *valid* dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJPD Kabupayen Gorontalo Utara 2025-2045 menganut prinsip “tidak ada seorang pun yang tertinggal” *(no one left behind)* dan partisipasi yang bermakna, serta melibatkan para pemangku kepentingan yakni Perangkat Daerah, DPRD, maupun masyarakat umum (termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan Lansia) dengan menggunakan berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi dilakukan melalui forum-forum perencanaan mulai dari Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan desa, dan forum-forum perencanaan tematik lainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dan substansi forum, termasuk juga melalui media cetak dan elektronik yang tersedia.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian dapat mendorong partisipasi publik yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.2.5 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Gorontalo Utara Maju, Sejahtera, Beradab, dan Berkelanjutan di tahun 2045 yang merupakan bagian dari menyokong Gorontalo Madani Tahun 2045 dan Indonesia Emas 2045, memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (i) Penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi: penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak; dan (ii) Perluasan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber pembiayaan yang inovatif.

Sedangkan peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non-publik dilakukan melalui berbagai pembiayaan kreatif: (i) Pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang; (ii) Inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli dan bagi hasil; dan (iii) Sumber pembiayaan non-publik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025-2045 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan untuk berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan, serta mewujudkan visi dan misi jangka panjang daerah agar dapat tercapai **Gorontalo Utara Maju, Sejahtera, Beradab, dan Berkelanjutan Berlandaskan Iman dan Taqwa**.

Gorontalo Utara, 2024

Pj. Bupati Gorontalo Utara,

Sila M. Botutihe

*Hymne Gorontalo Utara**

Cipt.: Thariq Modanggu - Bayu Tamboto
Arr.: Bayu Tamboto

Tak akan berhenti
Rasa syukurku
Atas anugerah
Yang Maha Kuasa

Lautan biru
Lembah dan gunung
Alam yang kaya
Elok jelita

Untukmu negeriku
Gorontalo Utara
Harumlah namamu
Di dalam janji dan baktiku

Setulus hati
Membangun negeri
Wujudkan cita-cita mulia
Bulatkan tekad di sanubari
Jayalah Gorontalo Utara
Jayalah Gorontalo Utara.

*Di-*launching* tepat pada momentum HUT ke-15 Kabupaten Gorontalo Utara, Selasa 26 April 2022.
https://www.youtube.com/watch?v=0FrIgHAjG60

19851003 201403 1001